



**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 31 TAHUN 2020**

**RENCANA
KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021**



**RKPD
2021**



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 merupakan landasan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kota Bukittinggi untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berpedoman kepada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, yang mengacu kepada RKP Tahun 2021, serta memperhatikan visi, misi dan program Walikota Terpilih.

Pasal 3

RKPD Tahun 2021 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021;
- b. Rancangan PPAS Tahun 2021; dan
- c. Rancangan APBD Tahun 2021

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

RKPD Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja, pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021
Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII : PENUTUP


(2) RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Juli 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,


Dama S
M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI


[Signature]
YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR ...31...

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 31 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-8
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi.....	II-1
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-28
2.2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-46
2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-153
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-164
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-191
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bukittinggi.....	III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2021.....	III-2
3.1.2. Arah Pengembangan Wilayah Sumatera.....	III-4
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021.....	III-9
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.....	III-13
3.1.5. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021	III-14
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-23
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-23
3.2.2. Kebijakan Belanja daerah	III-43
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-46
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020.....	IV-8
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional	IV-9
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-9
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi	IV-16

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
	6.1. Indikator Kinerja Utama	VI-1
	6.2. Indikator Kinerja Daerah	VI-7
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi.....	II-2
Tabel 2.2.	Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya.....	II-5
Tabel 2.3.	Sungai/Batang yang Melalui Bukittinggi	II-9
Tabel 2.4.	Hidrologi di Kota Bukittinggi.....	II-10
Tabel 2.5.	Rata-rata Curah Hujan Bulanan Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	II-12
Tabel 2.6.	Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi.....	II-14
Tabel 2.7.	Arahan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Bukittinggi.....	II-16
Tabel 2.8.	Arahan Pengembangan Pariwisata Kota Bukittinggi.....	II-18
Tabel 2.9.	Sejarah Kejadian Bencana di Kota Bukittinggi Tahun 2000-2018.....	II-19
Tabel 2.10.	Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir per Kecamatan di Kota Bukittinggi.....	II-20
Tabel 2.11.	Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor	II-22
Tabel 2.12.	Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrem per Kecamatan di Kota Bukittinggi.....	II-25
Tabel 2.13.	Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015 s.d 2019.....	II-27
Tabel 2.14.	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019.....	II-28
Tabel 2.15.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2019 Atas Dasar Harga berlaku Kota Bukittinggi (Juta).....	II-30
Tabel 2.16.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2019 Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta Rupiah).....	II-31
Tabel 2.17.	Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2015 s.d 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi	II-33
Tabel 2.18.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015 s.d 2019.....	II-34
Tabel 2.19.	Perkembangan PDRB per Kapita Tahun 2015 s.d 2019 Berdasarkan Dasar Harga KONstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi	II-36
Tabel 2.20.	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015 s.d 2019.....	II-37
Tabel 2.21.	Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019.....	II-39
Tabel 2.22.	Angka Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi.....	II-42
Tabel 2.23.	Angka Kematian Bayi Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-43
Tabel 2.24.	Angka Kematian Ibu Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-45
Tabel 2.25.	Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi.....	II-46
Tabel 2.26.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-47
Tabel 2.27.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-48
Tabel 2.28.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-48
Tabel 2.29.	Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-50

Tabel 2.30.	Angka Melanjutkan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2015 s.d 2019	II-50
Tabel 2.31.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-51
Tabel 2.32.	Ketersediaan Sekolah, Penduduk Usia Sekolah dan Rasio Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-52
Tabel 2.33.	Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-54
Tabel 2.34.	Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi ..	II-57
Tabel 2.35.	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2019 Kota Bukittinggi	II-58
Tabel 2.36.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)	II-58
Tabel 2.37.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2019 Kota Bukittinggi	II-59
Tabel 2.38.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-60
Tabel 2.39.	Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan Tahun 2019 Kota Bukittinggi.....	II-61
Tabel 2.40.	Jumlah Dokter/Tenaga Medis di Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019.....	II-62
Tabel 2.41.	Jumlah Dokter dan JUmlah Penduduk Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.	II-62
Tabel 2.42.	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-63
Tabel 2.43.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-64
Tabel 2.44.	Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019.....	II-66
Tabel 2.45.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk Tahun 2019	II-66
Tabel 2.46.	Rasio Tempat Ibadah Kota Bukittinggi	II-67
Tabel 2.47.	Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-63
Tabel 2.48.	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-69
Tabel 2.49.	Rasio Luas Kawasan Tertutup Perpohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-70
Tabel 2.50.	Rasio Rumah Layak Huni Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019	II-71
Tabel 2.51.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019	II-72
Tabel 2.52.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019	II-73
Tabel 2.53.	Jumlah Linmas dan Jumlah RT di Kota Bukittinggi Tahun 2015 – 2019.....	II-75
Tabel 2.54.	Jumlah Pelanggaran K3 yang Terselesaikan dan Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan Teridentifikasi oleh Satpol PP.....	II-76
Tabel 2.55.	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA dan Jumlah Pelanggaran PERDA .	II-78
Tabel 2.56.	Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota Tahun 2015 s.d Kota Bukittinggi	II-78
Tabel 2.57.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-80

Tabel 2.58.	Data PMKS Kota Bukittinggi.....	II-80
Tabel 2.59.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bukittinggi	II-85
Tabel 2.60.	Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-86
Tabel 2.61.	Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019	II-87
Tabel 2.62.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-90
Tabel 2.63.	Daerah Pelayanan Sektor Persampahan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-91
Tabel 2.64.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-92
Tabel 2.65.	Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Bukittinggi Tahun 2019	II-94
Tabel 2.66.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	II-97
Tabel 2.67.	Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-98
Tabel 2.68.	Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-100
Tabel 2.69.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-102
Tabel 2.70.	Rasio Izin Trayek Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-104
Tabel 2.71.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-105
Tabel 2.72.	Jumlah Terminal Bis Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-106
Tabel 2.73.	Jumlah Pemasanan Rambu-Rambu Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-106
Tabel 2.74.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-107
Tabel 2.75.	Cakupan Pengembangan KIM Tahun 2019.....	II-108
Tabel 2.76.	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-110
Tabel 2.77.	Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-111
Tabel 2.78.	Jumlah BPR/LKM tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-112
Tabel 2.79.	Jumlah Investor PMDN/PMA Kota BUKittinggi Tahun 2019.....	II-113
Tabel 2.80.	Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai Tahun 2019 Kota Bukittinggi	II-114
Tabel 2.81.	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-115
Tabel 2.82.	Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-116
Tabel 2.83.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-117
Tabel 2.84.	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-118
Tabel 2.85.	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019	II-119
Tabel 2.86.	Pemanfaatan Persandian Tahun 2019	II-119
Tabel 2.87.	Festival Seni dan Budaya yang Diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019	II-120
Tabel 2.88.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bukittinggi	II-122
Tabel 2.89.	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019	II-125
Tabel 2.90.	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019	II-126

Tabel 2.91.	Jumlah Perpustakaan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-128
Tabel 2.92.	Jumlah Pengunjunga Perpustakaan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi ...	II-130
Tabel 2.93.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019	II-131
Tabel 2.94.	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-132
Tabel 2.95.	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019	II-132
Tabel 2.96.	Jumlah Pustakawan, Tenaga teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikast Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-133
Tabel 2.97.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara baku Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-134
Tabel 2.98.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-134
Tabel 2.99.	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2015 s.d 2019	II-135
Tabel 2.100.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2015 s.d 2019	II-136
Tabel 2.101.	Produktivitas Padi Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-138
Tabel 2.102.	Produktivitas Jagung Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-139
Tabel 2.103.	Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-139
Tabel 2.104.	Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-140
Tabel 2.105.	Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2015 s.d 2019	II-141
Tabel 2.106.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2015 s.d 2019	II-141
Tabel 2.107.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s.d 2019.....	II-143
Tabel 2.108.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s.d 2019.....	II-144
Tabel 2.109.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2015 s.d 2019	II-144
Tabel 2.110.	Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019	II-145
Tabel 2.111.	Indikator Urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018	II-146
Tabel 2.112.	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-147
Tabel 2.113.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2019 Kota Bukittinggi	II-149
Tabel 2.114.	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II-149
Tabel 2.115.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019.....	II-150
Tabel 2.116.	Indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019.....	II-151
Tabel 2.117.	Indikator Penunjang urusan Pengawasan Tahun 2019	II-151
Tabel 2.118.	Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019	II-152
Tabel 2.119.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi 2015	II-153

- 2019	
Tabel 2.120. Rasio Luas Wilayah Produktif dan Luas Seluruh Wilayah Budidaya	II-155
Tabel 2.121. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019	II-156
Tabel 2.122. Rasio Lulusan Si/S2/S3 Kota Bukittinggi	II-157
Tabel 2.123. Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II-158
Tabel 2.124. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi.....	II-159
Tabel 2.125. Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan.....	II-165
Tabel 2.126. Pencapaian Target Misi Renstra Tahun 2019	II-245
Tabel 2.127. Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	II-246
Tabel 3.1. Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020.....	III-3
Tabel 3.2. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi.....	III-14
Tabel 3.3. Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III-29
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019 ..	III-30
Tabel 3.5. Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019.....	III-36
Tabel 3.6. Pertumbuhan Komponen Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019.....	III-36
Tabel 3.7. Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019.....	III-37
Tabel 3.8. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III-37
Tabel 3.9. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi	III-40
Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 s.d 2021.....	III-45
Tabel 3.11. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d 2019 dan Proyeksi/Target Tahun 2020 dan 2021	III-47
Tabel 4.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	IV-4
Tabel 4.2. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	IV-6
Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-10
Tabel 4.4. Keterkaitan Misi dan Prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	IV-16
Tabel 4.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	IV-17
Tabel 5.1. Alokasi Anggaran Belanja Langsung Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	V-1
Tabel 5.2. Rumusan Rencana program dan Kegiatan Kota Bukittinggi Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	V-4
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi	VI-2
Tabel 6.2. Target Kinerja Tahunan Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	VI-5
Tabel 6.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2019	VI-7
Tabel 6.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi	VII-8

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Grafik 1.1.	Proses Penyusunan Dokumen RKPD.....	I – 6
Grafik 1.2.	Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Integrated Kota Bukittinggi.....	I – 7
Grafik 1.3.	Menu Sistem Informasi manajemen Pemerintah daerah (SIMDA) Integrated Kota Bukittinggi.....	I – 7
Grafik 1.4.	Hubungan Antar Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.....	I - 8
Grafik 1.5.	Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Keuangan	I – 11
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Bukittinggi.....	II- 3
Gambar 2.2	Peta Topografi Kota Bukittinggi.....	II- 6
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kota Bukittinggi.....	II-11
Gambar 3.1	Arah Kebijakan Makro 2021.....	III-4

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1.	Kondisi Hidrologi Kota Bukittinggi	II – 11
Grafik 2.2.	Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)	II – 15
Grafik 2.3.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2019 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi	II – 16
Grafik 2.4.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi.....	II - 33
Grafik 2.5.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2019	II –36
Grafik 2.6.	Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 s.d 2019	II - 38
Grafik 2.7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 s.d 2019	II - 40
Grafik 2.8.	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi...	II - 41
Grafik 2.9.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Bayi Tahun 2015 s.d 2019	II - 44
Grafik 2.10.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II - 55
Grafik 2.11.	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II - 57
Grafik 2.12.	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi..	II - 62
Grafik 2.13.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi.....	II - 65
Grafik 2.14.	Rasio Rumah Layak Huni Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019	II - 71
Grafik 2.15.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	II - 73
Grafik 2.16.	Cakupan Petugas perlindungan Masyarakat Tahun 2015 – 2019	II - 74
Grafik 2.17.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran k3 Tahun 2015-2019	II - 76
Grafik 2.18.	Persentase Penegakan PERDA Tahun 2015-2019	II - 77
Grafik 2.19.	Ketersediaan Pangan Kota Bukittinggi	II - 88
Grafik 2.20.	Grafik Perbandingan Nilai IKU Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019	II - 94
Grafik 2.21.	Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP dan Jumlah Penduduk Wajib KTP Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II - 96
Grafik 2.22.	Rasio Penduduk yang Telah Memiliki KTP dan Penduduk yang Wajib KTP Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II - 96
Grafik 2.23.	Jumlah LSM Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II - 99
Grafik 2.24.	Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2015 s.d 2019	II - 100
Grafik 2.25.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II - 103
Grafik 2.26.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II - 105
Grafik 2.27.	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II - 107
Grafik 2.28.	Perkembangan Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi	II - 111
Grafik 2.29.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi...	II - 130
Grafik 2.30.	Koleksi Jumlah dan Judul Buku Tahun 2015 s.d 2019	II - 131
Grafik 2.31.	Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019	II - 136
Grafik 2.32.	Produktivitas Bahan Pangan Lokal Kota Bukittinggi (Kw/Ha) Tahun 2015-2019	II - 140
Grafik 2.33.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s.d 2019	II - 143
Grafik 2.34.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019 ...	II - 144
Grafik 2.35.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019	II – 198

Grafik 2.36.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2015-2019	II - 199
Grafik 2.37.	Persentase Penegakan PERDA Tahun 2015-2019	II - 200
Grafik 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019	III- 15
Grafik 3.2.	Gini Rasio Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019	III- 17
Grafik 3.3.	Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 18
Grafik 3.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019	III- 19
Grafik 3.5.	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019	III- 20
Grafik 3.6.	Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019	III- 21
Grafik 3.7.	Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019	III- 22
Grafik 3.8.	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019	III- 22
Grafik 3.9.	Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 23
Grafik 3.10.	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 24
Grafik 3.11.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2106 s/d 2019	III- 25
Grafik 3.12.	Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 26
Grafik 3.13.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 27
Grafik 3.14.	Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 28
Grafik 3.15.	Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 29
Grafik 3.16.	Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 31
Grafik 3.17.	Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 31
Grafik 3.18.	Rasio Aktiva Lancar Kota Bukittinggi.....	III- 32
Grafik 3.19.	Cash Rasio Kota Bukittinggi	III- 33
Grafik 3.20.	Quick Rasio Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 34
Grafik 3.21.	Debt to Asset Ratio Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 35
Grafik 3.22.	Debt to Equity Ratio Kota Bukittiinggi Tahun 2016 s/d 2019	III- 35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan awal dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5(lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

RKPD mempunyai kedudukan strategis sebagai dokumen yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, dan nilai penting lainnya antara lain:

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan/ atau lintas SKPD;
- c. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
- e. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan. Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah, disamping itu juga mengedepankan proses politik di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan mengakomodir kehendak dan kepentingan masyarakat yang direpresentasikan oleh wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi.

Penyusunan RKPD tahun 2021 dilakukan sebagai tahun terakhir implementasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021. Dengan demikian, evaluasi yang dimuat dalam RKPD ini menjadi informasi yang juga dilakukan sebagai acuan penyusunan dokumen teknokratis RPJMD lima tahun terakhir RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005 – 2025. Kondisi ini menjadikan penyusunan RKPD 2021 menjadi titik kritis untuk pencapaian target RPJMD Kota Bukittinggi 2016 – 2021, dan sekaligus sangat menentukan keberhasilan pencapaian target akhir RPJPD Kota Bukittinggi.

RKPD Tahun 2021 disusun mempedomani Permendagri No. 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, antara lain memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 juga sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang efektif dilaksanakan untuk penyusunan perencanaan Tahunan 2021, dalam hal ini RKPD 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan salah satu pedoman untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagi daerah yang telah memiliki RPJMD sebelum aturan ini dikeluarkan, dan akan segera berakhir, diwajibkan melakukan pemetaan terhadap kodefikasi dan nomenklatur program hingga sub kegiatan, sebagaimana diatur dalam permendagri tersebut. Bukittinggi merupakan salah satu daerah, yang telah memiliki RPJMD dan segera berakhir di tahun 2021, karena itu lampiran RKPD tahun 2021 ini dilengkapi dengan pemetaan dari program dan kegiatan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bersamaan dengan masa penyusunan RKPD 2021 ini, wabah *Corona Virus Deases (Covid-19)* juga melanda seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Bukittinggi, sehingga secara internasional ditetapkan sebagai pandemi. Hal ini berdampak sangat besar terhadap penyusunan dan proses penyusunan RKPD 2021. Dimana pada tahun 2020 telah dilakukan penghitungan ulang target kinerja RKPD tahun 2020 (*refocusing*) yang telah dijabarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yang difokuskan untuk penanganan *Covid-19* dan dampaknya. Dengan demikian sebagian besar alokasi anggaran diarahkan untuk program tersebut, sementara itu target pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan juga mengalami penurunan. Hal ini telah diatur dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Lebih lanjut untuk Pemerintah Daerah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peninjauan target kinerja daerah yang difokuskan kepada upaya penanggulangan *Covid-19* dan dampaknya, telah menggeser target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan di tahun anggaran 2020. Dengan demikian, target kinerja yang akan ditetapkan pada tahun 2021 juga akan mengalami pergeseran, dan yang lebih penting lagi, rencana kinerja tahun 2021, harus mengakomodir dan memprioritaskan kebijakan dan program penanggulangan *Covid-19* dan dampaknya, terkait pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pendidikan dan dampak lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Secara nasional, skenario agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP 2021. RKP 2021 diarahkan pada pemulihan ekonomi sosial guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Untuk itu, tema RKP 2021 adalah *Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial*. Fokusnya antara lain pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. Lebih lanjut penguatan fokus perencanaan pembangunan tahun 2021 untuk penanggulangan *Covid-19* dan dampaknya, secara nasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, yang terdiri dari 4 (empat) fokus utama sebagai berikut:

1. Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi.
2. Reformasi sistem kesehatan nasional.
3. Reformasi sistem jaring pengaman sosial.
4. Reformasi sistem ketahanan bencana.

RKP 2021 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh Prioritas Nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan tema RKP 2021. Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2021, dilakukan penekanan pada empat Prioritas Nasional dan beberapa *Major Project*.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, juga melakukan perubahan tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dari semula "*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Didukung Oleh Pertumbuhan Berkualitas Melalui Pengembangan Hilirisasi Pertanian, Pariwisata, Investasi, Dan Infrastruktur Di Berbagai Wilayah*" menjadi "*Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas*".

RKPD Kota Bukittinggi tahun 2021, juga melakukan penyesuaian fokus pembangunan untuk penanggulangan *Covid-19* dan dampaknya pasca pandemi, dengan mengusung tema: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Bukittinggi”**. Prioritas pembangunan Kota Bukittinggi juga mengalami pergeseran, menjadi 3 (tiga) aspek fokus, yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19
2. Pencapaian target RPJMD tahun 2016 – 2021, berupa:
 - a. Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar
 - b. Peningkatan Infrastruktur
 - c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
3. Pencapaian SPM

Karena keterbatasan informasi, pada RKPD ini asumsi yang digunakan sepenuhnya merujuk kepada perkiraan makro yang menjadi kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, baik kondisi hingga akhir 2020, maupun proyeksi tahun 2021 sebagai pijakan perumusan kebijakan program dan kegiatan. Dengan demikian, RKPD tahun 2021 akan disesuaikan sesuai dinamika yang ada melalui tahapan penyusunan perencanaan, hingga ditetapkannya anggaran tahun 2021, seperti pada RKUA, PPAS dan RAPBD tahun 2021.

Beberapa tahapan dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021, yang telah dimulai semenjak awal dan masa pandemi *Covid-19* juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Diantaranya adalah dengan pemberlakuan pembatasan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar, maka pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD dilakukan secara online memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika yang ada. Dengan demikian, proses penyusunan perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan.

Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari kelurahan dan kecamatan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Hasil Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan

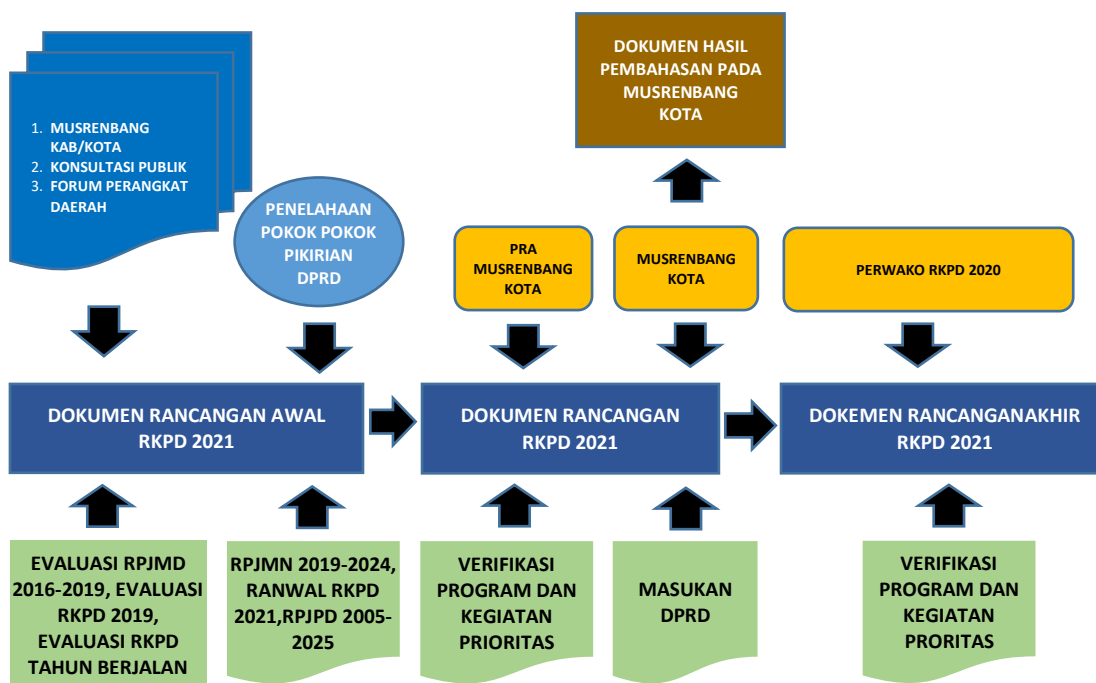
keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilakukan sebagai upaya dimana program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dijabarkan secara fungsional dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, evaluasi RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 dan evaluasi RKPD Kota Bukittinggi tahun berjalan. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kota Bukittinggi, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
2. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal dimana Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan:
 - a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang telah diverifikasi; dan
 - b. Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021, Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD untuk selanjutnya

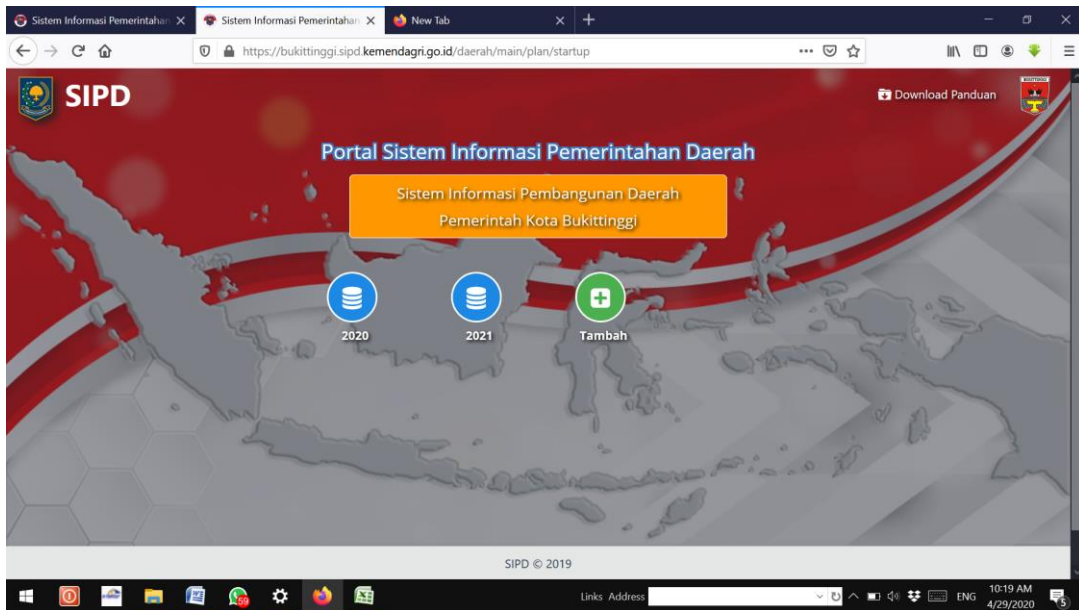
dilakukan pembahasan bersama seluruh Perangkat Daerah, fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota oleh Gubernur yang setelah itu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi. Adapun proses penyusunan dokumen RKPD adalah seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Dokumen RKPD



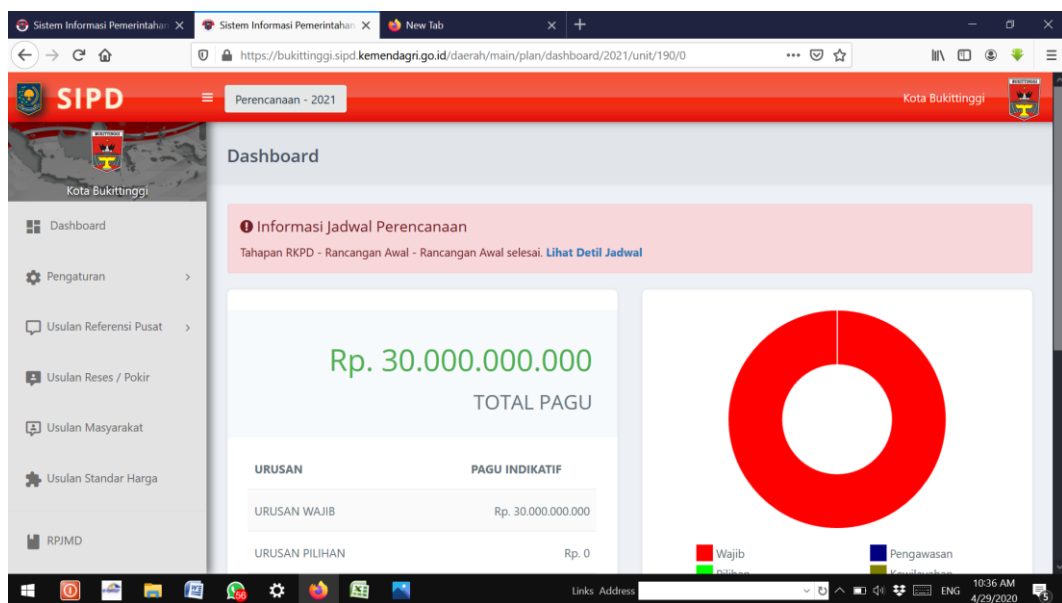
Sejalan dengan pelaksanaan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka pada penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 digunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi mulai perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan. Aturan ini ditegaskan juga dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/12261/SJ tanggal 6 November dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2021 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa SIPD wajib digunakan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan tidak hanya sekedar menyelaraskan, antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD/ Renstra, RKPD/Renja) dengan penganggaran keuangan daerah (APBD dan DPA) akan tetapi juga akan memperkuat terwujud sinergitas perencanaan ditingkat provinsi dan nasional.

Gambar 1.2
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri



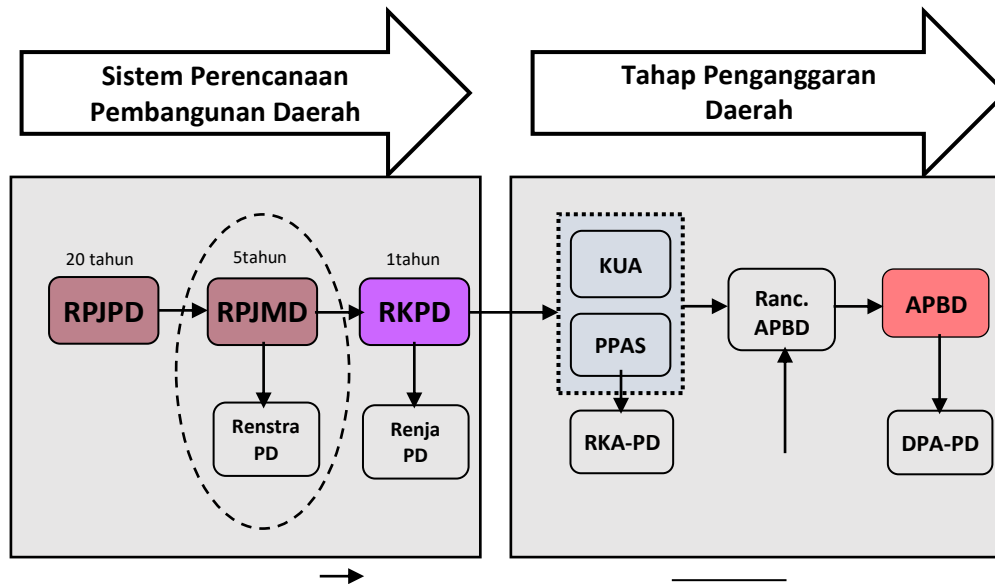
Disamping itu, penerapan sistem *e-planning* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kota serta melalui penjangkaran aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan kegiatan reses dan kecamatan.

Gambar 1.3
Menu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan Kemendagri



Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RKPD memiliki hubungan/ keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar berikut :

Gambar 1.4
Hubungan Antar Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD



Disamping itu, untuk mewujudkan seluruh kaedah dan ketentuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, maka pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 juga memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Implementasinya dilakukan pada saat perumusan teknis program dan kegiatan yang mempertimbangkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

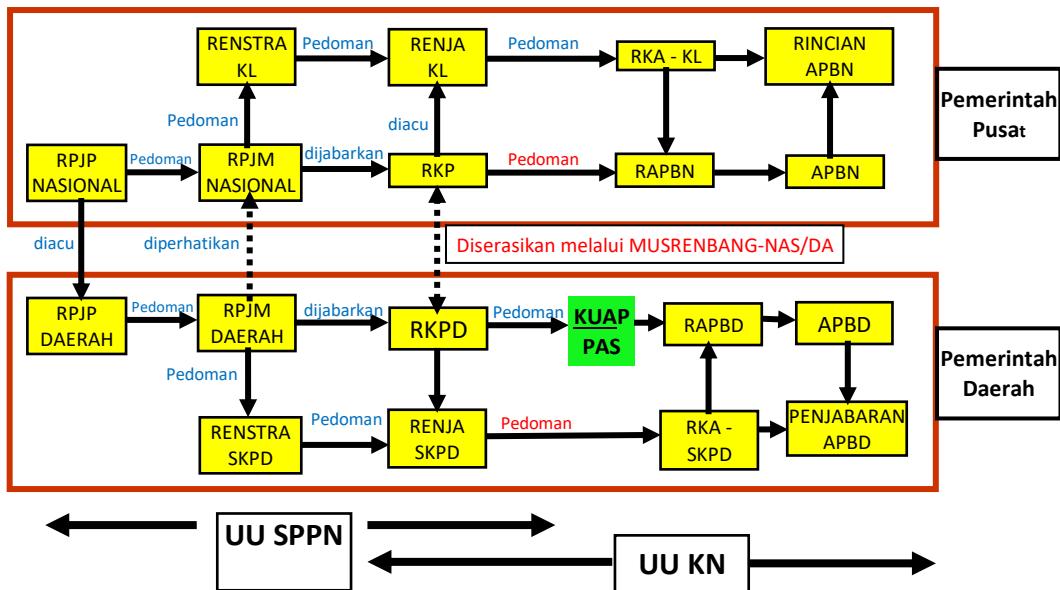
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Tahun 2016-2021. RKPD Kota disusun dengan mengacu pada RPJPD Kota Tahun 2006-2025, RPJMD Provinsi, RPJMN serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2021, RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 serta memperhatikan masterplan tingkat kota dan rencana induk pengembangan sektoral yang dimiliki Pemerintah Kota Bukittinggi .

RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan kota. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 1.5
Hubungan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai Kesatuan Sistem
Perencanaan Pembangunan Dan Sistem Keuangan



Sumber : Undang-undang No.25 tahun 2004

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah:

1. Untuk mewujudkan program pembangunan yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Tahun 2016-2021;
2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2021;
3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun Anggaran 2021;

4. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2021. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V Rencana Kerjadan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi.

BAB VII Penutup

Berisi penegasan bahwa RKPD merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/ kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kota Bukittinggi terletak antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan antara 00°16' - 00° 20' Lintang Selatan pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera. Letak astronomisnya menunjukkan bahwa Bukittinggi berada di bagian tengah pulau Sumatera. Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter diatas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan destinasi wisata. Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

Kota yang terkenal dengan Jam Gadang ini terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat dengan luas hanya 0,06 persen dari Provinsi Sumatera Barat atau setara dengan 25,239 Km². Kondisi geografis yang berbukit dan mempunyai lembah maka luas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan menjadi sangat terbatas. Selain itu, Kota Bukittinggi juga tidak memiliki sumber daya alam yang bisa di eksploitasi secara fisik, baik berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut. Potensi yang dimiliki oleh Bukittinggi hanyalah lingkungan alam yang indah, sejuk, bersih, dan letaknya strategis serta nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai agama dan nilai adat, memperkaya aset Kota Bukittinggi.

Dengan kondisi tersebut di atas, menjadikan Kota Bukittinggi menjadi daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sumatera Barat, disamping sebagai kota pendidikan, kota pelayanan kesehatan dan kota perdagangan dan jasa serta tempat peristirahatan. Kota Bukittinggi juga menjadi pusat pengembangan pariwisata di Sumatera Barat karena karakteristik alam dan budayanya serta lokasinya yang strategis dan menjadi *home base* bagi wisatawan yang hendak mendatangi objek- objek wisata yang ada di Sumatera Barat yang jaraknya relatif dekat dan mudah dicapai dari Kota Bukittinggi.

Untuk melihat gambaran umum kondisi daerah Kota Bukittinggi, data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Kota Bukittinggi disajikan sebagai berikut :

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Aspek geografis dan demografi menggambarkan tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi Kota Bukittinggi.

A. Karakteristik lokasi dan wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan Kota Bukittinggi.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,239 Km², yang merupakan 0,06 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi yang sangat strategis terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi – Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Disamping itu Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km² (683,10 Ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan;
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km² (1.215,60 Ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan;
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km² (625,20 Ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

Pembagian wilayah administrasi Kota Bukittinggi per Kecamatan dan Kelurahan ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi

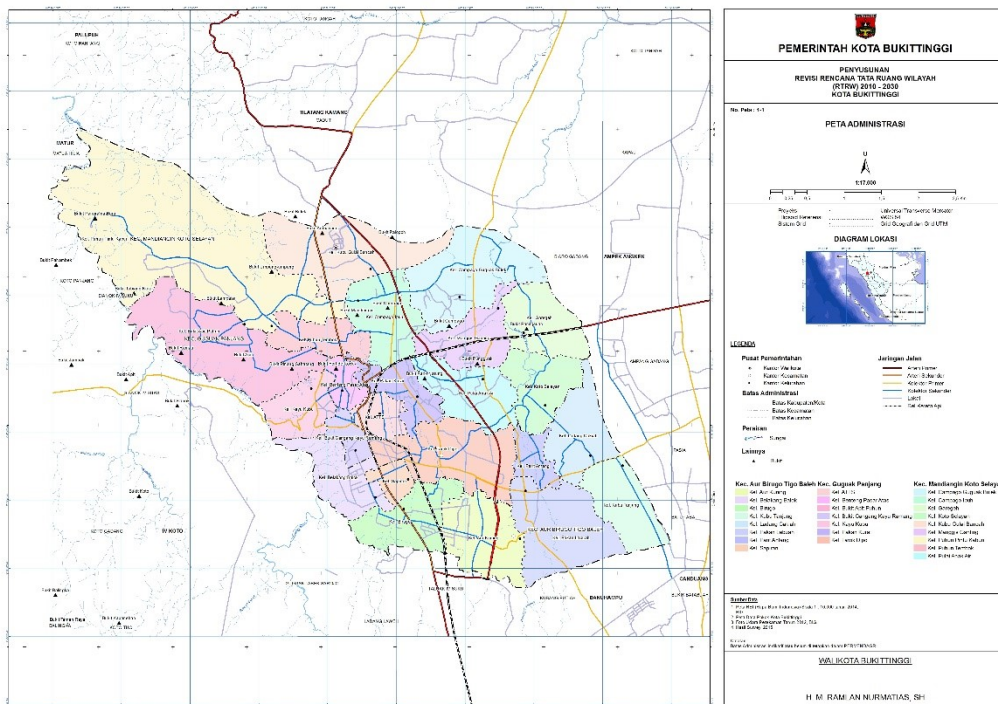
No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
I	GUGUK PANJANG	683,10	27,07
1.	Bukit Cangang K. Ramang	47,00	1,86
2.	Tarok Dipo	148,00	5,86
3.	Pakan Kurai	87,00	3,45
4.	Aur Tajunggang T. Sawah	69,00	2,73
5.	Benteng Pasar Atas	56,00	2,22
6.	Kayu Kubu	91,00	3,61
7.	Bukit Apit Puhun	185,10	7,33
II	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1.215,60	48,16
1.	Pulai Anak Air	88,20	3,49
2.	Koto Selayan	73,00	2,89

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
3.	Garegeh	65,00	2,58
4.	Manggis Ginting	65,10	2,58
5.	Campago Ipuh	139,30	5,52
6.	Puhun Tembok	71,00	2,81
7.	Puhun Pintu Kabun	361,00	14,30
8.	Kubu Gulai Bancah	181,00	7,17
9.	Campago Guguk Bulek	172,00	6,81
III	AUR BIRUGO TIGO BALEH	625,20	24,77
1.	Belakang Balok	50,40	2,00
2.	Sapiran	25,70	1,02
3.	Birugo	94,00	3,72
4.	Aur Kuning	90,00	3,57
5.	Pakan Labuah	118,00	4,68
6.	Kubu Tanjung	91,10	3,61
7.	Ladang Caklah	74,00	2,93
8.	Parit Antang	82,00	3,25
JUMLAH		2.523,90	100,00

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2019

Pembagian wilayah Kota Bukittinggi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Bukittinggi



Secara administratif, Wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Bukittinggi berada dalam lingkup Kabupaten Agam, serta terletak pada posisi sentral dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun antar provinsi terdekat. Letak geografis ini cukup strategis terhadap lintasan regional, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru. Kota Bukittinggi telah menjadi kota titik perlintasan dari Jalur Lintas Tengah Sumatera serta jalur penghubung antara Jalur Lintas Tengah dengan Jalur Lintas Timur Sumatera.

a. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kota Bukittinggi membentang antara 100°20' - 100°25' BT dan antara 00°16' - 00° 20' LS.

b. Posisi Geostrategis

Bukittinggi dengan posisi geostrategisnya, mempunyai dataran yang tinggi dan bergelombang serta mempunyai udara yang sejuk, memungkinkan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Bukittinggi. Oleh karena itu dalam lingkup Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi menjadi orientasi pelayanan utama perdagangan, dan pariwisata.

c. Kondisi/Kawasan Kota Bukittinggi

Bukittinggi dengan wilayah yang dimilikinya merupakan kategori Kota Kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori Kota Sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukittinggi tidak mempunyai daerah pedalaman, terpencil, pesisir, pegunungan dan kepulauan.

3. Topografi

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan yang terbentuk dari tufa batu apung dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut , sehingga tanahnya subur. Namun demikian luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali yaitu 639 ha dan kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki lahan pertanian yang paling luas yaitu 344 (ha), sementara kecamatan Aur BirugoTigo Baleh seluas 238 (ha) dan kecamatan Guguk Panjang 57 (ha). Hal ini

disebabkan karena sebahagian besar lahan digunakan untuk pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa. Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wikalayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,64%) berada di kawasan Gulai bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan dataran (74,98%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur. Adapun proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi berdasarkan klasifikasi kelerengan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi
Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya

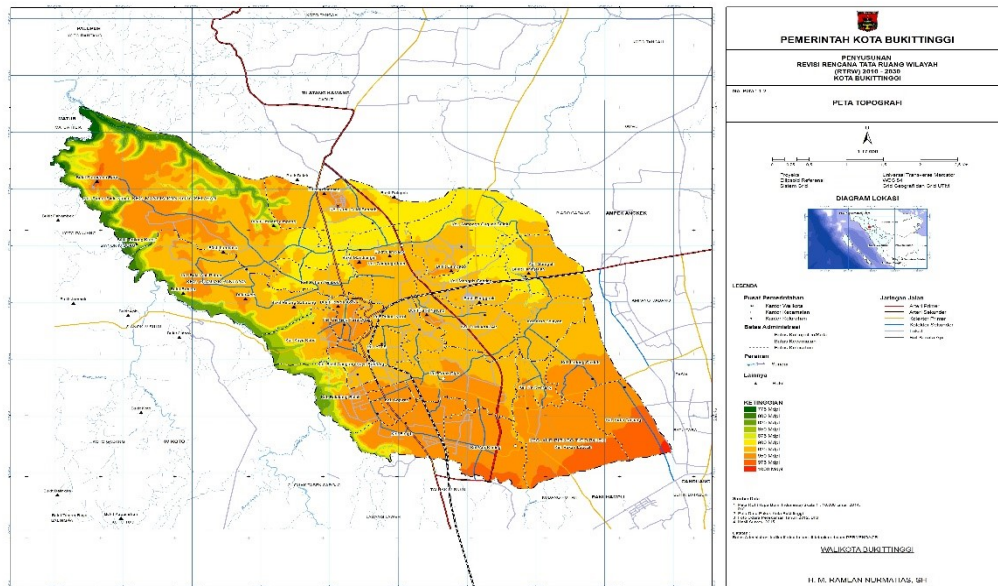
No	Lereng	Kecamatan						Jumlah (Ha)	%
		ABTB		GP		MKS			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
1.	0-2%	430,22	68,81	369,77	54,313	584,27	49,06	1.384,26	54,59
2.	3-8%	88,57	14,17	96,70	14,16	71,47	5,88	256,74	9,79
3.	9-15%	25,60	4,09	52,95	7,75	180,63	14,86	259,18	10,60
4.	16-25%	9,73	1,56	23,66	3,46	94,74	7,79	128,13	5,27
5.	26-40%	4,86	0,78	29,93	4,38	73,75	6,07	108,54	4,37
6.	>40%	66,22	10,59	110,09	16,12	210,75	17,34	387,05	15,38
JUMLAH		625,20	100	683,10	100	1.215,60	100	2.523,90	100

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kota Bukittinggi, Tahun 2017

Kota Bukittinggi dikelilingi oleh perbukitan di sebelah Utara, Timur dan Barat, serta pegunungan di sebelah Selatan dengan topografi wilayah pada umumnya bergelombang. Dengan kondisi demikian, berakibat terhadap terbatasnya pemanfaatan ruang kota untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai topografi Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Topografi Kota Bukittinggi di bawah ini:

Gambar 2. 2
Peta Topografi Kota Bukittinggi



Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi empat satuan morfologi, yaitu :

a. Satuan Morfologi Dataran

Kemiringan lereng umumnya 10%, dengan ketinggian berkisar antara 865-920 mdpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan, kebun/ladang dan permukiman, daerah ini dibentuk oleh endapan vulkanik muda berupa tufa apung.

b. Satuan Morfologi Berelief Halus

Kemiringan lereng antara 10-15 % dengan ketinggian 850-920 mdpl, umumnya merupakan kebun/ladang belukar, permukiman dan perwasahan. Daerah ini dibentuk oleh batuan tufa apung dan sebagian oleh metamorf.

c. Satuan Morfologi Berelief Kasar

Dibentuk oleh batuan tufa apung dengan ketinggian daerah antara 650-900 mdpl, medan cukup terjal, kemiringan lebih dari 60% satuan morfologi ini merupakan tebing Ngarai Sianok.

d. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi

Kemiringan medan antar 10 -20% dengan kemiringan tempat 900 mdpl, penggunaan lahan pada satuan ini berupa semak/belukar, dan sebahagian persawahan. Daerah dengan satuan morfologi ini sangat subur, karena dibentuk oleh hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava.

4. Geologi

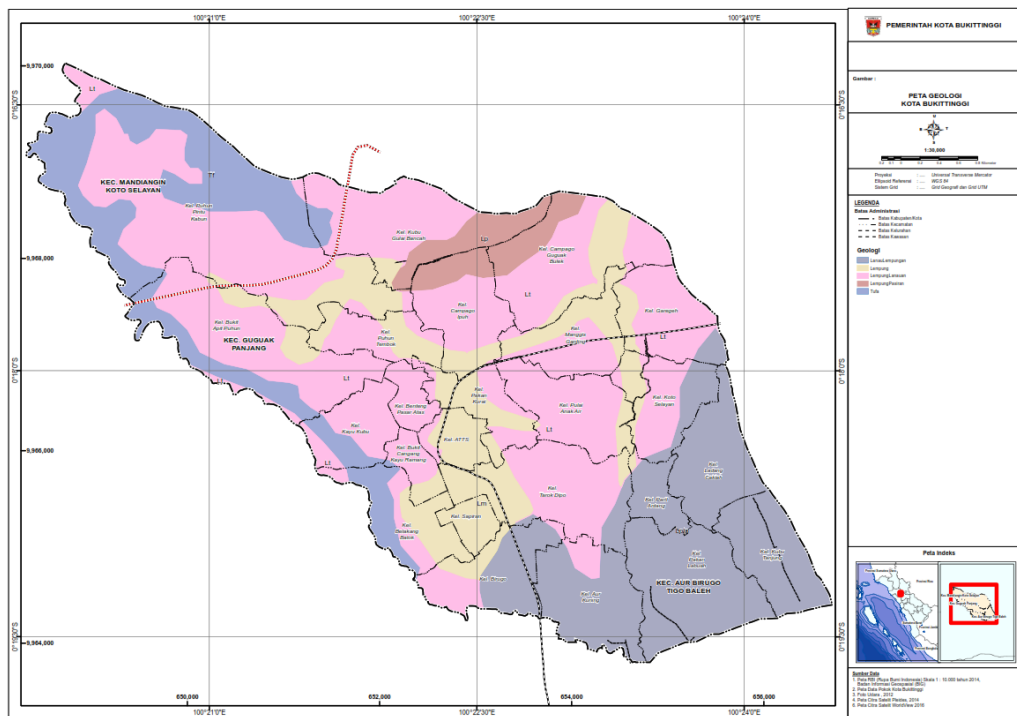
Ground Kota Bukittinggi tersusun dari material padat alam, yang terdiri dari batuan dasar, tanah, dan humus sebagai hamparan tempat tumbuhnya aneka tumbuhan. Di area Kota Bukittinggi, hanya terdapat sejenis batuan dasar yang tersingkap (*exposed*), yaitu Tufa Batuapung, hasil dari proses kegunungpian (*volkanisme*). Pada peta geologi resmi yang dipublikasikan Kementerian ESDM, Tufa Batuapung itu disimbolkan sebagai "Qpt". Secara aktual, terdapat batuan Qpt segar, dan Qpt lapuk menjadi tanah residual (hasil pelapukan). Tampilan fisik dari Qpt segar adalah: "kuning kelabu jika basah dan kuning keputihan jika kering". Terdapat partikel hitam ukuran 1 mm, serabut kaca putih mengkilat, kwarsa putih susu, partikel kuning karat 1 mm, dan gumpalan-gumpalan amorf silika. Partikel-partikel itu satu sama lain terikat lemah. Secara menyeluruh sebagai massa material, Qpt bersifat kohesif namun lunak (*soft*), porous dan kenyal (*Stiff*). Di beberapa lokasi lain, Qp mengandung kepingan welded tuff 50 mm dan kepingan lava 40 mm, dengan komponen penyusun mayoritas berupa partikel halus berukuran lempeng (kurang dari 0,2 mm). Qpt segar dapat ditemukan pada lereng alam Ngarai Sianok atau lereng-lereng galian di Kota Bukittinggi. Uji coba lapangan terhadap singkapan Qpt segar, dengan metode uji pantulan (*impact test*) menunjukkan "tumbukan bergedebuk, meninggalkan tapak palu dan terjadi keteretakan di sekitar tapak palu". Hasil "impact test" itu menunjukkan skala kekuatan Qpt segar adalah "cukup kuat". Dengan metode peremasan tangan, material Qpt memungkinkan peremasan secara normal, menunjukkan kekuatan geser relatif di kelas "kokoh" dengan nilai 36 s/d 72 kPa. Pengukuran berat satuan $\sigma = 18 \text{ kN/m}^3$, dan perkiraan porositas $n = 0,5$

Tanah sebagai bentukan dari pelapukan batuan dari pelapukan batuan secara fisika dan kimia, terdiri dari dua jenis, yaitu 1) tanah endapan, dan 2) tanah residu. Untuk Kota Bukittinggi, tanah endapan terdapat di dasar ngarai sepanjang alur Batang Sianok, sebagai hasil erosi, transportasi dan pengendapan oleh air sungai (*aluvium*) dan oleh longsoran tebing (*koluvium*). Tanah residu sebagai hasil pelapukan kimiawi terhadap batuan dasar, terutama ada di dataran dan lekuk perbukitan di Kota Bukittinggi (contohnya di hamparan sawah dan pemukiman). Bagian paling atas dari hamparan tanah yang diselimuti tumbuhan (*vegetasi*) merupakan humus. Ketebalan tanah dan humus bervariasi mencapai beberapa meter.

Kawasan Bukittinggi, terletak pada suatu zona yang dikenal sebagai jalur utama Sistem Sesar Sumatera yaitu pada segmen Central Barisan Fault Zone (CBFZ, Possavec et al, 1973 & Hahn & Weber, 1981). CBFZ merupakan komponen utama dari Sistem Sesar Sumatera dan kerap juga disebut sebagai "Patahan Semangko" yang membentang sepanjang tengah daratan Pulau Sumatera. Lembah yang berderet paralel dengan barisan bukit-bukit sepanjang tengah Pulau deretan lembah mulai dari Muara Labuh, terus ke Gumanti dan Solok terus ke Marapi, terus ke Palupuh dan Rao di

Pasaman Timur. Kota Bukittinggi, terletak 1250 meter di timur dari jalur CBFZ. Untuk skala regional, jarak tersebut relatif dekat. Segmen CBFZ itu satu-satunya struktur geologi yang signifikan untuk dinamika tektonik Kota Bukittinggi masa kini, karena jalur secara sesar aktif itu kerap merupakan lokasi dari episentrum gempa bumi di Pulau Sumatera. Gambaran kondisi geologi Kota Bukittinggi ditampilkan pada peta berikut ini:

Gambar 2. 2
Peta Geologi Kota Bukittinggi



D. Hidrologi

Kota Bukittinggi terletak di dalam dua Wilayah Aliran Sungai (WAS), yaitu WAS Masanghulu yang berada di bagian Barat dan mengalir ke arah Samudera Indonesia, dan WAS Batang Agam yang mengalir ke arah bagian Timur. Sungai-sungai yang relatif lebar di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 sampai 12 meter, serta terdapat juga sungai-sungai kecil (raven) yang merupakan tempat aliran air permukaan menuju ke pola aliran sungai. Sungai-sungai yang relatif besar di Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- Batang Sianok dengan lebar 12-15 meter, yang terletak di Sepanjang perbatasan sebelah Barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam yang membentang didalam lembah disebut dengan Ngarai Sianok dan alirannya melintasi Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kecamatan Guguak Panjang serta kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

- Batang Tambuo dengan lebar 5-7 meter, yang terletak disebelah timur Kota Bukittinggi dan aliran sungainya melintasi Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
- Batang Agam dengan lebar 5-7 meter., yang terletak di dalam wilayah Kota Bukittinggi dan melintasi Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Kecuali berfungsi sebagai outlet hidrologi kawasan, sungai ini berperan sebagai jaringan drainase primer yang merupakan muara distribusi pembuangan air dari kawasan perencanaan yang berasal dan jaringan drainase sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya kondisi Sungai yang ada di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3
Sungai/Batang yang Melalui Bukittinggi

No	Nama Sungai / Batang	Lebar (m)	Kec. Yang Dilalui
1.	Batang Tambuo	7	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Birugo Tigo Baleh • Mandiangin Koto Selayan
2.	Batang Sianok	12	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Birugo Tigo Baleh • Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan
3.	Batang Agam	6	<ul style="list-style-type: none"> • Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2020

Untuk pengembangan wilayah di sekitar sungai perlu memperhatikan garis sempadan sungai. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di kiri dan kanan palung sungai sebagai batas perlindungan sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, untuk sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan (kedalaman tidak lebih dari tiga meter) memiliki garis sempadan minimal 10 meter dari sungai batang sianok, 5 m sempadan sungai untuk batang tambuo dan 4 m untuk batang agam.

Tipologi hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai (up stream) dengan pola Dendrtik, aliran air yang relatif deras. Selain itu kondisi kelerengan Kota Bukittinggi yang banyak membentuk aliran-aliran air (raven) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air melalui aliran bawah tanah.

Selain sungai, Kota Bukittinggi juga memiliki embung yang berfungsi sebagai penampung air hujan dan irigasi. Saat ini Kota Bukittinggi memiliki 3 buah embung yang tersebar di seluruh

kecamatan. Salah satu embung yang terluas adalah embung Lubuak Anak Limau dengan luas total sebesar 0,25 Ha. Embung ini berada di wilayah Bukittinggi, tepatnya terletak di Daerah Anak Limau, Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh.

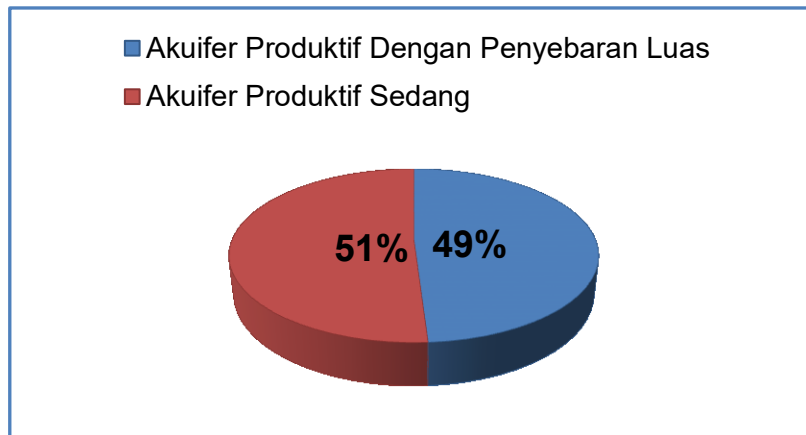
Karakteristik hidrologi di Kota Bukittinggi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu akuifer produktif dengan penyebaran luas, serta akuifer produktif sedang. Masing-masing jenis hidrologi tersebut tersebar merata di wilayah Kota Bukittinggi. Untuk lebih jelas mengenai kondisi hidrologi di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2. 4
Hidrologi di Kota Bukittinggi

Kecamatan	Kelurahan	Akuifer Produktif Dengan Penyebaran Luas	Akuifer Produktif Sedang	Luas (Ha)
Aur Birugo Tigo Baleh	Aur Kuning	104,24	0,07	104,31
	Belakang Balok	7,74	71,01	78,75
	Birugo	64,96	23,18	88,14
	Kubu Tanjung		84,22	84,22
	Ladang Cakiah		87,83	87,83
	Pakan Labuah	24,11	118,75	142,86
	Parit Antang	7,29	26,79	34,08
	Sapiran	22,86	0,54	23,4
Guguak Panjang	ATTS	34,41		34,41
	Benteng Pasar Atas	26,12	0,56	26,68
	Bukit Apit Puhun	0,71	203,1	203,81
	Bukit Cangang Kayu Ramang	12,5	14,6	27,1
	Kayu Kubu	1,67	62,26	63,93
	Pakan Kurai	59,62		59,62
	Tarok Dipo	138,19	1,03	139,22
Mandiingin Koto Selayan	Campago Guguak Bulek	153,81		153,81
	Campago Ipuh	93,74		93,74
	Garegeh	76,06	9,91	85,97
	Koto Selayan	54,28	26,21	80,49
	Kubu Gulai Bancah	117,84	39,75	157,59
	Manggis Ganting	78,78		78,78
	Puhun Pintu Kabun	16,14	469,14	485,28
	Puhun Tembok	30,89	27,97	58,86
	Pulai Anak Air	90,85		90,85
Total		1.216,81	1.266,92	2.483,73

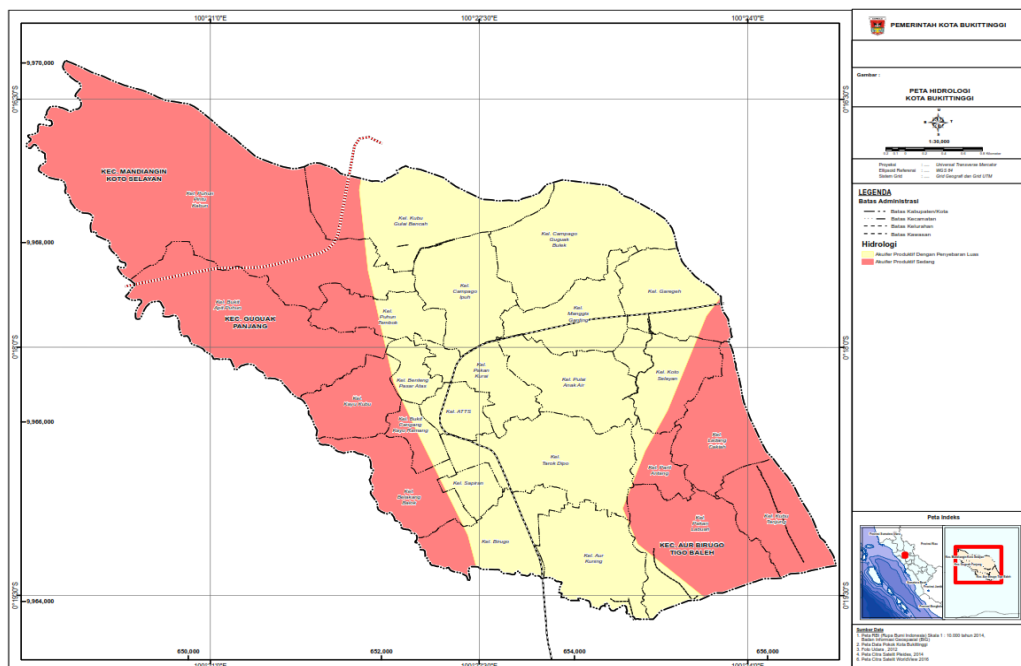
Sumber : Peta Hidrogeologi Sheet 0715 Skala 1 : 250.000, Puslitbang Geologi dalam Dalam Dok. RDTR Kota Bukittinggi

Grafik 2. 1
Kondisi Hidrologi Kota Bukittinggi



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta hidrologi Kota Bukittinggi berikut:

Gambar 2. 3
Peta Hidrologi Kota Bukittinggi



Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa kondisi akuifer Kota Bukittinggi adalah akuifer produktif dengan penyebaran luas dan sedang dengan luasan yang relatif sama yakni 51 % merupakan akuifer produktif sedang dan 49% akuifer produktif dengan penyebaran luas.

E. Klimatologi

a. Tipe

Kota Bukittinggi beriklim basah yang termasuk Tropis basah yang ditandai dengan kelembapan udara yang relatif tinggi (umumnya diatas 90%), memiliki curah hujan yang tinggi dan Memiliki suhu tahunan lebih dari 18° C dan mencapai 38° C ketika musim kemarau, yang menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat sejuk dan sangat cocok untuk pertanian terutama untuk tanaman hias, disamping untuk tempat peristirahatan.

b. Curah Hujan

Secara umum kondisi rata-rata curah hujan di Kota Bukittinggi berkisar antara 3.000 – 4.000 mm per tahun untuk seluruh wilayah yang berada di Kota Bukittinggi, pada tahun 2019 curah hujan Kota Bukittinggi berkisar 2.517 mm/tahun. Untuk lebih jelasnya rata-rata curah hujan bulanan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Rata-rata Curah Hujan Bulanan Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Bulan	Rata-rata Curah Hujan (mm)
1	Januari	268
2	Februari	180
3	Maret	110
4	April	336
5	Mei	188
6	Juni	247
7	Juli	186
8	Agustus	75
9	September	103
10	Oktober	338
11	November	168
12	Desember	318
	Total	2.517

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2020

c. Suhu

Kota Bukittinggi terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk dengan suhu kisaran suhu udara minimum 16,10° C dan maksimum mencapai 24,90° C dan tekanan udara berkisar antara 22–25 knots. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat cocok untuk tempat peristirahatan.

d. Kelembaban

Bukittinggi mempunyai kelembaban minimum 78% dan maksimum 93%, dengan kelembaban rata-rata 82% setiap tahunnya.

F. Penggunaan Lahan

Pengembangan pola ruang Kota Bukittinggi sendiri didasarkan pada beberapa pendekatan utama, yaitu:

- a. Struktur ruang yang dikembangkan;
- b. Evaluasi kesesuaian dan daya dukung lahan;
- c. Kondisi penggunaan lahan saat ini serta kecenderungan perkembangannya.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 dengan batasan sebagai berikut:

- a. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan sumber daya manusia.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana pola ruang wilayah Kota Bukittinggi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Gambaran rencana pola ruang di Kota Bukittinggi secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut.

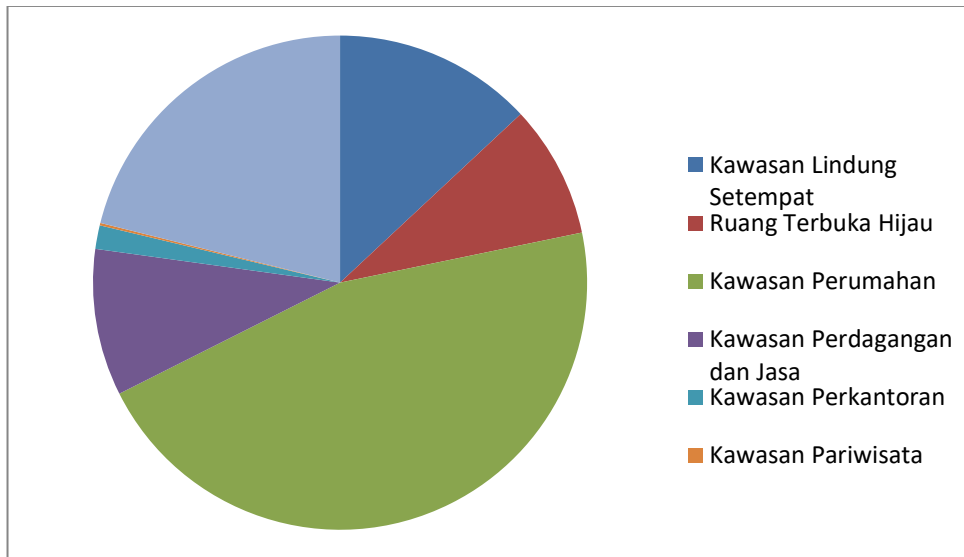
Tabel 2. 6
Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)

POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
Semua Kawasan		652,569	567,215	1.303,750	2.523,900
Kawasan Lindung		85,169	135,978	327,765	549,012
1, Kawasan Lindung Setempat		56,687	77,103	195,654	329,444
1,1	Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444
2, Ruang Terbuka Hijau		28,482	58,875	132,111	219,568
2,1	RTH Taman	3,624	11,640	44,963	60,327
	Taman Kota	2,232	6,528	21,188	29,948
	Hutan Kota	1,392	5,112	23,775	30,279
2,2	RTH Fungsi Tertentu	22,013	42,992	81,731	146,736
	Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836
	Sempadan Sungai	5,032	4,899	15,268	25,200
	Taman Pemakaman Umum	3,124	6,399	10,177	19,700
2,3	RTH Jalur Hijau Jalan	2,845	4,243	5,417	12,505
	RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,520	1,200	2,345	5,065
	RTH Ruang Di Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,440
Kawasan Budidaya		567,399	431,238	975,986	1.974,888
1, Kawasan Perumahan		320,376	211,357	624,927	1156,927
1,1	Perumahan Kepadatan Tinggi	112,985	104,362	298,424	515,771
1,2	Perumahan Kepadatan Sedang	194,511	96,928	326,503	617,942
1,3	Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946
2, Kawasan Perdagangan dan Jasa		32,759	131,424	78,229	242,411
3, Kawasan Perkantoran		8,555	10,989	19,402	38,945
4, Kawasan Pariwisata		0	4,021	0	4,021
5, Kawasan Peruntukan Lainnya		205,520	74,003	253,428	532,951
5,1	Pertanian Lahan Basah	183,390	0	106,948	290,338
5,2	Pertanian Lahan Kering	0	33,337	111,458	144,795
5,3	Sarana Pelayanan Umum	19,345	40,110	33,906	93,361
5,4	Pertahanan dan Keamanan	2,974	0,556	1,116	4,090

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Grafik 2. 2
Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)



G. Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan di Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi dari setiap kawasan di Kota Bukittinggi dalam pengembangan Kota Bukittinggi secara keseluruhan. Penetapan tersebut selain didasarkan pada kondisi saat ini yang lebih penting adalah rencana pengembangan kedepan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam penetapan pusat-pusat pelayanan di Kota Bukittinggi adalah :

- Penentuan hirarki pusat pelayanan disesuaikan dengan perkembangan yang ada pada kondisi eksisting dengan tetap memperhatikan kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan di masa mendatang yang tinggi.
- Sub pusat pelayanan akan dibentuk dengan merencanakan pengelompokan fasilitas yang memiliki skala pelayanan blok rencana, tidak hanya fasilitas pelayanan umum namun juga fasilitas pelayanan lainnya.
- Fungsi dan peran Kota Bukittinggi terhadap wilayah sekitar Kota Bukittinggi dalam pengembangan sektor pariwisata.
- Fungsi dan peran kawasan perencanaan dalam struktur fisik dan fungsional Kota Bukittinggi.

Pengembangan pusat-pusat pelayanan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Arahan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Bukittinggi

No	Pusat Pelayanan Kota Bukittinggi	Kawasan	Arahan Pengembangan
1	Pusat Pelayanan Kota – Fungsi Primer	Kawasan Pasar Atas	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional; - Kawasan perumahan kepadatan tinggi; - Ruang terbuka hijau skala perkotaan dalam bentuk taman kota dan jalur hijau jalan.
		Kawasan Aur Kuning	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional; - Pusat pergerakan regional;
2	Pusat Pelayanan Kota – Fungsi Sekunder	Kawasan Gulai Bancah	<ul style="list-style-type: none"> - kawasan pusat pemerintahan kota; - kawasan sosial budaya dengan keberadaan gedung perpustakaan bung hatta; - ruang terbuka hijau berbentuk taman kota, jalur hijau, taman makam pahlawan dan taman pemakaman umum; - kawasan permukiman kepadatan sedang beserta fasilitas pendukungnya; dan - kawasan pengembangan fasilitas pelayanan umum
		Kawasan Belakang Balok	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Perkantoran Pemerintahan skala kota. - Kawasan Pusat Pelayanan Pendidikan menengah dan tinggi serta Pusat pelayanan kesehatan skala kota. - Kawasan Perumahan berikut fasilitas pendukungnya. - Kawasan Perdagangan dan jasa skala kota. - Pengembangan Ruang Terbuka hijau skala kota
3	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kawasan Campago Ipuh	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Pelayanan Umum dan Sosial, meliputi pendidikan menengah, rekreasi skala sub wilayah kota. - Perdagangan dan Jasa Koridor skala sub wilayah kota. - Kawasan Olahraga skala sub wilayah Kota. - Perumahan berkepadatan tinggi dan fasilitas pendukungnya. - Ruang Terbuka Hijau rekreasi.
		Kawasan Garegeh	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan dan jasa skala sub wilayah kota. - RTH rekreasi skala sub wilayah kota. - Kawasan Olahraga skala sub wilayah Kota - Pendidikan tingkat menengah dan kesehatan skala puskesmas pembantu. - Sebagian perumahan berkepadatan tinggi dan sebagian perumahan kepadatan sedang dengan fasilitas pendukungnya.
		Kawasan Ladang Cakiah	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan dan jasa skala sub wilayah kota. - RTH rekreasi skala sub wilayah kota. - Kawasan Olahraga skala sub wilayah Kota - Pendidikan tingkat menengah dan kesehatan skala puskesmas pembantu. - Perumahan berkepadatan sedang dan fasilitas pendukungnya

No	Pusat Pelayanan Kota Bukittinggi	Kawasan	Arahan Pengembangan
4	Pusat Lingkungan	Kecamatan Aur Birugo Tiga Baleh, dengan 2 pusat pelayanan lingkungan berada pada Kelurahan Pakan Labuah dan Kelurahan Birugo	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan tingkat dasar; - Kesehatan: balai pengobatan; - Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Taman lingkungan/olahraga lingkungan; - Fasilitas peribadatan skala lingkungan; - Fasilitas perdagangan skala lingkungan
		Kecamatan Guguk Panjang, dengan 2 pusat pelayanan lingkungan berada pada Kelurahan Tarok Dipo dan Kelurahan Pakan Kurai	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan tingkat dasar; - Kesehatan: balai pengobatan; - Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Taman lingkungan/olahraga lingkungan; - Fasilitas peribadatan skala lingkungan; - Fasilitas perdagangan skala lingkungan
		Kecamatan Mandiangin Koto Selatan, dengan 4 pusat pelayanan lingkungan berada pada Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kelurahan Pulai Anak Air, dan Kelurahan Koto Selayan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan tingkat dasar; - Kesehatan: balai pengobatan; - Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Taman lingkungan/olahraga lingkungan; - Fasilitas peribadatan skala lingkungan; - Fasilitas perdagangan skala lingkungan.

Sumber : RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah. Bila dilihat dari karakteristik alam, kemiringan lereng Kota Bukittinggi yang sebagian wilayahnya merupakan bukit dan lembah (mencapai 25% dari kota) menyebabkan terbatasnya daya dukung pengembangan wilayah Kota Bukittinggi. Namun hal ini tidak menghambat pembangunan di Kota Bukittinggi dan itu merupakan suatu peluang dan tantangan bagi Kota ini untuk lebih mengembangkan ekonominya disektor perdagangan dan jasa, yang salah satu sektor unggulannya yaitu kepariwisataan.

Pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi dalam tata ruang Propinsi Sumatera Barat diarahkan sebagai pusat kegiatan pariwisata dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I. Dalam WPP I didominasi oleh jenis obyek wisata alam pegunungan. Kota Bukittinggi sendiri arahan pengembangan pariwisatanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Arahan Pengembangan Pariwisata Kota Bukittinggi

Satuan Pengembangan Pariwisata (SPP)	Obyek Wisata (OW)	Arahan Pengembangan
SPP I : Bukittinggi	- Kota Bukittinggi (1-l)	- Memperkuat fungsinya sebagai Kota Wisata
	- Koto Gadang (1-l)	- Menjadikan Koto Gadang sebagai Desa Wisata dan Kerajinan.
	- Panorama Ngarai Sianok (1-l)	- Melestarikan lingkungan dan pengendalian Bangunan fisik sebagai Ekowisata
	- Lubang Jepang (1 – l)	- Revitalisasi dengan penampilan fisik yang baik, wisata sejarah
	- Benteng Fort de Kock (1 – l)	- Revitalisasi bangunan, sebagai wisata sejarah
	- Pasar Atas & Bawah	- Pusat Kerajinan
	- TMSBK	- Kebun Binatang

Sumber : RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030

Pemerintah kota selalu berbenah diri dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi di antaranya telah dilakukan perencanaan secara menyeluruh terhadap pembenahan kandang-kandang binatang yang ada di Taman Budaya Kinantan atau yang lebih dikenal dengan Kebun Binatang. Secara bertahap mulai tahun 2019 telah dilakukan pembangunan kandang-kandang yang sesuai standar Balai Kelestarian Sumber Daya Alam. Upaya ini dalam rangka menciptakan ruang yang nyaman bagi binatang sehingga dapat hidup dan berkembang secara sehat serta menciptakan suasana yang nyaman dan indah bagi pengunjung sehingga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke Kebun Binatang. Usaha lain yang juga terus ditingkatkan adalah atraksi budaya yang dikemas dalam sajian yang lebih atraktif sehingga semakin meningkatkan dan menambah daya tarik wisata, seperti penampilan tari-tarian tradisional dipelataran Jam Gadang, serta pelaksanaan event-event daerah dikawasan objek wisata yang dapat menjadi sarana promosi kepariwisataan secara tidak langsung.

Peningkatan prasarana sarana dan utilitas sanitasi juga merupakan bagian penting dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana prasana air bersih, air limbah, persampahan, parkir dan pengembangan kawasan pedestrian terutama di kawasan Jam Gadang yang merupakan icon Kota Bukittinggi. Pengembangan kawasan pedestrian ini sangat mendukung terhadap kepariwisataan karena hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah dan udaranya yang sejuk menyebabkan para pengunjung akan betah berjalan kaki menikmati objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi.

Sedangkan dari segi non fisik, perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan baik dari segi regulasi, peningkatan Sumber Daya Manusia, penambahan daya tarik wisata serta penambahan objek wisata baru.

H. Wilayah Rawan Bencana

Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana.

Dari Catatan sejarah kejadian bencana pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Data kejadian bencana Kota Bukittinggi yang tercatat pada DIBI merupakan kejadian bencana dalam rentang tahun 2000 sampai 2018. Dalam rentang tahun tersebut, Kota Bukittinggi telah mengalami 18 kali kejadian dari 4(empat) jenis bencana.

Tabel 2. 9
Sejarah Kejadian Bencana di Kota Bukittinggi Tahun 2000–2018

Jenis Bencana	JUMLAH Kejadian	Korban (Jiwa)			Rumah (Unit)				Kerusakan (Unit)		
		Meninggal&Hilang	Luka-Luka	Terdampak & Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
1. Banjir	9	3	-	2.120	40	-	50	546	-	2	2
2. Gempabumi	2	7	100	1.525	10	-	89	-	-	-	14
3. Cuacaekstrim	3	-	-	92	14	15	7	-	-	1	-
4. Tanah Longsor	4	13	-	-	2	1	2	-	-	-	-
Total	18	23	100	3.737	66	16	148	546	-	3	16

Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia, Agustus 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kota Bukittinggi, bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Selain itu, dari total kejadian seluruh bencana terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan berupa korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan fasilitas (umum dan kesehatan).

Hal ini membuktikan bahwa Kota Bukittinggi membutuhkan upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan ataupun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya penanggulangan bencana.

1. Kawasan Rawan bencana Banjir/genangan

Melihat kondisi Topografi Kota Bukittinggi, sangat rentan terhadap bencana. Bencana yang berkemungkinan paling sering terjadi adalah bencana banjir. Berdasarkan hasil kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bukittinggi Tahun 2018, bencana banjir ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Besarnya debit air yang datang dari Kabupaten Agam
- b. Penumpukan sampah yang terbawa air disaluran drainase dan badan air
- c. Banyaknya terjadi *Bottleneck* dibadan drainase (dimensi drainase primer/sekunder/tersier)
- d. Adanya bangunan liar di atas drainase
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelancaran arus air di badan drainase
- f. Riol lama jaman Belanda tertutup

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB). Penentuan luasan terpapar bahaya banjir menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya banjir meliputi:

1. Daerah Rawan Banjir, menggunakan data DEMSRTM 30 tahun 2015 dengan sumber data dari USGS;
2. Kemiringan Lereng, menggunakan data DEMSRTM 30 tahun 2015 dengan sumber data dari USGS;
3. Jarak dari Sungai, menggunakan data Peta Jaringan Sungai dengan sumber data dari RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

Berdasarkan parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan wilayah terpapar bahaya banjir. Adapun luasan bahaya banjir perkecamatan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10

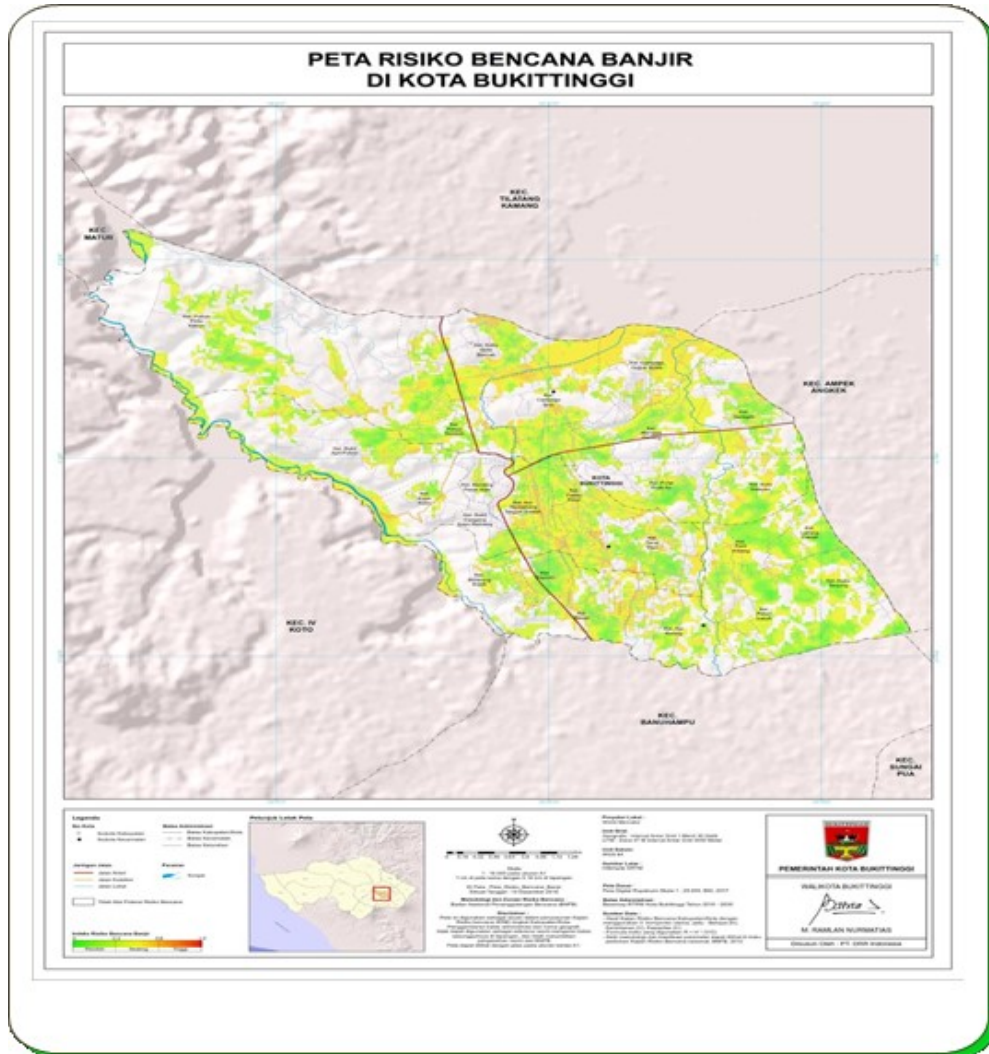
Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Bukittinggi

Kecamatan	Bahaya	
	Luas(Ha)	Kelas
1. Aur Birugo Tigo Baleh	382,77	Tinggi
2. Guguk Panjang	294,12	Tinggi
3. Mandiangin Koto Selayan	607,77	Tinggi
Kota Bukittinggi	1.284,66	Tinggi

Sumber: Dok. KRB Kota Bukittinggi Tahun 2018

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya banjir. Secara keseluruhan, bahaya banjir memberikan dampak luas bahaya di Kota Bukittinggi dengan total **1.284,66Ha** yang berada pada kelas **tinggi**.

Gambar 2. 4
Peta Resiko Bencana Banjir



2. Kawasan rawan bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor

Kawasan Rawan gempa bumi meliputi ketiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi dan daerah rawan longsor berada sepanjang bibir Ngarai Sianok yang juga meliputi ketiga kecamatan yang ada seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 11
Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor

Rawan Gempa Bumi				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
1.	Zona Rawan Tinggi	Belakang Balok Birugo Ladang Cakiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran Aur Kuning Parit Antang	Kayu Kubu BCKR Pakan Kurai ATTS Tarok Dipo Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Garegeh Campago G.Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai bancah Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak Air Puhun P.Kabun
Kerawanan Goncangan Tanah				
1.	Zona Rawan rendah	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Sapiran Parit Antang Ladang Cakiah	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Pakan Kurai Bukit Apit Puhun ATTS	Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Puhun Pintu Kabun
2.	Zona Rawan Sedang	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Parit Antang	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Bukit Apit Puhun ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Campago Ipuh Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah
3.	Zona Rawan Tinggi	Birugo Belakang Balok	BCKR Tarok Dipo ATTS Kayu Kubu ATTS	Pulai Anak Alr Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah

Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

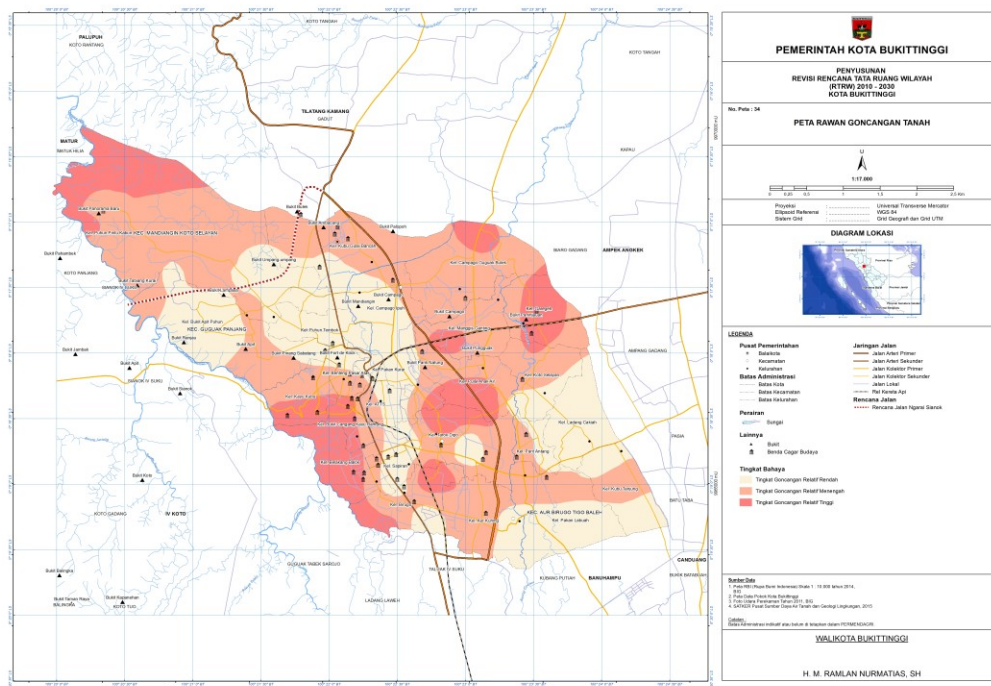
Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa seluruh wilayah yang berada dalam Kota Bukittinggi sangat berisiko terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi. Kategorinya mulai dari zona rawan bencana rendah, sedang dan tinggi. Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, bahwa sepanjang Kawasan Ngarai Sianok dan sempadan Ngarai Sianok yaitu dari Bibir Ngarai sampai dengan 50 Meter merupakan kawasan rawan bencana dengan zona rawan tinggi.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerawanan goncangan tanah di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Rawan Goncangan Tanah di Kota Bukittinggi di bawah ini:

Gambar 2. 5
Peta Goncangan Tanah Kota Bukittinggi

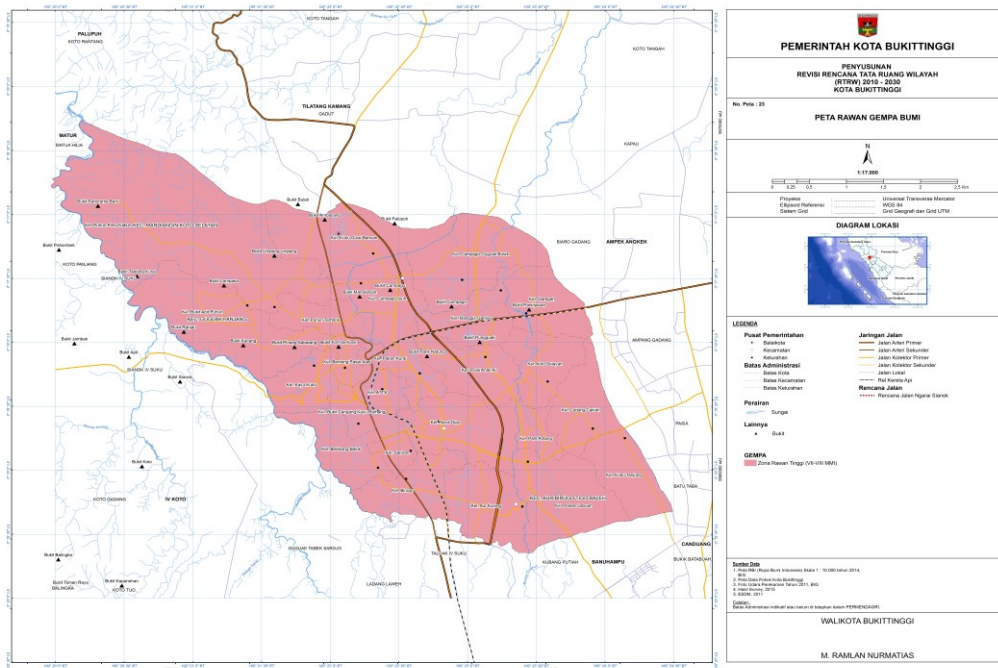


Berdasarkan jenis bencana alamnya, zona kerawanan bencana di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Zona rawan bencana gempa bumi. Zona Rawan Bencana Gempa Bumi pada umumnya dibagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Pembagian zona rawan ini didasarkan kepada:
 - Zona Rawan Rendah biasanya didasari oleh batuan berumur tersier yang relatif kompak, namun masih berpotensi terjadi longsoran apabila terjadi gempa.
 - Zona Rawan Menengah, biasanya didasari oleh endapan tufa, pasir, lempung dan lanau hasil pengendapan material gunung api yang relatif kompak.
 - Zona Rawan Tinggi, biasanya didasari oleh endapan aluvium, rawa basah dan daerah aliran sungai dengan potensi terjadi pelulukan (*liquefaction*) apabila terjadi gempa.

- Zona Kerawanan Gerakan Tanah. Tingkat kerentanan gerakan tanah dapat dibagi atas empat tingkat yaitu: (1) Sangat rendah, gerakan tanah jarang terjadi. (2) Rendah, gerakan tanah bisa terjadi bila ada gangguan. (3) Menengah, gerakan tanah berpotensi terjadi bila curah hujan tinggi dan ada gangguan pada lereng. (4) Tinggi, sering terjadi gerakan tanah bila musim hujan dan gerakan tanah lama aktif kembali.

Gambar 2.6
Peta Rawan Gempa Bumi Tanah Kota Bukittinggi



Kota Bukittinggi terdiri perbukitan dengan kemiringan yang beragam. Pembagian zona kerentanan gerakan tanah ini didasarkan dari kemiringan lereng sehingga dapat dibagi menjadi 4 zona yaitu :

- Zona Kerentanan Amat Rendah, merupakan zona dataran rendah dengan kemiringan lereng < 3%, sepanjang lembah Sungai Batang Agam.
- Zona Kerentanan Rendah, merupakan daerah dengan dataran dengan litologi endapan Tufa Maninjau dengan kemiringan antara 3-15%,
- Zona Kerentanan Menengah, merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 15-30% dengan litologi endapan gunung api yang relatif kompak namun dekat dengan sumber gempa atau terkena struktur geologi.

4. Zona Kerentanan Tinggi, mempunyai kemiringan lebih besar dari 30% didasari oleh litologi Tufa sepanjang Ngarai Sianok dengan lereng terjal, dekat dengan sumber gempa bumi dan terkena struktur geologi.

3. Kawasan Rawan bencana Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB). Berdasarkan hasil kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bukittinggi Tahun 2018, bencana cuaca ekstrim ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Kurangnya peremajaan pohon pelindung
- b. Konstruksi papan iklan tidak memenuhi persyaratan teknis
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya cuaca ekstrim

Penentuan luasan terpapar bahaya cuaca ekstrim menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya cuaca ekstrim meliputi:

- 1. Keterbukaan Lahan, menggunakan data Peta Penutupan/Penggunaan Lahan dengan sumber data dari RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030;
- 2. Kemiringan Lereng, menggunakan data DEMSRTM 30 tahun 2015 dengan sumber data dari USGS; RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

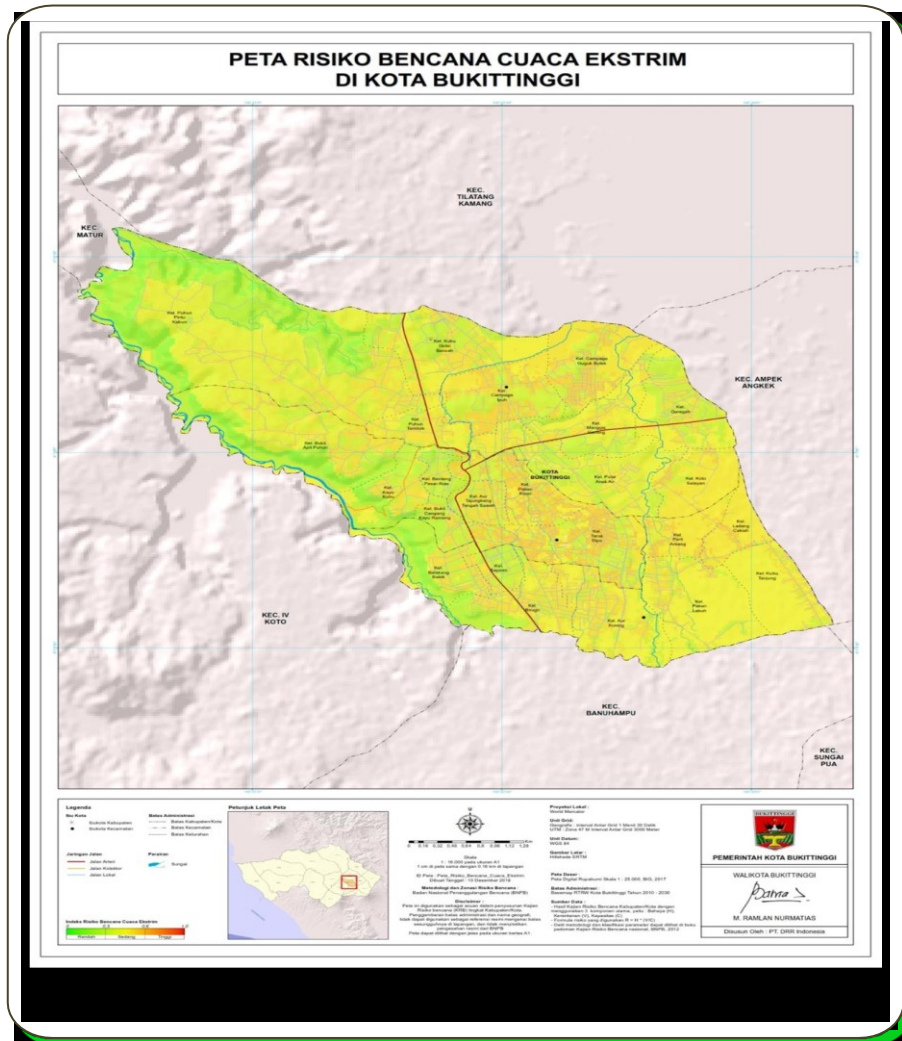
Berdasarkan parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan wilayah terpapar bahaya cuaca ekstrim. Adapun luasan bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12
Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrim
PerKecamatan di Kota Bukittinggi

KECAMATAN	Bahaya	
	Luas(Ha)	Kelas
1. Aur Birugo Tigo Baleh	625,20	Sedang
2. Guguk Panjang	683,10	Sedang
3. Mandiangin Koto Selayan	1.215,60	Sedang
Kota Bukittinggi	2.523,90	Sedang

Sumber : Dokumen KRB Kota Bukittinggi Tahun 2018

Gambar 2. 7
Peta Rawan Cuaca Ektrim Kota Bukittinggi



I. Bencana yang timbul akibat kesalahan manusia

Bencana tidak hanya berasal dari fenomena alam namun juga dapat timbul karena ulah manusia. Kelalaian manusia terhadap aturan-aturan beraktivitas / salah prosedur seperti perilaku dalam berlalu lintas juga dapat menimbulkan bencana serta himbuan-himbuan pemerintah yang harus dipenuhi saat terjadi kondisi-kondisi ekstrim di masa-masa tertentu. Berikut adalah beberapa bencana yang timbul akibat kesalahan manusia:

1. Kecelakaan lalu lintas (karena daerahnya yang padat)
2. Bencana kebakaran
3. Bencana Bangunan Gagal Konstruksi

J. Demografi

Data jumlah penduduk berperan penting dalam perencanaan pembangunan, Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Jumlah suatu penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk selalu cenderung positif, sehingga jika tidak diimbangi oleh sumber daya alam yang ada, persebaran penduduk yang merata dan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali akan menimbulkan masalah baru.

Tabel 2. 13
Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut Kelompok Umur dan jenis kelamin Tahun 2015 s/d 2019

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0 – 4	6.395	6.240	12.635	
5 – 9	6.050	5.970	12.020	
10 – 14	5.348	5.282	10.630	
15 – 19	6.119	7.508	13.627	
20 – 24	6.065	8.049	14.114	
25 – 29	5.285	5.283	10.568	
30 – 34	4.980	4.817	9.797	
35 – 39	4.514	4.479	8.993	
40 – 44	4.173	4.313	8.486	
45 – 49	3.942	3.740	7.682	
50 – 54	3.147	3.023	6.170	
55 – 59	2.593	2.722	5.315	
60 – 64	2.054	2.139	4.193	
65 – 69	1.364	1.470	2.834	
70 – 74	742	936	1.678	
75+	748	1.283	2.031	
Jumlah	2019	63.519	67.254	130.773
	2018	62.484	66.299	128.783
	2017	61.588	65.216	126.804
	2016	60.503	64.212	124.715
	2015	59.419	63.202	122.621

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100 yaitu 94,44. Artinya pada tahun 2019, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 orang penduduk laki-laki.

Tabel 2. 14
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019

No.	Tahun	Penduduk	Kepadatan	Laju Pertumbuhan
1.	2019	130.773	4.858	1.77
2.	2018	128.783	4.941	1.71
3.	2017	126.804	5.024	1.68
4.	2016	124.715	5.103	1.56
5.	2015	122.621	5.181	1.55

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Dengan luas wilayah yang relatif tetap maka penambahan penduduk secara dinamis akan berdampak terhadap tingkat kepadatan wilayah tempat tinggal penduduk. Jika tahun 2018 tingkat kepadatan sekitar 5.103 orang/KM2 maka pada tahun 2019 meningkat menjadi 5.181 orang/KM2. Kepadatan penduduk terpusat di Kecamatan Guguk Panjang yang antara lain disebabkan karena banyaknya pusat kegiatan ekonomi dan pusat pariwisata. Kepadatan berikutnya disusul oleh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Kepadatan penduduk yang paling jarang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Jika dilihat penyebaran penduduk per kecamatan di Kota Bukittinggi, maka penyebaran berbanding lurus dengan luas wilayah, dimana wilayah yang luas, maka penduduknya juga banyak.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu negara dan daerah. Adapun indikator kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi diantaranya dapat dilihat dari data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PDRB perkapita dan indeks Gini/Koefisien Gini.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah. Dengan demikian PDRB dapat menggambarkan kegiatan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi

belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan sifat kegiatan perekonomiannya.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi / deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar Harga Berlaku dan atas dasar Harga Konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam RKPD ini di gunakan harga Tahun 2010.

1. PDRB atas dasar Harga Berlaku

Tabel 2. 15
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d. 2019
Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)

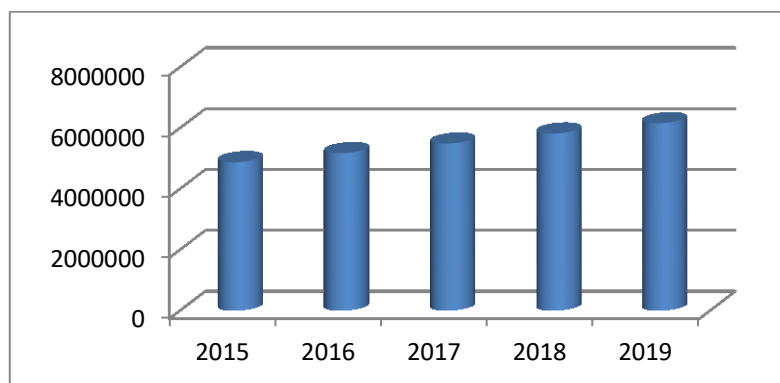
NO	Lapangan Usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%		
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	87.468,91	1,42	92.970,90	1,37	96.650,87	1,30	99.709,8	1.24	96.650,87	1,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	194,86	0,00	187,97	0,00	190,5	0,00	193,78	0.00	190,5	0,00
3.	Industri Pengolahan	417.403,13	7,76	437.706,04	6,45	453.203,15	6,08	454.629,3	5.63	437.298,72	5,02
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	41.339,95	0,45	47.377,68	0,70	53619,5	0,72	57.729,94	0.72	63.023,35	0,72
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.144,44	0,15	10.163,85	0,15	11.035,67	0,15	11.678,96	0.14	12.627,45	0,14
6.	Konstruksi	393.719,07	6,59	422.171,48	6,22	486.029,6	6,52	532.259,13	6.60	578.986,53	6,65
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.091.429,56	32,23	2.304.338,39	33,98	2.524.056,86	33,87	2.743.606,81	34.00	2.960.714,48	34,03
8.	Transportasi dan Pergudangan	665.354,45	10,78	719.657,59	10,61	799.518,9	10,73	874.304,6	10.84	944.601,17	10,85
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	334.075,06	4,74	387.302,14	5,71	433.568,27	5,82	482.167,15	5.98	526.064,01	6,04
10.	Informasi dan Komunikasi	365.362,91	6,61	400.451,04	5,90	460.744,43	6,18	507.686,44	6.29	568.179,68	6,53
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	375.575,11	6,15	420.792,93	6,20	432.853,32	5,81	449.211,32	5.57	465.959,43	5,35
12.	Real Estat	217.265,82	3,52	241.591,62	3,56	258.774,84	3,47	276.048,60	3.42	289.203,11	3,32
13.	Jasa Perusahaan	41.544,01	0,69	44.805,36	0,66	48.298,26	0,65	51.999,59	0.64	56.386,13	0,65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	379.930,77	6,77	414.835,05	6,12	451.816,62	6,06	491.279,74	6.09	539.323,55	6,19
15.	Jasa Pendidikan	324.925,94	5,13	363.667,98	5,36	415.625,87	5,58	453.109,72	5.62	415.625,87	4,77
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	186.125,92	3,12	207.306,12	3,06	241.571,22	3,24	264.642,99	3.28	241.571,22	2,77
17.	Jasa lainnya	238.891,06	3,87	266.559,93	3,93	285.548,92	3,83	318.623,82	3.95	357.574,64	4,11
	PDRB	6.169.750,95	100,00	5.635.927,99	100,00	7.453.106,84	100,00	8.068.881,71	100,00	8.699.579,35	100,00

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 masih berkontribusi 1,42% namun pada tahun 2019 hanya berkontribusi sebesar 1,11%. Jika dilihat secara nominal sektor pertanian mengalami penurunan ada 2019, namun penurunan tersebut tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yang tidak terlalu berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi.

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor dan Transportasi dan Pergudangan. Dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2019 berkontribusi sebesar Rp. 2.960.714,48 dan Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 944.601,17, dimana kedua sektor ini membentuk PDRB Kota Bukittinggi sebesar 44,88%.

Grafik 2. 3
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2019
Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)



2. PDRB atas dasar Harga Konstan

Perkembangan PDRB atas dasar harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 secara nominal PDRB atas harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 4.874.254,56, pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp. 6.155.217,98 terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar Rp. 1.280.963,42. Berikut perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2015 s.d. 2019 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 16
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2019
Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta Rupiah)

No.	LAPANGAN USAHA	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	66.721,87	1,37	67.822,77	1,31	69.120,86	1,31	68.805,60	1,31	69.121,36	1,27
2.	Pertambangan dan Penggalian	125,80	-	125,03	-	124,41	-	123,92	-	123,41	-
3.	Industri Pengolahan	369.139,12	7,57	373.267,84	7,2	376.197,39	6,86	370.170,28	7,22	364.894,38	6,86
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	35.632,11	0,73	39.249,16	0,76	41.303,96	0,75	42.950,77	0,76	44.061,92	0,75

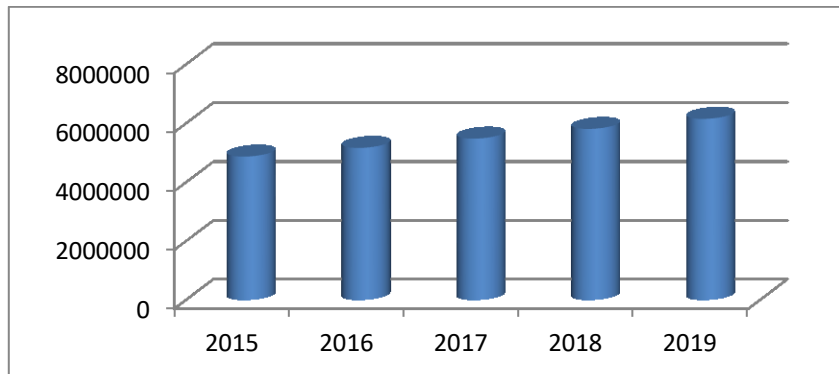
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.656,82	0,16	7.923,28	0,16	8.216,44	0,15	8.397,29	0,15	8.807,84	0,15
6.	Konstruksi	312.594,78	6,41	331.162,91	6,45	359860,60	6,56	385.074,811	6,41	410.228,56	6,56
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.601.978,47	32,87	1.699.443,88	32,87	1.803.831,77	32,87	1.926.642,24	32,88	2.060.549,96	32,88
8.	Transportasi dan Pergudangan	543.771,28	11,16	584.086,70	11,30	638.262,16	11,30	694.604,40	11,30	734.536,63	11,64
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	219.500,54	4,50	235.736,77	4,56	253.442,64	4,56	273.127,74	4,58	290.011,16	4,62
10.	Informasi dan Komunikasi	375.058,61	7,69	402.406,54	7,78	438.485,51	7,78	473.471,43	7,78	512.626,73	8,01
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	288.870,24	5,93	313.318,30	6,06	313.463,23	6,06	315.767,82	6,06	323.790,80	5,72
12.	Real Estat	167.519,99	3,44	175.761,98	3,40	183.495,50	3,35	190.792,22	3,40	198.085,59	3,35
13.	Jasa Perusahaan	33.461,26	0,69	34.876,67	0,67	36.802,35	0,67	38.464,42	0,67	40.679,97	0,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281.454,22	5,77	292.374,64	5,65	304.946,75	5,56	322.699,14	5,66	336.674,95	5,56
15.	Jasa Pendidikan	239.477,97	4,91	257.079,60	4,97	279.445,53	4,97	298.040,25	4,97	322.892,07	5,10
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151.302,29	3,10	163.489,34	3,16	177.876,40	3,16	190.543,69	3,16	204.409,74	3,24
17.	Jasa lainnya	179.989,16	3,69	190.850,45	3,70	198.622,93	3,62	213.959,05	3,69	233.722,92	3,62
PDRB		4.874.254,56	100	5.168.975,87	100	5.483.398,44	100	5.813.635,05	100	6.155.217,98	100

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 2.060.549,96 atau dengan persentase sebesar 32,88%, dan diikuti oleh kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 734.536,63 atau dengan persentase 11,64%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2015. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Sejalan dengan PDRB atas dasar Harga Konstan, PDRB atas dasar Harga Berlaku juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Grafik 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019



Berikut perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2015 s.d. 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi , yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2. 17
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2015 s.d. 2019
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi

NO	Kategori	2015		2016		2017		2018		2019	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,42	1,37	1,37	1,31	1,30	1,31	1,24	1,31	1,11	1,27
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
3.	Industri Pengolahan	7,76	7,57	6,45	7,2	6,08	6,86	5,63	7,22	5,02	6,86
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,45	0,73	0,70	0,76	0,72	0,75	0,72	0,76	0,72	0,75
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,15
6.	Konstruksi	6,59	6,41	6,22	6,45	6,52	6,56	6,66	6,41	6,65	6,56
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,23	32,87	33,98	32,87	33,87	32,87	34,00	32,88	34,03	32,88
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,78	11,16	10,61	11,30	10,73	11,30	10,84	11,30	10,85	11,64
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	4,50	5,71	4,56	5,82	4,56	5,98	4,58	6,04	4,62

NO	Kategori	2015		2016		2017		2018		2019	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
10.	Informasi dan Komunikasi	6,61	7,69	5,90	7,78	6,18	7,78	6,29	7,78	6,53	8,01
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,15	5,93	6,20	6,06	5,81	6,06	5,57	6,06	5,35	5,72
12.	Real Estate	3,52	3,44	3,56	3,40	3,47	3,35	3,42	3,40	3,32	3,35
13.	Jasa Perusahaan	0,69	0,69	0,66	0,67	0,65	0,67	0,64	0,67	0,65	0,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,77	5,77	6,12	5,65	6,06	5,56	6,09	5,66	6,19	5,56
15.	Jasa Pendidikan	5,13	4,91	5,36	4,97	5,58	4,97	5,62	4,97	4,77	5,10
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,12	3,10	3,06	3,16	3,24	3,16	3,28	3,16	2,77	3,24
17.	Jasa lainnya	3,83	3,69	3,93	3,70	3,83	3,62	3,95	3,69	4,11	3,62
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2019

Jika dilihat dari pertumbuhan lapangan usaha pada tahun 2019 atas dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Konstan, maka perkembangan kontribusi masing-masing sektor DPRD mengalami pertumbuhan dan juga mengalami penurunan kecuali pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang cenderung tetap. Sementara untuk sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung turun dan sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi diperoleh dari perhitungan PDB atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 18
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015 s.d. 2019

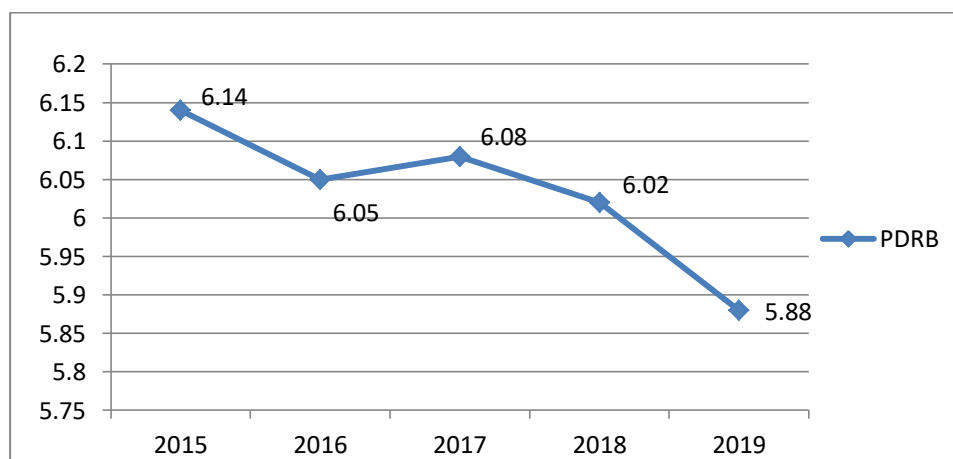
NO	Kategori	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,58	1,65	1,91	-0,46	0,46
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,53	-0,61	-5,50	-0,39	-0,41
3.	Industri Pengolahan	3,09	1,12	0,78	-1,60	-1,43

NO	Kategori	2015	2016	2017	2018	2019
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,37	10,15	5,24	3,99	2,59
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,63		3,70	2,20	4,89
6.	Konstruksi	5,89	3,48	8,67	7,01	6,53
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,66	5,94	6,14	6,81	6,95
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,16	7,41	9,28	8,83	5,75
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,87	7,40	7,51	7,77	6,18
10.	Informasi dan Komunikasi	7,74	7,29	8,97	7,98	8,27
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,09	8,46	0,05	0,74	2,54
12.	Real Estate	5,27	4,92	4,40	3,98	3,82
13.	Jasa Perusahaan	4,32	4,23	5,23	4,80	5,76
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91	3,88	4,30	5,82	4,33
15.	Jasa Pendidikan	7,42	7,35	8,70	6,65	8,34
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	8,05	8,80	7,12	7,28
17.	Jasa lainnya	6,62	6,03	4,07	7,72	9,24
PDRB		6,14	6,05	6,08	6,02	5,88

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2019

Melihat Laju pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2019 atas dasar Harga Konstan diatas, maka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi sebesar 5,88 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2018 adalah sebesar 6,02. Angka 5,88 masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang pada Tahun 2019 berada pada angka 5,05. Perlambatan ekonomi secara global disebabkan oleh trend penurunan pertumbuhan investasi swasta dan rendahnya permintaan global serta proteksi perdagangan internasional yang berdampak pada kinerja ekspor. Dampak ekonomi secara global ini tentu saja berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi. Penyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar di Kota Bukittinggi yaitu pada Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami perlambatan yang cukup signifikan.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2015-2019



b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tahun 2015 s.d. 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2. 19
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2015 s.d. 2019
Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta Rp)	6.169.750,95	6.783.186,07	7.453.106,84	8.012.777,07	8.699.579,35
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	4.874.254,56	5.168.975,87	5.483.398,44	5.813.635,05	6.155.217,98
Jumlah Penduduk (jiwa)	122.621	124.715	126.804	128.786	130,773
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	50,32	54,38	58,78	62,22	66,52
PDRB per Kapita ADHK	39,75	41,45	43,24	45,14	47,06

Sumber: BDA 2020 dan PDRB Kota Bukittinggi 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pada Tahun 2019, PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku sebesar 66,52, naik dibandingkan Tahun 2018

sebesar 62,22. Tingginya PDRB per kapita Kota Bukittinggi ini karena didukung oleh sector pariwisata, perdagangan dan jasa, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PDRB per kapita Kota Bukittinggi adalah dengan memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil mikro menengah (UMKM)

c. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019.

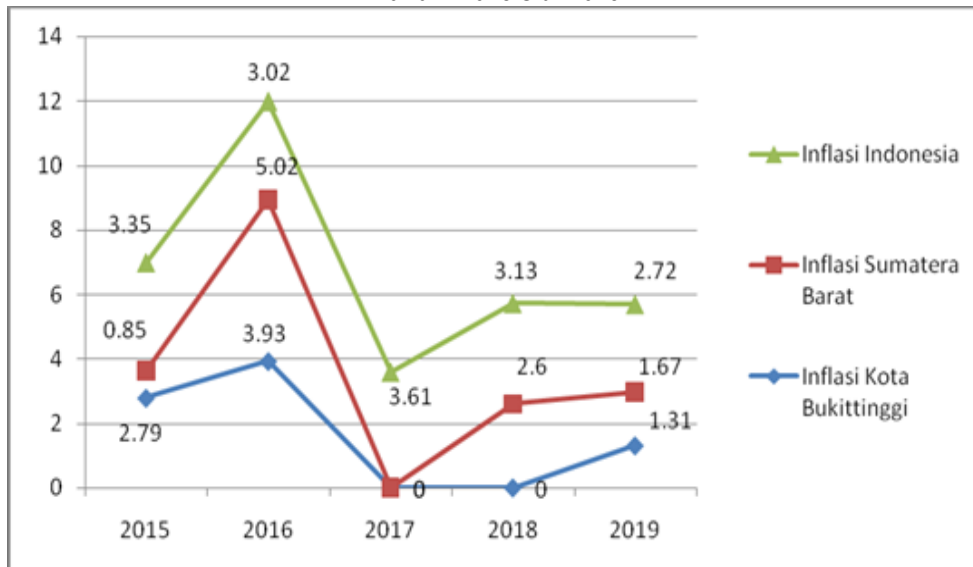
Tabel 2. 20
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015 s.d. 2019

Inflasi	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi Kota Bukittinggi	2,79	3,93	1,37	2,99	1,31
Inflasi Sumatera Barat	0,85	5,02	2,11	2,60	1,67
Inflasi Indonesia	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Dalam bentuk grafik terdapat perbedaan yang signifikan nilai Inflasi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

Grafik 2.6
Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015 s.d. 2019



Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2019 tercatat dibawah Laju Inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 1,67 persen. Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2019 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,5 \pm 1$ persen (yoy). Realisasi inflasi tahunan tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah ke-5 di Kawasan Sumatera, dan terendah ke-7 secara nasional. Secara spasial, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan kota Bukittinggi sampai akhir 2019 terkendali, dengan besaran masing-masing 1,16 persen dan 1,42 persen. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 5 (lima) kelompok pengeluaran. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,19 persen. Diikuti kenaikan indeks pada kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen

d. Indeks Gini/Koefisien Gini

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan. “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi, yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara, harus mampu mentransformasi sistem perkonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian berbasis sektor primer, industri manufaktur (sektor sekunder), dan jasa (sektor tersier) yang modern.

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019 berada pada ketimpangan sedang. Dimana pada kurun waktu tersebut, hanya pada tahun 2015 ketimpangan Kota Bukittinggi yang mencapai 0,37 sedangkan tahun 2019 indeks gini Kota Bukittinggi 0,34 naik 0,01 dari tahun 2018. Perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2015 s.d 2019 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 21
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Gini Kota Bukittinggi	0,37	0,34	0,31	0,33	0,34
Indeks Gini Prov. Sumatera Barat*	0,319	0,312	0,312	0,305	0,306**
Indeks Gini Indonesia*	0,402	0,394	0,391	0,384	0,382**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2019

*) Semester II

***) Semester I

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019 berada pada ketimpangan sedang. Dimana pada kurun waktu tersebut, hanya pada tahun 2015 ketimpangan Kota Bukittinggi yang mencapai 0,37 sedangkan tahun 2019 indeks gini Kota Bukittinggi 0,34 naik 0,01 dari tahun 2018. Jika dibanding dengan Indeks Gini Provinsi dan Indonesia tahun 2019, maka Indeks Gini Kota Bukittinggi lebih tinggi 0,034 dari Provinsi dan lebih rendah 0,042 dari pusat namun indeks ini masih berada pada ketimbangan sedang.

e. Indeks Pembangunan Manusia

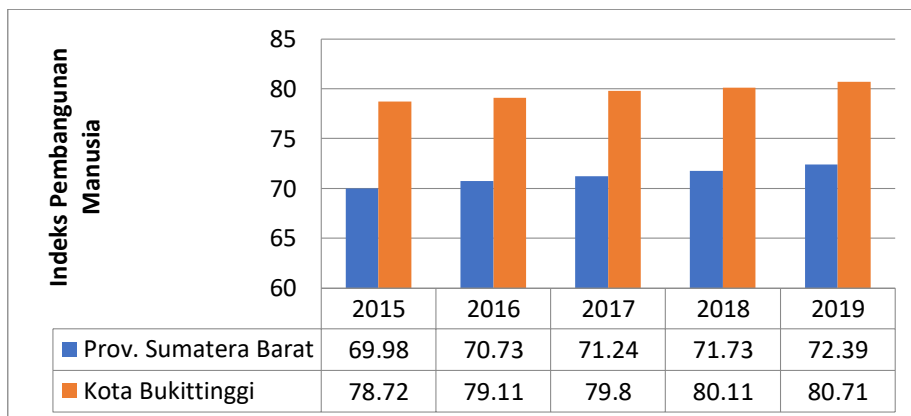
Indeks pembangunan manusia dipakai untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sejak tahun 2014 penghitungan IPM didasarkan kepada

1. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH):
Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25th+)
Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir.
3. Harapan Lama Sekolah (HLS)
Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
4. Komoditas pengeluaran per kapita disesuaikan

Selama kurun waktu 2015-2019, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori tinggi (IPM diatas 80 dikategorikan tinggi) yaitu sebesar 80,71 pada tahun 2019. Semua komponen IPM Kota Bukittinggi berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. IPM Kota Bukittinggi merupakan IPM kedua tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu sesudah Kota Padang. Perbandingan IPM Kota Bukittinggi dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 s.d. 2019



Sumber : Biro Pusat Statistik 2020

A. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

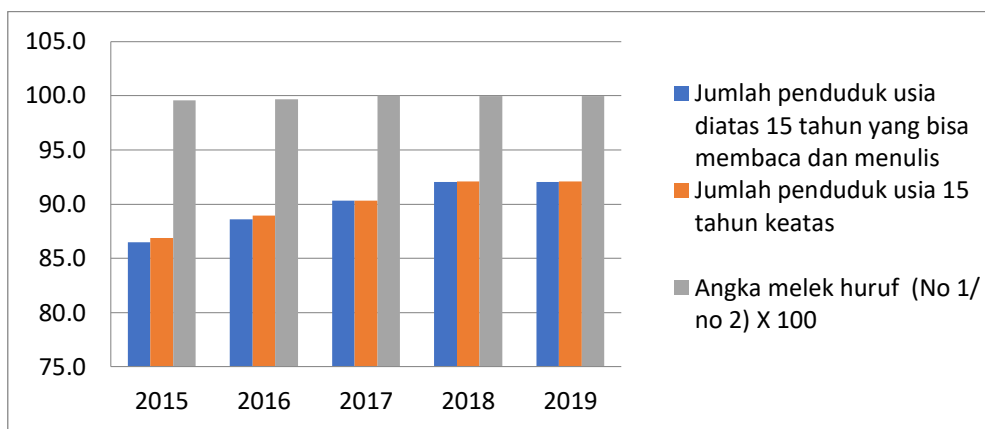
Strategi dalam pendidikan adalah suatu rencana tentang cara- cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui 4 (empat) sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti pembangunan gedung sekolah dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Grafik 2.8
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2015 s.d. 2019
Kota Bukittinggi



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Penyelenggaraan program pendidikan di Bukittinggi didukung oleh 45 Sekolah Dasar Negeri dan 11 sekolah Dasar Swasta, 8 SMP dan 5 SMA, serta sekolah madrasah baik ditingkat SD, SMP atau SMA.

Pada tahun 2016 terjadi pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun yang beralih hanyalah kewenangan penyelenggaraan SMA saja sedangkan Kota Bukittinggi

tetap menjadi Kota Pendidikan dengan semua fasilitas sekolah yang ada pada wilayah administratifnya.

Tentunya diharapkan setiap penduduk Kota Bukittinggi dalam usia sekolah, agar tepat waktu mengikuti pendidikan dibangku sekolah sesuai dengan umur yang ditetapkan. Salah satu alat ukur atau indikator tingkat kecerdasan siswa didik adalah sejauh mana kemampuan mereka untuk dapat membaca dan menulis, atau yang lebih dikenal dengan angka melek huruf. Angka melek huruf ini juga merupakan proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca. Semakin tinggi Angka Melek Huruf, membuktikan semakin tinggi mutu pendidikan di daerah tersebut.

Berdasarkan data tahun 2015 s/d 2019, angka melek huruf di Kota Bukittinggi hampir mencapai 100%. Ini artinya hampir 100 persen penduduk Bukittinggi di usia sekolah telah mampu tulis dan baca artinya sangat sedikit sekali yang buta huruf. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat paham dan mengerti atas informasi atau pesan yang disampaikan serta dapat mengembangkan pengetahuan.

3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2. 22
Angka Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi

Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
73.52	73.60	73,69	73,91	74,22

Sumber : BDA, 2020

Sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan, Angka Harapan Hidup tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Dengan mengetahui indikator Angka Harapan Hidup ini, kita bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan faktor-faktor yang bisa meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Dari tabel di atas dapat dilihat jika angka usia harapan hidup Kota Bukittinggi telah berada

di posisi yang cukup baik, bahkan berada diatas rata-rata provinsi (rata-rata Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah 69,31). Peningkatan angka harapan hidup ini hendaknya juga diiringi dengan peningkatan kualitas harapan hidup.

4. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi merupakan jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2019 yaitu 8 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi di Kota Bukittinggi pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan jumlah yang signifikan sedangkan di tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Tabel 2. 23
Angka Kematian Bayi Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Tahun	Jumlah kematian bayi (>1 tahun)	Jumlah kelahiran hidup	Angka kematian bayi
1	2015	26	2.407	8
2	2016	12	2.465	5
3	2017	7	2.427	3
4	2018	3	2.460	3
5	2019	8	2.156	8
6	2015	26	2.407	8

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

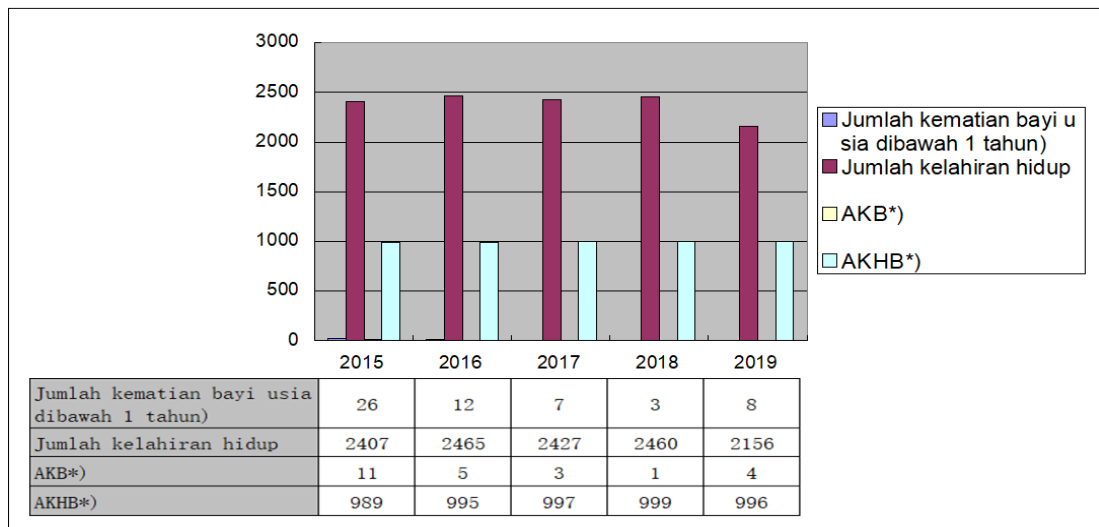
Berbagai berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB diantaranya dukungan peningkatan akses pelayanan kesehatan antara lain peningkatan cakupan imunisasi dan pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan

pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap infeksi penyakit.

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan tempat tinggal, ketersediaan layanan kesehatan. Indikator yang terkait langsung dengan angka kelangsungan hidup bayi adalah angka kematian bayi (*infant mortality rate*) yaitu suatu angka yang menunjukkan jumlah bayi yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum

Grafik 2. 9
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Bayi Tahun 2015 s.d 2019



Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Dari grafik diatas terlihat bahwa dari tahun 2015-2019 kelangsungan hidup bayi selalu bervariasi dari tahun ketahun. Angka kelangsungan hidup bayi ini mengalami sedikit fluktuasi namun tetap dalam rentang dan kategori baik, hal ini dipengaruhi oleh multi faktor antara lain penyakit infeksi, berat badan lahir rendah, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan lain-lain.

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau

cedera. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan sewaktu melahirkan dan masa nifas. Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah Pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga.

Jika dilihat AKI dari tahun 2015 hingga 2019, secara umum terjadi penurunan. Penurunan ini berkat usaha pemerintah bersama masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, peningkatan gizi ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi.

Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan ibu hamil yang meninggal jika dibandingkan dengan tahun 2017, namun peningkatan ini masih dalam kadar yang tidak mengkhawatirkan. Walaupun demikian diharapkan Angka Kematian Ibu di Kota Bukittinggi tidak ada lagi, sehingga pembangunan kesehatan di Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 24
Angka Kematian Ibu Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Jumlah ibu hamil yang meninggal	Junlah kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu
1	2015	7	2.407	0.00291
2	2016	3	2.465	0.00122
3	2017	1	2.427	0.00041
4	2018	2	2.460	0.00081
5	2019	2	2.156	0.00093

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

B. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kebudayaan

Pembangunan bidang seni, budaya dan olah raga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu 1) mewujudkan masyarakat indonesia yang berakhlak mulia, bermoral etika,berbudaya dan beradap serta 2) mewujudkan bangsa yang berdaya saiang untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Seni budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bukittinggi selama ini telah dikenal sebagai salah satu kota seni dan budaya. Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di tengah-tengah masyarakat, pemerintah dan stake holder lainnya di Kota Bukittinggi.

Sebagai Kota Pariwisata, Kota bukittinggi tidak hanya senantiasa melestarikan dan mengembangkan kebudayaan agar tetap lestari dan terjaga namun lebih dari itu budaya lokal yang ada di Kota Bukittinggi di jual dan dijadikan atraksi pada event-event pariwisata. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

Disamping penyelenggaraan dan melestarikan kegiatan-kegiatan budaya, pelestarian benda, situs dan kawasan budaya juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bukittinggi.

Berikut jumlah kelompok seni tradisional yang ada di Kota Bukittinggi yang terus selalu dibina dan dikembangkan :

Tabel 2. 25
Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni
1	Mandiingin Koto Selayan	26
2	Guguk Panjang	15
3	Aur Birugo Tigo Baleh	15
	Jumlah	56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2020

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Layanan Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

1. Pendidikan

b. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni atau APM juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program pendidikan di suatu daerah. APM ini diukur berdasarkan pengelompokan umur penduduk

menurut jenjang pendidikan dan berdasarkan jumlah siswa di kelompok jenjang pendidikan tersebut. Kelompok APM tersebut adalah Tingkat SD untuk kelompok di usia 7-12 tahun dan tingkat SMP untuk kelompok usia 13-15 tahun. Semakin tinggi persentase APM di suatu wilayah, maka semakin tinggi mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Tabel 2. 26
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD / MI					
	APM SD / MI	93,77	98,85	99,46	98,77	98,95
2	SMP /MTs					
	APM SMP / MTs	87,46	79,36	79,21	80,79	81

Sumber: BDA, 2016-2020

Secara umum APM tingkat SD/MI berfluktuasi dari tahun 2015 s/d 2019 dan rata-rata sudah lebih dari 90% partisipasi anak yang layak usia sekolah di SD umur 7-12 tahun sedang bersekolah rata-rata diatas 90%. Ini berarti hamper seluruh penduduk diusia sekolah tingkat SD telah terdaftar dan tepat usia sebagai pelajar yang tersebar di 45 Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi. Kesadaran dan ketepatan waktu sesuai usia wajib belajar diusia 7-12 tahun di tingkat dasar telah sepenuhnya dimengerti oleh para orang tua, sehingga mereka mendaftarkan anak anak mereka ke sekolah formal.

APM tingkat SMP/MTs umur 13-15 tahun sudah mencapai rata-rata sekitar 80%. Pada tahun 2019 APM SMP sebesar 81% artinya dari 100 orang siswa umur 13-15 tahun sedang bersekolah sebanyak 81 orang, sisanya tidak melanjutkan sekolah atau bersekolah ditempat lain. Meskipun APM tingkat SMP/MTs masih rendah dibanding APM pada tingkat SD namun secara rata-rata sudah baik dan mengindikasikan bahwa angka partisipasi penduduk pada usia pendidikan SMP/MTs untuk sekolah sudah bagus.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam Pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang Pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%, hal ini disebabkan karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang Pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang Pendidikan

yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia yang lebih tua disbanding usia standar di jenjang tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya siswa yang lebih muda disbanding usia standar yang duduk di suatu jenjang Pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang Pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah

Data perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 27
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
	APK SD/MI	102,60	106,11	107,34	110,47	105,78
2	SMP/MTs					
	APK SMP/MTs	111,96	84,52	87,71	91,15	88,29

Sumber: BDA, 2016-2020

Untuk jenjang pendidikan SMP / MTs adalah 136,63% dari data yang didapatkan terjadi penurunan dari tahun 2015 s/d tahun 2019. Walaupun demikian, APK tingkat SMP/MTs Kota Bukittinggi masih jauh diatas standar nasional yang ditetapkan yaitu 80 persen Hal ini masih mengembirakan karena cukup mengindikasikan betapa besarnya minat dan perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap kemajuan pendidikan.

d. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Bangunan merupakan salah satu syarat untuk dapat terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik. Kondisi bangunan yang baik akan menambah kenyamanan bagi peserta didik dalam menerima pembelajaran. Kondisi Bangunan Baik untuk Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dari Tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 28
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
I.	SD/MI					
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	34	37	43	24	24
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	61	61	61	62	64
3	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik (No 1/ no 2) X 100	55.74	60.66	70.49	38.71	38.71
II.	SMP/MTs					
1.	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	13	14	15	7	7
2.	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	19	19	19	21	21
3.	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik (No 1/ no 2) X 100	68.42	73.68	78.95	33.3	33.3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Kalau dilihat dari kondisi bangunan baik dari Tahun 2014 s.d 2019, pada tahun 2018 dan 2019 sedang dilakukan pembangunan pada sekolah-sekolah, sekolah dibangun baru dan dibuat 3 lantai supaya sarana dan prasarana terpenuhi dan siswa dapat belajar dengan nyaman.

e. Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas:
 - a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
 - b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
 - c. Kelompok mata pelajaran setetika, dan
 - d. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan Kesehatan
3. lulus ujian S/M/PK untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
4. lulus UN

Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Kota Bukittinggi sebagai berikut:

Tabel 2. 29
Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
I.	SD/MI					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	2,467	2,543	2,554	2,671	2,671
2.	Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	2,475	2,553	2,557	2,671	2,671
3.	AL SD/MI	99.67	99.61	99.88	100	100
II.	SMP/MTs					
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	1,729	2,137	2,847	3,000	3,000
2.	Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	1,731	2,140	2,848	3,000	3,000
3.	AL SMP/MTs	99.88	99.86	99.96	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2015 s/d 2019 Angka Kelulusan Siswa SD/MI dan SMP/MTs selalu menunjukkan angka hampir 100 % Angka Kelulusan. Ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah SD/MI di Kota Bukittinggi sudah menunjukkan angka yang signifikan kalau dilihat dari jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya.

e. Angka Melanjutkan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs

Dalam hal Angka Menlanjutkan Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2014 s.d 2018 Kota Bukittinggi digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 30
Angka Melanjutkan (AM) dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs
Tahun 2015 s.d. 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs	94,68	118,5	115,49	114,15	78,39

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2020

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa Angka Melanjutkan dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dari Tahun 2015 s.d 2019 terjadi sedikit fluktuasi turun naik. Pada tahun 2019

angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs adalah 78,39 angka yang cukup rendah karena data dari MI dan MTs tidak ada.

f. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Namun hal ini bukan berarti bahwa jika APS tinggi maka daya serap dan partisipasi sekolah juga tinggi. Namun kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Berikut tabel Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bukittinggi :

Tabel 2. 31
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	15,207	15,565	15,047	15,375	15,375
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12,472	12,478	12,908	13,111	13,111
1.3.	APS SD/MI	121.93	124.74	116.57	117.27	117.27
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	7,175	7,271	6,729	5,570	5,570
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6,505	6,610	6,702	6,795	6,795
2.3.	APS SMP / MTs	110.3	110	100.4	81.38	81.38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Dari data pada periode tahun 2015-2019 terlihat bahwa angka partisipasi sekolah terjadi penurunan. Kondisi ini perlu dicermati dan dicari langkah-langkah sehingga APS ini hendaknya meningkat dan diharapkan semua siswa pada usia pendidikan ini dapat semuanya diserap pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Bukittinggi.

g. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program Wajib Belajar 9 tahun. Dinamika ini dapat dilihat dari rasio dalam pelayanan penduduk usia sekolah sebagai berikut:

Tabel 2. 32
Ketersediaan Sekolah, Penduduk Usia Sekolah dan Rasio
Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD / MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	61	61	61	62	64
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12,472	12,478	12,908	13,111	13,164
1.3.	Rasio	48.91	48.89	47.26	47.29	48,61
2	SMP / MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	17	19	19	21	21
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6,505	6,610	6,702	6,795	6,799
2.3.	Rasio	26.13	28.74	28.35	30.90	30.88

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dinyatakan untuk standar sarana dan prasarana Sd/MI sebagai berikut:

1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru
3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI
4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

sarana dan prasarana untuk SMP/MTs sebagai berikut:

1. Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.

2. Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru
3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs, yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.
4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Pada tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, pemenuhan syarat wajib sarana dan prasarana terhadap sekolah telah terpenuhi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP diantaranya dengan pelaksanaan Rehab dan RKB serta pengadaan peralatan. Hal ini ditunjang oleh semakin besarnya anggaran daerah yang di alokasikan untuk membenahi sarana prasarana sekolah baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Disamping itu alokasi dana dari Pemerintah Pusat dibidang pendidikan turut menunjang meningkatnya pencapaian sasaran ini dari tahun ke tahun.

h. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru sesuai tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai pengajar merupakan faktor pendukung yang tak kalah pentingnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid untuk tingkat pendidikan dasar dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 33
Jumlah Guru, murid dan Rasio Guru Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD / SLB/MI					
1.1.	Jumlah Guru	884	815	900	883	883
1.2.	Jumlah Murid	16,414	16,237	17,285	17,222	17,222
1.3.	Rasio	53.9	50.19	52.07	51.27	51.27
2	SMP / SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	451	659	582	598	598
2.2.	Jumlah Murid	6,399	9,157	9,137	8,947	8,947
2.3.	Rasio	70.5	71.97	63.7	66.84	66.84

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara umum rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan selama kurun waktu 2015-2019. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi masih kekurangan guru pada jenjang pendidikan ini seperti halnya Guru Kelas. Tidak jauh berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MI, rasio yang juga terbilang rendah dapat dilihat pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

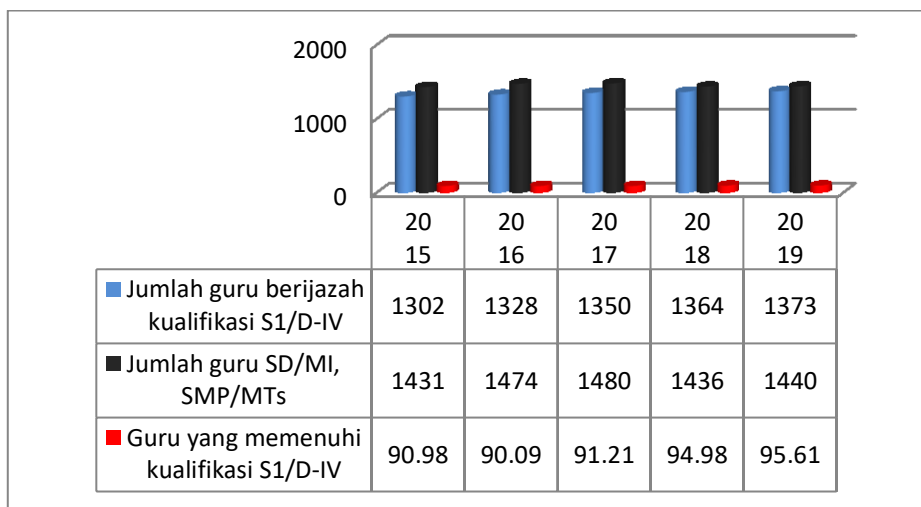
Dikaitkan dengan capaian indikator kinerja Persentase SD/SDLB/MI yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan, Kota Bukittinggi masih memperoleh capaian sebesar 78,06%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi belum mencapai 100% dalam pemenuhan tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan. Oleh sebab itu indikator kinerja terhadap persentase tenaga pendidik SD/SDLB/MI yang telah sesuai Standar Nasional Pendidikan masih menjadi agenda pokok dari pendidikan dasar. Masih banyak tenaga pengajar yang belum sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang tersebar di seluruh SD/SDLB /MI yang berada di Kota Bukittinggi.

Dari tabel diatas juga terlihat penurunan rasio guru terhadap jumlah murid yang disebabkan karena peningkatan jumlah siswa yang cukup besar namun tidak sebanding dengan pertambahan jumlah guru. Salah satu penyebab pertumbuhan jumlah guru tidak bisa mengimbangi pertambahan jumlah siswa pada jenjang pendidikan ini adalah adanya kebijakan moratorium penerimaan ASN yang tidak dikecualikan untuk guru di Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk memenuhi standar ketersediaan guru terhadap kelangsungan pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan kebijakan dengan tetap memberdayakan guru-guru honorer. Dengan kebijakan ini diharapkan kekurangan guru tidak menimbulkan kendala terhadap kemajuan pendidikan di Kota Bukittinggi.

i. **Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Dari segi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi dapat terlihat sebagai berikut:

Grafik 2.10
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2015 s.d 2019 terjadi angka yang fluktuatif, akan tetapi kalau dilihat dari segi jumlah guru yang berijazah kualifikasi S1/DIV mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan upaya dalam peningkatan kualitas dan kompetensi guru menunjukkan hasil yang cukup baik.

2. Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sehat diperlukan peningkatan derajat Kesehatan dan gizi masyarakat serta peningkatan kualitas dalam pelayanan kesehatan. Berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan sarana/prasarana kesehatan dan tenaga Kesehatan.

Salah satu potensi unggulan Kota Bukittinggi adalah bidang pelayanan kesehatan. Ini didukung oleh fasilitas yang cukup memadai, bahkan saat ini Kota Bukittinggi juga sedang membangun sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tentunya kehadiran RSUD ini akan melengkapi Bukittinggi sebagai kota pelayanan kesehatan.

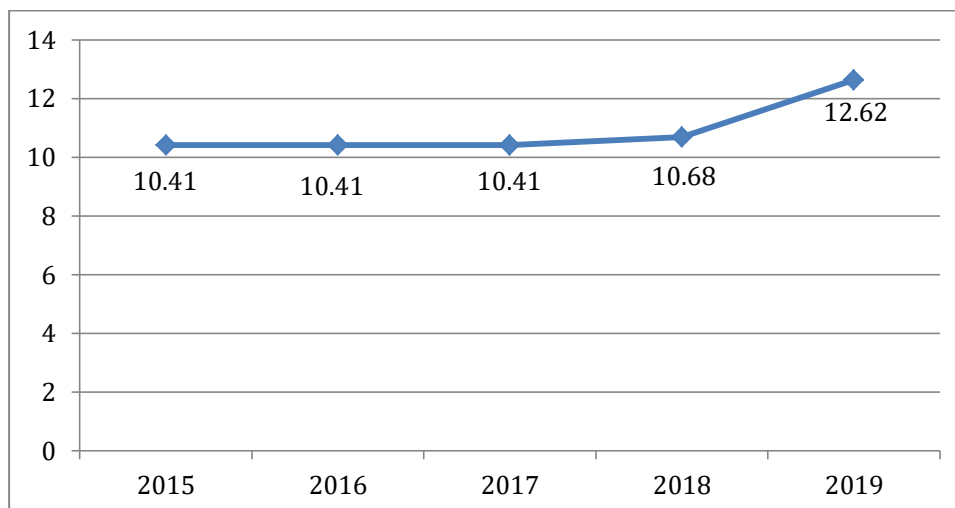
Pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan semata melainkan juga sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan karena dijadikan salah satu indikator terhadap kualitas hidup masyarakat.

Kinerja pembangunan Kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator diantaranya angka kematian bayi, angka kelangsungan hidup bayi, Angka Kematian Ibu, Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita, Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu), Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk., Rasio Dokter per Satuan Penduduk, dan Rasio tenaga medis per satuan penduduk

c. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Kerjasama tersebut berbentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Salah satu UKBM tersebut adalah posyandu. Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan Kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini, Salah satu pendukung pembangunan kesehatan di masyarakat dilihat dari ketersediaan posyandu, yaitu rasio posyandu dengan jumlah balita. Untuk Kota Bukittinggi dari tahun 2015 – 2019 terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.11
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi



Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Tabel 2. 34
Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita
1.	2015	132	12.638
2.	2016	132	12.649
3.	2017	132	12.649
4.	2018	135	12.646
5.	2019	136	10.774

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Rasio posyandu per satuan balita menggambarkan jumlah balita yang dapat dilayani oleh satu posyandu. Dalam kurun waktu 2015-2019 terlihat bahwa rasio semakin menurun yang artinya tingkat pertumbuhan balita lebih cepat dari tingkat pertumbuhan posyandu sehingga satu posyandu melayani lebih banyak anak, Pada tahun 2019 rasio posyandu per satuan balita adalah 12,62 artinya dalam 1000 balita dilayani oleh 12,62 posyandu, maka 1 Posyandu di Kota Bukittinggi melayani sebanyak 79-80 balita. Idealnya rasio posyandu terhadap balita adalah 13, dengan demikian rasio yang dimiliki belum memenuhi rasio yang ideal. Berikut jumlah posyandu dan balita menurut kecamatan.

Tabel 2. 35
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Tahun 2019 Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1.	Guguk Panjang	57	3353	16.9
2.	Mandiingin Koto Selayan	48	5091	9.43
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	31	2330	13.3
	Jumlah	136	10744	12.66

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

d. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 36
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Puskesmas	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Poliklinik	1	12	12	14	14
3.	Jumlah Pustu	14	14	14	14	14
4.	Jumlah Penduduk	122.621	124.715	126.805	128.783	130.773
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk *)	0,057	0,056	0,055	0,05	0,05
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk *)	0,008	0,096	0,094	0,11	0,11
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk *)	0,114	0,112	0,11	0,11	0,11

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Di Kota Bukittinggi, sarana kesehatan berupa puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam kondisi jumlah yang sama setiap tahunnya, beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi khususnya Dinas Kesehatan adalah meningkatkan pelayanan dengan melengkapi sarana dan prasarana serta SDM yang langsung melayani.

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 0.05 itu berarti dari 1

puskesmas yang ada melayani 5.352 penduduk, sedangkan untuk tahun 2015 rasio puskesmas adalah 0.058, memang mengalami sedikit penurunan, namun angka tersebut masih dalam standar yang baik dimana standar nasional 1 Puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk.

Untuk rasio poliklinik persatuan penduduk mengalami trend yang positif dari tahun 2015-2019, ini berarti layanan yang diberikan masih dalam standar yang baik. Dari tahun 2015-2019 jumlah Puskesmas Pembantu masih sama yaitu sebanyak 14. Dengan rasio 0.11 pada tahun 2019 dimana 1 puskesmas melayani 1.070 penduduk. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu menurut kecamatan tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2. 37
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Tahun 2019 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jml	Rasio*	Jml	Rasio*	Jml	Rasio*
1	Guguk Panjang	50.655	2	0.04	6	0.12	3	0.06
2	Mandiingin Koto Selayan	49.226	4	0.08	3	0.06	8	0.16
3	Aur Birugo Tigo Baleh	30.892	1	0.03	5	0.16	3	0.09
	Jumlah	130.773	7	0.05	14	0.11	14	0.11

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Pada tabel di atas tergambar penyebaran sarana kesehatan untuk tingkat kecamatan tidak merata. Namun walaupun demikian pelayanan kesehatan di setiap kecamatan masih berjalan dengan maksimal. Kecamatan mandiangin Kota Selayan adalah daerah yang mempunyai banyak pelayanan kesehatan yaitu sebanyak 15, hal ini sejalan dengan jumlah penduduknya yang paling banyak diantara kecamatan yang lain.

e. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk.

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan Kesehatan yang memiliki tenaga medis professional serta sarana kedokteran yang permanen dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, Data jumlah dan rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	0	0	0	0	0
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	2	2	2	2
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	5	5	5	5
7.	Jumlah Penduduk	122.621	124715	126805	128.783	130.773
8.	Rasio*)	0,049	0.040	0.039	0.039	0.038

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat jumlah Rumah Sakit mengalami penurunan, yaitu Rumah Sakit Sitawa Sidingin yang izinnya sudah dicabut karena ada permasalahan dalam pelaksanaan, dan sekarang statusnya menjadi klinik. Jumlah Rumah Sakit di Kota Bukittinggi saat ini adalah sebanyak 5 Rumah sakit yang terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat, RSUP yang sekarang menjadi RSSN (Rumah Sakit Strike Nasional)
2. Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat yaitu Rumah Sakit Achmad Muchtar.
3. Rumah Sakit Swasta Ibnu Sina
4. Rumah Sakit Swasta Madina
5. Rumah sakit TNI AD Tk.IV

Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan Kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2019 adalah 0,038 artinya satu rumah sakit melayani 380.000 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk sehingga Kota Bukittinggi memang membutuhkan kehadiran rumah sakit baru untuk melayani pasien. Adapun jumlah rumah sakit yang ada menurut kecamatan adalah :

Tabel 2. 39
Jumlah Rumah Sakit
Menurut Kecamatan Tahun 2019 Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru & penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio *	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio *	Jlh	Rasio	Jlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Guguk Panjang	50.655	1	0.019	0	0	0	0	0	0	2	0.039	3	0.059
2	Mandiingin Koto Selayan	49.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	30.892	0	0	1	0.032	0	0	0	0	0	0	2	0.065
		130.773	1	0.008	1	0.008	0	0	0	0	2	0,015	5	0.038

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Dari tabel diatas tergambar penyebaran jumlah rumah sakit tidak sama untuk masing-masing kecamatan. Di Kecamatan Guguk Panjang terdapat 3 (tiga) rumah sakit, kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 2 (dua) unit, sedangkan di Kecamatan Mandiingin Koto Selayan belum terdapat rumah sakit. Saat ini sedang dibangun RSUD di Kecamatan MKS yang diharapkan pada akhir tahun 2020 sudah bisa melayani pasien.

f. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.

Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarjana" yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan menurut PP No.32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisit) maupun dentist (dokter gigi).

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah

memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan (Anireon, 1984). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokter memiliki pengertian yang sama dengan tenaga medis.

Tabel 2. 40
Jumlah Dokter/Tenaga Medis di Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019

NO	Dokter/ Tenaga Medis	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dokter Spesialis	135	146	132	153	192
2.	Dokter Umum	91	98	121	96	133
3.	Dokter Gigi	18	18	27	28	30
	Jumlah	245	263	280	277	355

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

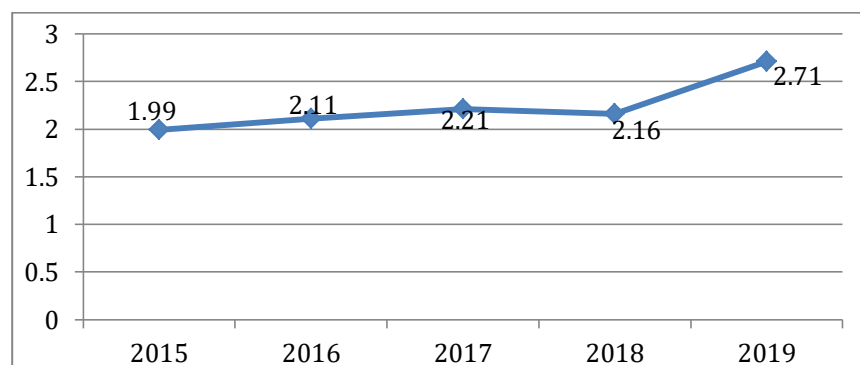
Untuk mengetahui berapa rasio dokter per satuan jumlah penduduk terlebih dahulu akan ditampilkan berapa jumlah dokter dan jumlah penduduk dari tahun 2015-2019 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2. 41
Jumlah Dokter dan Jumlah Penduduk
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah Dokter	Jumlah Penduduk
1.	2015	245	122.621
2.	2016	263	124.715
3.	2017	280	126.805
4.	2018	277	128.783
5.	2019	355	130.773

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Grafik 2. 12
Rasio Dokter per satuan penduduk Tahun 2015 s/d 2019 Kota Bukittinggi



Secara umum dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 s/d 2019 terdapat kecenderungan kenaikan rasio tenaga medis per satuan penduduk yang dikarenakan penambahan jumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada penduduk.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan jumlah Dokter di Kota Bukittinggi pada tahun 2019 adalah sebanyak 355 orang yang tersebar pada Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Institusi Dinas Kesehatan lainnya. Rasio Jumlah Dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 2,71 artinya untuk 1 orang dokter dapat menangani 271 orang penduduk. Untuk idealnya rasio dokter terhadap penduduk adalah 1 : 2500 (Standar dari WHO sebesar 40 per 100.000 penduduk). Dengan tabel yang tergambar di atas dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi telah mempunyai dokter sesuai dengan kebutuhan yang ada.

g. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis yang ada di Kota Bukittinggi terdiri dari tenaga analisis labor, temperatur dan pengaturan rontgen, anestesi, fisioterapi, rekam medic, refoptisien yang tersebar diseluruh puskesmas, rumah sakit dan institusi.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk meunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga Kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis per satuan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 42
Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk Tahun 2015 s.d 2019
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tenaga Medis	236	236	253	249	324
2	Jumlah Penduduk	122.621	124.715	126.804	128.783	130.773
3	Rasio	1,92	1,89	1,99	1,93	2,48

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Secara umum dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 s/d 2019 terdapat kecenderungan kenaikan rasio tenaga medis per satuan penduduk yang dikarenakan penambahan jumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada penduduk.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam upaya menyediakan infrastruktur bagi peningkatan pelayanan dan kualitas hidup

masyarakat maka pemerintah harus selalu meningkatkan kinerja pembangunan terkait jaringan jalan, peningkatan ini salah satunya dapat diukur dari proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik yang dipantau perkembangannya setiap tahun.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

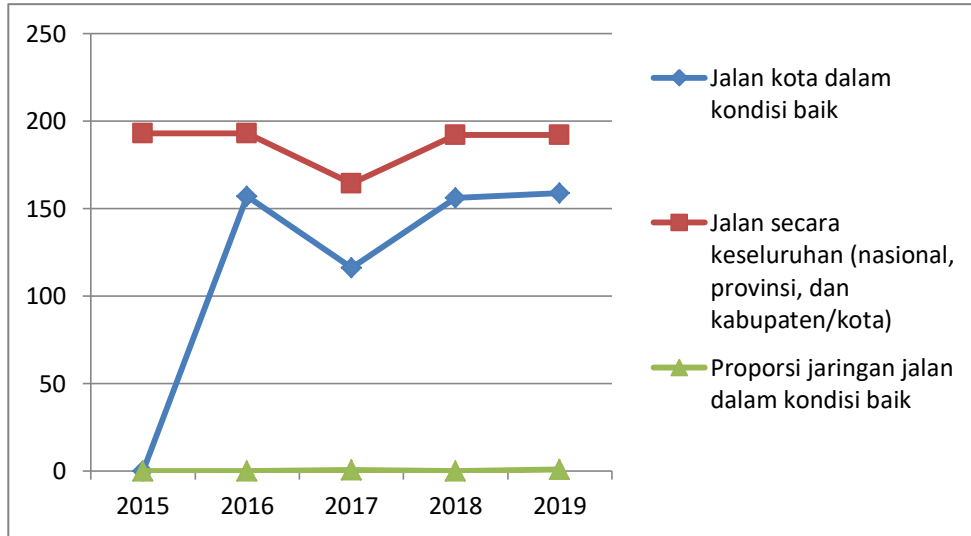
Sebagai kawasan yang memprioritaskan pembangunannya di sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan jasa, maka sektor transportasi di Kota Bukittinggi mempunyai peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dalam hubungan sistem aktivitas sistem transportasi, perkembangan fasilitas transportasi disebabkan oleh perkembangan guna lahan, pola aktivitas maupun keputusan lokasional. Jalan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang menghubungkan berbagai pusat-pusat kegiatan serta sebagai sarana distribusi barang dan jasa untuk menunjang perekonomian. Dalam mendesain jalan, hal yang harus dipertimbangkan adalah antisipasi terhadap kondisi lalu lintas dimasa yang akan datang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 43
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jalan kota dalam kondisi baik	164,96	157,06	116,12	155,965	158,718
2.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	192,99	192,99	164,48	192,06	192,06
3.	Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik	0.85	0.87	0,75	0.87	0,87

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2019

Grafik 2. 13
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi



Dari tabel diatas, pada tahun 2018 dan tahun 2019 terlihat proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik per panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota) sebesar 0,87 artinya rata-rata setiap 1 Km jalan yang ada 0,87 Km sudah dalam kondisi baik dan panjang jalan kota dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2,75 km. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan-jalan yang ada di Kota Bukittinggi sudah memberikan kenyamanan bagi penggunanya serta menggambarkan aktivitas social ekonomi masyarakat sudah lancar.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Dengan adanya irigasi maka kebutuhan

akan air pada sebidang lahan tetap terpenuhi sekalipun kondisi lengas tanah tidak mencukupi sehingga tanaman tetap bisa tumbuh secara normal.

Jaringan irigasi yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapannya. Rasio Jaringan irigasi dapat menggambarkan efisiensi dan efektifitas operasional jaringan irigasi yang ada dalam mengairi petak sawah / areal tanam yang ada. Tabel berikut menyajikan Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi.

Tabel 2. 44
Rasio Jaringan Irigasi Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Pasokan Irigasi	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang Saluran Irigasi (km)	1,25	1,25	1,25	31,7	31,7
2.	Luas Areal Tanam (Ha)	759	759	588	579,3	579,3
3.	Rasio Jaringan Irigasi	0.0015	0.0015	0,002	0.054	0.054

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2019

Dilihat dari tabel diatas, panjang saluran irigasi Kota Bukittinggi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tidak terdapat penambahan panjang saluran irigasi dan luas areal tanam, sehingga rasio jaringan irigasi per luas areal tanam juga tetap yaitu sebesar 0,54 artinya tidak ada penambahan beban saluran irigasi dalam mengairi area tanam.

c. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum biasa disingkat TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri. Rasio tempat pemakan umum per satuan penduduk adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 45
Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk Tahun 2019

No	Uraian	2019
1	Jumlah daya tampung TPU	5,17 Ha
2	Jumlah Penduduk	130.773
3	Rasio	0,039

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2019

Tempat pemakaman Umum TPU sebagai salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Tempat Pemakaman Umum TPU adalah areal tempat pemakaman milik dan dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah.

Penggunaan lahan TPU untuk makam dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut. Untuk masing-masing makam disediakan lahan maksimal 2,50 x 1,50 m dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah. Dari tabel diatas rasio tempat pemakaman umum per jumlah penduduk tahun 2019 yaitu sebesar 0,039. Dibanding tahun 2018 rasio ini menurun sebesar 0,001 hal ini disebabkan lahan makam yang tersedia tetap sementara jumlah penduduk cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari rasio yang ada jika dikaitkan dengan kebutuhan lahan pemakaman per orang yaitu 0,000375 ha/org maka lahan yang tersedia masih mampu menampung walaupun terjadi peningkatan jumlah penduduk.

Disamping itu untuk pemakaman ini juga tersedia makam private atau yang dikenal dengan pandam perkuburan kaum/suku artinya masing-masing kaum/suku yang ada di Bukittinggi sebagian besar juga memiliki lahan pribadi yang di peruntukan khusus bagi warga kaum/suku yang bersangkutan

d. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Kota Bukittinggi memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Sehingga jumlah Masjid dan Mushalla sangat menonjol dari pada jumlah tempat beribadah lainnya. Tempat ibadah yang tidak ada di Kota Bukittinggi adalah Pura (tempat beribadah agama Hindu).

Bukittinggi juga terkenal dengan toleransi antar umat beragamanya, dan masing-masing agama bebas menjalankan peribadatan dengan nyaman. Rasio masing-masing tempat ibadah terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 46
Rasio Tempat Ibadah Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Masjid	44	44	45	45	45
2.	Jumlah Mushalla menurut BDA	146	146	148	105	146
3.	Jumlah Penduduk beragama Islam	117.421	119.497	121.560	115.980	125.529
4.	Rasio Masjid Per satuan penduduk	0,37	0,37	0,37	0,39	0,36
5.	Rasio Mushalla Per satuan penduduk	1,24	1,22	1,22	0,91	1,16
6.	Jumlah Gereja Katholik	1	1	1	1	1

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
7.	Jumlah Penduduk beragama Katholik	1119	1.139	1.160	1.132	1.204
8.	Rasio Gereja Katholik Per satuan penduduk	0.89	0,87	0,86	0,88	0,83
9.	Jumlah Gereja Protestan	1	1	1	1	1
10	Jumlah Penduduk Beragama Protestan	1.723	1.754	1.758	1,882	1.802
11	Rasio Gereja Protestan Per satuan penduduk	0.58	0,57	0,57	0,53	0.55

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019

Peningkatan jumlah tempat ibadah di Kota Bukittinggi tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga rasio tempat ibadah dari tahun ke tahun cenderung menurun namun diperkirakan hal ini tidak akan mempengaruhi kualitas ibadah umat beragama. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kerusuhan yang terjadi antar umat beragama di Kota Bukittinggi. Dari tabel di atas terlihat bahwa mushalla yang ada sudah melebihi kapasitas yang seharusnya.

e. Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bukittinggi merupakan lahan yang terdiri dari Taman dan Hutan Kota, fasilitas umum berupa lapangan olah raga dan lahan pekarangan, Sempadan Sungai dan Sempadan Ngarai Sianok, TPU dan Jalur Hijau.

Berikut Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 47
Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017*)	2018*)	2019
1	Luas RTH	*	*	212,128	212,163	392,42 Ha
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	*	*	2523,9	2523,9	2523,9
3	Rasio	*	*	1 : 0,084	1 : 0,084	1 : 0,155

Keterangan: * data tidak tersedia

*) data RTH Publik

Dari table di atas terlihat bahwa luas RTH sampai dengan tahun 2019 seluas 392.42 Ha terjadi penambahan luas sebesar 180,257 Ha dimana RTH ini terdiri dari : Taman kota, Jalur Hijau yang pengelolaannya merupakan kewenangan DLH, Taman Pariwisata, Sempadan Sungai dan Ngarai

yang pengelolaannya merupakan kewenangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga. Untuk luas wilayah Hak Penggunaan Lahan / Hak Guna Bangunan luasnya masih sama dengan tahun 2018 sehingga rasionya meningkat sebesar 0,071 menjadi 0,155, artinya dalam 1 HPL/HGB baru terdapat 0,155 Ha RTH, dalam perhitungan sudah termasuk luas jalur sempadan sungai dan ngarai.

Dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan besaran proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang meliputi 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat. Berikut perkembangan Luasan RTH Publik Kota Bukittinggi dari tahun 2015 s/d 2019:

Tabel 2. 48
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas RTH public yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM (M2)	*	*	2.121.280	2.194.680	2.345.001
2	Luas RTH public yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kaw	*	*	5.047.800	5.047.800	5.047.800
3	Persentase	*	*	42%	43,47%	46,46 %

Sumber : DIKPLH tahun 2019

Bila dilihat dari tabel yang ada luas RTH public yang harus tersedia diakhir tahun pencapaian SPM adalah 2.345.001 m² ,sedangkan luas RTH public yang seharusnya tersedia dibandingkan dengan luas Kota Bukittinggi adalah 5.047.800 atau sebesar 46,46 % artinya terdapat peningkatan jumlah pemehuan RTH Tahun 2019 sebanyak 2,99% artinya harus ada penambahan RTH publik seluas 150.321 Ha.

Memenuhi amanat UU No. 26 Tahun 2007 bahwa luasan RTH public Kota Bukittinggi belum mencapai angka 20%, kekurangan ini disebabkan oleh berbagai factor, salah satunya sebagian besar lahan yang berpotensi sebagai RTH adalah tanah milik kaum sehingga penetapan lahan ini menjadi RTH membutuhkan proses yang panjang, dan adanya pengalihan fungsi lahan menjadi permukiman dan kendala lain adalah harga tanah yang tinggi sehingga membutuhkan alokasi dana yang besar untuk memilikinya disisi lain APBD Kota Bukittinggi juga terbatas.

f. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun

2010-2030 bahwasanya Kota Bukittinggi tidak memiliki Kawasan Hutan, namun hanya memiliki beberapa kawasan yang memiliki lindung yaitu Kawasan Ngarai Sianok, Sempadan Ngarai Sianok dan Sempadan Sungai serta Kawasan Ruang Terbuka hijau (RTH) dengan fungsi Hutan Kota yang merupakan kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati). Selain itu hutan kota juga dimanfaatkan sebagai aktivitas sosial masyarakat (duduk, beristirahat, olah raga ringan).

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 49
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017)*	2018)*	2019)**
1	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara (Ha)	*	*	67,99	61.74	61,51
2	Luas daratan	*	*	2523 Ha	2523 Ha	2523 Ha
3	Rasio	*	*	1 : 0,0269	1: 0,0244	1: 0,0243

Sumber:) * Data Diolah oleh Bapelitbang) ** Data Diolah Dinas PUPR

CTT: Beberapa pohon di kawasan Jam gadang ditebang

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil perhitungan Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil analisis foto udara Kota Bukittinggi Tahun 2019 didapat luasan kawasan yang tertutup pepohonan seluas 61,51 Ha dari luas daratan Kota Bukittinggi, dengan rasio 1: 0,0243 artinya dalam 1 Ha baru 0,024 Ha luas Kawasan yang tertutup pepohonan. Rasio ini turun 0,001 dari tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh semakin banyaknya lahan terbangun sehingga terjadi penebangan pohon-pohon besar di beberapa lokasi seperti di sekitar Jam Gadang dan lahan-lahan permukiman serta di beberapa ruang jalan. Hal ini juga disebabkan tumbangnya pepohonan yang lapuk karena dimakan usia serta terpaan angin saat terjadi hujan lebat yang disertai angin

Keberadaan pepohonan dalam kota perlu dipertahankan karena keberadaannya sebagai paru-paru kota adalah penyumbang terhadap O₂, dapat menyegarkan udara, menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembapan kota. Sekaligus sebagai pemandangan alami perkotaan dan mengurangi polusi udara serta berfungsi dalam proses fotosintesis tanaman akan menyerap CO₂ terutama dari gas buang yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Untuk itu perlu dilakukan penanaman kembali pohon-pohon terutama di ruang-ruang terbuka public dan melalui gerakan menanam pohon untuk mengantisipasi angka pencemaran lingkungan dan dampak pemanasan global.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Perumahan Rakyat

Setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan bathin, mempunyai tempat tinggal serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak. Hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia dimana pemerintah berkewajiban untuk mewujudkannya. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni. Rasio rumah layak huni untuk Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

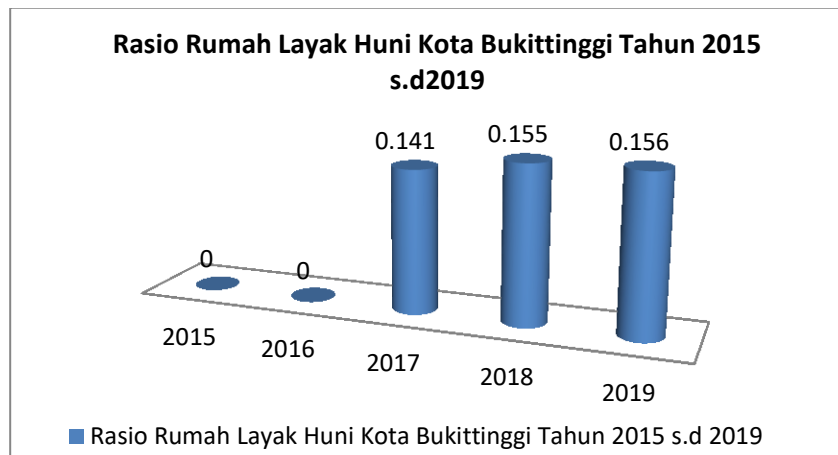
Tabel 2. 50
Rasio Rumah Layak Huni Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s.d 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rumah Layak Huni	*NA	*NA	17.914	20.089	20.456
2	Jumlah penduduk	122.621	124.715	126.804	128.783	130.773
3	Rasio	*NA	*NA	0.141	0.155	0.156

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2019

Grafik 2.14

Rasio Rumah Layak Huni Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019



Jumlah rumah layak huni di Kota Bukittinggi pada tahun 2019 adalah sekitar 20.456 rumah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 yang berjumlah sekitar 130.773 jiwa, maka rasio rumah layak huni per jumlah penduduk di Kota Bukittinggi pada tahun 2019 sebesar 0,156. Jika diasumsi masing-masing rumah terdiri dari 5 orang anggota maka dibutuhkan rumah layak huni sebanyak 26.155 rumah. Dengan demikian, maka kekurangan rumah layak huni sebesar 5.699 unit rumah atau lebih kurang 22%. Upaya penanganan rumah tidak layak huni telah dilakukan

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam berbagai macam program dan kegiatan, diantaranya adalah program bedah rumah.

2. Kawasan Kumuh

Dalam penanganan kawasan kumuh diintervensi melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam mencapai *universal acces* yang salah satunya adalah pengurangan kawasan kumuh perkotaan menjadi 0% pada tahun 2019.

Disamping itu, penanganan rumah tidak layak huni juga dilakukan pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat, serta dana dari sumber-sumber lainnya baik di pusat maupun daerah melalui APBD dan juga penanganan melalui dana CSR (*Rasio Corporate Social Responsibility*) dimana pada tahun 2020 akan dilakukan bedah rumah di kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah dan kelurahan Pakan Kurai.

Luas permukiman kumuh pada tahun 2015-2019 di Kota Bukittinggi adalah seluas 30,6 Ha. Dari luas tersebut semuanya sudah tertangani keseluruhan sebesar 30.6 Ha pada tahun 2019, sehingga persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2019 sudah tuntas menjadi 0%. Persentase luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

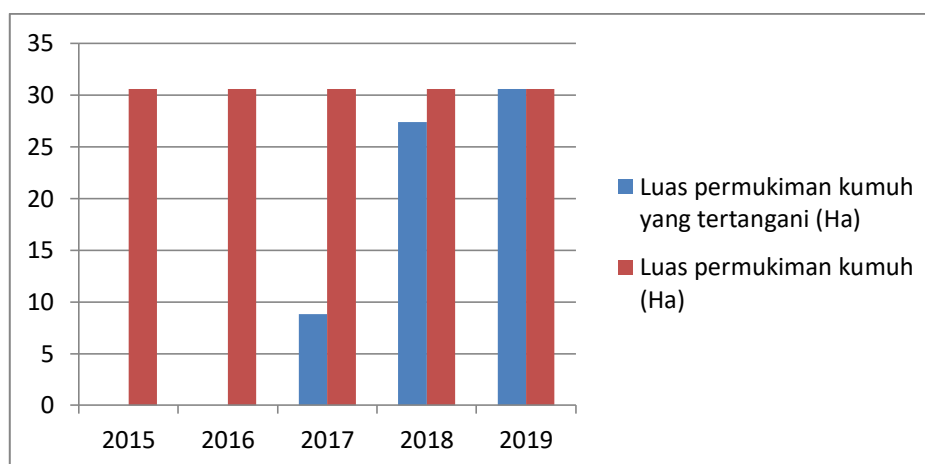
Tabel 2. 51
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	0	0	8,81	27,37	30.6 Ha
2	Luas permukiman kumuh (Ha)	30,6 Ha	30,6 Ha	30.6 Ha	30.6Ha	30.6 Ha
3	Persentase	0%	0%	28,79%	89,44 %	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2020

Pada tabel diatas terlihat luas pemukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2019 yakni sebesar 30.6 Ha dengan persentase 100%.

Grafik 2.15
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan



.Dari grafik terlihat penanganan permukiman kumuh meningkat dari tahun ketahun sehingga dapat dituntaskan pada tahun 2019.

a. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Secara umum, daerah kumuh (*slum area*) diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di banyak kota besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah jembatan. Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 52
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Kawasan Kumuh	30,6 Ha	30,6 Ha	21,79	4 Ha	0 Ha
2.	Luas Wilayah	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha
3.	Persentase	1,21%	1,21%	0,9%	0,15%	0%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dari tabel diatas persentase luas pemukiman kumuh di kawasan perkotaan untuk tahun 2019 sebesar 0 % atau sudah tuntas.. Hal ini merupakan gambaran berhasilnya program

terhadap pemukiman kumuh yang telah dilaksanakan, baik kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kota Bukittinggi terus melakukan upaya untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kinerja pelayanan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada beberapa indikator sebagaimana berikut:

a. Stabilitas dan Keamanan Lingkungan

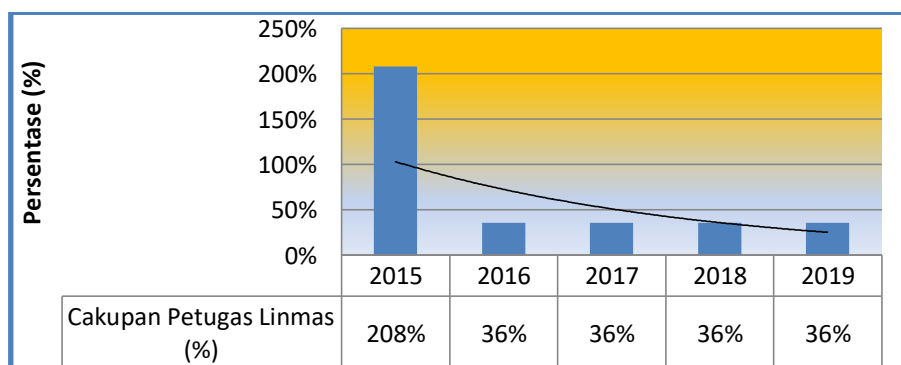
Indikator stabilitas dan keamanan lingkungan dapat dilihat dari sejauhmana cakupan petugas perlindungan Masyarakat, tingkat penyelesaian K3, dan Tingkat Penegakan Perda dapat direalisasikan

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasarnya kepada masyarakat, didasari dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Didalam pesan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 mengamanahkan bahwa yang terkait dengan tupoksi dari satuan perlindungan masyarakat di daerah, menurut jenis pelayanan dasarnya adalah pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dengan indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota dengan nilai satu (1) orang atau anggota satuan perlindungan masyarakat pada setiap rukun tetangga.

Grafik 2.16
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tahun 2015-2019



Cakupan petugas perlindungan masyarakat berasal dari perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah RT sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 53
Jumlah Linmas dan Jumlah RT di Kota Bukittinggi tahun 2015-2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Linmas	704	120	120	120	120
2.	Jumlah RT	338	338	338	338	338

Sumber: Dinas Satpol PP, diolah, 2020

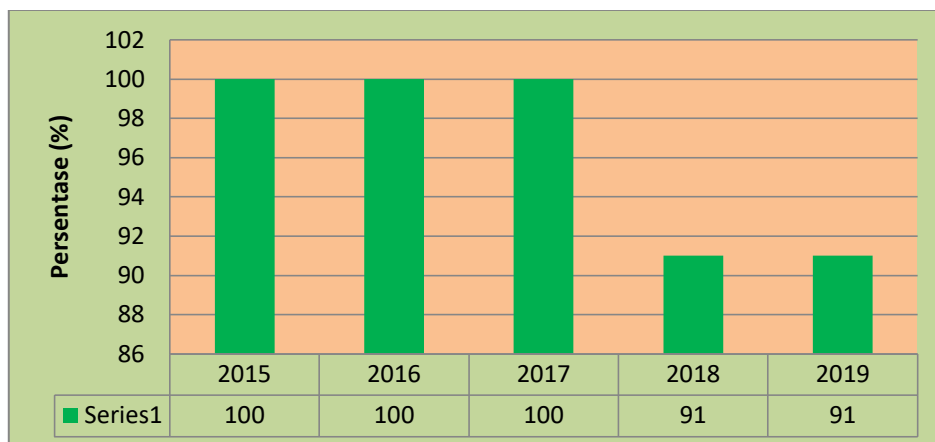
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 cakupan petugas Linmas lebih banyak dibandingkan tahun-tahun selanjutnya, dengan persentase 208%. Kondisi ini disebabkan karena adanya Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015 yang mengharuskan petugas linmas di masing-masing TPS harus tersedia, sedangkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 cakupan petugas Linmas hanya 36%. Jumlah petugas Linmas hanya 5 orang per Kelurahan, dengan total 120 orang se Kota Bukittinggi. Sementara untuk kondisi ideal seharusnya ada 338 orang petugas Linmas (sesuai dengan jumlah RT). Rendahnya realisasi cakupan petugas Linmas Kota Bukittinggi disebabkan oleh keterbatasan anggaran, meskipun dengan jumlah personil Linmas yang terbatas sejauh ini pelaksanaan tugas perlindungan Masyarakat di Kota Bukittinggi tidak mengalami kendala berarti.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 4 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk itu tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan merupakan salah satu indikator dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Capaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dapat diukur dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang telah dilaksanakan. Selama periode Tahun 2015-2019, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.17
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Satpol PP. 2020

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2015-2019 berasal dari perbandingan antara jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan. dengan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP.

Tabel 2. 54
Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan dan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	722	657	1,494	1,944	2,357
2	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	722	657	1,494	2,131	2,587

Sumber: Dinas Satpol PP, 2020

Pelanggaran K3 yang terselesaikan adalah pelanggaran yang telah selesai dilakukan sidang dan telah selesai pembayaran denda. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran K3 cenderung meningkat. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ditahun 2018 dan Tahun 2019 hanya sebesar 91%, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 terdapat sebanyak 187 kasus yang masih dalam proses penyelesaian pelanggaran Perda antara lain menunggu proses sidang, tidak sanggup membayar biaya penegakan Perda, atau tidak/belum diselesaikan oleh pihak pelanggar Perda. Kejadian yang sama juga terjadi pada Tahun 2019 dengan jumlah kasus yang masih dalam proses penyelesaian meningkat menjadi 230 kasus.

c. Penegakan PERDA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

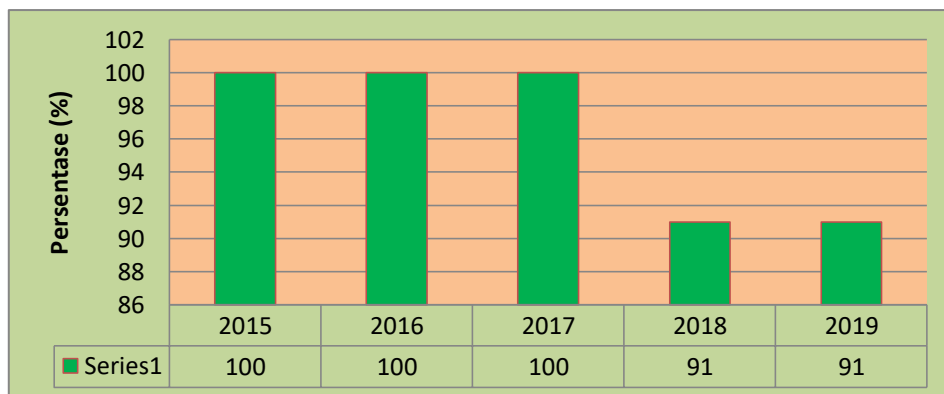
Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventifnon yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persentase penegakan PERDA dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.18

Persentase Penegakan PERDA Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Satpol PP. 2020

Tabel 2. 55
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dan jumlah Pelanggaran PERDA

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	722	657	1,494	1944	2,357
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	722	657	1,494	2,131	2,587

Sumber: Dinas Satpol PP, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan 2017 jumlah pelanggaran Perda dengan jumlah penyelesaian pelanggaran K3 sama nilainya, karena yang baru dikerjakan oleh Satpol PP baru Perda Trantibum saja. Sementara itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP bukan hanya ditugaskan untuk penegakan Perda Trantibum saja, namun idealnya Satpol PP menegakkan seluruh Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang ada. Berbeda halnya dengan Tahun 2018 dan 2019, tidak seluruh pelanggaran PERDA dapat diselesaikan.

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah layanan kebakaran merupakan salah satu sub urusan Ketentraman dan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dimana pada sub urusan kebakaran Pemerintah Kabupaten/ Kota salah satunya berkewajiban untuk melakukan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan Kebakaran. Dalam memberikan pelayanannya diatur dalam Standar Pelayanan Minimalnya yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (response time).

Besarnya cakupan layanan bencana kebakaran tidak terlepas ketersediaan sarana penanggulangan kebakaran yang ada di Dinas Kebakaran salah satunya keberadaan mobil pemadam kebakaran, berikut gambaran Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019:

Tabel 2. 56
Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota
Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	5	6	6	6	6
2.	Jumlah Penduduk	122.621	124.715	126.804	121.590	130.773
3.	Rasio (1:2 x 100%)	32,62%	48,31%	47,31%	49,35%	45,88%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kota Bukittinggi per tahun 2019 masih tetap 6 unit artinya tidak ada penambahan mobil pemadaman kebakaran dari tahun 2016. Berdasarkan standar *International Fire Chiefs Association of Asia* (IFCAA) yang menetapkan bahwa setiap 10.000 penduduk dilayani 1 (satu) unit mobil (telah sesuai dengan standar yg dipedomani oleh Damkar). Jika Penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2019 adalah sebanyak 130.773 jiwa, maka idealnya Kota Bukittinggi memiliki 13 unit mobil pemadam kebakaran. Walaupun demikian, Dinas Kebakaran selalu berusaha memaksimalkan sarana yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal, dengan jumlah mobil pemadam kebakaran 6 unit, cakupan layanan bencana kebakaran adalah sebesar 45,88% menurun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Dengan kondisi lebih dari 50% kekurangan mobil pemadam kebakaran Kota Bukittinggi maka hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah kota sehingga cakupan layanan bencana kebakaran kedepan lebih terpenuhi sesuai standar yang seharusnya.

b. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (response time) menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran). Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 (lima belas) menit.

Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (response time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. (ini adalah arahan dalam permndagri di atas artinya setiap kejadian kebakaran wajib ditangani oleh Damkar)

Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 57
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran	116	115	121	77	65
2.	Jumlah Kejadian Kebakaran	116	115	121	77	65
3.	Rasio (1:2 x 100%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebakaran, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК) Kota Bukittinggi telah 100%, rasio ini telah memenuhi mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018. Dari table juga tergambar bahwa kejadian kebakaran menurun sebanyak 12 kasus dan seluruh kasus dapat tertangani dan memenuhi tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*).

6. Sosial

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS. Adapun data PMKS Kota Bukittinggi dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada data berikut :

Tabel 2. 58
Data PMKS Kota Bukittinggi Tahun 2015 - 2019

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Anak Balita Terlantar	Anak	10	14	45	1	0
2.	Anak Terlantar	Anak	488	436	580	12	1
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak	8	1	4	9	2
4.	Anak Jalanan	Anak	0	27	25	0	0
5.	Anak dengan Kedisabilitas	Anak	144	106	134	64	74
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak	4	16	32	12	0
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	0	3	4	8	6
8.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	1684	1595	1908	443	383
9.	Penyandang Disabilitas	Orang	331	363	390	216	1958
10.	Tuna Susila	Orang	5	6	5	2	0
11.	Gelandangan	Orang	0	0	0	0	5
12.	Pengemis	Orang	16	5	9	4	12
13.	Pemulung	Orang	59	62	83	23	39
14.	Kelompok Minoritas	Orang	4	7	7	7	3
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahan Masyarakat	Orang	9	20	15	14	11
16.	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	0	14	36	55	0
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	657	65	470	66	7
18.	Korban Trafficking	Orang	0	1	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	Orang	2	1	0	0	0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	0	0	0	0	0
21.	Korban Bencana Alam	Orang	635	563	1137	1497	713
22.	Korban Bencana Sosial	Orang	0	1	0	68	9
23.	Perempuan Rawan Sosial	Orang	1148	1108	820	810	724
24.	Fakir Miskin	KK	5988	4977	5508	5772	5744
25.	Keluarga Bermasalah Psikologi	KK	14	0	0	22	7
26.	Komunitas Adat Terpencil	KK	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, 2020

Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Anak Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Anak berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Anak korban tindak kekerasan adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mendapatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru dan pendamping.

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Lanjut Usia Telantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurlang barang-barang bekas.

Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang).

Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Korban Bencana Alam adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Penanganan PMKS menjadi program prioritas pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk menangani PMKS tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak, perlu ada sinergitas antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Persoalan mendasar PMKS adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti Kesehatan, Pendidikan, sandang, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Para PMKS harus diberdayakan dan dilatih untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi.

Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja saat ini relatif masih rendah, salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas. Perkembangan lulusan S1/S2/S3 dari tenaga kerja kita lihat pada uraian tabel berikut :

Tabel 2. 59
Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan S1	8.544	10.063	9.622	10.454	11.394*
2.	Jumlah lulusan S2/S3	978	1.322	893	956	1.091*
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	9.522	11.385	10.515	11.410	12.485*
5.	Jumlah penduduk	122.621	124.715	126.804	128.783	130.773
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	6,12	7,77	8,29	8,85	9,54

Sumber: Dinas PMPTSP 2019* (Data Sementara)
Bukittinggi Dalam Angka 2019

Dari tabel diatas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

b. Kesempatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja aktif dan penduduk yang sedang mencari

pekerjaan yang merupakan pengangguran terbuka. Diluar dari itu adalah merupakan bukan angkatan kerja yang merupakan penduduk yang masih bersekolah, rumah tangga, purnakarya dan lain-lain. Untuk pembangunan kesempatan kerja sasaran yang ingin dicapai adalah terbukanya informasi seluas luasnya mengenai ketenagakerjaan dan ketersediaan lapangan kerja yang dapat diisi bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang belum mendapatkan pekerjaan/tenaga kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan juga merupakan sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas dibawah laki-laki. Salah satu indikator Pemberdayaan perempuan adalah dengan melihat Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan proporsi yang duduk di DPRD.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Indikator terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 60
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	9.07%	9.07%	8.41%	8.92%	8.92%
2.	Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD	8%	8%	8%	8%	8%
3.	Rasio KDRT	0.00%	0.00%	0.20%	0.36%	0.19%
4.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	0.06%	0.07%	0.06%	4.50%	4.50%
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	54.56%	54.63%	57.97%	54.68%	54.68%

Sumber: DP3APPKB, 2020

Berdasarkan tabel di atas untuk partisipasi perempuan di lembaga pemerintah rata-rata diangka 8-9%, setiap tahunnya, sedangkan untuk proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bukittinggi tetap sama dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu sebesar 8% dengan keterlibatan

perempuan sebanyak 2 (dua) orang dari total 25 orang anggota DPRD.

Untuk Rasio KDRT di Kota Bukittinggi, dapat dilihat masih dalam persentase yang sangat kecil. Selanjutnya untuk persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur sedikit mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2019, ini perlu menjadi perhatian lebih agar anak-anak pada usia sekolah dapat bersekolah dengan baik. Partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Bukittinggi sudah sedikit diatas angka 54%, ini sudah menunjukkan angka yang baik karena tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia hanya 54persen.

d. Pangan

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dari pengertian tersebut maka menjadi kewajiban Negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perserorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1966, ada 4 (empat) komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu :

1. Kecukupan ketersediaan pangan
2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun.
3. Aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan
4. Kualitas/ keamanan pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai daerah perkotaan, Kota Bukittinggi masih memiliki lahan untuk pertanian yang tersebar pada 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, kecamatan Mandingin Koto Selayan yang mempunyai lahan pertanian yang lebih luas dibanding 2 (dua) kecamatan lainnya.

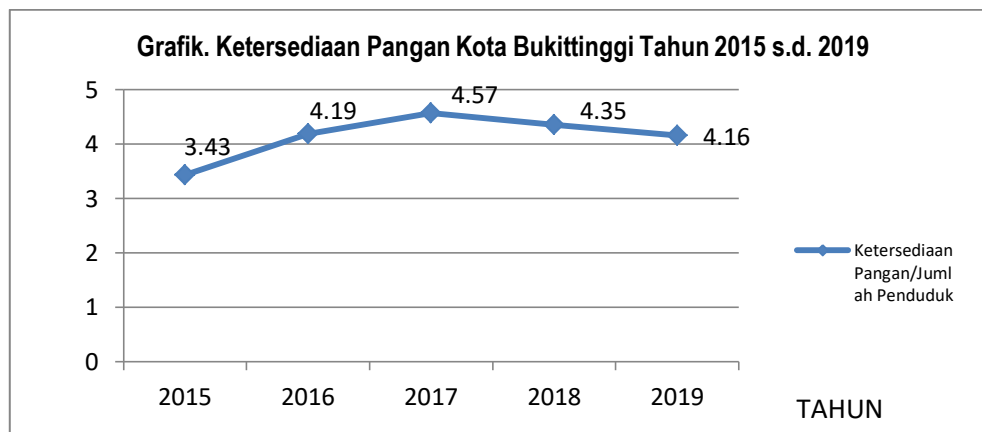
Ketersediaan pangan utama (beras) Kota Bukittinggi untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 61
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk	122.621	124.715	119.183	126.804	130.773
2.	Produksi Padi	4.200	5.227	5.444,82	5.515,8	5450
3.	Ketersediaan pangan utama (rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)/jumlah penduduk x 10%)	3,43	4,19	4,57	4,35	4,16

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2020

Grafik 2.19
Ketersediaan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019



Dari grafik diatas terlihat jumlah Produksi Padi di Kota Bukittinggi sebayak dari tahun 2015 s/d 2017 cenderung meningkat namun dari tahun pada tahun 2017 s/d 2019 cenderung menurun dimana terjadi penurunan sebesar 0,19% atau sebanyak 65,80 ton/tahun. Penurunan ini sejalan dengan semakin berkurangnya area persawahan di Kota Bukittinggi dimana sebagian lahan pertanian yang berpola permukiman telah dimanfaatkan untuk perumahan. Penyediaan pangan di Kota Bukittinggi hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota telah melaksanakan berbagai kegiatan baik dengan cara mandiri maupun bekerjasama dengan daerah sekitar. Selain sebagai salah satu upaya ketahanan pangan, sawah abadi juga diperuntukan bagi perluasan ruang terbuka hijau. Saat ini sedang dilakukan kajian tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dimana nantinya akan ditetapkan suatu luasan dimana lahan ini akan dipertahan tetap menjadi lahan

pangan sampai kapanpun, jika lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B di bangun maka akan dikenakan sanksi perdata.

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan juga dilakuka terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasam Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Bukittinggi.

d. Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Sebagai unit kerja baru, bidang pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran urusan pertanahan antara lain adalah persentase tanah bersertifikat, penyelesaian permasalahan/ sengketa tanah dan penyelesaian izin lokasi Per 31 Desember 2019 tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 420 persil tanah dengan luas 1.143.068,26 M2 berupa tanah bangunan gedung, tanah jalan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Dari total 420 persil tanah yang dikuasai, sebanyak 137 persil dengan luas 385.121,80 M2 telah memiliki sertifikat dan sebanyak 283 persil dengan luas 757.946,46 M2 belum memiliki sertifikat.

e. Lingkungan Hidup

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Lingkungan Hidup merupakan Urusan Konkuren Wajib Non Dasar. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup di Kota Bukittinggi ada pada Dinas Lingkungan Hidup dimana salah satu Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang harus dipenuhi dalam urusan lingkungan hidup adalah persentase penanganan sampah. Persoalan sampah bukanlah hal yang sepele jika tidak ditangani secara serius karena berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan Sosial Ekonomi. Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup:

1) Persentase penanganan sampah

Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan hidup melakukan dua upaya yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Upaya penanganan berupa Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir. Sampah yang ditangani berasal dari berbagai sumber diantaranya sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah fasum dan sampah fasos. Kondisi kota Bukittinggi yang memiliki 3 Pasar yang cukup besar serta jumlah penduduk yang

cukup padat untuk skala kota kecil, memiliki volume sampah yang besar setiap harinya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 62
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	*	412	426	578,96	616
2.	Jumlah volume produksi sampah (m3)	*	432	448	682,16	696,78
3.	Persentase	*	95,37 %	95,08%	84,87 %	88,40%

Sumber: Dokumen Review Master Plan Persampahan 2019

* Data tidak tersedia

Dari data jumlah sampah yang ditangani cenderung meningkat dari tahun ketahun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi sampah. Dibanding tahun 2018 maka presentase penanganan sampah tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,53 %. Dari data Dinas Lingkungan Hidup sumber sampah kota yang dominan adalah sampah yang berasal dari Jalan, Pasar Tradisional Rumah tangga, yang mendominasi dari total jumlah timbulan perhari yaitu 119,613 ton/hari.

Kenaikan ini diasumsikan dengan adanya sampah kiriman yang berasal dari luar Kota Bukittinggi dan Penyebab lain dari tingginya produksi sampah ini adalah produk yang dikonsumsi masyarakat sebagian besar memakai kemasan baik itu berupa plastik, kertas, karton dll.

Berdasarkan review Master Plan Persampahan Kota Bukittinggi, dengan perhitungan $0,7 \times$ Jumlah penduduk maka total produksi sampah adalah. $= 0,7 \times 126.000$ jiwa $= 88,2$ ton/hari, sedangkan kenyataannya timbulan sampah Kota Bukittinggi adalah 119,61 ton/hari. Selisih jumlah timbulan sampah yang ada berasal dari luar Kota Bukittinggi dan sesuai dengan SNI di asumsikan sampah berasal dari luar Kota Bukittinggi 31,41 ton/hari.

Belum diberlakukannya sepenuhnya Penegakan Perda aturan pembuangan sampah pada masyarakat pada jam-jam yang telah ditentukan dan masih kurangnya peran serta masyarakat dalam penanganan sampah terutama pengolahan sampah organik menjadi kompos dan daur ulang sampah non organik menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis sehingga bisa menambah income/pendapatan masyarakat, merupakan penyebab peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun. Disamping itu budaya malu untuk membuang sampah sembarangan juga belum ada pada masyarakat kota Bukittinggi maupun pengunjung yang masuk ke Kota Bukittinggi.

Dari jumlah volume sampah kota Bukittinggi, pada tahun 2019, volume sampah yang ditangani sebesar 616 m3 atau 88,40 % dan sisanya atau 11,6 % sudah diolah menjadi kompos

artinya secara keseluruhan sampah yang ada di Kota Bukittinggi sudah tertangani sesuai yang ditargetkan pada RPJMD Kota Bukittinggi. Pengolahan sampah menjadi kompos saat ini baru ada di 4 kelurahan dimana 1 Kelurahan melalui pendanaan APBD yaitu Kel. Aur Kuning, dan 3 Kelurahan lainnya yaitu Kel. Pulai Anak Air, Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang dan Kel. Puhun Pintu Kabun masih bersifat swadaya masyarakat.

2) Persentase cakupan area pelayanan

Data sebaran timbulan sampah menurut Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2018 terbesar ada di Kecamatan Guguk Panjang sebesar 50,46 ton/hari hal ini sebanding dengan tingkat kepadatan penduduknya, namun timbulan ini dapat dilayani secara penuh.

Kendala yang ada saat ini adalah Kota Bukittinggi tidak memiliki TPA, sampah yang dilayani dibuang ke TPA Regional Payakumbuh sedangkan berdasarkan kajian TPA ini hanya mampu menampung sampah 2 atau 3 tahun kedepan jadi hal ini menjadi PR besar bagi Kota Bukittinggi untuk segera mencari solusi TPA jika TPA Regional sudah penuh sehingga cakupan pelayanan timbulan sampah di Kota Bukittinggi tetap dipenuhi secara keseluruhan.

Tabel 2. 63
Daerah Pelayanan Sektor Persampahan
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ² /Ha)	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523.9 Ha
2.	Luas area kota (Ha)	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523.9 ha
3.	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Dari table terlihat bahwa daerah cakupan pelayanan persampahan telah meliputi seluruh kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi yaitu sebanyak 24 kelurahan, yang dilayani dengan sarana prasarana Betor sebanyak 44 unit yang menjemput sampah setiap kelurahan rata – rata 2 kali sehari untuk masing-masing kelurahan dan menggunakan Gerobak serta Becak Sampah, untuk selanjutnya sampah ini dengan menggunakan dump truck sebanyak 15 unit per hari dengan penjadwalan 2 shift setiap hari, diangkut ke TPA Regional Payakumbuh.

3) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Sebelum sampah di angkut ke TPA regional sebagian sampah dikumpul di TPS yang tersebar di beberapa titik di Kota Bukittinggi. Idealnya jumlah TPS yang ada dapat menampung

seluruh volume sampah yang ditumpuk di TPS yang dapat digambarkan berdasarkan rasio tempat pembuangan sampah tabel dibawah ini :

Tabel 2. 64
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah daya tampung TPS	405,1	243,1	136,72	186,6	337,2
2	Jumlah Penduduk	122.621	124.715	126.804	129.521	130.773
3	Persentase	0,33%	0,19%	0,10 %	0,144%	0,26 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas terlihat daya tampung TPS untuk tahun 2019 sebesar 337,2 m² meliputi TPS batu, TPS kayu, TPS Gandeng dan Kontainer. Kenaikan dari tahun kemaren tidak merupakan penambahan jumlah TPS pada tahun 2019, tapi pada tahun 2018 Jumlah TPS yang didata hanya TPS batu saja.

Berdasarkan Standar Pengelolaan sampah di permukiman SNI No. 3242:2008 maka kebutuhan TPS dibedakan kepada tipenya, merujuk pada keadaan TPS di Kota Bukittinggi dapat dikategorikan pada tipe I dimana volume TPS 100 m² untuk 2.500 jiwa, artinya dari data diatas dengan jumlah penduduk 130.773 jiwa idealnya dibutuhkan daya tampung TPS seluas 5.200 m² angka ini masih jauh dari luasan TPS yang ada. Sebagai antisipasi kekurangan ini upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penjemputan sampah langsung ke rumah penduduk serta upaya mengolah sampah setempat baik oleh masing-masing Rumah tangga ataupun yang dikelola oleh kelompok masyarakat peduli sampah yang ada di beberapa kelurahan serta dengan pengaturan pola/ jam pengangkutan sampah. Upaya ini secara nyata dapat menghindari adanya penumpukan sampah dalam waktu lama.

4) Indeks Pencemaran Air (IPA)

Indek kualitas air adalah salah satu indikator pencemaran air untuk mengukur kualitas air baku air permukaan. Indek ini diukur oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan data yang tersedia adalah data tahun 2019 yaitu 51,38. Sedangkan yang rutin dipantau adalah kualitas air sungai yang diukur oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi.

Pemantaun Kualitas Air Sungai dilakukan setiap tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pada Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan terhadap 3 (tiga)

sungai yakni Sungai Batang Masang, Sungai Btang Agam dan Sungai Batang Tambuo yang dipantau di masing-masing hulu dan hilirnya dengan periode pemantauan 4 kali dalam setahun.

Batang Agam merupakan salah satu sungai di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan status mutunya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian, dan Batang Lembang. Berdasarkan Pergub tersebut, mutu air Batang Agam dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu mutu kelas I yakni pada segmen hulu dan rentang sungai, dan mutu kelas II, pada segmen hilir sungai.

Hasil analisa sampel air yang dilakukan di laboratorium dan pengujian langsung di lapangan, dapat dilakukan evaluasi sesuai baku mutu air. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa sungai-sungai yang mengalir di Kota Bukittinggi telah menunjukkan indikasi pencemaran, terutama untuk parameter mikrobiologi. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan yang tinggi dari sektor domestik.

Pengukuran status mutu air sungai di Kota Bukittinggi dilakukan terhadap 8 (delapan) parameter, yaitu TSS, TDS, BOD, COD, Total Phospat, Fenol, E.Coli dan Total Coliform. Penentuan status mutu air sungai mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan Metode Storet diketahui status mutu air sungai Batang Agam dan Batang Tambuo sudah dalam kondisi Cemar Berat dengan skor mutu Batang Agam -59 dan Batang Tambuo adalah -52 yaitu termasuk pada Kelas D : buruk, karena skor = ≥ -31 . Tingginya pencemaran ini salah satu berasal dari limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai. Limbah domestik yang dibuang bukan hanya merusak ekosistem sungai secara kimia saja, namun juga fisik dari sungai tersebut. Banyaknya sampah yang menghambat laju air, merupakan salah satu penyebab masalah banjir yang sering terjadi belakangan ini serta limbah tinja yang langsung di alirkan ke sungai.

5) Indeks Pencemaran Udara (IPU)

Indeks Pencemaran Udara adalah kualitas udara untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Kualitas udara ambien dipengaruhi oleh aktivitas manusia maupun aktivitas alami, namun yang bisa dikendalikan adalah sumber pencemar yang berasal dari aktivitas manusia yang berupa emisi sumber bergerak maupun sumber stasioner/ tidak bergerak

Kualitas udara menggambarkan tingkat pencemaran udara yang terjadi sehingga kualitas udara juga ini perlu dipantau secara berkala sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalain Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota .

Untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di Kota Bukittinggi maka Dinas Lingkungan

Hidup Kota Bukittinggi telah melakukan pemantauan Kualitas Udara secara rutin, untuk tahun 2019 pengukuran dengan titik pantau di Lapangan Kantin dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Pengukuran dilakukan terhadap 8 (delapan) parameter sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 2. 65
Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Bukittinggi
Tahun 2019

No	Parameter	Hasil Pemantauan	Baku Mutu	Satuan
1	Sulfur Dioksida (SO2)	13,11	365	µg/Nm ³
2	Carbon Monoksida (CO)	1550	10000	µg/Nm ³
3	Nitrogen Dioksida (NO2)	25,8	150	µg/Nm ³
4	Ozon (O3)	3,43	235	µg/Nm ³
5	Hidro Carbon (HC)	6,2	160	µg/Nm ³
6	Particulate Matter (PM 10)	146,9	150	µg/Nm ³
7	Total Suspended Particulate (TSP)	tad	230	µg/Nm ³
8	Timbal (Pb)	0,24	2	µg/Nm ³

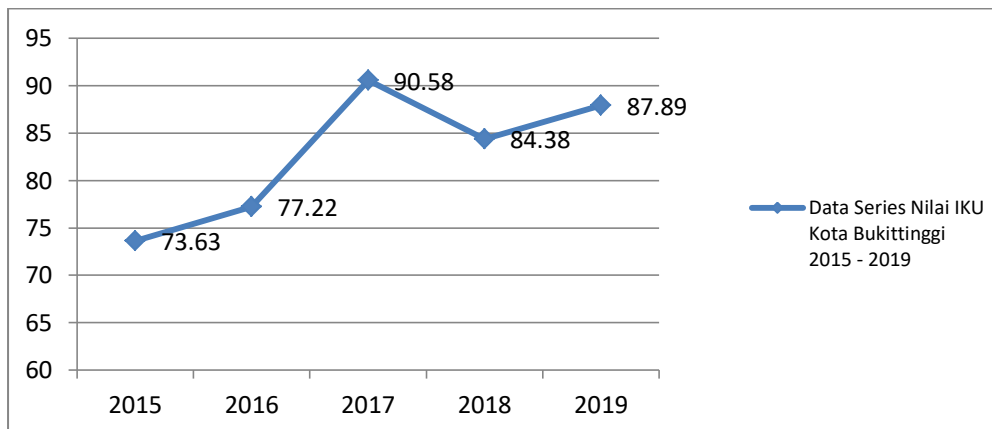
Sumber: Olahan Data Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kota Bukittinggi 2018

Keterangan: Baku mutu berdasarkan PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Dari table di atas terlihat bahwa berdasarkan hasil analisa diketahui kondisi udara Kota Bukittinggi untuk semua parameter yang diukur masih tergolong baik karena angka masing-masing parameter masih berada di bawah baku mutu. Dan dari perhitungan Indeks kualitasnya udaranya adalah 87,89 meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar 84,38 dan nilai IKU ini berada di bawah IKU Provinsi Sumbar (89,4) tapi melebihi nilai IKU Nasional (86,8) Keadaan ini perlu kita petahankan bahkan ditingkatkan sehingga sebutan Bukittinggi kota yang sejuk tetap terjaga.

Grafik 2.20

Grafik Perbandingan Nilai IKU Kota Bukittinggi Tahun 2015 -2019



Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan IKU Kota Bukittinggi 5 (Lima) tahun terakhir diperoleh data series yang cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari

berbagai macam faktor, baik yang berupa antropogenik (berhubungan dengan aktivitas manusia) maupun karena faktor alam. Pengaruh aktivitas manusia antara lain berupa peningkatan jumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, peningkatan kegiatan industri, serta peningkatan jumlah penduduk.

Selain faktor antropogenik tersebut, terdapat faktor alam yang juga turut mempengaruhi kualitas udara diantaranya kondisi curah hujan, arah angin, suhu udara, serta lamanya penyinaran matahari. Kondisi cuaca yang sering turun hujan akan berkontribusi meningkatkan kualitas udara di suatu daerah, sedangkan daerah yang jarang turun hujan juga akan menyebabkan lamanya waktu tinggal polutan diudara yang berpotensi menyebabkan turunnya kualitas udara ambien.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Kota Bukittinggi berada dibawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas ini telah dibentuk sejak tahun 2008, dimana sebelumnya hanya merupakan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

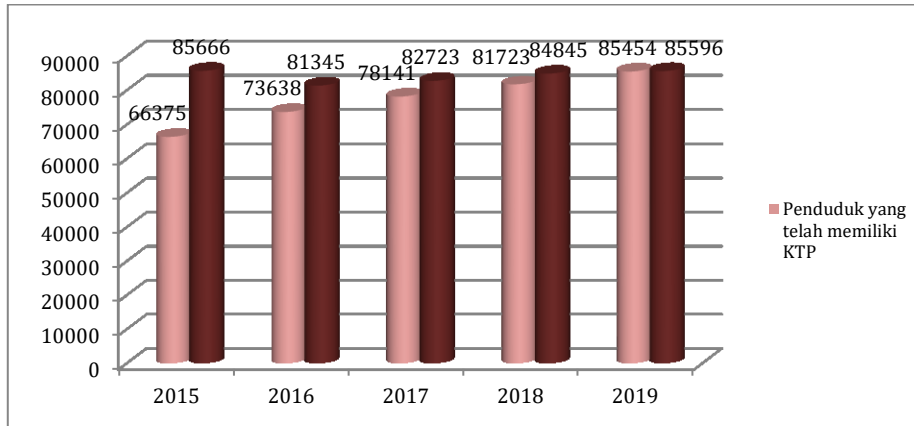
Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, akan menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pemerintah menetapkan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan akta catatan sipil. Indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari indikator Rasio penduduk yang ber-KTP per satuan penduduk dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

1) Rasio Penduduk yang ber-KTP per satuan Penduduk

Dari sistem aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara online dan berbasis internet serta *Single Identity Number* dapat digunakan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atas berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Kartu tanda penduduk yang mempunyai nomor induk kependudukan tunggal merupakan salah satu bukti kependudukan suatu wilayah. Salah satu indikator dalam pengendalian penduduk adalah seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk memiliki dan melengkapi administrasi kependudukannya antara lain dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menetapkan KTP secara elektronik yang terkoneksi dalam *data based* di tingkat nasional.

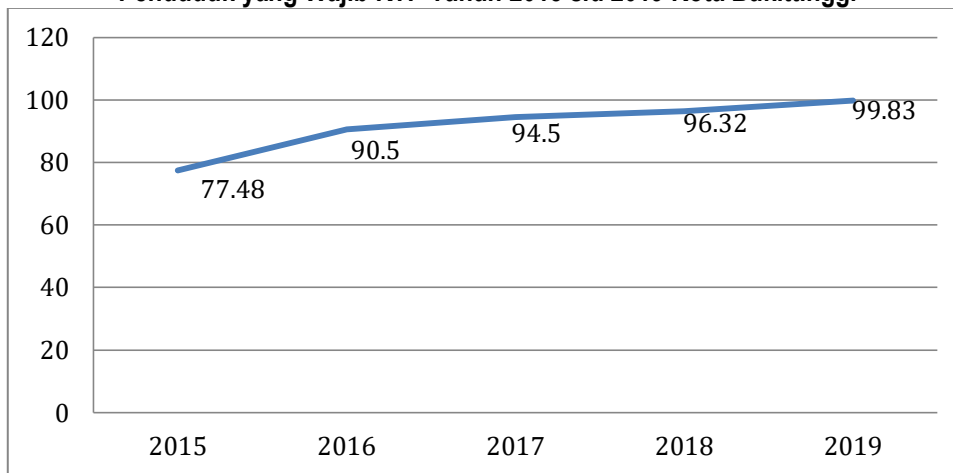
Jumlah penduduk yang memiliki KTP dan jumlah penduduk yang wajib KTP dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2. 21
Jumlah Penduduk yang telah memiliki KTP dan Jumlah Penduduk Wajib KTP
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Grafik 2.22
Rasio Penduduk yang Telah Memiliki KTP dan
Penduduk yang Wajib KTP Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Berdasarkan data diatas, dari tahun 2015-2019 masih ada penduduk usia wajib KTP yang belum mempunyai KTP, akan tetapi jumlah yang telah memiliki KTP jika dibandingkan dengan penduduk yang wajib KTP, rasionya relatif meningkat setiap tahun. Idealnya penduduk yang wajib KTP sama dengan penduduk yang telah memiliki KTP. Kerjasama seluruh elemen kota sangat diperlukan dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesadaran tentang wajib KTP bagi setiap penduduk usia

wajib KTP dimaksud. Jika hal ini telah terlaksana dengan baik maka siapa dan dimanapun berada dapat dipantau dengan adanya SIAK dengan basis nomor induk kependudukan secara tunggal.

2) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana. Instansi pelaksana yang dimaksud untuk Kota Bukittinggi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerapan KTP nasional berbasis NIK di Kota Bukittinggi sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Tabel 2. 66
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

No.	Uraian	Sudah/belum
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong.

1) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti

kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Perkembangan lebih lengkap dasa wisma dapat dilihat ada tabel berikut:

Tabel 2. 67
Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Mandiingin Koto Selayan	425	425	425	425	425
2.	Guguak Panjang	388	388	388	388	388
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	288	288	288	288	288

Sumber: TP PKK Kota Bukittinggi

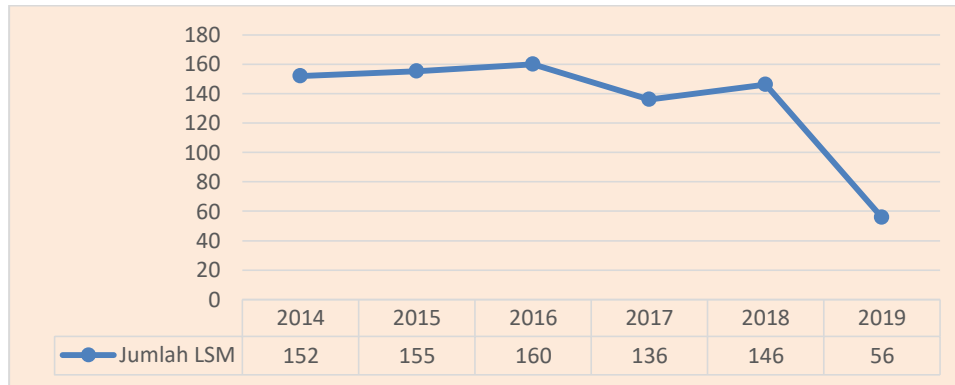
Kelompok Dasawisma inilah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibawah naungan PKK untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan. Untuk mengaktifkan fungsi dan kualitas Dasawisma ini diperlukan peran masyarakat dan pemerintah. Perkembangan kelompok dasawisma dari tahun ketahun di Kota Bukittinggi relatif tetap, dan sesuai dengan jumlah penduduk, maka kelompok dasawisma terbanyak terdapat ada Kecamatan Mandiingin Koto Selayan yakni 425, disusul Kecamatan Guguak Panjang 388 dan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 288. Kelompok ini dibentuk dalam 10 rumah tangga menjadi 1 Dasawisma pada setiap kelurahan. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus meningkat dan berperan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan, maka melalui kelompok dasawisma ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran perempuan.

2) Jumlah LSM

Secara umum pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat yang disingkat (LSM) merupakan semua organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah dan birograsi, tujuannya bisa membantu kinerja pemerintah bahkan justru ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Saat ini di Kota Bukittinggi terdapat 56 lembaga swadaya masyarakat yang ikut berperan aktif dalam mengawasi jalanya pemerintahan terutama pada ranah politik. Perkembangan jumlah LSM di Kota Bukittinggi didukung oleh beberapa factor antara lain adalah karena perkembangan dalam bidang politk, bidang pembangunan ,demokrasi dan pembangunan ekonomi hal ini seiring dengan perkembangan laju pembangunan semua sector di Kota Bukittinggi. Berikut data Jumlah LSM yang ada di Kota Bukittinggi.

Grafik 2.23
Jumlah LSM Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi



Sumber : Dinas Kesbangpol

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah LSM di Kota Bukittinggi mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2018, hal ini dikarenakan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019 hanya menerima 7 LSM pendaftaran baru muncul sementara dari LSM yang sudah ada, diantaranya ada surat keterangan terdaftarnya sudah berakhir /tidak memperpanjang. .

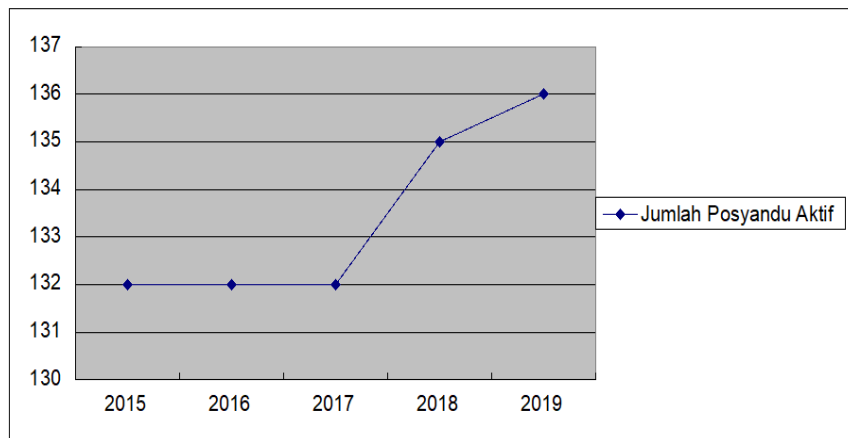
3) PKK Aktif

Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan partner Pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat. Jangkauan wilayah kerja PKK mulai di tingkat Kota sampai dengan Dasawisma. Dalam hal pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Jumlah Tim Penggerak PKK di Kota Bukittinggi berjumlah 28 (dua puluh delapan), yang terdiri dari 1 (satu) TP PKK tingkat Kota, 3 (tiga) TP PKK tingkat kecamatan dan 24 (dua puluh empat) TP PKK tingkat kelurahan. Semua TP PKK yang ada di Kota Bukittinggi berjalan dengan aktif dan lancar.

4) Posyandu Aktif

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu ini merupakan kegiatan swadaya masyarakat dibidang kesehatan yang berada pada kelurahan-kelurahan. Posyandu ini lebih difokuskan kepada pelayanan kesehatan balita meliputi imunisasi, timbang berat badan, menyediakan makan suplemen dll. Hal ini sangat penting dilakukan dalam meningkatkan angka harapan hidup bayi. Tenaga kesehatan atau sukarelawan pada posyandu telah mendapat pelatihan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan dan panduan bagi ibu hamil, bayi dan ibu menyusui. Selain itu Posyandu juga memberikan makanan suplemen kepada bayi dan Balita. Posyandu ini juga berfungsi sebagai pendeteksi dini terhadap perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak. Jumlah posyandu aktif yang tersebar di Kota Bukittinggi sebagai berikut :

Grafik 2.24
Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2015 s.d 2019



Terlihat pada data berikut, jumlah pos yandu aktif konstan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penambahan yaitu pada Kecamatan Guguk Panjang. Harapan yang terpenting dari keberadaan posyandu adalah bagaimana kelompok Dasawisma dapat meningkatkan dan menggerakkan kegiatan posyandu, agar kualitas posyandu dapat maksimal, dan berdampak pada peningkatan perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak.

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Rasio Akseptor KB

Rasio Akseptor KB menggambarkan adanya pengendalian terhadap jumlah penduduk. Rasio Akseptor KB dihitung dengan membandingkan jumlah akseptor KB dengan pasangan usia subur mulai dari umur dibawah 20 tahun sampai umur 49 tahun.

Tabel 2. 68
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
Tahun 2015						
1.	Guguk Panjang	5.790	2.002	34.58	4.014	69.79
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.900	1.371	19.09	4.809	69.70
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.655	829	22.68	2.610	71.41
	Total	16.345	4.148	25.38	11.433	69.95
Tahun 2016						
1.	Guguk Panjang	5.897	1.241	21.04	3.685	63.49
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.856	1.277	18.62	4.120	60.09

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.591	834	23.22	2.283	63.58
	Total	16.344	3.352	20.51	10.088	61.72
Tahun 2017						
1.	Guguk Panjang	5.932	1.550	26.13	3.784	63.79
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.943	1.382	19.90	4.325	62,29
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.580	932	26.03	2.387	66.68
	Total	16.455	3.864	23.48	10.496	63.79
Tahun 2018						
1	Guguk Panjang	5.927	1.461	24.65	3.834	64.69
2	Mandiingin Koto Selayan	7.049	1.743	24.72	4.448	63.1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.445	377	10.94	2.363	68.6
	Total	16.421	3.581	21.81	10.645	64.83
Tahun 2019						
1	Guguk Panjang	5.941	1.364	22.96	3.924	66.05
2	Mandiingin Koto Selayan	7.219	1.401	19.41	4.958	68.68
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.481	621	17.84	2.446	70.27
	Total	16.641	3.386	20.35	11.328	68.07

Sumber : Dinas DP3APPKB, 2020

Pada tahun 2015-2019 tercatat rasio peningkatan peserta KB aktif dibandingkan dengan PUS atau pasangan usia subur. Pasangan Usia Subur menjalani program KB dan aktif menjadi akseptor KB. Semakin tinggi persentase angka absolutnya berarti program KB semakin dipahami dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun sebenarnya program KB ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat secara maksimal. Agar usaha ini berhasil maka program KB perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yang lebih efektif.

h. Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu pengelolaan sarana transportasi menjadi sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya. Pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi hanya melayani angkutan darat saja sementara untuk angkutan kereta api, kapal laut dan pesawat udara tidak ada di Bukittinggi. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta aksesibilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan alasan diatas, maka kinerja pelayanan urusan perhubungan di kota Bukittinggi tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum, Rasio Izin Trayek, Jumlah Uji Keur Angkutan Umum, Jumlah Terminal Bis, Pemasangan rambu-rambu dan Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan..

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus penumpang angkutan umum di Kota Bukittinggi terjadi di Terminal Simpang Aur, Terminal Wowo dan beberapa terminal bayangan. Terminal Simpang Aur adalah terminal tipe A yang melayani arus penumpang bus Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Luar Provinsi. Pada tahun 2019 pengelolaan terminal ini telah diambil alih Kementerian Perhubungan, sementara itu untuk melayani angkutan kota dan angkutan pedesaan yang berasal dari Utara Kota Bukittinggi berlangsung di Terminal Wowo yaitu Terminal Tipe C dan beberapa terminal bayangan yang melayani arus penumpang pedesaan.

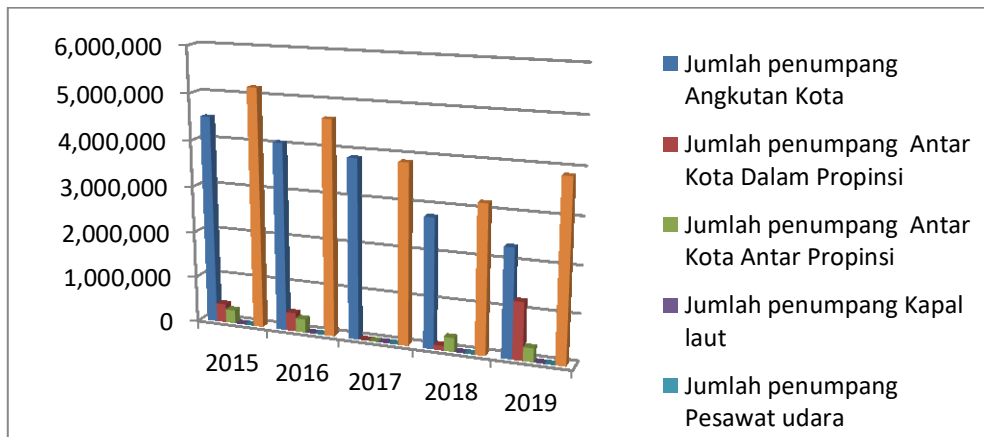
Angkutan pedesaan yang memasuki Kota Bukittinggi yang diberikan dispensasi perpanjangan izin karena angkutan ini melayani sebagian besar masyarakat Agam Timur yang beraktifitas di Kota Bukittinggi dan pertumbuhan angkutan pedesaan ini sangat sulit dikendalikan. Berikut Arus penumpang angkutan umum di Kota Bukittinggi dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 69
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penumpang Angkutan Kota	4.496.800	4.062.450	3.869.000	2.788.740	2.336.000
2.	Jumlah penumpang Antar Kota Dalam Propinsi	396.846	396.846	-	96.336	1.235.901
3.	Jumlah penumpang Antar Kota Antar Propinsi	284.528	284.528	-	294.098	292.485
4.	Jumlah penumpang Kapal laut	0	0	0	0	0
5.	Jumlah penumpang Pesawat udara	0	0	0	0	0
6.	Total Jumlah Penumpang	5.178.174	4.636.973	3.869.000	3.179.174	3.864.386

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019, Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan Terminal Tipe A Tahun 2019

Grafik 2.25
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2015 s.d. 2019
Kota Bukittinggi



Dari table dan grafik terlihat bahwa pada tahun 2018 s.d 2019 terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan kota sebanyak 105.415.510 orang dan jumlah penumpang Antar Kota Antar Provinsi sebanyak 1.139.565, sementara untuk jumlah penumpang Antar Kota Dalam Provinsi mengalami peningkatan sebanyak 1.613 orang.

Penurunan jumlah penumpang angkutan kota ini terjadi karena belakangan ini menjamurnya angkutan Daring dan taxi online seperti Gojek dan Grab, yang sampai saat ini belum ada aturan kalau angkutan daring terdaftar sebagai angkutan umum resmi. Penyebab lain terjadinya penurunan ini adalah karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi dimana para dealer mobil semakin memberi kemudahan bagi calon konsumen untuk mendapatkan kendaraan tersebut

Sementara itu penurunan jumlah penumpang Antar Kota Antar provinsi tidak terlepas dari kondisi Terminal Tipe A yang ada yang melayani penumpang bus antar kota dan antar provinsi yang pengelolaannya telah diambil alih oleh kementerian Perhubungan tahun 2016. Dimana kondisi terminal Tipe A Simpang Aur Kuning saat ini kurang tertata dan semraut, dimana adanya penyempitan areal terminal oleh para pedagang kaki lima, sehingga menimbulkan ketidaknyaman bagi para pengunjung/penumpang disamping factor adanya pilihan moda lain yang lebih efisien dari sisi waktu perjalanan yaitu pesawat udara yang belakangan ini berpacu memberikan diskon harga tiket serta promo-promo yang membuat calon penumpang beralih moda.

Sementara untuk jumlah Penumpang Antar Kota dalam provinsi mengalami peningkatan karena sudah banyaknya pengusaha angkutan umum yang meningkatkan standar pelayanan, sehingga banyak penumpang pribadi yang beralih ke angkutan umum.

2) Rasio Izin Trayek

Menurut Kusumawati (1999), trayek angkutan umum yang baik harus dapat memenuhi kepentingan beberapa pihak terkait seperti penumpang (*user*), pengelola (*operator*) dan pemerintah (*regulator*) yang pada umumnya kepentingan tersebut saling bertolak belakang. Dengan wilayah seluas ± 25 Km², dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan telah dibentuk/ditetapkan trayek angkutan kota sebanyak 24 trayek dengan 539 unit kendaraan yang melayani trayek dalam Kota Bukittinggi.

Semenjak tahun 2015-2019 tidak terdapat penambahan jumlah trayek, walaupun terjadi penambahan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan luas wilayah perkotaan kecil, sehingga sudah terlayani dengan trayek yang ada. Jumlah trayek dan perkembangan jumlah penduduk semenjak tahun 2015-2019 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 70
Rasio Izin Trayek Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Izin Trayek perkotaan	24	24	24	24	24
2.	Jumlah penduduk	122.621	124.715	126.804	121.590	128.783
3.	Rasio Izin Trayek	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2020

Dari table di atas terlihat bahwa tahun 2019 rasio izin trayek Kota Bukittinggi masih tetap hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat akan angkutan umum masih terlayani dengan trayek yang ada dan dengan kondisi ini pula Kota Bukittinggi terhindar dari benturan para pihak dalam pelayanan angkutan umum.

3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pengawasan dan penerapan pengujian KIR angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Uji KIR kendaraan umum ini dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dengan artian 1 (satu) kendaraan umum akan melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

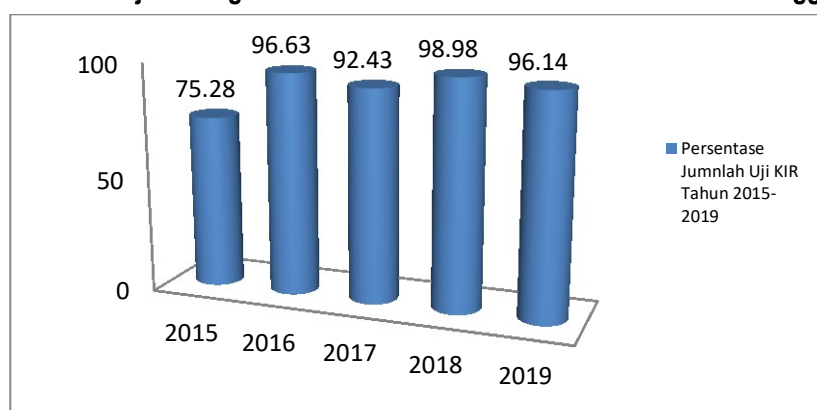
Uji KIR ini harus diperketat demi mengantisipasi terjadinya kecelakaan angkutan umum. Hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan angkutan umum. Angkutan umum ini yang wajib uji KIR meliputi mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang digunakan untuk transportasi umum yang ditandai dengan warna kuning pada plat kendaraan. Perkembangan angkutan umum melakukan uji KIR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 71
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Angkutan umum	917	1.218	1.177	1.088	1.089
2.	Jumlah Uji Kir	1.218	1.177	1.088	1.077	1.791
RASIO		0.75	1.03	1.08	1.01	0.61

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2020

Grafik 2.26
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi



Dari tabel diatas terlihat bahwa tahun 2019 jumlah uji Kir meningkat dari tahun sebelumnya dengan persentase kendaraan adalah sebesar 96, 14 %. Peningkatan jumlah KIR menandai bahwa jumlah kendaraan yang memenuhi syarat layak jalan semakin meningkat dibanding tahun lalu sehingga akan berdampak pada menurunnya angka kecelakaan atau meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya dan menurunnya polusi udara. Peningkatan jumlah kendaraan yang uji KIR juga akibat adanya kendaraan yang numpang uji Kir dari Kabupaten Kota lain ke UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

4) Jumlah Terminal Bis

Di Kota Bukittinggi tidak terdapat pelabuhan laut dan pelabuhan udara, sementara untuk terminal bis hanya terdapat 1 (satu) terminal, yaitu terminal tipe A Simpang Aur, dan Terminal tipe C di wowo yang merupakan terminal angkutan kota dan angkutan pedesaan. Jumlah terminal bis, Pelabuhan Laut dan udara dari tahun 2013–2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 72
Jumlah Terminal Bis Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah terminal bis	2	1	1	1	1
JUMLAH		2	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2019

Semenjak tahun 2016 terminal Simpang Aur telah diserahkan ke Pemerintah Pusat karena Terminal Tipe A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pada tahun 2019 memiliki 1 (satu) terminal yaitu terminal tipe C di Wowo yang merupakan kewenangan kota Bukittinggi.

5) Jumlah Pemasangan Rambu-rambu

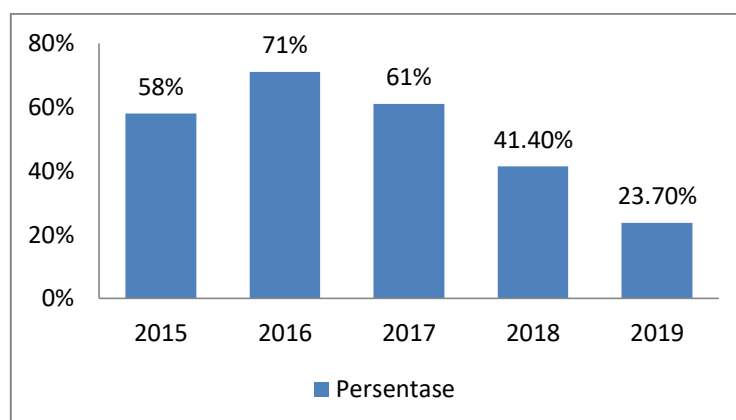
Rambu-rambu lalu lintas diatur menurut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014. Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Setiap tahun Dinas Perhubungan selalu berbenah dalam mewujudkan layanan lalu lintas yang aman, nyaman dan berkeselamatan bagi penggunanya, dan keberadaan rambu lalu lintas salah satunya. Berikut data jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di Kota Bukittinggi dari tahun 2015 s.d 2019:

Tabel 2. 73
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	423	608	621	956	711
2.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	600	1.000	1.500	1.500	3.000
Persentase		58%	71%	61%	41,4%	23,7%

Sumber: Dinas Perhubungan tahun 2020

Grafik 2.27
Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi



Berdasarkan table diatas, terlihat jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas di kota Bukittinggi yang tercatat menurut data-data dari Dinas Perhubungan pada tahun 2019 adalah 711 unit, sementara Jumlah pemasangan rambu-rambu yang seharusnya tersedia sebanyak 3.000 unit, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dari yang seharusnya. Rendahnya jumlah rambu yang terpasang dengan yang seharusnya memberikan sinyal bagi pemerintah untuk segera memenuhinya sesuai kebutuhan yang seharusnya karena keberadaan rambu erat kaitannya dengan tingkat keselamatan berlalu lintas.

6) Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Dibawah ini adalah tabel yang menampilkan panjang jalan yang adalah di kota Bukittinggi dengan jumlah kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2. 74
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang jalan	198,18	198,18	155,683	180.17	192.06
2.	Jumlah kendaraan	35.897	42.680	38.941	38.300	38.912
	Rasio	181,1	215,3	250.1	212,5	202,6

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2015-2019, Dinas Perhubungan Tahun 2020

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Berdasarkan tabel di atas menunjukkan di Kota Bukittinggi setiap 1 km jalan melayani 202 kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

i. Komunikasi Dan Informatika

Komunikasi dan Informatika merupakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan urusan ini telah menunjukkan capaian kinerja seperti yang sudah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan program tahunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

7) Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk oleh Masyarakat dan di SK kan melalui Keputusan Lurah. Pembinaan untuk meningkatkan kualitas kelompok baik dalam hal peningkatkan SDM maupun dalam mengelola informasi. Sebagai

Salah satu kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyebaran informasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik melalui media elektronik maupun media tradisional dan juga melibatkan lembaga komunikasi social. Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini juga mendukung terciptanya keterbukaan informasi sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 dan Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibuat secara mandiri dan kreatif dalam mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna bertukar informasi serta membuka peluang kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kota. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang masih eksis ini tak hanya bertukar informasi antara pemerintah dan masyarakat saja. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga berperan sebagai penyebar (diseminator) informasi kepada masyarakat untuk mengakses informasi seputar pembangunan.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Kota Bukittinggi sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 75
Cakupan Pengembangan KIM Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jumlah KIM	Jumlah Kelurahan	% Pengembangan/ kecamatan
1.	Mandiingin Koto Selayan	6	9	66,67
2.	Guguak Panjang	4	7	57,14
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	8	62,50

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2020

Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat di Kota Bukittinggi sampai Tahun 2018 hampir mencakup seluruh Kecamatan, untuk Kecamatan Mandiingin Koto Selayan telah dibentuk di Kelurahan Koto Selayan, Gulai Bancah, Garegeh, Campago Ipuah, Puhun Pintu Kabun, dan Manggis Gantiang, untuk tahun selanjutnya perlu pengembangan ke Kelurahan Pulai Anak Aia, Kubu Gulai bancah dan Campago Guguak Bulek. Pengembangan KIM di Kecamatan Guguak Panjang meliputi Kelurahan Kayu Kubu, Bukik Cangang Kayu Ramang, Benteng Pasar Ateh, dan Bukik Apit Puhun, dan untuk tahun selanjutnya perlu pembentukan KIM di Kelurahan Tarok Dipo, Pakan Kurai dan Aua Tajungkang Tengah Sawah. Sementara itu Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh telah membentuk KIM di Kelurahan Aua Kuning, Ladang Cakiah, Sapiran, dan Belakang Balok, dan ditahun berikutnya perlu dibentuk di Kelurahan, Birugo, Pakan Labuah dan Parit Antang.

j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Koperasi adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang melandaskan kegiatannya sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Sementara tujuan Koperasi sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Sehingga Koperasi sebagai salah satu soko guru ekonomi Indonesia, selain perusahaan swasta dan BUMN, merupakan lembaga yang paling tepat untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang sangat lebar dan membahayakan kesatuan bangsa ini.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah yaitu mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan

masyarakat kecil. yaitu: 1). Sebagai Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, 2). Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, 3). Memberikan pemasukan devisa bagi Negara.

1) Persentase Koperasi aktif

Salah satu indikator untuk menentukan berkembang atau tidaknya Koperasi pada suatu wilayah atau daerah yaitu dengan melihat jumlah koperasi aktif pada daerah tersebut. Koperasi Aktif menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 23/Per./M.KUKM/IX/2015 adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Perkembangan koperasi di Kota Bukittinggi tahun 2015 s.d. 2019 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 76
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah koperasi aktif	85	87	87	87	70
2.	Jumlah koperasi	103	105	92	92	93
3.	Persentase koperasi aktif	82,5	82,8	94,6%	94,6	75,3

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi 2019

Keberadaan koperasi di Kota Bukittinggi cukup banyak, dimana pada tahun 2015 terdapat 103 koperasi yang terdaftar di Kota Bukittinggi, kemudian pada tahun 2016 terjadi penambahan 2 koperasi sehingga koperasi yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 105 koperasi. Akan tetapi pada tahun 2017, tahun 2018 terjadi pengurangan hingga tahun 2019 menjadi 93 koperasi. Sehingga persentase koperasi aktif tahun 2019 menjadi 75,3% turun sebesar 19,3% dari tahun 2018. Terdapat empat kendala mendasar yang menghambat bagi perkembangan kualitas koperasi yaitu, yang pertama sumber daya manusia yang terlibat dalam koperasi yang kurang profesional dan kurang bisa diandalkan. Selanjutnya adanya kekurangan modal juga menjadi hambatan bagi perkembangan koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Ketiga ada sistem manajerial koperasi, sumber daya manusia dengan sistem manajerial koperasi sangat berkaitan erat, karena sistem manajerial koperasi yang bagus dibentuk oleh sumber daya manusia yang bagus pula. Terakhir yaitu kurangnya kesadaran berkoperasi para anggota yang berdampak pada kurangnya rasa saling memiliki, sehingga para anggota kurang minatnya untuk berkontribusi lebih pada koperasi. Melihat kendala yang dihadapi koperasi saat ini, pemberdayaan koperasi dari segi kualitas seperti pelatihan keterampilan pelayanan dan pengelolaan keuangan bagi para pegawai koperasi, sehingga koperasi-koperasi mampu

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan menyejahterakan anggotanya.

2) Jumlah UKM Non BPR / LKMUKM

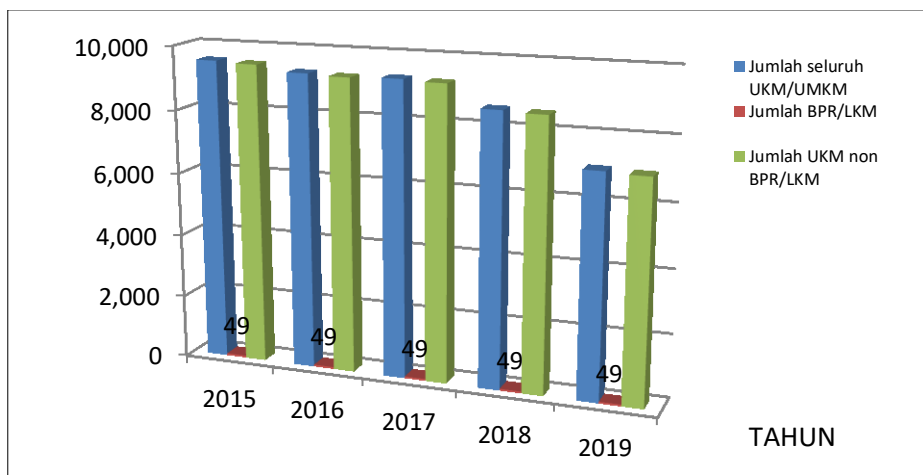
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) UMKM dan UKM adalah jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan kriteria aset dan omset. Usaha Kecil dengan Aset > 50 jt – 500 jt dan omset . 300 jt-2,5 M, sedangkan Usaha Menengah dengan Aset 2,5 M – 50 M, Berikut Perkembangan jumlah UKM di Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 77
Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah seluruh UKM/UMKM	9.527	9.302	9.302	8573	7015
2.	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49	49
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM	9.478	9.253	9.253	8.524	6.966

Sumber: Bagian Perekonomian Kota Bukittinggi

Grafik 2.28
Perkembangan Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi



Jumlah UKM di Kota Bukittinggi cukup banyak, namun dalam perkembangannya jumlah UKM/UMKM dan Jumlah UKM non BPR/ LKM cenderung menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Jumlah UKM/UMKM Tahun 2019 berkurang sebanyak 1558 usaha atau menurun dari 8573 usaha menjadi 7015 usaha. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada akhir tahun 2018 terjadi bencana kebakaran Pasar Atas sehingga berdampak signifikan terhadap keberadaan UKM/UMKM di Kota Bukittinggi. Kebakaran tersebut mengakibatkan 334 petak toko terbakar dari 763 jumlah petak

toko yang ada. Ratusan pedagang mengalami kerugian yang cukup besar akibat kebakaran tersebut. Dari tabel terlihat bahwa banyak usaha kecil yang menggunakan modal sendiri dan memiliki minat rendah untuk akses pada BPR. Sementara usaha kecil itu sendiri membutuhkan tambahan modal. Sekitar 60 % UKM /UMKM di Bukittinggi permodalannya bersumber dari modal sendiri dan 20 % permodalan tersebut berasal dari keuangan keluarga yang digabungkan sehingga banyak UKM yang berbentuk usaha bersama anggota keluarga.

3) Jumlah BPR/LKM

Salah satu penunjang pengembangan usaha masyarakat dalam akses permodalan adalah keberadaan BPR dan LKM. Menurut Bank Indonesia BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Jumlah BPR dan LKM di Kota Bukittinggi tahun 2015 s.d. 2019 tidak mengalami perubahan, dimana jumlah BPR sebanyak 3 BPR dan Jumlah LKM sebanyak 46 LKM.

Tabel 2. 78
Jumlah BPR / LKM Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah BPR	3	3	3	3	3
2.	Jumlah LKM	46	46	46	46	46
JUMLAH		49	49	49	49	49

Sumber: Bagian Perekonomian Setda

Sejak beberapa tahun terakhir, BPR di Sumatera Barat mengalami perkembangan yang cukup sehat. Tetapi peran BPR dalam pembiayaan usaha kecil masih menempati porsi yang relative kecil dibandingkan dengan pembiayaan oleh Bank Umum. Hal ini tidak terlepas dari kondisi BPR yang secara umum masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil, salah satunya adalah : (1) Struktur pendanaan BPR belum didukung oleh permodalan yang kuat serta keterbatasan dalam menghimpun dana masyarakat (2) kualitas sumberdaya yang belum memadai baik dari teknis manajerial maupun teknis operasional

k. Penanaman Modal

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal (investasi) merupakan faktor yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Peningkatan penanaman modal akan memacu peningkatan produktifitas dan juga penyerapan tenaga kerja. Kinerja pembangunan pada urusan wajib penanaman modal dilihat dari beberapa indikator berikut.

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)

Penanaman modal dapat dibagi atas 2 (dua) bagian utama yaitu penanaman modal swasta (*private investment*) dan penanaman modal pemerintah (*public investment*). Penanaman modal swasta merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta seperti pendirian pabrik baru, peralatan dan penambahan faktor produksi baru. Penanaman modal ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN), swasta asing (PMA) dan rumah tangga. Sedangkan penanaman modal pemerintah merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur, transportasi, komunikasi, listrik, irigasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Sampai dengan 2019 di Kota Bukittinggi terdapat 29 investor yang terdiri dari 21 Penanaman Modal Dalam Negeri dan 8 Penanaman Modal Asing. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 yang berjumlah 26 investor, dimana peningkatan terjadi pada Penanaman Modal Asing. Kondisi ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 79
Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2019

Tahun	PMDN	PMA	Total
Akumulasi sampai Tahun 2019	21	8	29

Sumber: Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi, 2020

Jumlah investor untuk berinvestasi dipengaruhi oleh Faktor interen (dalam negeri) dan eksteren (luar negeri), salah factor interen adalah Stabilitas politik dan perekonomian, Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokrasi. Kota Bukittinggi tidak mempunyai potensi sumber daya alam berupa hutan, mineral, gas bumi dan perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Potensi Penanaman Modal di Kota Bukittinggi adalah : (a) Perdagangan dan Jasa., (b) Pariwisata, (c) Pendidikan, (d) Kesehatan. Berdasarkan visi dan misi Penanaman Modal dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan Penanaman Modal yaitu :

1. Perbaikan iklim Penanaman Modal
2. Mendorong persebaran Penanaman Modal
3. Fokus pengembangan infrastruktur pada 3(tiga) potensi unggulan daerah yaitu pariwisata, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan, ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber energy terbarukan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi (UMKMK)

2) Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Pada tahun 2019, jumlah investasi di Kota Bukittinggi dari 21 investor PMDN tercatat sebesar Rp. 16.987.929.346,936 dan dari 8 investor PMA tercatat sebesar US\$252.650.847.171 Dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Bukittinggi telah dilakukan berbagai upaya seperti promosi investasi dan juga meningkatkan iklim investasi serta peningkatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2. 80
Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2019 Kota Bukittinggi

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (US\$)
Akumulasi Sampai Tahun 2019	21	16.987.929.346,936	8	252.650.847.171

Sumber: DPMPTSPPTK 2019

I. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor pembangunan. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti : (1) masih terbatasnya peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (2) masih terbatasnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan dan masyarakat (3) masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan; (4) belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Sedangkan permasalahan dalam pembangunan olahraga antara

lain: (1) masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga. (2) masih terbatasnya sarana olahraga yang representatif; (3) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (4) belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

Untuk kedepannya berkaitan dengan pelayanan olahraga dan kepemudaan diupaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan karang taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olahraga (*sport center*) yang baru.

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Kelompok pemuda yang kreatif biasanya sering berkumpul hingga membentuk organisasi sesuai dengan kreatifitas mereka dan menyusun suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Semakin banyak organisasi kepemudaan di suatu wilayah maka menggambarkan bahwa tingginya peran serta pemerintah daerah dalam membina organisasi kepemudaan. Jika banyaknya aktifitas pemuda yang terorganisir akan mengurangi permasalahan sosial di kalangan pemuda.

Tahun 2019 jumlah organisasi pemuda yang terdaftar di Kota Bukittinggi sebanyak 24 yang tersebar di 3 kecamatan. Jumlah Organisasi terbanyak ada di kecamatan Guguk Panjang kondisi ini terjadi pergesaran dibanding tahun 2018 dimana jumlah terbanyak ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Disini tergambar tingginya minat pemuda untuk berorganisasi dan tingginya peran pemerintah dalam memfasilitasi aktifitas pemuda sehingga mereka eksis pada setiap kegiatan. Untuk terus memicu peningkatan jumlah organisasi pemuda ini diharapkan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan pada khususnya berupaya mengajak para pemudanya untuk berorganisasi sehingga program pemerintah dapat tersalur melalui program organisasi mereka. Secara data dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 81
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Mandiangin Koto Selayan	10	25	9	9	9
2.	Guguk Panjang	14	19	7	7	10
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	6	24	8	8	8
JUMLAH		30	30	30	24	24

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olah raga yang ada di Kota Bukittinggi juga tersebar di setiap kecamatan, organisasi dari sekolah dan dari organisasi olahraga dari masyarakat itu sendiri. Untuk jumlah organisasi olahraga dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. 82
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Mandiingin Koto Selayan	3	1	4	7	7
2.	Guguk Panjang	3	2	4	5	5
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	1	4	6	6
JUMLAH		11	11	11	12	18

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi 2019

Sesuai Tabel di atas Tahun 2019 jumlah Organisasi olah raga yang ada di Kota Bukittinggi sama dengan tahun 2018 yaitu 18 organisasi olahraga. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan memiliki 7 organisasi, serta Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh memiliki masing-masing 5 dan 6 organisasi olahraga.

Pembinaan Organisasi olah raga dilakukan oleh masing-masing pihak seperti organisasi yang ada di sekolah-sekolah dibina oleh sekolah itu sendiri sedangkan pembinaan organisasi olah raga masyarakat langung dibina oleh ketua pemuda yang ada disetiap kelurahan dan keseluruhan organisasi ini berada dibawah naungan/bimbingan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi,. Untuk memicu keaktifan organisasi ini untuk mengikuti kegiatan keolahragaan di Bukittinggi ataupun ke luar Bukittinggi perlu perhatian yang lebih dari pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat memberikan bimbingan ataupun pembinaan serta bantuan dalam melengkapi sarana dan prasarana.

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan adalah *event* kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberdayaan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan

organisasi kepemudaan yang dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi harus meningkatkan pembinaan, kepedulian dan meningkatkan koordinasi dengan organisasi kepemudaan, sehingga Kota Bukittinggi betul-betul mempunyai pemuda yang berpendidikan dan kreatif, sesuai tujuan pembangunan kepemudaan yaitu . terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perkembangan jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 83
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Mandiingin Koto Selayan	2	3	3	3	3
2.	Guguk Panjang	2	3	3	3	3
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	2	4	4	4	4
JUMLAH		6	6	10	10	10

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Organisasi yang ada, jika kurang atau tidak ada melakukan kegiatan, sama saja dengan organisasi yang sia-sia. Harapan kita tentunya setiap organisasi yang ada selalu beraktifitas sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh organisasi tersebut. *Event* yang paling sering dilakukan oleh organisasi pemuda adalah di bidang keolahragaan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Sangat banyak *event* keolahragaan yang dilakukan sampai ketingkat nasional bahkan internasional. Jika kita selalu melakukan pembinaan yang rutin terhadap kegiatan olahraga dan dalam mencari bibit dan bakat seseorang di bidang keolahragaan, niscaya di Kota Bukittinggi akan bertaburan insan olahraga yang berpestasi.

Jika diambil rata-rata perbulan maka terdapat 2 *event* olahraga yang dilakukan masing-masing kecamatan untuk memberdayakan para pemuda dibidang olahraga. Selain bakat mereka tersalur, maka yang paling penting adalah para pemuda di Kota Bukittinggi selalu disibukkan dengan kegiatan positif sehingga diharapkan pengaruh negatif terhadap lingkungan akan dapat ditekan terus.

Untuk memacu peningkatan jumlah kegiatan olah raga tentu tidak terlepas dari keberadaan Sarana dan prasarana olah raga yang representative untuk itu sarana prasarana olah raga ini harus selalu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan keolahragaan dan menjadikannya sebagai program prioritas. Berikut perkembangan kegiatan keolahragaan Tahun 2015 s.d 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 84
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Mandiingin Koto Selayan	3	1	4	7	9
2.	Guguk Panjang	3	2	4	5	6
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	1	4	6	5
JUMLAH		11		12	18	20

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga Kota Bukittinggi

Dilihat pada tabel di atas kegiatan olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 20 kegiatan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal ini perlu dilakukan peningkatan yang lebih baik lagi, agar Bukittinggi dapat memiliki nama baik di bidang olahraga. Untuk itu perlu adanya Monitoring dan evaluasi yang lebih aktif lagi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan aktifitas olah raga yang dilaksanakan oleh pemuda dan disamping itu juga diperlukan dukungan dana untuk pembinaan serta *reward* untuk yang telah memberikan hasil yang terbaik dalam bidang keolahragaan.

m. Statistik

Statistik merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota. Perkembangan dari indikator urusan wajib statistik, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi bersama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi melakukan percepatan pengumpulan data sektoral daerah untuk percepatan penerbitan Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2019. Langkah percepatan penyusunan Daerah Dalam Angka Tahun 2019 merupakan kebijakan BPS secara nasional untuk mendukung penyusunan perencanaan nasional dan daerah, atas penerapan kebijakan tersebut Publikasi Bukittinggi dalam Angka Tahun 2019 telah tersedia pada website BPS Kota Bukittinggi pada akhir Februari.

Tabel 2. 85
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s.d 2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Buku "Kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

n. Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Dalam hal ini untuk Kota Bukittinggi Urusan persandian ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kegiatannya Kota Bukittinggi memiliki 2 (dua) alat sandi yaitu Email Sandi dan Kriptografi.

Email sandi adalah system/ perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim dan menerima berita yang bersifat rahasia yang mana email ini langsung dipantau oleh BSSN. Kriptografi adalah cara untuk mengamankan informasi dengan menggunakan kode atau sistem atau ilmu untuk tulisan rahasia dengan pertimbangan bahwa komunikasi dan data dapat dikodekan untuk mencegah agar orang lain tidak dapat mengetahui.

Tabel 2. 86
Pemanfaatan Persandian Tahun 2019

NO.	Nama Alat Sandi	Skpd Pemanfaat	Jumlah Total Skpd	% Pemanfaatan	Keterangan
1.	Email Sandi	1	28	3,5%	
2.	Kriptografi	1	28	3,5%	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

Terdapat 7 (tujuh) SKPD perangkat daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tidak lagi menggunakan santel dalam menerima surat dari instansi luar, dan untuk penggunaan alat sandi hanya digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Dimana alat sandi yang digunakan tersebut adalah Email Sandi, sementara untuk Kriptografi sampai saat ini hanya dimanfaatkan oleh Kepala Daerah.

o. Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah kebudayaan. Urusan kebudayaan dikelola oleh Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas 3 hal yaitu:

1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota
3. Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota

Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia/daerah.

Bukittinggi selain terkenal dengan obyek wisata alamnya, juga dikenal sebagai salah satu Kota Seni dan Budaya, dengan adat istiadat khas dan kemajemukan penduduk yang ikut memberi warna bagi kebudayaan yang ada, karena selain suku Minangkabau, penduduk Kota Bukittinggi berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Arab dan lainnya. Peran pemerintah dalam hal ini, adalah memfasilitasi keanekaragaman kebudayaan yang ada agar tetap lestari dengan tidak meninggalkan nilai tradisi didalamnya namun tetap dapat mengikuti perkembangan zaman.

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan seni budaya Kota Bukittinggi, pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpartisipasi dalam berbagai event seni dan budaya dengan mengikut sertakan sanggar atau kelompok seni yang ada di Kota Bukittinggi baik di tingkat regional maupun nasional. Festival atau pagelaran seni budaya yang telah diikuti sebagai berikut:

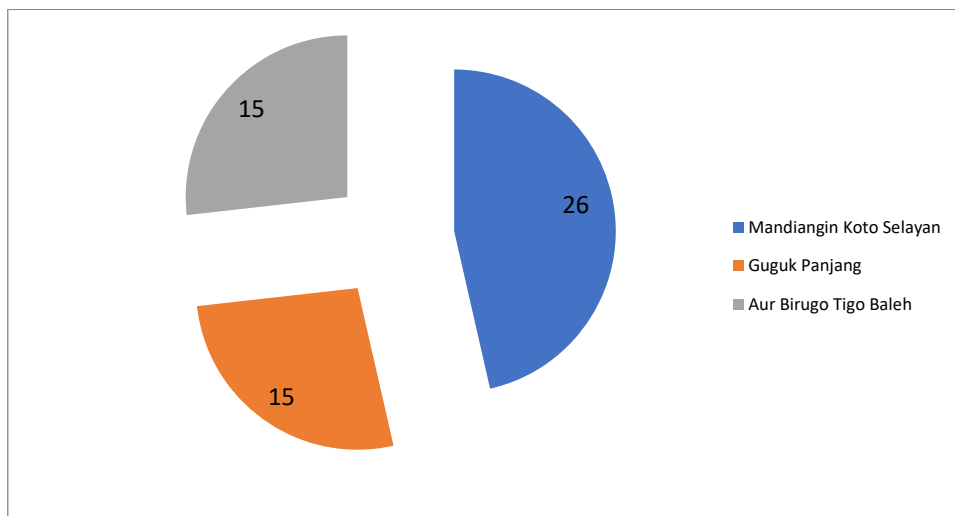
Tabel 2. 87
Festival Seni dan Budaya yang Diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Tanggal	Tempat	Kelompok Seni
1	Festival Randai Se-Sumbar 2019	12 s.d 14 Juli 2019	Pelataran Parkir Pasar Raya Padang	Randai Pamenan Mato Kota Bukittinggi
2	Sumbar Expo 2019	14 s.d 17 November 2019	Lapangan Merdeka Medan	Perguruan Silat Sunua Harimau Lalok Kota Bukittinggi

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel diatas, promosi kebudayaan Kota Bukittinggi khususnya seni tradisional Minangkabau telah dilakukan, namun dengan keterbatasan anggaran pada pemerintah kota, tidak semua event seni budaya yang diadakan dapat diikuti. Namun demikian Pemerintah Kota Bukittinggi tetap memberi perhatian terhadap keberadaan sanggar atau kelompok seni budaya yang ada ditengah masyarakat, dimana hingga saat ini tercatat 56 kelompok seni yang ada di Kota Bukittinggi, yaitu:

Gambar 2. 8
Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2019



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Peran Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal meningkatkan dan mengembangkan seni budaya antara lain memberi bantuan pengadaan peralatan kesenian, pelatihan seni budaya (*panitahan*) dan fasilitasi kegiatan lainnya.

2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kebudayaan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya,

struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya

Upaya melestarikan benda cagar budaya dan situs yang ada baik bersifat fisik (*tangible*) maupun non fisik (*Untangible*) diawali dengan pendataan benda cagar budaya berupa pendokumentasian (tulisan dan gambar), dilanjutkan dengan pendaftaran, penetapan, serta zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Sebagai upaya untuk melestarikan, melindungi, memelihara dan memanfaatkan potensi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi, Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi. Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut terdapat 42 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 88
Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
1.	SMU Negeri 2 Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 5 Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
2.	Bangunan Kantor Disdikbud Kota Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 9 Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
3.	Komplek Kantor Polres Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 23 Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
4.	Denzibang 5/1 Bukit Barisan	Jl. Sudirman Kelurahan Birugo Kecamatan	Bangunan Cagar

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
		ABTB Bukittinggi	Budaya
5.	Komplek Kantor Kodim 03/04 Agam	Jl. Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
6.	Tugu Peringatan Perang Kamang Mangopoh	Jl. Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
7.	Bangunan SMP 1	Jl. Sudirman No 1 Kelurahan Bukit Cangang Kayu ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
8.	Gereja Katolik	Jl. Sudirman Kelurahan Bukit Cangang Kayu ramang Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
9.	Rumah Bekas Kepala Stasiun	Jl. M.Syafei No. 4 Kelurahan Bukit Cangang kayu ramang Kecamatan Guguak panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
10.	Gereja Protestan	Jl. M Syafei No 12 Kelurahan tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
11.	Villa Oepang-Oepang	Jl. Sudirman No 11 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
12.	Studio Foto Agam	Jl. Sudirman No 10 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
13.	Hotel Centrum	Jl. Sudirman No 75 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
14.	Istana Bung Hatta	Jl. Istana No. 1 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
15.	Jam Gadang	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
16.	Toko Sulaman Silungkang	Jl. Panorama No 5 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
17.	SD Negeri 14 Bukit Cangang	Jl. Panorama No. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
18.	Wisma Anggrek	Jl. Panorama No. 16 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
19.	Wisma Cipta Sari	Jl. Panorama No 20 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
20.	Lobang Jepang	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
21.	Rumah Keluarga Amiroeddin	Jl. Panorama No. 6 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
22.	Villa Merdeka	Jl. Dr. A. Rivai No 20 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
23.	Rumah Dinas Wakil Walikota (Sekarang Rumah Dinas Sekdako)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
24.	Makam Tuangku Syech Imam Jirek	Jl. Haji Miskin Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan	Struktur Cagar Budaya

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
		Bukittinggi	
25.	LKAAM Agam	Jl. Veteran No 96 Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
26.	SMP 4	Jl. Dr.A.Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
27.	Benteng Fort de Kock	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
28.	Toko Souvenir (CK Center)	Jl. A. Yani No 85 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
29.	Eks Bank BNI 46 Bukittinggi (rumah kepala BNI)	Jl. A. Yani No 128 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
30.	Cerobong Asap	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
31.	Mesjid Surau Gadang (Masjid Jami'/ bangunan asli tidak ada lagi)	Jl. H. Miskin Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
32.	Rumah Gadang	Jl. Ipuh Mandiangin No 61 A Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
33.	Rumah Tinggal	Jl. Mandiangin No 22 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
34.	Rumah Tinggal	Jl. Mandiangin No 38 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
35.	Rumah Tinggal	Jl. Veteran No 97 A Kelurahan Benteng Pasar atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
36.	Rumah Tinggal	Jl. Dr. A. Rivai No 8 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
37.	Rumah Tinggal	Jl. Dr. A. Rivai No 40/42 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
38.	Rumah/Salon	Jl. Panorama No 8 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
39.	Rumah Keluarga Dr. Erman (RS. Madina)	Jl. M Syafe'i Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
40.	Lembaga Pemasarakatan Bukittinggi	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
41.	Rumah Kelahiran Bung Hatta	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
42.	Batu Kurai Limo Jorong	Jl. Kurai XIII Kelurahan Parit Antang Kecamatan ABTB Bukittinggi	Benda Cagar Budaya

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

3) Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Revitalisasi (menghidupkan) karya budaya merupakan proses secara sistemik dan metodologi untuk menggiatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman. Revitalisasi karya budaya merupakan suatu pekerjaan yang bukan sekedar menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestarikannya, melainkan bahwa kearifan lokal yang tersimpan digunakan sebagai pencerah dalam mendampingi dan mewarnai karakter bangsa.

Inventarisasi (pendataan, pencatatan dan pelaporan) karya budaya perlu dilakukan guna mencegah hilangnya warisan budaya atau mengalami klaim orang lain karena tidak dihargai di rumah sendiri. Dengan adanya inventarisasi diharapkan warisan budaya bisa terdokumentasikan dengan baik dan bisa menjadi sumber pengetahuan di masa yang akan datang, dengan adanya inventarisasi ini juga diharapkan mampu mencegah hilangnya nilai-nilai budaya oleh gelombang globalisasi yang semakin hebat.

Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 89
Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Asal
1	Randai Pamenan Mato	Binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
2	Amril	Pelaku Seni (silek)
3	Hendri Adek	Pelaku Seni (silek)
4	Ramli	Pelaku Seni (silek)
5	Sofyan Nadar	Pelaku Seni (silek)
6	Hendra	Pelaku Seni (silek)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari data diatas terlihat jumlah karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi pada tahun 2019 adalah 6 (enam) buah, yang merupakan karya seni dari anak bangsa yang merupakan pelaku seni di Kota Bukittinggi.

5) Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 90
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
1	SMU N 2 BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 5 kelurahan sapiran kecamatan ABTB Bukittinggi	SMU N 2 Bukittinggi (sekolah Rajo) didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tanggal 1 Maret 1873, Sekolah Rajo dipindahkan ke gedung baru yaitu yang menjadi Gedung SMU 2 Bukittinggi, Direktur pertama Sekolah Rajo bernama G.Van der Wijk yang kemudian diganti oleh J.Van der Toorn hingga tahun 1895. Adapun staf pengajar dari bangsa Indonesia yang paling terkenal adalah guru Nawawi St. Makmur (1859-1928) Sekolah Rajo pernah ditutup pada tahun 1935 dan kemudian setelah kemerdekaan diaktifkan kembali dengan berbagai perubahan nama. Tahun 1946 didirikan Sekolah Menengah Tinggi (SMT) tahun 1950 diubah menjadi SMA I B dan SMA II C, tahun 1960 SMA IIC dipecah menjadi SMA IIC dan SMA A, dan tahun 1962, SMA II C diubah menjadi SMA 2 bukittinggi. Terakhir, perubahan nama terjadi tahun 1965 dari SMA 2 Bukittinggi menjadi SMU 2 Bukittinggi. Berdasarkan hasil pemutakhiran tahun 2016, telah terjadi perubahan nama menjadi SMA 2 Bukittinggi.
2	BANGUNAN KANTOR DISDIKBUD KOTA BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 9 kelurahan belakang balok, kecamatan ABTB Bukittinggi	Pertama kali didirikan gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal Kepala Sekolah Kweekschool. Pasca kemerdekaan, sebelum menjadi Kantor Dikbud, bangunan ini berturut-turut menjadi Kantor DPRD, Kantor Pajak, dan IKIP Bahasa Inggris dan Arab (sebelum dipindahkan ke Padang). Tahun 2017 gedung ini dipakai menjadi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, dimana sebelumnya merupakan Dinas Pendidikan
3	JAM GADANG	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat oembangunan Jam Gadan g ini todak diketahui dengan pasti. Hanya saja jam yang dipajang pada bangunan ini dibuat pada tahun 1926. Jam tersebut ditangan dari Rotterdam, Belanda., tetapi jamnya sendiri merupakan buatan Jerman. Hal ini dapat dilihat pada label kertas yang terempel di lemari pengaman komponen jam yang berbunyi : "Abs.B.Vortmann, Turmuhrenfabrik I.W.Germany". Kemudian pada roda gigi jam terdapat inskripsi: "B.Vortman, Recklinghausen - 1926". Sekarang Kompleks Jam Gadang ini dipakai sebagai tempat wisata. Hasil Pemutakhiran terakhir, Ja, Gadang baru di cat ulang, sebelumnya di cat terakhir tahun 2010 dan penambahan CCTV oleh Pemerintah Kota Bukittinggi
4	SD N 14 BUKIT CANGANG	Jl. Panorama no. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat gedung ini tidak diketahui dengan pasti. Sampai sekarang gedung ini masih dipakai sebagai sekolah (SD 14). Hasil pemutakhiran terbaru 2016 SD ini berubah nama menjadi SD 07 Teladan
5	LOBANG JEPANG	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan	Ini merupakan terowongan buatan yang berfungsi sebagai tempat pertahanan para tantara Jepang. Dibangun pada tahun 1943 atas perintah Komandan Tentara Pertahanan

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
		Guguak Panjang Bukittinggi	Sumatera, Jenderal Watanabe. Para pekerjanya kebanyakan didatangkan dari Jawa yang dibawa Jepang untuk bekerja secara paksa membuat terowongan sepanjang 1.470m dalam waktu yang cukup singkat, sehingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Untuk mengenang para pekerja paksa ini, di depan pintu masuk telah digambarkan dalam bentuk relief mengenai situasi pembuatan terowongan pada masa itu. Lobang Jepang ini berfungsi sebagai tempat wisata.
6	RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA (SEKARANG RUMAH DINAS SEKDAKO)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Rumah Dinas Peternakan terletak di seberang Rumah Sakit Achmad Mochtar atau sebelah kanan Gedung RRI lama dengan bangunan yang terbuat dari tembok dan beratap seng. Temboknya memberi kesan yang kokoh dan kuat karena terbuat dari bata-bata berukuran relatif besar. Di depan pintu masuk dihubungkan dengan sebuah tangga beton. Kondisi rumah cukup terawat. Saat ini bangunan tersebut mengalami perubahan renovasi total sehingga bentuk aslinya sudah tidak nampak lagi.
7	SMP 4	Jl. Dr. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat pembangunan gedung ini untuk pertama kalinya tidak diketahui dengan pasti. Keterangan yang didapat dari kepala sekolah menyebutkan bahwa gedung ini pada tahun 1945 bangunan ini dipakai sebagai sekolah rendah atau MULO. Setelah MULO dibubarkan kemudian pada tahun berikutnya beralih fungsi sebagai tempat percetakan "Oeang Republik Indonesia (ORI)". Pada tahun 1949 bangunan di lokasi ini hancur, tetapi tahun 1950 dibangun kembali dan sejak saat itu berfungsi sebagai SMP II Bukittinggi. Selanjutnya, sejak tahun 1997 bangunan SMP 2 berubah menjadi SMP 3 dan SMP 4 sampai sekarang, sedangkan SMP 2 pindah ke tempat yang lain. Dan sekarang menjadi SMP 4.
8	BENTENG FORT DE KOCK	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Benteng ini dibangun pada tahun 1830 oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan maksud sebagai pertahanan antara Belanda terhadap perlawanan rakyat yang dimonitori oleh Tuanku Imam Bonjol. Sekarang tempat ini dipakai sebagai tempat wisata salah satu bagian dari kebun binatang Kota Bukittinggi.
9	CEROBONG ASAP	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan ini dibangun pada tahun 1928 dan berfungsi sebagai tempat pembakaran sampah. Pada saat pemerintahan kolonial jepang (Takekoshi) digunakan untuk pembakaran bata
10	RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Rumah ini merupakan tempat kelahiran Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator RI. Adapun riwayat pembangunannya belum diketahui. Sekarang bangunan ini berfungsi sebagai tempat wisata (museum)
11	KOTAK SURAT / BRIEVENBUS	Jl. Sudirman Kantor Pos Kota Bukittinggi	Benda ini ditetapkan melalui SK Walikota pada tahun 2019. Benda ini berupa kotak surat berbahan besi yang didatangkan langsung dari Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Benda ini berjumlah 2 (dua) buah. Saat ini tidak dimanfaatkan lagi, tetapi masih berada di lokus Kantor pos.

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
12	MERIAM	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi dan Taman Marga Satwa da Budaya Kinantan	Benda Meriam yang ditetapkan berjumlah 9 buah. 8 buah Meriam berada di Benteng de Kock 1 buah Meriam berada di TMSBK

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Terlihat ada 12 buah Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, dan menjadi aset yang harus selalu dijaga dalam rangka pelestarian benda-benda budaya dan meupakan juga sebagai sarana daya tarik wisata.

p. Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2015-2019 di Kota Bukittinggi tergambar pada beberapa indikator yaitu Jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan serta koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Indikator tersebut digambarkan sebagai berikut:

1) Jumlah perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perkembangan jumlah perpustakaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 termasuk perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 91
Jumlah Perpustakaan Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pusat)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah	*)	185	185	136	136
3.	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemerintah Daerah	*)	49	52	103	103
Total Perpustakaan (1+2)		1	235	238	240	240

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka kota Bukittinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

*) Data tidak tersedia

Kota Bukittinggi mempunyai 1 (satu) Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi. Perpustakaan ini baru membuka pelayanan pengunjung mulai pada tahun 2015. Disamping itu juga terdapat 1 (satu) buah perpustakaan milik pemerintah pusat, yakni UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (PPBH). Aset tersebut murni adalah milik pemerintah pusat termasuk seluruh karyawannya. Tabulasi perpustakaan ini berasal dari sekolah-sekolah (145), PT (23), organisasi masyarakat (5), kecamatan (3), kelurahan (24), SKPD (24), instansi vertikal (10), BUMN/BUMD (3), pondok pesantren (2) dan 1 perpustakaan Nasional.

Perpustakaan milik Pemerintah Daerah meliputi :

- TK Negeri	2
- SD Negeri	48
- SLTP Negeri	12
- SLTA Negeri	9
- Perguruan Tinggi	3
- Kecamatan	3
- Kelurahan	24
- SKPD	24
- Instansi Vertikal	10
- BUMN/BUMD	1

Bagi masyarakat apakah sebuah perpustakaan milik pemerintah pusat atau tidak, yang penting kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan melalui penyaluran minat baca dapat terfasilitasi melalui sebuah perpustakaan. Tentunya kebutuhan dan budaya minat baca diharapkan tetap meningkat di Kota Bukittinggi.

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

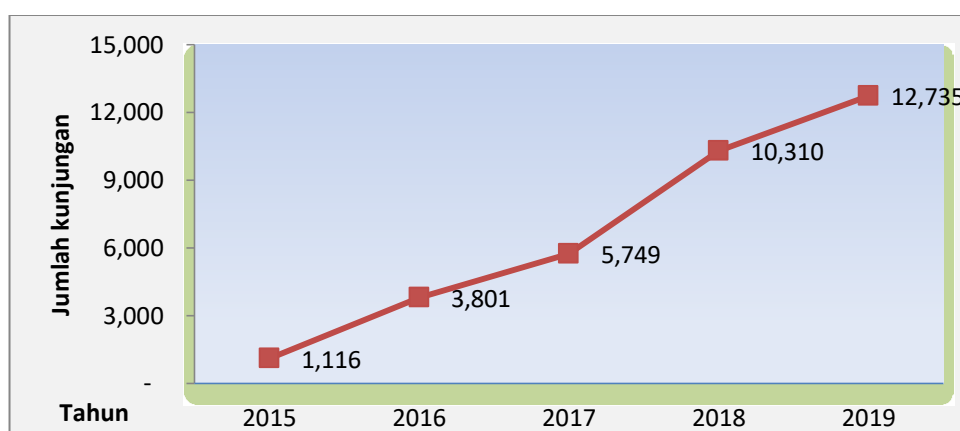
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Bukittinggi hanya mempunyai 1 (satu) perpustakaan daerah yaitu Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan 1 (satu) perpustakaan Nasional, yaitu Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Perpustakaan tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan minat baca bagi masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Perpustakaan Umum Daerah masih dalam kondisi keterbatasan, yaitu keterbatasan koleksi dan keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu belum adanya gedung yang representatif untuk sebuah Perpustakaan Daerah. Namun Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang merupakan milik pemerintah pusat sudah sangat representatif, pada lingkungan yang asri dan nyaman, sehingga memberi ketenangan dan konsentrasi pengunjung untuk lebih fokus membaca.

Semenjak tahun 2012, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah diserahkan kepada

pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Nasional Bung Hatta. Pemerintah Kota Bukittinggi mulai merintis membuat perpustakaan daerah dimulai dengan persiapan dan pengelolaan sampai tahun 2014. Pada tahun 2015 baru secara resmi membuka pelayanan untuk perpustakaan daerah yang dibuka untuk umum.

Kalau dilihat dari jumlah pengunjung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan pada Tahun 2019, ini dapat menggambarkan semakin tingginya minat baca warga masyarakat bukittinggi, yang dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2. 29
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015 s.d. 2019
Kota Bukittinggi



jumlah pengunjung pertahun dan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 92
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	1.116	3.801	5.749	10.310	12.735
2.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	122.621	124.715	126.804	128.783	130.773
3.	Persentase kunjungan dibandingkan populasi	0,91	3,05	4,53	8,00	9,74

Sumber: BPS, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

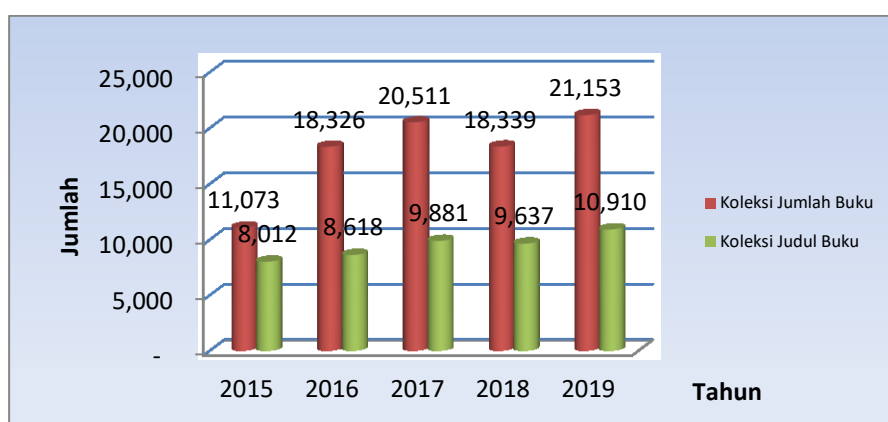
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari sejak dibukanya perpustakaan daerah milik Pemerintah Kota Bukittinggi, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 jumlah pengunjung perpustakaan meningkat dari 10.310 kunjungan menjadi 12.735 kunjungan. Angka ini menunjukkan semakin meningkatnya minat literasi masyarakat Kota Bukittinggi. Akan tetapi kalau dilihat dari populasi yang harus dilayani baru 9,74% yang memiliki minat baca (minat literasi). Jadi masih sebagian kecil saja

penduduk Kota Bukittinggi yang memanfaatkan perpustakaan daerah ini. Kondisi ini terjadi disamping karena kurangnya perpustakaan yang representatif juga disebabkan oleh pengaruh kemajuan teknologi, dimana semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses melalui internet. Untuk itu agar jumlah kunjungan dapat terus ditingkatkan, keberadaan perpustakaan yang nyaman dan menyenangkan serta kecukupan koleksi buku tetap menjadi perhatian.

3) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Grafik 2. 30
Koleksi Jumlah dan Judul Buku Tahun 2015 s.d 2019



Tabel 2. 93
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	8.012	8.618	9.881	9.637	10.910
2.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	11.073	18.326	20.511	18.339	21.153

Sumber: Dinas Perpustakaan dan kearsipan

Dari tabel di atas terlihat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, terjadi peningkatan koleksi baik judul buku maupun jumlah buku. Dengan meningkatkan koleksi buku akan menambah minat baca seseorang, karena semakin banyaknya pilihan buku yang tersedia.

4) Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Rasio Perpustakaan Persatuan Pendudukan merupakan jumlah perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Adapun di Kota Bukittinggi rasio perpustakaan Per Satuan Penduduk dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 94
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah perpustakaan	*)	235	238	240	240
2.	Jumlah penduduk	122.621	124.715	126.804	128.783	130.773
3.	Rasio	0,082	0,18	0,18	0,19	0,19

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
*) data tidak diketahui

Dari data diatas, terlihat jumlah rasio jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk dari tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan yang sangat kecil dan bahkan pada tahun 2019 tidak ada perubahan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi oleh pertumbuhan jumlah perpustakaan. Disamping itu kemajuan teknologi juga telah mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap perpustakaan konvensional semakin berkurang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan melalui internet. Untuk itu kedepan Pemerintah Daerah hendaknya dapat mengembangkan perpustakaan kearah elektronik dan digital tanpa mengurangi perhatian pada perpustakaan konvensional.

5) Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun adalah :

Tabel 2. 95
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata pengunjung pertahun	3.750	3.801	5.749	10.310	12.735

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari data tersebut menggambarkan bahwa dari tahun ketahun memang terjadi peningkatan dalam jumlah pengunjung perpustakaan. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum signifikan dan

masih berada di 23,52%. Pada umumnya pengunjung yang datang adalah siswa-siswa sekolah yang membutuhkan referensi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Jumlah ini masih potensial untuk ditingkatkan dengan menjadikan perpustakaan menjadi tempat representatif dan menyenangkan.

1) Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai sangat menentukan kualitas pada perpustakaan, semakin banyak jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai maka semakin baik kualitas layanan perpustakaan dan akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung yang datang pada perpustakaan. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 96
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	7	8	9	8	7

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai bervariasi dari tahun ketahun. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak adanya pengangkatan baru pustakawan, tenaga teknis dan penilai sehingga pada tahun 2019 justru mengalami penurunan. Hal ini perlu komitmen bersama agar minat dan pengangkatan pada jabatan fungsional pustakawan, tenaga teknis dan penilai juga ikut meningkat.

Berdasarkan Standard Nasional Perpustakaan, untuk pustakawan dibutuhkan minimal 1 orang per 15.000 penduduk. Dengan demikian jika jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 130.773 pada tahun 2019, maka jumlah ideal pustakawan adalah sebanyak 9 orang. Dengan demikian masih terdapat kekurangan 2 orang pustakawan lagi untuk mencapai jumlah yang ideal tersebut.

q. Kearsipan

Kearsipan adalah suatu proses pengaturan penyimpanan bahan-bahan atau warkat secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan. Aktvitasnya meliputi penerimaan, pencatatan penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip.

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Bukittinggi dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 97
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	2	4	7	13	14
2.	Jumlah perangkat daerah	29	29	29	29	28
3.	Persentase	6,90	13,79	24,14	44,80	50,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tahun 2018 terjadi peningkatan tajam dalam jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku, sehingga dalam hal persentase dapat digambarkan bahwa telah terjadi peningkatan dan upaya dalam memperbaiki sistem kearsipan pada perangkat daerah di Kota Bukittinggi. Persentase ini terus meningkat sampai dengan tahun 2019.

1) Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Pengelola Kearsipan yang kompeten akan dapat meningkatkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien. Kalau dilihat peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 98
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Tahun 2015 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, belum terlihat peningkatan dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia pengelola kearsipan. Hal ini mengakibatkan tidak terjadinya peningkatan signifikan dalam kualitas dan pelayanan pengelolaan kearsipan di Kota Bukittinggi. Hal ini

terjadi disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan pada APBD Kota Bukittinggi.

B. Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mempunyai *multiflier effect* tinggi dalam pembangunan perekonomian. Selain berdampak positif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Dewasa ini banyak daerah yang menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk Kota Bukittinggi.

Kunjungan Wisata

Kota Bukittinggi yang dianugerahi sang pencipta dengan pesona alam dan iklim yang sejuk serta didukung dengan pengembangan berbagai destinasi wisata telah bertopang kepada sektor ini dalam pembangunan daerahnya. Hal ini disebabkan juga karena Kota Bukittinggi tidak memiliki sumber kekayaan alam berupa pertambangan dan juga terbatasnya lahan pertanian.

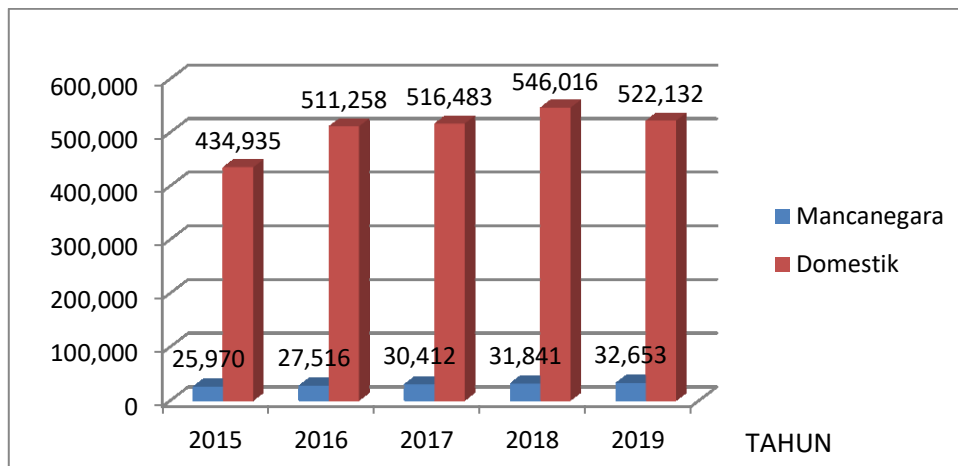
Salah satu indikator guna melihat kinerja pembangunan Kota Bukittinggi di bidang pariwisata adalah kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Kota Bukittinggi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata ke Kota Bukittinggi berjumlah 584.765 wisatawan yang terdiri dari 32.653 wisatawan mancanegara dan 522.132 wisatawan domestik. Meningkat 1,01 % dari tahun 2018, dimana jumlah kunjungan wisatanya sebanyak 577.857. perkembangan jumlah kunjungan wisata tahun 2015 s.d. 2019 ke Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 99
Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Wisatawan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Mancanegara	25.970	27.516	30.412	31.841	32.653
2.	Domestik	434.935	511.258	516.483	546.016	522.132
JUMLAH		460.905	538.774	546.895	577.857	584.785

Sumber: Bukittinggi Dalam angka 2019 & Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga

Grafik 2.31
Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019



Dari grafik dapat dilihat kunjungan wisatawan ke Bukittinggi lebih didominasi oleh wisatawan domestik. Untuk jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sebanyak 812 orang atau 2,55 % sedangkan jumlah wisatawan domestik menurun cukup besar yaitu 4,37 % atau sebanyak 23.884 orang, hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 terjadi kenaikan harga tiket pesawat domestik yang cukup signifikan dan berdampak besar terhadap pariwisata Sumatera Barat. Target 1,6 juta wisatawan ke Sumatera Barat bertepatan dengan libur lebaran tidak tercapai. Mahalnya harga tiket pesawat domestik membuat para perantau berpikir panjang untuk pulang kampung dan merayakan libur lebaran. Hal ini juga dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), dimana jumlah penumpang angkutan udara domestik sepanjang Kuartal I-2019 anjlok hingga 17,66 % dibanding Kuartal I-2018.

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi dilihat atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan keberadaan hotel dan restoran serta sarana pendukung lainnya di Kota Bukittinggi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2019 telah mencapai 6,04% untuk PDRB atas dasar Harga Berlaku dan 4,62% untuk PDRB atas dasar Harga Konstan. Perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi kurun waktu lima tahun terakhir terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 100
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Tahun 2015 s.d. 2019

No	Kontribusi Sektor Pariwisata	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4,74	5,71	5,82	5,98	6,04
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4,53	4,56	4,56	4,58	4,62

Sumber: PDRB Bukittinggi 2015-2019.

Dari tabel terlihat Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi baik Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,06% dan 0,04%, peningkatan ini menggambarkan bahwa upaya pengembangan sector pariwisata yang oleh Pemerintah Kota Bukittinggi telah memberikan dampak positif terhadap PRDB. Peningkatan infrastruktur penunjang kepariwisataan terus diupayakan, sembari melakukan pembenahan sarana dan prasarana pada objek wisata, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bukittinggi , melakukan promosi dan pemasaran baik ke dalam maupun luar negeri. Upaya-upaya tersebut terus dilakukan agar pengembangan pariwisata memberikan *multiflier effect* bagi sektor-sektor lainnya, tidak hanya pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, tapi juga berpengaruh pada sektor Perdagangan Besar, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi, dan sektor jasa lainnya.

2. Pertanian

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan.

1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sektor pertanian tidak terlalu berperan di Kota Bukittinggi, hal ini sesuai dengan karakteristik kota yang pemanfaatan lahannya lebih mengarah kepada jasa usaha dan permukiman. Produksi pertanian di Kota Bukittinggi didominasi oleh produksi padi, ketela rambat, ketela pohon dan jagung yang merupakan bahan pangan utama lokal lainnya selain padi. Produktivitas padi Kota Bukittinggi setiap tahunnya rata-rata masih di atas 60 kw/ha. Pada tahun 2018, dengan luas area tanaman 818 ha dapat memproduksi padi sebanyak 5.515,8 ton atau dengan tingkat produktivitas 66,06 kw/ha. Produktivitas tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,39 Kw/Ha dibandingkan tahun 2018, dengan tingkat produktivitasnya 65,67 kw/ha dan hasil produksi padi 5.450 ton dengan luas area tanaman 850,5 ha. Perkembangan produktivitas padi Kota Bukittinggi tahun 2015 s/d 2019 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 101
Produktivitas Padi Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

No	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2019	5266,31	805,15	65,41
2.	2018	5.515,8	818	66,06
3.	2017	5.480,46	807	67,66
4.	2016	5.227	809	65,33
5.	2015	4.200	633	66,7

Sumber: Dinas Pertanian dan pangan 2019

Menurunnya produktivitas padi pada Tahun 2019 disebabkan oleh factor cuaca (musim kemarau) yang menyebabkan lahan mengalami kekeringan dan gagal panen. Factor lainnya adalah masa tanam yang terlambat. Selain itu lahan sawah yang pada mulanya ditanami padi setiap tahun banyak yang beralih fungsi untuk keperluan sektor non pertanian, seperti perumahan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengatasi masalah ini salah satunya dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani/ gapoktan se Kota Bukittinggi. Selain itu upaya untuk mengatasi masalah irigasi, maka pada tahun 2019 telah dibentuk Komisi Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang akan membantu pemerintah merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi di Kota Bukittinggi. Sektor infrastruktur saja tidak cukup untuk meningkatkan nilai kerja sistem irigasi, perlu peran kelembagaan yang cukup signifikan sebagai motor penggerak berfungsinya pengelolaan sistem irigasi.

Produktivitas Jagung di Kota Bukittinggi pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2018, produktivitas tanaman 37,74 kw/ha dari luas area tanaman seluas 41,9 ha dengan produksi tanaman sebanyak 37,74 ton sedangkan tahun 2019 produktivitas meningkat sebesar 19,06 Kw/Ha, peningkatan ini juga diiringi dengan penambahan luas

area tanam dari 41,9 Ha menjadi 47 Ha atau meningkat sebesar 12,17% sedangkan produksi meningkat 50,50%. Perluasan area diarahkan pada lahan-lahan potensial seperti lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk pertanian. Dan hal tersebut membuahkan hasil dengan meningkatnya produktivitas jagung pada tahun 2019. Perkembangan produktivitas jagung tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 102
Produktivitas Jagung Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2019	232,88	47	56,8
2.	2018	37,4	41,9	37,74
3.	2017	73,61	38	43,30
4.	2016	77	32	45,38
5.	2015	104,84	50	67

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan 2019

Produktivitas Ketela Pohon di Kota Bukittinggi Tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, dimana pada tahun 2018 dengan luas area tanaman 14 Ha hanya mampu memproduksi sebanyak 541,45 Ton atau dengan tingkat produktivitas 416,5 Kw/Ha. Sedangkan pada tahun 2019 dengan luas area tanaman seluas 13 Ha, produktivitas Ketela Pohon meningkat sebesar 96,05 % menjadi 416,5 Kw/Ha dengan jumlah produksi sebanyak 541,45 Ton. Sama halnya dengan produktivitas Ketela Rambat bahwa peningkatan ini menandakan adanya perbaikan kualitas bibit, cara tanam ataupun kualitas tanah/area tanam. Berikut perkembangan produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi tahun 2015 s.d. 2019:

Tabel 2. 103
Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

No,	Tahun	Produksi Ketela Rambat (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2019	744	27	310
2.	2018	789	28	263
3.	2017	1.008,66	31	272,61
4.	2016	1.355	44	307,95
5.	2015	907,20	39	245,19

sumber: Dinas Pertanian dan Pangan 2019

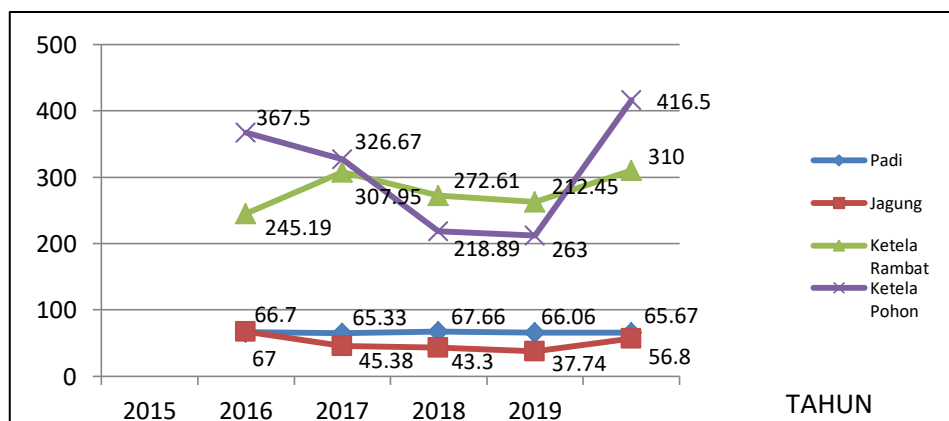
Produktivitas Ketela Pohon di Kota Bukittinggi Tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, dimana pada tahun 2018 dengan luas area tanaman 14 Ha hanya mampu memproduksi sebanyak 541,45 Ton atau dengan tingkat produktivitas 416,5 Kw/Ha. Sedangkan pada tahun 2019 dengan luas area tanaman seluas 13 Ha, produktivitas Ketela Pohon meningkat sebesar 96,05 % menjadi 416,5 Kw/Ha dengan jumlah produksi sebanyak 541,45 Ton. Sama halnya dengan produktivitas Ketela Rambat bahwa peningkatan ini menandakan adanya perbaikan kualitas bibit, cara tanam ataupun kualitas tanah/area tanam. Berikut perkembangan produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi tahun 2015 s.d. 2019:

Tabel 2. 104
Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

No,	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2019	541,45	13	416,5
2.	2018	318,7	14	212,45
3.	2017	284,56	13	218,89
4.	2016	784	12	326,67
5.	2015	367,50	14	367,50

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan 2019

Grafik 2. 32
Produktivitas Bahan Pangan Lokal Kota Bukittinggi (Kw/ Ha) Tahun 2015 -2019



Dari grafik terlihat bahwa Produktivitas Padi di Kota Bukittinggi adalah paling rendah dibanding produktivitas Bahan Pangan lainnya. Sedangkan produktivitas tertinggi adalah Ketela Pohon dengan produksi lebih 6 kali lipat dibanding produksi padi, diikuti dengan produktivitas Ketela Rambat dan Jagung. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah kota untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan produktivitas padi di Kota Bukittinggi minimal untuk memenuhi kebutuhan warga kota dan ketersediaan lahan bekerja bagi petani kita.

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bukittinggi baik dilihat melalui atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini merupakan karakteristik sebuah kota, dimana struktur perekonomiannya tidak lagi bertopang kepada kelompok primer. Penurunan ini telah tergambar dari produktivitas padi yang cenderung turun setiap tahunnya sebagaimana pembahasan di atas.

Sektor Pertanian adalah salah satu sektor atau lapangan usaha dimana didalamnya terdapat penggunaan sumberdaya hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan, bahan baku industri dan sumber energi dimana di dalamnya meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi tahun 2015 s.d. 2019 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 105
Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015 s.d 2019

No	Kategori	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,42	1,37	1,30	1,24	1,11

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019

Dari Tabel di atas terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2015 masih berkontribusi sebesar 1,42%, seiring bertambahnya tahun terus menurun sampai pada tahun 2019 hanya berkontribusi sebesar 1,11%. Dibanding tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0,13%.

Sejalan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan pun mengalami penurunan. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian ini hanya 1,37%, dimana dalam kurun waktu lima tahun, maka pada tahun 2019 kontribusi sektor pertanian menurun menjadi 1,27%. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 106
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2015 s.d. 2019

No	Sub Sektor	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,37	1,31	1,31	1,31	1,27

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2019

Dari table di atas terlihat bahwa terjadi penurunan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) pada tahun 2019 sebesar 0,1% dibanding tahun 2018. Penurunan kontribusi sector ini terhadap PDRB Kota Bukittinggi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah infrastruktur pendukung pertanian yang kurang memadai, penerapan berbagai jenis teknologi yang belum optimal atau terbatasnya ketersediaan SDM Pertanian berkualitas yang bisa berperan sebagai transformator. Akibatnya menghambat minat investor untuk mengembangkan industry pengolahan hasil pertanian. Salah satu kebijakan keluar yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan industrialisasi sektor pertanian, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

3. Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan Kota Bukittinggi dalam pembangunan daerah. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi ditopang dengan keberadaan pasar simpang aur, pasar atas, dan pasar bawah. Pasar Simpang Aur Kuning merupakan pasar grosir terbesar di Sumatera sehingga pasar simpang Aur Kuning disebut juga sebagai Tanah Abang II. Hal ini menyebabkan Bukittinggi bukan saja sebagai sentral perdagangan yang berskala lokal, tapi juga regional.

Sektor Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara produsen dan konsumen yang meliputi kegiatan membeli dan menjual barang baru maupun bekas untuk penyaluran atau

Pendistribusian tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi didalamnya mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara produsen dan konsumen yang meliputi kegiatan membeli dan menjual barang baru maupun bekas untuk penyaluran atau Pendistribusian tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Sektor perdagangan Kota

Bukittinggi didalamnya mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

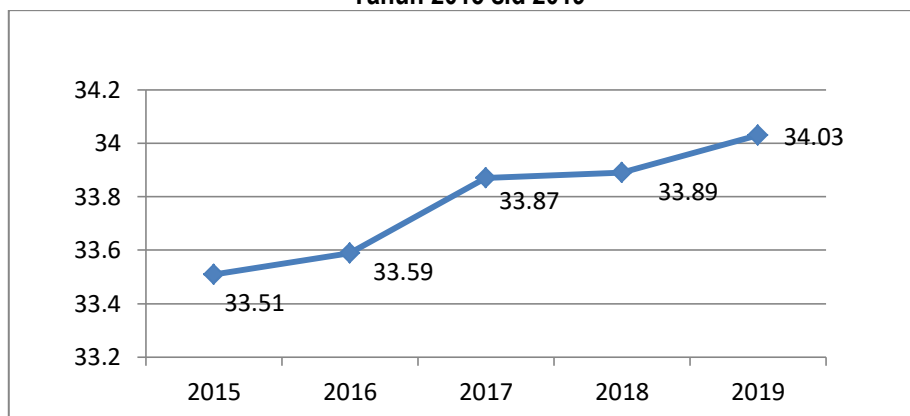
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB sangat dominan dimana pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 33,89% naik sebesar 0,14% pada tahun 2019 menjadi 34,03%. Meningkatnya kontribusi sector perdagangan ini maka secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 2. 107
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s.d. 2019

No	Sub Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1,	Perdagangan Besar dan Eceran	33,51	33,59	33,87	33,89	34,03

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2020

Grafik 2.33
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015 s.d 2019



4. Perindustrian

Industri menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industry, sedangkan perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Untuk mengukur kinerja unsur perindustrian, dapat dilihat dari kontribusi sector industry pada kota Bukittinggi, yang berasal dari Industri Pengolahan. Potensi komoditi industri pengolahan yang ada di Kota Bukittinggi adalah Industri pakaian jadi dari tekstil, Industri Bordir/Sulaman, Industri Kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture, Industri kue-kue basah, Industri kerupuk dan sejenisnya, Industri

Roti dan sejenisnya. Serta industry pengolahan the dan kopi.

Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB yang dilihat melalui peranan sektor industri pengolahan mempunyai kecenderungan penurunan setiap tahunnya baik dilihat melalui atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku pada tahun 2019 sebesar 5,03% terjadi penurunan 1,77% dalam kurun waktu lima tahun, dimana pada tahun 2015 kontribusinya masih 6,80%. Berikut perkembangan peranan sektor perindustrian terhadap PDRB dari tahun 2015 s.d. 2019:

Tabel 2. 108
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Industri Pengolahan	6,80	6,56	6,08	5,66	5,03

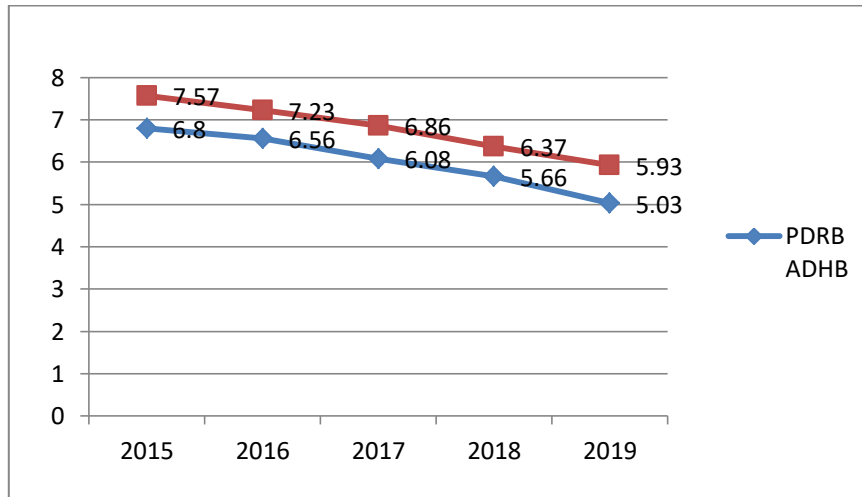
Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tabel 2. 109
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Industri Pengolahan	7,57	7,23	6,86	6,37	5,93

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2020

Grafik 2.34
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar
Harga Konstan (2010) Kota Bukittinggi Tahun 2015 -2019



Dari grafik terlihat jelas bahwa kontribusi Perindustrian Kota Bukittinggi terhadap PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan maupun Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2015 -2019 cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah melemahnya nilai rupiah yang menyebabkan kenaikan biaya produksi serta kenaikan suku bunga kredit. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kontribusi sector perindustrian ini antara lain dengan meningkatkan daya saing dan mempersiapkan produk unggulan, meningkatkan kapasitas produsen untuk ekspor, melakukan pendampingan promosi baik dalam dan luar negeri serta memperkuat jaringan kerjasama dengan daerah Kab/Kota lain, dan negara tetangga. Hal ini mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu, karena aktivitas industry memberi efek ganda yang luas bagi penyerapan tenaga kerja local dan dapat memacu dan mendorong pembangunan sektor-sektor lainnya, misalkan sektor pertanian dan sektor jasa.

Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

Terdapat tujuh indikator penunjang urusan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi. Pada tahun 2018 dilakukan revisi terhadap dokumen perencanaan RPJPD yang yang pada tahun 2019 ini akan ditetapkan dengan Perda, RPJMD yang ditetapkan Perda/Perkada, RKPD yang ditetapkan Perkada, Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD. Dan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Berikut tabel indikator penunjang urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2. 110
Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019

NO	INDIKATOR	Tahun 2019
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$= \frac{170}{185} \times 100\%$ $= 91,89 \%$
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$= \frac{171}{170} \times 100\%$ $= 100\%$

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi, tahun 2020.

Kota Bukittinggi sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006, dan pada tahun 2018 sedang dilakukan revisi dan direncanakan akan ditetapkan dengan Perda tahun 2019. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017. Adapun perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018.

b. Keuangan

Dalam urusan keuangan terdapat tujuh indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan, Persentase SILPA, Persentase belanja pendidikan, Persentase belanja kesehatan dan Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Bagi hasil kota, Penetapan APBD.

Berikut tabel indikator urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018 :

Tabel 2. 111
Indikator Urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018

No.	Indikator	Tahun 2018
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP (wajar tanpa pengecualian)
2.	Persentase SILPA	11,93%
3.	Persentase belanja pendidikan	21,01%
4.	Persentase belanja kesehatan	11,24%
5.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	62,94%
6.	Bagi hasil kota	2,26
7.	Penetapan APBD	Tepat waktu

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2019

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semenjak tahun 2014. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah siap untuk menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintrah) secara penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, perbendaharaan, pembukuan dan pengelolaan aset.

Dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) menyatakan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kota Bukittinggi memiliki persentase belanja pendidikan sebesar 21,01% yang artinya sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh amandemen keempat UUD 1945.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, pada dasarnya Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut dapat diprioritaskan untuk mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan program strategis dan program nasional. Pada tahun 2018, belanja kesehatan Kota Bukittinggi sudah diatas yang diamanatkan UU kesehatan yaitu sudah 11,24%. Untuk indikator Bagi hasil kota 2,26 dan Penetapan APBD tepat waktu.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai upaya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Adapun rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 112
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 jam	20 jam	20 jam	20 jam	20 jam

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

Dari tabel tersebut di atas, kalau dilihat dari rata-rata pegawai yang masih rata-rata 20 jpl (jam pelajaran) dalam satu tahun yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, namun masih terdapat PNS yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya. Sehingga upaya dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Bukittinggi belum memperlihatkan hasil yang signifikan, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

2) Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal untuk Aparatur Sipil Negeri (ASN) merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kualiatas ASN tersebut. Salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Bukittinggi di Kota Bukittinggi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 113
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tahun 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2019
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	319
2.	Jumlah total ASN	2.644
3.	Persentase	12,07

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

Pada Tahun 2019 sebanyak 319 orang (12,07%) ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kualitas SDM Pegawai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga terbukanya kesempatan Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendidikan formal baik S1 maupun S2 yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi.

3) **Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan PNS. Diklat struktural bagi ASN bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan sikap pegawai dalam melakukan jabatan secara profesional dengan dilandasi oleh etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi dan menciptakan aparatur Negara yang mampu sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 114
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat structural	14	31	35	35	25
2.	Jumlah total jabatan ASN	589	589	595	560	564
3.	Persentase	2,38	5,26	5,88	7,00	7,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural tersebut di atas, adalah yang mengikuti diklat struktural pada tahun tersebut. Dari data tersebut di atas terlihat bahwa persentase pejabat Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural meningkat dari tahun 2015-2018, akan tetapi pada tahun 2019 karena keterbatasan anggaran, ASN yang mengikuti diklat struktural tidak sebanyak tahun sebelumnya.

4) **Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi pemerintah:**

Jabatan pimpinan tinggi adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Jabatan Administrasi adalah Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan Kasubid. dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan erat dengan satu sama lain

dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 115
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah
Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2019

NO	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26	26	26
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	558	558	558
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	999	984	984

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

Dari tabel diatas Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah tidak mengalami peningkatan, tetap berjumlah 26 orang untuk yang eselon 2, sedangkan jumlah jabatan pemangku jabatan fungsional berkurang yang diakibatkan terjadi pension dan perpindahan dari jabatan fungsional ke struktural.

d. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian merupakan sebuah proses penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru atau suatu rumusan yang menunjukkan adanya hasil. Kegiatan penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dibutuhkan disemua kalangan termasuk di pemerintahan karena banyak program strategis daerah ataupun kegiatan yang berskala resiko besar ataupun dampak besar sangat diperlukan kajian atau penelitian.. Banyak pekerjaan pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik di Kota Bukittinggi mempergunakan hasil kajian atau penelitian, dan ini merupakan kebutuhan oleh pemerintah. Tentu pemikiran tersebut tidak terlepas dari pandangan Pemerintah Kota Bukittinggi bahwa penelitian atau kajian mempunyai nilai yang sangat berarti dan penting untuk di pedomani. Setiap tahun pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan kegiatan penelitian dan kajian pada sector-sektor yang dianggap sangat strategis dalam rangka menyusun kebijakan baik secara teknis maupun rekomendasi regulasi yang melahirkan kebijakan walikota. Berikut tabel indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

Tabel 2. 116
Indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019

NO	INDIKATOR	Tahun 2019
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
	Penerapan SIDA :	
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	17,86%
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	20,00%

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi, 2019

e. Pengawasan

Penunjang urusan pengawasan berada pada Inspektorat. Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit kinerja dan keuangan setiap tahun semakin membaik, hal ini menggambarkan upaya SKPD menyajikan pelaksanaan pembangunan juga semakin baik. Disamping itu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 ini adalah bagian penguatan APIP untuk lebih independen, efektif dan optimalisasi dalam mengawasi perangkat daerah. Ada dua indikator yang ada seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 117
Indikator Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2019

NO	INDIKATOR	Tahun 2019
1.	Persentase tindak lanjut temuan	81%
2.	Jumlah Temuan BPK	14 Temuan

Sumber: Inspektorat, 2019

Dari tabel diatas dapat Persentase tindak lanjut temuan yang telah dilakukan yaitu sebesar 81% dan jumlah temuan BPK sebanyak 14 temuan.

f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraannya bertugas melaksanakan fungsi penunjang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat memfasilitasi setiap kebutuhan DPRD Kota Bukittinggi. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam melihat fungsi DPRD pada Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Alat-Alat Kelengkapan Dewan, Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) serta Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan

Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.Selanjutnya tabel Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan adalah :

Tabel 2. 118
Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019

No.	Indikator	Tahun 2019
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
3.	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota, seluruh fungsi dari DPRD Kota Bukittinggi selalu dijalankan dengan baik, mulai dari fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran. Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Untuk Fungsi pembentukan Perda inisiatif DPRD pada tahun 2019 diantaranya :

- 1.Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Kepemudaan
3. Penyandang Disabilitas

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi

dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data yang ada menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB yang diciptakan di Kota Bukittinggi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya sebagian besar produk domestik yang dihasilkan di wilayah Kota Bukittinggi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Tabel 2. 119
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
Kota Bukittinggi 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (juta Rp.)	3,358,039.72	3,644,335.23	3,906,189.75	4,248,963.77	4,676,148.18
b. ADHK (juta Rp.)	2,547,416.35	2,667,154.56	2,812,783.39	2,962,992.28	3,120,626.66
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	54.43	53.73	52.41	53.03	53.75
Rata-rata Konsumsi per Kapita (Ribu Rp.)					
a. ADHB (Ribu Rp.)	27,385.52	29,163.82	31,363.59	32,993.20	35,757.75
b. ADHK 2010 (Ribu Rp.)	20,774.72	21,387.99	22,197.01	23,007.64	23,862.93
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	4.44	4.70	5.18	5.34	5.32
b. Per Kapita	2.63	2.95	3.78	3.65	3.72
Jumlah Penduduk (orang)	122,621.00	124,715.00	126,804.00	128,783.00	130,773.00

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2020 (data di olah)

Data di atas menunjukkan bahwa periode tahun 2015-2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas harga berlaku) maupun harga riil (atas dasar harga Konstan). Pertambahan jumlah penduduk juga menjadi pendorong kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga kenaikan tersebut juga kan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama tahun 2015 – 2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung berfluktuasi dimana posisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 54,43% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 52,41 %. Untuk konsumsi per rumah tangga rata-rata meningkat dari tahun ke tahun baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, dimana pada tahun 2019 setiap rumah tangga menghabiskan dana sekitar 35,75 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya meningkat sekitar 2,8 juta rupiah. Sementara atas dasar harga konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pada kisaran 5 %, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,34%. Dari table juga terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Ketaatan Terhadap RTRW Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 -2030.

Ketaatan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan Pola Ruang yang telah digariskan dalam Perda RTRW di Kota Bukittinggi belum terdata dengan baik namun tindakan kearah penertiban itu sudah dilakukan sejak dari penerbitan Advis Planning sebagai dasar dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan pengawasan yang dilakukan terhadap IMB yang telah diterbitkan serta terhadap bangunan yang dibangun secara liar/belum mengontongi IMB.

Dalam Advis Planning dijelaskan pola ruang lahan yang dimohonkan oleh pemohon berikut intensitas kawasan tersebut sehingga dalam membangun akan meminimalkan penyimpangan pemanfaatan ruang yang akan terjadi. Dari tahun ke tahun permohonan Advis Planning cenderung meningkat, peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketaatannya dalam pemanfaatan ruang sesuai aturan yang berlaku

b. Luas Wilayah Produktif

Luas Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, yang terdiri dari kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan wisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan campuran, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

Sedangkan Wilayah produktif merupakan Wilayah yang didalamnya melakukan proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing, yang terdiri kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Rasio wilayah produktif dan Wilayah Budidaya Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019 , dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2. 120
Rasio Luas Wilayah Produktif dan Luas Seluruh Wilayah Budidaya

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas Wilayah Produktif	998	1016,17	992,63	1.974,88	1.974,88
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	NA	NA	1966,63	1.974,88	1.974,88
	Rasio (1 : 2)	-	-	1: 1,98	1 : 1	1 : 1

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan table diatas, tahun 2018 - 2019 luas wilayah Produktif dan Luas Wilayah Budidaya di Kota Bukittinggi sama, dengan artian luas wilayah budidaya merupakan daerah-daerah produksi dan distribusi. Perhitungan luasan ini mengacu kepada hasil Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota BUKittinggi Tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu variabel yang penting untuk diperhatikan . Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas , maka hal itu mengidenkasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relative tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Bukittinggi. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan social di masyarakat.

Berikut ini merupakan tabel mengenai angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2015 s/d 2019.

Tabel 2. 121
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019

TAHUN	JUMLAH KRIMINAL YANG TERTANGANI
2015	620
2016	516
2017	434
2018	463
2019	275

Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi

Berdasarkan data yang ada, seperti yang tersaji pada table 2.116 terlihat bahwa angka kriminalitas yang terjadi di Kota Bukittinggi bersifat fluktuatif, jumlah kejahatan yang tertangani tahun 2016 menurun menjadi 516 kasus dari 620 kasus di tahun 2015, kembali menurun menjadi 434 kasus di tahun 2017 namun mengalami fluktuasi di tahun 2018 menjadi 463 kasus dan mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 dengan hanya 275 kasus.

Penurunan kriminalitas ini diharapkan mampu meningkatkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat Kota Bukittinggi. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas di daerah yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga Kerja yang berkualitas merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja, menyusun dan

melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya system ketenagakerjaan yang ideal serta memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi dan juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Berikut dapat dilihat perkembangan kelulusan tingkat strata 1 s.d 3 tahun 2014 - 2018:

Tabel 2. 122
Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan S1	8.544	10.063	9.622	10.454	11.394*
2.	Jumlah lulusan S2/S3	978	1.322	893	956	1.091*
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	9.522	11.385	10.515	11.410	12.485*
5.	Jumlah penduduk	122.621	124.715	119.183	121.590	130.773
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	7,77	9,13	8.82	9.38	9,54

Sumber: Dinas PMPTSP 2019* (Data Sementara)
Bukittinggi Dalam Angka 2019

Dari tabel diatas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

b. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Penduduk muda usia dibawah 15 tahun disebut sebagai penduduk yang belum produktif

karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Penduduk usia 65 tahun ke atas juga dianggap sudah tidak produktif lagi. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif. Berikut dapat dilihat rasio ketergantungan Kota Bukittinggi tahun 2015 s.d 2019:

Tabel 2. 123
Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	33.999	34.375	34,710	35,014	35,285
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.557	5.751	5.982	6,244	6,543
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	39.556	40.126	40.692	41,258	41,828
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	83.065	84.589	86.112	87,525	88,945
5.	Rasio Ketergantungan	47,62	47,44	47,25	47,14	47,03

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan Kota Bukittinggi dari tahun 2015 – 2019 cenderung menurun hal ini menggambarkan bahwa beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk belum produktif dan penduduk tidak produktif berkurang, kondisi ini akan berdampak positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2. 124
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2015	2016	2017	2018	2019		
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	4.874.254,56	5.169.275,87	5.483.598,44	5.813.635,05	6.155.217,98	+	Sesuai
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	6.169.750,95	6.781.886,09	7.453.106,84	8.012.777,07	8.615.217,98	+	Sesuai
PDRB per kapita Berdasarkan Harga Konstan	39,75	41,45	43,24	45,14	47,06	+	Sesuai
PDRB per kapita Berdasarkan Harga Berlaku	50,32	54,38	58,78	62,22	66,52	+	Sesuai
Indeks Gini	-	0,329	0,3196	0,33	0,34	< 0,3	Belum tercapai
Kesejahteraan Sosial							
Pendidikan							
Angka melek huruf	99,66	100	99,89	99,93	99,58	100	Belum Tercapai
Angka Partisipasi Murni SD/MI	121,93	122,58	118,61	117,27	117,18	110	Melampaui
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	110,30	118,20	102,12	81,38	101,89	115	Melampaui
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	139,75	138,54	135,45	129,75	127,48	125	Melampaui
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	140,02	142,97	140,85	101,32	124,01	145	Belum Tercapai
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SD/MI	2.636	2.538	2.554	2.671	2.826	+	Sesuai
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SMP/MTs	2.660	2.846	2.847	3.000	2.933	+	Sesuai
PELAYANAN UMUM							
Pelayanan Urusan Wajib							
Pendidikan							

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2015	2016	2017	2018	2019		
Pendidikan dasar							
Angka partisipasi sekolah SD/MI	100	100	99,46	98,77	99,38		Belum Tercapai
Angka partisipasi sekolah SMP/MTs	99,57	98,29	98,53	98,24	98,54		Belum Tercapai
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	1:280	1:281	1:239	1:211	1:210		Belum Tercapai
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	1:624	1:634	1:516	1:369	1:335		Belum Tercapai
Rasio guru terhadap murid SD/MI	1:19	1:19	1:20	1:20	1:17		Belum Tercapai
Rasio guru terhadap murid SMP/ MTs	1:18	1:18	1:18	1:16	1:14		Belum Tercapai
Kesehatan							
Rasio posyandu per satuan balita	10,41	10,41	10,41	10,68	12,62	13,5	Melampaui
Rasio puskesmas per satuan penduduk	0,057	0,056	0,055	0,05	0,05	1,32	Belum Tercapai
Rasio poliklinik per satuan penduduk	0,008	0,096	0,094	0,011	0,11	1,32	Belum Tercapai
Rasio pustu per satuan penduduk	0,114	0,112	0,11	0,11	0,11	1,32	Belum Tercapai
Rasio rumah sakit persatuan penduduk	0,049	0,040	0,039	0,039	0,038	0,05	Tercapai
Rasio dokter persatuan penduduk	1,99	2,11	2,21	2,16	2,71	0,030	Melampaui
Rasio tenaga medis persatuan penduduk	1,92	1,89	1,99	1,93	2,48		
Lingkungan Hidup							
Persentase penanganan sampah	78,49	95,37	95,08	84,87	88,40	71,8	Melampaui
Persentase RT yang mendapat akses air minum	37,188	35,91	35,37	33,80	88,68	59,41	Belum Tercapai
Pekerjaan Umum							
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,80	0,82	0,82	0,85	0,87	0,87	Belum Tercapai
Rasio jaringan irigasi	0,0015	0,0015	0,002	0,054	0,054	0,0086	Belum Tercapai
Rasio Masjid	0,37	0,37	0,37	0,39	0,36		Sesuai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2015	2016	2017	2018	2019		
persatuan penduduk							
Rasio Mushalla persatuan penduduk	1,24	1,22	1,22	0,91	1,16		Sesuai
Rasio Gereja Katolik persatuan penduduk	0,89	0,87	0,86	0,88	0,83		Sesuai
Rasio Gereja Protestan persatuan penduduk	0,58	0,57	0,57	0,53	0,55		Sesuai
Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk	0,33	0,19	0,10	0,144	0,26	0,61	Melampaui
Perhubungan							
Jumlah penumpang Antar Kota Dalam Propinsi	-	3.060.979	1.882.864	2.005.866	1.235.901	+	
Jumlah penumpang Antar Kota Antar Propinsi	-	2.907.143	928.096	514.725	292.485	+	
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	5	Belum Tercapai
Rasio ijin trayek perjumlah penduduk	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	Sesuai
Rasio uji KIR perjumlah Angkutan Umum	0,75	1,03	1,08	1,01	0,61	1	Sesuai
Koperasi							
Persentase koperasi aktif	70,75	75,49	82,18	81,19		100	Belum Tercapai
Kependudukan							
Jumlah penduduk laki-laki	59.419	60.503	61.588	62.488	63.519	+	
Jumlah penduduk perempuan	63.202	64.212	65.216	66.299	67.254	+	
Rasio penduduk yang memiliki KTP	77,48	90,5	94,5	96,32	99,83	100	Belum Tercapai
Kepemudaan dan Olahraga							
Jumlah organisasi Pemuda	30	30	30	24	24	80	Melampaui
Jumlah organisasi Olahraga	11	11	11	12	18	180	Belum Tercapai
Jumlah kegiatan	6	6	10	10	10	84	Belum

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2015	2016	2017	2018	2019		
kepemudaan							Tercapai
Jumlah kegiatan Olahraga	11	11	12	18	20	60	Belum Tercapai
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja perjumlah penduduk	8,80	9,06	8,82	7,86		+	Belum Tercapai
Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	-	44,82	10,49	2,029		+	Belum Tercapai
Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur							
Aksesibilitas Daerah							
Rasio jumlah pos Siskamling per kelurahan	3,41	3,41	3,54	4,08		7	Belum Tercapai
Pertumbuhan Ekonomi	6,12	6,23	6,39	6,45	5,88	+	Sesuai
Kemiskinan							
Jumlah KK Miskin berdasarkan data Susenas (orang)	6.540	6.810	6.750	6.315	6.000	-	Belum Tercapai
Petugas Linmas							
Rasio petugas Linmas per jumlah penduduk	-	-	0,0044	0,0010		0,0050	Belum Tercapai
Tingkat waktu tanggap (Response Time) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)							
Rasio ketepatan waktu pemadaman kebakaran per jumlah kejadian kebakaran	-	100	100	100		100	Sesuai
Pemberdayaan Masyarakat							
Jumlah kelompok Dasa Wisma	281	282	288	288	288	+	Sesuai
Jumlah LSM	155	160	136	146	56	-	Belum tercapai
Pos Yandu Aktif	128	129	131	132	136	+	Sesuai
Statistika							
Komunikasi dan Informatika							
Jumlah surat kabar Nasional dan Lokal	-	26 jenis	29 jenis	29 jenis	30 jenis	+	Sesuai
Perpustakaan							
Jumlah perpustakaan	1	235	238	240	241	+	Sesuai
Jumlah pengunjung perpustakaan	1.116	3.801	5.749	10.310	12.735	+	Sesuai
Pelayanan Urusan Pilihan							

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2015	2016	2017	2018	2019		
Ketahanan Pangan							
Ketersediaan pangan utama (angka konsumsi 123 kg/thn/org x jumlah penduduk – produksi beras x 10%)	3,43	4,9	4,57	4,35	4,16		
Pertanian							
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
Produktivitas Padi (Ton/Ha)	6,64	6,46	6,79	6,74	6,40	-	Belum tercapai
Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	2,09	2,41	1,94	0,89	4,9	+	Sesuai
Produktivitas Ketela Rambat (Ton/Ha)	0,97	30,79	32,53	28,18	27,56	-	Belum tercapai
Produktivitas Ketela pohon (Ton/Ha)	26,25	65,33	21,89	22,76	41,65	+	Sesuai
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	1,42	1,37	1,30	1,24	1,11	-	Belum tercapai
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	1,37	1,31	1,31	1,31	1,27	-	Belum tercapai
Pariwisata							
Jumlah kunjungan wisata	460.905	538.774	546.895	577.857	584.785	+	Sesuai
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	4,74	5,71	5,82	5,98	6,04	+	Sesuai
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	4,53	4,56	4,56	4,58	4,62	+	Sesuai
Perdagangan							
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	33,51	33,59	33,87	33,89	34,03	+	Sesuai
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	17,36	17,42	17,53	17,78	17,86	+	Sesuai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
	2015	2016	2017	2018	2019		
Perindustrian							
Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	6,80	6,56	6,08	5,66	5,03	-	Belum tercapai
Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	7,57	7,23	6,86	6,37	5,93	+	Sesuai
Keamanan dan Ketertiban							
Angka Kriminalitas yang tertangani	620	516	434	463	275	-	Sesuai
Jumlah Demonstrasi	4	0	0	1	0	-	Sesuai
Sumber Daya Manusia							
Kualitas Tenaga Kerja							
Rasio lulusan S1/S2/S3 per jumlah penduduk	729,264	787,769	804,221	815,736		1.278	Belum tercapai
Rasio ketergantungan (jumlah penduduk usia tidak produktif/jumlah penduduk usia produktif)	56	51,26	55,97	48,17		45	Belum tercapai

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPД sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Kinerja RKPД Tahun Lalu

Evaluasi kinerja RKPД Tahun 2019 dilakukan terhadap evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan evaluasi terhadap pencapaian realisasi kegiatan.

- a. Capaian kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi melalui 28 SKPD, menyelenggarakan 237 program dan 1.654 kegiatan. Dari 1.654 kegiatan yang dilaksanakan sampai akhir Tahun 2019 yang memenuhi target kinerja kegiatan adalah 87,60 % dapat terlihat pada tabel 2.125 berikut:

Tabel 2.126
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kota Bukittinggi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1																				
			Pendidikan																	
1			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	100	1,264,784,288														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan TKN Pembina	lancarnya Proses Belajar Mengajar TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi			12	81,050,000	3	8,604,484	25.00	10.62								
			Penyelenggaraan TKN 1	lancarnya proses belajar mengajar TKN 1 Kota Bukittinggi			12	31,550,000	3	12,121,000	25.00	38.42								
			Lomba anak Usia Dini dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN)	terpilihnya pmenang lomba pendidik dan anak usia dini kota bukittinggi			6	35,000,000	-	-	-	0.00								
			Lomba PAUD dan Dikmas Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	terpilihnya utusan kota bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi dan Nasional			13	97,306,000	-	-	-	0.00								
			Pelatihan Penyelenggaraan PAUD bagi HIMPAUDI Kota Bukittinggi	Anggota HIMPAUDI Kota bukittinggi yang terlatih			50	47,130,000	-	-	-	0.00								
			Orientasi program PAUD	Peserta memahami program PAUD			60	39,173,000	60	30,171,400	100.00	77.02								
			Penunjang DAK PAUD, TK Pembina, Tk N 1, SPNF (Fisik)	lancarnya DAK PAUD, TK, TKN I, SPNF			100%	28,521,750	-	-	-	0.00								
			TK N Pembina Tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020)				100%	217,050,000	-	-	-	0.00								
			Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Pembina (BOP PAUD 2020)				100%	120,000,000	-	-	-	0.00								
			Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Negeri I (BOP PAUD 2020)				100%	23,400,000	-	-	-	0.00								
								720,180,750		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13								
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tingkat APM dan APK SD, SMP	> 100	17,459,373,950														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 1 Bukittinggi			12	107,326,150	3	7,987,000	25.00	7.44									
		Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 2 Bukittinggi			12	111,327,200	3	9,826,198	25.00	8.83									
		Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 3 Bukittinggi			12	93,395,570	3	-	25.00	0.00									
		Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 4 Bukittinggi			12	101,703,000	3	5,936,000	25.00	5.84									
		Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 5 Bukittinggi			12	91,433,700	3	21,744,243	25.00	23.78									
		Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 6 Bukittinggi			12	91,107,900	3	12,298,400	25.00	13.50									
		Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 7 Bukittinggi			12	89,004,000	3	392,000	25.00	0.44									
		Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 8 Bukittinggi			12	90,428,500	3	128,145	25.00	0.14									
		Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Campago Ipuh			12	24,050,000	3	15,589,000	25.00	64.82									
		Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Campago guguak bulek			12	16,948,000	3	1,000,000	25.00	5.90									

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulau Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pulau Anak Aia					12	28,087,000	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh					12	14,510,000	3	210,000	25.00	1.45						
		Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun pintu kabun					12	28,449,000	3	5,499,000	25.00	19.33						
		Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulau Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulau anak aia					12	133,480,000	3	1,350,000	25.00	1.01						
		Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Kubu Gulai Bancah					12	32,322,000	3	9,900,000	25.00	30.63						
		Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Campago Ipuh					12	10,900,000	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Manggis ganting					12	17,100,000	3	7,650,000	25.00	44.74						
		Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun					12	27,060,000	3	2,800,000	25.00	10.35						
		Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Campago Guguak Bulek					12	28,550,000	3	150,000	25.00	0.53						
		Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun pintu kabun					12	116,650,000	3	9,500,000	25.00	8.14						
		Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu gulai bancah					12	76,957,700	3	-	25.00	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung alam					12	7,800,000	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulau Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulau Anak Aia					12	91,415,500	3	248,000	25.00	0.27						
		Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago ipuah					12	16,435,000	3	6,000,000	25.00	36.51						
		Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Manggis gantiang					12	29,103,500	3	10,000,000	25.00	34.36						
		Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 campago ipuah					12	26,873,300	3	5,600,000	25.00	20.84						
		Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng pasar atas					12	33,507,250	3	1,200,000	25.00	3.58						
		Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 percontohan					12	48,454,650	3	675,000	25.00	1.39						
		Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pakan kurai					12	59,727,000	3	11,250,000	25.00	18.84						
		Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 bukit apit					12	18,898,200	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05Tarok dipo					12	21,750,000	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 ATTS					12	30,154,000	3	9,304,000	25.00	30.85						
		Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Bukit Cangang					12	89,359,500	3	-	25.00	0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Tarok Dipo					12	34,780,200	3	308,000	25.00	0.89						
		Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 ATTS					12	22,138,000	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukit Apit Puhun					12	26,800,000	3	9,000,000	25.00	33.58						
		Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukit Cangang					12	14,966,300	3	6,516,300	25.00	43.54						
		Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit					12	25,650,000	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 ATTS					12	40,421,000	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Tarok Dipo					12	37,472,500	3	12,750,000	25.00	34.02						
		Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai					12	28,028,000	3	1,640,000	25.00	5.85						
		Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 Tarok Dipo					12	25,234,250	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 19 ATTS					12	17,991,000	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cakiah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Ladang Cakiah					12	25,732,500	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Aur Kuning					12	24,109,500	3	-	25.00	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh					12	34,750,000	3	4,700,000	25.00	13.53						
		Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Birugo					12	54,982,000	3	9,100,000	25.00	16.55						
		Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo					12	34,132,500	3	13,982,000	25.00	40.96						
		Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Parit Antang					12	75,244,400	3	10,648,000	25.00	14.15						
		Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Belakang Balok					12	34,399,000	3	1,800,000	25.00	5.23						
		Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Kubu tanjung					12	69,925,000	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok					12	25,061,000	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran					12	77,072,250	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aua kuning					12	17,098,100	3	-	25.00	0.00						
		Penyelenggaraan US SD	Lancarnya US SD/MI					59	82,199,000	-	-	-	0.00						
		Penyelenggaraan UN SMP/MTs	Lancarnya UN SMP/MTs					21	19,595,000	-	12,706,250	-	64.84						
		Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer	Lancarnya Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer					15	82,650,000		7,474,000	-	9.04						
		Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional	Peringatan Hari Pendidikan Nasional					50	24,780,000		-	-	0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13							
		Olimpiade Sains Nasional SD/MI	Terpilainya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional			40	105,000,000	-	4,935,000	-	4.70								
		Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs	Terpilainya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional			60	143,350,000	-	6,700,000	-	4.67								
		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SMP	Terpilainya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni			15	83,000,000	-	-	-	0.00								
		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD/MI	Terpilainya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni			62	81,100,000	-	-	-	0.00								
		Peleksanaan O2SN dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilainya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga			50	261,450,000		128,780,050	-	49.26								
		Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Lancarnya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi			77	44,250,000	-	-	-	0.00								
		Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Memotivasi siswa Kota Bukittinggi berprestasi			50	47,680,000	-	-	-	0.00								
		Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs	lancarnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs			5000	122,250,000	-	-	-	0.00								
		Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD / SMP	lancarnya distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi			77	18,000,000	-	-	-	0.00								
		Penerimaan Peserta Didik Baru	lancarnya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP			1300	10,000,000	-	-	-	0.00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13							
		Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS	lancarnya pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi			77	26,602,000	-	8,192,000	-	30.79								
		Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah Yang meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi	memotivasi Siswa dan Sekolah untuk berprestasi			3930	50,000,000	-	-	-	0.00								
		Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) Kota	lancarnya Kegiatan UKS Kota Bukittinggi			75	102,635,000	-	-	-	0.00								
		Pengurusan DAK SD/SMP	lancarnya Pengelolaan DAK SD?SMP			77	30,390,500	-	3,156,000	-	10.38								
		Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi	Gedung SMPN 5 Bukittinggi yang SNP			1	2,190,000,000	-	-	-	0.00								
		Lanjutan Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi	Gedung SMPN 7 Bukittinggi yang SNP			1	3,490,000,000	-	-	-	0.00								
		Lanjutan Pembangunan SMPN 4 Bukittinggi	Gedung SMPN 4 Bukittinggi yang SNP			1	5,890,000,000	-	-	-	0.00								
		DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo	Gedung SDN 16 Tarok Dipo yang SNP			1	100,000,000	-	-	-	0.00								
		Lanjutan Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai	Gedung SDN 17 Pakan Kurai yang SNP			1	1,690,000,000	-	-	-	0.00								
		Lanjutan Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo	Gedung SDN 05 tarok dipo yang SNP			1	990,000,000	-	-	-	0.00								
		Lanjutan Pembangunan SDN 06 ATTS	Gedung SDN 06 ATTS yang SNP			1	2,590,000,000	-	-	-	0.00								
		Pengadaan Meubiler SD Negeri Kota Bukittinggi	Meubiler SDN yang diadakan			4	200,000,000	-	-	-	0.00								
		Lanjutan Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air	Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulau Anak Air yang Aman			1	1,490,000,000	-	-	-	0.00								
		Lanjutan Pembangunan SDN 19 ATTS	Gedung SDN 19 ATTS yang SNP			1	2,490,000,000	-	-	-	0.00								
		Lanjutan Pembangunan SDN 15 Pulau Anak Air	Gedung SDN 15 Pulau Anak Aia yang SNP			1	3,490,000,000	-	-	-	0.00								
		Lanjutan Pembangunan SDN 01 Benteng Pasar Atas	Gedung SDN 01 Benteng Pasa Atas yang SNP			1	2,590,000,000	-	-	-	0.00								

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Pembuatan AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi	Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi					5	385,000,000	-	-	-	0.00						
		Pemasangan Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok	Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok terpasang					1	50,000,000	-	-	-	0.00						
		Pembangunan Gerbang SMPN 6	Gerbang SMPN 6 yang aman					1	50,000,000	-	-	-	0.00						
		Rehab WC SDN 02 Percontohan	WC SDN 02 Percontohan yang bersih dan sehat					1	100,000,000	-	-	-	0.00						
		Rehab SDN 07 Bukik gangang	Gedung SDN 07 Belakang Balok yang SNP					1	220,000,000	-	-	-	0.00						
		Rehab SDN 07 Belakang Balok	WC dan sarana kebersihan yang sehat dan bersih					1	100,000,000	-	-	-	0.00						
		Pengadaan Meubiler SDN 04 Birugo	Meubiler SDN 04 Birugo yang dibeli					1	60,000,000	-	-	-	0.00						
		Pembangunan gapura SDN 06 Pulau Anak Aia	gapapura SDN 06 pulau anak aia yang aman					1	50,000,000	-	-	-	0.00						
		Pembangunan SDN 08 Ipuh	Gedung SDN 08 Ipuh yang SNP					1	3,000,000,000	-	-	-	0.00						
		Pembangunan SDN 04 Garegeh	Gedung SDN 04 Garegeh yang SNP					1	5,000,000,000	-	-	-	0.00						
		DAK SD Tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020)						62	4,799,869,000	-	-	-	0.00						
		DAK SMP Tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020)						15	1,476,990,000	-	-	-	0.00						
		Pembuatan Pagar dan WC SDN 04 Birugo						1	200,000,000	-	-	-	0.00						
		Lanjutan Pemasangan Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air	Vaping Blok SDN 06 Pulau Anak Air terpasang					1	70,000,000	-	-	-	0.00						
		Pemasangan Vaping Blok SDN 03 Pulau Anak Air						1	100,000,000	-	-	-	0.00						
									46,747,045,620	-	-	0.00%	0.00%						
		Program Pendidikan Non Formal	Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun		729,295,235							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	peserta UN Paket A, B dan C					250	26,480,000	-	-	-	0.00						
		Penunjang Operasional BOP (DAK Non Fisik)	Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM					100%	37,680,000	-	-	-	0.00						
		Penunjang Akreditasi PAUD Dikmas	Terangkatnya akreditasi lembaga PAUD Dikmas					30	19,760,000	-	-	-	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi	lancarnya pelaksanaan operasional kantor					12	64,030,000	3	7,676,743	25.00	11.99						
		Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A setara SD	Lancarnya pembelajaran paket A					30	46,125,000	21	26,395,000	70.00	57.22						
		Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B setara SMP	Lancarnya pembelajaran paket B					25	20,921,000	-	11,144,000	-	53.27						
		Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C setara SMA	Lancarnya pembelajaran paket C					25	27,905,000	-	-	-	0.00						
		Dak Fisik SPNF SKB Tahun 2020 (DAK Bidang Pendidikan 2020)						1	667,269,000	-	-	-	0.00						
		DAK Non Fisik Paket B, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020)						100%	94,500,000	-	-	-	0.00						
		DAK Non Fisik Paket C, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020)						100%	25,200,000	-	-	-	0.00						
									1,029,870,000			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan		16,789,894,727														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				100															
		Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru	Terukurnya kemampuan guru sesuai dengan kompetensinya dan guru memperoleh sertifikat profesional					200	13,000,000	-	-	-	0.00						
		Pemeriksaan berkas TPG dan Aneka Tunjangan Guru	Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya					700	41,000,000	-	-	-	0.00						
		Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Terbayarnya tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS					1050	5,395,040,000	-	-	-	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP					40	135,900,000	-	-		0.00						
			Pembinaan dan Seleksi OGN Guru SD dan SMP					40	54,000,000	-	-	-	0.00						
			Pembekalan dan Penerbitan Jurnal Guru dan Pengawas					30	38,281,000	-	-	-	0.00						
			Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional					300	44,640,000	-	1,764,900	-	3.95						
			PKB Guru melalui KKG/MGMP					1000	106,710,000	-	-	-	0.00						
			Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan					100	24,745,000	-	-	-	0.00						
			Rekrutmen Calon Kepala Sekolah					23	202,264,000	-	-	-	0.00						
			Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah					25	192,139,500	-	-	-	0.00						
			Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri					316	9,071,155,429	-	1,556,426,440	-	17.16						
									15,318,874,929	-		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		1,251,304,980			100										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan DapoPAUD-Dikmas					202	112,000,000	-	-	-	0.00						
			Pelaksanaan akreditasi sekolah					75	38,034,000	-	-	-	0.00						
			Penjaminan Mutu Pendidikan					75	38,480,000	-	-	-	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi	Adanya webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi					1	56,000,000	-	-	-	0.00						
		Pembuatan Buku Profil Pendidikan	Buku Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					1	17,500,000	-	-	-	0.00						
		Program Anugerah Ki Hajar	Pelajar SD dan SMP ikut aktif dalam mengikuti kegiatan Kuis Kihajar dan kepala daerah memperoleh anugerah ki hajar					1	62,000,000	-	-	-	0.00						
		Penyusunan Database untuk Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan						1	88,000,000	-	-	-	0.00						
									412,014,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Kesehatan																	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar .		11,124,920,000													Dinas Kesehatan	
				95															
		Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan (Sisa DAK)	Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi .					100%	400,000,000	0.00	-	-	0.00						
		Distribusi obat dan E logistik (DAK Non Fisik/BOK 2020)						12	49,000,000	3.00	300,000	25.00	0.61						
		Pengadaan Obat (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)						100%	190,690,849	0.00	-	-	0.00						
		Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)						100%	110,671,151	0.00	-	-	0.00						
		Penyediaan Prasarana Pendukung Kefarmasian (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020)						4	18,500,000	0.00	4,500,000	-	24.32						
									768,862,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13								
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100	38,926,015,491														Dinas Kesehatan	
		Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana .			1	23,614,000	0.00	-	-	0.00									
		Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)			7	165,030,635	16.04	26,465,120	229.14	16.04									
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga			300	47,894,000	61.69	29,544,310	20.56	61.69									
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja																	
			Jumlah peserta pengukuran tingkat kebugaran jasmani																	
		Pemeriksaan kesehatan haji	Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya .			100%	22,770,000	35.13	8,000,000	3,513.00	35.13									
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan .			4	52,393,000	19.00	10,000,000	475.00	19.09									
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan .			3	23,830,000	0.00	625,000	-	2.62									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .					4	10,000,000	29.20	2,008,500	730.00	20.09						
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .					2	33,100,000	8.50	2,840,000	425.00	8.58						
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .					1	17,500,000	3.77	375,000	377.00	2.14						
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo baleh	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan esensial dan pengembangan .					8	65,125,000	1.80	900,000	22.50	1.38						
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang (DAK Non Fisik/BOK 2020)						6	618,174,000	17.00	5,576,800	283.33	0.90						
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK Non Fisik/BOK 2020)						6	580,400,000	13.11	10,510,614	218.50	1.81						
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin (DAK Non Fisik/BOK 2020)						6	484,000,000	9.77	18,247,050	162.83	3.77						
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo Baleh (DAK Non Fisik/BOK 2020)						6	587,912,000	16.70	17,685,480	278.33	3.01						
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari (DAK Non Fisik/BOK 2020)						6	453,600,000	12.00	17,683,700	200.00	3.90						
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah (DAK Non Fisik/BOK 2020)						6	369,600,000	9.07	27,352,600	151.17	7.40						
		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin (DAK Non Fisik/BOK 2020)						6	440,800,000	15.00	43,824,250	250.00	9.94						
		Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik/BOK 2020)						30	38,291,000	15.00	6,729,000	50.00	17.57						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK Non Fisik/BOK 2020)					100%	412,608,000	10.00	35,916,818	1,000.00	8.70						
			Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD					4	900,000,000	1.00	87,028,040	25.00	9.67						
			Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD					3	831,000,000	1.00	22,180,560	33.33	2.67						
			Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD					4	350,000,000	0.00	-	-	0.00						
			Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin - BLUD					2	722,673,600	1.00	450,000	50.00	0.06						
			Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah - BLUD					1	300,000,000	1.00	23,898,800	100.00	7.97						
			Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD					8	630,000,000	1.00	6,920,250	12.50	1.10						
			Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD					2	260,000,000	1.00	56,505,240	50.00	21.73						
			Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN Puskesmas					7	30,000,000	1.00	1,200,000	14.29	4.00						
									8,470,315,235										
			Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar .			2,006,671,800												Dinas Kesehatan
					100														
			Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan kefarmasian di puskesmas				20.00	42,813,890	5.00	2,460,800	25.00	5.75						
				Frekuensi pertemuan pengelola Aspak di puskesmas															
				Jumlah puskesmas/pustu/ poskeskel yang diawasi rasionalitas pengobatannya															

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK Non Fisik/Pengawasan Obat dan Makanan 2020)					100	55,839,000	0.00	-	-	0.00						
			Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik/Pengawasan Obat dan Makanan 2020)					60	175,551,950	0.00	-	-	0.00						
									274,204,840	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan PHBS Tingkat Kota .	82	5,912,610,100												Dinas Kesehatan	
			Pengembangan program promosi kesehatan dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat					50	190,762,000	23.00	12,164,400	46.00	6.38						
			Pembinaan dan Fasilitas Kota Sehat					100%	319,500,923	10%	27,919,102	10.00	8.74						
									510,262,923	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase kasus Balita Gizi buruk yang mendapat perawatan	100	2,354,494,100												Dinas Kesehatan	
			Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah Balita kurus/sangat kurus mendapatkan makanan tambahan				13	75,461,500	1.00	1,791,500	7.69	2.37						
				Jumlah anak sekolah (remaja putri) gizi kurang mendapatkan makanan tambahan															
			Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro lainnya.	Jumlah petugas yang dilatih konseling menyusui				40	37,770,500	10.00	2,285,000		6.05						
				Jumlah kader yang mendapatkan pelatihan Motivator ASI .															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Jumlah LP/LS yang sudah mendapatkan sosialisasi PERDA ASI																
		Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi pada Remaja	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja putri					600	39,806,000	60.00	2,010,000	10.00	5.05						
			Jumlah remaja putri yang di periksa HB dan status gizi																
			Jumlah anak sekolah yang mendapatkan pelatihan konselor teman sebaya																
			Jumlah peserta yang mendapatkan informasi hasil survei anemia dan status gizi remaja putri																
			Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan evaluasi program gizi terintegrasi																
									153,038,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan		693,411,500													Dinas Kesehatan	
		Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah TTU dan TPM yang diperiksa sanitasi lingkungan	62				20	260,710,500	3.00	29,544,310	15.00	11.33						
		Pengawasan sanitasi depot air minum	Frekuensi pemeriksaan depot air minum .					95%	12,619,000	25.00	1,800,000	2,631.58	14.26						
		Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan					3800	350,000,000	390.00	18,827,960	10.26	5.38						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									623,329,500			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase orang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		6,539,215,600												Dinas Kesehatan	
				Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, Waria/ Transgender, pengguna NAPZA dan warga Binaan LP) mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	100														
			Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA, Diare, TB, Hepatitis, Malaria, DBD, HIV/ AIDS, Filariasis (Kecacingan), Penyakit berbasis Surveilans lainnya				7	140,003,250	4.00	80,000,000		57.14						
			Peningkatan imunisasi	Terlaksananya sosialisasi PD3I kepada petugas dan TOMA yang terkait untuk mendukung program imunisasi				50	84,790,000	5.00	6,000,000		7.08						
			Peningkatan dan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dokumen data surveillance epidemiologi yang tersedia				1	35,250,500	0.00	1,696,250	-	4.81						
			Pengendalian penyakit tidak menular	Pembinaan program penyakit tidak menular (PTM)				21	161,060,000	3.00	5,807,000	14.29	3.61						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik dan KIE .					10	264,600,887	20.00	38,000,000	200.00	14.36						
		Pengembangan IPWL dan Non IPWL	Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL .					4	30,852,500	0.00	-	-	0.00						
		Pengadaan bahan habis pakai skrining HIV dan sifilis pada ibu hamil (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020)						12	161,697,200	0.00	-	-	0.00						
		Pengadaan catridge tes cepat molekuler (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020)						12	722,579,900	0.00	-	-	0.00						
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik/BOK 2020)						12	315,000,000	5.00	350,000	41.67	0.11						
									1,915,834,237										
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						7	5,483,741,982										Dinas Kesehatan
		Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik/Akreditasi Puskesmas 2020)						3	660,412,000	0.00	-	-	0.00						
									660,412,000										
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin .					100	13,279,907,400										Dinas Kesehatan
		Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk miskin	Jumlah peserta JKN PBI APBD yang di bantu pembayaran premi JKN.					13999	3,100,995,500	700.00	1,845,263,600	5.00	59.51						
									3,100,995,500										

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi .		2,458,780,000													Dinas Kesehatan	
		Pembangunan rumah sakit	% pembangunan fisik RSUD	1				1	84,958,701,060	0.00	16,109,478,541	-	18.96						
		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah dan jenis alat kesehatan RSUD yang diadakan					1	26,022,247,102	0.00	-	-	0.00						
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan RSUD yang diadakan					1	3,000,000,000	0.00	-	-	0.00						
		Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai	Jumlah dan jenis obat dan bahan habis pakai RSUD yang diadakan					6	1,750,000,000	0.00	-	-	0.00						
		Penunjang pelayanan RSUD	Terpenuhinya penunjang pelayanan RSUD					6	3,000,000,000	0.00	-	-	0.00						
									118,730,948,162				0.00%	0.00%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	100	161,225,500													Dinas Kesehatan	
		Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba senam Lansia					50	63,201,000	10.00	7,470,500	20.00	11.82						
									63,201,000				0.00%	0.00%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan	100	206,427,600													Dinas Kesehatan	
		Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah sampel pangan diperiksa .					60	45,280,500	6.00	3,634,600	10.00	8.03						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Jumlah industri rumah tangga yang diaudit .																
									45,280,500			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar (Antenatal)		1,337,112,700												Dinas Kesehatan	
			Peningkatan Kesehatan Ibu	Jumlah peserta yang di Validasi Data & EV Prog Kesga	100			25	96,063,000	2.00	5,619,260	8.00	5.85						
			Peningkatan Kesehatan Anak	Jumlah Bayi yang dilaksanakan pemeriksaan SHK				37	121,338,000	6.00	20,067,800	16.22	16.54						
			Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik/Jaminan Persalinan 2020)					5	159,104,000	1.00	27,201,434	20.00	17.10						
									376,505,000										
			Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase ketersediaan data pelayanan kesehatan		-												Dinas Kesehatan	
			Penyusunan Profil Kesehatan dan aplikasi SIK	Jumlah buku profil kesehatan yang dicetak	95			100%	14,336,000	43.21	10,793,700	4,321.29	75.29						
				Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data															
			Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi Infokes Bridging P-Care	Tersedianya data SPM				12	13,374,500	1.00	10,500,000	8.33	78.51						
									27,710,500					0.00%	0.00%				
														Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai standar		307,721,500													Dinas Kesehatan	
		Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas	Terlaksananya Monev BLUD Puskesmas					100%	257,133,984	25.00	59,093,267	2,500.00	22.98						
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan kota terbangun yang berkondisi baik		42,700,000,000													Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pembangunan jembatan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, jumlah jembatan yang dibangun	95				1	166,730,000			-	0.00						
		Peningkatan Trotoar	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, dan Panjang trotoar yang ditingkatkan					3	6,970,245,000			-	0.00						
		Peningkatan Jalan Syech Arasulli (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)						1	2,100,735,985			-	0.00						
		Penggantian Jembatan Jalan Prof. Bader Johan (DAK Fisik Bidang Jalan 2020)						1	923,663,000			-	0.00						
		Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass						1	1,100,000,000			-	0.00						
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik		10,700,000,000													Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		95				3	1,942,000,000			-	0.00						
		Peningkatan Drainase						1	1,327,323,000			-	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota					12	987,395,184	3	126,828,756	25.00	12.84						
									4,256,718,184	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase pengamanan titik bahaya longsor		6,257,675,207												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				80															
			Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan					4	8,377,286,820	-	-	-	0.00						
			Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan					3	2,964,554,500	-	-	-	0.00						
									11,341,841,320	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan jembatan terpelihara dalam kondisi baik		6,200,000,000												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				95															
			Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin jalan Dalam Kota					12	598,833,904	3	48,193,354	25.00	8.05						
			Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota					12	296,916,952	3	10,754,902	25.00	3.62						
			Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota					12	374,375,428	3	17,545,354	25.00	4.69						
			Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota					12	6,984,889,915	3	-	25.00	0.00						
									8,255,016,199	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat-alat berat ke PU an/Kebinamargaan		61,300,000,000												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				90															
			Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan					12	26,949,050	-	-	-	0.00						
			Pemeliharaan alat-alat berat dan operasionalisasi					26	950,375,428	-	55,124,354	-	5.80						
									977,324,478	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	2,100,000,000														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				100																
			Rehab/peningkatan Saturan Irigasi			1	1,801,600,000		-	-	-	0.00								
			Pemeliharaan Rutin Irigasi			12	347,333,904		3	79,380,774		25.00								
			Perencanaan DAK Irigasi 2021			1	143,990,000		-	-	-	0.00								
			DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi 2020)			1	1,101,843,000		-	-	-	0.00								
							3,394,766,904					0.00%	0.00%							
												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk terlayani sistem air limbah yang memadai	7,800,000,000														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				75																
			Pendampingan Pengembangan Jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)			1	500,000,000		-	-	-	0.00								
			Pengembangan Jaringan Air Minum			1	100,000,000		-	-	-	0.00								
			Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi			1	500,000,000		-	-	-	0.00								
							1,100,000,000					0.00%	0.00%							
												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	3,700,000,000														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				85																
			Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi			1	255,000,000		-	14,968,055		-	5.87							
			Pembuatan Keterangan Rencana Kota			300	234,993,904		-	21,311,082		-	9.07							
			Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak			20	100,000,000		-	1,814,400		-	1.81							
			Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data			1	135,676,000		-	3,980,900		-	2.93							
			Pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas			1	101,141,500		-	-		-	0.00							
							826,811,404					0.00%	0.00%							
												Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota		800,000,000														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				75																
		Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang						12	250,562,428	3	16,132,354	25.00	6.44							
		Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)						7	161,000,000	-	-	-	0.00							
									411,562,428	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum		81,000,000,000														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				85																
		Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (kedua)						1	73,876,416,399	-	-	-	0.00							
		Event-Event Daerah dan Nasional						6	85,500,000	-	-	-	0.00							
									73,961,916,399	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi		377,301,005														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				40																
		Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung						15	137,696,000	-	5,231,600	-	3.80							
									137,696,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/jalan dengan penerangan jalan lengkap		10,136,513,588														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum						12	653,233,904	3	103,493,606	25.00	15.84							
		Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum						12	24,496,650	3	11,138,200	25.00	45.47							
		Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum						1	1,625,005,000	-	-	-	0.00							

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum					12	3,500,000,000	3	481,136,657	25.00	13.75						
			Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum					1	550,000,000	-	14,380,000	-	2.61						
									6,352,735,554	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI		600,000,000													Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					85														
			Pembinaan Jasa Konstruksi					1	184,000,000	-	-	-	0.00						
			Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain					12	91,720,000	-	-	-	0.00						
			Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi					5	42,000,000	-	-	-	0.00						
									317,720,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
			Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rumah bagi MBR		1,302,087,000													Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					50														
			Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman					2	434,539,000	-	-	-	0.00						
			Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah Bansos					110	42,753,760	-	-	-	0.00						
			Bedah Rumah					35	1,179,978,720	-	-	-	0.00						
			Pendamping Pembangunan Rusunawa					4	1,712,753,090	-	1,085,500	-	0.06						
									3,370,024,570	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Sehat		12,250,000,000													Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					100														
			Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan					5200	4,570,568,250	-	-	-	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								3600	1,388,685,250	-	-	-	0.00						
								750	818,818,000	-	-	-	0.00						
								500	884,934,000	-	-	-	0.00						
								204	339,407,482	-	39,414,031	-	11.61						
									8,002,412,982	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
					1,200,000,000													Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					90														
								24	112,580,380	-	-	-	0.00						
								7	396,508,000	-	-	-	0.00						
								1	139,826,500	-	2,331,000	-	1.67						
								350	81,921,750	-	550,000	-	0.67						
								1	111,809,000	-	-	-	0.00						
								1	86,237,000	-	-	-	0.00						
								23	33,250,000	-	-	-	0.00						
								1	2,581,237,500	-	-	-	0.00						
									3,543,370,130	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
					349,068,406													Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					90														
								12	66,594,000	3	6,319,384	25.00	9.49						
									66,594,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			25.00%	9.49%					
										Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13								
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dan tanggap terhadap pencegahan kebakaran meningkat		3,500,000,000														Dinas Kebakaran	
		Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran		90					340	58,314,090	50	2,265,000	14.71	3.88						
		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Bahaya Kebakaran							48	34,879,000	-	-	-	0.00						
		Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran							57	75,439,000	57	396,000	100.00	0.52						
		Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran							7	194,800,000	5	14,500,000	71.43	7.44						
		Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR)							72	141,711,840	-	25,920,000	-	18.29						
										505,143,930			44.18%	8.53%						
													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah		750,800,000														Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat							5	180,323,485	-	18,707,922	-	10.37						
		Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial							1	33,113,000	-	-	-	0.00						
		Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian							1500	7,824,000	300	-	20.00	0.00						
										221,260,485			0.00%	0.00%						
													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program pemeliharaan kanrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda		10,550,000,000														Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		100					10	5,123,134,407	2	863,600,510	20.00	16.86						
		Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara Secara Represif Non Yustisial							100	43,499,800	-	-	-	0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/Acara Pemeriksaan Cepat/Tipiring					26	143,198,150	-	-	-	0.00						
			Pengelolaan Sekber PPNS					12	29,800,050	-	-	-	0.00						
			Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan					4	29,558,750	-	-	-	0.00						
			Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum					12	91,925,000	3	10,699,750	25.00	11.64						
			Penegakan Trantibum Oleh Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)					12	3,452,226,000	3	553,116,800	25.00	16.02						
			Pengamanan Hari Besar Keagamaan, Pejabat dan Tamu Negara serta Operasi yang diarahakan Pimpinan					12	789,875,500	3	-	25.00	0.00						
			Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Oleh PTI					12	80,375,900	3	11,575,900	25.00	14.40						
			Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilukada					3	24,930,300	-	-	-	0.00						
									9,808,523,857	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memperoleh pelatihan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan		271,300,000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
					100														
			Sosialisasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					100	17,886,250		-	-	0.00						
									17,886,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan		560,000,000												Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
					65														
			Penyebaran Informasi Perda dan Perkada Kepada Masyarakat					4300	90,660,000	-	-	-	0.00						
			Pembinaan dan Operasional Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat					120	328,600,000	-	-	-	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembentukan / Pembekalan Satlinmas Kelurahan untuk Pemilukada					120	247,473,000	-	-	-	0.00						
									666,733,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	86,500,000													Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				100															
			Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya					5	177,080,000	-	-	-	0.00						
									177,080,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Persentase penurunan agama dan aliran kepercayaan yang menyimpang	197,300,000													Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				100															
			Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat					100	184,330,000	-	-	-	0.00						
									184,330,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanaan terpenuhi	187,600,000													BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
				100															
			Penyusunan Rencana Kontijensi					1	57,273,000	0.00	-	-	0.00						
			Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat					30	189,500,000	30.00	188,996,000	100.00	99.73						
			Gladi Kesiapsiagaan pada Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Nasional					400	50,000,000	0.00	-	-	0.00						
			Jambore Pengurangan Resiko Bencana dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana					2	82,499,150	0.00	-	-	0.00						
									379,272,150	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	100	5,300,000,000													BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana						12	1,176,793,292	3.00	298,604,008	25.00	25.37						
									1,176,793,292	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Peningkatan Penanggulangan kebakaran															Dinas Kebakaran	
		Pengadaan Saran dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran						1	301,946,710	-	-	-	0.00						
		Penanggulangan Kebakaran						80	1,324,581,354	22	176,571,350	27.50	13.33						
		Penyelamatan Korban Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya						100	46,406,000	25	-	25.00	0.00						
								100		25		25.00							
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran						6	53,500,000	5	2,470,500	83.33	4.62						
									1,726,434,064	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Sosial																	
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan	1490	3,380,000,000													Dinas Sosial	
		Penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan Berprestasi						30%	306,215,100	0.075	1,539,500	25.00	0.50						
		Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS						50	135,520,000	-	-	-	0.00						
									441,735,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13								
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial		4,245,966,299														Dinas Sosial	
				75																
		Penanggulangan Orang Terlantar, Gangguan Kejiwaan dan Penguburan Mayat Terlantar						100%	233,264,692	0	19,789,811	40.00	8.48							
		Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan						12	46,500,000	3	-	25.00	0.00							
		Perlindungan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang Membutuhkan Perlindungan Khusus						12	75,000,000	3	-	25.00	0.00							
									354,764,692			0.00%	0.00%							
												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya		253,864,564														Dinas Sosial	
				30																
		Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan						12	72,238,000	3	-	25.00	0.00							
		Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat dan Disabilitas						10	365,000,000	-	-	-	0.00							
		Pelatihan Pijat Tuna Netra dan Bahasa Isyarat						70	172,000,000	-	142,913,000	-	83.09							
									609,238,000			0.00%	0.00%							
												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks. Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya																Dinas Sosial	
				6																
		Pembinaan dan Pelatihan bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial						20	84,000,000	-	-	-	0.00							
									84,000,000			0.00%	0.00%							
												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial		1,340,000,000														Dinas Sosial	
				60																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan					16	152,569,000	4	24,246,700	25.00	15.89						
			Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)					12	54,000,000	3	-	25.00	0.00						
									206,569,000			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian		1,092,569,601												Dinas Sosial	
					92														
			Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),					139	483,358,000	63	-	45.00	0.00						
			Pembinaan Karang Taruna					150	138,250,000	68	-	45.00	0.00						
									621,608,000			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial		10,975,000,000												Dinas Sosial	
					95														
			Pelayanan Psikososial bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk bagi Korban Bencana					100%	153,825,000	0	14,901,750	40.00	9.69						
			Operasional Taruna Siaga Bencana (TAGANA)					12	166,889,790	3	11,177,452	25.00	6.70						
			Pelatihan Usaha Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif					350	55,420,000	-	-	-	0.00						
			Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)					1000	474,664,546	830	229,118,552	83.00	48.27						
			Sinkronisasi Data Terpadu dan Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM					2	503,188,000	-	29,685,610	-	5.90						
			Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan					1100	396,377,000	770	199,523,900	70.00	50.34						
									1,750,364,336			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Tenaga Kerja																
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian		1,645,631,330												DPMPPTSPPTK	
					65														
			Pelatihan Kewirausahaan					16	58,197,100	-	-	-	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelatihan Tata Boga					16	53,481,100	-	-	-	0.00						
			Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta					20	22,836,000	-	-	-	0.00						
			Monev Eks.siswa Pelatihan					64	3,120,000	-	-	-	0.00						
									137,634,200			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja		137,640,731													DPMPPTSPPTK
			Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja		23			12	39,474,500	3	9,723,250	25.00	24.63						
									39,474,500			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan		1,454,161,814													DPMPPTSPPTK
			Penanganan permasalahan dan pemantauan hubungan industrial		9			30	36,345,700	9	1,145,000	30.00	3.15						
			Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB)					10	11,092,750	-	-	-	0.00						
									47,438,450			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif		210,000,000													DP3APPKB
			Pelayanan dan perlindungan khusus anak		70			55	38,255,500	12	3,095,000	21.82	8.09						
									38,255,500			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	860,000,000														DP3APPKB
				60															
			Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah					28	42,840,750	28	1,000,000	100.00	2.33						
			Pengelolaan Data Gender dan Anak					1	22,007,000	-	700,000	-	3.18						
			Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)					24	54,472,500	-	637,500	-	1.17						
			Pemenuhan Hak-hak Anak					5	176,358,061	-	82,402,834	-	46.72						
								3											
								1											
								5											
								60			60								
			Pembinaan Forum Anak Daerah (Forda)					4	119,151,150	2	5,567,750	50.00	4.67						
									414,829,461			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	308,000,000														DP3APPKB
				5,8															
			Pelayanan Perempuan dan Anak korban kekerasan					1	172,085,285	-	23,879,428	-	13.88						
								40			16								
								1			1								
			Pembinaan dan Peningkatan Kualitas					720	607,631,211	720	99,308,934	100.00	16.34						
			KIE dan Advokasi Jelajah Three End					10	40,019,000	-	985,800	-	2.46						
									819,735,496			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Perempuan di lembaga legislatif	390,000,000														DP3APPKB
					20														
				Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi.															
			Perkuatan Organisasi Perempuan					3	230,920,000	3	3,900,000	100.00	1.69						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyelenggaraan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga					3	490,332,161	3	54,936,721	100.00	11.20						
			Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Perempuan					25	37,664,050	25	11,892,000	100.00	31.57						
									758,916,211	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Pangan																
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan energi dan protein perkapita		969,000,000												Dinas Pertanian dan Pangan	
					2400														
			Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan					1	10,000,000	-	395,000	-	3.95						
			Pemantauan dan Informasi Harga Pangan					12	25,329,500	3	1,958,492	25.00	7.73						
								12		3									
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan					1	10,000,000	-	1,197,000	-	11.97						
			Koodinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi					1	9,000,000	-	754,000	-	8.38						
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan					14	30,000,000	-	318,000	-	1.06						
									84,329,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		7.51%	3.16%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Peningkatan Diservikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan		734,085,067												Dinas Pertanian dan Pangan	
					85														
			Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat					1	5,440,000	-	740,500	-	13.61						
			Percepatan Pengankaragaman dan Konsumsi Pangan (P2KP)					1	76,360,000	-	2,159,500	-	2.83						
								1		-									
								2		-									
			Penunjang event-event daerah					5	31,000,000	-	3,469,425	-	11.19						
			Pemanfaatan Lahan Pekarangan					5	50,001,250	-	8,304,750	-	16.61						
									162,801,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	7.69%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Pertanahan																
			Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah aset daerah		2,156,500,000												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					94														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah					2	222,966,476	-	5,377,450	-	2.41						
									222,966,476	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah		1,000,000,000												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					84														
			Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass ,masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya					50	985,754,762	-	15,820,702	-	1.60						
									985,754,762	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	persentase ketersediaan informasi pertanahan		350,000,000												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					90														
			Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi					1	99,439,860	-	-	-	0.00						
									99,439,860	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Lingkungan Hidup																
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/ pelayanan /pengelolaan persampahan		7,200,000,000												Dinas Lingkungan Hidup	
					100														
			Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan					31	2,638,458,000	-	1,318,000	0.00	0.05						
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan					12	2,997,063,600	3	445,960,150	25.00	14.88						
			Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota					38100	7,514,252,849	9,525	1,021,077,302	25.00	13.59						
			Pengelolaan Rumah Kompos					1	840,788,000	1	21,288,500	100.00	2.53						
			Pengendalian dan Penyemprotan Microorganisme di TPSS/IPST					68	74,305,550	68	3,326,500	100.00	4.48						
			Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan					6	217,734,170	6	31,530,260	100.00	14.48						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Keikutsertaan Kader Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah					150	53,961,000	-	-	0.00	0.00						
			Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan					1	1,000,000,000	-	-	0.00	0.00						
			Sosialisasi Revisi Perda Retribusi Pelayanan Persampahan					200	23,250,500	-	-	0.00	0.00						
			Penegakan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan					24	25,000,000	2	-	8.33	0.00						
			Koordinasi Penilaian Adipura					2	369,365,500	-	-	0.00	0.00						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK Fisik Penugasan 2020)					0	1,522,078,000	-	-		0.00						
									17,276,257,169			16.91%	8.82%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan		1,062,528,760												Dinas Lingkungan Hidup	
				30															
			Pemantauan Kualitas Tanah dan Produksi Biomassa					1	107,975,000	-	-	0.00	0.00						
			Pengawasan dan Pengendalian Usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup					59	17,230,800	12	996,250	20.34	5.78						
			Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup					20	7,576,840	-	777,400	0.00	10.26						
			Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup					12	83,396,000	3	16,485,500	25.00	19.77						
			Pelayanan Perizinan PPLH					100	29,999,800	17	5,520,580	17.00	18.40						
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup					12	155,994,950	3	7,010,000	25.00	4.49						
			Penegakan Hukum Administratif Bidang Lingkungan Hidup					20	2,849,760	-	-	0.00	0.00						
			Studi Kajian Usaha/Kegiatan Sepanjang					1	99,998,000	-	-	0.00	0.00						
									505,021,150			13.55%	6.10%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Presentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup		1,000,000,000												Dinas Lingkungan Hidup	
				95															
			Penunjang Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Event-Event Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional					6	250,000,000	-	-	0.00	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)					1	94,992,000	-	2,763,000	0.00	2.91						
			Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim					3	74,719,250	6	2,734,850	200.00	3.66						
			Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup					0	68,991,000	4	2,963,800	0.00%	4.30						
			Penerapan Saka Kalpataru					30	163,095,000	30	617,500	100.00	0.38						
			Pengembangan Data dan Penyebarluasan Informasi tentang Lingkungan Hidup dan Penyuluhan Keiling pada Masyarakat					6	99,193,000	1	2,987,000	16.67	3.01						
									750,990,250			43.82%	1.61%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pemenuhan RTH		6,000,000,000													Dinas Lingkungan Hidup
			Pemeliharaan rutin taman dalam kota		35			5.3	1,938,735,067	5	214,862,998	100.00	11.08						
			Pengadaan Pot dan Bunga					120	60,000,000	-	-	0.00	0.00						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman					8	20,000,000	-	-	0.00	0.00						
			Rehab Taman Dalam Kota					1	50,000,000	-	-	0.00	0.00						
									2,068,735,067			93.72%	10.39%						
												Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	persentase data kependudukan yang akurat dan dapat dimanfaatkan		1,656,720,293													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					90														
			Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan					12	106,365,000	6	-	0.00							
			Pengelolaan Administrasi Kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS					12	338,537,000	3	13,380,894	25.00	3.95						
			Pelayanan Identitas Penduduk					8000	558,753,001	1,600	39,074,958	20.00	6.99						
			Pelayanan Akta Kelahiran					3000	179,408,135	600	16,746,411	20.00	9.33						
			Pelayanan Pindah Datang Penduduk					4000	30,024,750	-	-	0.00	0.00						
			Pelayanan Akta Kematian					500	20,079,000	-	-	0.00	0.00						
			Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian					800	24,921,000	-	-	0.00	0.00						
			Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan					2000	14,952,000	-	-	0.00	0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk					8000	42,999,900	3,200	-	40.00	0.00						
			Digitalisasi akta catatan sipil					8725	36,693,400	3,490	775,000	40.00	2.11						
			Bimbingan Teknis Tenaga Operator SIAK dan Kerjasama Data SIAK					40	58,500,000	-	-	0.00	0.00						
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan					21	119,980,000	6	-	28.57	0.00						
			Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020)					4	416,714,000	-	-	0.00	0.00						
									1,947,927,186			4.34%	0.69%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah			2,000,000,000												Aur Birugo Tigo Baleh
			Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi					8	13,896,000		-	0.00	0.00						
			Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga kecamatan						79,100,000		462,000		0.58						
			Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)						41,000,000		6,054,000		14.77						
			Koordinasi kecamatan sehat (UKS, Kec.Sehat, Pokja Kelurahan Sehat)						21,500,000		-		0.00						
			Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di wilayah Kecamatan						20,363,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Parit Antang						60,000,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Belakang Balok						60,000,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Pakan Labuah						60,000,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Kelurahan Birugo						60,000,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Kubu Tanjung						60,000,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Sapiran						80,000,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Ladang Cakiah						60,000,000		-		0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Manunggal Sakato Kelurahan Aur Kuning						60,000,000		-		0.00						
			Training Center dan Pengiriman Khalifah Kecamatan Untuk Mengikuti MTQ Tingkat						135,000,000		47,010,900		34.82						
			Pendataan / Updating UMKM						45,000,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Parit Antang (Dana Kelurahan)						124,150,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belakang Balok (Dana Kelurahan)						166,400,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah (Dana Kelurahan)						81,800,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Birugo (Dana Kelurahan)						170,000,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjung (Dana Kelurahan)						104,740,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapiran (Dana Kelurahan)						89,700,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah (Dana Kelurahan)						100,000,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Aur Kuning (Dana Kelurahan)						107,000,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parit Antang (Dana Kelurahan)						225,850,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belakang Balok (Dana Kelurahan)						183,600,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Labuah (Dana Kelurahan)						268,200,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Birugo (Dana Kelurahan)						180,000,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kubu Tanjung (Dana Kelurahan)						245,260,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sapiran (Dana Kelurahan)						260,300,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ladang Cakiah (Dana Kelurahan)						250,000,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Aur Kuning (Dana Kelurahan)						243,000,000		-		0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									3,655,859,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
					1,900,000,000														Guguk Panjang
				Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi					25,000,000		-		0.00						
				Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga kecamatan				2	405,078,000		-	115,711,800	0.00	28.57					
								3			-		0.00						
								60			60		100.00						
				Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)					25,000,000		-		0.00						
				Koordinasi kecamatan sehat (UKS, Kec.Sehat, Pokja Kelurahan Sehat)					10,000,000		-		0.00						
				Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di wilayah Kecamatan					25,000,000		-		0.00						
				Manunggal Sakato Kelurahan Tarok Dipo					60,000,000		-		0.00						
				Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Apit Puhun					60,000,000		-		0.00						
				Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang					60,000,000		-		0.00						
				Manunggal Sakato Kelurahan Benteng Pasar Atas					60,000,000		-		0.00						
				Manunggal Sakato Kelurahan Pakan Kurai					60,000,000		-		0.00						
				Manunggal Sakato Kelurahan Kayu Kubu					60,000,000		-		0.00						
				Manunggal Sakato Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah					60,000,000		-		0.00						
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tarok Dipo (Dana Kelurahan)					110,880,000		-		0.00						
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Apit Puhun (Dana Kelurahan)					300,000,000		-		0.00						
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan BCKR (Dana Kelurahan)					298,000,000		-		0.00						
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benteng Pasar Atas (Dana Kelurahan)					313,540,700		-		0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Kurai (Dana Kelurahan)						68,400,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayu Kubu (Dana Kelurahan)						203,500,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan)						228,400,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo (Dana Kelurahan)						239,120,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun (Dana Kelurahan)						50,000,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang (Dana Kelurahan)						52,000,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas (Dana Kelurahan)						36,459,300		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai (Dana Kelurahan)						281,600,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu (Dana Kelurahan)						146,500,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ATTS (Dana Kelurahan)						121,600,000		-		0.00						
									3,360,078,000				4.02%	0.00%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung program pemerintah		1,900,000,000													Mandiingin Koto Selayan
			Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi		40				35,000,000		-		0.00						
			Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga kecamatan						139,161,500		48,995,200		35.21						
			Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)						35,000,000		-		0.00						
			Koordinasi kecamatan sehat (UKS, Kec.Sehat, Pokja Kelurahan Sehat)						36,905,000		-		0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di wilayah Kecamatan						15,000,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Koto Selayan						62,044,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Campago Ipuah						65,700,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Manggis Gantiang						60,588,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Pulai Anak Air						60,051,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Pintu Kabun						60,388,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Puhun Tembok						65,000,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Kubu Gulai Banchah						129,329,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Campago Guguak Bulek						63,150,000		-		0.00						
			Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh						57,354,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Selayan (Dana Kelurahan)						219,000,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Ipuah (Dana Kelurahan)						200,000,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggis Gantiang (Dana Kelurahan)						215,000,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulai Anak Air (Dana Kelurahan)						70,774,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puhun Pintu Kabun (Dana Kelurahan)						219,450,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puhun Tembok (Dana Kelurahan)						227,105,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kubu Gulai Banchah (Dana Kelurahan)						267,393,200		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Guguak Bulek (Dana Kelurahan)						280,000,000		-		0.00						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Garegeh (Dana Kelurahan)						187,824,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Koto Selayan (Dana Kelurahan)						131,000,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campago Ipuah (Dana Kelurahan)						150,000,000		-		0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manggis Gantiang (Dana Kelurahan)						135,000,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Anak Air (Dana Kelurahan)						279,226,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puhun Pintu Kabun (Dana Kelurahan)						130,550,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puhun Tembok (Dana Kelurahan)						122,895,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kubu Gulai Bancah (Dana Kelurahan)						82,606,800		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campago Guguak Bulek (Dana Kelurahan)						70,000,000		-		0.00						
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Garegeh (Dana Kelurahan)						162,176,000		-		0.00						
									4,034,670,500				0.00%	0.00%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun		1,800,000,000												Aur Birugo Tigo Baleh	
			Musrenbang tingkat Kecamatan						12,000,000		9,896,600		82.47						
			Musrenbang kelurahan parit antang						14,340,000		12,585,400		87.76						
			Musrenbang kelurahan belakang balok						13,940,000		11,379,800		81.63						
			Musrenbang kelurahan pakan labuah						18,020,000		15,537,200		86.22						
			Musrenbang kelurahan birugo						17,860,000		15,746,900		88.17						
			Musrenbang kelurahan kubu tanjuang						14,540,000		11,207,000		77.08						
			Musrenbang sapiran						15,440,000		15,150,800		98.13						
			Musrenbang kelurahan ladang cakiah						9,920,000		9,708,400		97.87						
			Musrenbang kelurahan aur kuning						14,240,000		11,356,500		79.75						
									130,300,000				0.00%	0.00%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		900,000,000													Guguk Panjang	
			Musrenbang tingkat Kecamatan	40				1	16,442,000	1	16,122,000	100.00	98.05						
			Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo					1	10,000,000	1	9,729,000	100.00	97.29						
			Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun					1	10,000,000	1	8,421,000	100.00	84.21						
			Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang					1	10,000,000	1	9,194,000	100.00	91.94						
			Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas					1	10,000,000	1	9,915,500	100.00	99.16						
			Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai					1	10,000,000	1	9,787,000	100.00	97.87						
			Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu					1	10,000,000	1	8,798,100	100.00	87.98						
			Musrenbang Tk Kelurahan ATTS					1	10,000,000	1	9,067,200	100.00	90.67						
									86,442,000			100.00%	93.74%						
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		2,000,000,000													Mandiingin Koto Selayan	
			Musrenbang tingkat Kecamatan						15,000,000		14,346,850		95.65						
			Musrenbang Kelurahan Koto Selayan						14,288,000		6,338,500		44.36						
			Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh						18,772,000		14,610,700		77.83						
			Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting						17,751,000		15,017,100		84.60						
			Musrenbang Kelurahan Pulau Anak Air						13,554,000		12,193,400		89.96						
			Musrenbang Kelurahan Puhun Pintu Kabun						12,800,000		11,703,000		91.43						
			Musrenbang Kelurahan Puhun Tembok						17,065,000		16,532,000		96.88						
			Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah						17,222,750		11,509,400		66.83						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Musrenbang Kelurahan Campago Guguak Bulek						21,613,000		17,804,040		82.38						
			Musrenbang Kelurahan Garegeh						11,631,000		10,152,400		87.29						
									159,696,750				0.00%	0.00%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa															Aur Birugo Tigo Baleh
			Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan						71,211,323		11,638,704		16.34						
			Pembinaan Administrasi Kelurahan						49,151,387		5,377,452		10.94						
			Koordinasi Kecamatan dan lintas sektoral						30,000,000		3,209,500		10.70						
									150,362,710				0.00%	0.00%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa															Guguk Panjang
			Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan					7	58,267,211		7	9,370,205	100.00	16.08					
			Pembinaan Administrasi Kelurahan						50,000,000		-		0.00						
			Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait						25,000,000		-		0.00						
									133,267,211				43.72%	7.03%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa															Mandiingin Koto Selayan
			Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan						78,576,423		2,210,740		2.81						
			Pembinaan Administrasi Kelurahan						21,063,000		-		0.00						
			Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait						9,111,500		3,067,430		33.67						
									108,750,923				0.00%	0.00%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
			Program Keluarga Berencana	Persentase PUS Ber KB	68	2,100,000,000													DP3APPKB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik 2020 BOKB)						282	26,444,000	1,440	3,376,000	510.64	12.77						
								1213		240		19.79							
								1224		76		6.21							
								254		1,200		472.44							
								311		47		15.11							
		Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS						24	35,000,000	24	-	100.00	0.00						
								2		-		0.00							
		Pembinaan Kesetiaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						1700	172,482,711	520	10,383,884	30.59	6.02						
								4		1		25.00							
								402		26		6.47							
								24		24		100.00							
								6		-		0.00							
		Penilaian dan Penghargaan KB teladan						18	109,057,000	-	-	0.00	0.00						
								3		-		0.00							
		Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader						85	641,084,711	85	106,182,134	100.00	16.56						
								24		24		100.00							
								165		165		100.00							
		Pelaksanaan Kampung KB						6	60,825,000	3	3,374,500	50.00	5.55						
		Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera						1	60,154,000	-	20,197,000	0.00	33.58						
								23		23		100.00							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana)						12	285,670,000	-	-	0.00	0.00						
		Operasional Penyuluh KB Bantuan Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB)						3	321,168,000	-	11,859,900	0.00	3.69						
		Operasional Integrasi Program KKBK dan program Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2020 BOKB)						6	320,970,000	-	15,330,200	0.00	4.78						
		Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB)						100	118,590,000	15	5,937,750	15.00	5.01						
		Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan sub PPKBD (DAK Non Fisik 2020 BOKB)						48	144,000,000	48	-	100.00	0.00						
									2,295,445,422			43.17%	1.59%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri															DP3APPKB	
					70														
			Pendataan Keluarga					3000	175,855,000	-	-	0.00	0.00						
								200		-	-	0.00							
			Koordinasi Koalisi Kependudukan					2	27,000,000	-	630,000	0.00	2.33						
			Grand design Pembangunan Kependudukan (GDPK)					5	165,248,000	-	2,396,250	0.00	1.45						
									368,103,000			0.00%	0.82%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				288,174,645											DP3APPKB	
				5 kel															
			Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Generasi Berencana					1	80,702,500	1	12,942,750		16.04						
									80,702,500			100.00%	16.04%						
												Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
			Perhubungan																
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				8,900,000,000											Dinas Perhubungan	
							75												
			Peningkatan Pengelolaan Terminal/ Parkir					12	1,990,701,776	3	490,014,933		25						
			Pengelolaan Gedung Parkir					2	1,851,911,000	2	31,506,571		100						
			Pengecatan Marka Jalan					1	265,000,000	-	-		-						
			Pengadaan Rubber Speed Hump/ Rubber Speed Bump/ Speed Table					1	305,000,000	-	-		-						
									4,412,612,776			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				500,000,000											Dinas Perhubungan	
							85												
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas					1	198,528,000	1	27,797,325		100		14.00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									198,528,000			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Angkutan umum yang mempunyai izin trayek	85	128,578,966												Dinas Perhubungan	
			Penyuluhan Bagi Sopir/ Juru Mudi dan Pengusaha Angkutan Umum di Kota Bukittinggi dan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum					50	19,234,000	-	-		0.00						
			Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan					30	44,784,000	-	-		0.00						
			Sosialisasi Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor					30	7,405,000	-	-		0.00						
			Pemutakhiran Data Perbengkelan					1	8,083,000	-	-		0.00						
									79,506,000			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu yang layak	90	885,000,000												Dinas Perhubungan	
			Lomba Tertib Lalu Lintas					1	31,471,688	-	-		0.00						
			Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					80	2,353,185,512	30	287,932,703	38	12.24						
			Edukasi Keselamatan LLAJ					200	47,936,500	-	-		0.00						
			Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas					30	65,513,500	-	-		0.00						
			Forum LLAJ					3	9,122,500	-	-		0.00						
									2,507,229,700			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang laik beroperasi	85	450,460,575												Dinas Perhubungan	
			Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan					12	374,110,900	3	11,623,830	25	3.11						
									374,110,900			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Komunikasi dan Informatika																

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik		800,000,000															
				1198																
		Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet						12	1,787,450,023	3	17,673,247	25	0.99							
		Pengadaan CCTV Online						4	250,000,000	-	-	-	0.00							
		Pengelolaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center						12	202,442,961	3	5,073,405	25	2.51							
									2,239,892,984			0.00%	0.00%							
												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang teknologi dan informasi	4	350,000,000															Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)						1	89,999,750	1	531,400	100	0.59							
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-Government						12	65,876,100	3	-	25	0.00							
									155,875,850			0.00%	0.00%							
												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi dalam pemerintahan dan Pelayanan publik	100	500,000,000															Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kustomisasi dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi						1	681,734,500	-	121,583,500	-	17.83							
		Pengelolaan Aplikasi TPP						12	87,947,600	3	9,630,400	25	10.95							
									769,682,100			0.00%	0.00%							
												Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13								
		Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi	85	300,000,000														Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penataan dan pembinaan menara telekomunikasi						1	10,000,000	-	1,185,500	-	11.86							
									10,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang telah melaksanakan aturan kelembagaan koperasi	17	600,343,365														Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
			Jumlah koperasi yg telah melaksanakan pembukuan sesuai dengan akuntansi perkoperasian (SAK-ETAP) Entitas tanpa akuntabilitas publik																	
		Penataan kelembagaan koperasi						50	21,517,935	-	-	-	0.00							
		Pelatihan akuntansi koperasi						50	35,547,500	50	34,965,500	100	98.36							
		Pengawasan koperasi						50	30,325,000	50	25,094,400	100	82.75							
									87,390,435	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Penanaman Modal																		
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	65	286,000,000														DPMPSPPTK	
		Promosi dan Gelar Potensi Investasi						10	146,067,000	-	1,321,250	-	0.90							
									146,067,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor	120	82,000,000														DPMPSPPTK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						1	32,490,000	-	3,805,350	-	11.71							
									32,490,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Jumlah dokumen kebijakan penanamna modal	1																DPMPTSPPTK
		Kajian Penanaman Modal						1	174,194,000	-	7,851,290	-	4.51							
									174,194,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Kepemudaan dan Olahraga																		
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasarakatan olahraga		1,058,044,350															Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				100																
		Kejuaran olahraga Daerah dan Nasional						10	1,456,347,500	-	32,552,500	-	2.24							
		Invitasi Bola Basket (Walkota Cup)						25	99,800,000	-	-	-	0.00							
		Pelaksanaan / Pertandingan Olahraga Masyarakat (Car free day)						22	110,125,000	-	-	-	0.00							
		Fasilitas Pacu Kuda						2	600,000,000	-	-	-	0.00							
		Festival Silek Tradisional						100	210,000,000	-	-	-	0.00							
									2,476,272,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai		400,000,000															Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				4																
		Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga						5	730,755,232	-	62,275,540	-	8.52							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat						10	140,000,000	-	-	-	0.00							
									870,755,232	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program Pembinaan Kepemudaan		919,161,000													Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			Penyelenggaraan dan perayaan dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional	100				54	716,082,000	-	2,269,000	-	0.32						
			Seleksi Pemuda Berprestasi					10	95,200,000	-	-	-	0.00						
			Pembinaan Marching Band					100	630,000,000	-	46,855,000	-	7.44						
									1,441,282,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Statistik																
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data Stategis Daerah	250,000,000													Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi					90	13,073,000	-	1,992,500	0.00	15.24						
									13,073,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	15.24%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Persandian	Persentase informasi yang diamankan	250,000,000														
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi															Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Pengelolaan persandian dan keamanan informasi Pemerintah Daerah					200	76,988,500	30	-	15.00	0.00						
									76,988,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		15.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Kebudayaan																
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Peran Serta Lembaga Adat	970,000,000													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan budaya					150	80,000,000	-	-	0.00	0.00						
			Pembinaan Sanggar dan Perguruan silat di Kota Bukittinggi					10	61,500,000	-	1,120,000	0.00	1.82						
			Penunjang Kegiatan Lembaga-lembaga Adat					100%	871,000,000	-	-	0.00	0.00						
									1,012,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				25															
		Registrasi Cagar Budaya Daerah						3	38,000,000	-	1,888,250	0.00	4.97						
		Pengelolaan Rumah Kelahiran Bung Hatta						1	250,461,711	-	19,215,452	0.00	7.67						
		Pengadaan sarana dan Prasarana RKBH (Pagar dan pos satpam)						1	250,000,000	-	-	0.00	0.00						
		Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya						2	146,000,000	-	1,558,000	0.00	1.07						
		Penunjang Operasional BOP Museum 2020						1	26,163,000	-	-	0.00	0.00						
		Pembangunan Kantor LKAAM/KAN						100%	1,000,000,000	-	-	0.00	0.00						
		Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta (BOP Museum dan Taman Budaya Tahun 2020)						1	600,000,000	-	-	0.00	0.00						
									2,310,624,711			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang diikuti	2	1,370,000,000													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI						100	50,000,000	-	-	0.00	0.00						
									50,000,000			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	1	755,300,000													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Mengikuti Event Budaya Nasional						4	167,000,000	-	20,062,540	0.00	12.01						
									167,000,000			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Perpustakaan																	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan		1,123,150,000													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				20															
		Bukittinggi Library Fiesta						40	40,000,000	-	-	0.00	0.00						
								1		-		0.00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Bintek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar					40	79,989,750	-	12,410,750	0.00	15.52						
			Layanan Perpustakaan Keliling					115	61,413,211	95	14,967,302	82.61	24.37						
								1		1		100.00							
			Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah					21153	46,798,450	21,153	28,779,370	100.00	61.50						
			Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka					1000	40,671,300	200	21,376,600	20.00	52.56						
								250		75		30.00							
			Pembinaan Perpustakaan					100	25,740,000	23	9,114,220	23.00	35.41						
			Pengadaan Koleksi Pustaka Binaan					1	70,000,000	-	-	0.00	0.00						
									364,612,711			32.63%	13.80%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program pengembangan data dan informasi perpustakaan	Tingkat Tersedianya Data dan Informasi Perpustakaan		102,000,000												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
					20														
			Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan					12	51,053,500	3	7,306,577	25.00	14.31						
								12		3		25.00							
								12		3		25.00							
									51,053,500			25.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Kearsipan																
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		965,000,000												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
					80														
			Pengadaan dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah					1	45,468,750	-	836,200	0.00	1.84						
			Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) persubstantif					5	23,311,500	-	1,374,000	0.00	5.89						
			Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah					24	52,110,000	24	30,404,200	100.00	58.35						
								9		9		100.00							
								1		1		100.00							
								1		1		100.00							
									120,890,250			43.11%	1.83%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi		236,000,000													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				80															
		Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi						5	15,635,000	-	2,066,020	0.00	13.21						
		Layanan Informasi Arsip Statis						30	37,373,250	-	-	0.00	0.00						
		Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA)						60	28,271,000	-	-	0.00	0.00						
									81,279,250			0.00%	2.54%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Pertanian																	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan pendapatan petani		160,800,000													Dinas Pertanian dan Pangan	
				5															
		Pembinaan dan Penilaian kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan						10	85,859,411	-	7,307,950	0.00	8.51						
									85,859,411			0.00%	8.51%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Produktivitas padi, palawija dan hortikultura		220,200,000													Dinas Pertanian dan Pangan	
				67															
		Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian						1	245,818,000	-	609,000	0.00	0.25						
								1		-		0.00							
								1		-		0.00							
		Penangkaran Jabal Benih Padi						20	30,000,000	-	3,843,000	0.00	12.81						
		Pengembangan Tanaman Hortikultura						1	140,000,000	-	2,710,800	0.00	1.94						
								1		-		0.00							
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)						3	12,345,000	-	3,600,000	0.00	29.16						
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida						12	35,560,000	3	1,421,750	25.00	4.00						
		Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian						4	737,896,000	-	681,000	0.00	0.09						
		Pengadaan pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi						1	820,000,000	-	4,770,500	0.00	0.58						
								6750		-		0.00							
		Pembangunan dam tebing PIPANISASI di ngarai						1	1,892,422,000	-	-	0.00	0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									3,914,041,000			0.23%	0.24%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	100	348,000,000												Dinas Pertanian dan Pangan	
			Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)					1	16,017,550	-	1,248,500	0.00	7.79						
			Pelaksanaan training dan review kegiatan Penyuluh dan Expo KTNA Tingkat Nasional					24	53,490,000	8	5,727,000	33.33	10.71						
			Penyelenggaraan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Model					2008	62,659,012	329	7,137,450	16.38	11.39						
			Penas Tani Tingkat Nasional					1	122,232,000	-	1,618,250	0.00	1.32						
									254,398,562			11.04%	6.18%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis	85	766,000,000												Dinas Pertanian dan Pangan	
			Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis					1	76,179,700	-	6,127,450	0.00	8.04						
								50		-		0.00							
			Pengelolaan Puskeswan					1500	237,734,400	300	32,718,694	20.00	13.76						
								950		-		0.00							
								285		30		10.53							
								2750		430		15.64							
								50		8		16.00							
									313,914,100			9.42%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Peningkatan Produksi Peternakan	Meningkatnya hasil produksi peternakan unggulan daerah	2	108,000,000												Dinas Pertanian dan Pangan	
			Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan					1	52,107,500	1	8,944,000	100.00	17.16						
								1		1		100.00							
			Pemberian Bantuan Ternak Sapi					1	30,000,000	-	-	0.00	0.00						
									82,107,500			63.46%	0.00%						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
										Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah						
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	2	388,888,000													Dinas Pertanian dan Pangan	
		Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH)						6150	242,862,425	980	25,116,300	15.93	10.34						
		Lanjutan Relokasi Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi (Sisa DAK)						1	3,029,647,448	-	-	0.00	0.00						
		Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah						1	90,892,400	-	528,500	0.00	0.58						
									3,363,402,273	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		1.15%	0.76%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Pariwisata																	
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Pasar dan Promosi Pariwisata	588245	5,111,100,000													Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		Promosi Pariwisata						3	887,921,259	-	34,949,663	0.00	3.94						
		Penyelenggaraan Event Pariwisata						10	296,900,000	-	10,390,250	0.00	3.50						
		Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi						10	190,000,000	-	-	0.00	0.00						
		Penampilan Tim Kesenian						40	350,066,492	-	26,391,187	0.00	7.54						
		Dukungan Pelaksanaan Tour de Singkarak						1	455,500,000	-	1,596,250	0.00	0.35						
		Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Nasional dan internasional						700	310,849,000	-	-	0.00	0.00						
		Pelatihan Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan)						40	139,454,000	-	-	0.00	0.00						
		Pelatihan Homestay (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan)						40	116,500,000	-	-	0.00	0.00						
		Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan)						40	264,525,000	-	-	0.00	0.00						
		Pelatihan Pemandu Wisata Alam dan Buatan (DAK Non Fisik Tahun 2020 Pelayanan Kepariwisataaan)						40	264,525,000	-	-	0.00	0.00						
									3,276,240,751	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Mengembangkan destinasi wisata alam, sejarah, budaya dan buatan		13,153,000,000													Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		Pengelolaan Jam Gadang		3				10000	1,401,476,462		177,726,157	0.00	12.68						
		Pengelolaan Taman Panorama Lobang jampang						3.5	626,938,740		102,128,325	0.00	16.29						
		Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Jampang						3.5	950,000,000		152,720,000	0.00	16.08						
		Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata						12	50,000,000		-	0.00	0.00						
		Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata						3	100,000,000		-	0.00	0.00						
		Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok menjadi Kawasan Geopark/ Geosite Ranah Minang						1	400,430,000		21,027,630	0.00	5.25						
		Pengelolaan Obyek Wisata Janjang Saribu						2	101,944,135		-	0.00	18.23						
		Pemeliharaan dan Peningkatan TMS-BK						5	80,000,000		-	0.00	0.00						
		Jasa Kebersihan dan Keamanan TMS-BK						7	1,800,000,000		-	0.00	7.77						
		Pemeliharaan Kandang dan Taman pada Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMS-BK)						10	200,000,000		-	0.00	0.48						
		Pemeliharaan dan Perawatan Flora dan Fauna						113	2,661,062,540	113	407,778,079	100.00	15.32						
		Revitalisasi TMS-BK						1	15,000,000,000		-	0.00	0.10						
		Revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjung						1	1,478,000,000		-	0.00	0.00						
		Pengelolaan dan Pelayanan TMS-BK						7	1,160,720,936	7	165,758,105	100.00	14.28						
		Penambahan Koleksi Fauna dan Flora						10	247,250,000		-	0.00	0.00						
		Revitalisasi Kawasan Beteng (DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Pariwisata)						2	1,941,793,000		-	0.00	0.00						
									28,199,615,813	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan Kemitraan dengan stakeholder pariwisata															Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		Pembinaan dan Promosi Ekonomi Kreatif						8	286,205,000		-	0.00	0.00						
		Pembinaan, Monitoring jasa usaha kepariwisataan dan fasilitasi sertifikasi						3	130,000,000		-	0.00	0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPDP s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1										416,205,000				0.00%	0.00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
										Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13								
		Program Peningkatan, Pengembangan Sarana Prasarana Pasar	Pesentase sarana pasar dalam kondisi baik		3,000,000,000														Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
			Pesentase capaian target retribusi pelayanan pasar																	
		Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar				3	180,000,000	-	-	0.00	0.00									
		Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar				24	977,420,480	24	118,985,220	100.00	12.17									
		Intensifikasi pemungutan retribusi pasar				12	350,230,405	3	48,397,068	25.00	13.82									
		Pengelolaan Gedung Pasar Atas				12	4,996,144,902	3	36,766,969	25.00	0.74									
		Penaksiran nilai bangunan pasar atas				1	100,000,000	-	-	0.00	0.00									
							6,603,795,787													
													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar (%)		507,152,000														Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
				100																
		Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar						1,331,309,333	186,146,881		13.98									
								1,331,309,333				0.00%	0.00%							
													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Industri																		
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil menengah yang berkembang		900,000,000															DPMPSPPTK
				30																
		Pelatihan teknis Industri Kecil Menengah				25	53,658,250	-	-	0.00	0.00									
		Promosi Industri Kecil Menengah				4	262,456,000	-	-	0.00	0.00									
		Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi				4	168,130,000	-	-	0.00	0.00									
		Pendampingan Gugus Kendali Mutu				5	49,804,000	-	-	0.00	0.00									
							534,048,250					0.00%	0.00%							
													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM		925,000,000															DPMPSPPTK
				3																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengembangan dan pelayanan teknologi industri					10	130,640,500	2	21,729,000	20.00	16.63						
			Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri					18	273,644,135	4	37,355,108	22.22	13.65						
			Perkuatan Organisasi Mitra Industri					9%	250,000,000	2.25%	1,932,300	25.00	0.77						
			Bimbingan Teknis Standarisasi Produk					25	11,245,000	-	-	0.00	0.00						
			Perkuatan Asosiasi Makanan					2	183,564,000	-	-	0.00	0.00						
									849,093,635	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Perencanaan Pembangunan																
			Program Pengembangan data/informasi	Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Proses Perencanaan Pembangunan		500,000,000													Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
					100														
			Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan					1	389,838,712	1	8,318,918	100.00	2.13						
									389,838,712	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota		400,000,000													Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
					85														
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang					1	100,411,634	-	29,051,885	0.00	28.93						
			Review dan Sinkronisasi RPJM Kota Bukittinggi					1	27,688,944	-	1,043,350	0.00	3.77						
			Koordinasi Komisi Irigasi					1	24,290,750	-	-	0.00	0.00						
									152,391,328	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR		200,000,000													Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
					100														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						1	303,838,500	-	-	0.00	0.00									
						1	40,258,500	-	326,000	0.00	0.81									
							344,097,000			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
							5,541,500,000													Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
					100															
						1	248,142,000	-	57,735,728	0.00	23.27									
						1	42,990,000	-	-	0.00	0.00									
						4	297,153,500	-	3,215,375	0.00	1.08									
						1	49,309,000	-	-	0.00	0.00									
						2	270,748,000	-	-	0.00	0.00									
						2	279,965,000	-	-	0.00	0.00									
						1	319,108,948	-	-	0.00	0.00									
						1	200,000,000	-	75,622,890	0.00	37.81									
							1,707,416,448			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
							212,400,000													Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
					100															
						1	55,655,880	-	21,800,705	0.00	39.17									
						1	75,116,500	-	-	0.00	0.00									
							130,772,380			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Keuangan																	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi		3,000,000,000	3													Badan Keuangan
		Penyusunan APBD Kota Bukittinggi						1	466,150,000	-	55,097,985	0.00	11.82						
		Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi						1	439,000,000	-	-	0.00	0.00						
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pergeseran Penjabaran APBD						1	30,000,000	-	1,100,000	0.00	3.67						
		Pengendalian Hibah dan Bansos						14	113,803,459	4	32,989,570	28.57	28.99						
		Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA						1450	114,150,000	-	40,344,900	0.00	35.34						
		Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya						1	124,684,840	-	58,750,750	0.00	47.12						
		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						1	407,878,000	-	5,388,750	0.00	1.32						
		Pelaksanaan dan Peningkatan Akuntansi Berbasis Akrua						6	270,295,000	-	-	0.00	0.00						
		Penyediaan dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah						12	110,424,422	-	10,754,904	0.00	9.74						
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya						1	69,267,000	-	-	0.00	0.00						
		Asistensi dan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah						4	53,000,000	-	3,248,750	0.00	6.13						
		Pengendalian Kas Daerah						7	56,000,000	-	1,096,250	0.00	1.96						
		Pemrosesan Gaji ASN						600	62,000,000	-	-	0.00	0.00						
		Pengendalian Belanja Daerah						388	313,395,573	-	42,770,349	0.00	13.65						
		Penyediaan dan Updating Simda Keuangan						4	206,000,000	-	2,887,500	0.00	1.40						
		Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah						12	71,000,000	-	1,592,500	0.00	2.24						
		Penyusunan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi						1	150,000,000	-	-	0.00	0.00						
									3,057,048,294			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD		2,300,000,000	75													Badan Keuangan
		Pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian BMD						2	323,264,711	-	6,898,702	0.00	2.13						
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang						1	55,490,000	-	-	0.00	0.00						
		Penatausahaan BMD						4	1,758,424,711	-	45,676,652	0.00	2.60						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Inventarisasi Barang Milik Daerah					28	955,599,850	-	-	0.00	0.00						
			Pengalihan Bukti Kepemilikan Tanah Pemko					10	53,730,500	-	-	0.00	0.00						
			Penggunaan BMD					29	51,155,000	-	-	0.00	0.00						
			Pemanfaatan BMD					57	59,200,000	-	-	0.00	0.00						
									3,256,864,772	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rasio PAD terhadap APBD		2,470,000,000	46605											Badan Keuangan	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah					100	571,657,102	-	34,151,404	0.00	5.97						
			Penyusunan Dokumen Pajak Daerah					9	181,529,422	-	24,548,904	0.00	13.52						
			Peningkatan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah					1	1,004,029,422	-	119,055,154	0.00	11.86						
			Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)					10	122,000,000	-	-	0.00	0.00						
									1,879,215,946	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
										Predikat Kinerja									
			Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur														Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti						25,000,000		-		0.00						
			Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan						278,400,000		-		0.00						
									303,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur		1,200,000,000	95											BKPSDM	
			Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS						1,105,383,250		9,243,105		0.84						
			Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar						110,699,000		-		0.00						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									1,216,082,250			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
																		Inspektorat	
									11,919,000		530,000		4.45						
									11,919,000			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
																		Dinas Kebakaran	
								3	61,054,000		3	52,468,400	100.00%	85.94					
									61,054,000			100.00%	85.94%						
												Sangat Tinggi	Tinggi						
																		Dinas Kesehatan	
									245,310,048		42,214,000		17.21						
									19,202,500		-		0.00						
									264,512,548			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
																		DPMPTSPPTK	
								10	58,400,000		1	3,825,000		6.55					
									58,400,000			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
																		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
								260	99,292,000		260	26,545,650		26.73					
								30	14,836,000		-	-		0.00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									114,128,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi mengikuti Pendidikan Kedinasan	550	2,740,000,000												BKPSDM	
								1	605,255,500	-	1,327,650		0.22						
								30	177,277,712	-	12,500,000		7.05						
									782,533,212	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	95	400,000,000												BKPSDM	
								12	36,617,000	-		0.00%	0.00						
								15	22,287,560	-		0.00%	0.00						
								5	55,000,000	-	6,902,050	0.00%	12.55						
								2	165,723,400	-	31,237,873	0.00%	18.85						
								100	48,500,000	-	-	0.00%	0.00						
								1	31,000,000	-	7,960,064	0.00%	25.68						
								1	457,005,600	-	130,645,963	0.00%	28.59						
								150	3,324,750	-	1,678,360	0.00%	50.48						
								12	4,804,000	-	-	0.00%	0.00						
								25	26,920,000	-	159,500	0.00%	0.59						
								2600	14,974,000	-	-	0.00%	0.00						
									866,156,310	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi		678,000,000													BKPSDM	
		Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja		7				600	158,264,712	-	17,183,602	0.00%	10.86						
		Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG						1	10,000,000	-	3,418,250	0.00%	34.18						
		Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)						1500	126,937,212	-	6,266,452	0.00%	4.94						
		Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun						120	50,000,000	-	8,785,023	0.00%	17.57						
		Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian						1	15,000,000	-	-	0.00%	0.00						
		Penyusunan Indeks Profesionalitas Aparatur						1	25,000,000	-	-	0.00%	0.00						
		Penyusunan Indeks Merit System						1	35,000,000	-	-	0.00%	0.00						
									420,201,924			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	95	400,000,000													Sekretariat Daerah	
		Penyusunan Evaluasi Jabatan						1	34,967,500	-	1,738,000	0.00%	4.97						
		Penyusunan Anjab dan ABK						5	34,968,000	-	19,728,454	0.00%	56.42						
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan						60	49,325,000	-	-	0.00%	0.00						
									119,260,500			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Bidang Pengawasan																	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Berkurangnya tingkat penyimpangan aparatur pemerintah	100	1,760,000,000													Inspektorat	
		Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala/reguler						84	41,455,800	8	3,919,400	952.38%	9.45						
		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/pemeriksaan khusus						20	19,475,750	5	4,482,600	2500.00%	23.02						

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Reviu Laporan Keuangan Pemko					1	15,000,000	-	1,987,700	0.00%	13.25						
			Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					4	95,159,000	-	2,116,250	0.00%	2.22						
			Pemutakhiran Data Tindak Lanjut					5	120,477,500	-	-	0.00%	0.00						
			Evaluasi SAKIP SKPD					28	131,198,000	3	21,792,700	1071.43%	16.61						
			Reviu Penyerapan Anggaran					4	6,500,000	-	-	0.00%	0.00						
			Reviu LKIP					1	44,177,500	-	3,165,600	0.00%	7.17						
			Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran					4	19,800,000	-	-	0.00%	0.00						
			Pembinaan dan Evaluasi SPIP					60	336,841,000	-	-	0.00%	0.00						
			Unit Pengendali Gratifikasi					5	26,000,000	-	-	0.00%	0.00						
			Reviu Perencanaan dan Penganggaran Presponsif Gender					5	54,120,000	-	-	0.00%	0.00						
			Evaluasi Pelayanan Publik					1	8,000,000	-	-	0.00%	0.00						
			Survey Penilaian Integritas					1	114,700,000	-	-	0.00%	0.00						
			Reviu Dana DAK					10	41,000,000	1	5,966,800	1000.00%	14.55						
			Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi					80%	46,000,000	-	996,250	0.00%	2.17						
			ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani					1	58,871,250	-	-	0.00%	0.00						
			Monev Pencegahan Korupsi					4	67,471,500	-	-	0.00%	0.00						
			Pemantapan Saber Pungli					1	106,687,000	-	-	0.00%	0.00						
			Penyelesaian Kerugian Daerah					1	25,000,000	-	-	0.00%	0.00						
									1,377,934,300			0.00%	0.00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
										Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tersedianya SDM yang profesional di bidang pengawasan		840,000,000												Inspektorat	
					100														
			Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja					30	350,000,000	-	2,696,250	0.00%	0.77						
			Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					3	150,000,000	-	-	0.00%	0.00						
			Pelatihan Kantor Mandiri					40	31,381,000	-	6,338,700	0.00%	20.20						
			Peningkatan kapabilitas dan Profesional APIP					1	57,220,000	-	-	0.00%	0.00						
									588,601,000			0.00%	0.00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Bidang Pemerintahan Umum																
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah		6,700,000,000												SEKRETARIAT DPRD	
					100														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rapat-rapat paripurna istimewa DPRD					6	451,398,500	1	-	1666.67%	0.00						
			Kegiatan Reses					84	709,855,000	20	-	2380.95%	0.00						
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD					6	1,991,529,423	1	272,628,934	1666.67%	13.69						
			Promosi dan publikasi melalui media massa, profil, dan dokumentasi kegiatan DPRD					10	429,303,780	-	24,849,000	0.00%	5.79						
			Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli					7	189,000,000	-	11,250,000	0.00%	5.95						
			Penyusunan standarisasi tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan dan anggota DPRD					2	85,000,000	-	-	0.00%	0.00						
			Penunjang kegiatan kerjasama asosiasi DPRD dan asosiasi sekretaris DPRD se Indonesia					2	941,000,000	-	117,492,350	0.00%	12.49						
			Penyusunan produk hukum inisiatif DPRD					4	400,000,000	-	2,807,250	0.00%	0.70						
			Belanja rumah tangga pimpinan DPRD					12	300,000,000	3	34,905,000	2500.00%	11.64						
			Penyelenggaraan pengawasan dan penganggaran					15	3,867,729,423	3	1,336,136,454	2000.00%	34.55						
			Penyelenggaraan kegiatan persidangan dan risalah					120	5,126,842,895	24	743,983,918	2000.00%	14.51						
			Penunjang operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi					5	194,997,925	5	16,132,356	10000.00%	8.27						
			Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD beserta kelengkapannya					125	198,000,000	-	-	0.00%	0.00						
									14,884,656,946			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH		8,200,000,000													Sekretariat Daerah
			Penunjang Keprotokol dan Pantap Agenda Pimpinan		100			12	110,000,000	3	-	2500.00%	0.00						
			Pelaksanaan Acara dan Upacara Nasional dan Kedaerahan					12	500,000,000	3	-	2500.00%	0.00						
			Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah					12	1,550,000,000	3	204,807,975	2500.00%	13.21						
			Penunjang Operasional KDH					12	2,883,852,980	3	246,575,901	2500.00%	8.55						
			Penunjang Operasional Wakil KDH					12	1,872,523,557	3	162,239,923	2500.00%	8.66						
			Pelayanan tata Usaha Pimpinan					48	682,184,610	9	127,199,520	1875.00%	18.65						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Walikota					1	3,700,000,000	-	-	0.00%	0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									11,298,561,147			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
							1,200,000,000												DPMPSPPTK
					90														
								12500	181,807,635	3,125	32,128,406	2500.00%	17.67						
								1200	275,743,358	300	36,449,060	2500.00%	13.22						
								60	28,444,740	3	966,625	500.00%	3.40						
								88%	105,548,200	6%	4,163,000	681.82%	3.94						
								3000	22,031,000	1,050	5,831,250	3500.00%	26.47						
								3	66,481,430	-	-	0.00%	0.00						
								3000	20,890,000	-	-	0.00%	0.00						
								30	9,864,000	7	820,000	2333.33%	8.31						
									710,810,363			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
																			BKPSDM
							2,700,000,000	1500											
								57	661,226,150	-	582,700,796	0.00%	88.12						
								1	25,000,000	-	-	0.00%	0.00						
									686,226,150			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
																			Sekretariat Daerah
							613,500,000	84											
								10	71,000,000	8	25,700,000	8000.00%	36.20						
								3	30,000,000	2	2,316,250	6666.67%	7.72						
									101,000,000			0.00%	0.00%						
												Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13								
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang-undangan	84	2,000,000,000															Sekretariat Daerah
		Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia				4	14,058,750	1	400,000	25	2.85									
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100	20,000,000	-	-	-	0.00									
		Penanganan perkara-perkara pemda				34	236,000,000	17	22,146,469	50	9.38									
		Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum				3	30,000,000	-	2,755,000	-	9.18									
		Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah				35	170,000,000	7	33,784,875	20	19.87									
		Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				50	17,000,000	5	358,000	10	2.11									
		Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya				180	60,000,000	27	645,000	15	1.08									
		Penelitian dan Evaluasi Perjanjian Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga/Masyarakat				30	5,000,000	-	-	-	0.00									
		Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum				120	30,000,000	-	-	-	0.00									
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota				1	25,000,000	-	-	-	0.00									
							607,058,750			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%								
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT	0																Aur Birugo Tigo Baleh
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Parit Antang					122,600,000		579,000		0.47									
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Belakang Balok					135,500,000		1,992,000		1.47									
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pakan Labuah					159,450,000		11,554,500		7.25									
		Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Sapiran					144,175,000		18,592,500		12.90									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning						155,425,000		-		0.00						
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah						106,700,000		1,442,000		1.35						
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Birugo						204,749,400		32,577,900		15.91						
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung						104,000,000		-		0.00						
			Pembinaan dan fasilitasi Kamtibus Kecamatan						62,264,711		5,377,452		8.64						
			Pembinaan dan Fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan						163,298,067		12,298,552		7.53						
									1,358,162,178				0.00%	0.00%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT		157,600,000													Guguk Panjang
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan						20,000,000		-		0.00						
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo					3	363,875,000	3	8,023,500	100.00	2.21						
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun					3	189,725,000	3	-	100.00	0.00						
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang					3	138,950,000	3	2,648,000	100.00	1.91						
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas					3	111,675,000	3	-	100.00	0.00						
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai					3	213,075,000	3	2,615,000	100.00	1.23						
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu Kubu					3	158,575,000	3	23,750,000	100.00	14.98						
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah					3	226,025,000	3	-	100.00	0.00						
			Pembinaan dan fasilitasi Kamtibus Kecamatan						20,000,000		-		0.00						
			Pembinaan dan Fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan					4	150,000,000	4	3,671,500	100.00	2.45						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									1,591,900,000					97.49%	2.56%				
														Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
							157,600,000												Mandiangin Koto Selayan
									109,834,000		3,445,500		3.14						
									245,455,000		-		0.00						
									146,226,000		-		0.00						
									186,170,500		20,660,000		11.10						
									193,162,000		3,780,350		1.96						
									214,400,000		-		0.00						
									194,555,200		3,501,500		1.80						
									295,058,000		-		0.00						
									99,053,500		-		0.00						
									183,287,071		22,627,652		12.35						
									29,213,000		-		0.00						
									1,896,414,271				0.00%	0.00%					
													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
							37,538,000												Sekretariat Daerah
							85												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan					24	20,000,000	-	5,406,780			27.03					
			Penilaian Kelurahan Berprestasi					3	124,228,000	-	3,606,000			2.90					
			Penilaian Kompetensi Lurah					3	45,275,000	-	-			0.00					
			Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Bukittinggi					3	41,330,000	-	500,000			1.21					
									230,833,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan			37,538,000												Sekretariat Daerah
					95														
			Penunjang Pers & Kehumasan					5	270,100,000	-	4,285,000			1.59					
			Pengumpulan data Informasi, kiping, penelaah berita.					12	7,527,500	3	5,097,500			67.72					
			Promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi					150	400,000,000	37	61,941,000			15.49					
			Penyebaran informasi Pembangunan daerah melalui media cetak dan online					19	796,010,000	4	141,267,500			17.75					
			Pembuatan Majalah Pemko					2	79,993,000	-	2,059,000			2.57					
			Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota					40	30,010,000		-			0.00					
									1,583,640,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			0.00%	0.00%					
										Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan			37,538,000												Sekretariat Daerah
					60														
			Wirid Bulanan dan Halal bi Halal					36	30,892,200	9	800,000			2.59					
			Lomba DDS Kota Bukittinggi					1	73,000,000	-	11,501,000			15.75					
			Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan					151	1,336,501,000	-	-			0.00					
			Fasilitator Kegiatan Pengiriman Peserta Lomba dan Peninjauan Lomba TK. Propinsi dan Nasional					60	42,480,000	-	-			0.00					
			Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hibah					40	15,000,000	-	-			0.00					
			MTQ Tingkat Kota Bukittinggi					60	694,641,000	-	212,101,750			30.53					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laju 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelatihan Guru MDTA, TPQ, TKQ, TPSQ, PQ dan Ponpes					100	38,113,900	-	-		0.00						
			Tabligh Akbar					1	283,247,500	-	-		0.00						
			Lomba Penyelenggaraan Jenazah					24	45,000,000	-	-		0.00						
			Pendidikan dan Pelatihan Imam/Khatib					50	80,000,000	-	-		0.00						
									2,638,875,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah	2,84	1,000,000,000													Sekretariat Daerah
			Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah					8	100,000,000	-	10,019,850		10.02						
			Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)					1	35,000,000	-	2,277,029		6.51						
			Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral					1	30,000,000	-	90,000		0.30						
			Pendampingan dan Dukungan Promosi Produk Daerah					1/4	40,000,000	-	694,000		1.74						
									205,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	100	300,000,000													Sekretariat Daerah
			Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi					1	40,000,000	-	90,000		0.23						
			Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi					30	74,788,000	-	6,894,950		9.22						
			Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD					2	43,200,000	-	22,040,400		51.02						
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR					1	50,000,000	-	240,000		0.48						
									207,988,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	35	1,000,000,000													Sekretariat Daerah
			Evaluasi Kelembagaan dan Tusi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi					1	49,998,000	-	7,898,712		15.80						
			Penyusunan Revisi Tupoksi Sesuai Hasil Evaluasi					5	45,010,000	-	-		0.00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Laku 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									95,008,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	100	1,400,000,000												Sekretariat Daerah	
			Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal					28	15,494,000	13	231,000		1.49						
			Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah					180	571,991,000	40	55,974,652		9.79						
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan					12	58,000,000	-	950,000		1.64						
			Tim Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Oleh TP4D					12	125,000,000	3	-		0.00						
			Assistansi Penyusunan RUP terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah					28	218,301,835	14	40,769,249		18.68						
									988,786,835	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Program peningkatan kualitas kelembagaan	Peningkatan capaian kinerja daerah	35	1,000,000,000												Sekretariat Daerah	
			Penyusunan LPPD					8	34,530,000	8	4,523,250		13.10						
			Penunjang Penyusunan LKPJ					45	47,535,000	45	957,000		2.01						
			Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (FKPPD)					1	17,310,000	-	-		0.00						
			Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi					1	18,150,000	-	400,000		2.20						
									117,525,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
			Bidang Penunjang Lainnya																
			Program pendidikan politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	100	14,000,000,000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi					24	2,293,996,000	8	618,508,100		26.96						
			Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik					8	25,470,000	1	-		0.00						
			Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi					40	4,834,000	1	232,000		4.80						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2020(tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
		Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada						1000	262,867,000	860	-		0.00						
		Desk Pemilu / Pilkada						9	413,753,000	3	11,806,000		2.85						
									3,000,920,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%						
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
									529,595,964,092	TOTAL		2.08%	0.49%						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

2.2.2 Evaluasi Capaian Target RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

2.2.2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Rencana dan target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 yang terdiri dari 14 sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan 22 indikator kinerja utama dan mengacu pada lima misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 126
Pencapaian target Misi Renstra Tahun 2019

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	2	119,5	-	-	-	-
2	Misi 2	5	3	116,8	2	100	-	-
3	Misi 3	6	2	115,9	1	100	3	78,7
4	Misi 4	4	1	122,1	-	-	3	81,2
5	Misi 5	6	3	109,3	-	-	3	97,4
	Jumlah	22	11	116,7	3	100	9	85,8

- Capaian pada misi pertama, sebanyak 1 indikator kinerja melampaui target 2 indikator atau 119,5%, dan sesuai target dan yang belum tercapai tidak ada.
- Capaian pada misi kedua, sebanyak 5 indikator kinerja melampaui target 3 indikator atau 116,8% sesuai target ada 2 indikator atau 100% dan belum mencapai target tidak ada.
- Capaian pada misi ketiga, sebanyak 6 indikator kinerja melampaui target 2 indikator atau 115,9% sesuai target ada tidak ada dan belum mencapai target 3 indikator atau 81,2%.
- Capaian pada misi keempat, sebanyak 4 indikator kinerja melampaui target 1 indikator atau 122,1% sesuai target tidak ada dan belum mencapai target 3 indikator atau 81,2%.
- Capaian pada misi kelima, sebanyak 6 indikator kinerja melampaui target 3 indikator atau 109,3% sesuai target tidak ada dan belum mencapai target 3 indikator atau 97,42%.

Tabel 2. 127
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	1 Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	2%	2,39%	119,5%
2	Terlaksananya reformasi birokrasi	2 Nilai SAKIP	BB	BB	100%
		3 Peringkat LPPD	35	27	122,86%
		4 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
		5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	75%	85,03%	113,37%
		6 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,1336	0,1524	114,07%
3	Terpenuhinya RTH Kota	7 8 Persentase RTH Publik	17%	8,4%	49,41,7 %
4	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	75%	88,12%	117,49%
5	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	9 Cakupan akses air minum layak	95%	88,68%	93,34%
		10 Luas Kawasan Kumuh	0 ha	0 ha	100%
		11 Persentase sanitasi layak	100%	96,39%	96,39%
6	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	12 Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	70%	80,13%	114,47
7	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	13 Pertumbuhan ekonomi	6,40%	5,88%	91,87
		14 PDRB Perkapita	54,50 juta	66,52	122,06%
		15 Indeks Gini	<0,3	0,267	89%
8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	16 Tingkat Kemiskinan	3,35%	4,6%	62,69%
9	Meningkatkan pelayanan pariwisata	17 Kunjungan Wisatawan	588.245	584.785	99,41%
10	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	18 Harapan lama sekolah	15 tahun	14,96 tahun	99,73%
11	Meningkatkan kualitas pendidikan	19 Angka Rata-rata lama sekolah	11,20 Tahun	11,32 tahun	101,67%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
12	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	20	Angka Harapan Hidup	73 tahun	74,22 tahun	101,67%
13	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	21	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	80%	100%	125%
14	Terkendalinya jumlah penduduk	22	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,45	1,55	93,11%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain rata-rata dari 22 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 14 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 107,21% Sesuai dengan Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan **Memuaskan**. Analisis capaian kinerja Tahun 2019 dengan target akhir RPJMD serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator dan alternatif solusi yang telah dilakukan per sasaran strategis serta indikator kinerja utama diuraikan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan**

Sasaran strategis meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan. Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk tanggungjawab sosial dari perusahaan yang bersifat sukarela terhadap lingkungan sekitar dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Indikator Kinerja Rasio *Corporate Social Responsibility* dengan Belanja Langsung dalam Pembiayaan Pembangunan adalah sebesar 2,39%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 2%, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2019. Keberhasilan penyaluran dana CSR yang terus meningkat hingga tahun 2019 tidak terlepas dari upaya dan dorongan dari Kepala Daerah yang terus berkomitmen untuk mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan terkait pembangunan Kota Bukittinggi ke berbagai perusahaan dan pihak swasta yang ada di Kota Bukittinggi.

Dana CSR yang disalurkan pun turut memenuhi banyak kebutuhan akan pembangunan Kota Bukittinggi baik fisik maupun non fisik. Hal ini dapat dicapai dengan bergeraknya semua sektor dalam mencari peluang agar pembangunan baik fisik maupun non fisik dapat juga dibiayai oleh dana CSR. Disamping itu hal ini mengindikasikan semakin baiknya

hubungan antara pemerintah dan swasta serta semakin tingginya tanggungjawab dari sektor swasta untuk turut andil dalam pembangunan.

Berikut kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui dana CSR tahun 2019:

- a. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) oleh PT Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelatihan dan pembekalan motivasi kewirausahaan PNS yang akan pensiun dan dari PT. Bank Nagari dalam bentuk seragam olahraga bagi PNS yang memasuki masa purna bhakti;
- b. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna kegiatan semiloka kearsipan;
- c. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) oleh PT. Sarana Multigriya Finansial dengan melakukan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit rumah di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan 6 unit rumah di Kelurahan Pakan Kurai;
- d. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bank Nagari untuk dana pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk TK, SD dan SMP senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- e. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan oleh Bank Indonesia untuk pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam tanaman cabe untuk menurunkan inflasi kepada 4 Kelompok Wanita Tani senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Keberhasilan penyaluran dana CSR yang terus meningkat hingga tahun 2019 tidak terlepas dari upaya dan dorongan dari Kepala Daerah yang terus berkomitmen untuk mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan terkait pembangunan Kota Bukittinggi ke berbagai perusahaan dan pihak swasta yang ada di Kota Bukittinggi. Dana CSR yang disalurkan pun turut memenuhi banyak kebutuhan akan pembangunan Kota Bukittinggi baik fisik maupun non fisik.

Hal ini dapat dicapai dengan bergeraknya semua sektor dalam mencari peluang agar pembangunan baik fisik maupun non fisik dapat juga dibiayai oleh dana CSR. Disamping itu hal ini mengindikasikan semakin baiknya hubungan antara pemerintah dan swasta serta semakin tingginya tanggungjawab dari sektor swasta untuk turut andil dalam pembangunan.

2.3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Sasaran strategis terlaksananya reformasi birokrasi memiliki 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu:

- b. Nilai SAKIP

Hasil evaluasi terhadap SAKIP Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 memperoleh nilai 70,84 dengan predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan hasil dari efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bukittinggi. Perolehan nilai SAKIP 70,84 menunjukkan hasil dengan kategori **memuaskan**. Ini merupakan bukti bahwa kinerja yang dilakukan pemerintah bukan hanya terpaku pada penyerapan anggaran tetapi juga fokus pada pencapaian hasil dan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Perkembangan capaian hasil penilaian dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai			
			2016	2017	2018	2019
A	Perencanaan Kinerja	30	16,54	19,44	22,00	22,00
B	Pengukuran Kinerja	25	10,31	13,48	16,16	16,16
C	Pelaporan Kinerja	15	9,65	10,22	10,58	10,58
D	Evaluasi Internal	10	4,34	6,94	7,83	7,83
E	Capaian Kinerja	20	9,5	10,13	13,81	14,27
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,34	60,21	70,39	70,84
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B	BB	BB

Sumber Data: Bagian Organisasi

Nilai SAKIP Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan realisasi nilai BB, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan nilai A, ada satu tingkatan lagi untuk mendapatkan nilai SAKIP A. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan dalam efisiensi anggaran serta perencanaan yang baik dan terintegrasi.

Keberhasilan dari indikator ini adalah komitmen yang sangat kuat dan tinggi dari pimpinan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Adanya pendampingan langsung oleh KemenPAN RB terhadap kekurangan dari SAKIP di tahun yang lalu sehingga menjadikan perencanaan Kota Bukittinggi semakin terarah sesuai dengan *cascadedown* perencanaan. Disamping itu juga peran serta aktif Kepala SKPD beserta seluruh jajarannya dalam mengimplementasikan SAKIP ini di SKPD masing-masing serta selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Satu lagi yang sangat menentukan pencapaian nilai SAKIP BB oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan dibentuknya TIM SAKIP Kota yang bertugas mendampingi dan membimbing SKPD agar terus melakukan perbaikan baik dokumen maupun implementasinya di lapangan.

c. Peringkat LPPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. LPPD yang dilaporkan harus bisa menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerintah Daerah.

Hingga laporan ini disusun, peringkat LPPD terakhir yang baru ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017. Untuk tahun 2018 dan 2019 sampai saat ini belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 118-8840 tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017, Kota Bukittinggi memperoleh nilai skor evaluasi LPPD sebesar 3,1668 dengan status kinerja Sangat Tinggi berada pada peringkat 27 dari 93 kota se Indonesia. Hasil ini merupakan penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2017, sedangkan untuk hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018 dan 2019 hingga saat ini belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga hasil yang dipakai dalam pelaporan ini adalah hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2017.

Sementara berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kota Bukittinggi Nomor LHE-413/PW03/3/2019 dan LAP-EKPPD/15/INSP/2019 Tanggal 29 Oktober 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi mendapatkan peringkat sementara dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke-5 (lima) dari 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan skor 3,2258 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018.

Peringkat LPPD tahun 2018 penilaian tahun 2017 telah melebihi peringkat akhir masa RPJMD dengan peringkat 30. Namun berdasarkan tren capaian pada tahun 2017 dan 2018, realisasi capaian indikator Peringkat LPPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 diperkirakan juga mengalami peningkatan sehingga akan semakin melampaui target yang ditetapkan pada masa akhir RPJMD.

keberhasilan indikator ini adalah adanya upaya yang serius dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam evaluasi yang dilakukan dari indikator penilaian dapat terpenuhi secara maksimal.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah adalah dengan membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Mandiri Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui keputusan Walikota Bukittinggi dengan tugas utamanya melakukan *self assessment* terhadap kinerja pemerintah daerah sebelum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Nasional. Dengan adanya tim ini diharapkan lebih awal dapat mengukur capaian kinerja dan dapat mengukur strategi untuk meningkatkan kinerja secara nasional.

Upaya yang dilakukan selama tahun 2019 yakni :

1. Membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
2. Melakukan *interview* langsung dengan SKPD terkait dengan data IKK yang disampaikan serta membandingkan dengan data tahun sebelumnya;
3. Melakukan konsultasi yang intensif dengan Tim Daerah yang terdiri dari Inspektorat, BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dan Biro Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat;
4. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan agar SKPD meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah

Sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat Nomor 54/S-HP/XVIII.PDG/05/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, disampaikan sebagai berikut:

- Opini atas Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian;
- Sistem Pengendalian Internal masih terdapat beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Penilaian LKPD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi adalah WTP, dan ini merupakan penilaian WTP yang keenam kalinya berturut-turut bagi Pemerintah Kota Bukittinggi. Opini BPK Tahun 2019 dengan target WTP telah terealisasi WTP dan untuk akhir masa RPJMD ditargetkan Opini BPK WTP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum Pemerintah Kota Bukittinggi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan target kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJMD Kota Bukittinggi. Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2019 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 telah dapat dicapai.

Laporan Keuangan Tahun 2018 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

e. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan hasil survei terhadap lembaga penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2019 kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan hasil survei pada lembaga pelayanan publik dimaksud memiliki nilai "baik" (B) dengan indeks nilai 85,03%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 9 unsur pelayanan yang dinilai meliputi :

- Persyaratan dengan nilai 3.320
- Prosedur dengan nilai 3.332
- Waktu Pelayanan dengan nilai 3.230
- Biaya/ Tarif dengan nilai 3.696
- Produk Layanan dengan nilai 3.289
- Kompetensi Pelaksanaan dengan nilai 3.385
- Perilaku Pelaksanaan dengan nilai 3.399
- Sarana dan Prasarana dengan nilai 3.338
- Penanganan Pengaduan dengan nilai 3.653

Capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sejak awal RPJMD sampai tahun 2019 tetap melampaui target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya dalam meningkatkan layanan pada masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang terlayani dengan baik.

Keberhasilan dari indikator ini dikarenakan adanya regulasi dari pemerintah untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat disetiap kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini dapat dirasakan dari unit pelayanan publik yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan haknya. Disamping itu indeks kepuasan masyarakat yang dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi maka secara langsung maupun tak langsung turut mendorong SKPD pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanannya.

f. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri.

Realisasi kegiatan tahun 2019 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan. Pada penetapan target kemandirian keuangan daerah tahun 2016 (tahun awal RPJMD) sebesar 0,124, potensi pajak dan retribusi belum tergal

secara keseluruhan. Namun seiring waktu, objek tersebut terus digali dan dibenahi hingga dapat mendongkrak penerimaan PAD Kota Bukittinggi.

Dalam upaya pencapaian indikator, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah dilakukan dengan mengikuti studi pembelajaran ke daerah lain, peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi pengawasan dan pengendalian yuridis, teknis (pendataan, penagihan dan pertimbangan keberatan) serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan (updating data pajak dan wajib pajak), serta optimalisasi penggunaan aplikasi 254 pengawasan pajak melalui *cash register online*. Hal lain yang tidak kalah penting dan berperan dalam peningkatan PAD adalah upaya pemerintah dalam menggali dan meningkatkan potensi sumber-sumber PAD baru di Kota Bukittinggi.

2. Terpenuhinya RTH Kota dengan indikator Persentase RTH Publik

Capaian kinerja untuk persentase RTH Publik hanya 49,41%, masih sangat jauh dibawah target tahun 2019 sebesar 17%. Jika mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang meliputi 20 (dua puluh) persen Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 (sepuluh) persen Ruang Terbuka Hijau Privat.

luas RTH Kota bukittinggi pada tahun 2019 adalah 212,163 Ha (8,4%) dari luas RTH 254 indikator yang seharusnya tersedia yaitu sebesar 506 Ha (20%). Sehingga untuk persyaratan luas minimal 20 (dua puluh) persen RTH Publik dari luas wilayah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang belum tercapai.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M2008 bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbagi dua, yaitu :

1. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
2. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Penyebab tidak tercapainya target capaian persentase RTH Publik dikarenakan kawasan yang seharusnya menjadi RTH dalam kondisi terbangun sehingga hal ini menjadi kendala dalam penambahan luas kawasan RTH. Disamping itu, lahan untuk pembangunan dan penambahan luas RTH yang sulit disediakan di Kota Bukittinggi. Penyebab lain yang membuat tidak tercapainya target adalah karena sebagian lahan yang berpotensi untuk diplot sebagai RTH adalah tanah kaum sehingga dibutuhkan pembahasan/negosiasi yang panjang dengan tokoh masyarakat untuk menyepakati suatu area untuk dijadikan RTH publik. Harga tanah yang tinggi di kota Bukittinggi juga merupakan faktor pendorong kegagalan pencapaian target pemenuhan RTH publik karena keterbatasan APBD untuk pembelian tanah dimaksud.

3. Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan

Fasilitas umum merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam menggunakan fasilitas umum, masyarakat tidak dikenai bayaran. Fasilitas umum terdiri dari jalan raya, tempat sampah, trotoar, ruang terbuka hijau, taman kota, lampu penerangan jalan, lampu lalu lintas, papan penunjuk jalan, pelayanan pemadam kebakaran, jembatan dan lainnya.

Pada tahun 2019 ini, realisasi indikator untuk Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan adalah sebesar 88,12%. Hal ini telah melebihi target 2019 yaitu sebesar 75%, dengan capaian sebesar 117,49%.

Berikut rincian fasilitas publik di Kota Bukittinggi dan upaya peningkatan yang dilakukan selama tahun 2019:

- a. Jalan $(157,4/180,17) \times 100\% = 87,8 \%$
- b. Jembatan $(29/32) \times 100\% = 90,62 \%$
- c. Trotoar $(66/86) \times 100\% = 77\%$
- d. Saluran Air $(60.088\text{m}^2/61.568\text{m}^2) \times 100\% = 97,5\%$

Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan terus bertambah seiring dengan giatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Mengacu pada kondisi awal RPJMD dengan Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan 55%, hingga tahun 2019 telah mampu dilampaui dengan realisasi mencapai 88,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah Persentase Fasilitas Publik yang

Memenuhi Standar Lingkungan terus bertambah seiring dengan giatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya maksimalkan seluruh potensi sesuai dengan rencana kerja Tahun 2019. Namun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Persentase Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Lingkungan di Kota Bukittinggi saat ini terkait dengan pembebasan lahan/tanah dimana Pemerintah harus berhadapan dan bernegosiasi dengan pemilik. Perdebatan akan luas tanah antara fisik dengan pencatatan aset masih terjadi, sehingga mengakibatkan terkendalanya proses penerbitan sertifikat dan lain-lainnya. Konflik internal antara pemilik tanah/bangunan terhadap pengembalian tanah By Pass menjadi perhatian serius yang terus diupayakan untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Penyebab keberhasilan lain adalah adanya pengawalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak dari awal perencanaan dengan memperhatikan keberadaan dan pelestarian lingkungan.

4. Pemenuhan target universal acces (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)

Pencapaian sasaran strategis pemenuhan target universal acces memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu:

a. Cakupan akses air minum layak

Cakupan akses air minum layak Kota Bukittinggi belum 100%. Tahun 2019, upaya pemerintah Kota Bukittinggi untuk memenuhi cakupan akses air minum layak bagi masyarakat bukittinggi baru terealisasi 88.68% atau 114.211 jiwa dari 128.783 jiwa. Masih terdapat sekitar 14.572 jiwa yang belum mendapatkan cakupan akses air minum layak di Kota Bukittinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memperluas cakupan akses air minum layak, salahsatunya dengan mengusulkan Pembangunan Embung yang berlokasi di Tabek Gadang. Embung ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kebutuhan akan air di Kota Bukittinggi. Pembangunan embung ini dibiayai oleh APBN dan APBD Kota Bukittinggi, dimana untuk tahap awal ini PDAM Kota Bukittinggi dapat memanfaatkan air 40 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan 3.800 Rumah Tangga baru.

Persentase cakupan air minum layak Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan realisasi 88,68%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan capaian 100% masih belum dicapai. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan penyediaan air minum layak

dengan dinataranya dengan diujicobakannya Embung Tabek Gadang sejak tahun 2019 yang secara langsung telah dapat menopang pemenuhan akses air minum layak bagi masyarakat Kota Bukittinggi, melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan kualitas air serta dengan meningkatkan distribusi air minum layak ke rumah-rumah warga masyarakat.

Dalam upaya penyediaan akses air minum layak, Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa melakukan berbagai usaha untuk menjamin ketersediaan air minum layak bagi penduduknya, salah satunya penyediaan lahan untuk pembangunan embung air di Tabek Gadang. Disamping itu, petugas kesehatan juga senantiasa melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya air minum yang memenuhi standar kesehatan serta selalu melakukan pengawasan terhadap sarana air minum dilakukan secara berkala.

Upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menambah debit air minum di Kota Bukittinggi adalah mencari sumber air baku melalui kerjasama dengan Kabupaten Agam yaitu melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional Bukittinggi-Agam dimana saat ini masih dalam tahap pembebasan Finalisasi MoU di Kementerian PUPR dan melalui upaya memaksimalkan potensi sumber air yang ada di Kota Bukittinggi sendiri yaitu rencana pembangunan SPAM Panorama Baru. Upaya lain adalah mengurangi tingkat kebocoran air yaitu dengan penggantian pipa distribusi PDAM yang sudah tua (pipa zaman Belanda) yang dilakukan secara bertahap dengan pendanaan APBN dan APBD Kota Bukittinggi.

Untuk pembangunan Embung Tabek Gadang ini, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menghabiskan dana sebesar 10 (sepuluh) Milyar untuk pembebasan lahan dan anggaran PDAM Tirta Jam Gadang sebesar 3 (tiga) Milyar untuk pembebasan lahan sebagai jalan menuju Embung.

b. Luas kawasan kumuh

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.

Luas permukiman kumuh pada tahun 2014-2017 di Kota Bukittinggi adalah seluas 30,6 Ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-300-2014 Tahun 2014 terdapat 2 (dua) lokasi kawasan kumuh kota kategori kumuh berat dengan luas total 30,6 Ha, yaitu Kawasan Aur Tanjungkang Tengah Sawah dengan luas kawasan lebih kurang 8,48 Ha dan Pakan Kurai dengan luas 22,12 Ha yang terletak di Kecamatan Guguk Panjang. Dari luas tersebut, luas permukiman kumuh yang tertangani adalah 8,81 Ha pada tahun 2017, sehingga persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2017 adalah sekitar 28,79 %. Persentase ini terus diupayakan berkurang dengan adanya kelanjutan program KOTAKU pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 ini persentase luasan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi berkurang menjadi 0%. Artinya dengan ditetapkannya 2 (dua) Kawasan Kumuh sebagaimana diatas, telah dituntaskan 2 (dua) kawasan tersebut tidak menjadi Kawasan Kumuh lagi pada tahun 2019. Diharapkan penuntasan Kawasan Kumuh ini berlangsung secara menyeluruh hingga tidak ada lagi Kawasan Kumuh di Kota Bukittinggi.

Tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil mencapai target akhir RPJMD. Upaya keras Pemerintah Kota dalam menekan luas kawasan kumuh hingga ke titik 0 Ha telah berhasil dilakukan dalam 3 tahun anggaran. Hingga nanti diakhir tahun RPJMD Pemerintah Kota akan terus berupaya agar 0 Ha luas kawasan kumuh ini dapat dipertahankan dengan tetap melakukan berbagai program dan kegiatan yang mampu meminimalisir munculnya kawasan-kawasan kumuh di Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai salah satu dari 11 kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang menjadi prioritas Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Upaya yang dilakukan diantaranya dengan melakukan sinergi dari penugasan khusus Kementerian Keuangan kepada SMF yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Pemerintah kota Bukittinggi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, dan Direktur SMF. Selanjutnya, Kementerian PUPR menunjuk Kota Bukittinggi sebagai penerima hibah senilai Rp1 miliar untuk membenahi 12 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi 45 jiwa di 2 Kelurahan di yakni Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah (AATS) dan Kelurahan Pakan Kurai.

c. Persentase sanitasi layak

Sanitasi merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan khususnya kesehatan masyarakat. Di Indonesia penanganan sanitasi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase lingkungan terutama di kawasan permukiman. Sanitasi dikatakan layak apabila toilet di

masing-masing rumah tangga sudah dilengkapi dengan sarana pengolahan air buangan yang memenuhi standar teknis baik untuk skala individual maupun skala komunal atau bersama.

Capaian kinerja untuk akses sanitasi layak baru mencapai 96,38%. Hal ini berarti bahwa jika dibandingkan dengan target nasional untuk tahun 2019 yang sudah harus 100%, pencapaian Kota Bukittinggi masih berada dibawah target nasional.

Pembangunan Sanitasi Kota Bukittinggi telah dirumuskan dalam Buku Putih Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dimuat dalam bentuk Memorandum Program Integrasi Program Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Dan Nasional melalui Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR. Monitoring dan evaluasi secara nasional program ini dilakukan dalam City Sanitation Summit setiap tahunnya seluruh pemerintah kabupaten dan kota peduli sanitasi, yang tergabung dalam AKKOPSI.

Pada tahun 2016, berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi ditargetkan 90% sanitasi yang ada di Bukittinggi sudah termasuk dalam kategori sanitasi layak, dan pada akhir tahun 2019, sesuai target nasional 100% sanitasi sudah harus masuk dalam sanitasi layak. Fokus penanganan dalam memenuhi sanitasi layak ini meliputi penyediaan tangki septik baik komunal ataupun terpusat. Selanjutnya penyediaan IPLT yang juga akan diarahkan sebagai IPLT Regional karena keterbatasan lahan di Bukittinggi.

Pencapaian target kinerja ini diupayakan melalui kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pembiayaan program juga dibiayai bersama melalui APBD pemerintah provinsi dan program Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR. Keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, karena itu dilakukan pertemuan yang intens melalui pemerintahan kecamatan dan kelurahan dan lembaga keswadayaan masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang ada pada seluruh kelurahan.

Persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat 93,12% sementara tahun 2016 terjadi penurunan signifikan menjadi 72,72% dari 95% yang ditargetkan, dan pada tahun 2017 dengan target 90% terealisasi 90,05% dan pada tahun 2019 ditargetkan 100% dan terealisasi 96,38% dengan realisasi capaian kinerja 96,38%. Kondisi ini merupakan penyesuaian terhadap data pada Strategi Sanitasi Kota dan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan.

persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan realisasi 96,38%, jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD dengan realisasi 100% ada setidaknya lebih kurang 3,62% atau 4,654 orang yang harus dicapai sampai akhir masa RPJMD dengan target 100%. Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meningkatkan sanitasi layak disetiap rumah warga sehingga terjadinya peningkatan mutu kesehatan masyarakat.

Secara umum pencapaian akses sanitasi layak yang cukup tinggi ini, tidak terlepas dari gencarnya pembinaan-pembinaan ke rumah tangga serta kesadaran masyarakat sendiri yang cukup tinggi. Capaian Sanitasi Layak juga ditentukan oleh keberadaan IPLT, sementara Kota Bukittinggi sampai saat ini belum memiliki IPLT. Sesuai dengan Revisi RTRW Kota Bukittinggi maka telah diplot lokasi pembangunan IPLT dan tahun 2018 telah dilakukan kajian *Feasibility Study* (FS). Disamping indikator ini juga ditentukan oleh pembuangan limbah tinja langsung ke saluran drainase/cubluk atau sungai, hal ini menyebabkan air tanah menjadi tercemar oleh bakteri e-coli dan hal ini juga disebabkan oleh septictank yang tidak septic artinya adanya kebocoran.

5. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota

Sasaran strategis pengendalian dan pemanfaatan ruang kota memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang kota. Pengontrolan pemanfaatan ruang dilakukan melalui penerbitan Rekomendasi Peruntukan Lahan, yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Kota Bukittinggi sebelum penerbitan izin mendirikan bangunan. Sementara bangunan yang didirikan tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukan lahan diawasi melalui razia gabungan yang melibatkan Dinas PUPR, Dinas PMPTSPPTK, Satpol PP dan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan.

Pada tahun 2019, ditargetkan 70% pemanfaatan ruang kota sudah sesuai dengan peruntukan lahan dalam pola ruang kota yang termuat dalam RTRW, dan sesuai dengan realisasi pemanfaatan ruang kota sebanyak 80,19% sudah sesuai dengan peruntukan ruang. Kesesuaian pemanfaatan ruang kota pada awal RPJMD dengan capaian 55% sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 70%, sampai pada akhir masa RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi menargetkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang kota menjadi 70% dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 80,19%.

Dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang, pemerintah Kota Bukittinggi mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang diketuai oleh Sekretaris

Daerah dan Sekretariatnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tim ini melakukan analisa dan menerbitkan peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang daerah. Pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dilakukan melalui penggusuran, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Bangunan tanpa izin diharuskan mengurus izin, sementara itu juga dilakukan revisi terhadap RTRW sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini dimungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan penataan ruang daerah, setelah dilakukan peninjauan kembali dan diproses secara teknis sesuai ketentuan pemerintah.

6. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi memiliki 3 (tiga) indikator linierja utama yaitu:

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya menjelaskan bagaimana perkembangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi sudah berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi propinsi (5,05%) dan nasional (5,02%). Dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 di RPJMD Kota Bukittinggi sebesar 6,40% telah dicapai yaitu 5,88%.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Hal ini sesuai dengan potensi Kota Bukittinggi sebagai kota wisata pariwisata, perdagangan dan jasa. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berbenah dan memenuhi seluruh infrastruktur pendukung sektor utama kota ini yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dominansi sektor tersier terhadap struktur ekonomi kota. Meskipun masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Nasional pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi masih berada diatas Propinsi dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi belum mampu melampaui target pada tahun ke-4 RPJMD.

Pada tahun 2019 secara nasional capaian pertumbuhan ekonomi nasional turun secara menyeluruh, bahkan penurunan ini terburuk dalam 5 tahun terakhir. Tidak terkecuali terjadi

pada Kota Bukittinggi, penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam 5 tahun terakhir adalah dampak dari menurunnya kinerja perekonomian Nasional. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa apabila terjadi penurunan kinerja perekonomian nasional maka hal inipun akan diikuti oleh daerah, termasuk Kota Bukittinggi. Jika di Indonesia penyebab utamanya adalah karena melemahnya sektor industri pengolahan maka di Kota Bukittinggi lebih didominasi oleh sektor perdagangan dan pariwisata. Menurunnya kinerja perekonomian juga didorong oleh penurunan investasi swasta ke Kota Bukittinggi dan turunya industri rumah tangga yang disebabkan oleh turunya permintaan baik nasional maupun internasional dalam bentuk ekspor.

b. PDRB perkapita

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu negara dan daerah. Indikator kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi diantaranya dapat dilihat dari data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PDRB perkapita dan indeks Gini/Koefisien Gini. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah. Dengan demikian PDRB dapat menggambarkan kegiatan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan sifat kegiatan perekonomiannya.

PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

PDRB per kapita Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah sebesar Rp 66,52 juta meningkat dari tahun 2017 yang berjumlah Rp 58,78 juta. Kondisi ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi kota yang relatif tinggi sementara pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan relatif stabil. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu di dalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

PDRB Perkapita Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016 hingga 2019. Dimana pada tahun 2019 PDRB perkapita Kota Bukittinggi mencapai angka 66,52 juta. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi adalah mengembangkan sektor-sektor potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempertahankan dan bahkan menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga menjadi stabil atau malah cenderung berkurang. Hal penting lain yang sangat terkait dengan ini adalah mengendalikan inflasi walaupun realitanya pada tahun 2016 tingkat inflasi terlalu rendah berada pada level dibawah 3% sehingga tidak terlalu mendorong bertumbuhnya ekonomi dari sektor riil.

c. Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain :

- Ketimpangan Rendah ($G < 0,3$)
- Ketimpangan Sedang ($0,3 \leq G \leq 0,5$)
- Ketimpangan Tinggi ($G \geq 0,5$)

Jika Koefisien bernilai 0, berarti ketimpangan sempurna.

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dihitung dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. "0" berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan "1" berkaitan dengan ketidak setaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indeks Gini Kota Bukittinggi pada tahun 2018 adalah sebesar 0,329, yang menggambarkan bahwa Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang memiliki ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, maka pemerataan penduduk lebih mengarah ke pemerataan sempurna dimana indeks gini Kota Bukittinggi sebesar 0,267. Sudah berada dibawah 0,3. Artinya kita sudah berada pada tingkat ketimpangan rendah. Dari hasil Susenas 2016, diperoleh hasil rata-rata pengeluaran per Kapita di Kota Bukittinggi paling besar di kelompok Makanan, yaitu sebesar 50,42 persen, sedangkan pengeluaran di kelompok bukan makanan sebesar 49,58 persen. Secara umum, 3 pengeluaran terbesar

yaitu: kelompok perumahan dan fasilitas rumah sebesar 23,70 persen, kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 18,34 persen, dan aneka barang dan jasa sebesar 13,16 persen.

Dilihat dari struktur ekonomi kota, dan distribusi masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut, terlihat bahwa sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja belum maksimal, malah sedikit berkontraksi. Hal lain juga terjadi karena sektor riil kurang berkembang, sehingga sebaran penduduk yang berusaha di sektor informal terus meningkat. Hal ini juga mendorong indeks gini sedikit bergeser ke tingkat sedang.

Beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah kota untuk mendorong Bergeraknya sektor riil diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dominan menjadi usaha masyarakat. Berdasarkan indeks gini dan dikategorikannya Kota Bukittinggi sebagai kategori “Sedang” dengan indeks yang semakin mendekati 0,3, artinya pemerataan pendapatan di Kota Bukittinggi tidak terlalu timpang sehingga jarak antara penduduk yang berpenghasilan tinggi dan rendah tidak terlalu jauh.

Hal ini disebabkan oleh semakin gencarnya pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian masyarakat bisa meningkatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan.

Indikator Kinerja Indeks Gini pada Tahun 2019 terjadi penurunan capaian. Penyebab turunnya capaian diakibatkan karena terjadi peningkatan pendapatan pada kelompok kelas menengah keatas sementara pendapatan kelompok penduduk berpenghasilan rendah belum bergerak naik.

7. Menurunnya tingkat kemiskinan

Sasaran strategis menurunnya tingkat kemiskinan memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu tingkat kemiskinan dimana kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Pada tahun 2019 realisasi kinerja untuk tingkat kemiskinan sebesar 4,6% masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,35%. Capaian indikator Tingkat Kemiskinan sejak awal RPJMD masih belum dicapai. Namun hingga tahun 2019, angka capaian tiap tahunnya terus bergerak turun dan mengikuti target capaian dengan realisasi melebihi angka

50% di tiap tahunnya. Angka ini didominasi oleh penduduk rentan miskin yang perlu diintervensi dengan program pemberdayaan.

Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan terus muncul sebagai sebab ataupun akibat dari pemberat berbagai jenis persoalan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Belum tercapainya penurunan angka kemiskinan sesuai target adalah karena intervensi penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran. Disamping itu, semua pihak termasuk SKPD yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan belum bersinergi dengan baik sehingga masih ada program yang tumpang tindih dalam pelaksanaan intervensi.

8. Meningkatnya Pelayanan Pariwisata

Sasaran strategis meningkatnya pelayanan pariwisata memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu kunjungan wisata. Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut.

Kunjungan wisatawan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat dari awal tahun RPJMD dengan jumlah kunjungan 460.905 dan meningkat sampai tahun 2019 dengan jumlah kunjungan 584.245 orang. Pemerintah Kota Bukittinggi terus mendorong kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung serta meningkatkan promosi Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata.

Berbagai upaya terus dilakukan dalam upaya menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Bukittinggi diantaranya:

- a. Promosi dalam dan luar negeri dengan didukung sarana promosi pariwisata seperti *booklet*, *leaflet*, tas promosi, kalender pemerintah Kota Bukittinggi serta mengoptimalkan media online.

- b. Meningkatkan *event* kepariwisataan, *event Tour de Singkarak* sejak Tahun 2009, pergelaran Seni Rupa Tambo, *Tour de Maninjau*, Fotografi, *Coffee Brewing* Bukik Apik, Festival lagu Minang, *Torch Relay Asian Games*, *Paskibraka Competition*, dan *Festival Band Psycho Effect*.
- c. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dengan perbaikan sarana dan prasarana diseluruh destinasi wisata untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung.
- d. Semakin meningkatnya *image* pariwisata Kota Bukittinggi, baik di media cetak, elektronik maupun media sosial.

9. Meningkatnya Layanan Akses Bidang Pendidikan

Sasaran strategis meningkatnya layanan akses bidang pendidikan memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Harapan Lama Sekolah. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas variabel ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2019, Harapan Lama Sekolah yang ditargetkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 15 tahun, dan terealisasi sebesar 14,96 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 99,73%. Artinya, setiap anak pada usia tertentu pada tahun 2019, akan memiliki harapan untuk bersekolah pada umur tertentu selama 14,96 tahun, atau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi pada semester 6.

Capaian ini didukung dengan keberadaan sekolah mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan perguruan tinggi yang ada di Bukittinggi sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar/ MI negeri dan swasta sebanyak 65 sekolah;
- b. SMP/ MTs negeri dan swasta sebanyak 18 sekolah;
- c. SMA/MA/SMK negeri dan swasta sebanyak 29 sekolah;
- d. Perguruan tinggi negeri dan swasta sebanyak 22 perguruan tinggi;

Pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sekolah merupakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, sementara untuk jajaran pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, baik tingkat kota maupun provinsi. Perguruan tinggi negeri sesuai kewenangannya dikelola oleh pemerintah, sementara keberadaannya sangat berpengaruh pada harapan lama sekolah di Bukittinggi. Karena itu program Pemerintah Kota

Bukittinggi terkait hal ini adalah dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi.

Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi tahun 2019 jika disandingkan dengan data awal tahun RPJMD mengalami kenaikan dari 14,7 menjadi 14,96 dan untuk akhir masa RPJMD akan ditingkatkan menjadi 15 tahun.

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari komitmen Walikota beserta jajarannya untuk senantiasa memberikan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan di Kota Bukittinggi. Hal ini tentu saja juga tidak terlepas dari peran pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeteren di bidangnya dan selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan di Kota Bukittinggi. Dan tentunya kesadaran dan kebutuhan yang sangat tinggi dari masyarakat akan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dituangkannya Pendidikan sebagai Visi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

10. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sasaran strategis meningkatkan kualitas pendidikan memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Kota Bukittinggi pada tahun 2019 sebesar 11,32 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Bukittinggi yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,32 tahun atau hampir menamatkan kelas XII. Dibandingkan dengan target pada tahun 2019, realisasi kinerja indikator ini sedikit melampaui target yaitu sebesar 11,32 tahun atau sekitar 101,07%.

Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 11,32 tahun telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 11,20 tahun. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap berupaya agar angka rata-rata lama sekolah dapat terus dipertahankan dengan tetap menjaga kualitas pendidikan di Kota Bukittinggi.

Salah satu visi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah menjadikan Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan telah diwujudkan diantaranya melalui pengalokasian dana yang cukup besar untuk menunjang sektor ini. Semakin tingginya capaian rata-rata lama sekolah di Kota Bukittinggi pada tahun 2019 menunjukkan minat dan keinginan masyarakat Kota Bukittinggi yang semakin tinggi untuk melanjutkan dan meningkatkan pendidikan formal. Hal ini seiring dengan pembenahan di sektor pendidikan, pembenahan sarana dan prasarana serta kualitas mutu lainnya. Pemerintah Kota Bukittinggi selalu mendorong agar rapor mutu pendidikan selalu

meningkat dan mencapai delapan standar mutu pendidikan.

11. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Sasaran strategis Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Angka harapan hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup Tahun 2019 dengan realisasi 74,22 tahun telah berada diatas target akhir RPJMD. Pada tahun 2019 ditetapkan target angka harapan hidup Kota Bukittinggi 73 tahun dan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bukittinggi, angka harapan hidup Kota Bukittinggi mencapai 74,22 tahun dan menjadi salah satu variabel Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi ini melampaui target dengan tingkat capaian 101,67%.

Pencapaian angka harapan hidup merupakan dampak dari berbagai kinerja bidang kesehatan, seperti tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, angka kesakitan dan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi beserta seluruh instansi dan lembaga kesehatan tingkat kota hingga kelurahan.

Tugas ini juga menjadi bagian penting partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui berbagai program di tingkat kelurahan, dasa wisma pos yandu dan kader kesehatan.

12. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Sumberdaya Kesehatan

Sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu persentase Puskesmas terakreditasi. Akreditasi Puskesmas merupakan suatu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Komisi Akreditasi terhadap standar pelayanan di Puskesmas. Akreditasi penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Dengan telah terakritisasinya semua Puskesmas di Kota Bukittinggi, dapat diartikan bahwa

pelayanan yang diberikan di semua Puskesmas telah terstandarisasi sesuai dengan standar akreditasi. Dengan demikian diharapkan masyarakat merasa lebih nyaman dalam berobat ke Puskesmas karena kualitas pelayanannya telah meningkat.

Jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD sebesar 30%, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% dan telah dapat mencapai target akhir RPJMD.

Keberhasilan pencapaian indikator ini, tidak terlepas dari dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan terutama Walikota Bukittinggi yang cukup concern terhadap masalah kesehatan di Kota Bukittinggi. Disamping itu keterlibatan semua sektor juga ikut mendukung pencapaian, diantaranya Dinas Kesehatan sebagai instansi pembina dan pendamping, kecamatan, kelurahan, kader-kader di masing-masing wilayah kerja Puskesmas.

13. Terkendalinya Jumlah Penduduk

Sasaran strategis terkendalinya jumlah penduduk memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu laju pertumbuhan penduduk. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk akan selalu mengalami pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Ditambah lagi oleh faktor Kota Bukittinggi sebagai pusat pertumbuhan di Sumatera Barat sehingga menjadi kota tujuan oleh penduduk wilayah sekitar untuk tinggal dan menetap dalam rangka mencari nafkah.

Dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD yang berada pada angka 1,71, saat ini laju pertumbuhan penduduk di Kota Bukittinggi sudah berada di angka 1,55. Namun jika dibandingkan dengan kondisi akhir, Kota Bukittinggi masih harus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu pada angka 1,38.

Dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya:

- a. Memfasilitasi alat dan kontrasepsi secara gratis;
- b. Melakukan pelayanan berkala di fasilitas kesehatan dan pelayanan serentak yang dikerjasamakan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Penyuluh Lapangan KB (IpeKB), TNI dan Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi;
- c. Menyediakan biaya layanan kegagalan program KB;
- d. Pemberian testimoni kepada calon akseptor oleh akseptor sukses;

- e. Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui berbagai model seperti KIE perorangan, KIE Kelompok, KIE Media Masa dan KIE melalui mobil penerangan KB (MUPEN);
- f. Memfasilitasi KIE KIT untuk kader, kelompok kegiatan dan Generasi Berencana (GenRe) KIT untuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) jalur pendidikan dan masyarakat;
- g. Mengkampanyekan hindari 4 T melalui berbagai penyuluhan yaitu tidak melahirkan terlalu muda, tidak melahirkan terlalu tua, tidak melahirkan terlalu banyak, tidak melahirkan terlalu rapat;
- h. Mengembangkan program Ketahanan Remaja melalui kegiatan PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat dengan konsentrasi program Tidak Menikah di Usia Dini, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, Memberikan Pemahaman Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- i. Mengembangkan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- j. Menggerakkan kampung KB; dan
- k. Membentuk dan mensosialisasikan Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi.

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

A. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya

Permasalahan pada prioritas pertama adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya
2. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau,
3. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama

B. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik

Berbagai permasalahan dari prioritas Kota Bukittinggi yang kedua ini sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya Struktur Organisasi Tata Kerja dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan SOTK Kota Bukittinggi belum efektif dan efisien karena belum mampu menyentuh seluruh aspek pelayanan masyarakat.
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal
3. masih terbatasnya kompetensi aparatur dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
4. manajemen kepegawaian dalam hal penempatan aparatur belum merujuk sepenuhnya kepada kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri
5. gedung kantor yang masih bergabung dengan kantor lain, menumpang atau memanfaatkan gedung lain yang masih menjadi aset ataupun bukan aset pemerintah kota
6. luasan gedung yang belum maksimal menampung personil kantor, gedung satu kantor yang terpisah relatif jauh
7. sarana dan prasarana lainnya berupa mobiler, peralatan gedung kantor dan peralatan kerja juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektifitas kerja, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik
8. peningkatan sarana dan prasarana berupa hardware dan software serta peningkatan sumber daya manusia berupa brain ware.
9. belum memiliki dukungan yang memadai untuk pengembangan jaringan, aplikasi dan sumber daya manusia untuk memenuhi Kota Bukittinggi sebagai smart city

C. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan

Secara umum permasalahan dalam peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan adalah:

1. Belum maksimalnya pendidikan berbasis aqidah sehingga belum mampu menjadi icon kota sebagaimana yang diharapkan
2. belum meratanya akses dan kualitas pendidikan tersebut bagi seluruh masyarakat.
3. Permasalahan tingkat kompetensi tenaga pendidik
4. manajemen pengelolaan lembaga pendidikan yang belum terkelola dengan baik

D. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Pada prioritas keempat masih terdapat permasalahan berupa:

1. Keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan alat kesehatan untuk operasional RSUD Kota Bukittinggi
2. Permasalahan penanganan penyakit yang relatif ekstra dan diakses secara cepat

3. belum terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat berdasarkan indikator indonesia sehat
4. Permasalahan kualitas tenaga kesehatan
5. Masih kurangnya ketersediaan seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

E. Pengembangan Pariwisata

Secara umum permasalahan dari pengembangan pariwisata adalah:

1. Sarana dan prasarana daerah destinasi pariwisata masih terbatas
2. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif dan daya saing
3. Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial
4. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
5. Kelembagaan pengelolaan pariwisata belum maksimal
6. Belum berkembangnya ekonomi kreatif

F. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Secara umum permasalahan yang dihadapi pada prioritas keenam sebagai berikut:

1. belum terwujudnya ketangguhan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan potensi unggulan daerah.
2. permasalahan peningkatan kualitas produk, packaging, manajemen usaha pelaku UMKM dan pola pemasaran.
3. Keterbatasan penggunaan teknologi produksi karena spesifik masing-masing produk dan bahkan pelaku usaha.
4. Permasalahan modal usaha dalam kaitannya dengan kredit perbankan
5. Permasalahan manajemen dalam pengelolaan keuangan.

G. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum permasalahan pada penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya
2. Masih tinggi tingkat pengangguran
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur

H. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur

Permasalahan pada prioritas nomor delapan adalah:

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
2. Masih tingginya *backlog* perumahan, serta berubahnya indeks kegempan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal
3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase)
4. Belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah

I. Pelestarian lingkungan hidup

Permasalahan untuk pelestarian lingkungan hidup berupa:

3. Permasalahan kualitas air dan tanah menjadi perhatian serius, terutama dengan konversi lahan pertanian menjadi bangunan dan gedung, serta pemanfaatan irigasi sebagai drainase.
4. Permasalahan fungsi-fungsi drainase tidak berjalan baik, sehingga menimbulkan genangan air disamping luapan air dari luar kota.
5. Permasalahan kualitas sanitasi. Target pemerintah tahun 2019, kualitas sanitasi sudah 100% baik, dimana kualitas sanitasi sudah memenuhi standar nasional. Persoalan ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup dengan berperilaku hidup bersih dan sehat.

Beberapa persoalan yang perlu diuraikan lebih mendalam antara lain adalah seperti berikut ini :

a. Persampahan

Tingginya tingkat aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Prilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, masyarakat yang tinggal diperbatasan serta dari aktifitas perdagangan.

Beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Payakumbuh cukup membantu penyelesaian masalah persampahan untuk sementara, namun tidak dalam jangka panjang, hal ini disebabkan karena keterbatasan daya tampung dan daya dukungnya dari TPA tersebut. Untuk itu pemerintah kota perlu memikirkan TPA regional baru karena pembangunan TPA di dalam Kota Bukittinggi tidak memungkinkan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan yang ada. Disamping itu, program 3 R (*reduce, reuse and recycle*) belum berjalan efektif, sehingga perlu lebih ditingkatkan

dengan cara pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Permasalahan sampah juga erat hubungannya dengan permasalahan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat di Kota Bukittinggi, maka permasalahan limbah pun menjadi sorotan yang perlu mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk mengatasi permasalahan sampah dan limbah ini perlu adanya kerjasama dengan daerah tetangga, yaitu Kabupaten Agam, dan juga mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

b. Air bersih

Ketersediaan air bersih guna melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu penunjang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Kondisi eksisting prasarana air minum di Kota Bukittinggi saat ini dilayani oleh PDAM Tirta Jam Gadang. Sumber Air baku PDAM berasal dari Mata Air Sungai Tanang, Mata Air Cingkaring, Sumur Bor Tabek Gadang, Sumur Bor Birugo, Sumur Bor Palolok, Sumur Dangkal Kubang Putih.

Secara umum, distribusi air minum di Kota Bukittinggi menggunakan sistem gravitasi, namun setiap sumber air memiliki cara pendistribusian masing-masing hingga sampai ke daerah pelayanan. Hingga saat ini wilayah pelayanan air minum hampir memenuhi keseluruhan wilayah perencanaan walaupun terdapat beberapa kelurahan yang belum terlayani pelayanan air minum oleh PDAM. Guna mendukung pendistribusian air, saat ini telah dibangun beberapa reservoir dengan total kapasitas sebesar 3.180 m³. Namun karena keterbatasan produksi maka tidak semua reservoir tersebut berfungsi. Permasalahan penting lain juga terkait jaringan perpipaan di Bukittinggi yang sudah tua, sehingga efisiensinya masih rendah, dan tingkat kebocoran cukup tinggi.

Selain mencari sumber air baku baru dari luar kota, Bukittinggi juga sudah harus melakukan rehabilitasi jaringan perpipaan, terutama transmisi induk dari sumber air baku di Sungai Tanang hingga batas kota. Sementara jaringan dalam kota sudah dilakukan rehabilitasi dan penggantian pipa secara bertahap semenjak tahun 2015 sampai 2019 ini. Dengan demikian peta jaringan menjadi hal penting untuk melihat kondisi perpipaan PDAM di Bukittinggi.

c. Sanitasi Kota

Kondisi sanitasi Kota Bukittinggi belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Penanganan sanitasi perkotaan mestinya sudah mengarah untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang komunal dan terpusat. Permasalahan yang dihadapi oleh Bukittinggi adalah keterbatasan lahan untuk pembangunannya. Sampai saat ini di Bukittinggi belum ada IPAL komunal ataupun IPLT. Persoalan ini tentu akan sangat mengurangi daya dukung lingkungan kota. Pada tahap berikutnya ini akan menjadi persoalan lingkungan, munculnya

kawasan kumuh dan persoalan lingkungan lainnya.

Sementara itu penanganan persoalan sanitasi telah menjadi target nasional untuk dituntaskan maksimal di tahun 2019. Sementara kondisi drainase kota belum sepenuhnya mampu mengendalikan pemasalahan titik genangan air pada beberapa kawasan yang akan berdampak pada kondisi kawasan tersebut. Dengan demikian penyelesaian masalah drainase di Bukittinggi perlu menjadi prioritas untuk ditangani untuk pencapaian universal access dan peningkatan pelayanan sanitasi di Kota Bukittinggi.

d. Genangan Air

Permasalahan genangan air sewaktu hari hujan menjadi sangat krusial dialami Bukittinggi. Permasalahan ini disebabkan oleh kondisi drainase kota yang belum mampu menampung luapan air sewaktu hujan karena endapan sedimen, dimensi dan jaringan yang tidak memadai. Persoalan lain juga diakibatkan oleh volume air hujan akibat luapan dari wilayah luar kota.

Penyelesaian persoalan ini perlu dukungan manajemen drainase terkait dengan penataan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier beserta dukungan dimensinya. Yang paling mendesak dilakukan dalam waktu dekat adalah pengerukan sedimen untuk mendukung kelancaran aliran air. Sementara penyelesaian luapan air pada musim hujan dari luar kota perlu dilakukan pembenahan drainase luar kota dan pengalihan aliran drainase hingga ke drainase primer. Persoalan terkait lainnya yang perlu diseriuskan adalah pengawasan dan edukasi pada masyarakat kota, luar kota dan pengunjung untuk tidak membuang sampah ke dalam drainase.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan:

1. Kekurangan guru di Sekolah Dasar
2. Kekurangan guru bidang studi di SMP

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan:

Keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan alat kesehatan untuk operasional RSUD Kota Bukittinggi

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan:

Pelaksanaan perbaikan drainase Jln. Padang Luar Bukittinggi sampai tahun 2017, mengakibatkan debit air menuju Kota Bukittinggi semakin besar. Drainase Kota Bukittinggi tidak mampu menampung debit air dari Padang Luar sehingga perlu solusi untuk pengalihan debit air dari hulu/padang luar dan Jambu Air menuju Batang Tambuo atau dihantar langsung ke Batang Sianok

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan:

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
2. Masih tingginya *backlog* perumahan, serta berubahnya indeks kegempan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal
3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase)
4. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah

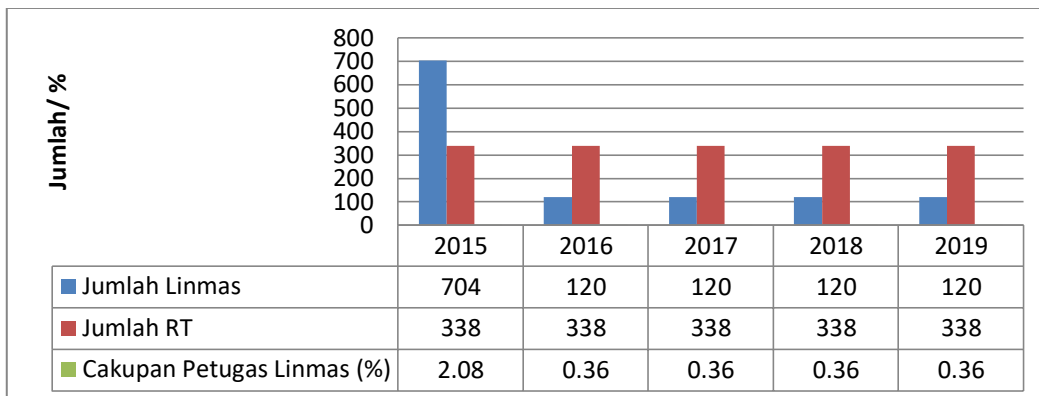
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kota Bukittinggi terus melakukan upaya untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kinerja pelayanan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada beberapa indikator sebagaimana berikut:

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Grafik 2.35
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Satpol PP, diolah, 2020

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 cakupan petugas Linmas lebih banyak dibandingkan tahun-tahun selanjutnya, dengan persentase 2,08, sedangkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 cakupan petugas Linmas hanya 0,36. Kondisi ini disebabkan karena adanya Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015 yang mengharuskan petugas linmas di masing-masing TPS harus tersedia. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi penurunan kembali petugas linmas hingga mencapai angka cakupan 0,36% dan kondisi ini berlanjut terus hingga memasuki tahun 2019, meskipun pada Tahun 2019 diadakan Pemilu namun tidak dilakukan penambahan jumlah petugas linmas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota maka kondisi idealnya petugas LINMAS itu ada 1 orang per RT. Sehingga jumlah yang ideal untuk kota Bukittinggi untuk petugas linmas adalah sebanyak RT yang ada yaitu 338 orang. Jadi untuk kondisi saat ini petugas linmas yang ada belum cukup memadai. Diperlukan sosialisasi mengenai peran fungsi Linmas mulai tingkat kecamatan maupun kelurahan.

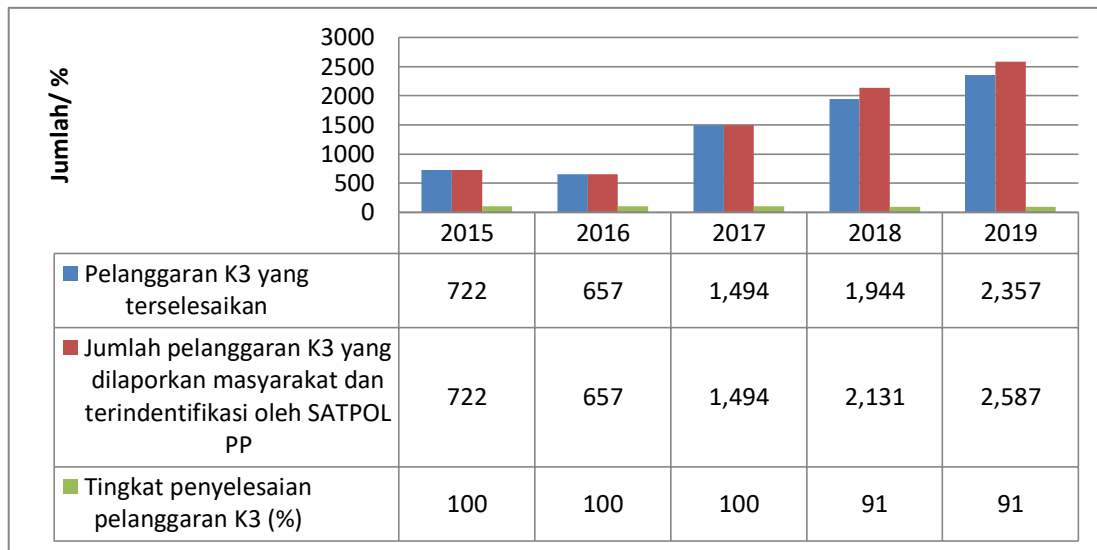
b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 4 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk itu tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan

keindahan merupakan salah satu indikator dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Capaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dapat diukur dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang telah dilaksanakan. Selama periode Tahun 2015-2019, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.36
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Satpol PP. 2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran K3 cenderung meningkat. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ditahun 2018 dan Tahun 2019 hanya sebesar 91%, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 terdapat sebanyak 187 kasus yang masih dalam proses penyelesaian pelanggaran Perda antara lain menunggu proses sidang, tidak sanggup membayar biaya penegakan Perda, atau tidak/belum diselesaikan oleh pihak pelanggar Perda. Kejadian yang sama juga terjadi pada Tahun 2019 dengan jumlah kasus yang masih dalam proses penyelesaian meningkat menjadi 230 kasus

c. Penegakan PERDA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan

kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

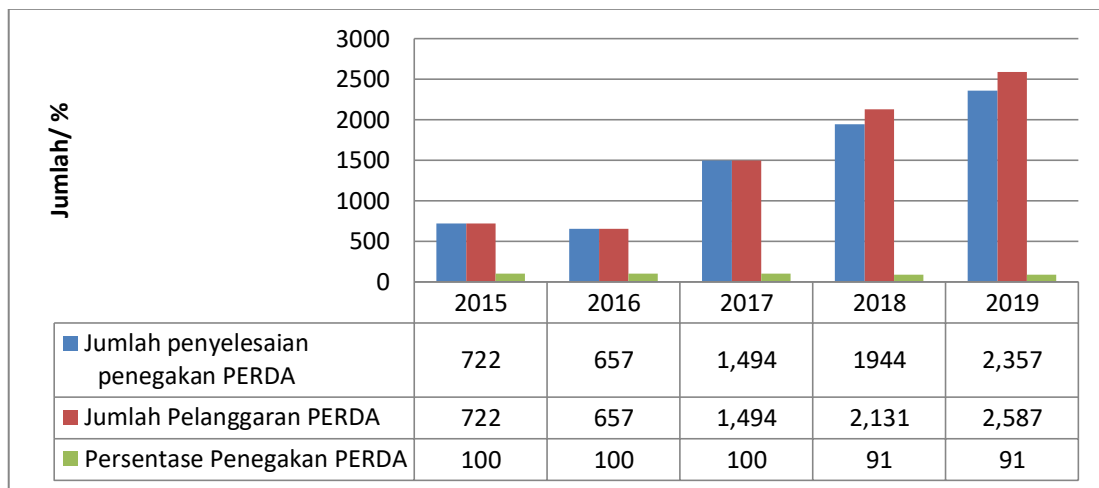
Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan *preventifnon yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persentase penegakan PERDA dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.37

Persentase Penegakan PERDA Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Satpol PP. 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan 2017 jumlah pelanggaran Perda dengan jumlah penyelesaian pelanggaran K3 sama nilainya, karena yang baru dikerjakan oleh Satpol PP baru Perda Trantibum saja. Sementara itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP bukan hanya ditugaskan untuk penegakan Perda Trantibum saja, namun

idealnya Satpol PP menegakkan seluruh Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang ada. Berbeda halnya dengan Tahun 2018 dan 2019, tidak seluruh pelanggaran PERDA dapat diselesaikan.

6. Urusan Sosial

Permasalahan:

1. Meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Bukittinggi. Dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Bukittinggi belum ditangani secara maksimal. Hal ini dikarenakan belum ada rumah penampungan sementara untuk Gelandangan dan Pengemis tersebut.
2. Meningkatnya jumlah eks. Penderita penyakit kejiwaan. Penderita penyakit kejiwaan yang telah melewati perawatan di RSJ Saanin Padang dan Membutuhkan rehabilitasi lebih lanjut di Panti Rehabilitasi agar penyakit kejiwaan mereka tidak muncul lagi.
2. Jumlah eks Pengguna narkoba, cenderung meningkat setiap tahunnya. Penanganan Eks. Pengguna Narkotika, Napza dan Psikotropika di Kota Bukittinggi belum ditangani secara maksimal.

7. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan:

- i. Tidak ada data jumlah pencari tenaga kerja (pencaker)
- ii. tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja
- iii. terbatasnya kesempatan kerja
- iv. masih rendahnya kualitas pencari kerja,

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan:

- i. Masih rendahnya pemahaman perempuan dalam upaya perwujudan keluarga berkualitas agar terwujud ketahanan dalam keluarga
- ii. Didapatkan data-data dimana perempuan menjadi kepala keluarga di Kota Bukittinggi yaitu 629 perempuan kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga 2146 orang (data LKKS 2017), ini sangat berdampak kepada kesenjangan ekonomi.
- iii. Adanya perempuan korban kebakaran Pasar Ateh dan Pasar Aur Kuning
- iv. Rendahnya angka partisipasi perempuan di legislatif

- v. Belum tertanganinya perempuan korban kekerasan secara maksimal
- vi. Belum tertanganinya anak korban kekerasan secara maksimal
- vii. Masih minimnya sarana rumah anak dalam mendukung Kota Layak Anak dan 24 indikator kota layak anak belum terpenuhi.

9. **Urusan Pangan**

Permasalahan:

Tidak dapat digunakan dengan maksimal karena belum ada mesin penggiling padi dan peralatan jemur serta alat untuk menjahit karung beras.

10. **Urusan Pertanahan**

Permasalahan:

- i. Pengadaan tanah selalu terkendala oleh masyarakat: 1.) Rencana lokasi pertama (1) ada 7 pemilik tanah, 4 sudah bersertifikat 3 belum bersertifikat dan tanah kaum atas nama Ir. H. Mursyid Dt. Mudo, hingga saat ini belum mengizinkan tanahnya untuk dijadikan pembangunan jalan kantor DPRD, 2. Rencana lokasi kedua (2) tidak jadi dilaksanakan karena banyak rumah msyarakat yang terkena dampak perencanaan jalan kantor DPRD, 3. Rencana lokasi ketiga (3) ada 6 pemilik, 2 bersertifikat, 4 tanah kaum, diantara 6 pemilik 1 tanah kaum atas nama ibuk Jus tidak setuju
- ii. Pengadaan tanah untuk instansi vertikal harus jelas. Tanah eks Lembaga Permasyarakatan Bukittinggi (Menhumkam RI) tersebut belum ada kejelasan MOU dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia

11. **Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan:

- 1. Terjadinya longsor pada TPA Regional Payakumbuh
- 2. Tercemarnya Sungai Batang Agam
- 3. Sulitnya mengatasi sampah dari daerah tetangga

12. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan:

- 1. Intensitas advokasi KIE yang masih rendah serta koordinasi yang terbarukan yang selama ini

masih belum intensif antar lembaga dan institusi sehingga akan berdampak pada angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk.

2. Pengetahuan bidang kependudukan, petugas ini yang masih kurang, termasuk sistem intensitas serta kepanutan
3. Melemahnya kemitraan antar lembaga yang sifatnya bekerja bersama
4. Menu yang ada dipetunjuk operasional tidak semuanya memenuhi kebutuhan pada dana DAK sub bidang KB
5. Masih rendahnya akseptor baru MKJP
6. Kekurangan alat atau teknologi untuk produksi poktan UPPKS

13. Urusan Perhubungan

Permasalahan:

1. Dengan kondisi Trafick Light yang sudah berumur maka terjadi kerusakan yang tidak bisa diprediksi
2. Zona Selamat Sekolah yang ada tidak memadai
3. Kepemilikan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor belum jelas
4. Kurangnya kesadaran pengemudi Angkutan Umum mengikuti Peraturan Berlalu lintas, banyak pengemudi angkutan umum tidak melaksanakan kewajibannya terutama dalam retribusi angkutan
5. Bukittinggi tidak memiliki terminal angkutan barang
6. Ruas jalan By Pass yang melintasi Kota Bukittinggi belum bersambung sesuai trase jalan rencana awal
7. Kondisi pengelolaan parkir masih terdapat kendala dengan adanya gangguan keamanan dan ketertiban terhadap Jukir yang bertugas terutama gangguan premanisme. Lokasi parkir saat ini banyak yang masih on street sehingga berpengaruh terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas

14. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan:

1. Masih kurang optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
2. Belum terintegrasinya sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah

15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan:

1. 414 UMKM anggota koperasi terkena dampak musibah kebakaran Lantai II Pasar Atas pada tanggal 30 Oktober 2017
2. Akses pemasaran produk UMKM masih relatif rendah.
3. Kurangnya SDM pembina koperasi baik kualitas maupun kuantitas
4. Biaya notaris terasa memberatkan bagi koperasi baru yang didirikan oleh para pengusaha mikro
5. Wirausaha baru mengalami kendala dalam hal kecukupan modal.
6. Koperasi pemula yang beranggotakan UMKM lambat berkembang karena kekurangan modal

16. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan:

1. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi
2. Kurangnya dokumen informasi investasi seperti (FS, DED, dan lainnya).

17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan:

1. Pada tahun 2013 dari dana APBD dibangun tiang-tiang sebanyak 32 buah dan tiang-tiang tersebut tidak dirancang untuk pembangunan bertingkat, tidak memiliki basement. Sehubungan dengan belum jelasnya status KDP Sporthall maka Pemko (Disparpora) akan memintakan pendapat hukum dari TP4-D pada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi.
2. Bahwa kolam renang Atas Ngarai tidak bisa dimanfaatkan karena ukuran kedalam kolam tidak standar dan proses sterilisasi air tidak layak karena tidak mempunyai sistem penyaringan air. Pada saat ini keberadaan kolam renang Bantola dalam kawasan simpadan Ngarai Sianok 100m dari bibir ngarai dan lebih kurang 1/3 nya termasuk dalam kawasan 50m dari bibir ngarai.

18. Urusan Persandian

Permasalahan:

1. Tidak tersedianya dana untuk sosialisasi sertifikat transaksi elektronik
2. Permasalahan peningkatan kapasitas dan keahlian ASN fungsional persandian

19. Urusan Kebudayaan

Permasalahan:

1. Belum memiliki grand design kebudayaan

2. Rancangan pembangunan Hatta memorial Heritage di Istana Bung Hatta Bukittinggi
3. Pengembangan dan pemanfaatan LP
4. Kurang terkelolanya sanggar
5. Belum optimalnya ABS-SBK

20. Urusan Perpustakaan

Permasalahan:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu gedung kantor dan roll o pack
2. Kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai yaitu tenaga fungsional pustakawan

21. Urusan Kearsipan

Permasalahan:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu gedung kantor dan roll o pack
2. Kuantitas sumber daya manusia yang tidak memadai yaitu tenaga fungsional arsiparis.

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Permasalahan:

1. Banyaknya proposal kerjasama/promosi yang tidak dapat diikuti karena terbatasnya dana promosi yang berasal dari APBD
2. Permasalahan penanganan konservasi satwa liar. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung aktivitas Konservasi penanganan konservasi satwa liar.
3. Belum adanya persamaan persepsi/kesepakatan antara masyarakat dengan PEMKO Bukittinggi tentang Pengembangan Kawasan Panorama Baru
4. Belum adanya SK Gubernur tentang penetapan kawasan Ngarai Sianok sebagai Geo Area dalam pengembangan Geopark Ranah Minang dan
5. Belum adanya BKSDA untuk kawasan konservasi

2. Urusan Pertanian

Permasalahan:

1. Belum adanya perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
2. Batas wilayah pertanian belum sinkron dengan RTRW Kota Bukittinggi
3. Keterlambatan penyaluran pupuk dilapangan sering terjadi karena keterbatasan jumlah stok di gudang pengecer yang tidak memiliki modal, sehingga harus mengumpulkan uang dari petani sebelum melakukan penebusan ke distributor.

3. Urusan Perdagangan

Permasalahan:

1. Aset Kemetrolagian yang berada di Bukittinggi belum diserahkan kepada Kota Bukittinggi oleh Pemerintah Provinsi
2. Biaya Operasional Belum memadai untuk BPSK. Usulan untuk dibantu oleh Kabupaten/Kota belum didukung dengan Surat Gubernur
3. Permasalahan timbul setelah terjadi kebakaran Pasar atas
 - Pasca kebakaran hasil uji labor bangunan tidak layak
 - Jumlah penampungan tidak Cukup
 - Pakir kendaraan roda empat tidak tersedia
 - Ruang terbuka hijau & rest area hanya berpusat di area jam gadang sehingga bagian blok c, blok e dan blok f sepi pengunjung
 - Kendaraan roda 4 yang pakir harian sangat banyak seharusnya ditata
 - Penegakan aturan masih lemah
 - Pengunjung sering tersesat karena tidak ada penunjuk arah (lantai dasar)
4. Permasalahan yang timbul setelah terjadi kebakaran di Pasar Simpang Aur:
 - Pasca kebakaran hasil uji labor sebahagian stuktur bangunan tidak layak
 - Pasar tradisional tidak layak kurang luas
 - Tidak ada terminal bongkar muat barang (tempat khusus)
 - Draenase pasar tidak lancar
 - Parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak memadai.
5. Pasar bawah Kurang bersih dan tidak layak sebagai Pasar Tradisional. Pengelompokan jenis dagangan tidak berjalan sesuai rencana. Drainase pasar sering bermasalah

4. Urusan Perindustrian

Permasalahan:

1. Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah.
2. Kurangnya penguasaan teknologi dan kapasitas SDM.
3. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk.
4. Masih banyak produksi industri mikro kecil dan menengah yang belum memenuhi standarisasi dan sertifikasi
5. Keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan industri

6. Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan:

Belum ada juknis tentang pemanfaatan sisa DAK

C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Perencanaan

Adapun permasalahan penyelenggaraan fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan dan belum optimalnya pemanfaatan SDM Perencana baik secara kuantitas dan kualitas
2. Belum optimalnya penyelenggaraan proses perencanaan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi
3. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan
4. Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang
5. Belum adanya pengintegrasian sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penganggaran dan sistem informasi pengendalian, monitoring dan evaluasi

2. Fungsi Kepegawaian

Adapun permasalahan penyelenggaraan fungsi kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten
2. Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya
4. Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan
5. Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
6. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja

3. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

1. Evaluasi pendidikan dan pelatihan aparatur belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata
3. Rendahnya waktu lama diklat yang diikuti aparatur
4. Belum maksimalnya upaya pengembangan Widyaiswara
5. Masih kurangnya sumber daya kediklatan yang modern dan profesional
6. Belum optimalnya analisis kebutuhan diklat
7. Belum adanya sistem informasi kediklatan

4. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Adapun permasalahan penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Belum tersosialisasinya fungsi kelitbangan sebagai dasar penciptaan inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
2. Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas
3. Minimnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Kelitbangan
4. Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim
5. Jaringan kelitbangan yang masih terbatas
6. Minimnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi pada Pemerintahan
7. Minimnya fasilitasi penyaluran hasil inovasi teknologi kepada pengguna

5. Fungsi Pengawasan

Permasalahan:

1. Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten
2. Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bukittinggi
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya
4. Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan

5. Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja

6. Fungsi lainnya

Permasalahan:

1. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun adanya kebijakan pusat yang menyatakan bahwa untuk dikota yang tidak mempunyai desa urusan tidak dilaksanakan. Dengan tidak adanya instansi khusus tersebut menyebabkan kesulitan juga bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat provinsi Sumatera Barat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kota khususnya yang tidak menyelenggarakan urusan tersebut. Kondisi saat ini bahwa bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara parsial oleh beberapa SKPD atau bagian yakni dinas P3APPKB, bagian Pemerintahan dan kecamatan.
2. PP Nomor 84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi sampai saat ini tidak dapat diimplementasikan namun PP tersebut tidak dicabut. Ini berakibat terhadap batas wilayah Kota Bukittinggi yang belum ada ketegasan, dimana untuk menetapkan batas segmen batas antar daerah harus ditetapkan dengan Permendagri, sampai saat ini Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam belum memiliki batas yang ditetapkan Permendagri. Hal ini berimplikasi juga terhadap penegasan batas kecamatan dan kelurahan di Kota Bukittinggi yang belum memiliki legalitas hukum yang pasti dan masih berpedoman pada batas-batas alam.
3. Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 364 menyatakan bahwa daerah yang berbatasan untuk meningkatkan pelayanan publik dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib melakukan kerjasama antar daerah. Kondisi saat ini bahwa banyaknya permasalahan Kabupaten Agam yang berimbas dan menjadi permasalahan bagi kota diantaranya yakni terkait masalah persampahan yakni banyaknya sampah yang berasal dari wilayah Agam, masalah drainase yang berakibat bagi kota, permasalahan tata ruang dsb. Kalau terus dibiarkan permasalahan ini lama kelamaan akan menjadi beban bagi Kota Bukittinggi.

2.5 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi acuan dalam penyusunan draf awal RKPD. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi. Pokok-pokok Pikiran DPRD

memiliki peran penting baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Walikota, karena berpengaruh terhadap mekanisme penyusunan dokumen-dokumen turunan berikutnya, khususnya penyusunan RKPD

Adapun tujuan dari penyusunan pokok-pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bahan, arahan kebijakan, sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun 2020
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2020
3. Membuka ruang arah kebijakan dan usulan pembangunan yang dari DPRD KOTA BUKITTINGGI untuk RKPD 2020

Pada Pokok-pokok pikirean DPRD disampaikan permasalahan pembangunan dan juga rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Bidang Pemerintahan dan Kesra

a. Pendidikan:

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Daya tampung SLTP dan SLTA belum mencukupi untuk penduduk Bukittinggi.
2. Masih adanya pungutan yang dilakukan oleh Komite atau nama lainnya disetiap tingkatan sekolah
3. Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Kota Pendidikan
4. Sarana Prasarana di sekolah-sekolah belum memadai, seperti sarana ibadah, alat-alat peraga edukasi, sarana olahraga, WC, sarana untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler.

Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Menambah ruang kelas baru untuk pendidikan Tingkat SLTP,
2. Mengusulkan ke Pemprov Sumbar untuk menambah Ruang Kelas Baru untuk Tingkatan SLTA, dengan demikian dapat menampung peserta didik baru.
3. Jumlah penerimaan siswa SLTP dan SLTA yang berasal dari luar Kota Bukittinggi, tidak melebihi ketentuan peraturan, sehingga penduduk Kota Bukittinggi dapat ditampung pada SLTP dan SLTA Negeri yang ada di Kota Bukittinggi.
4. Mendorong pemerintah membuat sistem yang jelas dan berkeadilan dalam penerimaan peserta didik baru
5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel dengan didukung tenaga pendidik yang handal dan alat penunjang lain

6. Meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Pendidikan untuk mendukung ekstra kurikuler bagi peserta didik, antara lain melalui revitalisasi kolam renang Bantola, Sport Hall, dan sarana olah raga lainnya.
7. Menyiapkan alokasi dana yang cukup untuk guru honorer dan anak-anak yang berprestasi terutama dari keluarga kurang mampu dan berkebutuhan khusus.
8. Memperkuat pendidikan berkarakter pada setiap jenjang pendidikan.
9. Membantu ketersediaan sarana dan prasarana MDTA dan TPQ serta pondok pesantren
10. Menjadikan seni budaya tradisi Minangkabau sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah.
11. Memfasilitasi pendirian Perguruan Tinggi, dan melakukan kerjasama dalam pembinaan antar Perguruan Tinggi.
12. Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada peserta didik terhadap pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informasi.

b. Kesehatan

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu di Kota Bukittinggi yang belum mendapat jaminan kesehatan.
2. Pelaksanaan layanan kesehatan melalui BPJS banyak mengalami permasalahan di lapangan, antara lain belum tersedia data yang valid antara BPJS, jamkesmas dan jamkesda,
3. Rendahnya pelayanan bagi peserta BPJS di tingkat rujukan, serta permasalahan yang bersifat administratif dan tidak mengedepankan sisi kemanusiaan dan keselamatan pasien.
4. Pemberian Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat tentang permasalahan administratif yang timbul selama ini terhadap pelayanan BPJS kepada masyarakat.
2. Menyediakan data yang valid antara BPJS, jamkesmas dan jamkesda,
3. Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan seluruh tingkatannya.
4. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas, puskesmas, puskesmas, posyandu.

5. Mewujudkan pembangunan RSUD, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
6. Memberikan perhatian khusus kepada masyarakat lanjut usia guna meningkatkan kesehatan

c. **Pariwisata**

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Masih rendah alokasi dana untuk kegiatan promosi wisata, workshop, dan pelatihan bagi SDM pariwisata di Kota Bukittinggi, guna pengembangan daya tarik wisata.
2. Belum ada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata serta target yang jelas sebagai arah untuk mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota tujuan wisata.
3. Belum tersedia program dan kegiatan untuk mewujudkan Bukittinggi sebagai Wisata MICE (meetings, incentives, conventions, exhibitions)
4. Belum optimal kerjasama, pembinaan dan komunikasi pemerintah daerah terhadap pelaku usaha pariwisata.
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana khusus untuk pengembangan seni budaya dalam bentuk atraksi seni dan budaya yang representatif.
6. Belum terbangun komitmen kerjasama dan koordinasi antar daerah dan provinsi untuk ketersediaan akses yang mudah dan nyaman bagi pengunjung menuju objek wisata.
7. Menginventarisir dan mengelola aset yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata baru.

Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Segera membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Kota Bukittinggi.
2. Menyediakan alokasi dana yang cukup untuk kegiatan promosi wisata, workshop dan pelatihan bagi SDM pelaku usaha pariwisata di Kota Bukittinggi, guna pengembangan daya tarik wisata sehingga pariwisata dapat dijadikan sektor unggulan di Kota Bukittinggi.
3. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan wisata MICE (meetings, incentives, conventions, exhibition) di Bukittinggi.
4. Menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk pengembangan seni budaya dalam bentuk atraksi seni dan pagelaran budaya yang representatif.
5. Meningkatkan koordinasi pemerintah Kota Bukittinggi dengan pelaku usaha pariwisata serta mendorong seluruh pelaku usaha pariwisata untuk berkembang dan mandiri.

6. Membangun pengamanan tebing yang ada di lokasi dan sekeliling objek wisata
7. Mengembangkan objek wisata baru untuk menambah daya tarik pengunjung, seperti di kawasan ngarai.
8. Revitalisasi seluruh objek wisata yang ada.
9. Menyediakan akses jalan yang lancar menuju objek wisata.

2. Bidang Ekonomi Pembangunan

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. UMKM belum mampu bersaing, dan SDM pada UMKM belum berkualitas maksimal.
2. Belum tersedia lahan khusus yang representatif bagi pelaku UMKM.
3. Penataan pasar belum optimal, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur tidak tertata dengan baik, begitu juga dengan Pasar Atas pasca kebakaran.

Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah untuk pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas SDM dengan menyediakan training atau pelatihan bagi UMKM yang dilaksanakan oleh trainer yang handal.
2. Perlunya keseriusan pemerintah dalam memacu pertumbuhan UMKM sehingga dapat mendorong produk unggulan daerah.
3. Menerbitkan regulasi yang mengatur dan melindungi produk unggulan daerah.
4. Peningkatan peran Lembaga Keuangan, Investasi, Koperasi dan ekonomi mikro.
5. Melakukan revitalisasi dan penataan ulang serta penertiban pasar secara komprehensif.

3. Bidang Infrastruktur dan Lainnya

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dengan daerah hinterland terutama terkait dengan permasalahan wilayah perbatasan yakni banjir kiriman, angkutan umum, masalah persampahan.
2. Cakupan layanan air bersih yang sangat rendah, serta sanitasi yang kurang memadai.
3. Banyak fasilitas umum yang tidak maksimal, seperti *traffic light* (lampu lalu lintas), lampu jalan, trotoar yang terletak pada bukan jalan utama, drainase, WC Umum, jalan raya, dan jalan lingkung, serta halte yang belum memenuhi jumlah sesuai kebutuhan

4. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum terselesaikan, seperti anak *punk*, orang gila, gelandangan dan pengemis, kejahatan yang tergolong kriminal.
5. Batas teritorial yang tidak jelas antara kelurahan dengan wilayah Kabupaten Agam.
6. Permasalahan penyelesaian pengelolaan Banto Trade Centre (BTC), dan Jembatan Penghubung Rumah Sakit Madina.
7. Masih terdapat tindakan yang tidak mendidik terhadap masyarakat, dalam penegakan peraturan oleh Tim penegak dan pengawal Perda.
8. Banyaknya pengangguran dan kurang ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat golongan usia produktif.
9. Lemahnya pengawasan terhadap juru parkir, yang berdampak kepada penurunan pendapatan di sektor retribusi.
10. Masih ada aset daerah yang belum diperhatikan.
11. Belum optimalnya penggalan dan pengembangan objek wisata baru.

Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bukittinggi perlu perencanaan yang fokus, jelas, terarah dan terukur serta tahapan evaluasi pembangunan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Bukittinggi.
2. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah antara lain melakukan evaluasi terhadap seluruh SKPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah agar bekerja serius dalam menggali sumber potensi pendapatan asli daerah.
3. Perlunya kerjasama yang komprehensif dengan daerah hinterland terkait penanganan permasalahan yang berhubungan dengan Kabupaten Agam seperti Banjir, Angkutan Umum, sampah.
4. Mencarikan lahan per-Kelurahan atau setidaknya per-Kecamatan untuk pembuatan sumur bor yang bisa menjadi solusi pemenuhan air bersih di Kota Bukittinggi.
5. Mengoptimalkan penggunaan gedung parkir yang ada, disamping itu perlu dipikirkan lokasi parkir baru untuk menambah satuan ruang parkir.
6. Mengoptimalkan pengelolaan pasar, jika perlu mempertimbangkan urusan pasar dikelola oleh Perusahaan Daerah.
7. Melakukan renovasi sarana olahraga, seperti kolam renang Bantola, Gedung Olahraga Sport Hall dan lapangan tenis atas ngarai.

8. Menuntaskan persoalan Banto Trade Centre (BTC), Islamic Centre dan Jembatan Penghubung Rumah Sakit Madina.
9. Melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan.
10. Melakukan pembatasan usia kendaraan bermotor, khususnya angkutan umum untuk kenyamanan masyarakat Kota Bukittinggi dan pengunjung.
11. Mengupayakan pembentukan karakter siswa dan generasi muda antara lain memasukkan seni bela diri pencak silat dan Budaya serta Seni Tradisional Minang Kabau lainnya dalam kurikulum sekolah dan memberikan pelatihan kepada pemuda di setiap kelurahan.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur utama dan penunjang untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah, seperti jalan, trotoar, drainase, wc umum, *traffic light* (lampu lalu lintas) dan fasilitas umum lainnya.
13. Menyediakan sarana dan prasarana sebagai langkah preventif terhadap bencana alam dan kebakaran.
14. Memfungsikan lahan tidur, seperti dijadikan tempat budidaya lele, perkebunan buah, bunga serta tanaman obat keluarga, sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
15. Mewujudkan pembangunan Gedung Kantor DPRD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2021 memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka ekonomi daerah ini memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2020. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2021 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Bukittinggi melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2020.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bukittinggi

Arah kebijakan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dan arah kebijakan pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025, serta RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021.

Dalam rangka keselarasan dan terintegrasinya Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional, arah kebijakan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2021 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2021. Disamping itu arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB, dan

juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Disamping itu arah Kebijakan Ekonomi Kota Bukittinggi untuk Tahun 2021 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2019, proyeksi Tahun 2019 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2020. Diharapkan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karenanya, Tahun 2021 merupakan lanjutan untuk kesuksesan transformasi perekonomian Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui reformasi struktural yang terus berlanjut, serta penguatan permintaan domestik dengan investasi sebagai ujung tombak dan perbaikan kinerja perdagangan internasional melalui upaya diversifikasi ekspor. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3-5,7 persen pada tahun 2021 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.340 – 4.390 per kapita pada tahun 2021.

Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen diikuti Jasa Perusahaan sebesar 10,25 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,41 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,80 persen diikuti Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,61 persen Konstruksi sebesar 0,58 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,49 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,70 persen Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,01 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,72 dan Konstruksi sebesar 10,75 persen.

Kondisi makro yang menguat dan stabil diiringi peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5 – 9,0 persen dan 4,8 – 5,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,375 – 0,380 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,51, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi makro ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2021

dibandingkan tahun 2020 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.			
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020			
Indikator	2019	2020*)	2021**)
Perkiraan Besar-besaran Pokok			
Pertumbuhan PDB (%)	5,2	5,3	5,3 - 5,6
Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,13	2,5 - 4,5	2,0 - 4,0
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata	14,247	15	14.000 - 15.000
Neraca Pembayaran			
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	6,4	8,0	7,8 - 9,7
Pertumbuhan Impor Nonmigas	19,5	11,0	10,5 - 12,3
Cadangan Devisa (USD miliar)	120,7	125,5 - 127,8	124,8 - 130,6
- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah)	6,5	6,6 - 6,8	6,1 - 6,2
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	3,0	2,5 - 2,7	2,2 - 2,5
Keuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan (%PDB)	10,30	11,10	10,60 - 11,20
Belanja Modal (%PDB)	1,25	1,18	1,43 - 1,58
Subsidi Energi (%PDB)	1,10	0,99	0,82 - 0,83
Keseimbangan Primer (%PDB)	(0,01)	(0,13)	0,00 - 0,23
Surplus/Defisit APBN (%PDB)	(1,76)	(1,84)	(1,75) - (1,52)
Stok Utang Pemerintah (%PDB)	29,98	30,00	29,40 - 30,10
Investasi			
Peringkat Indonesia pada EODB	73	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,7	7,0	7,0 - 7,4
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	721,3	833,0 - 870,0	875,1 - 890,3
Target pembangunan			
tingkat kemiskinan (%)	9,8	8,5 - 9,5	8,5 - 9,0
tingkat pengangguran (%)	5,3	4,8 - 5,2	4,8 - 5,1
Rasio <i>Gini</i> (nilai)	0,389	0,380 - 0,385	0,375 - 0,380
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,39	71,98	72,51

*) : Data Sementara

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2021 dapat digambarkan dalam skema pada Gambar dibawah ini

Gambar 3.1
Arah Kebijakan Makro 2021



3.1.2. Arah Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai sentra produksi komoditas dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, serta sebagai salah satu lumbung pangan dan lumbung energi nasional. Wilayah Sumatera merupakan penghasil terbesar komoditas kelapa sawit, karet, kopi, dan kayu, serta salah satu wilayah penghasil utama batubara, migas, dan timah.

Pada tahun 2020, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan mempercepat pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan wilayah dan pembangunan jaringan jalan tol Lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol untuk memperkuat konektivitas dan memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera. Di samping itu, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan meningkatkan jaringan irigasi dan transportasi untuk mendukung produksi pangan beras dan palawija di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Barat.

Pengembangan wilayah Sumatera juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah di Metropolitan Medan dan Palembang, serta kota-kota besar lainnya seperti Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Tanjung Pinang, Batam dan Pangkal Pinang. Pengembangan sistem transportasi perkotaan diarahkan pada terbentuknya sistem transportasi massal multi moda yang efisien dan

terintegrasi, khususnya di kawasan metropolitan Medan dan Palembang.

Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, permukiman, air bersih dan listrik di kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan kawasan kepulauan seperti Nias, Simeuleu, Mentawai, Anambas; serta memperkuat konektivitas antarkawasan dengan meningkatkan aksesibilitas kota-kota kecil dan menengah, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal; serta memperkuat keterkaitan antara kawasan penghasil komoditas di perdesaan dan kawasan industri pengolahan serta pasar di kota-kota besar.

Wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan bencana terutama ancaman gempa tektonik khususnya jalur patahan di pesisir barat dan di sepanjang Bukit Barisan, tsunami, erupsi gunung berapi, dan kebakaran lahan yang menurunkan kualitas udara dan memicu infeksi saluran pernapasan. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 diarahkan untuk mempercepat pemulihan daerah pasca bencana, mengurangi risiko kerugian ekonomi, meningkatkan mitigasi bencana, dan memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan mengembangkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana, meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat, serta memperluas kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan budaya sadar bencana.

Sasaran utama pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2021 adalah:

- (1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
- (3) menciptakan kesempatan kerja; dan
- (4) meningkatkan pembangunan manusia,

Pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:

- (1) pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe, KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Api-Api, KEK Galang Batang, kawasan industri (KI) Bintan, KI Tanggamus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, serta KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun;
- (2) pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba, KSPN/KEK Tanjung Kelayang, destinasi potensial Sabang, Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan, dan Palembang;
- (3) percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- (4) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi;

- (5) pengembangan kawasan kepulauan Nias, Mentawai, Simeuleu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung; dan
- (6) penguatan ketahanan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana sepanjang Pantai Barat Sumatera, dan daerah rawan bencana lainnya.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
 - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
 - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - d. Pengentasan kemiskinan.
 - e. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
 - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan

karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.

- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
 - e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
 - b. Mempercepat transformasi struktural.
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
 - d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
 - e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.

- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
 - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
 - c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
 - d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
 - e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
 - c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
 - d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
 - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
 - b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
 - c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
 - d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
 - e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp246,42 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp45,29 juta atau US\$3.237,19. • Ekonomi Sumatera Barat tahun 2019 tumbuh 5,05 persen, melambat dibanding tahun 2018 sebesar 5,16 persen. Dari sisi produksi, kinerja lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera Barat mengalami pertumbuhan melambat dari 3,54 persen tahun 2018 menjadi 2,63 persen di tahun 2019. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang memegang peranan terbesar kinerjanya membaik dari 4,62 persen di tahun 2018 menjadi 4,69 persen di tahun 2019. • Ekonomi Sumatera Barat triwulan IV-2019 bila dibandingkan triwulan IV-2018 (y-on-y) tumbuh positif yakni sebesar 5,13 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,51 persen. • Ekonomi Sumatera Barat triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,93 persen mengalami perlambatan dibandingkan triwulan III-2019 (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantara lapangan usaha lainnya yakni sebesar 8,22 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan pada hampir seluruh komponen pengeluaran, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang meningkat masing-masing sebesar 40,28 dan 3,14 persen

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha tahun 2019 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (22,17 persen); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (15,80 persen) dan transportasi dan pergudangan (12,60 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2019, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,16 persen, diikuti oleh konstruksi sebesar 0,77 persen serta informasi dan komunikasi 0,63

persen. 2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (y-on-y) Pada triwulan IV-2019 ekonomi Sumatera Barat tumbuh 5,13 persen bila dibandingkan triwulan IV-2018 (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Jasa keuangan dan jasa pendidikan merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 8,67 persen, diikuti konstruksi sebesar 8,52 persen, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sebesar 8,41 persen. Struktur perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV-2019 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (21,48 persen); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (16,12 persen) dan transportasi dan pergudangan (12,25 persen).

Struktur PDRB Sumatera Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Barat (53,95 persen). Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (29,93 persen); Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (12,74 persen); Ekspor Luar Negeri (8,73 persen); dan Impor Luar Negeri (2,93 persen), sedangkan Pengeluaran Konsumsi LNPRT relatif kecil yaitu 1,14 persen. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2017 sampai dengan 2019, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen yang tetap berada di kisaran 2 persen. Komponen yang mengalami penurunan adalah Impor Luar Negeri dan Net Ekspor Antar Daerah yaitu masing-masing menjadi -0,61 dan 1,08 persen. 2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (y-on-y) Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 terhadap triwulan IV-2018 terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 66,72 persen; diikuti Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 10,55 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,39 persen. Sebaliknya, Komponen Impor Luar Negeri mengalami kontraksi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar negatif 51,44 persen.

Perlambatan bersumber dari menurunnya kinerja konsumsi pemerintah dan investasi, yang disebabkan oleh faktor menurunnya tingkat realisasi belanja pemerintah baik disisi penerimaan maupun pengeluaran serta menurunnya porsi dan realisasi belanja modal dalam struktur APBD. Di sisi lapangan usaha (LU), perlambatan bersumber dari LU pertanian, LU perdagangan dan LU industri pengolahan. Tingginya curah hujan dan serangan hama berpengaruh pada penurunan kinerja LU pertanian. Selanjutnya, perilaku sebagian masyarakat yang menahan pembelian kendaraan bermotor berimbas pada melambatnya LU perdagangan.

Perbaikan kinerja perekonomian Sumatera Barat ternyata belum sejalan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja, tercermin dari menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja yang diiringi

oleh peningkatan pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 5,33 %. Perluasan lapangan kerja tidak dapat mengimbangi melonjaknya angkatan kerja baru. Keterbatasan jumlah industri dan ketidaksesuaian kualitas pencari kerja dengan kualifikasi perusahaan turut menyumbang turunnya angka penyerapan tenaga kerja. Naiknya jumlah angkatan kerja, diiringi dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 67,51 persen, naik sebesar 0,25 poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Kesejahteraan daerah terpantau membaik pada tahun 2019, tercermin dari menurunnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan indeks keparahan kemiskinan secara merata di perdesaan maupun perkotaan. Peningkatan harga internasional Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 III- 8(CPO dan karet) yang terjadi sejak akhir tahun 2016 berimbas pada meningkatnya pendapatan masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya bergantung pada dua komoditas tersebut. Selain itu, kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat juga relatif meningkat dengan membaiknya IPM, diikuti oleh perbaikan pada indeks ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi penduduk di Sumatera Barat. Angka rasio gini Sumatera Barat terpantau cukup baik, yakni berada pada urutan terendah ke-2 (tiga) di Sumatera atau ke-5 (lima) secara nasional.

Laju inflasi Sumbar pada triwulan IV 2019 tercatat 1,67% (yoy), dipicu oleh menurunnya tekanan harga dari kelompok administered price dan keberhasilan pengendalian inflasi volatile food. Terjaganya pasokan pangan serta kenaikan harga tarif angkutan udara yang tidak setinggi tahun sebelumnya menjadi faktor penjaga inflasi pada triwulan IV 2019. Tekanan inflasi di tahun 2019 diperkirakan dominan bersumber dari kelompok volatile foods. Sementara pada kelompok administered price, adanya jaminan dari pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga barang/jasa yang diatur pemerintah seperti BBM subsidi dan LPG 3 kg menjadi faktor penting penahan inflasi di tahun 2019. Mencermati risiko inflasi yang lebih tinggi, upaya pengendalian inflasi di 2019 akan dititikberatkan pada percepatan implementasi kerja sama antar daerah yang telah dijajaki pada tahun 2018. Selanjutnya, dalam memperbaiki kinerja perekonomian di tahun 2021 nanti, dari sisi produksi, maka sektor pertanian, industri pengolahan, ekonomi kreatif, perdagangan hotel dan restoran, Jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi haruslah mendapat perhatian lebih besar, karena ke lima sektor inilah yang berkontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat selama ini. Diantara sektor pertanian yang memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat adalah sub sektor perkebunan, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan. Ke empat sub sektor ini perlu dikembangkan ke arah peningkatan nilai tambah produknya dengan mendorongnya melangkah ke agroprosesing dalam pengembangan agro bisnis dan bahkan agroindustri.

Hal ini sejalan dengan prioritas dan sasaran pembangunan di bidang pertanian pada RPJM tahun 2016 -2021 yang menekankan pada peningkatan kualitas teknis pengelola agribisnis, pengembangan balai-balai penelitian untuk hortikultura dan bahan makanan, pengembangan kawasan agropolitan dan agrocitry, pengembangan zona pengolahan ekspor yang semuanya mengarah kepada peningkatan peluang pasar untuk produk olahan pertanian, baik pasar di dalam negeri sendiri maupun pasar luar negeri. Diharapkan pada tahun 2021 sebagai tahun kelima dari pelaksanaan RPJM III Sumatera Barat 2016-2021 telah berhasilnya upaya peningkatan industri kreatif Sumatera Barat, terutama dari ekonomi kreatif yang berbasis budaya, dan lebih khusus kepada produk hasil perkebunan, hortikultura, produk industri makanan, dan produk olahan hasil perikanan tangkap, yang selama ini mendominasi peningkatan kualitas perekonomian Sumatera Barat.

Produk pertanian unggulan dan industri unggulan ini diharapkan mampu bersaing dengan produk komoditi utama yang dikembangkan pula pada pusat-pusat koridor ekonomi Sumatera dalam rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) dan MP3ESB yang juga telah berhasil dibuat oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mensinkronkan pembangunan ekonomi di provinsi Sumatera Barat dengan pembangunan ekonomi koridor Sumatera.

Upaya ke arah pematapan agrobisnis dan agroindustri pada sektor pertanian dalam arti luas, tentunya memerlukan dukungan dari infrastruktur sosial ekonomi yang cukup memadai, seperti infrastruktur fisik jalan raya menuju kawasan pertanian, farm road pada kawasankawasan andalan produk unggulan pertanian yang berorientasi agro-prosesing dan agroindustri. Disamping itu, diperlukan pula pengembangan kelembagaan produksi dan pemasaran produk unggulan pertanian yang mampu menopang ke arah pengembangan agrobisnis dan agro industrinya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan standarisasi komoditi ekspor pemasaran produk industri unggulan yang ada, sehingga dapat dengan mudah memasuki pasar bersama ASEAN. Pada sisi pengeluaran, komponen konsumsi lembaga swasta yang dapat berupa investasi swasta dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat harus terus didorong agar peran investasi pihak swasta dalam pembangunan perekonomian Sumatera Barat akan terus mengalami perbaikan.

Oleh karena itu, perbaikan suprastruktur dan infrastruktur perekonomian agar pengeluaran lembaga swasta semakin menguat dalam sistem perekonomian Sumatera Barat ke depan. Pembangunan short cut jalur kereta api menuju Kota Padang dari Dharmasraya, Lunang Silaut dan dari Simpang Empat Pasaman sangatlah mendesak untuk dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya adalah pembangunan jalan tol Padang - Payakumbuh menuju Riau sebagai pusat pertumbuhan

Koridor Sumatera tentu juga harus sudah dapat dilaksanakan di tahun 2020. Usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor barang dan jasa luar negeri harus terus dilakukan melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, sehingga permintaan terhadap barang-barang domestik akan semakin tinggi. Besarnya kontribusi impor barang dan jasa terhadap pembentukan

nilai PDRB ternyata berasal dari pembelian barang-barang golongan kertas/karton, mesin-mesin mekanik, keramik, serta barang-barang dari besi dan baja. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Sumatera Barat harus mampu mengarah kepada perubahan struktural terutama mengembangkan industri pengganti substitusi impor ini, sebab komponen konsumsi rumah tangga yang terus meningkat ternyata juga sejalan dengan peningkatan impor. Keadaan ini tentu memperlemah kinerja perekonomian Sumatera Barat di masa depan.

Keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera Barat selama ini telah dapat terlihat dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat; upah buruh yang terus meningkat, angka kemiskinan yang semakin rendah, terus tumbuhnya tingkat konsumsi masyarakat, semakin tingginya aktifitas perdagangan, hotel dan restoran, serta pergerakan aktifitas jasa-jasa di tengah masyarakat. Demikian pula pada sisi penawaran, keberhasilan pembangunan pertanian ditandai dengan semakin besarnya volume produksi barang produk pertanian. Namun keberhasilan perekonomian dalam wilayah sendiri saja tidaklah cukup, karena perekonomian Sumatera Barat sangat tergantung kepada aktifitas perekonomian dari luar, terutama kondisi perekonomian nasional dan perekonomian global umumnya yang tengah mengalami perubahan kearah penurunan pertumbuhan.

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang

tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya serap yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

3.1.5. Kondisi Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2019 dan 2020 dan perkiraannya pada tahun 2021 diperkirakan agak menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang hampir dirasakan oleh seluruh Negara-negara di dunia. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, khususnya Kota Bukittinggi yang sangat bergantung pada Sektor Pariwisata sangat terdampak akibat pandemic Covid-19 ini. Sektor-sektor pendukung perekonomian Kota Bukittinggi tentu juga ikut merasakan dampaknya. Beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2016 - 2019 berikut dengan proyeksi tahun 2020- 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun				Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,05	6,08	6,02	5,88	1,13	5,58
2.	Gini Ratio	0,34	0,31	0,34	0,27	0,265	0,259
3.	Tingkat Kemiskinan	6,04	6,94	4,91	4,59	3,66	3,61
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,04	6,94	6,59	7,15	7,74	6,85
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	79,11	79,80	80,11	79,93	81,12	82,19

Sumber Data :

2016 s/d 2019 : Data BPS Kota Bukittinggi

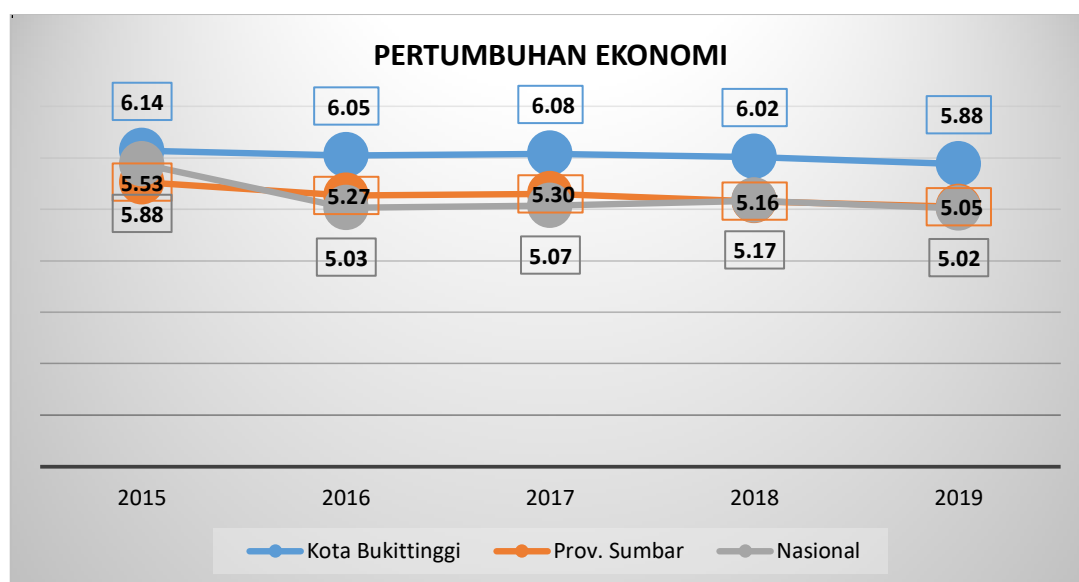
2020 sd 2010 : Proyeksi Bappeda Propinsi Sumbar

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya kapasitas ekonomi buat menghasilkan barang dan jasa dalam suatu waktu tertentu atau dapat diartikan sebagai naiknya produksi barang dan jasa dalam suatu negara yang kemudian mendorong perubahan positif/negatif terhadap kondisi ekonomi. Makin tinggi pertumbuhannya, kondisi ekonomi makin baik pula.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 namun masih di atas pertumbuhan provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 2.060.549,96 atau dengan persentase sebesar 33,47 %, dan diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 734.536,63 atau dengan persentase 11,93%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2015. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer,

kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

B. Gini Rasio

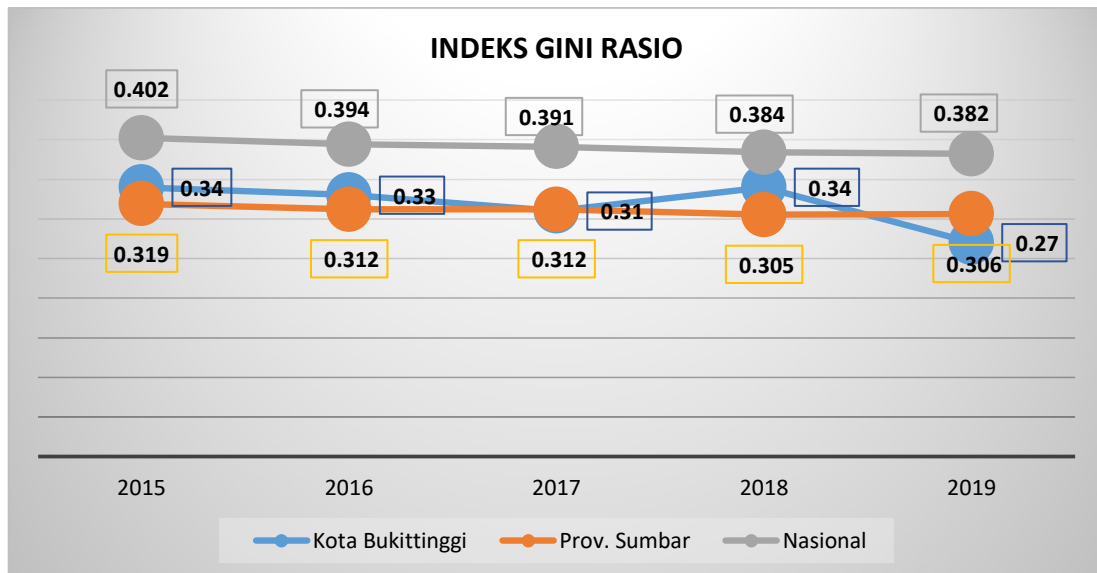
Gini rasio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dihitung dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. "0" berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan "1" berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Perkembangan gini rasio Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dan rata-rata mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 gini rasio Kota Bukittinggi 0,34, pada tahun 2019 turun menjadi 0,27. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di Kota Bukittinggi semakin mengecil. Perkembangan Gini Rasio Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2.
Gini Rasio Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019

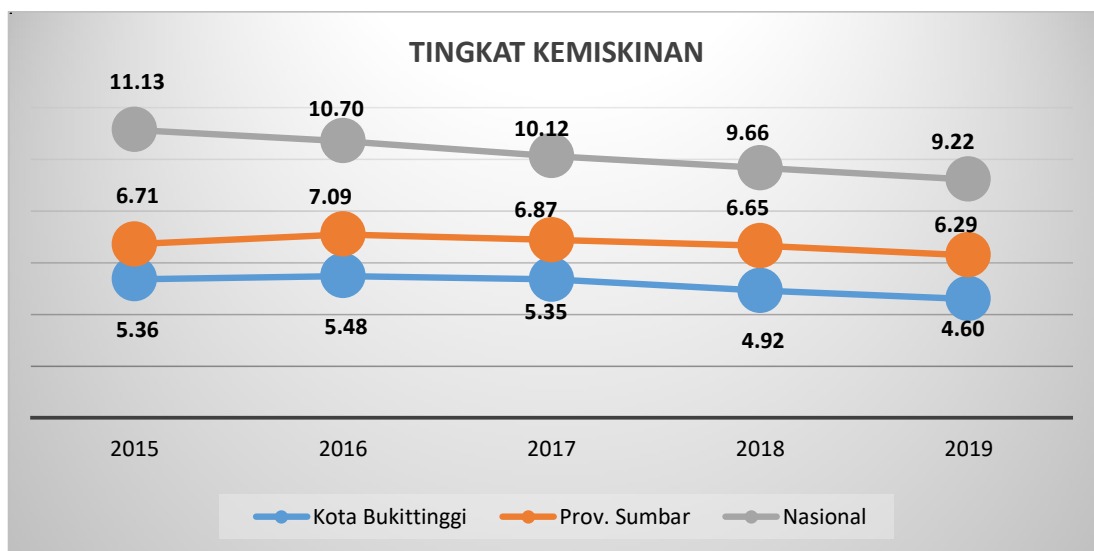


C. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan, tergolong sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Untuk mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi 5,36 %, pada tahun 2019 turun pada angka 4,60%. Angka kemiskinan Kota Bukittinggi ini berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penanggulangan kemiskinan cukup berhasil. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.3.
Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019

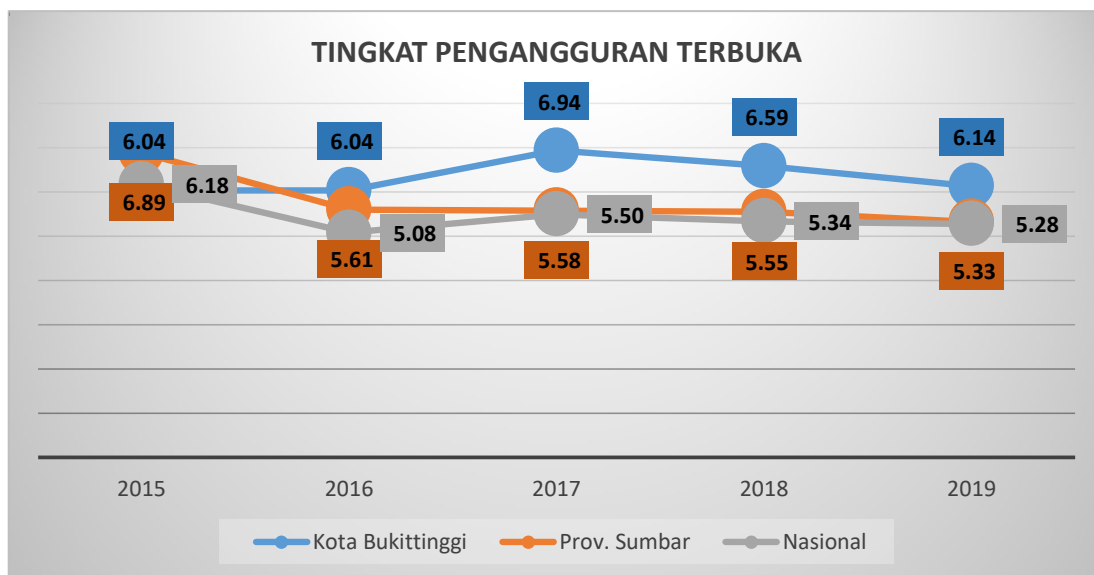


D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebanyak 7,15. Diprediksi untuk tahun 2020 akibat wabah Covid 19 yang cukup signifikan terhadap meningkatnya pengangguran, maka pada Tahun 2020 diperkirakan angka pengangguran terbuka berada pada angka 7,74, naik sekitar 0,59 persen dibandingkan dengan data tahun 2019. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



E. Indeks Pembangunan Manusia

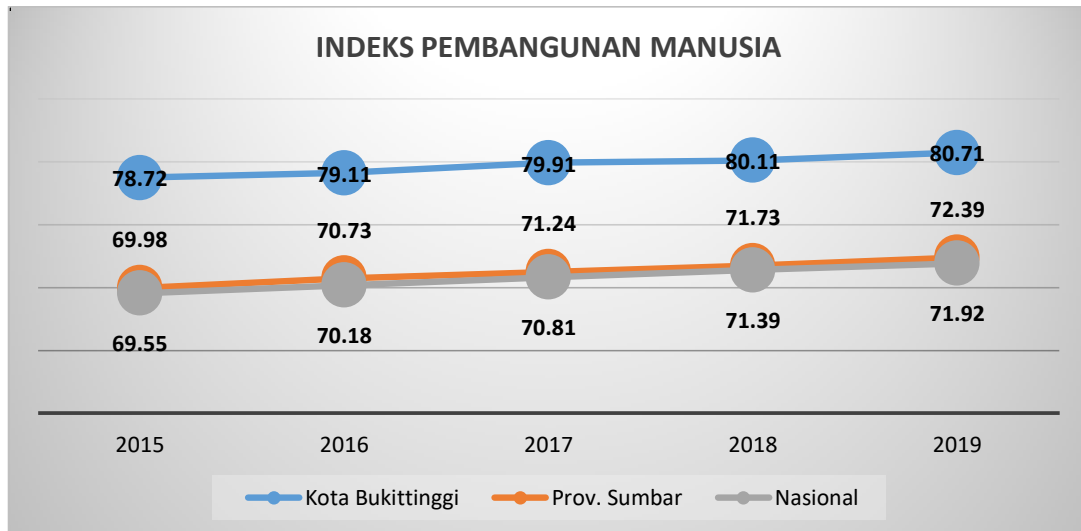
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Sesuai dengan konsep pembangunan manusia, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi

Sumatera Barat dan Nasional yang setiap tahunnya juga selalu meingkat. Perkembangan IPM Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

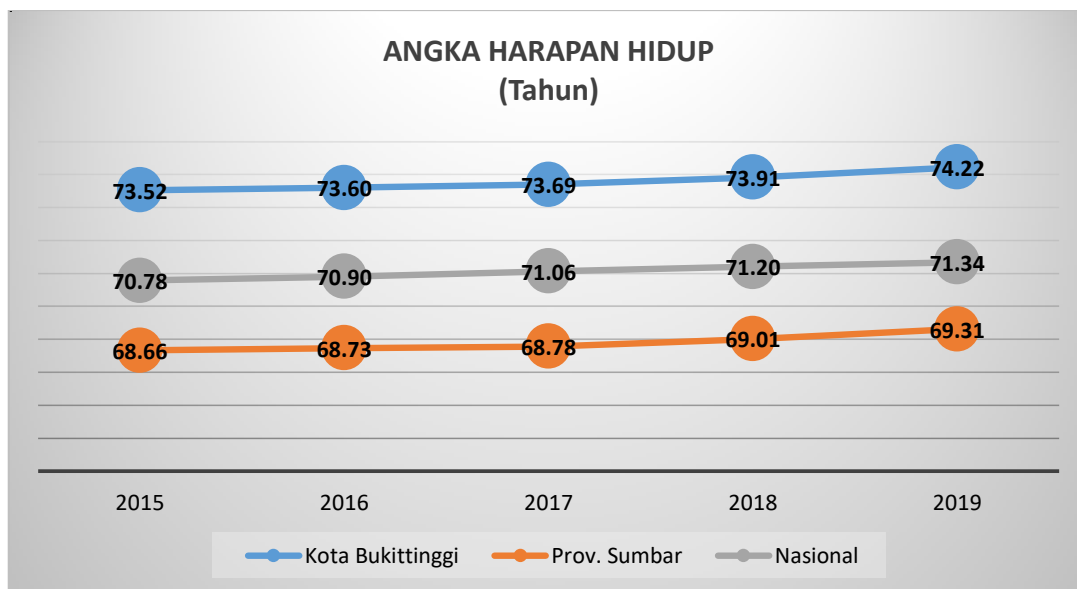
Grafik 3.5.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan dan berada di atas pertumbuhan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan AHH Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik dibawah.

Grafik 3.6.
Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019

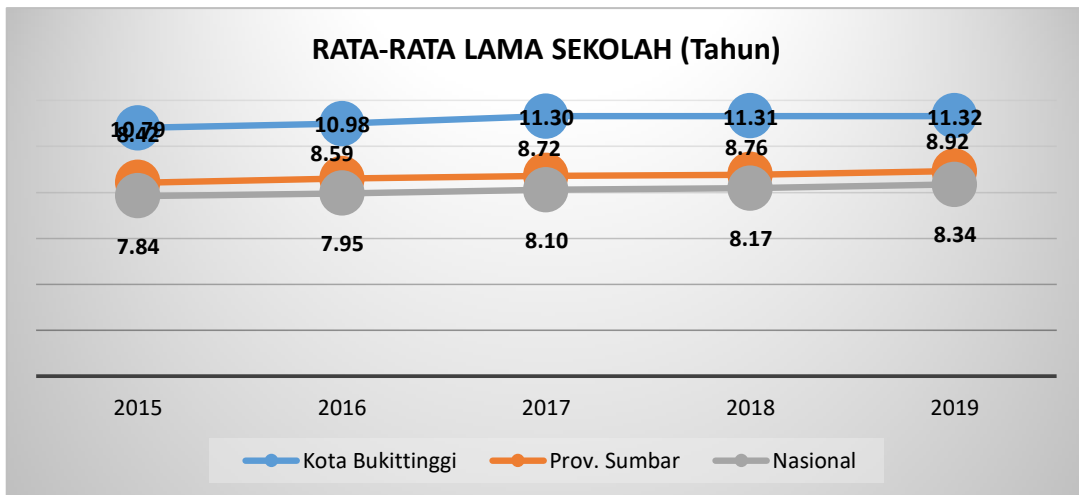


Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

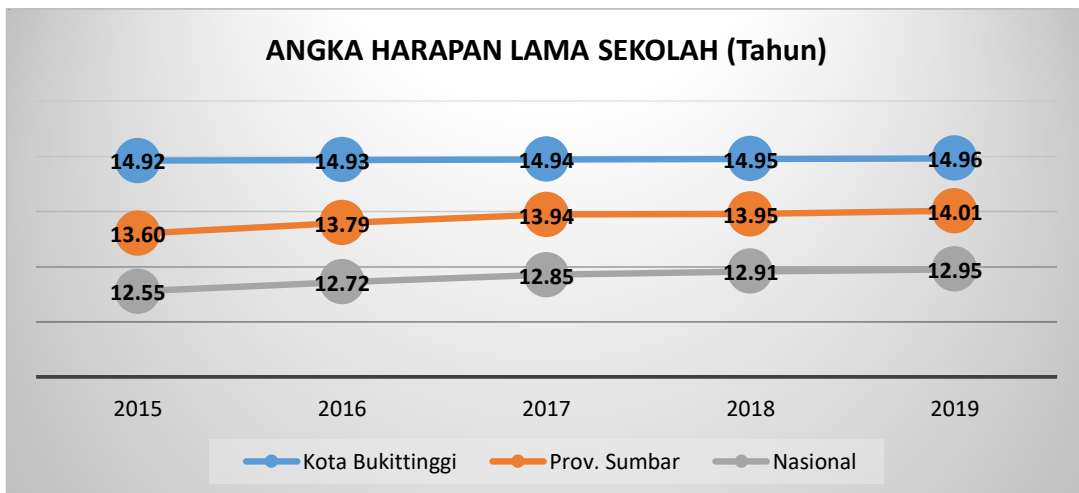
Perkembangan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi sudah mencapai 11,32 tahun di atas angka Provinsi

Sumatera Barat 8,92 tahun dan Nasional yang masih 8,35 tahun. Seiring dengan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di atas nilai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.7.
Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



Grafik 3.8.
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019

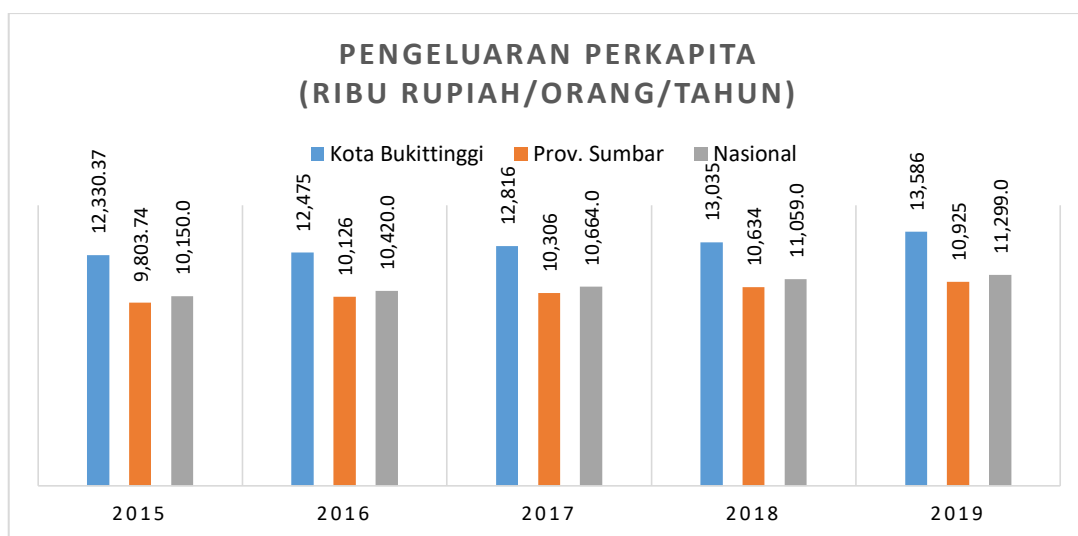


Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi kehidupan yang layak dilihat melalui Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita

dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada tahun 2015 pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi sebesar Rp.12.330.370,-/org/tahun, pada tahun 2019 telah mencapai Rp.13.586.000,-/org/tahun. Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tersebut berada di atas angka pengeluaran perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tahun 2015 samapai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.9.
Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

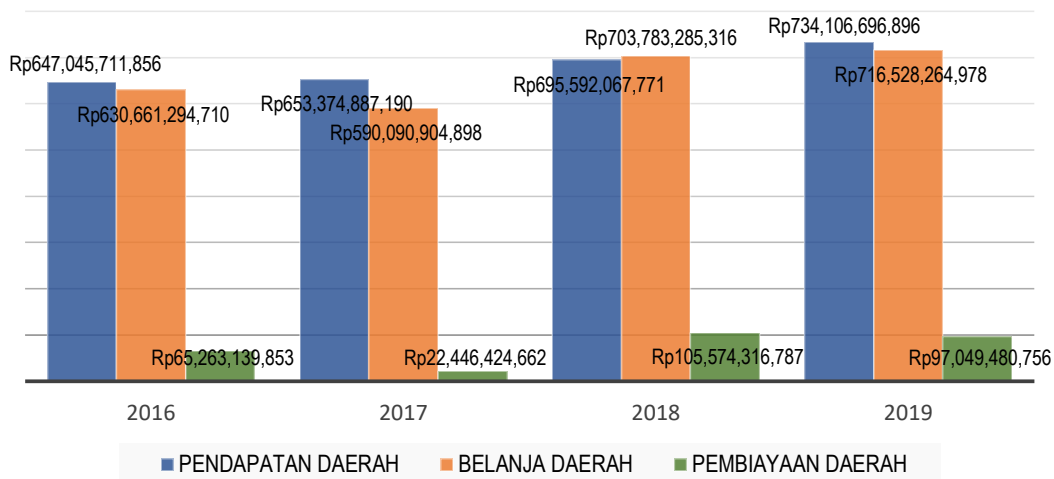
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada prinsipnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 masih berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (*money follow program*). Oleh sebab itu arah dan kebijakan keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi yang berkembang di

daerah guna mewujudkan rencana-rencana pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

Salah satu hal yang perlu dilakukan guna menyusun perhitungan keuangan daerah dan kerangka pendanaan selain memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi makro juga perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD beberapa tahun sebelumnya. Realisasi APBD guna melihat realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Realisasi APBD Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.10.
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



Berdasarkan grafik di atas, realisasi pendapatan Kota Bukittinggi yang terdiri Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi sebesar Rp.647.045.711.856,- meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp.734.106.696.896,-. Seiring dengan peningkatan realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Hanya pada tahun 2017 terjadi penurunan karena terjadi pengurangan Dana Perimbangan serta beberapa belanja yang tidak terlaksana. Sementara itu pembiayaan dapat terealisasi mendekati target yang ditetapkan.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan; pendapatan daerah merupakan hal penting yang harus diupayakan peningkatannya setiap tahun. Realisasi pendapatan Daerah Kota Bukittinggi yang selalu meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan kinerja dalam hal mewujudkan kemandirian daerah terus meningkat. Realisasi Pendapatan Daerah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya menunjukkan capaian di atas 90% pada setiap komponennya. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli

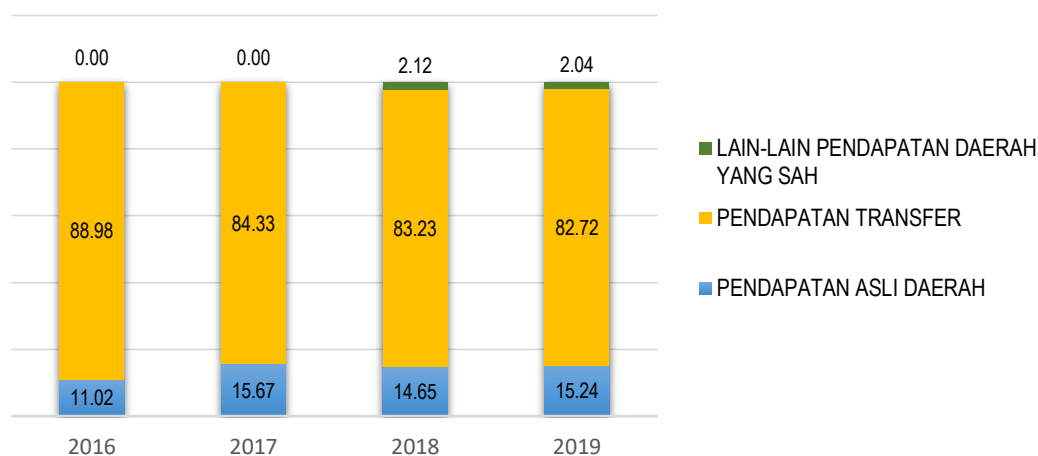
Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.11.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



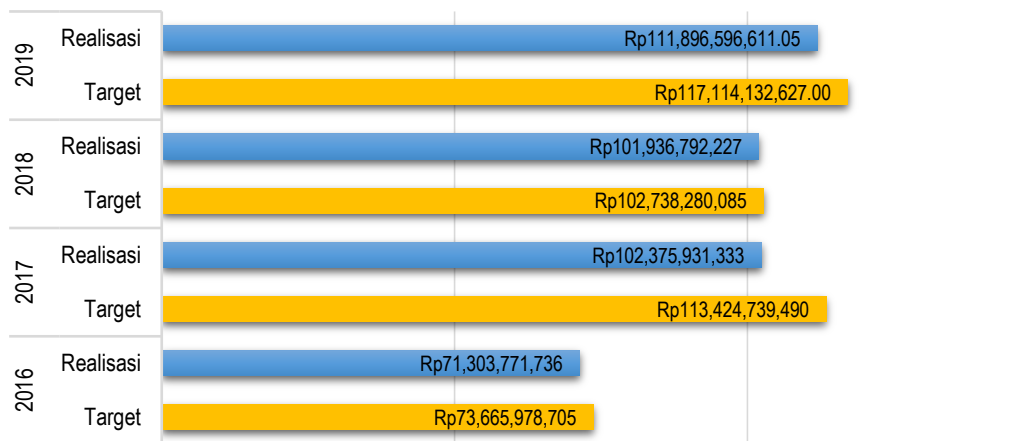
Secara umum, Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019, baik dari komponen Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, maupun Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Dilihat dari kontribusi realisasi dari komponen pembentuk Pendapatan Daerah tersebut, Pendapatan Transfer merupakan penyumbang tertinggi dalam kontribusi pembentukan realisasi Pendapatan Daerah. Namun walaupun mempunyai kontribusi terbesar, Pendapatan Transfer terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 88,98%, pada tahun 2019 turun menjadi 82,72%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah mempunyai kontribusi 11,02% pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 15,24%. Secara berangsur dari tahun 2016, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terus naik mengurangi kontribusi Pendapatan Transfer yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat berangsur berkurang. Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.12.
Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



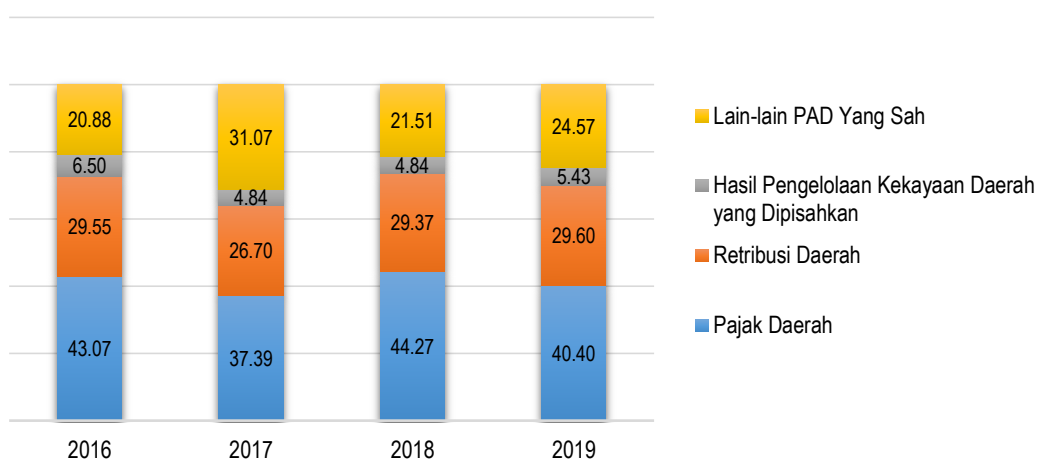
Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan, aktifitas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber potensi keuangan daerah masing-masing salah satunya melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena salah satu indikator kemampuan dan cerminan kemnadirian daerah adalah peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur penerimaan daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah telah menetapkan target dari potensi yang ada. Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2019, pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu berada di atas 90% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai angka 96,79% dan di tahun 2019 terealisasi sebesar 95,54%. Bahkan angka tertinggi realisasi bias dicapai pada tahun 2018 dengan tingkat capaian realisasi mencapai 99,22%. Gambaran target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.13.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



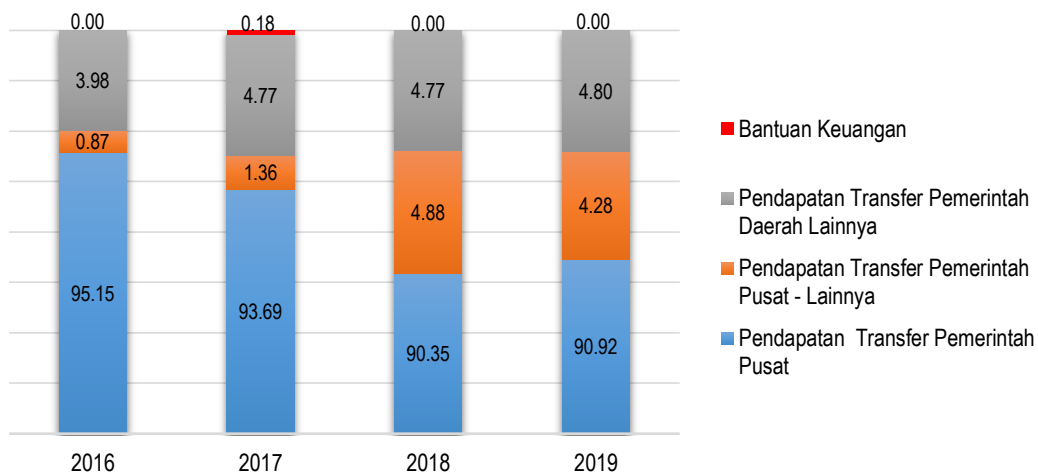
Pendapatan Asli Daerah dibentuk atas komponen Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi realisasi komponen PAD didominasi tertinggi oleh Pendapatan Pajak Daerah yang didapat melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kontribusi tertinggi kedua setelah Pendapatan Pajak adalah Pendapatan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh melalui Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.14.
Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



Selain dari Pendapatan Asli Daerah, Komponen Pendapatan Daerah lainnya adalah Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Secara umum, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam membiayai pembangunan daerah masih bergantung kepada Pendapatan Transfer, dimana kontribusi Pendapatan Transfer dalam komponen Pendapatan Daerah berkontribusi lebih dari 80%. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya serta Bantuan Keuangan. Kontribusi realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2019 didominasi tertinggi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang rata-rata berada di atas 90%. Gambaran Kontribusi realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.15.
Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



Pendapatan transfer merupakan penyumbang kontribusi tertinggi dalam Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi. Namun pertumbuhan realisasi komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi fluktuasi. Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2016 tumbuh 21,77%, kemudian pada tahun selanjutnya pertumbuhannya -0,06% dan baru tahun 2018 tumbuh 1,32% dan 2019 kembali tumbuh 5,54%. Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan juga mengalami fluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Gambaran Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi terlihat pada grafik berikut.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019

No	Uraian	Tahun			
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	21,77	-0,06	1,32	5,54

2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	-90,56	50,00	276,67	-7,92
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7,53	14,66	5,08	5,60
4	Bantuan Keuangan	-100,00	100,00	-100,00	0

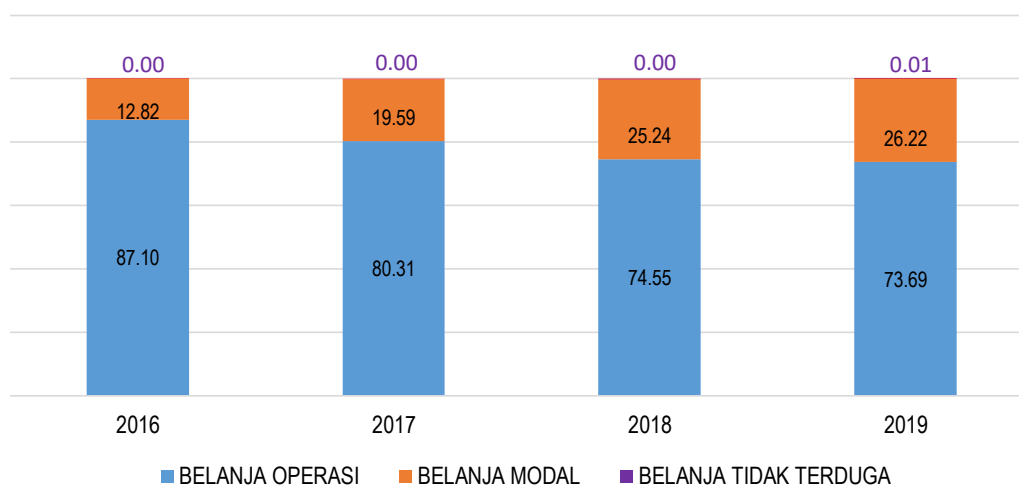
Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Target Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2019 rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, demikian juga realisasinya. Hanya saja pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan karena terjadi kekurangan pendapatan dan terdapat beberapa kegiatan yang terealisasikan. Target dan realisasi belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada table berikut.

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019

No	Tahun	Belanja Daerah		Pertumbuhan Realisasi (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2016	739.912.598.927,22	630.661.294.710,00	8,90
2	2017	732.873.501.966,34	590.090.904.897,65	- 6,43
3	2018	838.430.535.411,22	703.783.285.315,95	19,27
4	2019	890.512.534.055,88	716.528.264.978,33	1,81

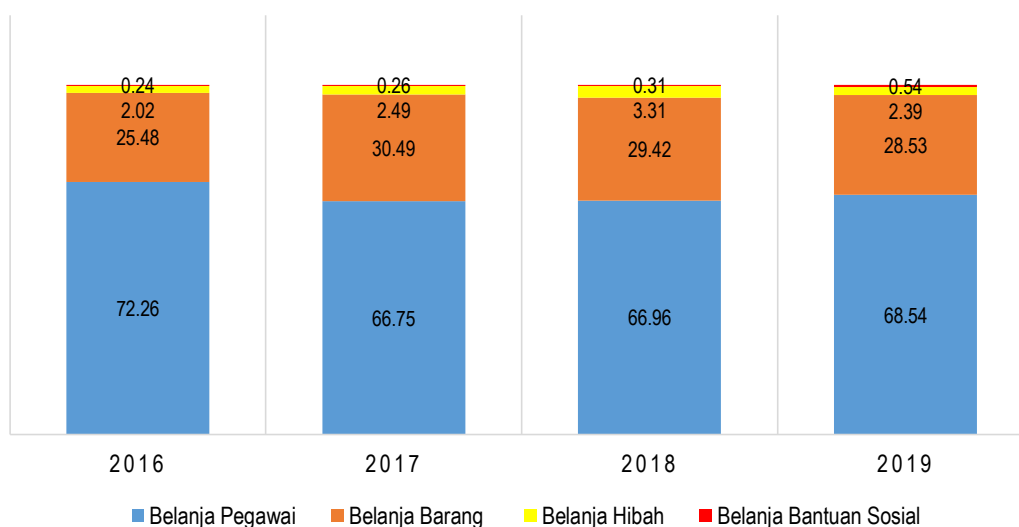
Belanja Daerah terdiri dari komponen Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak terduga. Kontribusi realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi tertinggi terdapat pada Belanja Operasi, selanjutnya Belanja Modal dan diikuti oleh Belanja Tidak Terduga. Kontribusi masing-masing komponen belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.16.
Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi yang merupakan tertinggi pada realisasi Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Pegawai yang terbesar memuat gaji dan tunjangan pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi. Realisasi komponen belanja operasi tertinggi selanjutnya adalah belanja barang dan diikuti belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.17.
Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



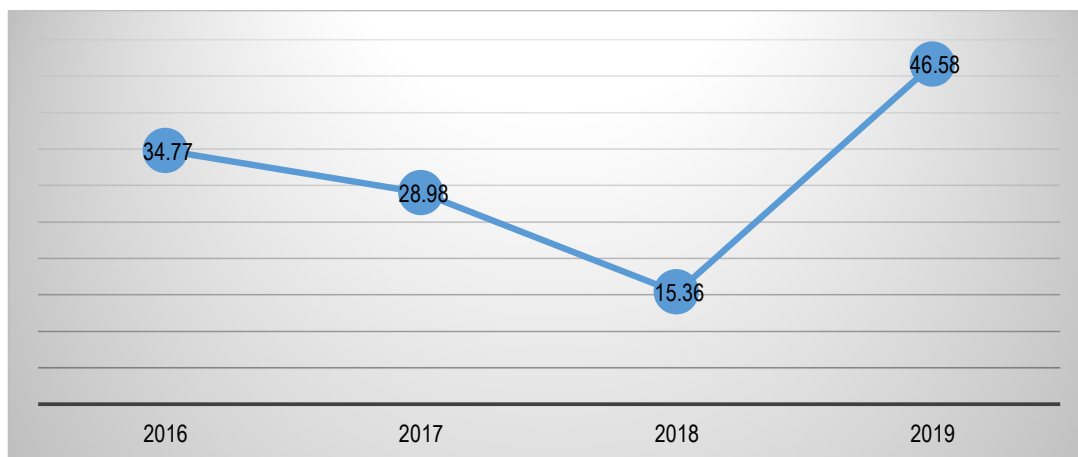
Selain evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, guna melihat kinerja penyelenggaraan keuangan daerah perlu dianalisis melalui perhitungan Rasio Keuangan Daerah. Perhitungan rasio keuangan daerah dilihat melalui beberapa perhitungan berikut ini.

a. Rasio Aktiva Lancar

Rasio Lancar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan neraca likuiditas. Rasio Lancar ini menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya pada 12 bulan ke depan. Rasio Lancar dihitung dengan membagikan Aktiva Lancar (*current assets*) dengan Kewajiban atau Hutang Lancar (*current liabilities*). Aktiva lancar atau aset lancar adalah aset yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai sedangkan hutang lancar adalah hutang perusahaan yang harus dibayar tunai dalam waktu satu tahun. Semakin tinggi rasio lancar berarti semakin tinggi kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya. Rasio Aktiva Lancar Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi fluktuasi, dimana pada tahun 2016 sebesar 34,77, kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 28,98 dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 15,36 dan meningkat signifikan pada tahun 2019 menjadi 46,58. Secara rata-rata tahun 2016 sampai dengan 2019 kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya cukup tinggi. Perkembangan Rasio Aktiva Lancar Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik di bawah berikut.

Grafik 3.18.
Rasio Aktiva Lancar Kota Bukittinggi

Tahun 2016 s/d 2019

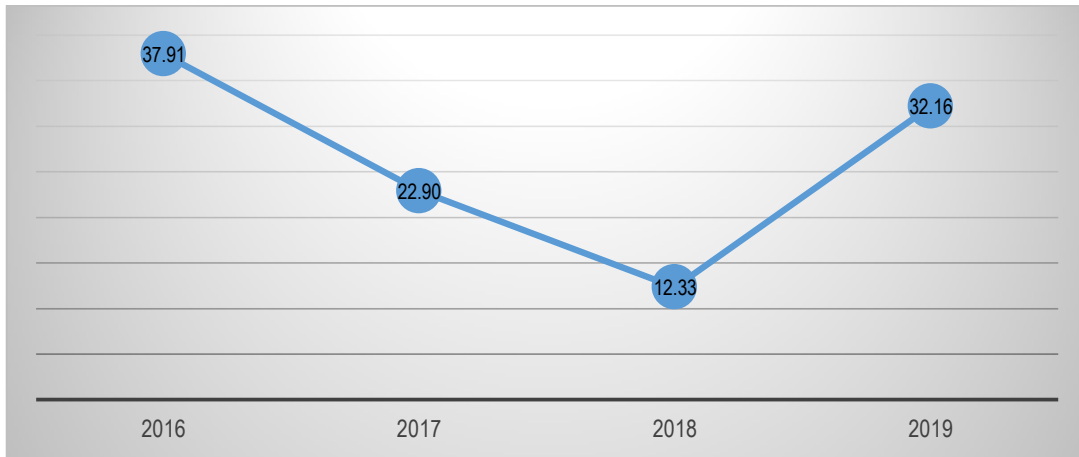


b. Cash Rasio

Rasio Kas, sering disebut sebagai rasio likuiditas, adalah ukuran likuiditas yang menunjukkan kemampuan untuk membayar utang jangka pendek menggunakan kas dan setara kas. Cash Ratio ini pada dasarnya merupakan metode penyelesaian laporan dengan cepat, yang digunakan untuk menentukan jumlah dana (kas dan setara kas) yang tersedia guna membayar kewajiban atau liabilitas jangka pendek.

Rasio Kas ini merupakan rasio likuiditas yang paling ketat dan konservatif terhadap kemampuan dalam menutupi hutang atau kewajiban jangka pendeknya jika dibandingkan rasio-rasio likuiditas lainnya (rasio lancar dan rasio cepat). Hal ini dikarenakan Rasio Kas hanya memperhitungkan aset atau aktiva lancar jangka pendek yang paling likuid yaitu kas dan setara kas yang paling mudah dan cepat untuk digunakan dalam melunasi hutang lancarnya. Rasio Kas (*Cash Ratio*) dihitung dengan membagikan aktiva lancar yang paling likuid yaitu kas dan setara kas dengan kewajiban lancarnya. Perkembangan Cash Ratio Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi turun naik, namun secara rata-rata kemampuan dalam menutupi hutang atau kewajiban jangka pendeknya cukup tinggi. Cash Ratio Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.19.
Cash Rasio Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



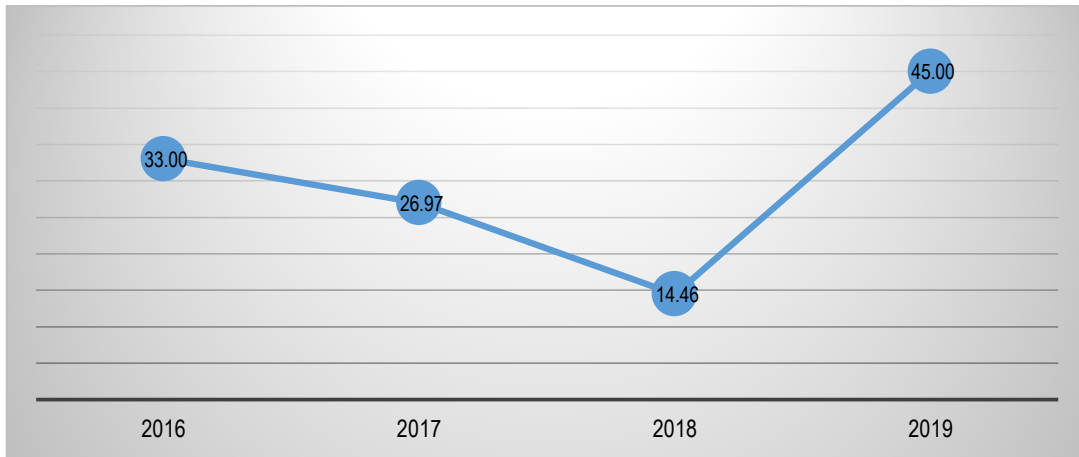
c. Quick Rasio

Rasio Cepat atau sering disebut juga dengan Quick Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid atau aset yang paling mendekati uang tunai (aset cepat). Yang termasuk sebagai Aset Cepat (*Quick Asset*) adalah Aktiva Lancar atau Aset lancar yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dan mendekati nilai bukunya.

Quick Ratio atau Rasio cepat dihitung dengan mengurangi persediaan (*inventory*) dari aktiva lancar (*current assets*) dan sisanya dibagi dengan kewajiban lancar (*Current Liabilities*). Dikurangkan Persediaan atau Inventory dari perhitungan Aktiva lancar karena persediaan pada dasarnya merupakan aset lancar yang sulit dikonversi dengan uang tunai dalam waktu singkat dan biasanya juga akan terjadi kerugian jika terjadi likuidasi.

Perkembangan Quick Ratio Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi turun naik, namun secara rata-rata kemampuan dalam menutupi hutang atau kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid cukup tinggi. Quick Ratio Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.20.
Quick Rasio Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019

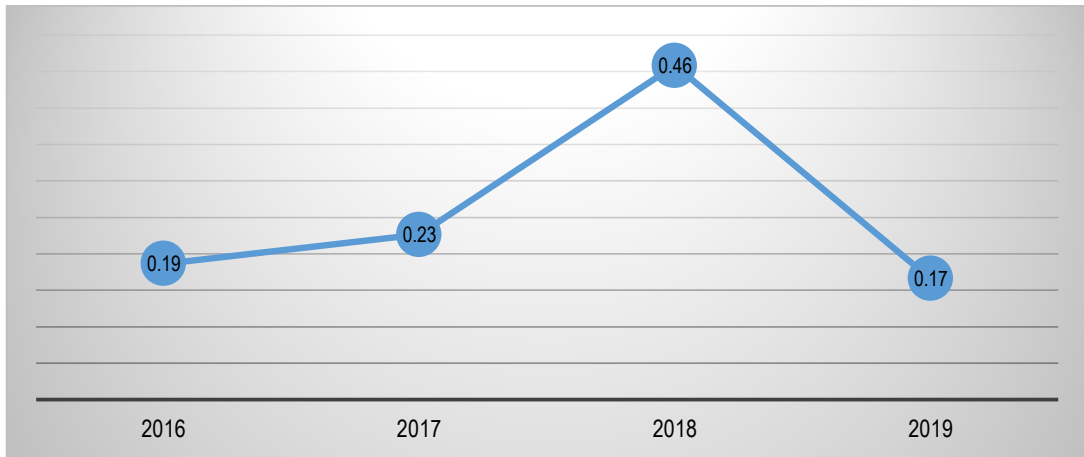


d. Solvabilitas Rasio

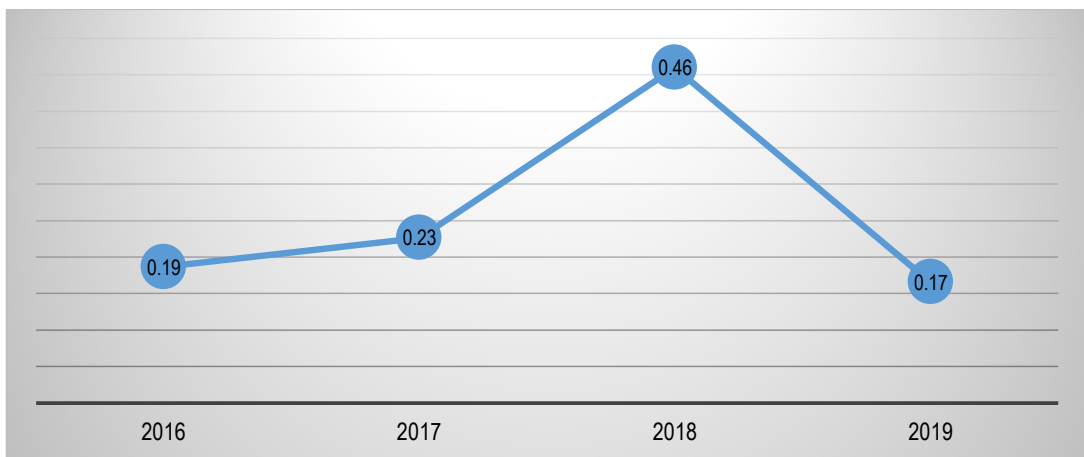
Solvabilitas Rasio adalah rasio untuk menilai kemampuan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki. Rasio solvabilitas membandingkan beban utang secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset yang dimiliki dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Rasio Solvabilitas bisa dilihat melalui Debt to Aset Ratio dan Debt to Equity Ratio.

Debt to ratio atau rasio utang menilai seberapa besar daerah berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total utang (*liabilities*) dengan total aset yang dimiliki. Aset adalah sumber daya yang diperoleh dari transaksi atau kegiatan lain di masa lalu. Sedangkan ekuitas merupakan hak residual atas aset setelah pengurangan seluruh liabilitas sesuai hakikat akuntansi. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset. Debt to equity ratio atau DER membandingkan total liabilitas dan ekuitas (*equity*). Debt to Equity Ratio digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang telah diberikan. Jika semakin tinggi rasio, maka semakin kecil modal sendiri dibanding utangnya. Seharusnya kebijakan harus memiliki utang yang tidak lebih besar dari modal. Karna semakin kecil utang yang dimiliki maka semakin aman. Perkembangan Debt to Aset Ratio dan Debt to Equity Ratio Kota Bukittinggi terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.21.
Debt to Aset Ratio Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



Grafik 3.22.
Debt to Equity Ratio Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019



Kemampuan pengelolaan APBD mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi APBD merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Salah satu laporan realisasi APBD yang wajib dibuat Pemerintah daerah adalah neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait, dan modal pada waktu tertentu.

Perkembangan Neraca Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi baik dari sisi asset, kewajiban maupun ekuitas. Pada tahun 2016, asset Kota Bukittinggi tumbuh sebesar 3,36% diiringi dengan pertumbuhan ekuitas sebesar 3,38% dan penurunan pada sisi

kewajiban 4,77%. Pada tahun 2017, pada sisi asset, kewajiban dan ekuitas mengalami pertumbuhan dengan angka yang berbeda. Pada tahun 2018, asset dan ekuitas mengalami penurunan sedangkan kewajiban meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2019 kewajiban turun dan asset serta ekuitas kembali tumbuh. Perkembangan neraca Kota Bukittinggi dan pertumbuhannya dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Neraca Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019

No	Uraian	Tahun			
		2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
1	ASET	1,492,027,311,190.50	1,515,282,417,304.37	1.445.331.498.036,00	1.620.893.912.558,68
2	KEWAJIBAN	2,780,376,220.00	3,426,642,672.67	6.619.770.671,00	2.686.736.009,00
3	EKUITAS	1,489,246,934,970.50	1,511,855,774,631.70	1.438.711.727.365,00	1.618.197.176.549,68

Tabel 3.6.
Pertumbuhan Komponen Neraca Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019

No	Uraian	Tahun			
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	ASET	3,36	1,56	-4,62	12,15
2	KEWAJIBAN	-4,77	23,24	93,19	-59,41
3	EKUITAS	3,38	1,52	-4,84	12,48

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini didapat dengan membandingkan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah, dimana semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019

No	Tahun	Pendapatan Transfer (Rp.)	Pendapatan Daerah (Rp.)	Rasio Ketergantungan Daerah (%)
1	2016	575.741.940.120,00	647.045.711.855,85	88,98
2	2017	550.998.955.857,00	653.374.887.189,69	84,33
3	2018	578.916.555.544,00	695.592.067.770,61	83,23

4	2019	607.228.300.285,00	734.106.696.896,05	82,72
---	------	--------------------	--------------------	-------

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2019 Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi rata-rata masih mendekati 85%. Namun dilihat dari tren, terjadi penurunan secara terus menerus setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 Rasio Ketergantungan Kota Bukittinggi berada pada angka 88,98%, pada tahun 2019 sudah berada pada angka 82,72%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ketergantungan masih sangat tinggi, tetapi kemandirian daerah terus menunjukkan tren positif yang ditunjukkan oleh terus menurunnya Rasio Ketergantungan Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Selain dilihat dari Rasio Ketergantungan Daerah, kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga bias dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio kemandirian daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2019

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Pendapatan Transfer (Rp.)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
1	2016	71.303.771.735,85	575.741.940.120,00	12,38
2	2017	102.375.931.332,69	550.998.955.857,00	18,58
3	2018	101.936.792.226,61	578.916.555.544,00	17,61
4	2019	111.896.596.611,05	607.228.300.285,00	18,43

Perkembangan Rasio Kemandirian Daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2019 sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Bukittinggi terhadap keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Dari tahun 2016 sampai dengan 2019 rasio kemandirian daerah Kota Bukittinggi masih rendah, dimana pada tahun 2016 rasio kemandirian masih 12,38 % dan meningkat sampai dengan

tahun 2019 pada angka 18,43%. Walaupun ketergantungan keuangan masih tinggi terhadap pemerintah pusat, tetapi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi terus meningkat dari tahun ke tahun dari kurun waktu 2016 sampai dengan 2019.

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk *input*, *output* dan *outcome* yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Sehingga arah dan kebijakan umum daerah dijabarkan dalam:

- 1) proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,
- 2) arah kebijakan pendapatan daerah,
- 3) arah kebijakan belanja daerah, dan
- 4) arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta menggunakan data-data tahun sebelumnya dan tahun berjalan, proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 151.437.934.799 milyar rupiah dengan rincian pajak daerah dapat tercapai sebesar 51.163.135.193 milyar rupiah, retribusi daerah 79.886.202.400 milyar rupiah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 6.100.000.000 milyar rupiah serta dari sumber lain-lain PAD yang sah sebesar 14.288.597.206 milyar rupiah. Proyeksi tersebut dengan asumsi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) formula tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Seiring dengan wabah pandemic Covid 19 yang dialami oleh Indonesia sejak awal Januari 2020, pemerintah daerah memberikan relaksasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berupa pembebasan pembayaran selama 4 (empat) bulan berturut-turut. Hal ini berimbas pada penurunan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang pada bulan Maret 2020 seharusnya terhimpun Rp 33 milyar lebih, pada bulan Maret 2020 ini hanya terhimpun sebesar Rp 23.089.036.573,40 (15,25%). Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan pembatasan aktivitas ekonomi dan juga diberlakukannya berbagai pembebasan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah per April, kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ke depannya akan mengalami tekanan yang cukup berat.

Selain itu kebijakan pemerintah yang cukup krusial di April 2020 sebagai akibat pandemi Covid 19 adalah yaitu:

- 1) Refokusing 25% Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) agar dapat digunakan sebagian/seluruhnya untuk penanganan pandemic COVID-19;
- 2) Relaksasi penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk segera bisa digunakan mendukung penanganan COVID-19;
- 3) Refokusing dan realokasi DAK Fisik kesehatan untuk penanganan COVID-19; serta
- 4) Penghentian seluruh proses pengadaan DAK Fisik diluar bidang Pendidikan dan Kesehatan

Berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah dengan adanya pandemi covid-19 pada Tahun 2020 dan berkemungkinan akan berdampak dan mengalami mengalami penurunan pada Tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan hanya sebesar 90,65 milyar rupiah dengan rincian pajak daerah dapat tercapai sebesar 38,70 milyar rupiah, retribusi daerah 32,23 milyar rupiah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 5,79 milyar rupiah serta dari sumber lain-lain PAD yang sah sebesar 13,90 milyar rupiah. Rincian proyeksi pendapatan tahun 2021 diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi

Rek	Uraian	Proyeksi Tahun 2021 (Rp)

1	PENDAPATAN DAERAH	551.364.832.482
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	90.646.454.932
1.1.1.	Pajak Daerah	38.707.014.656
1.1.2.	Retribusi Daerah	32.234.743.070
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.795.000.000
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	13.909.697.206
1.2.	Dana Perimbangan	437.832.939.550
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	17.206.616.550
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	420.626.323.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.885.438.000
1.3.1	Hibah	0
1.3.2	Dana Darurat	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2020

Adapun kontribusi dari masing masing komponen Pendapatan dan Belanja daerah serta pembiayaan terhadap APBD dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah serta pembiayaan terhadap APBD
Tahun 2016-2019

No. Urut	URAIAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	PENDAPATAN DAERAH	675.267.277.741,89	647.045.721.855,85	95,82	710.125.538.263,16	653.374.887.189,69	92,01	720.174.380.033,00	695.566.582.636,61	96,58	749.055.030.480,00	734.106.696.896,05	98,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	73.665.978.704,89	71.303.781.735,85	96,79	113.424.739.490,16	102.375.931.332,69	90,26	102.738.280.085,00	101.912.947.092,61	99,20	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	95,54
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	37.372.320.634,00	30.709.690.231,00	82,17	46.068.135.193,00	38.282.140.327,00	83,10	47.068.135.193,00	45.123.830.395,00	95,87	47.413.135.193,00	45.204.119.636,50	95,34
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.008.005.523,89	21.070.502.562,00	84,26	33.868.949.414,00	27.329.451.324,00	80,69	38.216.489.567,00	29.941.703.285,00	78,35	49.311.930.925,00	33.125.468.779,75	67,18
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.733.946.797,00	4.636.543.697,00	124,17	4.953.910.645,00	4.953.910.645,00	100,00	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	143,13	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	99,53
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.551.705.750,00	14.887.045.245,85	197,13	28.533.744.238,16	31.810.429.036,69	111,48	14.005.034.528,00	21.911.507.388,61	156,45	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	192,43
1.2	Dana Perimbangan	571.717.429.850,00	547.829.867.933,00	95,82	565.330.425.613,00	516.228.868.598,00	91,31	535.292.061.948,00	523.061.869.776,00	97,72	562.947.079.000,00	552.063.924.512,00	98,07
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.942.934.000,00	15.128.297.227,00	94,89	16.082.256.613,00	15.520.149.463,00	96,50	18.049.292.620,00	12.590.206.437,00	69,75	13.244.201.000,00	9.145.673.440,00	69,05
1.2.2	Dana Alokasi Umum	458.968.482.000,00	458.968.482.000,00	100,00	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	100,00	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	100,00	468.422.823.000,00	464.187.531.000,00	99,10
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	96.806.013.850,00	73.733.088.706,00	76,17	98.342.287.000,00	49.802.837.135,00	50,64	66.336.887.328,00	59.565.781.339,00	89,79	81.280.055.000,00	78.730.720.072,00	96,86
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29.883.869.187,00	27.912.072.187,00	93,40	31.370.373.160,00	34.770.087.259,00	110,84	82.144.038.000,00	70.591.765.768,00	85,94	68.993.818.853,00	70.146.175.773,00	101,67
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	15.013.600.000,00	14.737.080.000,00	98,16	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	104,88
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	22.914.429.187,00	22.912.072.187,00	99,99	22.870.373.160,00	26.270.087.259,00	114,87	22.885.438.000,00	27.604.685.768,00	120,62	28.690.794.853,00	29.151.151.773,00	101,60
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	100,00	26.013.224.000,00	26.013.224.000,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.969.440.000,00	-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	15.995.000.000,00	-	-	-	-	-
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	675.267.277.741,89	647.045.721.855,85	95,82	710.125.538.263,16	653.374.887.189,69	92,01	720.174.380.033,00	695.566.582.636,61	96,58	749.055.030.480,00	734.106.696.896,05	98,00
2.	BELANJA DAERAH	740.530.417.595,22	631.173.276.618,00	85,23	733.491.320.634,34	590.688.034.803,65	80,53	839.898.354.079,22	698.275.894.652,95	83,14	891.197.754.148,88	717.087.566.902,83	80,46
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	369.112.321.364,22	349.010.851.917,00	94,55	286.519.235.361,34	264.787.956.662,00	92,42	332.175.042.956,42	304.155.459.053,89	91,56	324.905.946.697,61	306.939.664.039,58	94,47
2.1.1	Belanja Pegawai	352.495.800.801,22	336.101.758.265,00	95,35	267.396.791.492,34	249.390.763.119,00	93,27	305.097.465.288,42	284.865.045.503,00	93,37	303.919.313.975,61	293.106.428.610,00	96,44
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	11.694.321.895,00	11.063.426.045,00	94,61	14.618.618.100,00	11.813.560.637,00	80,81	18.761.459.000,00	16.150.441.919,89	86,08	15.268.252.629,00	11.934.939.445,00	78,17
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.304.380.000,00	1.333.685.699,00	57,88	2.013.142.000,00	1.244.142.000,00	61,80	2.348.300.000,00	1.655.929.463,00	70,52	4.033.160.000,00	1.241.900.000,00	30,79
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	617.818.668,00	511.981.908,00	82,87	617.818.668,00	597.129.906,00	96,65	1.467.818.668,00	1.467.818.668,00	100,00	685.220.093,00	559.301.924,50	81,62
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	-	-	1.872.865.101,00	1.742.361.000,00	93,03	4.500.000.000,00	16.223.500,00	0,36	1.000.000.000,00	97.094.060,08	9,71
2.2	BELANJA LANGSUNG	371.418.096.231,00	282.162.424.701,00	75,97	446.972.085.273,00	325.900.078.141,65	72,91	507.723.311.122,80	394.120.435.599,06	77,63	566.291.807.451,27	410.147.902.863,25	72,43
2.2.1	Belanja Pegawai	55.285.208.090,00	49.860.243.789,00	90,19	59.192.842.676,00	50.967.336.875,00	86,10	45.181.862.818,00	39.511.993.124,00	87,45	45.031.380.635,00	39.471.245.963,00	87,65
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.585.992.083,00	151.375.611.821,00	80,27	196.994.264.464,00	160.938.549.412,65	81,70	221.822.906.198,80	177.404.741.931,06	79,98	217.181.335.983,27	182.690.201.803,46	84,12
2.2.3	Belanja Modal	127.546.896.058,00	80.926.569.091,00	63,45	190.784.978.133,00	113.994.191.854,00	59,75	240.718.542.106,00	177.203.700.544,00	73,61	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61,82
	JUMLAH BELANJA	740.530.417.595,22	631.173.276.618,00	85,23	733.491.320.634,34	590.688.034.803,65	80,53	839.898.354.079,22	698.275.894.652,95	83,14	891.197.754.148,88	717.087.566.902,83	80,46

No. Urut	URAIAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	PEMBIAYAAN DAERAH	65.263.139.853,33	(23.200.000.000,00)	(35,55)	23.365.782.371,18	22.446.424.662,18	96,07	119.723.974.046,22	105.574.028.769,22	88,18	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	68,28
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	88.463.139.853,33	-	-	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	98,86	124.723.974.046,22	110.574.028.769,22	88,65	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	68,28
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	88.463.139.853,33	88.463.139.853,33	100,00	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	98,86	84.419.892.263,22	84.419.892.263,22	100,00	88.590.322.797,88	88.590.322.797,88	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				-	-		40.304.081.783,00	26.154.136.506,00		53.552.400.871,00	8.459.157.958,00	15,80
3.1.3	Hasil Penjualan Kakayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.463.139.853,33	-	-	80.492.917.270,18	79.573.559.561,18	98,86	124.723.974.046,22	110.574.028.769,22	88,65	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	68,28
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23.200.000.000,00	23.200.000.000,00	100,00	57.127.134.899,00	57.127.134.899,00	100,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	43.127.134.899,00	43.127.134.899,00	100,00	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	100,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.200.000.000,00	23.200.000.000,00	100,00	57.127.134.899,00	57.127.134.899,00	100,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-	-	-

Secara umum rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bukittinggi dari Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016 – 2019 yaitu 13,50%. Kemampuan keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2019 yaitu sebesar 15% dan terendah tahun 2016 sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki tingkat kemampuan keuangan yang rendah dan mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai pembangunan di daerah.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Kebijakan belanja daerah tidak terlepas dari kebijakan penganggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2021 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

- 1) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 2) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah maka perlu dilakukan kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
- 3) Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan Kelompok UKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
- 4) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih

fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;

- 5) Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
- 6) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 7) Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *outcomes* sesuai anggaran kinerja pembangunan;
- 8) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- f. Program dan Kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah harus jelas *output* dan *outcomenya*.
- g. Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari DAK harus jelas Juklak dan Juknisnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Penganggaran belanja modal yang merupakan salah satu komponen belanja langsung penganggarnya harus jelas dan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- i. Perangkat Daerah dalam mengajukan program dan kegiatan harus mengutamakan program yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja tidak langsung lainnya untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2018 s.d. 2021

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
2.1.	Belanja Tidak Langsung/Belanja Operasi	304.175.581.134,89	306.939.664.039,58	389.689.740.463,43	327.077.318.482,81
2.1.1	Belanja Pegawai	284.870.090.003,00	293.106.428.610	288.282.841.732,99	293.376.670.956,81
2.1.2	Belanja Bunga	-	-		
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-		
	Belanja Hibah	16.165.519.500,89	11.934.939.445	34.033.186.250	22.500.000.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.655.929.463,00	1.241.900.000	1.134.000.000	1.365.000.000

2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.467.818.668,00	559.301.924,50	735.647.526	735.647.526
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	16.223.500,00	97.094.060,08	65.504.064.954,44	9.100.000.000
2.2.	Belanja Langsung	401.075.522.849,06	410.147.902.863,25	415.292.534.231,82	405.464.586.670,68
	Belanja Pegawai	39.801.213.124	39.471.245.963	36.476.046.593,05	37.205.567.524,91
	Belanja Barang dan Jasa	183.263.492.531,06	182.690.201.803,46	165.993.068.868,62	169.193.068.868,62
	Belanja Modal	178.010.817.194	187.986.455.096,79	212.823.418.770,15	199.065.950.277,15

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2020

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah; dan
7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal /investasi pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Optimalisasi penerimaan dana bergulir sebagai sumber pembiayaan daerah.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2018 dan 2019 serta Proyeksi 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d. 2019
dan Proyeksi / Target Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
1	PEMBIAYAAN DAERAH	105.574.316.787,22	97.120.731.944,88	107.809.635.185,87	20.850.934.125,87
1.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	110.574.316.787,22	97.120.731.944,88	107.809.635.185,87	20.850.934.125,87
1.1.1	Silpa Tahun sebelumnya	84.420.180.281,22	88.590.322.797,88	22.850.934.125,87	20.850.934.125,87
1.1.2	Pencairan dana cadangan	26.154.136.506,00	8.530.409.147	84.958.701.060	-
	Pembangunan RSUD	26.154.136.506,00	8.530.409.147	84.958.701.060	-
1.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	-	-	-
1.2.1	Pembentukan Dana	-	-	-	-

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun 2021
	Cadangan				
1.2.2	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya	-	-	-	-
1.2.3	Penyertaan Modal	5.000.000.000,00	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2020

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.107.809.635.185,87,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 22.850.934.125,87,- dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp. 84.958.701.060,- Sementara untuk pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan pada Tahun 2020. Sedangkan tahun 2021, pembiayaan daerah hanya terdapat penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya yang diproyeksikan sebesar Rp. 20.850.934.125,87,-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019, mempedomani target capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, identifikasi isu strategis dan permasalahan di tingkat daerah dan nasional serta kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah juga berangkat dari analisis terhadap pencapaian kinerja kota yang diturunkan ke masing SKPD sesuai bidang urusan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Rumusan dan usulan masing-masing SKPD dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan; relevansi dan keterkaitannya terhadap pencapaian prioritas nasional, provinsi, visi dan misi kota, serta penyelesaian terhadap isu strategis daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Pemerintah telah menetapkan perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju, dan memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan.

Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah: *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

- (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- (9) Sinerg iPemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 yang telah sejalan dengan. Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang diringkas dengan SDGs. Adapun 7 agenda pembangunan tersebut adalah :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut, dan arahan presiden, maka sasaran makro pembangunan Nasional yang diproyeksi di tahun 2024, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
4. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%

Berdasarkan RPJMN tersebut, maka pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, telah ditetapkan tema Pembangunan Nasional Tahun 2021, yaitu Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas. Untuk itu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. *Major Project* yang mendukung langsung Tema RKP 2021 yang akan diprioritaskan antara lain:

- 1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai
- 2) 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter
- 3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
- 5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Memperhatikan capaian kinerja nasional dan sasaran pembangunan tahun 2021 dengan terjadinya Pandemi COVID 19, Pemerintah telah melakukan koreksi terhadap target indikator sasaran makro pembangunan nasional tahun 2021, sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan semula ditargetkan 6,0 –7,0 %, kemudian dikoreksi sehingga meningkat menjadi 8,3 –8,8%,
2. Pertumbuhan Ekonomi semula ditargetkan sebesar 5,7 – 6,0 %, dikoreksi sehingga menurun menjadi 5,1 –5,5%,
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) semula ditergetkan 75,54, dikoreksi menjadi 73,0.
4. Rasio Gini (indeks) semula ditargetkan 0,360 –0,374, dikoreksi menjadi 0,373 –0,376,
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semula ditargetkan 3,6 – 4,3 %, dikoreksi menjadi 4,8 –5,2,

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Pada tahun 2021, Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ditargetkan untuk mencapai Sasaran Makro Pembangunan meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,92%
2. Tingkat Inflasi 5-6%
3. PDRB Perkapita 50,99 Juta
4. Indeks Gini 0,327
5. Tingkat Kemiskinan 5,50%
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,60%
7. Indeks Pembangunan Manusia 72,59
8. Indeks Pemberdayaan Gender 95,08
9. IDG 62,42

Sebagai arahan dalam pencapaian target kinerja sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, maka tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Didukung Oleh Pertumbuhan Berkualitas melalui Pengembangan Hilirisasi Pertanian, Pariwisata, Investasi Dan Infrastruktur Di Berbagai Wilayah.

Adapun langkah konkret pencapaian tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dicapai melalui :

- A. Sumber Daya Manusia

1. Pemenuhan Pencapaian SPM (Pendidikan, Kesehatan, PU, Perkim, Sosial Dan Trantib)
 2. Meningkatkan Akses Dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
 3. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Pada Kabupaten Dengan Tingkat Prevalensi Diatas 30% Yakni Pasaman, Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten 50 Kota, Sijunjung, Dharmasraya, Agam Dan Mentawai
 4. Peningkatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- B. Pariwisata da Investasi
1. Pengembangan Dan Promosi Destinasi Wisata Pada Daerah Strategis (Mandeh, Silokek, Arau Dan Warisan Dunia UNESCO.
 2. Penyediaan Lahan Pengembangan Pariwisata Yang Siap Dimanfaatkan (Clear And Clean)
 3. Penyediaan Konektivitas Antar Destinasi Wisata
 4. Pengembangan Pariwisata Halal Dan Nuansa Islami
 5. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- C. Hilirisasi Pertanian
1. Meningkatkan Kualitas Dan Nilai Tambah Dari Komoditas Pertanian
 2. Peningkatan SDM Dari Petugas, Penyuluh Dan Kelompok Tani
 3. Menambah Jumlah Dan Kualitas Kawasan Pertanian Sesuai Komoditi Unggulan Masing-masing Daerah
 4. Meningkatkan Nilai Ekspor 2 Kali Lipat Dari Saat Ini, Seperti Komoditi Karet, Manggis, Sawit, Buah-buahan Dan Komoditi Unggulan Lainnya.
- D. Infrastruktur
1. Peningkatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi
 2. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Untuk Meningkatkan Hubungan Dan Pengembangan Wilayah
 3. Penyediaan Dukungan untuk Pembangunan Infrastruktur Prioritas Dan Strategis Nasional (Dukungan Pembangunan Jalan Tol Padang – Batas Riau Dan Lain-lain).

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, maka Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2021 adalah:

1. Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-BSK) dalam Kehidupan Masyarakat
2. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Serta Penanganan Daerah Tertinggal
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan
6. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
8. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi,UMKM dan Peningkatan Investasi
9. Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Sejalan dengan revisi target indikator pembangunan Nasional dan Sumatera Barat tahun 2021 dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, dengan mempertimbangkan dampak pandemic covid-19, maka dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, juga dilakukan penyesuaian target indikator pembangunan Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi semula 5,92% dikoreksi sehingga menjadi 4,22%
2. Indeks Gini semula ditarget 0,327, dikoreksi menjadi 0,304
3. Tingkat Kemiskinan semula ditargetkan 5,50%, dikoreksi menjadi 6,15%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka semula ditargetkan 5,60%, dikoreksi menjadi 7,77%
5. Indeks Pembangunan Manusia semula ditargetkan 72,59, dikoreksi menjadi 72,99

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2021

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021, visi kota adalah ***“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dan dilakukan penyempurnaan setiap tahun berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja, baik yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintahan Kota Bukittinggi, begitu pula dengan memperhatikan evaluasi kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan RB. Adapun tujuan dan sasaran untuk tahun 2021 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

VISI:

“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).	Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan
			Melibatkan Pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah
2.	Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
			Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
			Peningkatan kualitas pelayanan publik
			Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan
3.	Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan
			Peningkatan kualitas air minum
			Peningkatan penyehatan lingkungan pemukiman
			Peningkatan kepemilikan rumah
			Meningkatnya kualitas air sungai
			Meningkatnya kualitas udara
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	
Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu	Peningkatan pelayanan transportasi		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
4.	Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	Peningkatan pembangunan ekonomi sektor primer
			Peningkatan pembangunan ekonomi sektor sekunder
			Peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan
5.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasaserta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
			Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
			Mewujudkan pembangunan ramah gender, ramah anak dan ramah penyandang disabilitas
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, maka target makro ekonomi yang akan dicapai pada tahun terakhir RPJMD ini adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi 6,5%
2. Tingkat Inflasi 3-4%
3. Indeks Gini 0,3
4. Tingkat Kemiskinan 2,84%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,93%
6. Indeks Pembangunan Manusia 79,8

Sejalan dengan kebijakan nasional dan pemerintah provinsi, maka makro ekonomi Kota Bukittinggi yang dimuat dalam RKPD Tahun 2021 ini juga mengalami penyesuaian, begitu juga dengan tujuan dan sasaran kota. Target makro ekonomi kota tersebut diarahkan secara nasional dan daerah, sehingga ditetapkan target sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 6,5% dikoreksi menjadi 5,58%
2. Tingkat Inflasi 3-4% dikoreksi menjadi
3. Indeks Gini 0,3 dikoreksi menjadi 0,259
4. Tingkat Kemiskinan 2,84% dikoreksi menjadi 3,61
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,93% dikoreksi menjadi 6,85
6. Indeks Pembangunan Manusia 79,8 dikoreksi menjadi 82,19

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

RKP 2021 merupakan RKP yang disusun untuk menyikapi pandemi *COVID 19* yang berdampak besar terhadap stabilitas nasional. Karena itu terjadi pergeseran awal dari Rancangan Pembangunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2024. Dengan demikian tema awal pembangunan nasional yang telah ditetapkan yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, bergeser menjadi “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan RKP tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Dengan demikian pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 telah disepakati Prioritas Nasional yaitu :

1. Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi. Sebagai langkah konkret, telah disusun tujuh Proyek Prioritas Strategis/MP untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
2. Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pembangunan Wilayah pada tahun 2021 diarahkan untuk menumbuhkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.
3. Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial menjadi fokus

pembangunan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 menjadi momentum perluasan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

5. Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2021 akan mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, perbaikan permukiman. Selain itu percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2021 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata, industri dan yang menunjang peningkatan investasi.

6. Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti Covid-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (good governance) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi Covid-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Sejalan dengan kebijakan nasional, maka pada tahun 2021 RKPD Provinsi Sumatera Barat juga diarahkan untuk penanggulangan *covid 19* dan pemulihan ekonomi terkait dampak bencana ini. Secara umum prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat masih berangkat dari prioritas

pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021
1	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
6	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
7	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
8	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
9	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dijelaskan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat

Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) diarahkan untuk pencapaian; 1) Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif terutama dalam masa pemulihan pandemic Covid-19, 2) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, dan diarahkan untuk tetap memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada penderita Covid-19, 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial

ekonomi, 4) Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat terutama dalam upaya mengadvokasi masyarakat terkait dengan penerapan *New Normal*, dan 7) Penurunan perbuatan maksiat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama,
3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekati),
4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial,
5. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat,
6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif serta responsive dengan kondisi penanganan dan pemulihan pandemic Covid-19, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6) Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Sasaran yang hendak dicapai Prioritas ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur,
2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur,
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,
4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan,
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib

belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat,
2. Meningkatnya integritas peserta didik,
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan,
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja,
5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca,
6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi,
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata,
8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana,
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga,
10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan,
11. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Geramas) yang perlu dilakukan secara masif, berkecukupan gizi terutama dalam pencegahan dan penanganan Stunting, serta meningkatkan kualitas layanan Kesehatan dalam menghadapi bencana Kesehatan seperti Covid-19. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian, 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata,
2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana,
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga,
4. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan,
5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi panganterutama sebagai rangkaian pelaksanaan Fokus Reformasi Sistem Ketanahan Bencana serta meningkatkan imunitas Kesehatan masyarakat melalui pemenuhan konsumsi pangan, 2) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, 7) Pola pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan,
2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis,
3. Meningkat-nya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.

6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.

Prioritas ini diarahkan untuk pemulihan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan dan promosi objek dankawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan terutama akses kepada destinasi wisata, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan

budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKMdalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja yang salah satunya dengan penyederhanaan perijinan dan investasi.

Sasaran yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah,
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

5. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2) Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan wisata bahari, 4) Optimalisasi pengelolaan ruang laut dan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman.

7. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah yang juga ditekankan mendukung Fokus Reformasi Jaring Pengaman Sosial. Sehingga pada prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, 4) Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin,
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka,
3. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal,
4. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

8. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi dibidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi,
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi,
3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas,
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air,
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung,
6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang,
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,

3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan,
4. Berkurangnya resiko bencana,
5. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana,
6. Terpeliharanya debit sungai,
7. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Bukittinggi”**.

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2021 dikaitkan dengan misi kota sesuai RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.3.
Keterkaitan Misi dan Prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2021

MISI	PRIORITAS
MISI 1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).	PRIORITAS 1. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
MISI 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan	PRIORITAS 2. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik
MISI 3. Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	PRIORITAS 8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
	PRIORITAS 9. Pelestarian Lingkungan Hidup
MISI 4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna	PRIORITAS 6. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
	PRIORITAS 7. Penanggulangan Kemiskinan
MISI 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasaserta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PRIORITAS 1. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
	PRIORITAS 3. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan

MISI	PRIORITAS
	PRORITAS 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
	PRORITAS 5. Pengembangan Pariwisata

Untuk melihat keterkaitan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2021 dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan prioritas nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi Tahun 2021

NO	AGENDA/PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KOTA BUKITTINGGI
1.	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	5	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	6	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
		9	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	8	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
		10	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	9	Pelestarian Lingkungan Hidup
		7	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan		
		6	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi	5	Pengembangan Pariwisata
		8	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	6	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
2.	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	8	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	7	Penanggulangan Kemiskinan
		3	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	3	Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
		4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
		5	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	6	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

NO	AGENDA/PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KOTA BUKITTINGGI
3	Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
		3	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	3	Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
		8	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	7	Penanggulangan Kemiskinan
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	1	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat	1	Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	9	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	8	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
		2	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	2	Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik
		3	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	3	Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan
		4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	10	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	9	Pelestarian Lingkungan Hidup
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	2	Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Lebih baik

Mengacu kepada prioritas nasional dan provinsi, serta untuk penanggulangan pandemi covid 19 serta dampaknya, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi terhadap dampak COVID 19, sesuai prioritas pembangunan:

a. Pengembangan Pariwisata

Prioritas ini ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi kota yang berkualitas, dengan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Pencapaian tujuan ini pada prioritas pengembangan pariwisata diarahkan untuk peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier yang diukur dari pertumbuhan ekonomi sektor tersier, dari lapangan usaha perhotelan, rumah makan, restoran dan transportasi.

Terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, maka kebijakan umum untuk prioritas pengembangan pariwisata meliputi:

- 1) Penyediaan prasarana pendukung daya tarik wisata sesuai standar dan protokol covid 19
 - 2) Penguatan insan wisata untuk mendukung kepariwisataan sesuai standar penanganan covid 19
 - 3) Peningkatan objek wisata untuk mendukung daya tarik wisata
- b. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Prioritas ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan ekonomi kota yang berkualitas, dengan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Pencapaian tujuan ini pada prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diarahkan untuk: a) peningkatan pembangunan sektor sekunder meliputi lapangan usaha industri pengolahan, b) peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier meliputi lapangan usaha perdagangan dan jasa-jasa, c) peningkatan pembangunan ekonomi sektor primer meliputi usaha pertanian.

Terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, maka kebijakan umum untuk prioritas ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) meliputi:

- 1) Penyediaan prasarana pendukung dan regulasi untuk menunjang aktivitas dan kegiatan ekonomi sesuai standar covid dan pasca covid 19
 - 2) Menyiapkan sarana dan prasana pendukung serta regulasi untuk mendorong pemanfaatan media online dalam aktivitas ekonomi masyarakat
 - 3) Meningkatkan daya saing produk memasuki pasar global
 - 4) Mendorong peningkatan produktifitas pertanian
- c. Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas ini ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin akibat dampak covid, sehingga mampu mengendalikan penambahan keluarga miskin baru, dengan sasaran penanggulangan kemiskinan dan indikator tingkat kemiskinan.

Terkait perbaikan ekonomi pasca pandemi covid 19, maka kebijakan umum terhadap penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan
 - 2) Mengoptimalkan potensi kesejahteraan sosial masyarakat untuk mendukung penanggulangan kemiskinan
2. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016 – 2021, sesuai prioritas pembangunan:
- a. Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar

Prioritas pencapaian target RPJMD tahun 2016 – 2021 terkait pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar meliputi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan sarana pendidikan dengan sasaran peningkatan mutu dan akses pendidikan dan indikator 1) harapan lama sekolah, 2) harapan lama sekolah dan untuk kesehatan dengan sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator usia harapan hidup.

Kebijakan umum untuk pencapaian target RPJMD dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar berupa:

- 1) Pembangunan ruang kelas baru untuk penambahan ruang kelas baru dan ruang lainnya untuk pemenuhan standar nasional pendidikan
- 2) Pembangunan prasarana kesehatan berupa lanjutan pembangunan rumah sakit, puskesmas dan pengadaan alat kesehatan

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur

Prioritas pencapaian target RPJMD tahun 2016 – 2021 terkait peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur adalah untuk mencapai sasaran; 1) peningkatan kualitas jalan dengan indikator indeks jalan mantap, 2) peningkatan kualitas air minum dengan indikator indeks air minum layak, 3) peningkatan penyehatan lingkungan dengan indikator indeks sanitasi layak dan indeks kawasan pemukiman yang tidak kumuh.

Kebijakan umum untuk pencapaian target RPJMD dalam peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur meliputi:

- 1) Pemeliharaan jalan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan mantap
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana penyediaan air baku
- 3) Rehabilitas drainase perkotaan untuk mengatasi genangan air

c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik

Prioritas pencapaian target RPJMD tahun 2016 – 2021 terkait peningkatan tata kelola pemerintahan untuk pencapaian sasaran 1) peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP dan EKPPD, 2) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan, dan jumlah SKPD/ unit kerja yang WBK

Kebijakan umum untuk pencapaian target kinerja RPJMD terkait peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan urusan dan kewenangan pemerintah kota
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan prima bagi masyarakat

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai prioritas:

a. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan

Prioritas pembangunan dalam pencapaian SPM terkait peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan adalah untuk pemenuhan dan mempertahankan capaian 100% target SPM bidang pendidikan pada pendidikan usia dini dan pendidikan dasar tingkat SD dan SMP. Kebijakan pencapaian standar SPM terkait peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan meliputi:

- 1) Pemenuhan sarana pendukung penyelenggaraan pendidikan
- 2) Peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan
- 3) Pemberian bantuan dan dukungan pembiayaan serta sarana bagi masyarakat

b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Prioritas pembangunan dalam pencapaian SPM terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah untuk pemenuhan dan mempertahankan capaian 100% target SPM bidang kesehatan, seperti; 1) pelayanan kesehatan ibu hamil, 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin, 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir, 4) pelayanan kesehatan balita, 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif, 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut, 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi, 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus= HIV). Kebijakan pencapaian standar SPM terkait peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan meliputi:

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan untuk setiap jenis layanan kesehatan dasar
- 2) Penguatan kapasitas dan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar
- 3) Dukungan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pada matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2021 dan perkiraan maju 2022 yang mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan sudah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di Kota Bukittinggi, pada tahun 2021 telah ditetapkan pagu indikatif menurut indikator sasaran yang diformulasikan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia telah dialokasikan untuk pencapaian sasaran. Penetapan pagu indikatif ini dilakukan dengan memperhitungkan :

- a. Realisasi terhadap target indikator sasaran sampai dengan tahun 2019
- b. Kontribusi SKPD dalam pencapaian sasaran
- c. Besaran alokasi dana yang telah di anggarkan melalui Prioritas, Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel 5.1

**Tabel 5.1
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021**

NO	SKPD	URUSAN	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		49,002,774,502
		Pendidikan	46,802,775,025
		Kebudayaan	2,199,999,477
2	Dinas Kesehatan		47,889,637,634
		Kesehatan	47,889,637,634
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		73,291,181,541
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72,630,841,481
		Pertanahan	660,340,060
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		5,787,865,478
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5,787,865,478

NO	SKPD	URUSAN	JUMLAH
5	Dinas Kebakaran		3,311,289,729
		Kebakaran	3,311,289,729
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		12,415,135,615
		Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,415,135,615
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2,673,546,792
		Bencana	2,673,546,792
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		4,490,942,572
		Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,490,942,572
9	Dinas Sosial		3,596,762,392
		Sosial	3,596,762,392
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4,773,292,427
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,258,421,505
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,514,870,922
11	Dinas Lingkungan Hidup		25,290,043,976
		Lingkungan Hidup	25,290,043,976
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		2,326,825,000
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,326,825,000
13	Dinas Perhubungan		7,915,966,951
		Perhubungan	7,915,966,951
14	Dinas Komunikasi dan Informatika		7,466,860,663
		Komunikasi dan Informatika	7,289,402,413
		Statistik	104,000,000
		Persandian	73,458,250
15	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		15,694,615,748
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2,178,647,348
		Perdagangan	13,515,968,400
16	Dinas PM, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja		9,816,627,274
		Penanaman Modal	7,508,271,974
		Tenaga Kerja	351,403,500
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		61,566,238,891
		Perpustakaan	60,689,057,691
		Kearsipan	877,181,200

NO	SKPD	URUSAN	JUMLAH	NO
18	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga			33,417,925,098
		Kepemudaan dan Olahraga	2,633,799,048	
		Pariwisata	30,784,126,050	
19	Dinas Pertanian dan Pangan			10,066,276,738
		Pangan	219,154,950	
		Pertanian	8,884,223,512	
		Kelautan dan Perikanan	962,898,276	
20	Sekretariat Daerah			41,007,032,934
		Administrasi Pemerintahan	41,007,032,934	
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			19,823,500,230
		Administrasi Pemerintahan	19,823,500,230	
22	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan			5,708,092,407
		Administrasi Pemerintahan	5,708,092,407	
23	Kecamatan Guguk Panjang			4,357,270,625
		Administrasi Pemerintahan	4,357,270,625	
24	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh			3,812,056,452
		Administrasi Pemerintahan	3,812,056,452	
25	Inspektorat			3,983,467,216
		Pengawasan	3,983,467,216	
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan			4,268,309,483
		Perencanaan	3,744,882,983	
		Penelitian dan Pengembangan	523,426,500	
27	Badan Keuangan			13,135,298,468
		Keuangan	13,135,298,468	
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia			3,230,606,646
		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	3,230,606,646	
	TOTAL		480,119,443,482	480,119,443,482

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

TABEL 5.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA BUKITINGGI TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA BUKITINGGI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BELANJA LANGSUNG				480,119,443,482				
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				49,002,774,502	APBD			49,517,378,353
	URUSAN PENDIDIKAN				46,802,775,025				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran optimal		100%	1,101,467,325				1,211,614,058
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli	Disdikbud Bukittinggi	3220 buah	7,499,950	APBD		3135 buah	8,249,945
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan	Disdikbud Bukittinggi	6 rekening / bulan	141,000,000	APBD		5 rekening / bulan	155,100,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dibayarkan	Disdikbud Bukittinggi	5 unit roda 4, 45 unit roda 2	159,321,875	APBD		5 unit roda 4, 45 unit roda 2	175,254,063
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan	Disdikbud Bukittinggi	10 Jenis , 1paket dan 1 Tahun	112,680,000	APBD		10 Jenis , 1paket dan 1 Tahun	123,948,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor yang dibeli	Disdikbud Bukittinggi	41 item	27,500,000	APBD		41 jenis	30,250,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	Disdikbud Bukittinggi	10 Jenis	11,320,000	APBD		10 Jenis	12,452,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Disdikbud Bukittinggi	13 item	5,273,500	APBD		12 macam	5,800,850
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman yang dibeli	Disdikbud Bukittinggi	1300 porsi makan 13000 kotak snack	32,500,000	APBD		1504 porsi dan 2200 kotak	35,750,000
9	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Rakor, sosialisasidan perjalanan dinas yang dilaksanakan	Disdikbud Bukittinggi	1 tahun	174,372,000	APBD		12 bulan	191,809,200
10	Penyediaan Jasa Perbaikan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan kantor yang dipelihara dan peripheral yang dibeli	Disdikbud Bukittinggi	12 item	15,000,000	APBD		12 macam dan 2 paket	16,500,000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	jasa pegawai non PNS yang dibayarkan	Disdikbud Bukittinggi	1 orang peg.kontak	0	APBD		1 orang	0
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayar	Disdikbud Bukittinggi	5 orang	200,000,000	APBD		1 paket	220,000,000
13	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor PPK, PPHP, PTK dan Pejabat pengadaan yang dibayarkan	Disdikbud Bukittinggi	150 Paket	215,000,000	APBD		150 Paket	236,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja SKPD	Persentase capaian realisasi perencanaan yang sesuai dengan rencana kerja		100%	48,255,450				53,080,995
14	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Perencanaan Yang tepat waktu	Disdikbud Bukittinggi	1 dokumen	48,255,450	APBD		1 dokumen	53,080,995
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		100%	725,000,000				4,650,000,000
15	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang baik dan layak	Disdikbud Bukittinggi	1 unit	225,000,000	APBD		1 unit	250,000,000
16	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Disdikbud Bukittinggi	10 unit	-	APBD		8 unit	200,000,000
17	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan perlengkapan Kantor	Disdikbud Bukittinggi	3 macam	-	APBD		3 macam	450,000,000
18	kendaraan operasional TKN I an Pembina(mobil hiace)	Tersedianya Kendaraan Operasional TKN	Disdikbud Bukittinggi	2 unit	500,000,000	APBD		2 unit	500,000,000
19	Pembangunan Gedung serbaguna	Terciptanya lingkungan kantor yang baik dan layak	Disdikbud Bukittinggi	1 unit	-	APBD		1 unit	3,000,000,000
20	pembangunan gudang Dinas di SKB	Tersedianya gudang yang baik dan layak	Disdikbud Bukittinggi	1 unit	-	APBD		1 unit	250,000,000
II	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini			578,451,500				538,362,385
21	Penyelenggaraan TK N Pembina	lancarnya Proses Belajar Mengajar TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi	TKN Pembina	12 bulan	78,140,000	APBD		12 bulan	85,954,000
22	Penyelenggaraan TK N 1	lancarnya proses belajar mengajar TKN 1 Kota Bukittinggi	TKN 1 Kota Bukittinggi	12 bulan	110,000,000	APBD		12 bulan	66,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	Lomba PAUD dan Dikmas Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	terpilihnya utusan kota bukitinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi dan Nasional	TKN 1 Kota Bukittinggi	13 cabang lomba	102,306,000	APBD		13 cabang lomba	101,282,940
24	Lomba Anak Usia Dini Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)	terpilihnya utusan pendidik dan anak usia dini untuk mengikuti lomba tingkat Propinsi	Disdikbud Bukittinggi	6 lomba	35,000,000	APBD		6 lomba	34,650,000
25	orientasi program PAUD				42,005,500	APBD			41,585,445
26	Pelaksanaan Akreditasi Satuan PAUD dan PNF	Tersusunnya bahan akreditasi PAUD PNF	Disdikbud Bukittinggi	30 lembaga	20,000,000	APBD		30 lembaga	19,800,000
27	Penunjang DAK NON FISIK BOP PAUD	Lancarnya penyaluran BOP PAUD	Disdikbud Bukittinggi	110 lembaga	35,000,000	APBD		110 lembaga	34,650,000
28	Fasilitasi Penunjang HIMPAUDI	jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAUDI Kota Bukittinggi	Disdikbud Bukittinggi	50 orang	65,000,000	APBD		50 orang	64,350,000
29	Manajemen DAK Fisik Satuan Pendidikan TKNPembina, TK N 1, SPNF SKB dan PKBM	Lancarnya pelaksanaan DAK Fisik PAUD PNF	Disdikbud Bukittinggi	4 lembaga	30,000,000	APBD		4 lembaga	29,700,000
30	Fasilitasi Penunjang GOP TKI	Lancarnya penyelenggaraan GOP TKI	Disdikbud Bukittinggi	1 tahun	41,000,000	APBD		1 tahun	40,590,000
31	Manajemen hibah PAUD PNF	Lancarnya pengelolaan HIBAH	Disdikbud Bukittinggi	7 lembaga	20,000,000	APBD		7 lembaga	19,800,000
IV	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tingkat APM dan APK SD, SMP	Disdikbud		25,253,557,750	APBD			20,248,007,973
32	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 1 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	141,900,000	APBD	SPM	12 bulan	156,090,000
33	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 2 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	190,740,000	APBD	SPM	12 bulan	209,814,000
34	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 3 Bukittinggi	Sekolah	100%	112,200,000	APBD	SPM	12 bulan	123,420,000
35	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 4 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	306,240,000	APBD	SPM	12 bulan	336,864,000
36	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 5 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	174,240,000	APBD	SPM	12 bulan	191,664,000
37	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 6 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	161,700,000	APBD	SPM	12 bulan	177,870,000
38	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 7 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	115,500,000	APBD	SPM	12 bulan	127,050,000
39	Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMPN 8 Bukittinggi	Sekolah	12 bulan	132,660,000	APBD	SPM	12 bulan	145,926,000
40	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Campago Ipuh	Sekolah	12 bulan	27,500,000	APBD	SPM	12 bulan	30,250,000
41	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Campago guguak bulek	Sekolah	12 bulan	28,050,000	APBD	SPM	12 bulan	30,855,000
42	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulai Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pulai Anak Aia	Sekolah	12 bulan	31,350,000	APBD	SPM	12 bulan	34,485,000
43	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	Sekolah	12 bulan	27,500,000	APBD	SPM	12 bulan	30,250,000
44	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Puhun pintu kabun	Sekolah	12 bulan	33,000,000	APBD	SPM	12 bulan	36,300,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
45	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulai Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Pulai anak aia	Sekolah	12 bulan	29,150,000	APBD	SPM	12 bulan	32,065,000
46	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Kubu Gulai Bancah	Sekolah	12 bulan	45,650,000	APBD	SPM	12 bulan	50,215,000
47	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Campago Ipuh	Sekolah	12 bulan	43,450,000	APBD	SPM	12 bulan	47,795,000
48	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Gantiang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Manggis gantiang	Sekolah	12 bulan	34,100,000	APBD	SPM	12 bulan	37,510,000
49	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun	Sekolah	12 bulan	38,500,000	APBD	SPM	12 bulan	42,350,000
50	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Campago Guguak Bulek	Sekolah	12 bulan	28,050,000	APBD	SPM	12 bulan	30,855,000
51	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun pintu kabun	Sekolah	12 bulan	17,600,000	APBD	SPM	12 bulan	19,360,000
52	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu gulai bancah	Sekolah	12 bulan	38,500,000	APBD	SPM	12 bulan	42,350,000
53	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung alam	Sekolah	12 bulan	15,400,000	APBD	SPM	12 bulan	16,940,000
54	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulai Anak Aia	Sekolah	12 bulan	35,200,000	APBD	SPM	12 bulan	38,720,000
55	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago ipuah	Sekolah	12 bulan	31,350,000	APBD	SPM	12 bulan	34,485,000
56	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Gantiang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Manggis gantiang	Sekolah	12 bulan	33,000,000	APBD	SPM	12 bulan	36,300,000
57	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 campago ipuah	Sekolah	12 bulan	35,200,000	APBD	SPM	12 bulan	38,720,000
58	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Benteng pasar atas	Sekolah	12 bulan	27,500,000	APBD	SPM	12 bulan	30,250,000
59	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 percontohan	Sekolah	12 bulan	82,500,000	APBD	SPM	12 bulan	90,750,000
60	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 03 Pakan kurai	Sekolah	12 bulan	108,900,000	APBD	SPM	12 bulan	119,790,000
61	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 bukit apit	Sekolah	12 bulan	49,500,000	APBD	SPM	12 bulan	54,450,000
62	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05Tarok dipo	Sekolah	12 bulan	30,800,000	APBD	SPM	12 bulan	33,880,000
63	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajung Tangah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 ATTS	Sekolah	12 bulan	46,750,000	APBD	SPM	12 bulan	51,425,000
64	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Bukik Cangang	Sekolah	12 bulan	29,700,000	APBD	SPM	12 bulan	32,670,000
65	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Tarok Dipo	Sekolah	8 item	59,400,000	APBD	SPM	12 bulan	65,340,000
66	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajung Tangah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 ATTS	Sekolah	12 bulan	44,000,000	APBD	SPM	12 bulan	48,400,000
67	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Bukik Apit Puhun	Sekolah	12 bulan	70,400,000	APBD	SPM	12 bulan	77,440,000
68	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Bukik Cangang	Sekolah	12 bulan	26,950,000	APBD	SPM	12 bulan	29,645,000
69	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit	Sekolah	12 bulan	26,950,000	APBD	SPM	12 bulan	29,645,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
70	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 ATTS	Sekolah	1 tahun	49,500,000	APBD	SPM	12 bulan	54,450,000
71	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Tarok Dipo	Sekolah	12 bulan	47,300,000	APBD	SPM	12 bulan	52,030,000
72	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai	Sekolah	12 bulan	78,650,000	APBD	SPM	12 bulan	86,515,000
73	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 18 Tarok Dipo	Sekolah	12 bulan	18,150,000	APBD	SPM	12 bulan	19,965,000
74	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 19 ATTS	Sekolah	12 bulan	50,600,000	APBD	SPM	12 bulan	55,660,000
75	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkih	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01 Ladang Cangkih	Sekolah	12 bulan	33,000,000	APBD	SPM	12 bulan	36,300,000
76	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 02 Aur Kuning	Sekolah	12 bulan	82,500,000	APBD	SPM	12 bulan	90,750,000
77	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Garegeh	Sekolah	12 bulan	43,450,000	APBD	SPM	12 bulan	47,795,000
78	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 04 Birugo	Sekolah	12 bulan	48,950,000	APBD	SPM	12 bulan	53,845,000
79	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 05 Birugo	Sekolah	3 jenis	33,000,000	APBD	SPM	12 bulan	36,300,000
80	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 06 Parit Antang	Sekolah	12 bulan	31,900,000	APBD	SPM	12 bulan	35,090,000
81	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 07 Belakang Balok	Sekolah	12 bulan	24,200,000	APBD	SPM	12 bulan	26,620,000
82	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 08 Kubu Tanjung	Sekolah	12 bulan	23,650,000	APBD	SPM	12 bulan	26,015,000
83	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 09 Belakang Balok	Sekolah	12 bulan	12,100,000	APBD	SPM	12 bulan	13,310,000
84	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 10 Sapiran	Sekolah	12 bulan	38,500,000	APBD	SPM	12 bulan	42,350,000
85	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 11 Aur kuning	Sekolah	12 bulan	19,250,000	APBD	SPM	12 bulan	21,175,000
86	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Terlaksananya Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Disdikbud Bukittinggi	7000 siswa	25,000,000	APBD		7000 siswa	24,750,000
87	Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD/MI	Terpilihnya siswa pemenang KSN SD/MI	Disdikbud Bukittinggi	6 orang	122,000,000	APBD		6 orang	120,780,000
88	Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP/MTs	Terpilihnya siswa pemenang KSN SMP/MTs	Disdikbud Bukittinggi	9 orang	149,614,500	APBD		9 orang	148,118,355
89	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SMP/MTs	Terpilihnya siswa SMP untuk mengikuti FLS2N Tk Provinsi dan Nasional	Disdikbud Bukittinggi	30 sekolah	103,472,000	APBD		30 sekolah	102,437,280
90	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD/MI	Terpilihnya siswa SD untuk mengikuti FLS2N Tk Provinsi dan Nasional	Disdikbud Bukittinggi	75 sekolah	122,528,000	APBD		75 sekolah	121,302,720
91	Pelaksanaan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) TK SD	Kontingen Kota Bukittinggi di KOSN SD/MI	Disdikbud Bukittinggi	50 orang	132,832,000	APBD		50 orang	131,503,680
92	Pelaksanaan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) TK SMP	Kontingen Kota Bukittinggi di KOSN SMP/MTs	Disdikbud Bukittinggi	50 orang	120,987,000	APBD		50 orang	119,777,130

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
93	Penunjang Tim Koordinasi Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Reguler	Terfasilitasinya pelaksanaan BOS Jenjang SD dan SMP	Disdikbud Bukittinggi	70 sekolah	36,000,000	APBD		70 sekolah	35,640,000
94	Operasional DAK SD/SMP	Terlaksananya Pengelolaan DAK SD, SMP	Disdikbud Bukittinggi	77 SD/SMP	30,000,000	APBD		77 SD/SMP	29,700,000
95	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) Kota Bukittinggi	Terlaksananya pembinaan sekolah/ madrasah sehat dan LSS Tk Provinsi dan Nasional	Disdikbud Bukittinggi	100 sekolah	100,000,000	APBD		100 sekolah	99,000,000
96	Penunjang Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD	Terfasilitasinya pelaksanaan beasiswa miskin melalui Progrm Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang SD dengan verifikasi data siswa yang akurat	Disdikbud Bukittinggi	15 sekolah	20,000,000	APBD		15 sekolah	19,800,000
97	Penunjang Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP	Terfasilitasinya pelaksanaan beasiswa miskin melalui Progrm Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang SMP dengan verifikasi data siswa yang akurat	Disdikbud Bukittinggi	62 sekolah	20,000,000	APBD		62 sekolah	19,800,000
98	Hari Pendidikan Nasional	Timbulnya nilai-nilai patriotisme dikalangan pendidikan	Disdikbud Bukittinggi	50 orang	25,000,000	APBD		50 orang	24,750,000
99	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Terlaksananya Reward untuk siswa berprestasi	Disdikbud Bukittinggi	50 orang	45,000,000	APBD		50 orang	44,550,000
100	Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter SD	Terlaksananya AKM SD Kota Bukittinggi	Disdikbud Bukittinggi	60 sekolah	40,000,000	APBD		60 sekolah	39,600,000
101	Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter SMP	Terlaksananya AKM SMP Kota Bukittinggi	Disdikbud Bukittinggi	21 sekolah	21,000,000	APBD		21 sekolah	20,790,000
102	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi	Disdikbud Bukittinggi	75 sekolah	45,000,000	APBD		75 sekolah	44,550,000
103	Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada Jenjang SMP dan MTs	Terlaksananya Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Aqidah di Kota Bukittinggi	Disdikbud Bukittinggi	35 SMP/MTs	122,800,000	APBD		35 SMP/MTs	121,572,000
104	Sosialisasi E-Rapor SD	Tercapainya cara pembuatan E-rapor untuk SD	Disdikbud Bukittinggi	130 orang	70,000,000	APBD		130 orang	69,300,000
105	Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran SD Tahun 2021	Tersedianya Guru SMP yang berkompetensi dalam penyusunan perangkat pembelajaran	Disdikbud Bukittinggi	30 orang	50,289,000	APBD		30 orang	49,786,110
106	Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran SMP Tahun 2021	Tersedianya Guru SD yang berkompetensi dalam penyusunan perangkat pembelajaran	Disdikbud Bukittinggi	30 orang	46,255,250	APBD		30 orang	45,792,698
107	Pengadaan Meubiler SD	Tersedianya Meubiler SD	Disdikbud Bukittinggi	400 Pasang Meja dan Kursi Siswa	200,000,000	APBD		400 Pasang Meja dan Kursi Siswa	220,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
108	Pengadaan Meubiler SMP	Tersedianya Meubiler SMP	Disdikbud Bukittinggi	400 Pasang Meja dan Kursi Siswa	200,000,000	APBD		400 Pasang Meja dan Kursi Siswa	220,000,000
109	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah Dasar	Disdikbud Bukittinggi	08 campago ipuah 08 kubu tanjung dan Sumur resapan SD 03 Pakan Kurai, Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo	18,650,000,000	APBD		08 campago ipuah 08 kubu tanjung dan Sumur rsapan SD 03 Pakan Kurai	13,145,000,000
110	Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama	Disdikbud Bukittinggi	Lanjutan SMP 4 dan sumur resapan SMP 6 dan SMP 8	1,595,000,000	APBD		Lanjutan SMP 4 dan sumur resapan SMP 6 dan SMP 8	1,754,500,000
111	Penunjang Pengelolaan Bantuan Hibah/Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penunjang Pengelolaan Bantuan Hibah/Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Dasar	Disdikbud Bukittinggi	Penerima Hib	15,000,000	APBD		35 Penerima Hib	14,850,000
1	Program Pendidikan Non Formal	Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun			483,618,000				507,575,200
112	Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	peserta UN Paket A, B dan C	Disdikbud Bukittinggi	300 warga belajar	29,480,000	APBD		300 warga belajar	29,185,200
113	Penyelenggaraan operasional SPNF SKB Kota Bukittinggi	lancarnya pelaksanaan operasional kantor	SPNF SKB Kota Bukittinggi	1 tahun	282,238,000	APBD	Operasional dan Pembangunan Pagar dan gudang SKB keadaan Sekolah yang berada dipinggir ngarai	1 tahun	275,000,000
114	Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A di SPNF SKB	Lancarnya pembelajaran paket A	SPNF SKB Kota Bukittinggi	30 orang	17,400,000	APBD	SPM	30 orang	19,140,000
115	Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket B di SPNF SKB	Lancarnya pembelajaran paket B	SPNF SKB Kota Bukittinggi	100 orang	49,000,000	APBD	SPM	30 orang	77,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
116	Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket C di SPNF SKB	Lancarnya pembelajaran paket C	SPNF SKB Kota Bukittinggi	30 orang	25,500,000	APBD	SPM	25 orang	28,050,000
117	Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Satuan Pendidikan PAUD PNF	tampilnya hasil karya peserta didik dan guru dalam kegiatan HAI tingkat provinsi dan nasional	Disdikbud Bukittinggi	30 orang	65,000,000	APBD		30 orang	64,350,000
118	Pelaksanaan Manajemen Izin Operasional Satuan Pendidikan PAUD PNF	terbitnya rekomendasi izin/perpanjang izin satuan pendidikan paud pnf	Disdikbud Bukittinggi	120 lembaga	15,000,000	APBD		120 lembaga	14,850,000
VI	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan			18,044,175,000	APBD			19,795,150,100
119	Pemeriksaan berkas Tunjangan Profesi guru (TPG) dan Aneka Tunjangan Guru	jumlah Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya dan aneka tunjangan guru	Disdikbud Bukittinggi	700 orang	107,200,000	APBD		700 orang	106,128,000
120	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Terbayarnya insentif bulanan dan tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS	Disdikbud Bukittinggi	1050 orang	5,958,335,000	APBD		1050 orang	6,554,168,500
121	Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP	Peserta seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah	Disdikbud Bukittinggi	42 orang	135,000,000	APBD		42 orang	133,650,000
122	Pembinaan dan Seleksi OGN Guru SD dan SMP	Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan olimpiade sains guru SD	Disdikbud Bukittinggi	40 orang	50,000,000	APBD		40 orang	49,500,000
123	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Penilaian angka kredit fungsional guru dan pengawas	Disdikbud Bukittinggi	250 orang	53,640,000	APBD		250 orang	53,103,600
124	Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri	Terbayarnya honor guru kontrak di TK, SD dan SMP Negeri	Disdikbud Bukittinggi	300 orang	11,100,000,000	APBD		300 orang	12,210,000,000
125	Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Guru melalui wadah MGMP dan KKG	Jumlah peserta peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP) Guru melalui wadah MGMP dan KKG	Disdikbud Bukittinggi	800 orang	105,000,000	APBD		800 orang	103,950,000
126	Peningkatan Kompetensi manajemen Kepala Sekolah	kepala sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi	Disdikbud Bukittinggi	75 orang	35,000,000	APBD		75 orang	34,650,000
127	Recruitmen Calon Kepala Sekolah	Calon Kepala Sekolah yang ikut seleksi	Disdikbud Bukittinggi	25 orang	250,000,000	APBD		25 orang	275,000,000
128	Recruitmen Calon Pengawas	Calon Pengawas yang ikut seleksi	Disdikbud Bukittinggi	25 orang	250,000,000	APBD		25 orang	
VII	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pelayanan pendidikan sesuai SNP			568,250,000	APBD			576,697,000
129	Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan DapoPAUD-Dikmas	Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapopaud-dikmas	Disdikbud Bukittinggi	202 orang /2 semester	100,000,000	APBD		202 orang /2 semester	99,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
130	Pelaksanaan akreditasi sekolah	Terlaksananya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan	Disdikbud Bukittinggi	75 sekolah	35,000,000	APBD		75 sekolah	34,650,000
131	Penjaminan Mutu Pendidikan	Jumlah sekolah yang telah mengolah rapor mutu pada aplikasi PMP	Disdikbud Bukittinggi	75 sekolah	45,000,000	APBD		75 sekolah	44,550,000
132	Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi	Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi	Disdikbud Bukittinggi	1 kegiatan	177,800,000	APBD		1 kegiatan	176,022,000
133	Pembuatan Buku Profil Pendidikan	jumlah Buku Profil Pendidikan	Disdikbud Bukittinggi	12 buku	20,000,000	APBD		12 buku	19,800,000
134	Program Anugrah Ki Hajar	Pelajar SD dan SMP ikut aktif dalam mengikuti kegiatan anugrah Kihajar	Disdikbud Bukittinggi	80 orang guru dan 80 orang siswa	62,000,000	APBD		80 orang guru dan 80 orang siswa	61,380,000
135	Penyusunan Database Perencanaan SPM Pendidikan	Database SPM Pendidikan	Disdikbud Bukittinggi	1 kegiatan	128,450,000	APBD		1 kegiatan	141,295,000
	Rakor Kependidikan				-				
VIII	Program BOS	Proses Belajar Mengajar Berjalan dengan Lancar			0				-
136	Kegiatan BOS	dana BOS untuk SD dan SMP Negeri, Swasta Kota Bukittinggi	Disdikbud Bukittinggi	65 SD dan 11 SMP	0	APBN		65 SD dan 11 SMP	-
	URUSAN KEBUDAYAAN				2,199,999,477				
IX	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peran Serta Lembaga Adat			155,000,000				170,500,000
137	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat	lancarnya operasional lembaga adat	Disdikbud Bukittinggi	7 lembaga	155,000,000	APBD		7 lembaga	170,500,000
X	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan			915,700,000	-			660,581,240
138	Pengelolaan Operasional Museum Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Lancarnya operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta	Disdikbud Bukittinggi	12 bulan	364,476,000	APBD		12 bulan	1,458,640,398
139	Pengadaan sarana dan Prasarana RKBH	Pengamanan rumah Kelahiran Bung Hatta	Disdikbud Bukittinggi	12 bulan	526,224,000	APBD		12 bulan	275,000,000
140	Penunjang Operasional BOP DAK Non Fisik Museum	optimalnya kegiatan BOP museum	Disdikbud Bukittinggi	1 museum	25,000,000	APBD		1 museum	24,750,000
XI	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase cagar budaya yang diapresiasi			1,129,299,477				1,158,890,398
141	Pawai Alegoris HUT RI	jumlah peserta pawai alegoris HUTRI	Disdikbud Bukittinggi	100 kelompok	66,550,000	APBD		100 kelompok	78,955,718
142	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah				-				0
143	Pembinaan Sanggar dan Perguruan silat di Kota Bukittinggi	pembinaan seni dan budaya di kota bukittinggi	Disdikbud Bukittinggi	10 sanggar dan 10 perguruan silat	61,500,000	APBD		10 sanggar dan 10 perguruan silat	60,885,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
144	Pelatihan Panitahan Kurai Limo Jorong	Jumlah peserta Pelatihan Nilai Tradisi	Disdikbud Bukittinggi	60 orang	79,753,250			60 orang	78,955,718
145	Registrasi Cagar Budaya Daerah	jumlah Rekomendasi Cagar Budaya untuk ditetapkan	Disdikbud Bukittinggi	3 rekomendasi	41,000,000	APBD		3 rekomendasi	40,590,000
146	Pelestarian Cagar Budaya	Lestariannya cagar budaya	Disdikbud Bukittinggi	1 cagar budaya	150,000,000	APBD		1 cagar budaya	165,000,000
147	Mengikuti event seni budaya	event budaya yang diikuti	Disdikbud Bukittinggi	7 kali	196,379,000	APBD		7 kali	194,415,210
148	Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda				24,298,000				24,055,020
149	Festival Seni Budaya Anak Nagari Kota Bukittinggi	keaktifitas seni dan budaya yang ditampilkan	Disdikbud Bukittinggi	10 kelompok seni	509,819,227			10 kelompok seni	529,104,950
	URUSAN KESEHATAN				47,889,637,634				
II	BELANJA RUTIN				14,173,083,000				
A	DINAS KESEHATAN dan 9 UPTD (Puskesmas/IFK/Laboratorium)				3,725,795,000				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran .	DKK	100%	2,783,757,000		Belanja Rutin		
		Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran di DKK dan UPTD	DKK	100%					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dokumen terkirim melalui Pos .	DKK	50	6,500,000				
		Jumlah materai 3000 tersedia .		200	-				
		Jumlah materai 6000 tersedia .		150	-				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar .	DKK	37 rekening	271,730,000				
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara .	DKK	22 kali	618,794,000	Termasuk gaji			
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa / honor .	DKK	15 orang	707,718,500	Termasuk gaji pegawai kontrak			
		jumlah item bahan kebersihan yang disediakan		-					
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor .	DKK	12 bulan	62,000,000				
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli .	DKK	113 item	66,000,000				
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan penggandaan yang tersedia .	DKK	12 bulan	38,560,000				
		Jenis barang cetakan yang dicetak .	DKK	6 item					
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara .	DKK	11 item	18,447,500				
		Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan .	DKK	20					
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makan minuman rapat,tamu dan lembur yang tersedia yang disediakan untuk rapat, tamu dan lembur .	DKK	100	46,625,000				
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota	Persentase Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan	DKK	100	127,382,000.00				
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang diberikan honor .	DKK	17 orang	740,000,000	Termasuk gaji pegawai kontrak sebanyak 4 orang			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terbayar .	DKK	55	80,000,000				
2	Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja SKPD	Tingkat pelaksanaan rencana kerja dan keuangan		90%	77,038,000		Belanja Rutin		
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan rencana kerja dan keuangan	DKK	90%	77,038,000				
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur .		90%	865,000,000		Belanja Rutin		
1	Pemeliharaan gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor	DKK	90%	30,000,000				
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor yang terlaksana dan kalibrasi alat kesehatan	DKK	90%	15,000,000				
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase gedung yang direhab .	DKK	90%	650,000,000				
6	Rehab Pustu Kubu Tanjung	Jumlah Pustu Kubu Tanjung Yang Di Rehab	DKK	90%	-		Musren bang		
7	Lanjutan pembangunan Puskesmas Kel. Campago Ipuh	Jumlah pembangunan Puskesmas Kel. Campago Ipuh	DKK	90%	-		Musren bang		
8	Bantuan pengadaan alat kesehatan	Jumlah paket bantuan alat kesehatan	Guguk Panjang	1 Paket	100,000,000		Pokir DPRD (Arnis)		
9	Gerbang Puskesmas Tarok Dipo	Persentase pembangunan gerbang Puskesmas Tarok Dipo	Guguk Panjang	100%	70,000,000		Pokir DPRD (H.Irman)		
B	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)				10,447,288,000				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran di RSUD	RSUD	100%	10,447,288,000				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat-RSUD	Jumlah surat dokumen terkirim melalui Pos .	RSUD	1 ls	19,000,000				
		Jumlah materai 3000 tersedia .							
		Jumlah materai 6000 tersedia .							
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik-RSUD	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar .	RSUD	12 bln	505,190,000				
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional-RSUD	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara .	RSUD	1 ls	484,808,000				
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor-RSUD	Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa / honor .	RSUD	1 ls	1,127,440,000				
		jumlah item bahan kebersihan yang disediakan							
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja-RSUD	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor .	RSUD	12 bln	375,000,000				
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor-RSUD	Jumlah jenis ATK yang dibeli .	RSUD	1 ls	275,000,000				
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan-RSUD	Pemenuhan kebutuhan penggandaan yang tersedia .	RSUD	1 ls	200,000,000				
		Jenis barang cetakan yang dicetak .							
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor-RSUD	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara .	RSUD	1 ls	125,000,000				
		Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan .							
9	Penyediaan Makanan dan Minuman-RSUD	Persentase makan minuman rapat,tamu dan lembur yang tersedia yang disediakan untuk rapat, tamu dan lembur .	RSUD	1 ls	252,000,000				
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi dan Luar Daerah	Persentase Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi yang dihadiri .	RSUD	1 ls	569,290,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor-RSUD	Jumlah tenaga keamanan yang diberikan honor .	RSUD	1 ls	828,560,000				
12	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah-RSUD	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terbayar .	RSUD	1 ls	100,000,000				
13	Jasa Pegawai Kontrak-RSUD	Jumlah tenaga kontrak yg diberikan honorarium	RSUD	1 ls	5,586,000,000				
III	BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN				23,269,266,634				
A	DINAS KESEHATAN				12,571,599,634				
I	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		95%	1,465,000,000		Belanja Operasional Pelayanan		
		Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai		100%	-				
		Persentase tenaga medis dan sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan		95%	-				
1	Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	DKK	7 puskesmas	320,000,000				
		Terlaksananya kegiatan P3K PAM lebaran, Paskibra, hari besar dan keramaian kota		12 bulan					
		Persentase pemanfaatan ambulance siaga oleh masyarakat		1,5 %					
		Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)		7 puskesmas					
		Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan LAPAS kelas II A Bukittinggi		12 kali					
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kunjungan Keluarga Sehat		7 puskesmas					
		Jumlah Puskesmas yang mengikuti penilaian FKTP berprestasi		7 puskesmas					
		Jumlah Puskesmas yang mengikuti nakes teladan		7 puskesmas					
		Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer		7 puskesmas					
		Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan RS dan Unit transfusi Darah untuk rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu		7 puskesmas					
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	Jumlah Jemaah Haji yang diukur kebugarannya	DKK	400 orang	65,000,000				
		Jumlah ASN yang diukur kebugarannya		80 orang					
		Jumlah Peserta Pembinaan Pos Usaha Kesehatan Kerja		250 orang					
3	Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan jampersal (DAK non Fisik)	Jumlah Puskesmas yang dimonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program BOK .	DKK	7 puskesmas	50,000,000				
		Jumlah pertemuan sosialisasi dan monitoring evaluasi		4 kali	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah rapat koordinasi DAK di kementerian		2 kali	-				
4	Upaya Kesehatan masyarakat sekunder (DAK non fisik)	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan UKM Rujukan	DKK	6 kali	460,000,000				
		Jumlah kegiatan Monev Terpadu yang dilakukan ke Puskesmas		12 kali	-				
5	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN		7 puskesmas	40,000,000				
6	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Jumlah ibu hamil, persalinan, nifas dan KB yang menjadi sasaran jampersal dapat terlayani sesuai standar	DKK	30 org	400,000,000				
7	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana .		1 pelayanan	50,000,000				
		Jumlah pertemuan pengendalian krisis kesehatan		1 kali	-				
		Persentase data faktor resiko bencana yang terkumpul pada saat bencana dan pasca bencana		100%	-				
		Jumlah dokumen data faktor resiko krisis kesehatan saat dan pasca bencana		21 orang	-				
8	Pemeriksaan kesehatan haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes .	DKK	100%	30,000,000				
		Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya .		100%	-				
		Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air .		100%	-				
		Jumlah pertemuan persiapan pemeriksaan kesehatan haji		1 kali	-				
		Jumlah pertemuan monev kesehatan haji		1 kali	-				
9	Sunat Rasul Untuk Anak Yatim yang Tidak Mampu	Jumlah anak yatim yg mengikuti sunat rasul	Guguk Panjang	100 or	50,000,000				
II	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Pelayanan ibu Hamil yang pertama kali sesuai standar (K1)		100%	325,000,000				
		Cakupan Pelayanan ibu Hamil 4 kali sesuai masa usia kehamilan sesuai standar (K4)		100%	-				
		Cakupan pelayanan ibu nifas oleh tenaga kesehatan sesuai standar (KF3)		88%	-				
		Persentase kunjungan neonatal lengkap (KNL) sesuai standar		92%	-				
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi (29 hr-11 bln) sesuai standar		88%	-				
		Cakupan pelayanan kesehatan balita (12-59 bln) sesuai standar		83%	-				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 1,7,10		65%	-				
10	Peningkatan Kesehatan Ibu	Pertemuan Validasi Data & Evaluasi Program Kesga		25 orang	175,000,000				
		Pertemuan manual rujukan		30 orang	-				
		Peningkatan kompetensi bidan		30 orang	-				
		Monev dan tindak lanjut pasca bintek terpadu ke Puskesmas (jejaring dan jaringan)		7 puskesmas	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Review bedah kohor		30 orang	-				
		Penilaian bidan poskeskel		7 puskesmas	-				
		Sosialisasi tatalaksana pasca persalinan		30 orang	-				
		Pertemuan Pertemuan Kegiatan Movev terpadu dan RTL ke Puskesmas		7 puskesmas	-				
		Jumlah Cetak Buku KIA, Buku saku kespro catin		1.750 dan 800 bh	-				
11	Peningkatan Kesehatan Anak	Jumlah peserta Update pelayanan Neonatal essensial		30 orang	150,000,000				
		Jumlah Bayi yang dilaksanakan pemeriksaan SHK		600 orang	-				
		Jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran kasus AMP		25 orang	-				
		Jumlah peserta update kohor anak		25 orang	-				
		Jumlah peserta update AMP ibu dan Anak		25 orang	-				
		Jumlah peserta pembahasan kasus AMP		30 orang	-				
		Cetak Cakram DDTK		1000 buah	-				
		Pembelian Komputer		1 unit	-				
III	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan IMD		53%	338,603,000				
		Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif		53%	-				
		Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan		100%	-				
		Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan		100%	-				
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan TTD 90 tablet selama masa kehamilan		90%	-				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans Gizi		50%	-				
		Persentase puskesmas yang mampu tatalaksana gizi buruk		10%	-				
12	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah Balita gizi buruk/ kurang mendapatkan makanan tambahan			200,000,000				
		Jumlah anak sekolah/remaja putri yg mendapatkan makanan tambahan		100 orang	-				
		PMT untuk Balita di Pos Gizi dalam rangka pencegahan Stunting			-				
13	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro lainnya.	Jumlah peserta Pelatihan Nutriclin		1 keg (20 peserta)	88,603,000				
		Jumlah peserta Sosialisasi Regulasi Tentang ASI Eksklusif		1 keg (35 peserta)	-				
		Jumlah peserta Pelatihan Motivator ASI dan Pembentukan KP ASI		1 keg (20 peserta)	-				
		Jumlah peserta Review PMBA dan Pembentukan Pos Gizi		1 keg (20 peserta)	-				
		Cetak leaflet		2 rim	-				
		Pembelian tripod		1 ls	-				
14	Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi pada Remaja	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Sosialisasi tentang program pemberian TTD untuk remaja putri		1 keg (30 peserta)	50,000,000				
		Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Konselor Gizi Teman Sebaya		2 keg (24 peserta)	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah kegiatan Pertemuan evaluasi program gizi terpadu		2 keg(20 peserta)	-				
					-				
IV	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan PHBS Tingkat Kota .		35%	796,387,500				
		Cakupan Kelurahan Siaga aktif		75%	-				
		jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan .		3 dokumen	-				
		Cakupan posyandu dengan strata mandiri		35%	-				
		Persentase kelurahan sehat		80%	-				
15	Pengembangan program promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Kelurahan yang dibina TOGA dan Lingkungan Sehat	DKK	24 kelurahan	407,182,000				
		Jumlah pertemuan PHBS, TOGA dan Lingkungan Sehat		1 kali	-				
		Jumlah Kelurahan yang dilakukan pembinaan posyandu dan monitoring oleh pokjandal posyandu		24 kelurahan	-				
		Jumlah pertemuan evaluasi hasil pembinaan dan monitoring pokjandal		4 kali	-				
		Penilaian kader Posyandu Berprestasi		136 posyandu	-				
		Jumlah pemenang lomba kader posyandu berprestasi Tk. Kota		3 orang	-				
		Jumlah kader posyandu berprestasi yang dikirim untuk Tk. Provinsi		1 orang	-				
		Jumlah kelurahan siaga yang aktif		24 kelurahan	-				
		Jumlah pertemuan Kelurahan Siaga Aktif		2 kali	-				
		Jumlah Anggota Saka Bakti Husada yang dibina		30 orang	-				
		Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti		2 kegiatan	-				
		Pembinaan pengetahuan dan keterampilan tentang kesakaan bagi anggota saka bakti husada		12 kali	-				
		Jumlah tema dalam KIE ke masyarakat yang dihasilkan		70 tema	-				
		Jumlah media elektronik untuk promosi kesehatan		5 macam	-				
		Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan		10 macam	-				
		Jumlah kampanye germas yang dilaksanakan		2 kegiatan	-				
		Jumlah pertemuan advokasi dunia usaha dan organisasi masyarakat untuk memanfaatkan dana CSR dan sumber daya untuk program		1 kegiatan	-				
		Jumlah pertemuan rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan implementasi germas		1 kegiatan	-				
		Jumlah sekolah yang dibina		12 sekolah	-				
		Jumlah sekolah yang dibina untuk penilaian Tk. Provinsi		4 sekolah	-				
		Jumlah pertemuan pengelola UKS Puskesmas		2 kali	-				
16	Fasilitasi Kota Sehat	Jumlah dokumen kota sehat	DKK	1 dokumen	389,205,500				
					-				
V	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia		60%	137,000,000				
		Cakupan pelayanan kesehatan lansia yang sesuai standar		100%	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Jumlah peserta pertemuan validasi data dan evaluasi program lansia			137,000,000				
		Jumlah peserta pertemuan pemberdayaan kesehatan lansia							
		Jumlah peserta pertemuan orientasi penggunaan panduan praktis untuk Caregiver pada perawatan jangka panjang penanganan penyakit degeneratif			-				
		Jumlah Puskesmas yang mengikuti lomba senam lansia			-				
		Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelola dan kader lansia			-				
		Cetak buku kesehatan lansia			-				
		Cetak buku pedoman untuk pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas			-				
					-				
VI	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		100%	2,495,673,634				
		Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, Waria/ Transgender, pengguna NAPZA dan warga Binaan LP) mendapatkan pemeriksaan sesuai standar		100%	-				
		Cakupan penderita DBD yang ditangani .		100%	-				
		Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + .		90%	-				
		Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita .		100%	-				
		Cakupan penemuan penderita diare .		100%	-				
		Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI) .		100%	-				
		Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan .		25%	-				
		Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) .		0.90%	-				
		Jumlah WPA (Warga Peduli AIDS) yang dibina .		1	-				
		Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan .		100%	-				
		Persentase angka keberhasilan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular		85%	-				
		Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi		85%	-				
		Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan.		100%	-				
		Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi		100%	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase penderita hipertensi, diabetes mellitus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard.		100%	-				
18	Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA .	DKK	7 puskesmas	674,000,000				
		Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi .		20 petugas	-				
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Diare .		7 puskesmas	-				
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program TB .		7 puskesmas	-				
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan program Ispa, Diare, Filariasis/Kecacingan, Hepatitis, TB, HIV/AIDS, Malaria, DBD		7 puskesmas	-				
		Jumlah bahan cetak, fotokopi, KIE pencegahan penyakit menular .		4 buah	-				
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Hepatitis .		7 puskesmas	-				
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program HIV/AIDS .		7 puskesmas	-				
		Jumlah peserta Workshop Pencegahan dan penanggulangan hepatitis		30 orang	-				
		Jumlah peserta sosialisasi dan koordinasi tentang gigitan HPR		30 peserta	-				
		Jumlah peserta Monev Ispa Diare Hepatitis dan Typhoid		30 peserta	-				
		Jumlah peserta Workshop Peningkatan Peran kelompok Masyarakat dalam Penemuan Kasus TB		30 peserta	-				
		Jumlah peserta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Tas		30 peserta	-				
		Jumlah peserta OJT survey Tas Filariasis		30 peserta	-				
		Jumlah peserta Pertemuan E-Sismal Malaria		30 peserta	-				
		Jumlah peserta Workshop LROA		30 peserta	-				
		Jumlah peserta Monev KLB		30 peserta	-				
		Jumlah Sekolah yang mendapatkan penyuluhan Adaptif DBD		40 peserta	-				
		Jumlah peserta workshop Pencegahan dan PE		30 peserta	-				
19	Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah pemantauan semua kasus penyakit menular .	DKK	5 kasus	741,673,634				
		Data / kasus penyakit potensial wabah yang ditemukan .		100 kasus	-				
		Jumlah Puskesmas yang melakukan PE pada setiap kasus potensial wabah .		7 puskesmas	-				
		Jumlah petugas Puskesmas dapat melakukan PE pada setiap kasus potensial wabah sesuai dengan protap .		7 petugas	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen data surveilan epidemiologi yang tersedia,		10 dokumen	-				
		Jumlah puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB		7 puskesmas	-				
		Jumlah Puskesmas, pustu dan poskeskel yang dimonitoring program surveilans epidemiologi		40 puskesmas	-				
20	Surveillance/ Pengendalian penyakit tidak menular	Pembinaan program penyakit tidak menular (PTM)	DKK	24 kali	150,000,000				
		Jumlah posbindu yang di monitoring		21 posbindu	-				
		Jumlah puskesmas yang dapat melakukan pemeriksaan IVA		2 puskesmas	-				
		Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM .		24 kelurahan	-				
		Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu .		7 puskesmas	-				
		Persentase perempuan usia 30 sampai 50 thn yg dideteksi dini kanker servix dan kanker payudara .		20%	-				
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku		7 puskesmas	-				
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		7 puskesmas	-				
		Persentase pasien ODGJ berat yang terlayani		100%	-				
21	Peningkatan imunisasi	Jumlah sekolah / kelurahan / BPS yang mendapatkan informasi / sosialisasi program imunisasi .	DKK	64 sekolah	120,000,000				
		Jumlah lintas sektor yang mendapatkan informasi/sosialisasi program imunisasi .		30 instansi	-				
		Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi .		15 petugas	-				
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program imunisasi .		7 puskesmas	-				
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan program imunisasi .		7 puskesmas	-				
		Jumlah jenis bahan cetak, fotokopi, KIE pencegahan penyakit menular tersedia petugas yang diikuti di tingkat propinsi/pusat .		4 jenis	-				
		Jumlah pelaksanaan workshop Revitalisasi Program Imunisasi		1 kali	-				
		Penyusunan regulasi Imunisasi			-				
		Workshop Revitalisasi Program Imunisasi			-				
		Monev Program Imunisasi,			-				
		Sosialisasi Imunisasi MR			-				
22	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan program pengendalian penyakit bersumber binatang	DKK	7 puskesmas	-				
		Jumlah tenaga fogging yang mendapatkan pembinaan		10 orang	-				
		Jumlah fogging foccus yang dilakukan .		14 kali	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Malaria		7 puskesmas	-				
		Jumlah lintas sektor yang mendapatkan informasi/sosialisasi program penyakit bersumber binatang		30 instansi	-				
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Rabies .		7 puskesmas	-				
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program DBD .		7 puskesmas	-				
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Thypoid .		7 puskesmas	-				
		Jumlah sekolah/kelurahan yang mendapatkan informasi/sosialisasi program penyakit bersumber binatang		64 kali	-				
		Jumlah bahan cetak, fotokopi, KIE penyakit bersumber binatang		4 paket	-				
		Jumlah mesin fogging yang diservice		6 unit	-				
		Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan/pelatihan di tingkat propinsi .		20 petugas	-				
		Jenis bahan kimia cypermertin (seruni) dan larvasida (abate) yang diadakan untuk pengendalian DBD .		2 paket	-				
23	Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Jumlah perjalanan dinas luar daerah .	DKK	6 kali	300,000,000				
		Jumlah ODHA yang konsumsi ARV		90%	-				
		Jumlah anggota KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program .		15 orang	-				
		Jumlah Pemetaan titik hot spot .		1 buah	-				
		Jumlah mahasiswa kampus yang dibina oleh KPAK .		60 orang	-				
		Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan .		40 orang	-				
		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat/sarana penunjang .		4 paket	-				
		Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik dan KIE .		3 kali	-				
		Jumlah Sekretariat KPA yang menerima honorarium dalam setahun .		4 orang	-				
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah .		10 kali	-				
		Jumlah pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan .		2 kali	-				
		Peringatan Hari AIDS Sedunia .		1 kali	-				
		Jumlah focus Group Diskusi .		7 kali	-				
		Jumlah konseling rohani bagi komunitas/ponci		10 kali	-				
		Jumlah warga yang mengikuti pembentukan Kelompok Warga Peduli AIDS .		60 orang	-				
		Jumlah siswa sekolah yang dibina oleh KPAK .		60 orang	-				
		Jumlah Warga Peduli AIDS, LSM dan KDS yang mendapat bantuan .		15 orang	-				
		Jumlah kader LKB yang mengikuti pertemuan .		60 orang	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun .		5 orang	-				
		Jumlah LSM Peduli AIDS, Jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti pertemuan .		60 instansi	-				
24	Pengembangan IPWL	Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL .	DKK	4 kali	45,000,000				
		Jumlah petugas yang mendapat peningkatan pengetahuan/pelatihan dalam upaya kesehatan pengembangan IPWL/Non IPWL .		2 petugas	-				
		Jumlah puskesmas Institusi Penerima wajib Lapur (IPWL) bagi pecandu narkoba .		4 puskesmas	-				
		Jumlah pecandu narkoba yang terjangkau		30 orang	-				
25	Pengadaan bahan habis pakai skrining HIV dan sifilis pada ibu hamil (DAK Fisik penugasan)	Persentase bahan habis pakai HIV sifilis yang terpenuhi	DKK	80%	150,000,000				
26	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik)	Jumlah bulan pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	DKK	12 bulan	315,000,000				
					-				
VII	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	DKK	65%	889,710,500				
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan		60%	-				
		Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan		40%	-				
		Persentase Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan		50%	-				
27	Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah TTU yang diperiksa Sanitasi lingkungan	DKK	20 sarana	279,710,500				
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM		24 Kelurahan	-				
		Jumlah Petugas Pengelola Program mengikuti pertemuan Orientasi Program		15 orang	-				
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan IKL		100 sekolah	-				
		Jumlah Fasyankes yang melaksanakan Pengelolaan Limbah		30 fasyankes	-				
		Jumlah Petugas yang mengikuti Pelatihan UKL- UPL		2 orang	-				
28	Pengawasan sanitasi depot air minum	Persentase Depot Air Minum yang memenuhi standar kesehatan	DKK	955	30,000,000				
		Frekuensi pengawasan sanitasi Depot air minum		1 kali	-				
29	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan	Lab.Kes	3800 sampel	580,000,000				
		Jumlah kelengkapan lapangan		5 item	-				
		Jenis pemeriksaan sampel air yang dilaksanakan		3 jenis	-				
		Jumlah petugas yang memperoleh makanan minuman penambah daya tahan tubuh/penetralisir kontaminasi bahan kimia		7 orang	-				
		Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi		14 alat	-				
		Jumlah siklus program PME laboratorium		2 siklus	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan		1700 kg	-				
		Jumlah alat laboratorium yang diadakan		8 item	-				
		Jumlah alat laboratorium yang dipelihara		14 alat	-				
		Jumlah alat rumah tangga yang diadakan		1 item	-				
		Jumlah perjalanan dinas dan kaji banding yang dilaksanakan		15 kali	-				
VIII	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin .		9198	3,749,170,500				
30	Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk miskin	Jumlah peserta JKN (PBI APBD) yang dibantu pembayaran premi JKN		9.143 orang + 55 prediksi bayi baru lahir tahun 2020 menjadi 9198 x 12 bln x Rp. 42.000 x 80 %	3,749,170,500				
		Jumlah pertemuan yang dilakukan untuk pengembangan dan peningkatan pengelolaan JKN		1 kali	-				
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan dan monitoring pengelolaan JKN		7 Puskesmas	-				
IX	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi dan meningkat status akreditasinya		7 puskesmas	70,000,000				
31	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan akreditasi		3 kegiatan	464,000,000				
		Jumlah Kegiatan Pendampingan Reakreditasi		6 kali	-				
		Jumlah Puskesmas yang Disurvey Reakreditasi		2 puskesmas	-				
32	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Tenaga dan Sarana Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi untuk Izin Praktik	500	orang	35,000,000				
		Jumlah Sarana Kesehatan yang diberikan rekomendasi untuk Izin Operasional	50	sarana	-				
		Jumlah Sarana/Fasilitas/Tenaga Kesehatan yang dibina dan diawasi	100	sarana	-				
		Frekuensi Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perizinan Tenaga dan Sarana Kesehatan	1	Kali	-				
		Frekuensi Pertemuan Koordinasi dengan Organisasi Profesi Kesehatan	1	Kali	-				
33	Sosialisasi dan Pengawasan Perizinan Tenaga/Sarana Kesehatan	Jumlah sarana kesehatan/Faskes yang direkomendasikan untuk pemberian izin		10 sarana	35,000,000				
		Jumlah peraturan kesehatan/perizinan yang disosialisasikan kepada masyarakat		2 buah	-				
		Jumlah sarana kesehatan/faskes yang dilakukan pengawasan dan visitasi		28 sarana	-				
					-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja		100%	307,931,000				
54	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan/Workshop/Capacity Building/Seminar Teknis Kesehatan	50	orang	273,000,000				
		Frekuensi Pertemuan Koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan	1	kali	-				
		Frekuensi Pertemuan Sosialisasi Hasil Pelatihan/Workshop/Seminar Kesehatan dari SDM Kesehatan yang telah Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar kepada SDM Kesehatan Lainnya	1	kegiatan	-				
		Jumlah Mahasiswa Kesehatan yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, Pengambilan Data dan Penelitian	500	orang	-				
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Kota Bukittinggi	1	Dokumen	-				
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi	1	Dokumen	-				
34	Pelaksanaan Penilaian Kredit Fungsional Medis dan Paramedis	Terlaksananya sosialisasi dan uji kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan untuk SDM yang berkualitas	20	orang	34,931,000				
					-				
XI	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan pembekalan kesehatan di puskesmas		95%	1,400,919,000				
		Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan		95%	-				
35	Pengadaan Obat dan pembekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat dan pembekalan kesehatan terpenuhi .	IFK	100%	469,987,000				
		Bahan pembungkus dan pengepakan tersedia		1 paket	-				
		Penambah daya tahan tubuh petugas tersedia		12 bulan	-				
		Obat kadaluarsa/rusak dimusnahkan		1 paket	-				
		Terlaksananya kegiatan penjemputan obat/vaksin maupun konsultasi/koordinasi		12 bulan	-				
		Terlaksananya kegiatan pertemuan perencanaan obat terpadu		2 kegiatan	-				
36	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK fisik)	Persentase kebutuhan obat dan pembekalan kesehatan terpenuhi	IFK	100%	450,000,000				
37	Distribusi Obat dan e-logistik (DAK Non Fisik)	Jumlah bulan pengembangan system E-logistik	IFK	12 bulan	46,932,000				
38	Penyediaan sarana pendukung kefarmasian (DAK fisik)	Jumlah prasarana pendukung instalasi farmasi yang disediakan	IFK	10 item	184,000,000				
39	Pengadaan bahan medis habis pakai (DAK fisik)	Persentase kebutuhan pembekalan kesehatan terpenuhi	IFK	100%	250,000,000				
					-				
XII	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar .		100%	135,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase penggunaan obat secara rasional		100%	-				
		Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan		100%	-				
		Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani		100%	-				
40	Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan kefarmasian di puskesmas	30	orang	75,000,000				
		Frekuensi Pertemuan pengelolaan ASPAK	2	kali	-				
		Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang Terawasi Penggunaan Obat Rasionalnya	20	sarana	-				
		Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/ Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek	30	orang	-				
		Jumlah sarana yang terbina dan terawasi distribusi sediaan farmasinya	30	sarana	-				
		Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat	1	kali	-				
					-				
41	Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian	Jumlah peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	100	sarana	60,000,000				
		Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian tentang peraturan / regulasi terkait sarana pelayanan kefarmasian	200	orang	-				
		Peningkatan pengetahuan petugas pengelola sarana pelayanan kefarmasian tentang penyelenggaraan pelayanan kefarmasian	15	orang	-				
					-				
42	Pengawasan makanan dan minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non fisik)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang keamanan pangan	60	orang	-				
		Jumlah industri rumah tangga yang diaudit	300	sarana	-				
		Jumlah sampel pangan yang diterima	71	sampel	-				
		Jumlah masyarakat yang diberikan edukasi tentang keamanan pangan	300	orang	-				
					-				
XIII	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase ketersediaan data pelayanan kesehatan		100%	96,204,500				
		Persentase ketersediaan data Standard Pelayanan Minimal		100%	-				
		Persentase masyarakat yang terlayani melalui aplikasi SIK, Infokes/ P-care		100%	-				
65	Penyusunan Profil Kesehatan dan Penyelenggaraan Komunikasi Data	Persentase tersedianya jaringan komunikasi data	DKK	100%	40,000,000				
		Jumlah Buku profil kesehatan yang dicetak		30 buku	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data profil		30 instansi	-				
		Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui web DKK		5 buah	-				
66	Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan aplikasi e-kesehatan (e-puskesmas)	DKK	7 puskesmas	56,204,500				
		Adanya capaian SPM		12 indikator	-				
		Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer dan jaringan LAN		12 bulan	-				
					-				
XIV	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan		100%	305,000,000				
	Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	DKK	2 kali	-				
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan		14 orang	-				
67	Pengembangan peningkatan pengelolaan BLUD-JKN	Jumlah pertemuan yang dilakukan	DKK	3 kali	305,000,000				
		Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan JKN	DKK	7 puskesmas	-				
					-				
XV	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan		100%	60,000,000				
68	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan	60	orang	60,000,000				
		Jumlah industri rumah tangga yang diaudit	70	sarana	-				
		Jumlah sampel pangan yang diperiksa	1	kali	-				
					-				
B	PUSKESMAS				8,167,189,000				
I	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		95%	8,167,189,000		Belanja Operasional Pelayanan		
1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk RA	4 kelurahan	80,000,000				
2	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk GP	3 kelurahan	70,000,000				
3	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk NS	4 kelurahan	60,000,000				
4	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk Mks	2 kelurahan	50,000,000				
5	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancha	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk GB	1 kelurahan	40,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo baleh	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk TB	8 kelurahan	20,615,000				
7	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk Plus MKS	2 kelurahan	40,000,000				
8	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang (DAK Non Fisik 2021)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk GP	3 kelurahan	618,174,000				
9	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rasimah Ahmad (DAK Non Fisik 2021)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk RA	4 kelurahan	800,000,000				
10	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo Baleh (DAK Non Fisik 2021)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk TB	8 kelurahan	646,000,000				
11	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin (DAK Non Fisik 2021)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk MKS	3 kelurahan	484,000,000				
12	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah (DAK Non Fisik 2021)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk GB	1 kelurahan	370,000,000				
13	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin (DAK Non Fisik 2021)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk Plus MKS	2 kelurahan	440,800,000				
14	Pelayanan Kesejatan di Puskesmas Nilam Sari (DAK Non Fisik 2021)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk NS	3 kelurahan	453,600,000				
15	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang-BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk GP	3 kelurahan	831,000,000				
16	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad-BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk RA	4 kelurahan	900,000,000				
17	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh-BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk TB	8 kelurahan	630,000,000				
18	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin-BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk MKS	2 kelurahan	723,000,000				
19	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah-BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk GB	1 kelurahan	300,000,000				
20	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin-BLUD	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Pusk Plus MKS	2 kelurahan	260,000,000				
21	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari-BLUD	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	Pusk NS	3 kelurahan	350,000,000				
C	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)				2,036,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi . Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal		1 unit 100% 20% 100%	2,036,000,000 - - -				
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan RSUD	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan RSUD yang diadakan	DKK	1 ls	1,036,000,000				
2	Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai RSUD	Jumlah dan jenis obat dan bahan habis pakai RSUD yang diadakan	DKK	1 ls	1,000,000,000				
D	PMI				494,478,000				
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				73,291,181,541			-	93,138,592,696
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				72,630,841,481				
	PENUNJANG URUSAN				1,801,406,250				2,157,776,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,765,630,000				2,087,776,000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	DPU PR	4 Jenis	3,500,000			5 Jenis	7,000,000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, rekening telepon, reklistrik, rekening kawat/faximili/internet	DPU PR	12 rekening telepon, 12 rekening air, 12 rekening listrik, 12 rekening kawat/faximili /internet	260,000,000			12 rekening Telepon, 12 rekening Air, 12 rekening listrik, 12 rekening Internet	260,000,000
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya, Kendaraan dinas roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	DPU PR	2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truk, 24 unit sepeda motor	298,578,000			2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truk, 24 sepeda motor	350,000,000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat kebersihan yang disediakan, Jasa kebersihan yang disediakan, retribusi sampah yang dibayar	DPU PR	10 item, 1 paket , 1 retribusi sampah	270,180,000			9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 orang) 3 item 6 jenis	290,000,000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli	DPU PR	59 Jenis	15,000,000			59 Jenis	30,000,000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan, Penggandaan yang dilakukan	DPU PR	11 jenis, 67.854 lembar	17,500,000			16 jenis, 126.310 lembar fotocopy	35,000,000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang dibeli	DPU PR	13 jenis	5,000,000			13 jenis	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan yang dibeli, Snack yang dibeli, Makan minum yang dibeli	DPU PR	1.232 bungkus nasi, 525 bungkus snack, 1 ls	12,500,000			874 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	25,000,000
18	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	Rapat-rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	DPU PR	12 bulan	174,372,000			12 bulan	276,776,000
19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara,	DPU PR	2 item, 9 jenis	15,000,000			2 item, 8 jenis	20,000,000
21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan	DPU PR	1 kantor (2 SKPD)	374,000,000			1 paket (6 orang)	374,000,000
22	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	DPU PR	126 Paket	220,000,000			126 Paket	220,000,000
23	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket honor penunjang operasional pengelola teknis pelaksana kegiatan	DPU PR	126 Paket	100,000,000			126 Paket	100,000,000
24	Pengurusan DAK Bidang ke PU an	Bidang yang terfasilitasi	DPU PR	1 bidang DAK				126 Paket	90,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Pemeliharaan berkala gedung kantor yang dilaksanakan			20,776,250				38,000,000
01	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Dokumen perencanaan dan keuangan	DPU PR		20,776,250			1 gedung	38,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor yang dilaksanakan			15,000,000				30,000,000
22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor yang dilaksanakan	DPU PR	1 gedung	15,000,000			1 gedung	30,000,000
23	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas yang disediakan	DPU PR	1 unit mobil dinas eselon II, 1 unit mobil dinas eselon III					
24	Pengadaan Pompa Hydran dan Jaringannya	Pompa hydran yang diadakan	DPU PR	1 pompa hydran					
25	Pengadaan Bangunan gedung Tempat Kerja	Dokumen perencanaan, Laporan Pengawasan, gudang	DPU PR	1 Dokumen perencanaan, 1 Laporan Pengawasan, 1 Gudang					
26	Pengadaan Perlengkapan Kantor	lemari arsip, tangga, gerobak	DPU PR	4 lemari arsip, 1 tangga, 1 gerobak					
27	Pengadaan Peralatan Kantor	Mesin penghancur kertas, Laptop, Printer, Sound System	DPU PR	2 Mesin penghancur kertas, 1 Laptop, 4 Printer, 1 Sound System				1 paket	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketersediaan pakaian dinas	DPU PR						200,000,000
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPU PR	pakaian dinas 115 orang pegawai					200,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian			-				40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Peserta yang mengikuti bimtek/diklat ke P U an	DPU PR	5 orang				1 gedung	40,000,000
					21,365,003,388				58,275,255,254
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan kota terbangun yang berkondisi baik			4,265,146,750				31,552,238,750
01	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Trotoar	Ketersediaan dokumen perencanaan dan Laporan pengawasan kegiatan	DPU PR	2 dokumen perencanaan, 2 laporan pengawasan				1 dok perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 pekerjaan	602,885,500
02	Peningkatan Trotoar	Panjang trotoar yang ditingkatkan	DPU PR	6.017 m trotoar yang ditingkatkan	2,824,677,000			1 dok perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 pekerjaan	15,622,346,000
03	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota	Ketersediaan dokumen perencanaan dan Laporan pengawasan kegiatan	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan				1 dok perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 pekerjaan	303,084,000
04	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Jalan yang dibangun	DPU PR					1 dok perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 pekerjaan	3,502,971,000
05	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jembatan	Ketersediaan dokumen perencanaan dan Laporan pengawasan kegiatan	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan				1 dok perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 pekerjaan	181,730,000
06	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	DPU PR					1 dok perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket	1,001,730,000
07	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Trotoar	Ketersediaan dokumen perencanaan dan Laporan pengawasan kegiatan	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan				1 dok perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 pekerjaan	252,885,500
08	Pembangunan Trotoar	panjang trotoar yang dibangun	DPU PR	3.999 m trotoar yang dibangun	1,411,776,000			1 dok perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket	10,055,913,000
	Penyusunan Leger jalan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
09	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Laporan monitoring dan evaluasi	DPU PR	1 laporan monitoring dan evaluasi	28,693,750			1 dok perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket	28,693,750
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik			6,376,666,388				7,197,272,716
03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Dokumen perencanaan, Laporan pengawasan, panjang Saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	DPU PR	1 Dokumen perencanaan, 1 Laporan pengawasan, 1.910 m drainase/gorong-gorong yang dibangun (4 paket)	4,055,000,000			1 Dokumen perencanaan, 1 Laporan pengawasan, 5 paket	3,508,900,000
05	Peningkatan Drainase	Dokumen perencanaan, Laporan pengawasan, panjang Saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan	DPU PR	2 Dokumen perencanaan, 2 Laporan pengawasan, 1.505 m Saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan (4 paket fisik)	1,581,120,000			1 Dokumen perencanaan, 1 Laporan pengawasan, 6 paket	2,656,499,000
06	Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota	Panjang/ Jumlah ruas (pilih sesuai konsep pemeliharaan) Drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk	DPU PR	26.163 m Drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk (12 bulan)	740,546,388			1 tahun	1,031,873,716
	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Persentase pengamanan titik bahaya longsor			4,483,011,700				8,485,456,550
05	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan	Ketersediaan dokumen perencanaan dan Laporan pengawasan kegiatan	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan				2 Dokumen perencanaan, 2 Laporan pengawasan, 2 paket	481,818,850
05	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan	Panjang Batu bronjong/dam jalan dipasang	DPU PR		3,780,000,000			2 Dokumen perencanaan, 2 Laporan pengawasan, 2 paket	4,001,818,850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan	Panjang Batu bronjong/dam jalan dipasang	DPU PR		703,011,700			2 Dokumen perencanaan, 2 Laporan pengawasaan, 2 paket	4,001,818,850
	Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan jembatan terpelihara dalam kondisi baik			3,675,512,500				3,967,887,284
01	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Ketersediaan dokumen perencanaan dan Laporan pengawasan kegiatan	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan				1 tahun	201,600,000
07	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan dalam kota yang diperlihara	DPU PR		2,321,600,000			1 tahun	2,001,600,000
07	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin jalan, Jembatan dan Trotoar Dalam Kota	Jalan dalam kota yang direhabilitasi/pemeliharaan rutin	DPU PR	12 bulan	1,178,000,000			1 tahun	1,588,774,784
10	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Bidang Jalan 2021)	Jalan dalam kota yang direhabilitasi/dipelihara	DPU PR					1 tahun	
11	Perencanaan DAK Jalan 2022	Dokumen Perencanaan	DPU PR	1 dokumen perencanaan	175,912,500			1 laporan pengawasaan, 1 paket pekerjaan	175,912,500
	Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat-alat berat ke PU an/Kebinamargaan			894,441,050				2,937,441,050
15	Pemeliharaan Alat-alat Berat	Alat berat yang dipelihara	DPU PR	28 unit	850,000,000			12 unit	950,000,000
16	Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	Dikukngan logistik dan perbekalan alat berat dan alat pendukung lainnya	DPU PR	20 unit				12 unit	235,000,000
17	Pengadaan Alat Berat	Alat berat yang diadakan	DPU PR	3 unit				12 unit	1,200,000,000
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	DPU PR	1 unit				12 unit	450,000,000
19	Pengadaan Peralatan Bengkel	Peralatan bengkel yang diadakan	DPU PR	11 unit				12 unit	58,000,000
20	Penujng Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Terlaksananya operasional dan administrasi UPTD	DPU PR	12 bulan	44,441,050			12 bulan	44,441,050
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik			1,570,225,000				3,134,958,904
01	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi	Ketersediaan dokumen perencanaan dan Laporan pengawasan kegiatan	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan				1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasaan, 2 paket pekerjaan	301,600,000
02	Rehab/peningkatan Saluran Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhab/dipelihara	DPU PR	3 paket				1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasaan, 2 paket pekerjaan	901,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03	Pemeliharaan Rutin Irigasi	Saluran Irigasi yang dipelihara	DPU PR	5 Daerah Irigasi (panjang irigasi yang dipelihara) / 12 bulan	499,000,000			12 bulan	647,333,904
04	Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi	Ketersediaan dokumen perencanaan dan Laporan pengawasan kegiatan	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan				1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	301,600,000
05	Pembangunan Saluran Irigasi	Saluran irigasi yang dibangun	DPU PR	2 paket	940,000,000			1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	851,600,000
05	DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi 2021)	laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/dipelihara	DPU PR	1 laporan pengawasan, 489,5 m saluran irigasi yang direhab/dipelihara				1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	
23	Perencanaan DAK Irigasi 2022	Dokumen Perencanaan	DPU PR	1 dokumen perencanaan	101,125,000			1 Dokumen perencanaan	101,125,000
09	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Laporan monitoring dan evaluasi	DPU PR	1 laporan monitoring dan evaluasi	30,100,000			1 dok perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket	30,100,000
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk terlayani sistem air limbah yang memadai			100,000,000				1,000,000,000
10	Pengadaan dan pemasangan pipa air jaringan air minum (Sisa DAK fisik air minum tahun 2010-2018)	dokumen perencanaan, fisik pipa air, laporan pengawasan	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 5 paket pemasangan air minum, 1 laoran pengawasan				1 paket	
11	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (fisik) Sisa DAK Tahun 2010 - 2015	dokumen perencanaan, paket , laporan pengawasan	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 1 paket , 1 laoran pengawasan				1 paket	
12	Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi				100,000,000				
13	Pendampingan Pengembangan Jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)	Terlaksananya pengembangan jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi	DPU PR	1 zona				1 paket	1,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					49,464,431,843				24,823,873,024
	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota			692,572,768				2,117,437,279
18	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Keterangan rencana kota	DPU PR	300 KRK	223,241,000			300 KRK	312,329,904
19	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Dokumen Materi Teknis, Perda RDTR	DPU PR	1 dokumen MT, 1 Perda	102,371,768				312,959,875
20	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Sertifikat tanah yang terkena pelepasan hak	DPU PR	20 sertifikat	136,735,000			20 sertifikat	200,000,000
21	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data	data tata ruang berbasis spasial	DPU PR	1 dokumen, 1 aplikasi	115,000,000			1 dokumen	200,000,000
22	Lanjutan Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	DPU PR	1 paket	115,225,000				150,000,000
23	Pemetaan dan Pematokan Rencana Jalan yang Telah diserahkan Masyarakat	Pemetaan dan Pematokan Rencana Jalan yang Telah diserahkan Masyarakat	DPU PR	1 paket					100,000,000
24	Sosialisasi Tata Ruang	Sosialisasi berkaitan dengan Tata Ruang	DPU PR	3 kali sosialisasi				1 kegiatan	307,572,500
25	Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang	sistem informasi tata ruang Kota Bukittinggi	DPU PR	1 aplikasi					534,575,000
	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota			446,603,925				898,034,088
09	Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah razia bangunan	DPU PR	200 surat peringatan	285,472,825			12 bulan	369,220,753
12	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	jumlah sidang TKPRD	DPU PR	7 kali sidang	161,131,100			1 laporan	330,603,335
13	Pembuatan papan pengumuman pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah papan pengumuman pengendalian pemanfaatan ruang	DPU PR	65 unit					198,210,000
	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA SOSIAL KEMASYARAKATAN dan PENINGKATAN FASILITAS UMUM	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum			44,000,000,000				14,032,648,705
01	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi (PRIORITAS)	Dokumen Manajemen konstruksi, bangunan kantor DPRD, Laporan pengawasan berkala	DPU PR	1 Dokumen MK, 1 unit Gedung Kantor DPRD, 1 pengawasan berkala	44,000,000,000			1 Dokumen MK, 1 Dokumen UKL/UPL, 1 Dokumen DPRD, 1 Dokumen Andal/Lalin, 1 unit Gedung Kantor DPRD, 1 pengawasan berkala, 1 Laporan dokumen DED jalan	7,380,088,205
02	Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah even yang dilaksanakan	DPU PR	6 even (17 Agustus, PKK, HUT Kota, Pacu Kuda, Kunker daerah dan pusat)				5 even	87,540,000
03	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Bersama Nama Kegiatan menjadi Pembangunan Kantor Bersama (BK, Bapelitbang, BKPSDM, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Komindo) PRIORITAS	Dokumen perencanaan pembangunan gedung bersama	DPU PR	1 dokumen UKLUPL, 1 dokumen andalalin, 1 dokumen DED					1,798,054,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04	Pembangunan Gedung YPAC Kota Bukittinggi	Pembangunan Gedung YPAC Kota Bukittinggi dan laporang pengawas	DPU PR	1 unit gedung, 1 laporan pengawasan, 1 dokumen pengawasan berkala				1 Dokumen Perencanaan, 1 laporan pengawasaan, 1 Rumah Jabatan, 12 Rumah Pegawai	4,766,966,500
05	Penataan Kawasan Rumah Kelahiran Bung Hatta PRIORITAS								
	Lanjutan Pembangunan Kantor KAN Aur Birugo								
06	Revitalisasi/Pembangunan Kembali Pasar Bawah dan Pasar Aua Tajungjang PRIORITAS								
	PROGRAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi			145,000,000				347,000,000
01	Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung	jumlah rekomendasi teknis	DPU PR	25 rekomendasi TABG, 5 SLF	145,000,000			9 kali sidang, 18 SLF	347,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM	Persentase wilayah/jalan dengan penerangan jalan lengkap			4,038,255,150				6,697,646,452
01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	Pekerjaan pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum	DPU PR	4.000 titik lampu penerangan jalan yang dipelihara / 12 bulan	713,758,500			12 bulan	890,064,452
02	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum	Terlaksananya operasional dan administrasi kegiatan di UPTD Penerangan Fasilitas Umum	DPU PR	12 bulan	24,496,650			12 bulan	50,000,000
03	Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, pengadaan lampu jalan	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 230 titik lampu (2 paket)				1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasaan, 1 paket	1,625,485,000
04	Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	Rekening Listrik PJU dan fasilitas umum yang dibayar	DPU PR	12 bulan / 90 ID pelanggan	3,000,000,000			12 bulan	3,500,000,000
05	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, pengadaan lampu jalan, jaringan PJU dan fasum yang direvitalisasi	DPU PR	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 110 titik lampu (2 paket pekerjaan)	300,000,000			1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasaan, 1 paket	632,097,000
	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI			142,000,000				731,106,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Pembinaan Jasa Konstruksi	Pelatihan dan sertifikasi keterampilan (SKT), sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan tenaga pengelola teknis, pelatihan pengendalian mutu kontrak, bimtek administrasi kontrak dan pelatihan penerbitan SLF bangunan gedung	DPU PR	250 orang	100,000,000			12 bulan	498,854,000
02	Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain	Jumlah pendampingan	DPU PR	44 paket	22,000,000			44 paket	189,890,000
04	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Dokumen Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi dan HSBGN	DPU PR	5 dokumen	20,000,000			4 buku	42,362,500
	URUSAN PERTANAHAN				660,340,060				7,881,688,418
	PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN ,PENGUNAAN dan PEMANFAATAN TANAH	Persentase kepastian hukum atas tanah aset daerah			286,475,100				6,962,979,396
03	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ ditertibkan	DPU PR	4 sertifikat, 6 peta bidang	145,778,000			5 sertifikat	220,540,476
04	Pengadaan Tanah Pembangunan Relokasi Rumah Dinas Pegawai Lembaga Pemasarakatan Bukittinggi	paket pengadaan tanah	DPU PR	1 paket pengadaan tanah				5 sertifikat	6,579,584,310
	Inventarisasi Tanah Ulayat	dokumen data tanah, ranperda tanah ulayat	DPU PR	1 dokumen data tanah, 1 ranperda tanah ulayat..	79,055,000				
05	Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Kegiatan Pengadaan Tanah yang difasilitasi	DPU PR	2 paket (perwako pengadaan tanah skala kecil)	61,642,100			5 sertifikat	162,854,610
	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah			320,592,960				840,068,162
02	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass ,masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya	Masalah tanah konsolidasi by pass, tanah pemko, dan tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	DPU PR	50 persil tanah yang akan diselesaikan	320,592,960			1 kegiatan	840,068,162
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	persentase ketersediaan informasi pertanahan			53,272,000				78,640,860
02	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Data tanah dan perlengkapan pendukung aplikasi	DPU PR	1 paket perlengkapan pendukung aplikasi serta data tanah pemerintah Kota Bukittinggi	53,272,000				78,640,860
	Belanja Gaji dan Tunjangan								
	Tambahan Penghasilan ASN								
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				5,787,865,478				6,494,872,800
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				5,787,865,478				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				674,760,130				729,474,150
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Materai 3000, Materai 6000 dan Benda Pos Lainnya	DPKP	4 item	3,600,000	APBD		4 item	4,140,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Biaya Langganan Internet	DPKP	12 Rekening telepon dan biaya internet	15,000,000	APBD		12 Rekening telepon dan biaya internet	17,250,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	DPKP	14 unit	128,050,000	APBD		14 unit	147,257,500
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan	DPKP	26 item	41,500,000	APBD		26 item	47,725,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor yang Diperbaiki	DPKP	12 Bulan	2,500,000	APBD		12 Bulan	2,875,000
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Alat Tulis Kantor	DPKP	34 item	10,188,130	APBD		34 item	11,716,350
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	DPKP	3 item	5,000,000	APBD		3 item	5,750,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPKP	12 Bulan	1,773,000	APBD		12 Bulan	2,038,950
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Minum Rapat/ Lembur yang Disediakan	DPKP	360 porsi nasi , 800 porsi snack dan makan minum Tamu LS 4.000.000	11,775,000	APBD		360 porsi nasi , 800 porsi snack dan makan minum Tamu LS 4.000.000	13,541,250
	Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Biaya Perjalanan Dinas, Rapat-Rapat, Koordinasi Konsultasi dan Sosialisasi Keluar Kota Bukittinggi	Dalam dan Luar Daerah Bukittinggi	12 Bulan	145,374,000	APBD		12 Bulan	167,180,100
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan, Tim Peneliti Kontrak	DPKP	183 paket pekerjaan	200,000,000	APBD		183 paket pekerjaan	200,000,000
	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK), perencanaan, pelaksana, pengawas dan sekretariat kegiatan swakelola	DPKP	62 paket pekerjaan	110,000,000	APBD		62 paket pekerjaan	110,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20,150,000				-
	Penyusunan Renstra OPD	Tersedianya Dokumen Renstra 2021-2026	DPKP	1 dokumen	20,150,000	APBD			-
	Program Pengembangan Perumahan				592,753,402				606,666,412
	Pemutakhiran Basis Data Perumahan	Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lengkap dan mutakhir	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	50,000,000	APBD			57,500,000
	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah	Jumlah Kegiatan Fisik Hibah yang diverifikasi Secara Teknis	Kota Bukittinggi	7 laporan	42,753,402	APBD			49,166,412
	Bedah Rumah	Jumlah RTLH yang Diperbaiki	Kota Bukittinggi	40 Unit		APBD			-
	Jasa kebersihan dan keamanan Rusunawa	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan Rusunawa	Kota Bukittinggi	12 bulan	500,000,000	APBD			500,000,000
	Program Lingkungan Sehat Perumahan				3,674,498,151				4,209,172,874
	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang ditingkatkan	Kota Bukittinggi	5200 meter	321,200,000	APBD		5000 meter	369,380,000
	Pembangunan Riol	Panjang Riol yang dibangun	Kota Bukittinggi	3600 meter	584,000,000	APBD		3600 meter	671,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehab/ Peningkatan Riol	Panjang Riol yang direhab	Kota Bukittinggi	750 meter	1,848,500,000	APBD		750 meter	2,125,775,000
	Pembangunan Jalan Lingkung	Jalan Lingkung Dalam Kota	Kota Bukittinggi	500 meter	246,600,000	APBD		500 meter	283,590,000
	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Terpelihara	Kota Bukittinggi	50 meter jalan lingkung dan 200 meter riol	364,198,151	APBD		50 meter jalan lingkung dan 200 meter riol	418,827,874
	Pemutakhiran basis data PSU	Tersedianya Database PSU yang lengkap dan mutakhir	Kota Bukittinggi	1 dokumen	90,000,000	APBD		1 dokumen	120,000,000
	Pembangunan Septictank komunal	Tersedianya septictank komunal	Kota Bukittinggi	14 unit	220,000,000	APBD		14 unit	220,000,000
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				450,166,695				517,691,699
	Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM	Manunggal Sakato Tahun 2021	Kota Bukittinggi	24 Kelurahan	149,666,695	APBD		24 Kelurahan	172,116,699
	Pembangunan Gedung/ Gapura	Gapura	Kota Bukittinggi	6 Gapura		APBD		6 Gapura	-
	Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Kota Kumuh yang dientaskan, DED	Kota Bukittinggi	1 Dokumen	125,500,000	APBD		1 Dokumen	144,325,000
	Pendamping Kegiatan BSPS	Jumlah Rumah BSPS	Kota Bukittinggi	350 Unit	85,000,000	APBD		350 Unit	97,750,000
	Penyusunan Perda RP3KP	Perda dan sosialisasi Perda	DPKP	1 Perda	90,000,000	APBD		1 Perda	103,500,000
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman				375,537,100				431,867,665
	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	12 Bulan	375,537,100	APBD		12 Bulan	431,867,665
	DINAS KEBAKARAN				3,311,289,729				3,736,732,520
	URUSAN KEBAKARAN				3,311,289,729				
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,121,251,500	APBD			2,127,252,827
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Materai dan Buku cek terbeli	Dinas Kebakaran	3 Jenis	1,050,000	APBD		3 Jenis	2,200,000.00
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Rekening terbayar	Dinas Kebakaran		52,000,000	APBD			65,000,000.00
		- Rekening Telpon		24 Rekening				24 Rekening	
		- Rekening air		96 Rekening				96 Rekening	
		- Rekening Listrik		24 Rekening				24 Rekening	
3	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki	Dinas Kebakaran	roda 2(6 unit), roda 4(8 unit), Mobil Damkar (6 unit),	944,200,000	APBD		roda 2(6 unit), roda 4(8 unit), Mobil Damkar (6 unit),	816,750,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Jumlah alat kebersihan serta bahan pembersih tersedia serta iuran retribusi persampahan	Dinas Kebakara n	26 buah alat dan bahan pembersih serta 1 jenis iuran retribusi persampahan	6,821,500	APBD		26 buah alat dan bahan pembersih serta 1 jenis iuran retribusi persampahan	14,200,000.00
5	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Laptop, mesin tik, infocus, alat komunikasi radio dan printer yang diperbaiki	Dinas Kebakara n	6 jenis peralatan kantor	2,500,000	APBD		6 jenis peralatan kantor	6,600,000.00
6	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli	Dinas Kebakara n	39 jenis	7,500,000	APBD		39 jenis	42,350,000.00
7	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Barang cetak dan Penggandaan	Dinas Kebakara n	10 jenis	6,000,000	APBD		10 jenis	16,520,000.00
8	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli	Dinas Kebakara n	10 jenis	3,317,000	APBD		10 jenis	8,650,000.00
9	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Jumlah makan dan Minum yang disediakan	Dinas Kebakara n	295 nasi bungkus, snack 170 kotak	7,485,000	APBD		295 nasi bungkus, snack 170 kotak	19,830,000.00
10	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	Jumlah rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan	Dinas Kebakara n	12 bulan	87,378,000	APBD		12 bulan	266,200,000.00
11	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS DAN JASA PEMELIHARAAN KESEHATAN NON PNS	Tambahan penghasilan, upah dan premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan Non PNS yang dibayarkan	Dinas Kebakara n	23 orang		APBD		23 orang	860,952,827.00
12	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	Honorarium tim barang dan jasa PPHP, PPK dan PPBJ	Dinas Kebakara n	1 paket	3,000,000	APBD		1 paket	8,000,000.00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			40,400,000	APBD			24,696,791,000
1	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Kebakara n			APBD		4 macam	6,500,000.00
2	PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR PEMADAM DI ABTB	Luas tanah yang disediakan	Dinas Kebakara n	300m"		APBD		300 m"	3,000,000,000.00
3	PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR	Jumlah Sektor Pemadam Yang Dibangun	Dinas Kebakara n			APBD		1 unit	800,000,000.00
4	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah peralatan kantor Yang disediakan	Dinas Kebakara n	2 jenis	27,000,000	APBD		5 Macam	282,305,000.00
5	PENGADAAN MEBELUR	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Dinas Kebakara n	1 Jenis		APBD		4Jenis	380,000,000.00
6	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Jumlah Kendaraan Dinas terbeli	Dinas Kebakara n	1 unit kendaraan Operasional		APBD		Mobil Tangga	20,000,000,000.00
7	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	Jumlah Gedung yang dipelihara Jumlah PBB yang dibayarkan	Dinas Kebakara n	1 unit gedung 1 PBB	13,400,000	APBD		1 unit gedung 1 PBB	220,000,000.00
8	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBILEUR	Jumlah Meubiler kantor terpelihara	Dinas Kebakara n			APBD		5 Jenis	7,986,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai			126,375,000	APBD			247,720,000.00
1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Dinas Kebakaran	57 stel	126,375,000	APBD		57 stel	247,720,000.00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai			50,000,000	APBD			434,000,000.00
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta Diklat/pelatihan	Dinas Kebakaran	55 orang			sesuai casceding dan Permen dagri No 114	55 orang	296,000,000.00
2	Peringatan HUT Damkar	Jumlah Kegiatan upacara, simulasi dan atraksi	Dinas Kebakaran	Upacara, simulasi dan atraksi	50,000,000		Edaran Menteri dalam negeri	3 kegiatan	138,000,000.00
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu			20,150,000	-	-		-
1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Laporankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kebakaran	1 Laporan		APBD		1 Laporan	-
2	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	Jumlah laporan keuangan semester	Dinas Kebakaran	10 laporan		APBD		10 laporan	-
3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN SKPD	Jumlah laporan rencana kerja dan keuangan	Dinas Kebakaran	4 laporan					
4	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD TH 2021-2026	jumlah laporan Renstra	Dinas Kebakaran	1 laporan%		APBD		4 laporan	-
	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :								
	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	Persentase kesiapsiagaan dan tanggap terhadap pencegahan kebakaran meningkat			155,000,000	-	-		1,357,351,020
1	Pengawasan bahaya kebakaran	Jumlah Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Dinas Kebakaran	14 orang x 48 kali pengawasan	30,000,000	APBD	sesuai casceding dan Permen dagri No 114 th 2018	14 orang x 48 kali pengawasan	82,764,000
2	Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah peserta peserta bimtek	Dinas Kebakaran	55 orang	50,000,000	APBD	sesuai casceding dan Permen dagri No 114 th 2018	55 orang	55,000,000
3	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta penyuluhan	Dinas Kebakaran	150 (3 Sekolah x 50 orang) dan 750 orang (anak PAUD dan TK)	50,000,000	APBD	sesuai casceding dan Permen dagri No 114 th 2018	8 Kelurahan dan 6 Sekolah	55,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Publikasi Pencegahan dan pengendalian bahaya Kebakaran	Penyediaan Jasa Informasi pencegahan Kebakaran	Dinas Kebakaran	4 jenis	25,000,000	APBD	sesuai casceding dan Permen dagri No 114 th 2018	4 jenis	27,500,000
		- Spanduk		16 buah					
		- Baliho		3 buah					
		- Mini billboard		6 buah					
		- Media Elektronik, Radio, dll		1 ls					
5	Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR)	Jumlah anggota BALAKAR	Dinas Kebakaran	24 Kelurahan (3 org x 24 kel = 72 org)		APBD	sesuai casceding dan Permen dagri No 114 th 2018	120 orang	1,137,087,020
6	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran Kota (RISPK)	Dokumen daerah rawan kebakaran	Dinas Kebakaran	1 dokumen		APBD	sesuai casceding dan Permen dagri No 114 th 2018	1 dokumen	450,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Persentase Peningkatan Penanggulangan kebakaran			1,798,113,229	-	-		2,379,381,500
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran	Dinas Kebakaran	11 jenis	203,003,229	APBD	sesuai casceding dan Permen dagri No 114 th 2018	8 Jenis	1,327,617,500
2	Operasional Penanggulangan Kebakaran	jumlah penanggulangan kebakaran	Dinas Kebakaran	100 Kejadian/ jumlah petugas yang akan diberikan honor dan uang lembur	1,411,300,000	APBD	sesuai casceding dan Permen dagri No 114 th 2018	100 Kejadian	82,764,000
3	Penyelamatan Korban Kebakaran dan penyelamatan lainnya	Persentase Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya	Dinas Kebakaran	100%	131,810,000	APBD	sesuai casceding dan Permen dagri No 114 th 2018	45 kegiatan	235,000,000
4	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Dinas Kebakaran	6 jenis (Mesin Apoung 7 unit, Perahu karet 1 unit, Mesin Portable 3 unit, Mesin Jensen 2 unit, mesin chainsaw 7 unit dan 8 resevoar	52,000,000	APBD	sesuai casceding dan Permen dagri No 114 th 2018	5 item	734,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Pembangunan/Rehabilitasi Bak Penampungan air/Resevoir	Rehab berat Resevoir(Di aur kuning)	Dinas Kebakaran	1 resevoir		APBD	sesuai casceding	perbaikan 3 resevoir	10,000,000
6	Pembangunan Hidran Kota	terbangunnya hidran kota	Dinas Kebakaran	di sepanjang jalan protokol		APBD	sesuai casceding	perbaikan 3 resevoir	400,000,000
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITINGGI				12,415,135,615				20,968,000,000
	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				12,415,135,615				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Satpol PP	100%	1,713,200,388	APBD		100%	2,368,000,000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	Satpol PP	491 lbr, 2 buku	2,396,000	APBD		700 bh, 4 buku	5,000,000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	Satpol PP	48 bulan rekening	90,000,000	APBD		48 bulan	160,000,000
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara	Satpol PP	36 unit	819,941,740	APBD		36 unit	850,000,000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service	Satpol PP	12 bulan	204,755,000	APBD		12 bulan	215,000,000
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	Satpol PP	12 bulan	3,500,000	APBD		12 bulan	13,000,000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Peripherals kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	Satpol PP	12 bulan	10,000,000	APBD		60 jenis	50,000,000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan	Satpol PP	5 jenis/12 bulan	6,862,648	APBD		7 jenis/12 bulan	30,000,000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli	Satpol PP	15 jenis	10,000,000	APBD		15 jenis	20,000,000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya	Satpol PP	100%	18,750,000	APBD		100%	55,000,000
18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	Satpol PP	95%	150,000,000	APBD		95%	450,000,000
28	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan	Satpol PP	28 org	386,995,000	APBD		30 org	500,000,000
31	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK)	Satpol PP	7 org	10,000,000	APBD			20,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Satpol PP	100%	100,000,000	APBD		100%	2,600,000,000
04	Pengadaan Mebeleur	Jenis mobil yang diadakan	Satpol PP	11 jenis	0	APBD		10 jenis	850,000,000
05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	Satpol PP	12 unit, 2 jenis	0	APBD		1 unit	500,000,000
09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Satpol PP	6 jenis	0	APBD		5 jenis	800,000,000
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Satpol PP	1 unit	100,000,000	APBD		1 unit	150,000,000
	Pengadaan alat olah raga	Jenis peralatan olah raga	Satpol PP	1 set	0	APBD			0
	Pengadaan Perengkapan kantor	Jenis perlengkapan yang diadakan	Satpol PP	3 jenis	0	APBD		3 jenis	300,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Satpol PP	100%	297,940,000	APBD		100%	450,000,000
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Satpol PP	190 stel	297,940,000	APBD		200 stel	450,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Satpol PP	100%	126,784,602	APBD		100%	500,000,000
25	Latihan Pembinaan Kesatuan dan HUT Satpol PP dan Linmas	Jumlah anggota Pol.PP yg mengikuti latihan pembinaan kesatuan	Satpol PP	200 org	111,948,602	APBD		200 org	225,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27	Bimbingan teknis ketangkasatan Satpol PP dan beladiri kesatuan	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	Satpol PP	150 org	14,836,000	APBD		150 org	75,000,000
	Pendidikan dasar Satpol PP	Jumlah anggota Pol.PP yang mengikuti latihan diksar	Satpol PP	20 orang	0	APBD		20 org	200,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	Satpol PP	100%	36,740,000	APBD		100%	0
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD	Satpol PP	2 dokumen	36,740,000				
		Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	Satpol PP	100%	0	APBD		100%	0
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	Satpol PP	600 kasus	9,748,810,625	APBD		500 kasus	13,900,000,000
01	Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian	Satpol PP	10 bln	5,281,500,000	APBD		10 titik	7,500,000,000
02	Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Represif Non Yustisial	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial	Satpol PP	100 kasus	43,499,800	APBD		100 kasus	120,000,000
03	Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial	Satpol PP	25 kasus	60,000,000	APBD		60 kasus	160,000,000
04	Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS	Satpol PP	12 kegiatan	29,800,050	APBD		12 keg	700,000,000
05	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	Satpol PP	4 kegiatan	29,558,750	APBD		4 kegiatan	40,000,000
07	Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum	Jumlah pemantauan titik rawan pelanggaran trantibum	Satpol PP	12 bulan	60,000,000	APBD		12 bulan	180,000,000
08	Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)	Jumlah operasi penegakan trantibum SK4	Satpol PP	12 bulan	3,414,169,500	APBD		12 bulan	4,000,000,000
09	Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara	Satpol PP	12 bulan	754,906,625	APBD		12 bulan	1,000,000,000
	Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (PTI)	jumlah PTI yang bertugas siaga	Satpol PP	12 bulan	75,375,900	APBD		12 bulan	200,000,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	Satpol PP	30%	391,660,000	APBD		40%	1,150,000,000
01	Penyebaran Informasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Perda dan perkada	Satpol PP	3500 orang	79,660,000	APBD		4000 org	400,000,000
04	Pembinaan peningkatan kapasitas pengetahuan Satlinmas	Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	Satpol PP	120 orang	312,000,000	APBD		120 org	750,000,000
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				2,673,546,792				5,347,093,584
	URUSAN BENCANA				2,673,546,792				
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai			333,353,500				666,707,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	BPBD	12 Bulan	600,000	APBD		1	1,200,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar	BPBD	12 Bulan	8,000,000	APBD		1	16,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	BPBD	1 Kantor	108,180,000	APBD		1	216,360,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	BPBD	1 Kantor	4,133,500	APBD		1	8,267,000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	BPBD	12 bulan	2,000,000	APBD		1	4,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	BPBD	12 Bulan	7,500,000	APBD		1	15,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	BPBD	12 bulan	5,000,000	APBD		1	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	BPBD	12 Bulan	3,000,000	APBD		1	6,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	BPBD	12 bulan	8,000,000	APBD		1	16,000,000
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	BPBD	12 bulan	181,940,000	APBD		1	363,880,000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	BPBD	12 bulan		APBD		1	-
12	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	BPBD	12 bulan	5,000,000	APBD		1	10,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD		378,570,000			1	757,140,000
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	BPBD	12 bulan	18,500,000	APBD		1	37,000,000
2	Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	BPBD	12 bulan	47,150,000	APBD		1	94,300,000
3	Pengadaan Mebeleur	Jenis Mebeleur yang diadakan	BPBD	12 bulan	64,400,000	APBD		1	128,800,000
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis Kendaraan dinas/operasioan yang diadakan	BPBD			APBD		1	-
5	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	BPBD	12 bulan	192,520,000	APBD		1	385,040,000
6	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	BPBD	12 bulan	15,000,000	APBD		1	30,000,000
7	Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor	BPBD	12 bulan	41,000,000	APBD		1	82,000,000
8	pengadaan walkie talkie	terlaksananya pengadaan peralatan operasional	BPBD	10 Buah		APBD		1	-
9	pengadaan perlengkapan KBLK : Chainsaw, tenda keluarga, peralatan pertanian, penyediaan logistik bencana	terlaksananya pengadaan peralatan KBLK	BPBD	1 set		APBD		1	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai			42,000,000			1	84,000,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPBD	12 bulan	42,000,000	APBD		1	84,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu			36,740,000			1	73,480,000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	BPBD	2 Laporan		APBD		1	-
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	BPBD	2 Laporan		APBD		1	-
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	BPBD	2 Dok	36,740,000	APBD		1	73,480,000
4	Penyusunan Renstra SKPD dan Revisi	Jumlah dokumen Renstra	BPBD	1 Dok		APBD		1	-
	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siagaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakaran Meningkat	BPBD		-			1	-
1									
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	BPBD		1,764,063,292			1	3,528,126,584
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS	% Jumlah sarana prasarana penunjang Penanggulangan Bencana tersedia	BPBD	1 Kegiatan		APBD		1	-
2	Operasional Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS)	% Jumlah Honorarium Operasional Petugas PUSDALOPS PB	BPBD	1 Kegiatan	1,176,793,292	APBD		1	2,353,586,584
3	Pendampingan Kegiatan BPBD Propinsi (Jambore PRB, Simulasi Bencana dan Lomba Pasang Tenda)	Peran serta BPBD Kota Bukittinggi Pendampingan Kegiatan BPBD Propinsi terlaksana	BPBD	1 Kegiatan	97,270,000	APBD		1	194,540,000
4	Pelatihan dan penyediaan sarana fasilitas penanggulangan bencana	% jumlah sarana dan fasilitas serta pelatihan	BPBD	1 Kegiatan		APBD		1	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	penyusunan kajian resiko bencana, penanggulangan dan rencana aksi tingkat kelurahan	Peran serta BPBD Kota Bukittinggi dalam peningkatan aksi tingkat kelurahan	BPBD	1 Kegiatan	90,000,000	APBD		1	180,000,000
6	sosialisasi bantuan/konstruksi rawan bencana	% sosialisasi bantuan daerah rawan bencana	BPBD	2 Kegiatan		APBD		1	-
7	pembentukan dan pelatihan siaga bencana di setiap kelurahan	jumlah pembentukan dan pelatihan siaga bencana di setiap kelurahan	BPBD	1 Kegiatan	400,000,000	APBD			800,000,000
	Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Kapasitas dan Kualitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	BPBD		50,000,000			1	100,000,000
1	Pelatihan Gabungan Damkar, SAR dan PUSDALOPS	Pelatihan Gabungan Petugas BPBD dengan institusi terkait terlaksana	BPBD	1 Kegiatan		APBD		1	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal Petugas DAMKAR dan PUSDALOPS	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Petugas	BPBD	1 Kegiatan		APBD		1	-
3	Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Petugas BPBD	% pengetahuan dan wawasan petugas BPBD meningkat	BPBD	1 Kegiatan	50,000,000	APBD		1	100,000,000
4	Pelatihan KBLK	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Petugas	BPBD	2 Kegiatan		APBD		1	-
5	Bintek dan simulasi penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Petugas	BPBD	1 Kegiatan		APBD		1	-
	Program Sistem Kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanaan terpenuhi	BPBD		68,820,000			1	137,640,000
1	Penyediaan Jasa informasi Kebencanaan	Informasi tentang kebencanaan tersebar melalui media	BPBD	1 Kegiatan		APBD		1	-
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	Data dan Pemetaan Kebencanaan Tersedia	BPBD	1 Kegiatan		APBD		1	-
3	Gladi Kesiapsiagaan pada Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN)	Jumlah perlengkapan kebutuhan yang terbeli	BPBD	1 Paket	68,820,000	APBD			137,640,000
4	Rencana Kontijensi kesiapsiagaan bencana banjir dan longsor	Jumlah perlengkapan Kontijensi kesiapsiagaan bencana banjir dan longsor yang terbeli	BPBD	1 Paket					
5	Pembuatan Sarana Deteksi Kebencanaan	Alat Pendeteksi kebencanaan tersedia	BPBD	1 Kegiatan		APBD		1	-
	DINAS SOSIAL				3,596,762,392				
	URUSAN SOSIAL				3,596,762,392				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKT	100%	453,183,700	APBD			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya tersedia	BKT	550 Lbr Materai 6000, 100 lbr materai 3000, 4 buku cek dan benda pos lainnya	2,000,000	APBD	Sesuai APBD 2020		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	BKT	7 rek. 12 bulan	35,000,000	APBD	Sesuai APBD 2020		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Sosial/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara	BKT	5 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua	112,180,700	APBD	Sesuai APBD 2020		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor	BKT	12 bulan	130,000,000	APBD	Sesuai APBD 2020		
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKT	12 bulan	7,500,000	APBD	Sesuai APBD 2020		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK terbeli	BKT	41 jenis	5,500,000	APBD	Sesuai APBD 2020		
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas	BKT	5 jenis, 12 bulan	4,237,500	APBD	Sesuai APBD 2020		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ruangan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik terbeli	BKT	12 jenis	1,641,500	APBD	Sesuai APBD 2020		
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur	BKT	12 bulan	6,250,000	APBD	Sesuai APBD 2020		
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Pelaksanaan rapat rapat koordinasi	BKT	12 bulan	145,374,000	APBD	Sesuai APBD 2020		
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan	Jumlah kegiatan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPBJ	BKT	12 bulan	3,500,000	APBD	Sesuai APBD 2020		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas	BKT	100%	191,081,244	APBD			
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	BKT	4 gedung	25,000,000	APBD	Sesuai APBD 2020		
13	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Kusuma Bhakti	Jumlah bulan pemeliharaan TMP	BKT	12 bulan	97,856,244	APBD	Makam Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan		
14	Temu ramah pejuang dalam rangka peringatan HUT RI	temu ramah pejuang terfasilitasi	BKT	1 kegiatan	33,225,000	APBD	Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial		
15	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Jumlah kegiatan hari pahlawan	BKT	1 kegiatan	35,000,000	APBD	Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()	BKT	100%	20,150,000	APBD			
16	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Renja dan perubahan Renja ()	BKT	3 Dokumen	20,150,000	APBD	untuk penunjang kelancaran kegiatan dinas sosial		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan	BKT	750 KK	870,465,600	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Peningkatan SDM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan	Jumlah pengurus KUBE ditingkatkan kapasitasnya	BKT	825 orang	274,022,600	APBD	Dana Sharing Bantuan APBN/Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009/ POKIR RUSDY NURMAN dan SABIRIN RAHMAT		
18	Pendataan DTKS dan PMKS lainnya	jumlah verifikasi data	BKT	2 kali/ tahun	358,443,000	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/ SPM NO.2 th 2018/ Permensos no.8 th 2012/UU No.11 th 2009		
19	Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian PMKS	Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan dan ditingkatkan kemandiriannya	BKT	50 Orang	144,000,000	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PRSE	Jumlah PRSE yang meningkat penghasilannya	BKT	100 orang / 1 kegiatan	94,000,000	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009/ POKIR NUR HASRA		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial	BKT	70%	253,875,000	APBD			
21	Penanggulangan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar	BKT	12 bulan	162,750,000	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/SPM N0.2 th 2018/ Permensos no.8 th 2012/UU No.11 th 2009		
22	Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial	BKT	12 Bulan	34,875,000	APBD	SPM Sosial/ Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar	BKT	12 Bulan	56,250,000	APBD	SPM Sosial/Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009		
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya	BKT	20%	191,678,500	APBD			
24	Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan	Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk kerumah sakit	BKT	5 orang	54,178,500	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009		
25	Pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO)	Jumlah peserta yang dilatih	BKT	50 orang	100,000,000	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009/ POKIR IBNU AZIZ		
26	Pembinaan Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang dibina dan diberi bantuan	BKT	200 Orang	37,500,000	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial	BKT	40%	314,744,000	APBD			
27	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina	BKT	17 LKS	152,569,000	APBD	Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial/hasil musrenbang		
28	Penumbuhan dan Penguatan Jejaring Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)	Partisipasi LKKS terhadap pemberdayaan PMKS	BKT	100%	71,180,000	APBD	Cascading/Merupakan PSKS/mendukung kegiatan pusat/ke mentrian sosial		
29	Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	Penguatan LK3 yang dilakukan	BKT	12 Bulan	90,995,000	APBD	Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial/hasil musrenbang		
	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian	BKT	87%	566,000,000	APBD			
30	Pembinaan Pilar-pilar sosial (PSM, TKSK, Pendamping Disabilitas dan Karang Taruna)	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina	BKT	416 Orang	566,000,000	APBD	Cascading/Merupakan PSKS/mendukung kegiatan pusat/ke mentrian sosial/ POKIR SYAIFU L EFENDI		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	BKT	80%	735,584,348	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan	BKT	12 bulan	115,368,750	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/ SPM NO.2 th 2018/ Permensos no.8 th 2012/UU No.11 th 2009		
32	Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana	BKT	12 Bulan	126,889,790	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009		
33	Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi	BKT	1419 KK	312,575,808	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/ SPM NO.2 th 2018/ Permensos no.8 th 2012/UU No.11 th 2009/ POKIR IBNU AZIZ DAN IBRA YASSER		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
34	Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan	Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT	BKT	889 KK	124,500,000	APBD	Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/ SPM NO.2 th 2018/ Permensos no.8 th 2012/ UU No.11 th 2009		
35	Pelatihan Usaha bagi Lanjut Usia Miskin Produktif	Jumlah Lanjut Usia Miskin Produktif yang dilatih dan diberi permakanan tambahan	BKT	50 Orang	56,250,000	APBD	SPM Sosial/ Cascading / Dana Sharing bantuan pusat/ Permensos No.08.th 2012/ UU No.11 th 2009		
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					4,773,292,427				5,409,790,078
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3,258,421,505				
	program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		100%	580,370,500			100%	669,523,575
01	penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang terbeli	Bukittinggi	450 buah materai 6.000, 450 buah materai 3.000, 3 buku cek.	2,350,000	APBD		500 buah materai 6.000, 500 buah materai 3.000, 3 buku cek.	4,800,000
02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Bukittinggi	36 rek	42,000,000	APBD		36 rek	48,300,000
03	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan.	Bukittinggi	7 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2	246,184,000	APBD		7 kendaraan R4 dan 34 kendaraan R2	283,111,600
04	penyediaan jasa kebersihan	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	Bukittinggi	30 jenis	10,000,000	APBD		23 Jenis	11,500,000
05	penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang terbeli	Bukittinggi	37 jenis	15,431,000	APBD		31 jenis	17,745,650
06	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bukittinggi	8 jenis	16,740,000	APBD		8 Jenis	19,251,000
07	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli.	Bukittinggi	14 jenis	2,485,500	APBD		14 jenis	2,858,325
08	penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia	Bukittinggi	20 spanduk	5,000,000	APBD		20 spanduk	5,750,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
09	penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	Bukittinggi	225 porsi makan, 391 porsi snack.	11,680,000	APBD		225 porsi makan, 391 porsi snack.	13,432,000
10	rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	Bukittinggi	70 kali	200,000,000	APBD		90 kali	230,000,000
11	penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Bukittinggi	8 jenis	22,500,000	APBD		8 jenis	25,875,000
12	penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar	Bukittinggi	10 orang	0	APBD		10 orang	-
13	pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah paket pengadaan	Bukittinggi	10 paket	6,000,000	APBD		10 orang	6,900,000
	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		80%	211,000,000			80%	116,150,000
01	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terbeli	Bukittinggi	1 kendaraan R4	0	APBD			
02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	Bukittinggi	1 jenis	0				
03	pengadaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	Bukittinggi	10 unit	47,500,000	APBD		8 unit	54,625,000
04	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	Bukittinggi	1 Kantor	53,500,000	APBD		1 Kantor	61,525,000
05	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor terehab	Bukittinggi	1 kanopi	110,000,000	APBD			
	program peningkatan disiplin aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehaadiran dan penggunaan atribut pegawai		70%	37,050,000			70%	42,607,500
1	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terbeli	Bukittinggi	60 stel	37,050,000	APBD		60 stel	42,607,500
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun tepat waktu.		80%	0			80%	14,500,000
01	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP yang tersusun tepat waktu	Bukittinggi	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	5,000,000
02	penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Bukittinggi	2 dokumen	0	APBD		2 dokumen	5,000,000
03	penyusunan rencana kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Bukittinggi	2 dokumen	-	APBD		2 dokumen	4,500,000
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif		65%	77,443,000			70%	89,059,450
01	Pelayanan dan perlindungan khusus anak	Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus.	Bukittinggi	140 orang	77,443,000	APBD		150 orang	89,059,450
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.	Persentase kelembagaan PUG yang aktif		50%	487,843,661			60%	744,324,422
		Jumlah indikator KLA yang terpenuhi		20 indikator				20 indikator	
01	Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah.	Pendampingan perencanaan anggaran yang responsif gender oleh focal point.	Bukittinggi	28 SKPD,	59,265,000	APBD		29 SKPD	68,154,750
		Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		predikat utama.					
02	Pengelolaan Data Gender dan Anak	Update data gender dan anak	Bukittinggi	1 1 jenis kelompok data.	24,892,000	APBD		1 1 jenis kelompok data.	28,625,800
03	Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).	Jumlah PATBM Aktif dan terlatih.	Bukittinggi	24 Kelurahan	102,807,500	APBD		24 Kelurahan	130,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04	Pemenuhan Hak-hak Anak	Jumlah Kelurahan ramah anak, Puskesmas ramah anak, Sekolah ramah anak dan fasilitas publik ramah anak.	Bukittinggi	3 kelurahan, 5 Puskesmas, 5 sekolah,	180,856,011	APBD		4 kelurahan, 5 Puskesmas, 7 sekolah,	232,543,872
05	Pembinaan Forum Anak Daerah (Forda).	Jumlah Forum Anak aktif	Bukittinggi	4 forum	120,023,150	APBD		4 forum	285,000,000
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan		7,2	952,369,633			7,2	1,066,086,778
01	Pelayanan Perempuan dan Anak korban kekerasan	Fasilitas Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan.	Bukittinggi	1 lembaga.	184,330,133	APBD		27 kasus terlayani	211,979,653
		Fasilitas forum penanganan korban kekerasan (FPKK),		1 lembaga					
		penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan.		20 kasus					
		fasilitasi gugus tugas TPPO,		1 lembaga					
		penguatan kapasitas FPKK Kota Bukittinggi.		60 orang.					
02	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Keluarga yang d bina	Bukittinggi	720 keluarga	651,397,500	APBD		270 keluarga	749,107,125
03	KIE dan Advokasi Jelajah Three End	Jumlah capaian KIE dan Advokasi	Bukittinggi	10 Kelurahan	116,642,000	APBD		200 Orang	105,000,000
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan di lembaga legislatif		12%	912,344,711			12%	1,049,196,418
		Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi.		12.02				12.56	
01	Perkuatan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Bukittinggi	3 Organisasi	181,250,000	APBD		4 organisasi	208,437,500
02	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial Pada Organisasi Perempuan.	Advokasi peningkatan kapasitas perempuan partai politik.	Bukittinggi	100 Orang Perempuan politik	-	APBD		120 Orang Perempuan politik	-
03	Penyelenggaraan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK aktif		3 Kecamatan,	542,332,161	APBD		3 Kecamatan,	623,681,985
04	Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi		100 Orang, 1 kali pameran	188,762,550	APBD	Pokir EDISON KATIK BASA, SE.MBA sebesar Ro. 100.000.000	100 Orang, 1 kali pameran	217,076,933
					1,514,870,922				
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS Ber KB		68%	1,228,361,422			68%	1,421,122,535
01	Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	umlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik.	Bukittinggi	24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 6 kali liputan elektronik	16,608,000	APBD		24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 6 kali liputan elektronik	19,099,200
02	Pembinaan Kesetaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Bhakti sosial Pelayanan KB, ,	Bukittinggi	4 kegiatan.	183,882,211	APBD		4 kegiatan.	211,464,543
		Jumlah akseptor yang dilayani KB.		1700 akseptor				1700 akseptor	
		Jumlah klinik KB yang melayani KB.		24 klinik				24 klinik	
		Jumlah akseptor baru IUD-Implan yang di KIE Kader		800 akseptor				800 akseptor	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah advokasi dan KIE Kespro.		10 kali.				10 kali.	
03	Penilaian dan Penghargaan KB teladan	Jumlah penghargaan Tingkat Kota	Bukittinggi	30 Penghargaan, 3 kali peringatan Harganas	159,033,000	APBD		30 Penghargaan, 3 kali peringatan Harganas	182,887,950
04	Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader	Jumlah PPKBK aktif, jumlah sub PPKBK aktif dan jumlah kelompok kegiatan aktif.	Bukittinggi	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	645,743,711	APBD		24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	742,605,268
05	Pelaksanaan Kampung KB.	Jumlah Kampung KB yang yang memenuhi indikator Kampung KB.	Bukittinggi	6 Kampung KB	113,100,500	APBD		12 Kampung KB	130,065,575
06	Evaluasi dan Bimbingan terpadu program KKBPK	Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK dan jumlah IMP berprestasi.	Bukittinggi	55 orang, 12 kali	0	APBD		60 orang, 6 kali	-
07	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	Bukittinggi	23 kelompok.	109,994,000	APBD		23 kelompok.	135,000,000
08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana)	pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB	Bukittinggi	Menu DAK		APBD		Menu DAK	
09	Operasional Penyuluh KB (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2021)		Bukittinggi	Menu DAK		APBD		Menu DAK	
10	DAK Bidang Keluarga Berencana (Sisa DAK 2010-2015)		Bukittinggi	Menu DAK		APBD		Menu DAK	
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah indikator parameter kependudukan		22	148,091,500			22	31,117,800
01	Pendataan Keluarga	Jumlah peserta orientasi pendataan, pencatatan dan pelaporan, dan Jumlah KK baru yang terdata.	Bukittinggi	200 orang 2.700KK	0	APBD		200 orang 30000 KK	0
02	Koordinasi Koalisi Kependudukan	Jumlah analisa kependudukan yang direkomendasikan	Bukittinggi	2 Analisa	0	APBD		5 Analisa	0
03	Sekolah Siaga Kependudukan	Jumlah sekolah siaga dan pojok kependudukan	Bukittinggi	6	25,931,500	APBD		15	31,117,800
04	Grand design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah Grand design tersedia	Bukittinggi	5	122,160,000	APBD			
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah PIK Luar sekolah		5 Kel	138,418,000			5 Kel	166,101,600
		Persentase Sekolah dan PT Memiliki PIK		50%				55%	
01	Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Generasi Berencana.	Pembentukan PIK, Pelatihan pengurus PIK Remaja, Fasilitasi Generasi Berencana.	Bukittinggi	2 PIK R, 2 angkatan, 1 forum.	138,418,000	APBD		2 PIK R, 2 angkatan, 1 forum.	166,101,600
02	Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja.	Jumlah remaja peserta pelatihan	Bukittinggi	90 orang	0	APBD		90	0
03	Pembinaan Ketahanan Keluarga	Penyusunan Perwako, Juknis dan sosialisasi.	Bukittinggi	1 dokumen, 1 dokumen, 3 kali	0	APBD		Pelatihan Ketahanan Keluarga	0
	Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Kelompok kegiatan Aktif		76,93%	-			80,76%	-
01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping yang dibina.	Bukittinggi	90 Orang	0	APBD		60 Orang	0
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				25,290,043,976				26,895,475,146
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				25,290,043,976				
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		100%	1,443,742,500				1,480,482,500
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	DLH	12 Bulan	3,000,000	APBD		12 Bulan	3,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penambahan daya listrik kantor.	DLH	12 Bulan	150,000,000	APBD		12 Bulan	150,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	DLH	12 Bulan	437,992,000	APBD		12 Bulan	437,992,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	DLH	12 Bulan	205,000,000	APBD		12 Bulan	205,000,000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	DLH	12 Bulan	17,000,000	APBD		12 Bulan	17,000,000
6	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Peralatan rumah tangga	DLH	1 Set	20,000,000	APBD		1 Set	20,000,000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	DLH	12 Bulan	25,000,000	APBD		12 Bulan	25,000,000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	DLH	12 Bulan	15,000,000	APBD		12 Bulan	15,000,000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik penerangan kantor	DLH	12 Bulan	6,000,000	APBD		12 Bulan	6,000,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	DLH	12 Bulan	25,000,000	APBD		12 Bulan	25,000,000
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	DLH	12 Bulan	245,768,000	APBD		12 Bulan	245,768,000
12	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	DLH	12 Bulan	53,982,500	APBD		12 Bulan	53,982,500
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor (Satpam)	DLH	12 Bulan	200,000,000	APBD		12 Bulan	200,000,000
14	Penanggulangan resiko kerja pelayanan kebersihan dan pertamanan kota	Dana Resiko untuk kecelakaan Kerja	DLH	12 Bulan	10,000,000	APBD		12 Bulan	10,000,000
15	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan	Jumlah pegawai yang dibayarkan lembur	DLH	9 orang	-	APBD		9 orang	36,740,000
16	Penyediaan administrasi Pengelolaan DAK	jumlah laporan	DLH	4 laporan	30,000,000	APBD		4 laporan	30,000,000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			185,000,000				185,000,000
1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	DLH	1 Paket	25,000,000	APBD		1 Paket	25,000,000
2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	DLH	1 Paket	60,000,000	APBD		1 Paket	60,000,000
3	Pengadaan Peralatan Kantor	jumlah pengadaan peralatan kantor	DLH	1 Paket	-	APBD		1 Paket	-
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	kendaraan dinas eselon III	DLH	2 Unit	-	APBD		2 Unit	-
5	Pembuatan Kanopi dan Roof Top	Lanjutan pembangunan pagar kantor DLH	DLH	1 paket	100,000,000	APBD		1 paket	100,000,000
			DLH						
B	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian		85%	50,000,000			85%	50,000,000
1	Peningkatan kapasitas Aparatur	jumlah peserta diklat	DLH	20 orang	50,000,000	APBD		20 orang	50,000,000
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai		100%	60,000,000			100%	60,000,000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DLH	1 Paket	60,000,000	APBD		1 Paket	60,000,000
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan		DLH		36,740,000				36,740,000
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Lembur yang dibayarkan	DLH	9 orang	36,740,000	APBD		9 orang	36,740,000
D	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/ pelayanan /pengelolaan persampahan		100%	19,173,229,516			100%	19,235,920,686
1	Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota	penunjang operasional pengelolaan sampah	DLH		9,431,458,830	APBD			9,394,150,000
2	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara	DLH	39 jenis	3,356,471,000	APBD		39 jenis	3,456,471,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	DLH	1 tahun	4,128,759,750	APBD		1 tahun	4,128,759,750
4	Pengelolaan Rumah Kompos	penunjang operasional pengelolaan rumah kompos	DLH	1 tahun	1,467,575,696	APBD		1 tahun	1,467,575,696
5	Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	penunjang retribusi pelayanan persampahan	DLH	12 bulan	383,504,240	APBD		12 bulan	383,504,240
6	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS / TPST	penunjang operasional Pengendalian dan Penyemprotan TPSS	DLH	32 TPSS	65,460,000	APBD		32 TPSS	65,460,000
7	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan sampah	Jumlah peserta	DLH		-	APBD			-
8	Koordinasi penilaian adipura	Penilaian adipura	DLH	3 kali penilaian	125,000,000	APBD		3 kali penilaian	125,000,000
9	Rehab Eks RPH untuk TPS 3R dan pengadaan sarana prasarana penunjang	Rehab Eks RPH untuk TPS 3R dan pengadaan sarana prasarana penunjang	DLH		-	APBD			-
10	Lomba lingkungan bersih antar RW	Jumlah RW yang ikut lomba kelurahan bersih	DLH		35,000,000	APBD			35,000,000
11	Sosialisasi pengelolaan sampah kota bukittinggi (lurah dan kader kebersihan kelurahan)	Sosialisasi pengelolaan sampah kota bukittinggi (lurah dan kader kebersihan kelurahan)	DLH		-	APBD			-
12	Penegakan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kali razia penekan Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah	DLH	24 kali	25,000,000	APBD		24 kali	25,000,000
13	Pengadaan tanah untuk TPS3R	TPS 3R, Pool Kendaraan, tempat perbaikan kendaraan dan tempat pencucian mobil	DLH		-	APBD			-
14	Pembangunan rumah kompos dan peralatannya	Pembangunan rumah kompos dan peralatannya	DLH		-	APBD			-
15	Peningkatan kapasitas Kader Lingkungan dalam pengelolaan sampah	Peningkatan kapasitas Kader Lingkungan dalam pengelolaan sampah	DLH		-	APBD			-
16	Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengelolaan sampah	Jumlah peserta	DLH	-	30,000,000	APBD		-	30,000,000
17	Pendampingan pengolahan sampah	Jumlah peserta	DLH	1 lokasi (500 m)	-	APBD		1 lokasi (500 m)	-
18	Pelatihan pengolahan sampah dan strategi pemasaran bagi bank sampah	Jumlah peserta	DLH		-	APBD			-
19	Penyusunan draf ranperda pengelolaan persampahan	draf ranperda pengolahan persampahan	DLH	1 draf ranperda	50,000,000	APBD		1 draf ranperda	50,000,000
20	Penyusunan draft ranperda retribusi pelayanan persampahan	draf ranperda retribusi persampahan	DLH	1 Draft ranperda retribusi	50,000,000	APBD		1 Draft ranperda retribusi	50,000,000
21	Pelatihan pengelolaan sampah an organik dan sosialisasi pengelolaan dan pengembangan TPS 3R	Jumlah Dokumen evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	DLH	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	-
22	Pemantauan dan sistem evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Dokumen evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	DLH	1 dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000
23	Revitalisasi dan Pembangunan TPST di EKS TPA Padang Hijau	Revitalisasi dan Pembangunan TPST di EKS TPA Padang Hijau	DLH	1 draf ranperda	-	APBD		1 draf ranperda	-
24	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (DAK Fisik Penugasan 2020)	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (DAK Fisik Penugasan 2020)	DLH	450 orang	-	APBD		450 orang	-
E	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan		30%	535,436,160			30%	535,436,160
1	Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	jumlah usaha yang diamati	DLH	50 usaha	25,000,000	APBD		50 usaha	25,000,000
2	Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup	jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	DLH	20 pengaduan	19,576,840	APBD		20 pengaduan	19,576,840

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat	DLH	12 titik pantau	107,000,000	APBD		12 titik pantau	107,000,000
4	Penyusunan RPPLH	Dokumen rancangan perda RPPLH	DLH	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	-
5	Pelayanan perizinan PPLH	Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	DLH	100 usaha kegiatan	49,999,800	APBD		100 usaha kegiatan	49,999,800
6	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	Operasional laboratorium lingkungan hidup	DLH	1 tahun	225,000,000	APBD		1 tahun	225,000,000
7	Penegakan hukum administratif bidang lingkungan hidup	Jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan	DLH	20 kasus	8,859,520	APBD		20 kasus	8,859,520
8	Pemantauan Kualitas Tanah dan Produksi Biomasa	dokumen pemantauan Kualitas Tanah	DLH	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	-
9	Studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang tambuo kota bukittinggi	dokumen studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang agam kota bukittinggi	DLH	1 dokumen	100,000,000	APBD		1 dokumen	100,000,000
F	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Presentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup		95%	900,000,000			95%	900,000,000
1	Penunjang kegiatan bidang lingkungan hidup dan keikutsertaan dalam kegiatan event-event tingkat kota, provinsi dan nasional	Penilaian di bidang lingkungan hidup tingkat kota, provinsi dan nasional	DLH	8 kali penilaian	150,000,000	APBD		8 kali penilaian	150,000,000
2	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	DLH	3 buku	125,000,000	APBD		3 buku	125,000,000
3	Penyusunan Produk hukum tentang pengelolaan lingkungan.	perwako yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup	DLH	1 perwako	-	APBD		1 perwako	-
4	Pembinaan Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina	DLH	3 RW	200,000,000	APBD		3 RW	200,000,000
5	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah sekolah Adiwiyata tingkat SD,SLTP	DLH	10 sekolah	100,000,000	APBD		10 sekolah	100,000,000
6	Pemberdayaan Saka Kalpataru	Jumlah siswa pramuka yang menerapkan Saka Kalpataru	DLH	50 orang	100,000,000	APBD		50 orang	100,000,000
7	Pengembangan Data dan penyebarluasan informasi tentang lingkungan hidup dan penyuluhan keliling pada masyarakat	Jumlah media publikasi	DLH	6 media	225,000,000	APBD		6 media	225,000,000
8	Pembuatan Profil Dinas Lingkungan Hidup	Profil DLH	DLH	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
G	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pemenuhan RTH		35%	2,905,895,800			35%	4,411,895,800
1	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	DLH	1 tahun	2,619,395,800	APBD		1 tahun	2,619,395,800
2	Pengadaan pot beserta bunga	Jumlah Pot dan Bunga	DLH	1 paket	202,500,000	APBD		1 paket	202,500,000
3	Pembuatan Rumah Bunga				40,000,000	APBD			40,000,000
4	Pengadaan sarana dan prasarana taman				-	APBD			-
5	Rehab Taman dalam kota (Taman depan DPRD)				-	APBD			500,000,000
6	Revitalisasi Taman Tugu Exponen 66				-	APBD			400,000,000
7	Pengembangan kawasan Taman Ngarai Maaram				-	APBD			-
8	Update profil keanekaragaman hayati	profil keanekaragaman hayati	DLH	1 dokumen	44,000,000	APBD			-
9	Rehab Taman Tugu Imam Bonjol				-	APBD			450,000,000
10	Pembuatan Taman Pulau Jalan				-	APBD			200,000,000
11	Penyusunan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati				-	APBD			-
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2,326,825,000				2,436,566,000
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2,326,825,000				2,436,566,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				744,985,000				790,461,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, buku cek dan benda pos lainnya yang dibeli	Dinas Dukcapil	4 jenis	2,225,000	APBD		4 jenis	2,225,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayarkan	Dinas Dukcapil	24 rek / tahun	83,000,000	APBD		24 rek/tahun	85,000,000
		Jumlah rekening air yang dibayarkan		12 rek / tahun				12 rek/tahun	
		Jumlah rekening telepon yang dibayarkan		24 rek / tahun				24 rek/tahun	
		Jumlah rekening internet yang dibayarkan		12 rek / tahun				12 rek/tahun	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara	Dinas Dukcapil	11 unit	177,000,000	APBD		11 unit	190,000,000
		Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara		3 unit				3 unit	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli	Dinas Dukcapil	27 jenis	126,000,000	APBD		27 jenis	135,000,000
		Jasa petugas kebersihan yang dibayarkan		1 paket				12 bulan	
		Jumlah iuran / retribusi sampah yang dibayarkan		12 rek / tahun				12 rek/tahun	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Dinas Dukcapil	50 jenis	50,000,000	APBD		50 jenis	50,000,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan	Dinas Dukcapil	4 jenis	25,000,000	APBD		4 jenis	25,000,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibeli	Dinas Dukcapil	4 jenis	5,000,000	APBD		4 jenis	5,000,000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang dibeli	Dinas Dukcapil	3 paket	30,000,000	APBD		3 paket	30,000,000
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Dinas Dukcapil	4 jenis	25,000,000	APBD		3 jenis	25,000,000
10	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah honor pbj, ppk, ptk, pjphp, pphp yang dibayarkan	Dinas Dukcapil	2 orang	7,000,000	APBD		2 orang	7,000,000
11	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Dinas Dukcapil	100%	214,760,000	APBD		100%	236,236,000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				25,000,000				50,000,000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Dinas Dukcapil	2 paket	25,000,000	APBD		1 paket	50,000,000
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				36,740,000				
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Dinas Dukcapil	3 dokumen	36,740,000	APBD		3 dokumen	36,740,000
IV	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1,520,100,000				1,596,105,000
1	Pengelolaan Administrasi Kependudukan dengan Aplikasi SIAK dan AFIS	Jumlah bulan ketersediaan jaringan dan peralatan SIAK dan AFIS	Dinas Dukcapil	12 bulan	235,000,000	APBD		12 bulan	246,750,000
2	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	8000 dokumen	670,100,000	APBD		8000 dokumen	703,605,000
		Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	10000 dokumen				10000 dokumen	
		Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	6000 dokumen				6000 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	3000 dokumen	180,000,000	APBD		3000 dokumen	189,000,000
4	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	4000 dokumen	50,000,000	APBD		4000 dokumen	52,500,000
5	Pelayanan Akta Kematian	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	Dinas Dukcapil	500 dokumen	54,000,000	APBD		500 dokumen	56,700,000
6	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Kependudukan yang tersedia tepat waktu Jumlah dokumen perkembangan kependudukan yang tersedia	Dinas Dukcapil	12 laporan 2 dokumen	135,000,000	APBD		12 laporan 2 dokumen	141,750,000
7	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun	Dinas Dukcapil	800 data	37,000,000	APBD		800 data	38,850,000
8	Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Jumlah penduduk yang didata pada database kependudukan	Dinas Dukcapil	2000 orang	25,000,000	APBD		2000 orang	26,250,000
9	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diarsipkan / didigitalisasi	Dinas Dukcapil	8000 dokumen	45,000,000	APBD		8000 dokumen	47,250,000
10	Digitalisasi Akta Catatan Sipil	Jumlah dokumen akta catatan sipil yang didigitalisasi	Dinas Dukcapil	5000 dokumen	39,000,000	APBD		5000 dokumen	40,950,000
11	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yang melaksanakan PKS	Dinas Dukcapil	16 instansi	50,000,000	APBD		16 instansi	52,500,000
	DINAS PERHUBUNGAN				7,915,966,951				2,447,250,000
	URUSAN PERHUBUNGAN				7,915,966,951				2,447,250,000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Bukittinggi	100%	518,479,216			100%	1,090,000,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai prangko, dan Cek teraan yang dibeli	Bukittinggi	12 Bulan	1,650,000	APBD		12 Bulan	5,000,000
2	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik Terbayar (36 Rekening)	Bukittinggi	12 Bulan	55,000,000	APBD		12 Bulan	100,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Bukittinggi	12 Bulan	135,207,216	APBD		12 Bulan	270,000,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kantor Yang Bersih	Bukittinggi	3 orang satu tahun	82,346,000	APBD		12 Bulan	150,000,000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Komputer, Printer, HT dan peralatan lainnya yang dipelihara	Bukittinggi	12 bulan	3,000,000	APBD		12 Bulan	20,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Bukittinggi	1 Paket	14,000,000	APBD		1 Paket	30,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	Bukittinggi	1 Paket	13,400,000	APBD		1 Paket	20,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penerangan Kantor yang tersedia	Bukittinggi	1 Paket	1,500,000	APBD		1 Paket	5,000,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bukittinggi	1 Paket		APBD		1 Paket	5,000,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat, tamu dan kembur yang tersedia makanan dan minunya	Bukittinggi	250 snack, 100 makan rapat dan 100 makan minum	6,000,000	APBD		12 Bulan	10,000,000
11	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat, Koordinasi sosialisasi dan koordinasi Yang Diikuti	Bukittinggi	12 Bulan	116,376,000	APBD		12 Bulan	300,000,000
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa, PPHP, PPK, PTK yang di bayar (orang)	Bukittinggi	15 paket	10,000,000	APBD		12 Bulan	25,000,000
13	Penyediaan Jasa Keamanan kantor	Jumlah petugas jasa keamanan yang tersedia	Bukittinggi	12 Bulan	80,000,000	APBD			150,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bukittinggi	95%	38,000,000			100%	1,115,000,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terbeli	Bukittinggi	2 Unit roda 4 dan 7 unit roda 2, 1 BH MOBIL DEREK	-	APBD		1 Unit	500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bukittinggi	1 BH Mesin Absensi, CCTV, LED TV, Komputer, Laptop, Pritter, Drone, HT, Re piter	25,000,000	APBD		1 Paket	150,000,000
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli	Bukittinggi	1 Paket		APBD		1 Paket	40,000,000
4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang tersedia	Bukittinggi	1 Paket	-	APBD		1 Paket	200,000,000
5	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	Bukittinggi	1 Paket				1 Paket	
5	Perencanaan pembanguna gedung kantor	1 dokumen DPHL	Bukittinggi	1 paket		APBD			
7	Pemeliharaan gedung kantor	Terciptanya gedung kantor yang nyaman	Bukittinggi	1 Paket	13,000,000			1 Paket	200,000,000
6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terciptanya Gedung Kantor Yang Layak dan Nyaman	Bukittinggi	1 Paket gedung kantor , 1 Dok .Pengawasan , 1 Dok pengawasan	-	APBD		1 Paket	25,000,000
7	Pengadaan Tanah	Tersedianya tanah Bangunan kantor	Bukittinggi	1 Paket					
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Bukittinggi	100%	225,600,000			100%	225,000,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian serta perlengkapan yang tersedia	Bukittinggi	1 Paket	195,600,000	APBD		1 Paket	225,000,000
2	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/Kartu absensi yang diadakan			30,000,000				
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bukittinggi	100%	-			100%	120,000,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terdidiknya dan Terlatihnya Aparatur Sesuai Dengan Kualifikasi Teknis	Bukittinggi	4 orang	-	APBD		4 orang	80,000,000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Bukittinggi	100%	20,150,000				17,250,000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terukurnya Capaian Kinerja SKPD	Bukittinggi	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	2,500,000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan SKPD Semesteran	Bukittinggi	2 Laporan		APBD		2 Laporan	1,250,000
3	Penyusunan Rencana strategis SKPD	Adanya Pedoman/ uan Pelaksanaan KegiAcatan 5 Tahunan	Bukittinggi	1 Dokumen		APBD		-	10,000,000
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Adanya Acuan dan Pedoman Untuk Pelaksanaan Kegiatan 1 Tahun	Bukittinggi	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	1,750,000
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	Tersedianya Informasi Keuangan SKPD	Bukittinggi	1 Laporan		APBD		1 Laporan	1,750,000
7	Penyusunan Renstra SKPD 2021-2026	Tersedianya Renstra SKPD	Bukittinggi	1 dokumen	20,150,000				
VI	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan lalulintas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Bukittinggi	95%	2,957,431,215	APBD		100%	8,500,000,000
1	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	Jumlah PNS dan Non PNS yang dibayar lembur dan 40 jukir yang dibayar upah	Bukittinggi	70 orang 12 bln	2,066,450,000	APBD		12 Bulan	3,000,000,000
2	Pengelolaan Gedung parkir	Jasa kebersihan, keamanan dan pemeliharaan gedung	Bukittinggi	2 gedung	890,981,215	APBD		12 Bulan	2,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	Bukittinggi	1 Paket		APBD		1 Paket	500,000,000
4	Pengecatan Marka Jalan	Panjang/ jumlah ruas jalan yang telah dilengkapi marka/Zebra Cross	Bukittinggi	20 ruas jalan		APBD		1 Paket	200,000,000
5	Pengadaan Road Barrier	Jumlah road barieer yang diadakan	Bukittinggi	1 Paket		APBD		1 Paket	200,000,000
6	Pengadaan Rubber Speed Humb/Rubber Speed Bumb/Speed Table	Jumlah Rubber Speed Humb pengendali kecepatan pada lokasi rawan kecelakaan	Bukittinggi	61 Buah		APBD		1 Paket	300,000,000
7	Pengadaan dan Penggantian RPPJ	Persentase RPPJ yang terpasang dalam kota	Bukittinggi	1 Paket		APBD		-	200,000,000
8	Pengadaan Traffic Cone	Jumlah trafik cone yang diadakan	Bukittinggi	1 Paket		- APBD		-	200,000,000
9	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung	Jumlah cermin tikung yang terpasang pada lokasi rawan kecelakaan	Bukittinggi	9 buah		APBD		1 Paket	200,000,000
10	Pengadaan Warning Light	Jumlah warning light yang terpasang didaerah rawan kecelakaan	Bukittinggi	1 Paket		- APBD		-	200,000,000
11	Pengadaan Traffic Light	Jumlah Trfick Light yang terpasang	Bukittinggi	1 Paket		- APBD		1 Paket	1,500,000,000
12	Pengadaan dan pemasangan Guardreil	Panjang Guardrirel yang terpasang didaerah rawan kecelakaan	Bukittinggi	20 meter					218,000,000
VII	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Tersedianya rambu-rambu yang layak	Bukittinggi		278,574,030			-	500,000,000
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Rambu bersuar terdiri dari 9 unit Trafick Light dan 17 unit Warning Light (7 unit rusak berat. Rambu tidak bersuar sebanyak 500 unit dan 350 masih kondisi baik	Bukittinggi	12 Bulan	278,574,030	APBD		12 Bulan	500,000,000
VIII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Bukittinggi	100%	-				1,125,000,000
1	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang	Jumlah Jembatan Penyeberangan Orang yang dibangun	Bukittinggi	1 Paket		- APBD		1 Paket	425,000,000
2	Penyusunan Ranperda Lalu Lintas Darat	Tersedianya Ranperda Lalu Lintas	Bukittinggi	1 Dokumen		APBD		-	-
3	Pengadaan Halte	Jumlah Kebutuhan Halte di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 paket		APBD		1 Dokumen	500,000,000
4	Dokumen kajian rute Aman Sekolah (RASS)	Terwujudnya Dokumen Kajian rute Aman Sekolah (RASS)	Bukittinggi	1 Dokumen		- APBD		-	-
5	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Jumlah ZOSS Pada Sekolah Yang Rawan Kecelakaan	Bukittinggi	1 Paket		APBD		1 Paket	200,000,000
IX	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Angkutan umum yang mempunyai izin trayek	Bukittinggi		835,049,000				190,000,000
1	Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi dan Pengusaha Angkutan Umum di Kota Bukittinggi dan temu wicara pengelola angkutan umum	Jumlah sopir dan juru mudi yang diberi penyuluhan dan pengelola angkutan umum yang mengadakan pertemuan	Bukittinggi	30 Orang, dan 4 orang pengusaha angkutan		- APBD		30 Orang	15,000,000
2	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Jumlah awak angkutan umum teladan yang diseleksi	Bukittinggi	30 Orang	47,673,000	APBD		3 Orang	75,000,000
3	Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan	Persentase data papan trayek kendaraan angkutan kota sebanyak 539 kendaraan yang dikeluarkan	Bukittinggi	1078 Papan trayek	60,000,000	APBD		1008 buah	60,000,000
4	Sosialisasi Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Jumlah Pengemudi angkutan tidak bermotor yang dibina	Bukittinggi	30 Orang	8,581,000	APBD	Tidak ada pada Permen gagri No. 90 tahun 2019	30 Orang	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Pemuntakiran Data Perbengkelan	Tersedianya data perbengkelan yang terdata sesuai dengan izinnnya	Bukittinggi	1 Dok	8,345,000	APBD	Tidak ada pada Permen gagri No. 90 tahun 2019	Dok	12,000,000
6	Pemeriksaan dan penertiban kendaraan angkutan umum/kota	data kendaraan angkutan umum/kota yang beroperasi di kota bukittinggi	Bukittinggi	12 bln		APBD		12 bln	13,000,000
7	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota Bukittinggi	Tersedianya Dokumen data jaringan trayek	Bukittinggi	Dok	300,000,000				
8	Kajian Kebutuhan Terminal Barang dalam Kota Bukittinggi	Tersedianya data terminal kendaraan angkutan umum/kota dan angkutan barang	Bukittinggi	Dok	350,000,000		Tidak ada pada Permen gagri No. 90 tahun 2019		
9	Pengadaan plat kendaraan non bermotor.bendi	Jumlah Plat Kir dan Buku STNKTB diadakan	Bukittinggi	376 plat kir dan buku STNKTB	7,380,000		Tidak ada pada Permen gagri No. 90 tahun 2019		10,000,000
10	Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah datan angkutan kota dalam jaringan A.001.A.002.A.003	Bukittinggi	1 dokumen	53,070,000		Permen dagri no 90 tahun 2019		
X	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terwujudnya pengendalian lalulintas	Bukittinggi		2,737,821,500				2,200,000,000
1	Lomba Tertib Lalu Lintas	Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)	Bukittinggi	1 Kali penilaian	-	APBD		1 Kegiatan	50,000,000
2	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	uang Lembur PNS dan Non PNS yang melakukan pengendalian dan pengamanan lalulintas dan upah non PNS yang dibayarkan	Bukittinggi	28 orang PNS dan 31 orang non PNS	2,595,652,500	APBD		12 Bulan	2,000,000,000
3	Edukasi keselamatan LLAJ	Jumlah peserta sosialisasi keselamatan LLAJ	Bukittinggi	200 orang	47,936,500	APBD		200 orang	70,000,000
4	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah pelajar pelopor keselamatan berlalulintas yang di seleksi	Bukittinggi	30 orang	65,513,500	APBD		30 orang	80,000,000
5	Forum LLAJ	Terselenggaranya koordinasi antas penyelenggara angkutan jalan	Bukittinggi	1 Keg	5,000,000	APBD			150,000,000
6	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andallalin	Jumlah Rekomendasi andalalin yang dikeluarkan	Bukittinggi	1 Paket	23,719,000	APBD	Permen dagri no 90 tahun 2019		
XI	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang laik beroperasi	Bukittinggi		304,861,990				1,000,000,000
1	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Operasional PKB terdiri dari Belanja ATK, Jasa Kantor, belanja cetak tanda uji	Bukittinggi	12 Bulan	304,861,990	APBD		12 Bulan	1,000,000,000
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,466,860,663				9,724,000,000
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,289,402,413				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			472,693,290				549,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, Buku Cek, Pengiriman Barang	Dinas Kom	100 Materai 3000, 200 Materai 6000, 5 Buku Cek	2,250,000	APBD		100 Materai 3000, 200 Materai 6000, 5 Buku Cek	2,500,000
I.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar	Dinas Kom	12 Rekening	20,000,000	APBD		12 Rekening	60,000,000
I.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	Dinas Kom	3 roda 4, 1 Roda 2	124,832,000	APBD		3 roda 4, 1 Roda 2	150,000,000
I.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Kebersihan Kantor	Dinas Kom	9 Jenis	50,000,000	APBD		9 Jenis	5,000,000
I.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki	Dinas Kom	10 Jenis	15,000,000	APBD		10 Jenis	15,000,000
I.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Dinas Kom	54 Jenis	12,491,500	APBD		54 Jenis	25,000,000
I.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kom	7 Jenis, 1800 FC, 50 Jilid	6,000,000	APBD		7 Jenis, 1800 FC, 50 Jilid	7,500,000
I.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Dinas Kom	9 Jenis	1,416,790	APBD		9 Jenis	4,000,000
I.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Lembur	Dinas Kom	100 Porsi Lembur 370 Snack Rapat, 100 Makan Rapat	5,997,000	APBD		100 Porsi Lembur 370 Snack Rapat, 100 Makan Rapat	10,000,000
I.10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar kota Bukittinggi	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Dinas Kom	12 Bulan	214,760,000	APBD		12 Bulan	250,000,000
I.11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	PPHP, PPK dan Pejabat Pengadaan	Dinas Kom	18 Paket Pekerjaan	19,946,000	APBD		18 Paket Pekerjaan	20,000,000
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD				36,740,000				900,000,000
II.12	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Renja dan Keuangan	Dinas Kom	6 Dokumen	36,740,000	APBD			40,000,000
V	Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City			403,775,600				260,000,000
V.18	Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi	Aplikasi/ Sistem Informasi diadakan	Bukittinggi	1 aplikasi	-	APBD	Cascading		160,000,000
V.19	Pengelolaan Aplikasi TPP	Aplikasi TPP terkelola	Bukittinggi	1 bh	40,667,600.00	APBD	Cascading		100,000,000
V.20	Kostumisasi dan Pengembangan Aplikasi/ Sistem Informasi	Jumlah aplikasi yang dihasilkan	Bukittinggi	5 aplikasi	363,108,000	APBD	Cascading		-
VI	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi		Bukittinggi		70,000,000	APBD			340,000,000
VI.21	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK di Pemerintah Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 bulan / 1 dok	-	APBD	Cascading		120,000,000
VI.22	Penunjang Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dokumen Kerjasama dibidang TIK tersusun	Bukittinggi	1 dokumen	-	APBD	Cascading		100,000,000
VI.23	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-Government	Laporan evaluasi	Bukittinggi	1 laporan	70,000,000	APBD	Cascading		120,000,000
VI.24	Penyusunan Master Plan Smart City	Master plan Smart city tersusun	Bukittinggi	1 dokumen	-	APBD	Cascading		0
VII	Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik			3,714,110,000				3,725,000,000
VII.23	Promosi Program Pemerintah (*)								0
VII.25	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah kelompok yang dibina	Bukittinggi	pembinaan; Seminar; Data Kelompok	-	APBD	Cascading		120,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VII.26	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bukittinggi	Tersusunnya DIP, DIK, Laporan Layanan tahunan	Bukittinggi	Pelaksanaan sosialisasi/rakor/bimtek PPID dan DIP	46,000,000	APBD	Cascading		175,000,000
VII.27	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Website Pemko Bukittinggi terkelola	Bukittinggi	Publikasi informasi Pemko Bukittinggi selama 12 bulan	144,000,000	APBD	Cascading		200,000,000
VII.28	Pemilihan Kelompok Media Tradisional (Metra) Terbaik	Kelompok Metra Terbaik	Bukittinggi	Sosialisasi, 1 x pemilihan, 1 video terbaik	-	APBD	Cascading, permenkominfo no 08/per/m.kominfo/6/2010		130,000,000
VII.29	Pengelolaan Layanan pengaduan publik	Persentase pengaduan yang ditangani	Bukittinggi	Rakor; Bimtek; Laporan layanan; Rekrutmen tenaga operator pengaduan	74,000,000	APBD	cascading		100,000,000
VII.30	Pengadaan media informasi publik (videotron)	media informasi publik (videotron) diadakan	Bukittinggi	1 unit videotron terpasang	3,450,110,000	APBD	Cascading		3,000,000,000
VII.31	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Kota Bukittinggi	terlaksananya diseminasi informasi kepada publik	Bukittinggi	Diseminasi informasi kepada publik selama 12 bulan	-				
VII.32	Bukittinggi Video Kompetisi (BVK)	Video terbaik	Bukittinggi	Even BVK	-		Cascading		250,000,000
VIII	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK			2,587,448,523				3,300,000,000
VIII.34	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	Jaringan Intranet dan Internet yang dikembangkan dan terpelihara	Bukittinggi	29 SKPD	2,287,448,523	APBD	Cascading		2,000,000,000
VIII.35	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.36	Pengadaan CCTV Online	Jumlah CCTV yang diadakan	Bukittinggi	4 titik lokasi, 2 titik pantau	200,000,000	APBD	Cascading		200,000,000
VIII.38	Pengelolaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	Sarana dan Prasarana BCC yang dikelola	Bukittinggi	12 bulan	100,000,000	APBD	Cascading		750,000,000
	Pengelolaan domain, subdomain, hosting, DNS dan email Pemerintah Kota Bukittinggi	Domain, subdomain, hosting, DNS dan email Pemko Bukittinggi tersedia	Bukittinggi	-	-	APBD	Cascading		200,000,000
VIII.39	Pengembangan sumber daya TIK bagi ASN Pemko Bukittinggi (*)	Jumlah Pegawai yang dilatih	Bukittinggi	2 Orang	-	APBD	Cascading		150,000,000
IX	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi			4,635,000				0
IX.41	Penataan dan pembinaan menara telekomunikasi	jumlah menara yang ditata dan di bina	Bukittinggi	44 buah	4,635,000	APBD			0
	URUSAN STATISTIK				104,000,000				
X	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD			104,000,000				450,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.42	Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desimindasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Statistik sektoral dari 29 SKPD terkelola	Bukittinggi	Rakor; Sosialisasi; Bimtek; Sidang verifikasi; Rekrutmen tenaga statistik	100,000,000		Cascading		190,000,000
X.43	Pengelolaan Data Geospasial Kota Bukittinggi	Data geospasial Kota Bukittinggi terkelola	Bukittinggi	Rakor; Sosialisasi; Bimtek	4,000,000		Cascading		160,000,000
X.44	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Terintegrasi	Bimtek dan Diklat SDM terlaksana	Bukittinggi	1 Diklat, 2 Bimtek	-		Cascading		100,000,000
X.45	Pembangunan Meta Data Statistik Sektoral	Meta Data Statistik sektoral tersedia	Bukittinggi	1 Dokumen	-		Cascading		50,000,000
	URUSAN PERSANDIAN				73,458,250				
XI	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi			73,458,250				200,000,000
XI.46	Pengelolaan persandian dan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Surat-surat rahasia dan informasi yang diamankan	Dinas Kom	200 informasi	29,828,250	APBD	Cascading		100,000,000
XI.46	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Persandian	jumlah pegawai yang dilatih	Dinas Kom	2 orang	43,630,000	APBD	Cascading		100,000,000
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN				15,694,615,748				15,775,632,271
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				2,178,647,348				2,578,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)		100	724,316,938			100	1,428,000,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	perangko	Kota Bukittinggi	1 ls	1,760,913	APBD		1 ls	4,000,000
		materai 3000		394 lembar				394 lembar	
		materai 6000		283 lembar				283 lembar	
		buku cek		1 ls				1 ls	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening telp	Kota Bukittinggi	4 rek	135,000,000	APBD		12 14	330,000,000
		Pembayaran tagihan rekening air		2 rek					
		Pembayaran tagihan rekening listrik		5 rek					
		Pembayaran tagihan rekening belanja kawat/faximile /internet		1 rek					
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (komputer ,laptop, mesin tik, sound system, infocus, kamera, printer AC dll)	Kota Bukittinggi	4 jenis 10 jenis	8,624,886	APBD		12	17,500,000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara	Kota Bukittinggi	13 unit	176,868,984	APBD		13 unit	350,000,000
		jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara		6 unit				6 unit	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	Kota Bukittinggi	12 bulan	101,411,800	APBD		12 20	140,000,000
		retribusi sampah yang terbayar		12 bulan					
		peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor yang terbeli		21 jenis					
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli (jenis)	Kota Bukittinggi	39 jenis	15,244,355	APBD		50	37,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak	Kota Bukittinggi	18 jenis	30,640,000	APBD		18 jenis	63,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penggandaan (fotocopy, jilid)		2 jenis				2 jenis	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Kota Bukittinggi	12 jenis	7,500,000	APBD		12 jenis	50,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan lembur	Kota Bukittinggi	1 ls	16,599,000	APBD		1 ls	47,000,000
		minum lembur		320 bungkus				320 bungkus	
		makan dan minum tamu		200 porsi				200 porsi	
		makan dan minum rapat		1 ls				1 ls	
		snack rapat		200 bungkus				200 bungkus	
				625 kotak				625 kotak	
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas dalam daerah	Kota Bukittinggi	1 ls	174,372,000	APBD		1 ls	300,000,000
		Perjalanan dinas luar daerah		1 ls				1 ls	
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	iuran BPJS (bulan)	Kota Bukittinggi	12 bln		APBD		12 bln	
		jasa pegawai non PNS (orang)		30 orang				31 orang	
12	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	publikasi kegiatan kantor	Kota Bukittinggi	1 paket		APBD		1 paket	8,500,000
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran (tabung)	Kota Bukittinggi	1 ls	6,000,000	APBD		12	30,000,000
14	Pelaksanaan proses adminisrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Honor PPK, PTK,Pejabat pengadaan, Pejabat pemeriksa hasil pekerja dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan	Kota Bukittinggi	10 org	50,295,000				51,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)		100%	12,500,000.00			100	1,150,000,000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis peralatan kantor yang dibeli	Kota Bukittinggi	15		APBD		15	300,000,000
		jenis perlengkapan kantor yang dibeli		10				10	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara (paket)	Kota Bukittinggi	1 unit	12,500,000	APBD		3	35,000,000
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	Kota Bukittinggi	1 paket		APBD		1	215,000,000
	Pembangunan Pagar Rumah Dinas	Pagar rumah dinas (paket)	Kota Bukittinggi			-			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang dibeli	Kota Bukittinggi			APBD		2	600,000,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai (%)				-			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia (stel)	Kota Bukittinggi	94		APBD		94	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi ASN bidang Koperasi,Perdagangan dan Pasar	Kota Bukittinggi	90%		-		95%	660,000,000.00
	Peningkatan kompetensi Aparatur Pembina Koperasi ,UMKM,Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	Perjalanan dinas dalam rangka pengembangan wawasan dan disiplin personil	Kota Bukittinggi	130 org		APBD		60 org	660,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)		100	20,150,000.00			100	-
16	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu (dok)	Kota Bukittinggi	3	20,150,000	APBD		3	-
KOPERASI					1,421,680,410.00				1,414,632,271
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang telah melaksanakan aturan kelembagaan koperasi		18 kop	317,723,655.00			16.00	90,141,536
17	Penataan kelembagaan koperasi	Jumlah peserta pelatihan peraturan kelembagaan (kop)	Kota Bukittinggi	50 org	69,859,885.00	APBD		75	-
		Jumlah peserta pemberdayaan koperasi sekolah		25 org					90,140,115
18	Pelatihan akuntansi koperasi	Jumlah peserta pelatihan akuntansi koperasi	Kota Bukittinggi	50 org	90,140,115	APBD		75	1,421
19	Pengawasan koperasi	Jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi	Kota Bukittinggi	50 org	69,859,885.00	APBD		75 50	
		Jumlah koperasi yang diawasi		50 kop					
20	Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat	jumlah peserta sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat	Kota Bukittinggi		87,863,770	-		50	
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Persentase peningkatan kinerja usaha koperasi(%)		10%	236,845,635.00			12%	257,490,735
21	Pengembangan usaha koperasi	Jumlah peserta pelatihan manajemen usaha koperasi	Kota Bukittinggi	25 org	224,668,185.00	APBD		75	
		Jumlah koperasi yg dimonev		20 kop					
	Fasilitasi dan monev perkuatan permodalan koperasi	koperasi yang dimonev	Kota Bukittinggi			- APBD		20	
22	Monitoring peningkatan dana bergulir (UEM-SP)	Laporan monev UEM-SP	Kota Bukittinggi	1 laporan	12,177,450.00	APBD		1	45,000,000
	Peningkatan kapasitas koperasi (DAK non fisik 2019 dana peningkatan kapasitas koperasi dan UKM)	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas koperasi	Kota Bukittinggi	240 org					212,490,735
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Jumlah UMKM yang meningkat kinerja usahanya		20	867,111,120.00			20	1,067,000,000
23	Pengembangan usaha mikro	Jumlah peserta pelatihan manajemen bisnis, sosialisasi sumber modal dan temu kemitraan, pelatihan bagi UMKM yang bergerak dibidang makanan ringan, sosialisasi penyaluran KUR	Kota Bukittinggi	200 orang	810,191,850	APBD		150	897,000,000
		usaha mikro yang difasilitasi pameran		2 unit				2	
24	Penumbuhan wirausaha baru	jumlah peserta pelatihan motivasi bisnis	Kota Bukittinggi	100 org	56,919,270.00	APBD		50	170,000,000
		jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dan strategi pemasaran bagi KUBE		100 org					
24	Peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah (DAK non fisik 2019 dana peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM)	Jumlah peserta pelatihan (0rg)	Kota Bukittinggi	50 org					
PERDAGANGAN					13,515,968,400.00				3,148,000,000
9	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL yg telah tertata		30 pkl	-			1 lokasi	107,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan/ PKL kuliner malam	data PKL kuliner malam kota bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 laporan	-	APBD	Cascadin	3	31,000,000
	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima (Sosialisasi Kebijakan dan Aturan Pedagang Kaki Lima)	Jumlah PKL yang diberikan penyuluhan (PKL)	Kota Bukittinggi	50	-		Cascadin	370	76,000,000
10	Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan omset UMKM yg mengikuti acara pasar lelang, komtak dagang, pameran dlam dan luar negeri		1%	721,500,000.00			1%	1,700,000,000
	Gelar produk unggulan Kota Bukittinggi diluar propinsi	Jumlah gelar produk unggulan yang dilaksanakan (kl)	Kota Bukittinggi		-			0	-
25	Promosi/pameran dalam dan luar negeri bersama mitra kerja	Jumah pelaku usaha yg ikut pameran dalam dan luar negeri (pameran Dalam negeri : Indonesia fashion week, Inacraf, Apeksi, Sumbar exspo, Hut dekranas, trade expo, pameran luar negeri Indosia exspo (jedah), dan even-even dalam daerah	Kota Bukittinggi	12 pelaku usaha	650,000,000.00	APBD		8	1,700,000,000
26	Pasar Lelang dan Kontak Dagang				71,500,000.00				
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	jumlah kerjasama perdagangan luar negeri		1	-			1	-
	Pelatihan ekspor & import bagi aparat dan pelaku usaha	Jumlah aparat yang memiliki pengetahuan tentang ekspor impor (org)	Kota Bukittinggi	10 org	-	APBD		10	-
		Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki pengetahuan tentang ekspor impor (org)		20 org	-			20	
	Monitoring dan Motivasi produk Export IKM	Data perusahaan/ IKM yang melakukan export	Kota Bukittinggi		-	APBD		0	-
12	Program Perlindungan Konsumen dan tertib niaga	Persentase distributor,agen,pangkalan,dan SPBU yg telah mendistribusikan barang sesuai aturan perdagangan		80%	235,130,680.00			12 bulan	1,341,000,000
		Jumlah usaha yg telah memiliki legalitas		80 usaha				12 kasus	
		Persentase barang beredar sesuai standar		80%					
		fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBN dibawah batas toleransi		5%					
		Pesentase alat ukur sesuai standar kemetrolgian		3%			0.03125		
	Pengawasan SIUP , TDP dan TDG Dan Pengawasan Pendistribusian pupuk, gas dan BBM Bersubsidi	Jumlah perusahaan yg diawasi SIUP dan TDP dan TDG	Kota Bukittinggi	160 usaha		APBD		150	
		Jumlah distributor pupuk, agen dan pangkalan gas LPG 3 kg, SPBU yg diawasi	Kota Bukittinggi	2distributor, 2 agen dan 30 pangkalan ,3 SPBU					
27	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jenis produk yang diawasi (depot air minum, mainan anak, pakaian anak , ,makanan ,air minum dalam kemasan, ban kendaraan ,alat elektronik,alat listrik,)	Kota Bukittinggi	8 jenis	50,000,000.00	APBD		15	35,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jenis kebutuhan pokok yang dipantau (beras, minyak,,gula tepung,telur)		9 jenis					
	Pengawasan SIUP, TDP, dan TDG	Jumlah perusahaan yg diawasi SIUP dan TDP dan TDG	Kota Bukittinggi		-				16,000,000
	Fasilitasi Penyelesaian sengketa konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang difailitasi penyelesaiannya	Kota Bukittinggi	12		APBD		12	
	Bantuan paket sembako menghadapi lebaran dan kenaikan harga	Jumlah KK miskin yang dibantu (KK)	Kota Bukittinggi	5494 kk	-	APBD		5494 kk	755,000,000
28	Pengawasan pendistribusian pupuk, gas dan BBM bersubsidi	jumlah distributor pupuk	Kota Bukittinggi	3	3,500,000.00			3	20,000,000
		Jumlah agen LPG 3 kg		4	-			4	-
		Jumlah pangkalan yang terawasi (pangkalan)		30	-			30	
		Jumlah SPBU yang diawasi (bl)		3					
29	Pengawasan dan pelayanan pengujian UTPP	Jumlah alat ukur yg bertanda tera	Kota Bukittinggi	1500 alat ukur	32,586,000	-			135,000,000
30	Penyelenggaraan UPT kemetrolagian daerah	Operasional UPTD kemetrolagian (bl)	Kota Bukittinggi	12 bulan	149,044,680.0	APBD	UU. No. 23 th 2014	12 bulan	380,000,000
PASAR					12,559,337,720.00				8,635,000,000
13	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan sesuai dengan kriteria pasar SNI (struktur bangunan, arsitektur bangunan, mekanikal dan elektrikal)		3 item	11,259,337,500.00			3 item	7,135,000,000
		Pesentase capaian target retribusi pelayanan pasar		80%				85%	
31	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar	pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	Kota Bukittinggi	3 lokasi	180,000,000.00	APBD	Cascadin	1	215,000,000
32	Pengelolaan gedung pasar atas	Gedung pasar yang terpelihara		12 bln	5,000,000,000.00				5,500,000,000
		pemeliharaan lift, escalator, pompa air dan pompa ipal, genset, kamera cctv, jaringan, alat keselamatan, pemeliharaan taman, alat elektronik		10 jenis					
33	Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi	jumlah wc umum yang dikelola	Kota Bukittinggi	24 titik WC	726,569,000.00	APBD	tupoksi	24 titik WC	1,020,000,000
34	Intensifikasi pemungutan retribusi pasar	upah kerja pegawai kontrak dan iuran BPJS		12 bulan 10 org	352,768,500.00	APBD		12	400,000,000
35	Pembangunan pasar penampungan pedagang pasar bawah				5,000,000,000.00				
14	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar (%)		100%	1,300,000,220.00			100	1,500,000,000
	Penertiban dan Penyegelan Toko, Kios, Lap. Bulanan Yang Menunggak Retribusi	Toko, kios, lap. Bulanan yang ditertibkan dan disegel (kali)	Kota Bukittinggi	21 kali	-	APBD	Cascadin	21	
36	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar (kali)	Kota Bukittinggi	42 kali	1,300,000,220.00	APBD	Cascadin	42 kali	1,500,000,000
		tersedianya jasa keamanan pasar		9 orang/bl					
	Pelatihan peningkatan kinerja satuan pengamanan wilayah pasar	Jumlah peserta pelatihan			-				
	Pembuatan naskah akademik Perda	Jumlah naskah Perda (dokumen)	Kota Bukittinggi	3	-	APBD	Cascadin	12	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar	Tersedianya data pedagang dan sarana pasar	Kota Bukittinggi	2921	-	APBD		2921	176,956,848
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				9,816,627,274				9,670,000,119
	URUSAN PENANAMAN MODAL				7,508,271,974				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100%	841,330,000			100%	858,156,600
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket	DPMPTS PPTK	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2,500,000	DAU	Belanja Program Wajib	175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln	2,550,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy	DPMPTS PPTK	48 Rekening/ 12 Bulan	80,000,000	DAU	Belanja Program Wajib	48 Rekening/ 12 Bulan	81,600,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan terpelihara	DPMPTS PPTK	8 unit roda 4; 14 unit roda 2	190,000,000	DAU	Belanja Program Wajib	7 unit roda 4; 14 unit roda 2	193,800,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli	DPMPTS PPTK	12 bulan; 12 Jenis	84,910,000	DAU	Belanja Program Wajib	12 bulan; 12 Jenis	86,608,200
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	DPMPTS PPTK	1 Paket	10,000,000	DAU	Belanja Program Wajib	1 Paket	10,200,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis terbeli	DPMPTS PPTK	46 Jenis	21,744,000	DAU	Belanja Program Wajib	40 Jenis	22,178,880
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid	DPMPTS PPTK	7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah	35,400,000	DAU	Belanja Program Wajib	7 Jenis; 30028 Lembar; 86 Buah	36,108,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli	DPMPTS PPTK	45 jenis, 74 buah/100m, 148 buah	5,000,000	DAU	Belanja Program Wajib	11 Jenis	5,100,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia	DPMPTS PPTK	12 bulan	20,000,000	DAU	Belanja Program Wajib	12 bulan	20,400,000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri	DPMPTS PPTK	90%	276,776,000	DAU	Belanja Program Wajib	90%	282,311,520
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	DPMPTS PPTK	4 paket	25,000,000	DAU	Belanja Program Wajib	4 paket	25,500,000
13	Penyediaan petugas pengamanan kantor (security)	Honor security (bulan)	DPMPTS PPTK	12 bulan	90,000,000	DAU	Belanja Program Wajib	12 bulan	91,800,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%	5,415,000,000			100%	5,523,300,000
1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	DPMPTS PPTK	12 bulan	5,000,000	DAU	Belanja Program Wajib	12 bulan	5,100,000
2	Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) lanjutan	Jumlah pembangunan gedung kantor (sisa pembayaran)	DPMPTS PPTK	1 unit	5,410,000,000	DAU	Belanja Prioritas	1 dokumen	5,518,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen tersusun tepat waktu		100%	36,740,000			100%	37,474,800
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	DPMPPTS PPTK	3 jenis	36,740,000	DAU	Belanja Program Wajib	15 orang	37,474,800
	Urusan Wajib								
	Penanaman Modal								
	Pogram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%)		100%	878,192,849			100%	865,156,706
1	Pelayanan Perizinan Sektor A	Jumlah surat izin umum yang diterbitkan	Kota Bukittinggi	2500 surat izin; 2 FO dan 1 BO	231,205,865	DAU	Belanja Operasional Pelayanan	2500 surat izin; 2 FO dan 1 BO	235,829,982
2	Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik	Kota Bukittinggi	60 kasus	28,444,700	DAU	Belanja Urusan	60 kasus	29,013,594
3	Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan	Jumlah dokumen aturan perizinan	Kota Bukittinggi	2 dokumen	20,000,000	DAU	Belanja Urusan	1 Dokumen	20,400,000
4	Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online	Jenis Perizinan yang Dilayani secara Online; jml. Aplikasi perizinan yang dikelola	Kota Bukittinggi	81 Jenis Izin; 3 aplikasi	55,548,200	DAU	Belanja Urusan	81 Jenis Izin; 3 aplikasi	56,659,164
5	Validasi, Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan; jml. Berkas perizinan yang divalidasi	Kota Bukittinggi	48 laporan; 3000 berkas	22,031,000	DAU	Belanja Urusan	48 laporan; 3000 berkas	22,471,620
6	Pelayanan Perizinan Sektor B	Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan; Jml. FO dan BO perizinan	Kota Bukittinggi	1200 surat izin; 2 orang; 1 orang	356,036,784	DAU	Belanja Operasional Pelayanan	1200 surat izin; 2 orang; 1 orang	363,157,520
7	Tim Koordinasi Perizinan	Laporan koordinasi perizinan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	17,195,000	DAU	Belanja Urusan	1 Laporan	17,538,900
8	Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan	Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola	Kota Bukittinggi	90%	57,827,300	DAU	Belanja Urusan	92%	58,983,846
9	Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data	Laporan Berkas Perizinan secara online	Kota Bukittinggi	3000 berkas izin	50,000,000	DAU	Belanja Urusan	3000 berkas izin	51,000,000
10	Pengawasan Tempat Usaha	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha	Kota Bukittinggi	60 kali	9,904,000	DAU	Belanja Urusan	60 kali	10,102,080
11	Pembuatan profil digital dan website Mal Pelayanan Publik	Jml. Web dan profil digital MPP yang dibuat	DPMPPTS PPTK	1 aplikasi	30,000,000	DAU	Belanja Urusan	-	-
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi		75%	153,015,000			65%	156,075,300
1	Promosi dan gelar potensi investasi	Jml. Promosi investasi yang diikuti	Luar Kota Bukittinggi	1 event	153,015,000	DAU	Belanja Urusan	2 kali	156,075,300
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investor		120 perusahaan	32,490,000			115 perusahaan	33,139,800
1	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jml. Dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Kota Bukittinggi	1 dokumen	32,490,000	DAU	Belanja Urusan	1 dokumen	33,139,800
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	Peningkatan Jumlah Investor		4 dokumen	151,504,125			4 dokumen	154,534,208

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penyusunan Study Kelayakan Investasi	Jml. Buku studi kelayakan investasi	Kota Bukittinggi	1 dokumen	151,504,125	DAU	Belanja Urusan	1 dokumen	154,534,208
	URUSAN TENAGA KERJA				351,403,500				
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian		65%	240,929,000			64%	181,997,580
1	Pelatihan kewirausahaan	Jml. Peserta pelatihan kewirausahaan	Kota Bukittinggi	16 orang	60,000,000	DAU	Pokir DPRD (Nur Asra dan Arnis Malin Palimo)	20 orang/ 9 hari	61,200,000
2	Pelayanan, pembinaan dan pengembangan produktivitas Lembaga Latihan Swasta	Jml. Lembaga latihan swasta yang dibina	Kota Bukittinggi	10 lembaga	40,300,000	DAU	Belanja Urusan	10 lembaga	41,106,000
3	Monev. Eks siswa pelatihan	Jml. Eks siswa pelatihan yang dimonev	Kota Bukittinggi	32 orang	3,129,000	DAU	Belanja Urusan	30 orang	3,191,580
4	Pelatihan desain grafis	Jml. Peserta pelatihan desain grafis	Kota Bukittinggi	16 orang	62,500,000	DAU	Pokir DPRD M. Angga Alfarici	-	-
5	Pengelolaan klinik produktivitas	Jml. Pelaksanaan klinik produktivitas	Kota Bukittinggi	6 kali	75,000,000	DAU	Belanja Urusan	6 kali	76,500,000
6	Pelatihan menjahit	Jml. Peserta pelatihan menjahit	Kota Bukittinggi	2 paket/ 16 orang/ 9 hari	105,000,000	DAU	Pokir DPRD (Nur Asra dan H. Irman)		107,100,000
7	Pelatihan tata boga	Jml. Peserta pelatihan tata boga	Kota Bukittinggi	2 paket/16 orang/15 hari	60,000,000	DAU	Pokir DPRD (Nur Asra dan Abdul Rahman)		61,200,000
	Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan		85%	71,000,000			85%	72,420,000
1	Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial	Jml. Kasus hubungan industrial yang tetangani	Kota Bukittinggi	30 kasus	36,000,000	DAU	Belanja Urusan	30 kasus	36,720,000
2	Asistensi dan pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jml. Asistensi yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi	10 perusahaan	35,000,000	DAU	Belanja Urusan	10 perusahaan	35,700,000
	Program Peningkatan kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja		23%	39,474,500			23%	40,263,990
1	Pelayanan dan penempatan tenaga kerja	Jml. Laporan pencari kerja	Kota Bukittinggi	12 laporan	39,474,500	DAU	Belanja Urusan	12 Laporan	40,263,990
	Urusan Pilihan								
	URUSAN INDUSTRI				1,956,951,800				
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah industri kecil menengah yang berkembang		30 unit usaha	726,181,000			25 unit usaha	492,094,920

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pelatihan teknis Industri Kecil Menengah (IKM)	Jenis peserta pelatihan teknis yang dilaksanakan (pelatihan kain perca) dan peserta magang sepatu sandal	Kota Bukittinggi	3 kali; 60 orang	219,990,000	DAU	Belanja Musrenbang dan Pokir Dra. Hj. Rahmi Brisma	3 kali; 60 orang	224,389,800
2	Promosi Industri Kecil Menengah (IKM)	Jml. Event promosi yang diikuti; jml. IKM yang berpartisipasi	Luar Kota Bukittinggi	4 event; 8 IKM	262,456,000	DAU	Belanja Urusan	4 event; 8 IKM	267,705,120
3	Pelatihan desain dan pembuatan busana muslimah	Jml. Peserta pelatihan desain dan pembuatan busana muslimah	UPTD Kerajinan Industri	1 angkatan; 40 orang	75,000,000	DAU	Kegiatan Dekransda	2 angkatan; 40 orang	76,500,000
4	Pelatihan rendo koto gadang tingkat mahir	Jml. Peserta pelatihan rendo koto gadang tingkat mahir	UPTD Kerajinan Industri	1 angkatan; 15 orang	46,825,000	DAU	Kegiatan Dekransda	1 angkatan; 15 orang	47,761,500
5	Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jml. Peserta Seminar Revolusi Industri 4.0 dan Seminar Optimalisasi Produksi IKM	Kota Bukittinggi	20 peserta, 2 kali	121,910,000	DAU	Belanja Urusan	20 peserta, 2 kali	124,348,200
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM		10%	1,111,903,000			8%	1,134,141,060
1	Sosialisasi penerapan dan konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM)	Jumlah peserta sosialisasi; jml. Peserta konvensi	Kota Bukittinggi	25 IKM; 5 IKM	37,219,000	DAU	Belanja Urusan	25 IKM; 5 IKM	37,963,380
2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jml. Sosialisasi packing yang dilaksanakan; Jml. IKM yang difasilitasi label halal	Kota Bukittinggi	30 orang; 3 event	302,204,000	DAU	Belanja Urusan dan Pokir Zulhamdi Nova Candra	30 orang; 3 event	308,248,080
3	Perkuatan asosiasi makanan	Jml. Bimtek pangan yang diikuti; Jml. Peserta event pameran pangan	Luar Kota Bukittinggi	30 orang; 3 event; 6 IKM	242,480,000	DAU	Belanja Urusan dan Pokir Zulhamdi Nova Candra	30 orang; 3 event; 6 IKM	247,329,600
4	Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri	Jml. Pemenuhan pengelolaan UPTD	UPTD Kerajinan Industri	12 bulan	280,000,000	DAU	Belanja Operasional Pelayanan	12 bulan	285,600,000
5	Perkuatan organisasi mitra UPTD Kerajinan Industri	Jml. Organisasi yang difasilitasi	UPTD Kerajinan Industri	1 organisasi	250,000,000	DAU	Belanja Bantuan Organisasi Kemasyarakatan	1 organisasi	255,000,000
	Program Penataan Struktur Industri	Penambahan nilai penjualan IKM		35%	118,867,800			8%	121,245,156
1	Kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir	Jml. dokumen data informasi industri	Kota Bukittinggi	1 dokumen	118,867,800	DAU	Belanja Urusan	1 dokumen	121,245,156
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		Bukittinggi		61,566,238,891				63,248,039,300
	URUSAN PERPUSTAKAAN				60,689,057,691				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran			638,549,600				851,900,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos		3 jenis	1,948,000			3 Jenis	2,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (rekening/bulan)		48 Rekening	49,670,000			48 Rekening	100,000,000
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		12 perbaikan	12,000,000			12 Bulan	15,000,000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terpelihara (unit)		4 Unit Kendaraan Roda Empat dan 11 Unit Roda Dua	107,371,200				125,000,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa dan peralatan kebersihan kantor		1 Paket	91,995,000				150,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli		41 Jenis	24,124,500				30,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan barang cetakan		2 Paket	14,127,400				19,500,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli		6 Jenis	1,375,500				4,500,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makan, minum dan snack yang tersedia		1571 porsi	20,938,000				25,900,000
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Koordinasi, konsultasi, informasi, pendidikan yang diikuti		12 bulan	175,000,000				200,000,000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa non PNS, terbayarnya iuran BPJS		2 Orang	-				-
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar honoraria		6 Paket	20,000,000				20,000,000
13	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Jumlah tenaga pengaman kantor		3 orang	120,000,000				160,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			58,000,000,000				58,340,000,000
1	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebelair kantor yang akan dibeli (paket)						1 Paket	300,000,000
2	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan (jenis)							40,000,000
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan mobil pintar perpustakaan		8 Jenis	410,000,000				410,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan							-
5	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun		1 Paket	57,590,000,000				57,590,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				21,450,000				21,450,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Harian ASN		33 stel	21,450,000			33 stel	21,450,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				-				80,000,000
1	Pengembangan Sumber Daya Pengelola								80,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		0	-				-
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah LKIP yang tepat waktu (dokumen)		0	-				-
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu (dokumen)		0	-				-
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen renja dan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu (dokumen)		0	-				-
	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan			1,903,581,361				2,191,679,400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan umum		1 Paket	150,000,000		Cascading		150,000,000
2	Penyediaan Bahan Pustaka Digital Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan umum		Koleksi bahan pustaka layanan digital	50,000,000		Cascading		50,000,000
3	Bukittinggi Library Fiesta	Terlaksananya lomba literasi, Terlaksananya gemar membaca dengan mendengar dongeng oleh siswaTK		3 Perlombaan	112,467,500		Cascading		112,467,500
4	Pembinaan Perpustakaan	Terselenggaranya pembinaan perpustakaan			45,649,900		Cascading		45,649,900
5	Pengadaan Koleksi Pustaka Binaan	Penambahan koleksi perpustakaan binaan					Musrem bang/Cascading		100,000,000
6	Lomba Perpustakaan Terbaik	Jumlah Perpustakaan yang mengikuti perlombaan		60 Perpustakaan	39,999,900		Cascading		40,000,000
7	Bimtek Tenaga Literasi	Jumlah Pengelola Perpustakaan		40 Orang	81,000,000		Cascading		81,000,000
8	Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar	Jumlah peserta bimtek untuk pemuda dan pelajar					Pokkir DPRD		
9	Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka	Terolahnya koleksi monograf perpustakaan yang siap dilayankan, Terawatnya koleksi agar siap dilayankan		Terolahnya koleksi monograf perpustakaan yang siap dilayankan	117,822,500		Cascading		125,000,000
10	Layanan Perpustakaan Keliling	Kunjungan pustaka keliling		195 kunjungan, 1 Mobil bus	942,644,711		Cascading		950,000,000
11	Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pemustaka yang disurvei		Jumlah pengunjung perpustakaan umum	79,999,600		Cascading		100,000,000
12	Seminar Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca		Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca	87,562,000		Cascading		87,562,000
13	Bedah Buku	Jumlah peserta					Cascading		
14	Pemeliharaan Bahan/Koleksi Bahan Pustaka	Jumlah koleksi monograf perpustakaan yang siap dilayankan kembali		2000 exemplar	26,843,250		Cascading		50,000,000
15	Penelusuran Naskah Kuno/ Koleksi Bahan Pustaka	Jumlah Naskah Kuno/ Koleksi Langka Pustaka					Cascading		60,000,000
16	Penelusuran Naskah Kuno/Koleksi Langka	Jumlah naskah kuno/koleksi langka		3 naskah kuno	59,877,000		Cascading		60,000,000
17	Peningkatan Sarana Rumah Baca TBM Mentari	Jumlah Koleksi Perpustakaan Binaan					Pokkir DPRP		
18	Pengembangan Sumber Daya Pengelola Perpustakaan	Jumlah Peserta					Cascading		70,000,000
19	Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Anak	Koleksi bahan pustaka layanan anak		1 Paket	50,000,000		Cascading		50,000,000
20	Bimtek Otomasi Perpustakaan			25 Orang	59,715,000		Cascading		60,000,000
	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN	Tingkat Tersedianya Data dan Informasi Perpustakaan			125,476,730				132,999,900
1	Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan	Langganan provider internet, Pemeliharaan dan pengembangan sistem, Pemeliharaan dan pengembangan website		3 Perpustakaan	67,999,900		Cascading		67,999,900
2	Alih Media Koleksi Perpustakaan	Jumlah koleksi perpustakaan yang dialih mediakan			19,999,700		Cascading		25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Pelaksanaan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka	Data stock opname koleksi perpustakaan/penyiangan		1 Paket	13,237,130		Cascading		15,000,000
4	Survey Tingkat Kepuasan Pemustaka	Data kepuasan bagi pengunjung		Data kepuasan bagi pemustaka	24,240,000		Cascading		25,000,000
	URUSAN KEARSIPAN				877,181,200				
	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan			-				85,000,000
1	Pembangunan/ Pemeliharaan Data Base Informasi Kearsipan	Jumlah terpeliharanya data base kearsipan					Cascading		45,000,000
2	Pemeliharaan Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah terpeliharanya data base SIKEDA kearsipan					Cascading		40,000,000
	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			375,714,200				1,015,010,000
1	Pengadaan dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah	Jumlah dokumen yang bernilai sejarah Daerah			75,391,000		Cascading		80,000,000
2	Pengadaan Jadwal Retensi Aktif (JRA) Persubstantif	Jumlah buku JRA Persubstantif		2 Buku	23,648,000		Cascading		25,000,000
3	Pengelolaan Arsip Elektronik (E-Arsip) SIKN JIKN	Jumlah Arsip elektronik		500	25,097,000		Cascading		25,000,000
4	Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Jumlah buku JRA Persubstantif					Cascading		
5	Lomba Arsip Bernilai Sejarah	Jumlah dokumen bernilai sejarah					Cascading		
6	Pengumpulan Data (Akuisisi) Statis	Jumlah dokumen arsip statis		3 SKPD	85,010,000		Cascading		85,010,000
7	Penyusunan Perwako sebagai Tindak Lanjut Amanat Perda tentang Kearsipan	Jumlah Perwako		3 Perwako	27,985,000		Cascading		30,000,000
8	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Laporan penataan arsip SKPD		28 SKPD	78,583,200		Cascading		110,000,000
9	Penyusunan Album Bukittinggi dalam khasanah kearsipan	Album Bukittinggi dalam Khasanah Kearsipan					Cascading		125,000,000
10	Penyusunan Album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi tokoh	Jumlah album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi tokoh					Cascading		80,000,000
11	Penyusunan Album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi peristiwa	Jumlah album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi peristiwa					Cascading		80,000,000
12	Penyusunan Album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi dokumen	Jumlah album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi dokumen					Cascading		60,000,000
13	Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	Jumlah peserta pelatihan SIKEDA Daerah		36 peserta	60,000,000		Cascading		70,000,000
14	Sosialisasi Pengelolaan Arsip SKPD	jumlah kepala SKPD yang mengikuti sosialisasi					Cascading		115,000,000
15	Bimbingan Teknis Kearsipan Bagi Pengurus Arsip SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Jumlah Pengelola Kearsipan Dinamis di SKPD					Cascading		100,000,000
16	Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan					Cascading		30,000,000
17	Semiloka Kearsipan	Jumlah Peserta yang mengikuti Semiloka					Cascading		-
	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan			-				60,000,000
1	Perawatan berkala arsip dinamis dan statis	Jumlah Arsip dinamis dan statis yang dirawat					Cascading		60,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi			501,467,000				530,000,000
1	Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai Arsip	Jumlah PERDA					Cascading		-
2	Promosi dan Pameran Arsip Statis	Jumlah pengunjung promosi dan pameran arsip statis		3 Kali	152,000,000		Cascading		100,000,000
3	Layanan Informasi Arsip Statis	Jumlah pengguna layanan		1 Jenis Layanan	67,187,000		Cascading		125,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Bertambahnya pengetahuan peserta sosialisasi					Cascading		-
5	Penelusuran Tokoh- Tokoh Pemerintahan Kota Bukittinggi	Jumlah lembaga, SOPD, Masyarakat yang memanfaatkan arsip terhimpunnya dokumen tokoh-tokoh					Cascading		95,000,000
6	Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah peserta Bimtek Kearsipan berbasis IT		30 orang	57,750,000		Cascading		60,000,000
7	Pemeliharaan Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah terpeliharanya data base kearsipan (SIKD)		1 Paket	224,530,000		Cascading		150,000,000
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				33,417,925,098				600,000,000
	URUSAN PARIWISATA				30,784,126,050				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,469,308,400	-	-		-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai 6000, materai 3000, buku cek, benda pos lainnya terbeli	Disparpora	12 bulan	1,500,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	12 bulan	Dilakukan Setiap Tahun
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)	Disparpora	36 rekening/12 bulan	645,500,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	36 rekening/12 bulan	Dilakukan Setiap Tahun
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda2 roda3, dan roda4 yang terpelihara	Disparpora	12 Bulan	150,560,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	12 bulan	Dilakukan Setiap Tahun
4	Jasa Kebersihan Kantor	Jasa cleaning service yang dibayarkan	Disparpora	12 Bulan	80,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	12 Bulan	Dilakukan Setiap Tahun
5	Penyediaan Alat Tulis kantor	jenis ATK terbeli	Disparpora	38 item	16,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	38 item	Dilakukan Setiap Tahun
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah barang penggandaan, jumlah barang cetakan	Disparpora	12 bulan, 5 item	21,340,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	12 bulan, 11 item	Dilakukan Setiap Tahun
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah peralatan listrik terbeli	Disparpora	8 item	3,159,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	10 item	Dilakukan Setiap Tahun
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumnya	Disparpora	100%	32,500,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	100%	Dilakukan Setiap Tahun
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yg terpelihara	Disparpora	24 unit	27,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	24 unit	Dilakukan Setiap Tahun
10	Jasa Keamanan Kantor	Jasa Keamanan yang dibayarkan	Disparpora	12 Bulan	143,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	12 Bulan	Dilakukan Setiap Tahun
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah pejabat pengadaan barang jasa (pphp, ppk, ppjb, ptk) yang dibayar	Disparpora	13 orang	71,973,400	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	8 orang	Dilakukan Setiap Tahun
12	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti	Disparpora	75%	276,776,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	75%	Dilakukan Setiap Tahun
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang representatif			35,000,000	-	-		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Disparpora	1 unit gedung	35,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	1 unit gedung	Dilakukan Setiap Tahun
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan			36,740,000				-
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu	Disparpora	2 dokumen	36,740,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	2 dokumen	Dilakukan Setiap Tahun
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2,633,799,048				
IV	Program Pembinaan Kepemudaan	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan			560,000,000				0
1	Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah anggota paskibraka yang terpilih dan terlatih jumlah upacara yang diselenggarakan	Disparpora	100 orang 3 Upacara	560,000,000	APDB	Dilakukan Setiap Tahun	105 orang	Dilakukan Setiap Tahun
V	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan			160,000,000				0
1	Pelatihan Kepemudaan	terlaksananya Pelatihan kepemimpinan kepemudaan	Disparpora	40 orang	80,000,000	APDB	Dilakukan Setiap Tahun	40 Orang	Dilakukan Setiap Tahun
2	Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya peningkatan mutu organisasi kepemudaan di kota Bukittinggi	Disparpora	40 orang	80,000,000	APDB	Dilakukan Setiap Tahun	40 Orang	Dilakukan Setiap Tahun
VI	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasarakatan olahraga			982,650,000				0
1	Fasilitas kejuaraan olahraga daerah dan nasional	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	Bukittinggi, Provinsi dan Nasional	50 Orang 10 kejuaraan	777,650,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun +pokir arnis, edison dan zuhamdi	50 Orang 10 kejuaraan	Dilakukan Setiap Tahun +pokir arnis, edison dan zuhamdi
2	Invitasi bola basket	Jumlah tim yang mengikuti perlombaan	Dispora	25 tim	100,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	25 tim	Dilakukan Setiap Tahun
3	Pelaksanaan / Pertandingan Olahraga Masyarakat (Car free day)	Jumlah olahraga masyarakat yang difasilitasi	Disparpora	pertandingan olahraga	105,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	Pertandingan Olahraga	Dilakukan Setiap Tahun
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai			931,149,048				0
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara	Disparpora	6 lapangan	611,149,048	APDB	Dilakukan Setiap Tahun	6 lapangan	Dilakukan Setiap Tahun
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	jumlah sarana yang diberikan	Disparpora	10 Paket	320,000,000	APBD	Musrenbang dan Pokir	10 Paket	Musrenbang dan Pokir
	Urusan Pilihan Pariwisata								
VIII	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan			1,056,677,042				600,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Promosi Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata yang diikuti Jenis Sarana promosi yang dikelola	Disparpora	8 Kali 3 Jenis	359,677,042	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	10 Kali	Dilakukan Setiap Tahun
2	Penyelenggaraan Even event Pariwisata	Jumlah event-event pariwisata yang difasilitasi	Disparpora	10 Kali	225,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	5 kali	Dilakukan Setiap Tahun
3	Penyelenggaraan dan Penampilan Tim Kesenian	Jumlah penampilan tim kesenian yang difasilitasi	Disparpora	30 Kali	187,000,000	APBD	pokir Syahril 50 juta	40 Kali	pokir Syahril 50 juta
4	Festival Gaduh Marandang	Jumlah peserta marandang	Disparpora	100 orang	150,000,000	APBD	pokir deddi fatria	10 pasang	pokir deddi fatria
5	Penyusunan data base kepariwisataan dan Ekraf	jumlah data Pelaku Wisata dan Ekraf	Disparpora	3 laporan/pertahun	50,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	74 Hotel	Dilakukan Setiap Tahun
6	Pembinaan Sadar Wisata	jumlah peserta pelatihan	Disparpora	40 orang	85,000,000	APBD		200 orang	-
IX	Program Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya kerjasama dengan Stakeholder			450,000,000				
1	Penyelenggaraan Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekraf yang dilaksanakan	Dalam dan luar Kota Bukittinggi	10 Kali	100,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	12 x	600,000,000
2	Penyelenggaraan Even event Ekonomi Kreatif	Jumlah Event Ekraf yang diselenggarakan	Disparpora	4 Event	350,000,000	APBD	Pokir Asril SE		
X	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata - Rata lama tinggal wisatawan			27,736,400,608				-
1	Pengelolaan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang dikelola	Disparpora	1 kawasan	1,891,462,160	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	1 kawasan	Dilakukan Setiap Tahun
2	Revitalisasi Taman Jam Gadang	kawasan jam Gadang yang di revitalisasi	Disparpora	1kawasan	980,000,000				
3	Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang	Luas kawasan Taman Panorama Lobang Jepang yang dipelihara	Disparpora	3,50 ha	621,691,508	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	1 kawasan	Dilakukan Setiap Tahun
4	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Jepang	Luas kawasan Taman Panorama Lobang Jepang	Disparpora	3,50 ha	950,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	12 bulan	Dilakukan Setiap Tahun
5	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata	Jumlah penggantian berobat pengunjung diobjek wisata yang dibayarkan	Disparpora	30 Orang	20,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	12 bulan	Dilakukan Setiap Tahun
6	Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok menjadi Kawasan Geopark/ Geosite Ranah Minang	Sarana dan Parasaran Kawasan	Disparpora	1 Kawasan	200,000,000	APBD	Rekomendasi Propinsi	1 Kawasan	Rekomendasi Propinsi
7	Pengembangan Destinasi Wisata	jumlah Sarana Destinasi	Disparpora	2 Wahana	105,000,000	APBD	Pokir deddi fatria, syahril		
8	Pengelolaan Objek Wisata Jenjang Seribu	Terpeliharanya Objek Wisata Jenjang Seribu	Disparpora	1 Kawasan	167,256,988	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	1 Kawasan	Dilakukan Setiap Tahun
9	Revitalisasi Kawasan Jam Gadang Zona II	DED, UKL/UPL,ANDALALIN	Disparpora	3 Dokumen	300,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	10 sarana	Dilakukan Setiap Tahun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Revitalisasi TMS-BK	Sarana dan prasarana TMSBK	Disparpora	1 kawasan	15,000,000,000	APBD	Prioritas	1 Zona	Prioritas
11	Revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjung	Terbangunya RANB	Disparpora	1 Gedung	1,400,000,000	APBD	Prioritas	1 Gedung	Prioritas
12	Penyusunan Studi Kelayakan alih fungsi Museum Zoologi	Dokumen	Disparpora	1 Dokumen	100,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	1 Dokumen	Dilakukan Setiap Tahun
13	Pemeliharaan dan Perawatan Flora dan Fauna	Jumlah satwa yang dirawat dan di pelihara	Disparpora	113 spesies	2,705,886,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	113 spesies	Dilakukan Setiap Tahun
14	Penambahan Koleksi Fauna dan Flora	Jenis Flora dan Fauna yang bertambah	Disparpora	6 Jenis	100,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	6 Jenis	Dilakukan Setiap Tahun
15	Jasa Kebersihan dan Pengamanan TMS-BK	Tenaga Kebersihan TMS-BK	Disparpora	1 Tahun	1,800,000,000	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	1 Tahun	Dilakukan Setiap Tahun
16	Pengelolaan dan Pelayanan TMS-BK	Luas Kawasan TMS-BK yang dikelola	Disparpora	7 ha	1,395,103,952	APBD	Dilakukan Setiap Tahun	7 ha	Dilakukan Setiap Tahun
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					10,066,276,738				5,883,962,260
URUSAN PERTANIAN					8,884,223,512				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	745,842,650			100%	1,076,962,260
	Penyediaan Jasa Surat	Materai 3000	Bukittinggi	534 buah	5,068,650	APBD		534 buah	6,000,000
	Menyurat	Materai 6000		550 buah				525 buah	
		Buku Cek		1 buah				1 buah	
		Kiriman Paket/Kilat Khusus		15 kali				15 kali	
	Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik	jumlah rekening telepon; Air dan listrik yang dibayarkan	Bukittinggi	24 rekening; 12 rekening; 72 rekening	49,900,000	APBD		24 rekening; 12 rekening; 72 rekening	55,990,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.Dinas /Operasional	jumlah kendaraan roda 2, 3 dan 4, yang dipelihara	Bukittinggi	51 unit roda 2, 5 unit roda 3 dan 8 unit roda 4	250,000,000	APBD		51 unit roda 2, 5 unit roda 3 dan 8 unit roda 4	284,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan kebersihan dan Bahan pembersih yang dibeli; iuran retribusi persampahan dan jasa cleaning service	Bukittinggi	11 item; 12 bulan; 12 bulan	210,000,000	APBD		12 bulan	250,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli	Bukittinggi	38 item	20,000,000	APBD		50 item	35,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak ; jumlah penggandaan surat dan dokumen	Bukittinggi	6 item cetak dan 45.020 lbr ftcppy	10,000,000	APBD		10 item, 40.000 lembar	23,500,000
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	Bukittinggi	10 item	2,500,000	APBD		10 item	4,472,260
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat; Snack rapat; makan dan minum lembur; snack tamu; makan tamu	Bukittinggi	100 bks;300 ktk;378 bks;200ktk;200 bks	11,000,000	APBD		100 bks;300 ktk;378 bks;200ktk; 200 bks	22,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi ke luar daerah	Bukittinggi	100%	145,374,000	APBD		100%	315,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah komputer y diperbaiki; Jml laptop yang diperbaiki; jml mesin tik yang diperbaiki; jml kamera yang diperbaiki; jumlah infokus yang di perbaiki; jh printer y diperbaiki; jlh TV y diperbaiki Jmlh AC y diperbaiki	Bukittinggi	3 unit;3 unt;1 unt;1 unt; 1 unt; 3 unt; 1 unt;1 unt	8,000,000	APBD		3 unit;3 unt;1 unt;1 unt; 3 unt; 1 unt;1 unt	11,000,000
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	jumlah PPK, PTK, P2HP dan PPBJ yang di bayarkan honoronya	Bukittinggi	10 paket	34,000,000	APBD		20 paket	70,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja		100%	15,000,000			100%	42,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pintu, jendela, lantai, saluran air dan taman yang diperbaiki , Luas dinding kantor yang di cat ulang	Bukittinggi	5 Paket, 300 m2	15,000,000	APBD		5 Paket, 300 m2	42,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Kinerja sesuai rencana kerja yang telah disusun		100%	92,650,000			100%	30,000,000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Dokumen rencana kerja dan keuangan	Bukittinggi	2 dokumen	20,150,000	APBD		2 dokumen	11,670,000
	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	Laporan data statistik pertanian dan informasi pertanian ; laporan data ubinan pangan, palawija dan hortikultura	Bukittinggi	12 laporan; 15 sampel	72,500,000	APBD		12 laporan; 15 sampel	30,000,000
	URUSAN PANGAN				219,154,950				
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita		2400 Kkal/kap/hr	86,553,500			2400 Kkal/kap/hr	110,500,000
				63 gr/kap/hr				63 gr/kap/hr	
	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi ketahanan pangan	Bukittinggi	1 rekomendasi	10,000,000	APBD		2 rekomen dasi	15,000,000
	Pemantauan dan Informasi Harga Pangan	jumlah laporan, jasa informasi media elektronik	Bukittinggi	12 laporan, 12 bulan	26,553,500	PAD		12 laporan, 12 bulan	37,000,000
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM	Bukittinggi	1 dokumen	10,000,000	APBD		1 dokumen	12,000,000
	Koodinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen SKPG	Bukittinggi	1 dokumen	10,000,000	APBD		1 dokumen	11,500,000
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jenis komoditi yang diuji	Bukittinggi	14 jenis	30,000,000	APBD		14 jenis	35,000,000
	Program Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan		85.20%	132,601,450			85%	144,500,000
	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu	Bukittinggi	1 dokumen	6,240,200	APBD		1 dokumen	6,500,000
	Percepatan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan (P2KP)	jumlah lomba yang diselenggarakan dan pameran yang diikuti	Bukittinggi	1 kali ; 1 kali; 2 kali	76,360,000	APBD		4 kali ; 2 kali	98,000,000
	Penunjang Event Daerah	Jumlah event yang diikuti	Bukittinggi	5 kali	50,001,250	APBD		5 kali	40,000,000
	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Peningkatan Produktivitas padi, palawija dan holtikultura		68 kwintal/ha; 2%; 2%	1,613,497,500	APBD		67 kwintal/ha; 2%; 2%	2,359,000,000
	Penyusunan draft ranperda LP2B	tersedianya dokumen draft ranperda, album peta dan kajian akademis	Bukittinggi	1 paket	150,000,000	APBD	UU No. 41 tahun 2009	2 dokumen	175,000,000
	Penangkaran Jabal Benih Padi	lahan pertanian yang ditanami benih berlabel	Bukittinggi	0,2 Ha	41,000,000	APBD		0,25 Ha	45,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura	Bukittinggi	2 paket	75,000,000	APBD	Kegiatan Tingkat Propinsi/ Nasional	1 kelompok	65,000,000
	Perbibitan tanaman hortikultura	Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan	Bukittinggi	25 jenis	30,000,000	APBD		25 jenis	33,000,000
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	jumlah lokasi pengendalian hama tikus dan ulat	Bukittinggi	24 kelurahan	27,060,000	APBD		3 kali	28,000,000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	laporan pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 laporan	45,000,000	APBD		12 bulan	40,000,000
	Pemberian bantuan Alat dan Mesin Pertanian	Tersedianya alat dan Mesin Pertanian yang akan diserahkan pada petani	Bukittinggi	Cultivator 2 unit; Trsher 3 unit; RMU 1 unit		APBD		5 unit	150,000,000
	Penunjang kegiatan UPSUS Tanaman Pertanian	laporan UPSUS LTT	Bukittinggi	12 laporan	42,000,000	APBD	Kegiatan nasional	12 laporan	40,000,000
	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian	Bukittinggi	3 paket	837,601,000	PBD/APBN		4 paket	1,500,000,000
	Pemeliharaan Infrastuktur Srana dan Prasarana Pertanian	Jumlah saran dan prasarana pertanian yang diperbaiki dan perbaikan embung	Bukittinggi	1 paket	285,000,000	APBD		2 paket	200,000,000
	Demplot Budidaya Cabe	Terlaksananya demplot Budidaya Cabe	Bukittinggi	1,25 Ha	21,735,000	APBD		1,25 Ha	23,000,000
	Kursus dan Demplot Teknologi Budidaya Bawang Merah	Terlaksananya kursus Teknologi Bawang merah; Terlaksananya demplot/lahan percontohan bawang merah	Bukittinggi	1 kali; 2 paket	59,101,500	APBD		1 kali; 2 paket	60,000,000
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan pendapatan petani		5%	75,005,000			25%	115,000,000
	Pembinaan dan Penilaian ketenagaan dan kelembagaan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya	Bukittinggi	10 poktan	75,005,000	APBD		7 kelompok; 1 kelompok, 2 kelompok	115,000,000
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		100%	249,672,562			100%	249,000,000
	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)	Terlaksananya penyusunan dokumen program Kecamatan, Kota dan RKTP	Bukittinggi	1 dokumen	16,017,550	APBD		1 dokumen	20,000,000
	Pelaksanaan training dan review Penyuluh Pertanian dan Penas Tani Tingkat Nasional	Jumlah training penyuluh pertanian lapangan yang terlaksana; jumlah Temu Teknis Petani dan Pertemuan KTNA terlaksana	Bukittinggi	24 kali; 2 kali; 2 kali	172,040,000	APBD	Kegiatan Tingkat Propinsi	24 kali; 2 kali	140,000,000
	Penyelenggaraan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Model	Fasilitasi Kebutuhan BPP, Media percontohan tanaman , gaji pegawai kontrak	Bukittinggi	12 bulan	61,615,012	APBD		12 bulan	89,000,000
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi		15 kelompok	0			15 kelompok	50,000,000
	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok UP3HP	Jumlah Peserta pelatihan Kelompok UP3HP	Bukittinggi	30 org		APBD		25 orang x 4 hari	50,000,000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis		85%	289,146,450			85%	127,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	Penangkapan anjing liar ; jumlah peserta pelatihan tentang zoonosis	Bukittinggi	1 kali; 50 orang	76,179,700	APBD		1 kali; 50 orang	76,000,000
	Pengelolaan Puskesmas	Pelayanan kesehatan di UPTD Poskeswan; vaksinasi rabies di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan kesehatan hewan besar di Kota Bukittinggi; Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan Hewan Kurban Kota bukittinggi	Bukittinggi	2750 ekor; 1500 ekor; 285 ekor; 40 ekor; 950 ekor	174,903,500	APBD		2750 ekor; 1500 ekor; 285 ekor; 50 ekor; 950 ekor	3,000,000
	Pengawasan pemotongan hewan kurban di mesjid/mushalla	Jumlah pelaksanaan pelatihan pemotongan hewan kurban	Bukittinggi	1 kali	18,767,250	APBD		1 kali	23,000,000
	Pengawasan Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan	Bukittinggi	5 sampel	19,296,000	APBD		5 sampel	25,000,000
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya hasil produksi peternakan unggulan daerah		2%	147,041,750			2%	105,000,000
	Pengelolaan Kuda Bibit pejantan	Jumlah Kuda Bibit Pejantan yang dipelihara	Bukittinggi	1 ekor	112,041,750	APBD		2 ekor	200,000,000
	Pengadaan Kuda Bibit Pejantan	Jumlah Kuda Bibit Pejantan yang terbeli	Bukittinggi	1 ekor		APBD		1 ekor	55,000,000
	Penunjang Kegiatan SIKOMANDAN	Laporan IB,PKB,Lahir	Bukittinggi	12 laporan	35,000,000	APBD	Kegiatan nasional	12 laporan	50,000,000
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Bukittinggi	2%	5,656,367,600	APBD		10%	900,000,000
	Pengelolaan Rumah Potong hewan (RPH)	jumlah pemotongan sapi dan kerbau	Bukittinggi	6175 ekor	223,264,700	APBD		6300 ekor	265,000,000
	Lanjutan Relokasi Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi	RPH yang terbangun ; Pengolahan air limbah RPH terbangun ; Dokumen perencanaan pembangunan biogas	Bukittinggi	1 unit; 1 unit; 1 dokumen	5,301,296,000	APBD	Kegiatan strategis kota	1 unit	500,000,000
	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	jumlah acara promosi peternakan tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diikuti	Bukittinggi	1 kali	131,806,900	APBD	Kegiatan Tingkat Propinsi	1 kali	135,000,000
	-	-							
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				962,898,276				
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	jumlah Produksi Ikan		355 ton	778,445,251			355 ton	385,000,000
	Penyelenggaraan Balai benih Ikan Hias (BBIH)	jumlah produksi benih ikan	Bukittinggi	447.350 ekor	314,556,151	APBD		450.000 ekor	275,000,000
	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (sisa Dana DAK KP)	pembangunan/rehab kolam, pengadaan induk lele, Nila dan Benih lele, pakan, peningkatan SDM kelompok	Bukittinggi	1 pkt, 30 psg, 250 psg 10000 ekor, 1500 kg, 2 kali	344,878,500	sisa DAK			
	Peningkatan Produksi Ikan air tawar (termasuk Karang Taruna di pulau anak airusulan musrenbang)	Pengadaan benih/anak ikan dan pakan	Bukittinggi	50.000 ekor, 2.200 kg	119,010,600	APBD		50.000 ekor, 2.200 kg	110,000,000
	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan		2%	184,453,025	APBD		10%	190,000,000
	Promosi dan Lomba Gemarikan	Promosi, Mengadakan lomba masak, lomba jingle, Mengikuti lomba masak Tk. Prov dan Nasional	Bukittinggi	1 kali, 5 jenis lomba	184,453,025	APBD	Kegiatan Tingkat Propinsi	1 kali, 6 jenis lomba	190,000,000
	SEKRETARIAT DAERAH				41,007,032,934				47,884,710,527
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				41,007,032,934				
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran			5,196,701,369				5,956,371,506
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peranko, materai dan benda pos	SETDA	4 jenis	30,000,000	APBD		4 jenis	33,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, listrik dan telepon	SETDA	12 bulan	400,000,000	APBD		12 bulan	440,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dians/ operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	SETDA	roda 2, 4 daan 6	1,588,911,821	APBD		roda 2, 4 daan 6	1,747,803,003
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	SETDA	12 bulan	250,000,000	APBD		12 bulan	275,000,000
5	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	SETDA	12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	165,000,000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	SETDA	2 jenis	275,000,000	APBD		2 jenis	302,500,000
7	Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	alat listrik dan elektronik	SETDA	12 bulan	100,000,000	APBD		12 bulan	110,000,000
8	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum rapat /pertemuan/diklat sesuai kebutuhan	SETDA	12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	165,000,000
9	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi	Koordinasi , konsultasi, sosialisasi , dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi	SETDA	12 bulan	1,639,289,548	APBD		12 bulan	1,803,218,503
10	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kerja terpelihara	SETDA	12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	165,000,000
11	Pengembangan pelayanan kesehatan Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Medical chek up KDH dan WKDH berserta keluarga	SETDA	8 orang	38,500,000	APBD		8 orang	42,350,000
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya berba-gai sumber informasi	SETDA	4 koran Nasional & 10 majalah	75,000,000	DAU	-	4 koran Nasional & 10 majalah	82,500,000
13	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	Dokumentasi kegiatan Pemko	SETDA	1200 foto kerjasama 1 radio swasta dan 2 TV	350,000,000	APBD		1200 foto kerjasama 1 radio swasta dan 2 TV	625,000,000
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur			10,230,500,000				11,253,550,000
14	Pengadaan kendaraan dinas	Kendaraan dinas untuk operasional	SETDA	6Unit roda empat	3,300,000,000	APBD		3Unit roda empat	3,630,000,000
15	Pengadaan peralatan rumah dinas/ jabatan	Peralatan rumah dinas / jabatan	SETDA	12 bulan	100,000,000	APBD		12 bulan	110,000,000
16	Pengadaan peralatan kantor	Peralatan kantor	SETDA	12 bulan	4,268,000,000	APBD		12 bulan	4,694,800,000
17	Pengadaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	SETDA	12 bulan	200,000,000	APBD		12 bulan	220,000,000
18	Pengadaan mobil	Mebeleur	SETDA	12 bulan	77,500,000	APBD		12 bulan	85,250,000
19	pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas/ jabatan	Rumah dinas terpelihara secara rutin	SETDA	1 Tahun	549,000,000	APBD		1 Tahun	603,900,000
20	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor	Gedung kantor terpelihara secara rutin	SETDA	1 Tahun	1,214,000,000	APBD		1 Tahun	1,335,400,000
21	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah dinas/ jabatan	Perlengkapan rumah dinas / jabatan terpelihara secara rutin	SETDA	2 jenis	22,000,000	APBD		2 jenis	24,200,000
22	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Gedung kantor terpelihara secara rutin	SETDA	2 unit bangunan	500,000,000	APBD		2 unit bangunan	550,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut				-			-
23	Pengadaan pakaian dinas besertaperengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia (stel)	SETDA	150 stel	-	APBD		150 stel	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu			171,437,000				119,780,700
24	Penyusunan Laporan keuangan	Laporan keuangan	SETDA	2 laporan	10,000,000	APBD		2 laporan	11,000,000
25	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Laporan rencana kerja Sekretariat Daerah	SETDA	5 laporan	38,519,000	APBD		5 laporan	42,370,900
26	Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan pengelolaan keuangan	SETDA	12 bulan	14,918,000	APBD		12 bulan	16,409,800
27	Penyusunan LKIP Kota Bukittinggi	Buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pPemerintah Kota Bukittinggi 2020	SETDA	30 buku	108,000,000	APBD		30 buku	50,000,000
	Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH			12,430,452,110				13,673,497,321
28	Penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	Uang lembur penunjang keprotokolan dan pantap agenda [pim]inan	SETDA	48 orang	137,500,000	APBD		48 orang	151,250,000
29	Pelaksanaan acara dan upacara nasional dan kedaerahan	Uang lembur pelaksanaan upacara	SETDA	10 orang	400,000,000	APBD		10 orang	440,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30	Penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah	Penerimaan tamu pemerintah daerah	SETDA	12 bulan	1,600,000,000	APBD		12 bulan	1,760,000,000
31	Penunjang operasional KDH	Pelayanan kedinasan KDH	SETDA	12 bulan	3,187,000,000	APBD		12 bulan	3,505,700,000
32	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Dinas Walikota	Sarana dan prasarana rumah dinas wako	SETDA	jenis	4,400,000,000	APBD		jenis	4,840,000,000
33	Penunjang operasional Wakil KDH	Pelayanan kedinasan WKDHD	SETDA	12 bulan	1,975,000,000	APBD		12 bulan	2,172,500,000
34	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Jumlah staf penunjang operasional pimpinan	SETDA	50 orang	730,952,110	APBD		50 orang	804,047,321
35	Penyelenggaraan kegiatan hari jadi kota Bukittinggi	Sarana dan prasarana yang disediakan	SETDA	1 paket	-	APBD		1 paket	-
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah		0	100,000,000				151,000,000
36	Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah lainnya	jumlah raker/rakor	SETDA	5 kali	70,000,000	APBD		5 kali	97,000,000
37	Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah	jumlah MoU sosialisasi dan laporan monev	SETDA	3 MoU	30,000,000	APBD		3 MoU	54,000,000
	Program Penataan peraturan Perundang - Undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan			529,750,000				643,940,000
38	Penanganan perkara-perkara pemda	Jumlah sidang perkara yg ditangani	SETDA	50 kali	180,000,000	APBD		50 kali	198,000,000
39	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	SETDA	150 orang	30,000,000	APBD		150 orang	33,000,000
40	Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum	Jumlah dokumen produk hukum yang tersedia	SETDA	3 jenis dokumen	42,500,000	APBD		3 jenis dokumen	46,750,000
41	Penelitian dan evaluasi perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn Pihak ketiga/masyarakat	Jumlah Perjanjian yang diteliti	SETDA	30 perjanjian	-	APBD		30 perjanjian	-
42	Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan	SETDA	35 produk hukum	150,000,000	APBD		35 produk hukum	165,000,000
43	Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia	Laporan aksi nasional hak azazi manusia di Kota Bukittinggi	SETDA	4 laporan ANHAM	17,250,000	APBD		4 laporan ANHAM	18,975,000
44	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah dokumen hukum yang dipublikasikan di Web JDIIH	SETDA	50 peraturan	30,000,000	APBD		50 peraturan	33,000,000
45	Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum	Jumlah peserta sosialisasi kelurahan dan keluarga sadar hukum	SETDA	150 orang	30,000,000	APBD		150 orang	33,000,000
46	Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya	Buku lembaran daerah dan buku Berita daerah	SETDA	180 + 180 buku	50,000,000	APBD		180 + 180 buku	55,000,000
47	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang - undangan	SETDA	1 laporan	-	APBD		1 laporan	61,215,000
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur			235,000,000				835,000,000
48	Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Epdeskel dan Pendaaygunaan Profil Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	SETDA	24 kel	25,000,000	APBD		24 kel	55,000,000
49	Penilaian Kelurahan Berprestasi	Jumlah kelurahan yang dinilai	SETDA	3 kelurahan tingkat kota, 1 kelurahan tingkat propinsi	100,000,000	APBD		3 kelurahan tingkat kota, 1 kelurahan tingkat propinsi	195,000,000
50	Penilaian Kompetensi Lurah	Jumlah lurah yang dinilai	SETDA	3 kelurahan tingkat kota, 1 kelurahan tingkat propinsi	50,000,000	APBD		3 kelurahan tingkat kota, 1 kelurahan tingkat propinsi	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
51	Penilaian Kompetensi Camat	Jumlah camat yang dinilai	SETDA	3 camat untuk tingkat kota	30,000,000	APBD		3 camat untuk tingkat kota	60,000,000
52	Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan	Peserta Bimtek dan studi lapangan bagi aparatur bidang administrasi pemerintahan	SETDA	35 orang	-	APBD		35 orang	310,000,000
53	Monev dan pembinaan pelaksanaan PATEN di Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan PATEN di Kecamatan	SETDA	1 laporan	30,000,000	APBD		1 laporan	65,000,000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase peningkatan pelayanan publik			195,000,000				362,000,000
54	Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan Reformasi birokrasi	SETDA	1 dokumen	45,000,000	APBD		1 dokumen	70,000,000
55	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Pemenang inovasi pelayanan publik tingkat kota	SETDA	6 proposal	45,000,000	APBD		8 proposal	72,000,000
56	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan IKM tingkat kota	SETDA	1 dokumen	30,000,000	APBD		1 dokumen	50,000,000
57	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah laporan SPM dan Monev	SETDA	1 laporan	75,000,000	APBD		1 laporan	95,000,000
58	Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Persentase proses bisnis yang disusun	SETDA	100%	-	APBD		100%	75,000,000
	Program Peningkatan peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan			1,985,000,000				2,140,000,000
59	Penunjang Pers & Kehumasan	Terlaksananya kegiatan jumpa pers dan kegiatan kehumasan	SETDA	8 kali jumpers & 2 kegtn studi kehumasan	120,000,000	DAU	Adanya biaya kegiatan studi banding Wartawan	8 kali jumpers & 2 kegtn studi kehumasan	132,000,000
60	Pembuatan Majalah Pemko	Jumlah majalah pemko Bukittinggi yang terbit	SETDA	2 terbitan	250,000,000	APBD		2 terbitan	275,000,000
61	Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota	Jumlah dialog interaktif selamat pagi Walikota	SETDA	48 Kali dialog	40,000,000	DAU	-	48 Kali dialog	44,000,000
62	Penyebaran Informasi Pembangunan daerah melalui media cetak dan online	Jumlah media cetak harian , mingguan dan online	SETDA	7 media ctk harian, 15 media mingguan & 5 media online	935,000,000	DAU	-	7 media ctk harian, 15 media mingguan & 5 media online	985,000,000
63	Promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi	Kegiatan srategis kota yang dimuat dalam profil daerah	SETDA	150 berita	600,000,000	APBD		150 berita	660,000,000
64	Pengumpulan data informasi,kliping,penelaah berita	Data dan kliping	SETDA	12 bulan	40,000,000	PBD		12 bulan	44,000,000
65	Bimbingan Teknis Kehumasan	Jumlah peserta Bimtek	SETDA	25 orang	0	APBD		25 orang	-
66	Bimbingan Teknis Jurnalistik bagi wartawan	Jumlah peserta Bimtek	SETDA	30 orang	0	APBD		30 orang	-
	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah usulan bantuan kemasyarakatan yang direalisasikan			7,584,192,455				8,669,571,000
67	Pemberian Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Guru MDTA,TKQ,TPQ,TPSA,Pondok Qur'an,Ponpes, Imam Masjid, Garin Masjid dan Mushala	Jumlah penerima bantuan tunjangan operasional guru dan garin	SETDA	610 x 12 bulan	3,950,000,000	DAU	Kesra	610 x 12 bulan	4,451,000,000
68	Wirid Bulanan dan Halal bi Halal	Jumlah Wirid Bulanan Korpri dan Halal bi Halal	SETDA	36 x	31,351,455	DAU	Kesra	36 x	49,580,000
69	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jama'ah Haji Kota Bukittinggi	Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan	SETDA	300 orang	224,500,000	DAU	Kesra	300 orang	350,000,000
70	Lomba DDS Kota Bukittinggi	Utusan DDS dari Kota Bukittinggi	SETDA	1 lembaga	73,000,000	DAU	Kesra	1 lembaga	850,000,000
71	Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan	Jumlah Mesjid dan Musholla yang dikunjungi	SETDA	50 Mesjid dan 110 Mushalla	1,336,501,000	DAU	Kesra	50 Mesjid dan 110 Mushalla	1,447,351,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
72	Pengiriman Peserta Lomba dan Peninjauan Lomba TK. Propinsi dan Nasional	Jumlah kafilah utusan kota Bukittinggi ke tingkat Propinsi	SETDA	60 kafilah	30,000,000	DAU	Kesra	60 kafilah	49,000,000
73	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Al- Qur'an	Jumlah MDTA dan TPQ yang dibantu	SETDA	70	198,840,000	DAU	Kesra	70	248,000,000
74	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hibah	Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial	SETDA	40 lembaga	15,000,000	DAU	Kesra	40 lembaga	15,000,000
75	MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah kafilah ke MTQ TK Propinsi Sumbar	SETDA	60 kafilah	1,400,000,000		Kesra		-
76	MTQ Tingkat Kota Bukittinggi	Jumlah peserta MTQ ke Tingkat Kota Bukittinggi	SETDA	60 kafilah	-	DAU	Kesra	60 kafilah	700,000,000
77	Pelatihan Guru MDTA, TPQ, TKQ, TPSQ, PQ, dan Ponpes	Gurubyang berkompeten	SETDA	100 orang	40,000,000	DAU	Kesra	100 orang	59,640,000
78	Tabligh Akbar	Terlaksananya Tabligh Akbar	SETDA	1 X	150,000,000	DAU	Kesra	1 X	310,000,000
79	Lomba Penyelenggaraan Jenazah	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba penyelenggaraan jenazah	SETDA	24 kelompok	50,000,000	DAU	Kesra	24 kelompok	50,000,000
80	Pendidikan dan Pelatihan Imam / Khatib	Tercapainya pembinaan dan pelatihan Imam / Khatib	SETDA	50 orang	85,000,000	APBD	Kesra	50 orang	90,000,000
	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian			130,000,000				460,000,000
81	Koordinasi BidangEkonomi , Failitasi TPKAD dan FPED, Pembinaan dan Pengawasan LKM	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian	SETDA	4 Rekomendasi	100,000,000	APBD	Penggabungan 4 keg	4 rekomendasi	325,000,000
82	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD	Laporan monitoring dan pembinaan BUMD	SETDA	2 laporan	30,000,000	APBD	-	2 laporan	70,000,000
83	Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan	Rekomendasi pengelolaan CSR Kota Bukittinggi	SETDA	2 rekomendasi	-	APBD		2 rekomendasi	65,000,000
	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah			155,000,000				278,000,000
84	Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah	SETDA	8 rekomendasi	75,000,000	APBD	-	8 rekomendasi	165,000,000
85	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monitoring dan evaluasi pengawasan dan pembinaan energi dan sumber daya mineral	SETDA	2 laporan	30,000,000	APBD	-	2 laporan	33,000,000
86	Pendampingan dan Dukungan Promosi Produk Daerah	Jumlah promosi produk daerah	SETDA	1 kali	50,000,000	APBD	Pendampingan pimpinan daerah pada kegiatan pameran luar negeri/ dalam negeri	1 kali	80,000,000
	Program : Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah			110,000,000				53,000,000
87	Evaluasi kelembagaan dan tisi perangkat daerah	Perda organisasi perangkat daerah sesuai hasil evaluasi	SETDA	1 dokumen	60,000,000	APBD		-	-
88	Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai hasil evaluasi	Perwako tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	SETDA	2 dokumen	50,000,000	APBD		-	-
89	Moniroting dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah SKPD di lingkungan kota bukittinggi	Laporan	SETDA	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	53,000,000
	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan			Rp 1,369,000,000				Rp 2,485,000,000
90	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal	Laporan program belanja modal	SETDA	28 SKPD	Rp 30,000,000	APBD	-	28 SKPD	100,000,000
91	Tim Pendampingan pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi	Proses pembangunan yang didampingi	SETDA	28 SKPD	Rp 125,000,000	APBD	-	28 SKPD	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
92	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan	SETDA	12 laporan	Rp 60,000,000	APBD	-	12 laporan	125,000,000
93	Pengembangan Kompetensi Pegawai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pegawai yang memiliki kompetensi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	SETDA	1 Laporan	Rp 50,000,000	APBD		1 Laporan	100,000,000
94	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Paket Barang dan jasa Pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD dalam satu tahun	SETDA	120 Paket	Rp 700,000,000	APBD		120 Paket	1,000,000,000
95	Asistensi Penyusunan RUP, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah asistensi dan konsultasi penyusunan RUP, pelaksanaan barang/jasa SKPD dalam satu tahun	SETDA	28 SKPD	Rp 74,000,000	APBD		28 SKPD	100,000,000
96	Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	SETDA	1 Kegiatan	Rp 60,000,000	APBD		1 Kegiatan	170,000,000
97	Internalisasi dan Desiminasi Kode Etik Pengelolaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Internalisasi dan Desiminasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	SETDA	1 Kegiatan	Rp 40,000,000	APBD		1 Kegiatan	80,000,000
98	Penyusunan E-Katalog Lokal	Tersusunnya Katalog Lokal	SETDA	1 Katalog	Rp 30,000,000	APBD		1 Katalog	60,000,000
99	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE dalam satu tahun	SETDA	120 Paket	Rp 200,000,000	APBD		120 Paket	500,000,000
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Peningkatan capaian kinerja daerah			205,000,000				540,000,000
100	Penyusunan LPPD	LPPD Kota Bukittinggi	SETDA	7 Buku	30,000,000	APBD		7 Buku	80,000,000
101	Penunjang Penyusunan LKPJ	LKPJ Walikota Bukittinggi	SETDA	45 Buku	50,000,000	APBD		45 Buku	90,000,000
102	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Laporan EKPPD	SETDA	1 Laporan	30,000,000	APBD		1 Laporan	65,000,000
103	Penunjang Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Laporan Sekretariat HJK Bukittinggi	SETDA	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	175,000,000
104	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Unsur rupa bumi yang akan diusulkan untuk dibakukan	SETDA	1 dok	65,000,000	APBD		1 dok	65,000,000
105	Rapat Koordinasi Pemerintah Kota / Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya rapat koordinasi pemko/kec/kel	SETDA	2 kali	30,000,000	APBD		2 kali	65,000,000
	Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur			240,000,000				264,000,000
106	Penyusunan anjab dan ABK	Perwako anjab ABK sesuai hasil evaluasi perangkat daerah	SETDA	1 SKPD	75,000,000	APBD		2 SKPD	82,500,000
107	Penyusunan evaluasi jabatan	Perwako Evjab dan peserta yang telah mengikuti Bimtek Evjab	SETDA	1 dokumen	75,000,000	APBD		1 dok	82,500,000
108	Penyusunan standar kompetensi teknis	Perwako SKJ dan peserta yang mengikuti Bimtek	SETDA	1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dok	55,000,000
109	Evaluasi penyusunan standar kompetensi Manajerial	Perwako	SETDA	1 dokumen	40,000,000	APBD		1 dok	44,000,000
	Program : Penegasan Batas Wilayah	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur			140,000,000				160,000,000
110	Penegasan Batas Wilayah Kecamatan / kelurahan dan pemetaan Wilayah	Berita acara batas kecamatan dan kelurahan	SETDA	2 berita acara	140,000,000	APBD		2 berita acara	160,000,000
	BELANJA MUSRENBANG				230,000,000.00				
1	Renovasi atap dan kubah mesjid baitussalam				200,000,000				
2	Bantuan sound system Mushalla Al Firdaus				30,000,000.00				
	POKIR				265,811,610,367				
1	Pengadaan Karpet Masjid Jami' Tarok				67,500,000				
2	Pengadaan Karpet Masjid Mubaraq Stasiun				67,500,000				
3	Pengadaan Karpet Masjid Nurul Haq Kampung Cina				67,500,000				
4	Pengadaan Karpet Masjid Al Abrar Ahmad Moechtar				67,500,000				
5	Pengadaan Karpet Masjid Nur Iman Bukit Apit				67,500,000				
6	Pengadaan Karpet Mushalla Al Ihsan Sumarapak				30,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Pengadaan Karpet Mushalla Aqabah Tarok Dipo				67,500,000				
8	Pengadaan Karpet Masjid Darussalam Gurun Panjang				67,500,000				
9	Pengadaan Karpet Masjid Darul Ikhlas Jl. Pemuda				67,500,000				
10	Pengadaan Karpet Mushalla Al Hidayah Muslimin Kayu Kubu				30,000,000				
11	Pembangunan Mushalla Ridhatullah Parak Tinggi				150,000,000				
12	Dana operasional MDA				150,000,000				
13	Operasional MDA Pakan Kurai				50,000,000				
14	Pembuatan Kanopi untuk Masjid Al Mutathahharin Baruah Pulai				120,000,000				
15	Pengadaan Tenda Serba Guna TPQ AL Mutathahirin				100,000,000				
16	Hibah untuk Masjid Tengah Jua				300,000,000				
17	Hibah untuk Mushalla Al Nashir Tengah Jua				100,000,000				
18	Pengadaan Sound system masjid Jami' Birugo				50,000,000				
19	Renovasi Mushalla Inyik Jangguik				50,000,000				
20	Pengadaan meja dan kursi untuk MDA				40,000,000				
21	Bantuan untuk rumah Tahfiz Al_Wustha Sanjai				200,000,000				
22	rehab dan mobiler MDTA Taqwa II Asrama Kodim				100,000,000				
23	rehab dan mobiler MDTA Taqwa III Asrama Kodim				100,000,000				
24	Perbaikan/renovasi Mushalla H. Burhan				50,000,000				
25	Pelatihan Remaja Masjid Se Kota Bukittinggi				80,000,000				
26	Pelatihan Mubaligh se Kota Bukittinggi				80,000,000				
27	Hibah untuk pembangunan Masjid Jihad				100,000,000				
28	Hibah untuk pembangunan Mushalla Burhan				75,000,000				
29	Pembinaan Remaja Masjid dan Mushalla Se Kec. Guguk Panjang				60,000,000				
30	Bantuan Operasional BKMT Kec. Guguk Panjang				50,000,000				
31	Rehab Tempat Wudhu' Mushalla Babussalam				50,000,000				
32	Rehab Tempat Wudhu' Mushalla Al Ihsan				50,000,000				
33	Bantuan untuk Masjid Tanah Jua				100,000,000				
34	Bantuan pembangunan tempat berwudhu Masjid Gantiang				400,000,000				
35	Lanjutan pembangunan Mushalla Baiturrahim Banto Darano				50,000,000				
36	Pelatihan menejemen Masjid / Mushalla				100,000,000				
37	Bantuan kegiatan Mushalla Al-Muchlisin Garegeh				80,000,000				
38	Masjid Baitussalam				160,000,000				
39	FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) Kota Bukittinggi				110,000,000				
40	Majlis Taklim Masjid Jami' Aur Kuning				31,000,000				
41	TPQ Al Ikhlas Birugo puhun				106,025,000				
42	Masjid Tengah Jua				100,000,000				
43	Pembangunan pekarangan Masjid Jami' Birugo				500,000,000				
44	Rehab mushalla H. Burhan Birugo batas kota				150,000,000				
45	Masjid Jihad Tengah Jua				100,000,000				
46	Pelatihn Da'1 dan Mubaligh				50,000,000				
47	Renovasi Mushalla Al Ijtihad				100,000,000				
48	Renovasi TPQ Ihsan				200,000,000				
49	Penambahan Lokal MDTA sawah Paduan				200,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
50	Pembangunan WC dan Gapura				100,000,000				
51	Mushalla An Nur				50,000,000				
52	Mushalla				50,000,000				
53	Masjid Al Ikhwan Pintu Kabun				35,000,000				
54	Pengadaan karpet Mushalla Taufik Koto Dalam				50,000,000				
55	Pengadaan sarana dan prasarana MDA di Mushalla Taufik				50,000,000				
56	Bantuan untuk tahfiz Al-Quran Saroyo				50,000,000				
57	Bantuan untuk kegiatan Masjid Jamiak mandiingin				100,000,000				
58	Bantuan kegiatan karang taruna dan remaja Masjid				26,000,000				
59	Perlengkapan RIM MDA				15,000,000				
60	Rehab Mushalla Nur Hidayah Daujuang Koto Selayan				75,000,000				
61	Hibah Rehab Mushalla MAN 1 Bukittinggi				50,000,000				
62	Rehab Mushalla Mukhlisin Balai-Balai Pulau				50,000,000				
63	Bantuan Pakaian Sholat BKMT Kelurahan Garegeh				40,000,000				
64	Lanjutan pembangunan MDA Mushalla Nurul Hidayah				150,000,000				
65	Renovasi Masjid Al Ihsan				200,000,000				
66	Mushalla Al Wadi Ngarai				200,000,000				
67	Perbaikan Kubah untuk lamsering				160,000,000				
68	Pengadaan tikar mushala				160,000,000				
69	Bantuan baju seragam Badan Kontak Taklim....				20,000,000				
70	Pembangunan Tempat Wudhu Mushala Al - Ihsan				150,000,000				
71	Bantuan pembangunan Mesjid di Gurun Panjang				200,000,000				
	SEKRETARIAT DPRD				19,823,500,230	-	-		21,680,850,253
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				19,823,500,230				
A	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Sekr. DPR	100	5,179,771,025			100	5,671,748,128
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Buku cek, jumlah materai 3000, jumlah materai 6000	Sekr. DPR	Buku cek 5 buah, Materai 3000 200 lembar, materai 6000 600 lembar, perangko 200 sheet	3,999,000	DAU		Buku cek 5 buah, Materai 3000 200 lembar, materai 6000 600 lembar, perangko 200 sheet	4,398,900
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon,air, listrik dan TV kabel	Sekr. DPR	7 item rekening	260,000,000	DAU		7 item rekening	260,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang terpelihara	Sekr. DPR	22 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2	652,303,900	DAU		22 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2	717,534,290
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor, jumlah peralatan kebersihan	Sekr. DPR	Jasa kebersihan kantor 12 bulan, peralatan kebersihan 5 paket	210,215,660	DAU		Jasa kebersihan kantor 12 bulan, peralatan kebersihan 5 paket	231,237,226
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Sekr. DPR	50 item	16,000,000	DAU		50 item	17,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya belanja fotokopi, jumlah item barang cetakan	Sekr. DPR	Jumlah bulan tersedianya belanja fotokopi selama 12 bulan, jumlah item barang cetakan sebanyak 12 item	38,500,000	DAU		Jumlah bulan tersedianya belanja fotokopi selama 12 bulan, jumlah item barang cetakan sebanyak 12 item	42,350,000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik	Sekr. DPR	13 item	15,000,000	DAU		13 item	16,500,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan tersedianya makan minum lembur pegawai	Sekr. DPR	12 bulan	20,000,000			12 bulan	22,000,000
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah paket perjalanan dinas	Sekr. DPR	3 paket	2,733,948,565	DAU		3 paket	3,007,343,422
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah bulan tersedianya upah kerja jasa pengamanan kantor	Sekr. DPR	12 bulan	200,000,000	DAU		12 bulan	220,000,000
12	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah paket tersedianya Honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Sekr. DPR	50 paket	15,000,000	DAU		50 paket	16,500,000
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah item surat kabar, majalah dan buku bacaan tersedia	Sekr. DPR	15 item	400,000,000	DAU		15 item	440,000,000
13	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Jumlah bulan terfasilitasinya penerimaan tamu dan kunjungan ke daerah di luar kota Bukittinggi	Sekr. DPR	12 bulan	552,303,900	DAU		12 bulan	607,534,290
14	Pengembangan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	Sekr. DPR	25 orang	62,500,000	DAU		25 orang	68,750,000
B	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Sekr. DPR	100%	834,780,000			100%	819,258,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Sekr. DPR	2 unit	90,000,000				
2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan	Sekr. DPR	12 paket	177,780,000	DAU		12 paket	195,558,000
3	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan	Sekr. DPR	3 paket	40,000,000	DAU		3 paket	44,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor	Sekr. DPR	12 bulan	135,000,000	DAU		12 bulan	148,500,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan	Sekr. DPR	12 bulan	50,000,000	DAU		12 bulan	55,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Sekr. DPR	12 bulan	60,000,000	DAU		12 bulan	66,000,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan rumah jabatan	Sekr. DPR	12 bulan	15,000,000	DAU		12 bulan	16,500,000
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor	Sekr. DPR	12 bulan	25,000,000	DAU		12 bulan	27,500,000
9	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas	Jumlah bulan terpeliharanya rumah jabatan	Sekr. DPR	12 bulan	160,000,000	DAU		12 bulan	176,000,000
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Sekr. DPR	2 paket	7,000,000	DAU		2 paket	7,700,000
11	Pemulangan Jenazah	Tersedianya jasa pemulangan jenazah anggota DPRD	Sekr. DPR	2 paket	75,000,000	DAU		2 paket	82,500,000
C	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan yang sesuai standar	Sekr. DPR	95%	36,740,000	DAU		100%	40,414,000
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan bulanan sesuai ketentuan	Sekr. DPR	95%	36,740,000	DAU		100%	40,414,000
D	4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah	Sekr. DPR	95%	13,772,209,205			95%	15,149,430,126
1	Rapat - rapat paripurna istimewa DPRD	Jumlah rapat - rapat paripurna yang difasilitasi	Sekr. DPR	6 kali	473,698,500	DAU		6 kali	521,068,350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Kegiatan reses	Jumlah terfasilitasinya reses ke daerah pemilihan	Sekr. DPR	84 kali	1,048,605,000	DAU		84 kali	1,153,465,500
3	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimtek yang diikuti selama 1 tahun	Sekr. DPR	6 kali	2,240,000,000	DAU		6 kali	2,464,000,000
4	Promosi dan Publikasi Melalui Media Massa, Profil, dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	Jumlah suara dewan di media elektronik, jumlah pariwisata di media cetak, jumlah berita dewan di media cetak dan elektronik	Sekr. DPR	10 kali, 15 kali, 1000 berita	429,303,780	DAU		10 kali, 15 kali, 1000 berita	472,234,158
5	Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli	Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorarium	Sekr. DPR	6 Fraksi	162,000,000	DAU		6 Fraksi	178,200,000
6	Penyusunan standarisasi tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan perumahan	Sekr. DPR	2 dokumen	100,000,000	DAU		2 dokumen	110,000,000
7	Penunjang kegiatan kerjasama asosiasi DPRD dan asosiasi sekretaris DPRD se-Indonesia	Jumlah iuran adeksi dan asdeski yang terbayar, jumlah kontribusi keikutsertaan asdeski dan adeksi, jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Sekr. DPR	2 paket, 2 paket, 2 paket	1,586,000,000	DAU		2 paket, 2 paket, 2 paket	1,744,600,000
8	Pembentukan Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Peraturan DPRD	Jumlah produk hukum DPRD yang terfasilitasi	Sekr. DPR	4 produk huku	404,604,000	DAU		4 produk hukum	445,064,400
9	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga ketua DPRD	Sekr. DPR	12 bulan	300,000,000	DAU		12 bulan	330,000,000
10	Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan dan Penganggaran	Jumlah rapat - rapat penganggaran dan pengawasan yang difasilitasi	Sekr. DPR	15 kali	3,550,000,000	DAU		15 kali	3,905,000,000
11	Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan dan Risalah	Jumlah kegiatan alat kelengkapan dewan yang difasilitasi, jumlah risalah rapat yang terdokumentasi tepat waktu, jumlah jasa publikasi kegiatan dewan yang terlaksana	Sekr. DPR	120 rapat, 120 risalah rapat, 200 kali	3,100,000,000	DAU		120 rapat, 120 risalah rapat, 200 kali	3,410,000,000
12	Penunjang operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	Pembayaran honorarium ajudan, staf TUP, dan sopir pimpinan DPRD	Sekr. DPR	5 orang	179,997,925	DAU		5 orang	197,997,718
13	Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya yang tersedia	Sekr. DPR	125 stel	198,000,000	DAU		125 stel	217,800,000
					4,268,309,483				
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
					3,744,882,983				
	PERENCANAAN								
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				872,896,163	DAU			960,185,779
	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 3000 materai 6000 Belanja jasa paket/pengiriman (biaya kilat khusus,ekspedisi dll)		350 lbr 225 lbr 1 ls	3,162,500	DAU		350 lbr 225 lbr 1 ls	3,478,750
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi kantor Jasa sumber daya listrik Jasa internet		2 rekening telepon, 1 rekening listrik 3 rekening speedy	68,540,000	DAU		2 rekening telepon, 1 rekening listrik 3 rekening speedy	75,394,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	komputer laptop printer Periperal dan peralatan/perlengkapan lainnya		24 unit 29 unit 25 unit 1 ls	164,603,272	DAU		24 unit 29 unit 25 unit 1 ls	181,063,599
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara dan dibayar perizinannya Jumlah Kendaraan Roda 2 yang dipelihara dan dibayar perizinannya		6 unit 7 unit	254,000,000	DAU		6 unit 7 unit	279,400,000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honor pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa		1 ls	12,650,000	DAU		1 ls	13,915,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan alat tulis kantor	Jasa Kebersihan Kantor Peralatan kebersihan kantor		1 paket 23 item	27,000,000	DAU		1 paket 23 item	29,700,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Alat Tulis Kantor		28 item	20,800,000	DAU		28 item	22,880,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	penyediaan barang cetakan Penggandaan		6 item 1 ls	6,500,000	DAU		6 item 1 ls	7,150,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Alat-alat listrik penerangan kantor		1 ls	20,900,000	DAU		1 ls	22,990,000
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Makanan dan minuman rapat, Makanan dan minuman lembur, makan dan minum tamu yang disediakan		200 pasang 200 pasang 1 ls	276,776,000	DAU		200 pasang 200 pasang 1 ls	304,453,600
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 bulan	17,964,391	DAU		12 bulan	19,760,830
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				57,000,000	DAU		0%	62,700,000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan perlengkapan kantor		1 ls	57,000,000	DAU		1 ls	62,700,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				36,740,000	DAU		0%	40,414,000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD		3 Dokumen	36,740,000	DAU		3 Dokumen	40,414,000
						DAU		0%	-
	Belanja Urusan				3,301,673,320	DAU		0%	3,631,840,652
	Program perencanaan pembangunan daerah				1,246,407,320	DAU		0%	1,371,048,052
	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	Perda RKPD		1 Perda	271,369,500	DAU		1 Perda	298,506,450
	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi	Kalender Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		1 Produk Kalender	43,400,000	DAU		1 Produk Kalender	47,740,000
	Pelaksanaan Pengendalian Monitoring dan evaluasi Pembangunan Kota Bukittinggi	Laporan Monitoring		1 Laporan	75,151,160	DAU		1 Laporan	82,666,276
	Pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan	Laporan Pelaksanaan DAK		1 Laporan	247,928,160	DAU		1 Laporan	272,720,976
	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	Perda RKPD Perubahan		1 Perda	69,659,000	DAU		1 Perda	76,624,900
	Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Koordinasi		1 Laporan	200,000,000	DAU		1 Laporan	220,000,000
	Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026	Perda RPJMD		1 Perda	338,899,500	DAU		1 Perda	372,789,450
	Program perencanaan pembangunan ekonomi				170,612,000	DAU		0%	187,673,200
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan Koordinasi		1 Laporan	94105000	DAU		1 Laporan	103,515,500
	Rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Laporan Kegiatan		1 laporan	76507000	DAU		1 laporan	84,157,700
	Program perencanaan sosial budaya				501,604,000	DAU		0%	551,764,400
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	Laporan Koordinasi		1 Laporan	82,821,000	DAU		1 Laporan	91,103,100
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Laporan Koordinasi		1 Laporan	81,451,000	DAU		1 Laporan	89,596,100
	Kajian Akademis Pembangunan Museum Sejarah Kota Bukittinggi	1 Kajian		1 kajian	221,959,000	DAU		1 kajian	244,154,900
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Laporan Koordinasi		1 Laporan	115373000	DAU		1 Laporan	126,910,300
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar				429,210,000	DAU		0%	472,131,000
	Koordinasi Pengelolaan data AMPL Berbasis Rumah Tangga				400610000	DAU		0%	440,671,000
	Implementasi dan Monitoring Strategi Sanitasi Kota (SSK)				28,600,000	DAU		0%	31,460,000
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh				189,009,500	DAU		0%	207,910,450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2021	Laporan Koordinasi		1 Laporan	157,084,500	DAU		1 Laporan	172,792,950
	Sinkronisasi Penyusunan Startegi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2025	Laporan Sinkronisasi		1 Laporan	31,925,000	DAU		1 Laporan	35,117,500
	Program pengembangan data/informasi	Laporan Program			241,404,000	DAU		0%	265,544,400
	Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan			1 Laporan	241,404,000	DAU		1 Laporan	265,544,400
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				523,426,500				
	Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan				523,426,500	DAU		0%	575,769,150
	Kajian Peran Lembaga Adat dan Budaya dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal	Laporan Kajian		1 Laporan	114,160,000	DAU		1 Laporan	125,576,000
	Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi	Laporan Rencana		1 Laporan	115,991,500	DAU		1 Laporan	127,590,650
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Laporan Pengelolaan		1 Laporan	94,520,000	DAU		1 Laporan	103,972,000
	Penguatan Inovasi Daerah	Laporan Penguatan		1 Laporan	198755000	DAU		1 Laporan	218,630,500
	BADAN KEUANGAN				13,135,298,468				14,745,190,565
	Urusan Keuangan				13,135,298,468				7,610,384,431
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi		WTP	2,118,956,462	APBD		WTP	3,124,875,340
1	Penyusunan APBD Kota Bukittinggi	Perda APBD yang dihasilkan	BK	1 Perda	493,590,000	APBD		1 Perda	499,150,000
		Perwako APBD yang dihasilkan		1 Perwako				1 Perwako	
2	Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi	Perda Perubahan APBD yang dihasilkan	BK	1 Perda	123,990,000	APBD		1 Perda	509,000,000
		Perwako Perubahan APBD yang dihasilkan		1 Perwako				1 Perwako	
3	Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang pergeseran penjabaran APBD	Dokumen Perwako pergeseran APBD yang dihasilkan	BK	1 Perwako	30,000,000	APBD		1 Perwako	43,000,000
4	Pengendalian hibah dan bansos	Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos	BK	14 SKPD	11,000,000	APBD		14 SKPD	40,000,000
		Jumlah peserta sosialisasi		50 peserta					
5	Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA	Jumlah DPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD	BK	2670 DPA	90,000,000	APBD		2600 DPA	90,000,000
		Jumlah DPPA SKPD yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan P-APBD		1150 DPPA				1100 DPPA	
6	Penyusunan perwako tentang Standar Biaya	Dokumen Perwako Standar Biaya	BK	1 Perwako	24,000,000	APBD		1 Perwako	24,684,840
7	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan	BK	1 Perda	373,888,000	APBD		1 Perda	407,878,000
		Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan		1 Perwako				1 Perwako	
8	Pelaksanaan dan peningkatan akuntansi berbasis akrual	Jumlah dokumen LK yang disusun sesuai SAP	BK	6 laporan	175,000,000	APBD		6 laporan	305,000,000
9	Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun	BK	12 informasi	90,965,422	APBD		12 transaksi	43,895,000
10	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya	Laporan semester 1 tersusun	BK	1 laporan	39,417,500	APBD		1 laporan	69,267,500
		prognosis 6 bulan berikutnya tersusun		1 laporan				1 laporan	
11	Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	BK	4 Berita Acara	29,960,000	APBD		4 Berita Acara	53,000,000
12	Pengendalian kas daerah	Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda	BK	7 transaksi	35,547,000	APBD		7 transaksi	72,000,000
		Jumlah transaksi kas daerah deposito		5 transaksi				5 transaksi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Pemrosesan gaji ASN	Jumlah daftar gaji yang diterbitkan	BK	600 daftar gaji	37,777,500	APBD		600 daftar gaji	98,000,000
		Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda		168 penyetoran PFK				168 penyetoran PFK	
14	Pengendalian belanja daerah	Dokumen SP2DSKPD selain gaji	BK	388 SP2D	189,822,540	APBD		388 SP2D	312,000,000
		Laporan dana transfer disampaikan		9 kali laporan				9 kali laporan	
		SK pngelolaan keuangan yang diterbitkan		12 SK				12 SK	
		SPJ terverifikasi		348 SPJ terverifikasi				348 SPJ terverifikasi	
15	Penyediaan dan updating Simda Keuangan	Pengelolaan keuangan yang terintegrasi	BK	-	0	APBD		4 bidang pengelolaan	260,000,000
16	Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah	Laporan pengendalian penerimaan	BK	12 laporan	56,758,500			12 laporan	98,000,000
		jumlah kasus yang dibedah dalam sidng TP-TGR		2 kasus				2 kasus	
17	Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	BK	1 buku	121,240,000	APBD		1 buku	200,000,000
	Penyusunan KUA dan PPAS		BK		98,000,000	APBD			
	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		BK		98,000,000	APBD			
II	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD		80%	2,732,376,450	APBD		1	2,425,600,211
18	Penyusunan rencana kebutuhan barang	Jumlah dokumen RKBMD	BK	1 buku	23,380,000	APBD		1 buku	75,000,000
		Jumlah dokumen RKPMBMD		2 buku				2 buku	
19	Penatausahaan BMD	Jumlah laporan BMD tahunan	BK	4 laporan	1,628,140,000	APBD		4 laporan	1,758,424,711
		Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang		2 buku				2 buku	
		Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorinya		145 orang				145 orang	
20	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir	BK	28 laporan	704,099,850	APBD		28 laporan	155,600,000
21	Pengalihan bukti kepemilikan tanah Pemko	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	BK	10 sertifikat	37,968,100	APBD		10 sertifikat	54,000,000
22	Penggunaan BMD	Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah		29 penetapan status	33,375,500	APBD		29 penetapan status	33,375,500
		Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah		29 status pengalihan				29 status pengalihan	
23	Pemanfaatan BMD	Jumlah objek pemanfaatann aset	BK	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	39,353,000	APBD		50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	59,200,000
		Jumlah HGB diatas HPL yang tertata		76 HGB diatas HPL				76 HGB diatas HPL	
24	Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah BMD yang dipindahtanganan	BK	2 jenis	266,060,000	APBD		2 jenis	290,000,000
		BMD yang diawasi		1 laporan				1 laporan	
		BMD yang dapat dikendalikan		1 laporan				1 laporan	
III	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rasio PAD terhadap APBD	BK	10%	1,149,159,422	APBD		0	2,059,908,880
25	Penyusunan dokumen pajak daerah	Dokumen pajak daerah yang disusun	BK	9 jenis pajak	181,529,422	APBD		9 jenis pajak	340,268,000
26	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Penambahan objek pajak baru	BK	100 objek pajak	429,890,000	APBD		100 objek pajak	650,140,880
		Validasi dan verifikasi data PBB		3000 data PBB				3000 data PBB	
		Verifikasi data BPHTB dan survey lapangan		190 WP				190 WP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27	Peningkatan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah	Laporan pengawasan	BK	1 laporan	515,740,000	APBD		1	947,500,000
		Capaian target penerimaan pajak		100%				1	
		Capaian target penerimaan retribusi		100%				1	
		Jumlah piutang yang valid		Rp120 juta				Rp120 juta	
28	Peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	Jumlah data pajak online yang terintegasi	BK	10 data online	22,000,000	APBD		10 data online	122,000,000
	Program Penunjang				7,134,806,134				7,134,806,134
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas pelayanan internal	BK	80%	7,080,066,134	APBD		1	9,309,772,330
29	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 3000 tersedia	BK	200 lembar	3,000,000	APBD		200 lembar	3,058,000
		Materai 6000 tersedia		300 lembar				300 lembar	
		Cek bermaterai tersedia		10 buku;				10 buku;	
30	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening listrik terbayarkan	BK	36 rekening	142,500,000	APBD		24 rekening	142,500,000
		Rekening telpon terbayarkan		24 rekening				24 rekening	
		Rekening air terbayarkan		12 rekening				12 rekening	
		Rekening internet/fax		12 rekening					
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	Servis dan suku cadang kendaraan roda 4 tersedia	BK	8 unit	225,000,000	APBD		8 unit	225,000,000
		Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia		32 unit				32 unit	
		Pajak kendaraan terbayarkan		40 unit				48 unit	
		BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan		32 orang				32 orang	
32	Penyediaan jasa kebersihan kantor	alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	BK	16 jenis	228,500,000	APBD		16 jenis	228,500,000
		Jasa cleaning service tersedia		5 orang				5 orang	
		Retribusi sampah terbayarkan ;		12 tagihan				12 tagihan	
33	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop terpelihara	BK	20 unit	30,000,000	APBD		20 unit	24,000,000
		Komputer terpelihara		10 unit				10 unit	
		Printer terpelihara		20 unit				20 unit	
		Mesin tik		5 unit				5 unit	
		Peralatan dan perlengkapan lainnya terpelihara		10 unit				10 unit	
34	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	BK	46 jenis;	58,292,500	APBD		46 jenis;	86,000,000
35	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak	BK	8 jenis	265,595,070	APBD		8 jenis	465,595,070
		Barang cetakan keperluan kantor tercetak		9 Jenis				9 Jenis	
		Fotocopy terbayarkan		300 ribu lembar				300 ribu lembar	
		Penggandaan terbayarkan		60 exemplar				60 exemplar	
36	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik tersedia	BK	6 jenis	5,000,000	APBD		6 jenis	9,998,050
		Penerangan bangunan kantor tersedia		1 jenis				1 jenis	
37	Penyediaan makan minum kantor	Makan dan minum rapat	BK	50 bungkus/kotak	65,000,000	APBD		50 bungkus/kotak	65,000,000
		Makan dan minum lembur		50 bungkus/kotak				50 bungkus/kotak	
		Makan minum pendampingan pemeriksaan		60 hari				60 hari	
		Minum tamu		3 jenis				3 jenis	
		Manakan ringan ruang pimpinan		3 jenis				3 jenis	
38	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	perjalanan dinas dalam daerah diikuti	BK	80 kali	276,776,000	APBD		80 kali	350,000,000
		Perjalanan dinas luar daerah diikuti		15 kali				15 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
39	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Pengelola keuangan yang dibayarkan honorinya	BK	9 komponen pengelola	5,570,281,354	APBD			7,500,000,000
40	Penyediaan Jasa Pengadaan pengamanan kantor	Jasa pengamanan kantor terbayarkan		5 orang	200,000,000			5 orang	200,000,000
41	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa	BK	9 orang	10,121,210	APBD		9 orang	10,121,210
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana terpenuhi	BK	70%	18,000,000	APBD		1	123,564,321
42	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	BK		0	APBD		6 unit Komputer labor, 1 unit AC	73,564,321
43	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BK	1 gedung	18,000,000	APBD		1 gedung	50,000,000
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		BK		36,740,000	APBD			36,740,000
44	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan Daerah		BK		36,740,000	APBD			36,740,000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3,230,606,646				4,206,801,711
URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3,230,606,646				1,031,994,938
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran</i>	BKPSDM	100%	277,118,125	APBD		100%	304,829,938
001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000, Materai 3000 dan Pengiriman Surat yang dilakukan	BKPSDM	150 lembar materai 6000, 100 lembar materai 3000 dan 12 bulan pengiriman surat	1,000,000	APBD		150 lembar materai 6000, 100 lembar materai 3000 dan 12 bulan pengiriman surat	1,100,000
002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telephone yang Dibayarkan	BKPSDM	1 rekening telepon	8,200,000	APBD		1 rekening	9,020,000
003	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	BKPSDM	4 unit kendaraan roda empat 7 unit kendaraan roda dua	96,105,000	APBD		4 unit kendaraan roda empat 9 unit kendaraan roda dua	105,715,500
004	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat-alat Kebersihan Kantor yang disediakan	BKPSDM	10 Item	1,500,000	APBD		1 paket	1,650,000
005	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	BKPSDM	10 Item	1,500,000	APBD		18 Item	1,650,000
006	Kegiatan Penyediaan Alat-alat tulis kantor	Alat-alat tulis kantor yang Disediakan	BKPSDM	20 item	5,500,000	APBD		20 item	6,050,000
007	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	5 Item, 12 Bulan	5,139,125	APBD		8 item	5,653,038
008	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	10 item	750,000	APBD		12 item	825,000
009	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/ Pertemuan dan Tamu yang Disediakan	BKPSDM	12 bulan	8,500,000	APBD		12 bulan	9,350,000
010	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Biaya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek dan perjalanan tugas kedinasan lainnya yang Disediakan	BKPSDM	12 bulan	145,374,000	APBD		12 bulan	159,911,400
011	Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa Non PNS dan Premi Asuransi yang Dibayarkan	BKPSDM	3 Orang, 1 Tahun	0	APBD		3 orang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
012	Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tertibnya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	BKPSDM	1 tahun kegiatan pengadaan	3,550,000	APBD		1 tahun kegiatan pengadaan	3,905,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPSDM	100%	0	APBD			675,000,000
001	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional	BKPSDM	1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	0	APBD		1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	450,000,000
002	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	5 Item	0	APBD		50 item	75,000,000
003	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor	BKPSDM	5 Item	0	APBD		15 item	50,000,000
004	Kegiatan Pengadaan Meubilair Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Meubilair Kantor	BKPSDM	5 Item	0	APBD		10 item	50,000,000
005	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor	BKPSDM	1 unit	0	APBD		1 unit	0
006	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	BKPSDM	1 unit	0	APBD		1 unit	50,000,000
007	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	BKPSDM	1 paket	0	APBD		1 paket	0
008	Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Dokumen Pengadaan Tanah	BKPSDM	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	0
009	Persiapan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Dokumen Pengadaan Tanah	BKPSDM	1 kegiatan	0	APBD		1 paket	0
010	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Dokumen DED Bangunan Gedung Kantor	BKPSDM	1 dokumen	0	APBD		1 paket	0
011	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	Tersedianya Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor	BKPSDM	1 kegiatan	0	APBD		1 kegiatan	0
012	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang Representatif	BKPSDM	1 unit	0	APBD	Belum tersedia Gedung Kantor yg Reprerentatif dan Fasilitas Pelaksanaan Diklat.	1 unit	0
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Penggunaan Atribut Pegawai	BKPSDM	100%	0	APBD		100%	26,000,000
001	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Disiplin dalam Penggunaan Pakaian Dinas	BKPSDM	40 Stel	0	APBD		40	26,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	BKPSDM	100%	20,150,000	APBD		100%	26,165,000
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LKIP, LPPD, LKPJ	BKPSDM	3 Dokumen	0	APBD		3 Dokumen	2,500,000
002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan 2021	BKPSDM	2 Laporan	0	APBD		2 Laporan	1,500,000
003	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Tersedianya DPA 2021, DPA Pergeseran 2021, RKA 2022, DPPA 2021, Renja 2021, Renja Perubahan 2021	BKPSDM	6 Dokumen	20,150,000	APBD		6 Dokumen	22,165,000
004	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersedianya Renstra SKPD	BKPSDM	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Kepegawaian				2,933,338,521				3,174,806,773
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ratio Meningkatnya Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	BKPSDM	95%	1,915,500,000	APBD			667,684,400
001	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS	Terpenuhinya Persyaratan untuk Pengangkatan sebagai PNS	BKPSDM	112 orang	1,853,000,000	APBD		55 Orang Peserta Latsar CPNS	598,934,400
002	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar	BKPSDM	20 orang	50,000,000	APBD		100 orang	55,000,000
003	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Terpenuhinya Syarat untuk Kepangkatan PNS	BKPSDM	20 orang	12,500,000			50 orang	13,750,000
004	Peningkatan Kompetensi Pegawai BKPSDM Kota Bukittinggi	Pegawai BKPSDM yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi	BKPSDM	5 orang	0			10 orang	0
005	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dalam membangun Profesionalitas	Pimpinan yang Memiliki Profesionalitas	BKPSDM	43 orang	0			43 orang	0
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM	95%	341,500,000	APBD		90%	465,650,000
001	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	Terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	5 orang	15,000,000	APBD		15 orang	16,500,000
002	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak lanjut	Terlaksananya Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	BKPSDM	5 paket rekomendasi	25,000,000	APBD		5 paket rekomendasi	27,500,000
003	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Jabatan Tinggi Pratama yang Dievaluasi	BKPSDM	24 Eselon II/b	50,000,000	APBD		3 dokumen	55,000,000
004	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Terpetakannya Potensi ASN	BKPSDM	25 ASN	15,000,000	APBD		175 orang	16,500,000
005	Penyusunan Formasi ASN	Terpenuhinya Formasi ASN Kota Bukittinggi	BKPSDM	1 dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	27,500,000
006	Pengadaan dan Pengurusan NIP ASN	Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan ASN CPNS	BKPSDM	1 kegiatan	150,000,000	APBD		1 kegiatan	165,000,000
007	Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya Sumpah Janji PNS	BKPSDM	100 orang	3,000,000	APBD		50 orang	3,300,000
008	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	Terlaksananya Fasilitasi PNS Pindah/Masuk	BKPSDM	50 orang	0	APBD		50 orang	15,000,000
009	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Terlaksananya Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	BKPSDM	9 laporan	3,500,000	APBD		12 laporan	3,850,000
010	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	BKPSDM	10 rekomendasi	20,000,000	APBD		10 paket rekomendasi	22,000,000
011	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Terlaksananya Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Surat Keputusan Izin Melaksanakan Proses Perceraian dan atau Ishlah	BKPSDM	20 rekomendasi	25,000,000	APBD		1 laporan	27,500,000
012	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Terlaksananya Penyusunan SKP	BKPSDM	2600 Dokumen	10,000,000	APBD		25 SKPD	11,000,000
013	Pengangkatan/Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Proses Pengangkatan/Penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja	BKPSDM	1 laporan	0	APBD		1 laporan	75,000,000
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Difasilitasi mengikuti Pendidikan Kedinasan	BKPSDM	550 orang	172,838,521	APBD		660 orang	462,622,373
001	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III dan Pim Tk. IV	Terpenuhinya Syarat PNS dalam Menduduki Jabatan Struktural	BKPSDM	1 Orang Pim Tk. II, 1 Orang Pim Tk. III, 2 Pim Tk. IV	147,838,521	APBD		2 Orang Pim Tk. II, 6 Orang Pim Tk. III, 30 Pim Tk. IV	162,622,373
002	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	Terpenuhinya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi sesuai Kebutuhan melalui Diklat Khusus/Teknis	BKPSDM	20 orang	25,000,000	APBD		100 Orang	300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi	BKPSDM	7 kegiatan	212,000,000	APBD		5 kegiatan	308,200,000
001	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	Terlaksananya Proses Administrasi Kenaikan Pangkat, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	BKPSDM	400 SK, 1 SK dan 5 SK	52,000,000	APBD		600 SK	57,200,000
002	Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG	Tersedianya Kartu Identitas Pegawai	BKPSDM	75 dokumen	0	APBD		300 dokumen	0
003	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	Up date dan Up grade Modul Aplikasi	BKPSDM	1 laporan	0	APBD		12 bulan	0
004	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Up date Data SAPK On-line ke BKN Pusat dan Jasa Internet dan Gaji Non PNS yang dibayarkan	BKPSDM	12 bulan	120,000,000	APBD		12 bulan	132,000,000
005	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	Terlaksananya Pengurusan Pensiun PNS	BKPSDM	120 orang	40,000,000	APBD		100 orang	44,000,000
006	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Arsip Kepegawaian yang Terkelola	BKPSDM	3000 arsip	0	APBD		1 laporan	0
007	Pengelolaan Absensi Terintegrasi	Terintegrasinya Absensi SKPD dengan BKPSDM Kota Bukittinggi	BKPSDM	1 laporan	0	APBD		1 laporan	0
008	Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Rekomendasi Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	BKPSDM	1 rekomendas	0			1 rekomendas	15,000,000
009	Pengukuran Indeks Profesional Aparatur	Rekomendasi Indeks Profesional Aparatur	BKPSDM	1 rekomendas	0			1 rekomendas	25,000,000
010	Pengukuran Indeks Merit System	Rekomendasi Indeks Merit System	BKPSDM	1 rekomendas	0			1 rekomendas	35,000,000
011	Pengelolaan SKP On-line Terintegrasi	Terintegrasinya SKP ASN Pemko Bukittinggi	BKPSDM	12 bulan	0			12 bulan	0
	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Jumlah Pegawai yang menerima Reward	BKPSDM	850 Orang	291,500,000	APBD		850 Orang	1,270,650,000
001	Penilaian Pegawai/ASN Berprestasi	Pegawai yang Menerima Penghargaan	BKPSDM	20 orang	0	APBD		20 orang	450,000,000
002	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	BKPSDM	150 piagam	21,500,000	APBD		300 piagam	23,650,000
003	Pembekalan kewirausahaan bagi ASN	Terlaksananya Pembekalan Kewirausahaan	BKPSDM	40 orang	0	APBD		50 orang	500,000,000
004	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL yang diberikan	BKPSDM	1030 orang	0	APBD	*Pembayaran THR Non PNS Rutin setiap tahun	1030 orang	0
005	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	PNS yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	BKPSDM	67 orang	250,000,000	APBD		80 orang	275,000,000
006	Pemulangan Jenazah	Fasilitasi Pemulangan Jenazah ASN	BKPSDM	1 jenazah	15,000,000	APBD		1 jenazah	16,500,000
007	Evaluasi dan Implementasi TPP PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersedianya Laporan Evaluasi dan Implementasi TPP PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	BKPSDM	2 laporan	5,000,000	APBD		2 laporan	5,500,000
	INSPEKTORAT				3,983,467,216				
	PENGAWASAN				3,983,467,216				3,613,695,256
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Inspektora	100%	842,010,416	APBD		100%	858,023,066
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	Inspektora	4 item	1,597,200	APBD		4 item	1,597,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah Pemakaian rekening telepon dan pemakaian rekening listrik	Inspektora t	12 bulan/rek	37,193,000	APBD		12 bulan/rek	37,193,000
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Inspektora t	4 roda 4, 4 roda 2	174,503,000	APBD		4 roda 4, 4 roda 2	183,228,150
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan yang dibayar, jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli	Inspektora t	1 paket, 6 item	145,750,000	APBD		1 paket, 6 item	153,037,500
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	Inspektora t	59 item	28,927,000	APBD		59 item	28,927,000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, jumlah lembar tergandakan, jumlah buku terjilid	Inspektora t	6 item, 60.000 lembar, 28 jilid	20,728,000	APBD		6 item, 60.000 lembar, 28 jilid	20,728,000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang terbeli	Inspektora t	13 item	3,600,000	APBD		13 item	3,600,000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kotak dan bungkus makanan & minuman lembur, rapat, tamu yang tersedia	Inspektora t	903 porsi	15,466,000	APBD		903 porsi	15,466,000
18	Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi yang dihadiri	Luar Daerah	75%	380,306,216	APBD		75%	380,306,216
19	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Inspektora t	7 item	8,940,000	APBD		7 item	8,940,000
22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah paket yang diproses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Inspektora t	4 paket	25,000,000	APBD		4 paket	25,000,000
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kantor	Inspektora t	100%	865,030,000	APBD		100%	367,500,000
11	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	Inspektora t	14 jenis	235,530,000	APBD		1 paket	100,000,000
	Pengadaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan tangga yang terbeli	Inspektora t	10 jenis	15,000,000	APBD		1 paket	15,000,000
	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terbeli	Inspektora t	1 unit	285,000,000	APBD		1 paket	100,000,000
22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Perbaikan/penggantian bagian kantor yang rusak	Inspektora t	1 paket	50,000,000	APBD		1 paket	50,000,000
29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebeleur	Perbaikan/penggantian mebeleur yang rusak	Inspektora t	1 paket	2,500,000	APBD		1 paket	2,500,000
42	Rehab Gedung Kantor	Rehab gedung kantor	Inspektora t	1 paket	277,000,000	APBD		1 paket	100,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	Inspektora t	100%	29,600,000	APBD		100%	29,600,000
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Inspektora t	37 Stel	29,600,000	APBD		37 Stel	29,600,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Inspektora t	100%	11,919,000	APBD		100%	11,919,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05	Penilaian angka kredit auditor dan P2UPD	Jumlah DUPAK yang dinilai	Inspektora t	44 DUPAK	11,919,000	APBD	Dasar : Peratura n Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara Nomor PER/220 /M.PAN/ 7/2008	44 DUPAK	11,919,000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Inspektora t	100%	1,463,886,800	APBD		100%	1,537,081,140
01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler	Inspektora t	129 LHP	41,455,800	APBD	Dasar : PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembina an dan Pengaw asan Penyele nggaraa n Pemerint ah Daerah	129 LHP	43,528,590
02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus	Inspektora t	40 LHP khusus / kasus	19,500,000	APBD	Dasar : PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembina an dan Pengaw asan Penyele nggaraa n Pemerint ah Daerah	40 LHP khusus / kasus	20,475,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
09	Review Laporan Keuangan Pemko	Jumlah laporan hasil Review LKPD	Inspektora t	1 laporan	25,000,000	APBD	Dasar : PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapora n Keuanga n dan Kinerja Instansi Pemerint ah	1 LKPD Tahunan, 1 LKPD triwulan	26,250,000
10	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah laporan pemantauan TLHP yang dilakukan	Inspektora t	4 laporan	90,000,000	APBD	Dasar : PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembina an dan Pengaw asan Penyele nggaraa n Pemerint ah Daerah	4 laporan	94,500,000
11	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	Jumlah data pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan	Inspektora t	5 Dokumen	100,000,000	APBD	Dasar : PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembina an dan Pengaw asan Penyele nggaraa n Pemerint ah Daerah	5 Dokumen	105,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Laporan evaluasi SAKIP	Inspektora t	28 laporan	136,198,000	APBD	Dasar : - Peratura n Pemerint ah no.12 tahun 2015 tentang Pedoma n Evaluasi atas impleme ntasi SAKIP - Evaluasi SAKIP merupak an salah satu penduku ng capaian Indikator Kinerja Utama	28 laporan	143,007,900
13	Review Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan hasil review	Inspektora t	1 Laporan	6,500,000	APBD	Dasar : PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengend alian Intern Pemerint ah	1 Laporan	6,825,000
14	Review LKIP	Jumlah Laporan hasil review LKIP	Inspektora t	1 laporan	44,550,000	APBD	Dasar : PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapora n Keuanga n dan Kinerja Instansi Pemerint ah	1 laporan	46,777,500
15	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Laporan review Perencanaan dan Penganggaran	Inspektora t	6 Laporan	35,000,000	APBD	Dasar : Permen dagri No 35 Tahun 2018	4 Laporan	36,750,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Pembinaan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Laporan pembinaan dan evaluasi SPIP	Inspektora t	28 SKPD	336,841,000	APBD	Dasar : PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengend alian Intern Pemerint ah	28 SKPD	353,683,050
17	Unit Pengendali Gratifikasi	Jumlah pelaporan gratifikasi yang diteruskan ke KPK	Inspektora t	10 laporan	26,000,000	APBD	Dasar : Peratura n KPK No.2 tahun 2014 tentang Pedoma n Pelapora n dan Penetap an Status Gratifika si	10 laporan	27,300,000
18	Review Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah laporan hasil pengawasan PPRG	Inspektora t	6 laporan	55,000,000	APBD	Dasar : Permen dagri Nomor 67 Tahun 2011	6 laporan	57,750,000
19	Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan hasil evaluasi	Inspektora t	1 laporan	8,000,000	APBD	Dasar : Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2015	1 laporan	8,400,000
20	Survey Penilaian Integritas	Jumlah laporan survey	Inspektora t	1 laporan	150,000,000	APBD	Dasar : - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/103 69/SJ - Surat KPK Nomor B/1803/L IT.05/10- 15/02/20 19	1 laporan	157,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Review Dana DAK	Jumlah laporan hasil review	Inspektora t	1 laporan	11,000,000	APBD	Dasar : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PM K.07/201 8	1 laporan	11,550,000
22	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penilaian yang terpenuhi	Inspektora t	80%	37,500,000	APBD	Dasar : - Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2015 - Penilaian Mandiri Percepatan Reforma si Birokrasi salah satu penduku ng capaian Indikator Kinerja Utama Pemerint ah Kota Bukitting gi	80%	39,375,000
23	ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Jumlah SKPD yang dijadikan pilot project	Inspektora t	2 SKPD	58,871,000	APBD	Dasar : Permen PAN Nomor 60 Tahun 2012	2 SKPD	61,814,550
24	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan terpenuhi	Inspektora t	4 Laporan	95,471,000	APBD	Dasar : Permen dagri No.35 tahun 2018	4 Laporan	100,244,550
25	Pemantapan Saber Pungli	Jumlah laporan terpenuhi	Inspektora t	1 Laporan	130,000,000	APBD	Dasar : PerPres Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan Tugas Sapu Bersih Punguta n Liar	1 Laporan	136,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26	Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah laporan terpenuhi	Inspektora t	1 Laporan	25,000,000	APBD	Dasar : Permen dagri Nomor 133 Tahun 2018	1 Laporan	26,250,000
	LHKASN	Jumlah laporan terpenuhi	Inspektora t	1 Laporan	25,000,000	APBD	Dasar : SE MenPAN Nomor 1 Tahun 2015	1 Laporan	26,250,000
	Review LPPD	Jumlah laporan hasil review	Inspektora t	1 Laporan	7,000,000	APBD	Dasar : SE Mendagr i Nomor 120.04/6 977/OTD A tanggal 31 Desemb er 2019 tentang Pedoma n Penyusu nan LPPD tahun 2019	1 Laporan	7,350,000
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektora t	100%	771,021,000	APBD		100%	809,572,050
01	Pengiriman Peserta mengikuti diklat teknis pengawasan	Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja	Luar Daerah	30 orang	422,140,000	APBD	Dasar : Peratura n Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoma n teknis peningka tan kapabilit as APIP	40 orang	443,247,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	Pengiriman Peserta mengikuti diklat pembentukan dan penjenjangan auditor dan P2UPD	Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Luar Daerah	5 orang	257,000,000	APBD	Dasar : Permenpan Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya	5 orang	269,850,000
03	Pelatihan Kantor Mandiri	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri	Inspektora t	50 orang	31,381,000	APBD	Dasar : Permenpan Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya	50 orang	32,950,050
04	Peningkatan kapabilitas dan Profesional APIP	Laporan Self Assesment	Inspektora t	1 laporan	60,500,000	APBD	Dasar : Permen dagri Nomor 35 tahun 2018	1 laporan	63,525,000
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN					5,708,092,407				9,373,655,160
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					5,708,092,407				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		100%					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli	Kecamatan Mandiangingin Koto Selayan	3 jenis	2,500,000	DAU	Cascading	3 jenis	2,928,200
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar	Kecamatan Mandiangingin Koto Selayan	3 rekening/12 bulan	36,000,000	DAU	Cascading	3 rekening/12 bulan	53,240,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	Kecamatan Mandiangingin Koto Selayan	2 unit roda 4, 24 unit roda 2/ 1 tahun	60,500,000	DAU	Cascading	2 unit roda 4, 24 unit roda 2/ 1 tahun	117,975,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	35 item, 12 bulan	7,500,000	DAU	Cascading	35 item, 12 bulan	30,140,000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	2 jenis	6,000,000	DAU	Cascading	2 jenis	24,200,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	1 paket	11,000,000	DAU	Cascading	1 paket	52,030,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang dicetak dan penggandaan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	8 item	11,000,000	DAU	Cascading	8 item	3,267,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	10 item	3,500,000	DAU	Cascading	10 item	8,470,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3 item	30,000,000	DAU	Cascading	3 item	78,650,000
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	40 kali	74,085,000	DAU	Cascading	40 kali	387,200,000
11	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	jumlah dokumentasi, spanduk dan publikasi melalui media cetak, elektronik	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	200 lembar, 100 mter, 5 kali, 5 kali	2,500,000	DAU	Cascading	200 lembar, 100 mter, 5 kali, 5 kali	36,300,000
12	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	terbayarnya honor PJPHP, PPK, PPHP, PPBJ, PTK	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5 jenis	35,000,000	DAU	Cascading	5 jenis	42,350,000
13	Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan koto selayan	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat koordinasi di Kelurahan	Koto Selayan	19 item belanja, 12 kali rapat	265,021,045	DAU	Cascading	19 item belanja, 12 kali rapat	86,020,000
14	Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago ipuh	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat koordinasi di Kelurahan	campago ipuh	19 item belanja, 12 kali rapat	85,816,750	DAU	Cascading	19 item belanja, 12 kali rapat	128,370,000
15	Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan manggis ganting	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat koordinasi di Kelurahan	Manggis Ganting	19 item belanja, 12 kali rapat	81,782,500	DAU	Cascading	19 item belanja, 12 kali rapat	105,380,000
16	Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pulai anak air	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat koordinasi di Kelurahan	Pulai Anak Air	19 item belanja, 12 kali rapat	79,107,301	DAU	Cascading	19 item belanja, 12 kali rapat	100,540,000
17	Peelayanan administrasi perkantoran kelurahan pohon pintu kabun	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat koordinasi di Kelurahan	Pohon Pintu Kabun	19 item belanja, 12 kali rapat	90,705,770	DAU	Cascading	19 item belanja, 12 kali rapat	107,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pahun tembok	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat koordinasi di Kelurahan	Pahun Tembok	19 item belanja, 12 kali rapat	87,137,000	DAU	Cascading	19 item belanja, 12 kali rapat	129,470,000
19	Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan kubu gulai bancah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat koordinasi di Kelurahan	Kubu Gulai Bancah	19 item belanja, 12 kali rapat	72,518,596	DAU	Cascading	19 item belanja, 12 kali rapat	90,860,000
20	Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago guguk bulek	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat koordinasi di Kelurahan	Campago Guguk Bulek	19 item belanja, 12 kali rapat	76,872,543	DAU	Cascading	19 item belanja, 12 kali rapat	98,120,000
21	Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan garegeh	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat koordinasi di Kelurahan	Garegeh	19 item belanja, 12 kali rapat	67,335,481	DAU	Cascading	19 item belanja, 12 kali rapat	100,540,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sisem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		100%					
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun (RENJA, RENSTRA)	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	2 dokumen	20,150,000	DAU	-	2 dokumen	12,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100%					
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	1 unit/ 12 bulan	6,000,000	DAU	Cascading	1 unit/ 12 bulan	43,560,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	1 unit/ 12 bulan	10,000,000	DAU	Cascading	1 unit/ 12 bulan	181,500,000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat		17%					
1	Musrenbang Tingkat Kecamatan	laporan hasil musrenbang kecamatan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	1 laporan	15,000,000	DAU	Cascading	1 laporan	22,935,000
2	Musrenbang Kelurahan Koto Selayan	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Koto Selayan	2 laporan	14,288,000	DAU	Cascading	2 laporan	26,620,000
3	Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Campago Ipuh	2 laporan	18,772,000	DAU	Cascading	2 laporan	26,620,000
4	Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Manggis Ganting	2 laporan	17,751,000	DAU	Cascading	2 laporan	26,620,000
5	Musrenbang Kelurahan Pulai Anak Air	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Pulai Anak Air	2 laporan	13,554,000	DAU	Cascading	2 laporan	26,620,000
6	Musrenbang Kelurahan Pahun Pintu Kabun	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Pahun Pintu Kabun	2 laporan	12,800,000	DAU	Cascading	2 laporan	26,620,000
7	Musrenbang Kelurahan Pahun Tembok	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Pahun Tembok	2 laporan	17,065,000	DAU	Cascading	2 laporan	26,620,000
8	Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Kubu Gulai Bancah	2 laporan	17,222,750	DAU	Cascading	2 laporan	26,620,000
9	Musrenbang Kelurahan Campago Guguk Bulek	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Campago Guguk Bulek	2 laporan	21,611,000	DAU	Cascading	2 laporan	26,620,000
10	Musrenbang Kelurahan Garegeh	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	Garegeh	2 laporan	11,631,000	DAU	Cascading	2 laporan	26,620,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase terlaksananya PATEN sesuai SOP		100%					
1	Penunjang operasional terpadu kecamatan (PATEN)	Laporan PATEN sesuai SOP, Jasa Pegawai Non PNS, jumlah pelatihan dan inovasi pelayanan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	12 laporan, 2 orang, 1 kali, 1 inovasi	74,000,000	DAU	Cascading	12 laporan, 2 orang, 1 kali, 1 inovasi	145,200,000
2	Rapat koordinasi kecamatan dengan unsur terkait	jumlah koordinasi yang dilaksanakan,	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	6 kali	9,000,000	DAU	Cascading	6 kali	48,356,440
3	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Buku administrasi Kelurahan yang dibina, jumlah pemenang lomba kompetensi Lurah, monitoring	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	buku administrasi, 3 pemenang, 4 laporan monitoring	20,000,000	DAU	Cascading	buku administrasi, 3 pemenang, 4 laporan monitoring	78,650,000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase pembagunan berdasarkan prakarsa masyarakat		40%					
1	Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi	jumlah pemenang lomba, jumlah kelurahan yang terbina	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3 pemenang, 9 kelurahan	25,000,000	DAU		3 pemenang, 9 kelurahan	96,800,000
3	Penunjang operasional KOTAKU	jumlah rapat, jumlah sosialisasi/pelatihan yang dilaksanakan, laporan hasil monitoring	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	8 kali, 5 kali 6 laporan	25,000,000	DAU	Cascading	8 kali, 5 kali 6 laporan	77,000,000
4	Pendataan/updating UMKM	Jumlah pelatihan utk pendataan, Jumlah pendataan dan entri UMKM	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	2 kali, 2800 UMKM	40,000,000	DAU	Cascading	2 kali, 2800 UMKM	77,000,000
5	Koordinasi kecamatan sehat	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	4 kali	34,000,000	DAU	Cascading	4 kali	121,000,000
6	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan MKS	laporan Manunggal Sakato	Kecamatan mandiangin koto selayan	1 laporan	14,000,000	DAU	Cascading	1 laporan	27,500,000
7	Manunggal Sakato Kel. Koto Selayan	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Koto Selayan	2 proyek	58,000,000	DAU	Cascading	2 proyek	93,835,500
8	Manunggal Sakato Kel. Campago Ipuh	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Campago Ipuh	2 proyek	58,000,000	DAU	Cascading	2 proyek	92,383,500
9	Manunggal Sakato Kel. Manggis Ganting	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Manggis Ganting	2 proyek	58,000,000	DAU	Cascading	2 proyek	91,415,500
10	Manunggal Sakato Kel. Pulau Anak air	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Pulau Anak Air	2 proyek	58,000,000	DAU	Cascading	2 proyek	91,415,500
11	Manunggal Sakato Kel Puhun Pintu Kabun	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Puhun Pintu Kabun	2 proyek	58,000,000	DAU	Cascading	2 proyek	91,415,500
12	Manunggal Sakato Kel Puhun Tembok	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Puhun Tembok	2 proyek	58,000,000	DAU	Cascading	2 proyek	92,988,500
13	Manunggal Sakato Kel Kubu Gulai Banchah	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kubu Gulai Banchah	2 proyek	58,000,000	DAU	Cascading	2 proyek	93,175,500
14	Manunggal Sakato Kel. Campago Guguk Bulek	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Campago Guguk Bulek	2 proyek	58,000,000	DAU	Cascading	2 proyek	92,141,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Garegeh	2 proyek	58,000,000	DAU	Cascading	2 proyek	93,109,500
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Selayan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				DAU - T	dana kelurahan		
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Ipuh	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				DAU - T	dana kelurahan		
18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggis Ganting	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				DAU - T	dana kelurahan		
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Anak Air	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				DAU - T	dana kelurahan		
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pintu Kabun	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				DAU - T	dana kelurahan		
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Puhun Tembok	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				DAU - T	dana kelurahan		
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				DAU - T	dana kelurahan		
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Guguk Bulek	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				DAU - T	dana kelurahan		
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Campago Garegeh	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun				DAU - T	dana kelurahan		
25	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Koto Selayan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat				DAU - T	dana kelurahan		
26	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campago Ipuh	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat				DAU - T	dana kelurahan		
27	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat				DAU - T	dana kelurahan		
28	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Anak Air	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat				DAU - T	dana kelurahan		
29	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat				DAU - T	dana kelurahan		
30	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puhun Tembok	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat				DAU - T	dana kelurahan		
31	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kubu Gulai Bancah	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat				DAU - T	dana kelurahan		
32	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Campago Guguk Bulek	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat				DAU - T	dana kelurahan		
33	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Garegeh	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat				DAU - T	dana kelurahan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, adat dan generasi muda kecamatan	Jumlah pemenang lomba didikan shubuh,, jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi, jumlah lembaga adat yang terbina, Jumlah pelaksanaan MTQ Kecamatan,	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3 pemenang, 2 cabang olah raga, 2 lembaga adat, 1 kali, 2 kegiatan	329.729.571	DAU	1. Tersedianya Anggaran Operasional pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, seperti: FKKT (Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan), PMI, UKS, KAN, Pokia	3 pemenang, 2 cabang olah raga, 2 lembaga adat, 1 kali, 2 kegiatan	250.000.000
34	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Koto Selayan	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan	Koto Selayan	3 kegiatan	6.500,000	DAU	Pada DPA 2020 diakomodir pada DAU-T	3 kegiatan	35,455,000
35	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Campago Ipuh	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan	Campago Ipuh	3 kegiatan	33,000,000	DAU	Bantuan kegiatan karang taruna dan remaja Masjid 2 paket sebesar Rp.26 jt (POKIR Drs.Nofrizal Usra)	3 kegiatan	40,940,000
36	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Manggis Ganting	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan	Manggis Ganting	3 kegiatan	57,000,000	DAU	Pengadaan meja pingpong ke Karang taruna 4 unit sebesar Rp 50 jt (POKIR Shabirin	3 kegiatan	40,445,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
37	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Pulai Anak Air	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan	Pulai Anak Air	3 kegiatan	7,000,000	DAU	Pada DPA 2020 diakom dir pada DAU-T	3 kegiatan	40,510,000
38	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan	Puhun Pintu Kabun	3 kegiatan	72,000,000	DAU	Hibah Alat Kesenian untuk Pemuda Panorama Baru/LPM sebesar 65 jt (POKIR Dedi Fatria)	3 kegiatan	48,245,000
39	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Tembok	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan	Puhun Tembok	3 kegiatan	7,000,000	DAU	Pada DPA 2020 diakom dir pada DAU-T	3 kegiatan	56,000,000
40	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Gulai Banchah	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan	Kubu Gulai Banchah	3 kegiatan	7,000,000	DAU	Pada DPA 2020 diakom dir pada DAU-T	3 kegiatan	29,528,400
41	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Campago Guguk Bulek	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan	Campago Guguk Bulek	3 kegiatan	51,000,000	APBD	Bantuan pembuatan Asmaul Husna sebsar Rp 44 jt (Pokir Nofrizal Usra)	3 kegiatan	35,000,000
42	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Garegeh	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan	Garegeh	3 kegiatan	6,500,000	DAU	Pada DPA 2020 diakom dir pada DAU-T	3 kegiatan	35,524,000
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Koto Selayan	4 kegiatan/12 bulan	252.834,000	DAU	Peralatan Catering sebesar 100 jt dan Pengadaan Plang Asmaul Husna sebesar Rp.75 jt (POKIR H.Ibrayasser)	4 kegiatan/12 bulan	120,817,400
2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan campago ipuh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Campago Ipuh	4 kegiatan/12 bulan	299,255,000	APBD	1. Alat kelengkapan kematian sebesar Rp.45 jt (POKIR H.Syafriil 2. Pengadaan seperangkat tenda dan kursi kematian sebesar Rp.40 jt (POKIR Asriil, SE) 3. Pengadaan alat marchin	4 kegiatan/12 bulan	270,000,500
3	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis ganting	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Manggis Ganting	4 kegiatan/12 bulan	188,626,000	DAU	Pengadaan Matras untuk LPM (Silek, Randai dan Wushu) 3 bh sebesar Rp 90 jt (POKIR Shabirin R)	4 kegiatan/12 bulan	160,848,600
4	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan pulai anak air	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	kelurahan pulai anak air	4 kegiatan/12 bulan	136,170,500	DAU	cascaadin g	4 kegiatan/12 bulan	204,787,550

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan pohon pintu kabun	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Pohon Pintu Kabun	4 kegiatan/12 bulan	199,962,000	DAU	1. Alat kelengkapan kematian sebesar Rp.40 jt (POKIR H.Syafriil) 2. Pengadaan plang nama asmaulhusna Rp.30 jt (POKIR ABD.Rahman)	4 kegiatan/12 bulan	212,478,200
6	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan pohon tembok	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Pohon Tembok	4 kegiatan/12 bulan	156,900,000	DAU	cascadin g	4 kegiatan/12 bulan	235,840,000
7	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai bancah	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	4 kegiatan/12 bulan	131,355,200	DAU	cascadin g	4 kegiatan/12 bulan	214,010,720
8	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan campago guguk bulek	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Campago Guguk Bulek	4 kegiatan/12 bulan	238,058,000	DAU	cascadin g	4 kegiatan/12 bulan	324,563,800
9	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan garegeh	jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	kelurahan garegeh	4 kegiatan/12 bulan	220,653,500	DAU	Pengadaan plang Asmaulhusna Kel. Garegeh sebesar Rp. 75 jt (POKIR IBNU AZIS) dan Hibah Bantuan Alat Kesenian untuk Bundo Kanduang Garegeh /LPM sebesar Rp.75 jt (POKIR Dedi Etria)	4 kegiatan/12 bulan	108,958,850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan koto selayan	laporan kegiatan	Koto Selayan	12 laporan	65,000,000	DAU	Pada DPA 2020 diakomdir pada DAU-T	12 laporan	133,100,000
11	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan campago ipuh	laporan kegiatan	Campago Ipuh	12 laporan	198,100,000	DAU	1. Perbaikan posyandu balita dan lansia kelurahan Campago Ipuh/ RW 3 sebesar Rp.25 jt (Pokir Nofrizal Usra) 2. Bantuan kegiatan dasawisma Seruni 7 RW 3 Surau Gadang sebesar Rp.52.50	12 laporan	217,800,000
12	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan manggis ganting	laporan kegiatan	Manggis Ganting	12 laporan	90,000,000	DAU	Pada DPA 2020 diakomdir pada DAU-T	12 laporan	173,030,000
13	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan pulai anak air	laporan kegiatan	Pulai Anak Air	12 laporan	80,900,000	DAU	Pada DPA 2020 diakomdir pada DAU-T	12 laporan	148,830,000
14	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan pahun pintu kabun	laporan kegiatan	Pahun Pintu Kabun	12 laporan	95,500,000	DAU	Pada DPA 2020 diakomdir pada DAU-T	12 laporan	209,330,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan puhun tembok	laporan kegiatan	Puhun Tembok	12 laporan	118,000,000	DAU	Perbaikan posyandu lansia kelurahan Puhun Tembok/Simpang Tembok sebesar Rp.25 jt (Pokir Nofrizal Ustra)	12 laporan	182,710,000
16	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan kubu gulai bancah	laporan kegiatan	Kubu Gulai Bancah	12 laporan	97,000,000	DAU	Pada DPA 2020 diakomdir pada DAU-T	12 laporan	194,810,000
17	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan campago guguk bulek	laporan kegiatan	Campago Guguk Bulek	12 laporan	92,000,000	DAU	Pada DPA 2020 diakomdir pada DAU-T	12 laporan	173,030,000
18	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan garegeh	laporan kegiatan	Garegeh	12 laporan	116,321,900	APBD	Pengadaan alat memasak untuk Dasawisma Kenanga sebesar Rp 52.321.900 (POKIR Ibrayasser)	12 laporan	1,331,000,000
19	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Laporan kegiatan, jumlah pemenang lomba Jambore PKK, Jasa Pegawai Non PNS	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	6 laporan, 3 pemenang tiap lomba, 1 orang	140,000,000	DAU	cascading	6 laporan, 3 pemenang tiap lomba, 1 orang	271,250,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Pembinaan dan fasilitasi TRAMTIBUM kecamatan	laporan pembinaan dan monitoring	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3 kegiatan/12 bulan	70,000,000	DAU	keg utk pendataan rumah kost sebesar Rp.45 jt (Usulan dari Musrenbang)	3 kegiatan/12 bulan	88,000,000
KECAMATAN GUGUK PANJANG					4,357,270,625				12,894,800,000
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					4,357,270,625				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		20	997,544,750			20	1,627,800,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terbeli dan Jumlah Buku Cek Terbeli		300 buah	1,575,000			300 buah dan 3 buku	1,800,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening telepon, internet dan listrik yang dibayar		36 bulan rekening	36,000,000			36 bulan rekening	50,000,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan		8 unit kend dua, 2 unit kendaraan roda 4	67,000,000			8 unit kend dua, 2 unit kendaraan roda 4	100,000,000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat kebersihan tersedia, Jumlah retribusi sampah terbayar, dan Jumlah Jasa Pihak Ketiga untuk Kebersihan kantor yang tersedia		25 jenis, 12 bulan dan 5 orang	90,000,000			25 jenis, 12 bulan dan 2 orang	100,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor tersedia		51 jenis	25,618,750			51 jenis	35,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia		8 jenis, 12 bulan	12,077,500			8 jenis, 12 bulan	25,000,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli		14 jenis	3,228,500			14 jenis	6,000,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan, minuman dan Snack tersedia		500 bungkus, 50 porsi, 500 kotak	17,500,000			500 bungkus, 50 porsi, 500 kotak	40,000,000
	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar kota bukitinggi yang di ikuti		10 OK	74,085,000			10 OK	250,000,000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		5 jenis	8,335,000			5 jenis	20,000,000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah jasa pihak ketiga untuk pengamanan terbayar		1 orang	45,000,000			1 orang	50,000,000
	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa yang dibayarkan honorinya		5 OBK	25,000,000			5 OBK	25,000,000
	Penyediaan Jasa dokumentasi dan publikasi kantor	Jumlah Spanduk, Jumlah Media Publikasi tersedia		200 m, 3 media	13,000,000			200 m, 3 media	25,000,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Pelayan Administrasi perkantoran kelurahan tersedia		15 jenis	87,125,000			15 jenis	150,000,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Pelayan Administrasi perkantoran kelurahan tersedia		15 jenis	82,000,000			15 jenis	125,000,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah Pelayan Administrasi perkantoran kelurahan tersedia		15 jenis	82,000,000			15 jenis	125,000,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Pelayan Administrasi perkantoran kelurahan tersedia		15 jenis	76,875,000			15 jenis	125,000,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Pelayan Administrasi perkantoran kelurahan tersedia		15 jenis	82,000,000			15 jenis	125,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Pelayan Administrasi perkantoran kelurahan tersedia		15 jenis	82,000,000			15 jenis	125,000,000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajungkan Tengah Sawah	Jumlah Pelayan Administrasi perkantoran kelurahan tersedia		15 jenis	87,125,000			15 jenis	125,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	474,000,000			100%	7,410,000,000
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia		10 jenis				10 jenis	500,000,000
	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia		10 jenis				10 jenis	500,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 gedung	10,000,000			1 gedung	30,000,000
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Lurah	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor lurah yang tersedia		5 jenis/kelurahan				5 jenis/kelurahan	280,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Terbeli		13 unit kend dinas roda 2				13 unit kend dinas roda 2	-
	Pembuatan DED dan RAB pembangunan kantor lurah ATTS	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat		1 dokumen	464,000,000			1 dokumen	100,000,000
	Pembangunan Gedung kantor Lurah	Jumlah Bangunan Kantor yang dibangun		2 unit	-			2 unit	6,000,000,000
	Pengadaan Tanah Kantor Lurah ATTS	Jumlah Kavling tanah yang tersedia		1 kavling				1 kavling	
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Atribut Pegawai		100%	-			100%	100,000,000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi ASN		75 stel				75 stel	100,000,000
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen/Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	20,150,000			100%	21,000,000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun tepat waktu		3 dokumen	-			3 dokumen	4,500,000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan per semester yang tersusun tepat waktu		2 dokumen	-			2 dokumen	4,500,000
	Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	Jumlah Renja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		4 dokumen	20,150,000			4 dokumen	12,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT		100%	139,000,000			100%	275,000,000
	Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang diberikan		7 jenis	58,000,000			7 jenis	100,000,000
	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Lurah yang akan dibina, Buku Administrasi Kelurahan, Profil Kecamatan dan Kelurahan		2 Lurah, Buku Administrasi, 7 Profil Kelurahan, 1 Profil Kecamatan	50,000,000			2 Lurah, Buku Administrasi, 7 Profil Kelurahan, 1 Profil Kecamatan	125,000,000
	Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan		3 kali	31,000,000			3 kali	50,000,000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat		50%	810,000,000			50%	2,246,000,000
	Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 tim, 1 kegiatan	10,000,000			2 tim, 3 kegiatan	85,000,000
	Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 tim, 1 kegiatan	10,000,000			2 tim, 3 kegiatan	85,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 tim, 1 kegiatan	10,000,000			2 tim, 3 kegiatan	85,000,000
	Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 tim, 1 kegiatan	10,000,000			2 tim, 3 kegiatan	85,000,000
	Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 tim, 1 kegiatan	10,000,000			2 tim, 3 kegiatan	85,000,000
	Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 tim, 1 kegiatan	10,000,000			2 tim, 3 kegiatan	85,000,000
	Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan ATTS	Jumlah Tim Olah Raga yang dibina, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 tim, 1 kegiatan	10,000,000			2 tim, 3 kegiatan	85,000,000
	Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan	Jumlah Kafilah MTQ yang dikirim, Jumlah Tim Olah raga yang dibina, Jumlah Pemenang Lomba		60 orang, 2 tim, 3 pemenang/ lomba	225,000,000			60 orang, 2 tim, 3 pemenang/ lomba	510,000,000
	Koordinasi Kecamatan Sehat (UKS, Kec. Sehat, Pokja Kelurahan Sehat)	jumlah koordinasi yang dilaksanakan		4 kali	20,000,000			4 kali	18,000,000
	Penujang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	jumlah rapat dan audit yang dilaksanakan		4 kali	25,000,000			4 kali	75,000,000
	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Harian Perkembangan Kegiatan Manunggal Sakato		30 laporan	17,500,000			30 laporan	23,000,000
	Manunggal Sakato Kelurahan Tarok Dipo	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	57,500,000			1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000
	Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Apit Puhun	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	57,500,000			1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000
	Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	57,500,000			1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000
	Manunggal Sakato Kelurahan Benteng Pasar Atas	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	57,500,000			1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000
	Manunggal Sakato Kelurahan Pakan Kurai	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	57,500,000			1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000
	Manunggal Sakato Kelurahan Kayu Kubu	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	57,500,000			1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000
	Manunggal Sakato Kelurahan Aur Tajungkah Tengah Sawah	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	57,500,000			1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan	65,000,000
	Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi	jumlah pemenang lomba, pembinaan dan monitoring		2 pemenang, 4 kali 1 laporan	50,000,000			2 pemenang, 4 kali 1 laporan	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendataan/ Updating UMKM	Jumlah UMKM yang terdata		5700 UMKM				5700 UMKM	130,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		3 kegiatan				3 kegiatan	50,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di Tarok Dipo	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		3 kegiatan				3 kegiatan	50,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		3 kegiatan				3 kegiatan	50,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan BCKR	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		3 kegiatan				3 kegiatan	50,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan Benteng pasar Atas	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		3 kegiatan				3 kegiatan	50,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan pakan Kurai	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		3 kegiatan				3 kegiatan	50,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di Kelurahan kayu Kubu	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		3 kegiatan				3 kegiatan	50,000,000
	Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di ATTS	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		3 kegiatan				3 kegiatan	50,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia		2 paket			DAU Tambah an untuk keluraha n	2 paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia		2 paket			DAU Tambah an untuk keluraha n	2 paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan BCKR	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia		2 paket			DAU Tambah an untuk keluraha n	2 paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benteng Pasar Ateh	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia		2 paket			DAU Tambah an untuk keluraha n	2 paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia		2 paket			DAU Tambah an untuk keluraha n	2 paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia		2 paket			DAU Tambah an untuk keluraha n	2 paket	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ATTS	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia		2 paket			DAU Tambah an untuk keluraha n	2 paket	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 kegiatan			DAU Tambah an untuk keluraha n	2 kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 kegiatan			DAU Tambahan untuk kelurahan	2 kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan BCKR	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 kegiatan			DAU Tambahan untuk kelurahan	2 kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Benteng Pasar Ateh	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 kegiatan			DAU Tambahan untuk kelurahan	2 kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 kegiatan			DAU Tambahan untuk kelurahan	2 kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 kegiatan			DAU Tambahan untuk kelurahan	2 kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ATTS	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		2 kegiatan			DAU Tambahan untuk kelurahan	2 kegiatan	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat		40%	92,575,875			40%	165,000,000
	Musrenbang Kecamatan	laporan hasil musrenbang kecamatan		1 laporan	15,575,875			1 laporan	25,000,000
	Musrenbang Kelurahan Tarok Dipo	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		2 laporan	11,000,000			2 laporan	20,000,000
	Musrenbang Kelurahan Bukit Apit Puhun	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		2 laporan	11,000,000			2 laporan	20,000,000
	Musrenbang Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		2 laporan	11,000,000			2 laporan	20,000,000
	Musrenbang Kelurahan Benteng Pasar Atas	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		2 laporan	11,000,000			2 laporan	20,000,000
	Musrenbang Kelurahan Pakan Kurai	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		2 laporan	11,000,000			2 laporan	20,000,000
	Musrenbang Kelurahan Kayu Kubu	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		2 laporan	11,000,000			2 laporan	20,000,000
	Musrenbang Kelurahan ATTS	laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan		2 laporan	11,000,000			2 laporan	20,000,000
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT, Satlinmas, TP-PKK, Posyandu) yang aktif		100%	1,824,000,000			100%	1,050,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan, Jumlah Pemenang Lomba, Jumlah Kegiatan yang diikuti		4 kali, 3 pemenang/lomba, 4 kali	175,000,000			4 kali, 3 pemenang/lomba, 4 kali	250,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan, Jumlah Kegiatan yang diikuti		4 kali, 4 kegiatan	221,200,000			4 kali, 4 kegiatan	265,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan, Jumlah Kegiatan yang diikuti		4 kali, 4 kegiatan	92,200,000			4 kali, 4 kegiatan	100,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan, Jumlah Kegiatan yang diikuti		4 kali, 4 kegiatan	49,900,000			4 kali, 4 kegiatan	100,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan, Jumlah Kegiatan yang diikuti		4 kali, 4 kegiatan	36,100,000			4 kali, 4 kegiatan	70,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Kurai	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan, Jumlah Kegiatan yang diikuti		4 kali, 4 kegiatan	91,000,000			4 kali, 4 kegiatan	120,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kayu Kubu	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan, Jumlah Kegiatan yang diikuti		4 kali, 4 kegiatan	74,800,000			4 kali, 4 kegiatan	120,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan, Jumlah Kegiatan yang diikuti		4 kali, 4 kegiatan	100,300,000			4 kali, 4 kegiatan	170,000,000
	Pembinaan dan fasilitasi Kamtibus Kecamatan	Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilaksanakan		4 kali	41,000,000			4 kali	150,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan		3 kali	50,000,000			3 kali	80,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan		4 laporan	183,675,000			4 laporan	175,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan		4 laporan	126,925,000			4 laporan	135,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BCKR	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan		4 laporan	101,550,000			4 laporan	135,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BPA	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan		4 laporan	86,275,000			4 laporan	100,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan PK	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan		4 laporan	141,875,000			4 laporan	140,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KK	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan		4 laporan	105,775,000			4 laporan	135,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ATTS	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan		4 laporan	146,425,000			4 laporan	150,000,000
	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH				3,812,056,452				39,250,813,839
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				3,812,056,452				39,250,813,839
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	Kecamatan dan Kelurahan	20 pelayanan	1,125,299,754	DAU		20 pelayanan	1,237,829,729
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli	Kec. ABTB	3 jenis	2,200,000	DAU		3 jenis	2,420,000
2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar	Kec. ABTB	4 rekening	30,000,000	DAU		4 rekening	33,000,000
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	Kec. ABTB	10 unit	58,000,000	DAU		10 unit	63,800,000
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa outsourcing kebersihan	Kec. ABTB dan Kelurahan	3 jenis (1 Kecamatan, 1 Pengawas)	90,000,000	DAU		3 jenis	99,000,000
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	Kec. ABTB	2 jenis	15,000,000	DAU		2 jenis	16,500,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kec. ABTB	1 paket	12,500,000	DAU		1 paket	13,750,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan yang dicetak dan penggandaan	Kec. ABTB	7 item	10,000,000	DAU		7 item	11,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	Kec. ABTB	5 jenis	7,500,000	DAU		5 jenis	8,250,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	Kec. ABTB	3 item	17,500,000	DAU		3 item	19,250,000
10	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar kota bukitinggi	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	Kec. ABTB	36 kali	74,085,000	DAU		36 kali	81,493,500
11	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	jumlah spanduk dan leaflet yang dicetak	Kec. ABTB	515 lembar	5,225,000	DAU		515 lembar	5,747,500
12	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	terbayarnya honor PJPHP, PPK, PPHP, PPBJ, PTK	Kec. ABTB	5 jenis	25,000,000	DAU		5 jenis	27,500,000
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	tersedianya jasa pengamanan kantor	Kecamatan dan Kelurahan		45,000,000	DAU			49,500,000
14	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Parit Antang	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat/pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Kel. Parit Antang	6 jenis belanja, 8 kali rapat	73,248,800	DAU		6 jenis belanja, 8 kali rapat	80,573,680
15	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Belakang Balok	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS, terfasilitasinya rapat/pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Kel. Belakang Balok	8 jenis belanja, 1 orang, 8 kali rapat	147,360,000	DAU		8 jenis belanja, 1 orang, 8 kali rapat	162,096,000
16	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Pakan Labuah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, Jasa Pegawai Non PNS, terfasilitasinya rapat/pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Kel. Pakan Labuah	8 jenis belanja, 1 orang, 8 kali rapat	150,000,000	DAU		8 jenis belanja, 1 orang, 8 kali rapat	165,000,000
17	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Birugo	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat/pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Kel. Birugo	6 jenis belanja, 8 kali rapat	80,685,954	DAU		6 jenis belanja, 8 kali rapat	88,754,549
18	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Kubu Tanjung	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat/pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Kel. Kubu Tanjung	6 jenis belanja, 8 kali rapat	74,770,000	DAU		6 jenis belanja, 8 kali rapat	82,247,000
19	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Sapiran	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat/pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Kel. Sapiran	6 jenis belanja, 8 kali rapat	75,320,000	DAU		6 jenis belanja, 8 kali rapat	82,852,000
20	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Ladang Cakiah	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat/pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Kel. Ladang Cakiah	6 jenis belanja, 8 kali rapat	49,325,000	DAU		6 jenis belanja, 8 kali rapat	54,257,500
21	Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Aur Kuning	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran, terfasilitasinya rapat/pertemuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Kel. Aur Kuning	6 jenis belanja, 8 kali rapat	82,580,000	DAU		6 jenis belanja, 8 kali rapat	90,838,000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		95%	10,000,000			95%	35,411,000,000
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Kec. ABTB	4 item		DAU		4 item	
2	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Kec. ABTB	6 item		DAU		6 item	
3	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan ABTB	1 gedung	10,000,000	DAU		1 gedung	11,000,000
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Kecamatan ABTB	1 unit		DAU		1 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Pembangunan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun	Kecamatan, Kelurahan Ladang Cakiah, Kelurahan Parit Antang	3 gedung		DAU	Musrenbang (DPUPR)	1 gedung	27,000,000,000
6	Pengadaan tanah kantor	2 kapling tanah yang bersertifikat	Kelurahan Kubu Tanjung dan Parit Antang	2 sertifikat		DAU	Musrenbang (DPUPR)	1 dokumen	8,400,000,000
7	Sewa Gedung Kantor	Gedung kantor yang disewa	Kecamatan, Kelurahan Ladang Cakiah, Kelurahan Parit Antang	3 kantor		DAU	Tambahan		200,000,000
8	DED Pembangunan Gedung Kantor	Dokumen DED	Kelurahan Ladang Cakiah dan Parit Antang	2 Dokumen					200,000,000
III	Program Peningkatan Disiplin ASN	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan pakaian dinas serta atribu pegawai		95%	-			95%	
	Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi ASN	Kecamatan ABTB	80 stel	-			80 stel	
IV	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat		50%	705,855,600	DAU		50%	776,441,160
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parit Antang	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	3 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	3 paket	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Belakang Balok	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	3 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	3 paket	
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	3 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	3 paket	
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Birugo	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	3 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	3 paket	
5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kubu Tanjung	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	3 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	3 paket	
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sapiroan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	3 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	3 paket	
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ladang Cakiah	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	3 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	3 paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Prakiraan Maju Rencana		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Aur Kuning	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	3 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	3 paket	
9	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Parit Antang	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kel. PA	2 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	2 paket	
10	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Belakang Balok	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kel. BB	2 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	2 paket	
11	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pakan Labuah	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kel. PL	2 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	2 paket	
12	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Birugo	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kel. Brg	2 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	2 paket	
13	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kubu Tanjung	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kel. KT	2 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	2 paket	
14	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sapiran	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kel. Spr	2 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	2 paket	
15	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ladang Cakiah	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kel. LC	2 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	2 paket	
16	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Aur Kuning	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kel. AK	2 paket		DAU Tambahan	Dana Kelurahan	2 paket	
17	Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi	jumlah pemenang lomba, pembinaan dan monitoring	Kec. ABTB	3 pemenang, 4 laporan pembinaan dan monitoring	15,285,600	DAU		3 pemenang, 4 laporan pembinaan dan monitoring	16,814,160
18	Koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan	laporan Manunggal Sakato	Kec. ABTB	1 laporan	20,000,000	DAU		1 laporan	22,000,000
19	Manunggal Sakato Kelurahan Parit Antang	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kel. Parit Antang	2 proyek	57,500,000	DAU		2 proyek	63,250,000
20	Manunggal Sakato kelurahan belakang balok	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kel. Belakang Balok	2 proyek	57,500,000	DAU		2 proyek	63,250,000
21	Manunggal Sakato kelurahan pakan labuah	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kel. Pakan Labuah	2 proyek	57,500,000	DAU		2 proyek	63,250,000
22	Manunggal Sakato kelurahan birugo	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kel. Birugo	2 proyek	57,500,000	DAU		2 proyek	63,250,000
23	Manunggal Sakato kubu tanjuang	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kel. Kubu Tanjung	2 proyek	57,500,000	DAU		2 proyek	63,250,000
24	Manunggal Sakato kelurahan sapiran	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kel. Sapiran	2 proyek	57,500,000	DAU		2 proyek	63,250,000
25	Manunggal Sakato kelurahan ladang cakiah	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kel. Ladang Cakiah	2 proyek	57,500,000	DAU		2 proyek	63,250,000
26	Manunggal Sakato kelurahan aur kuning	jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kel. Aur Kuning	2 proyek	57,500,000	DAU		2 proyek	63,250,000
27	Pembinaan dan fasilitasi keagamaan, adat, pemuda dan olahraga Kecamatan	Jumlah pemenang lomba didikan shubuh, jumlah cabang olahraga dan adat yang dibina dan difasilitasi, jumlah pelaksanaan MTQ Kecamatan	Kec. ABTB	3 pemenang, 3 cabang, 1 kali	100,000,000	DAU		3 pemenang, 3 cabang, 1 kali	110,000,000
28	Pembinaan dan fasilitasi keagamaan, adat, pemuda dan olahraga Kelurahan Parit Antang	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan	Kel. PA	3 jenis	-	DAU		3 jenis	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
29	Pembinaan dan fasilitasi keagamaan, adat, pemuda dan olahraga Kelurahan Belakang Balok	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan, jumlah perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Kel. BB	3 jenis	-	DAU		3 jenis	-
30	Pembinaan dan fasilitasi keagamaan, adat, pemuda dan olahraga Kelurahan Pakan Labuah	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan, jumlah perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Kel. PL	3 jenis	-	DAU		3 jenis	-
31	Pembinaan dan fasilitasi keagamaan, adat, pemuda dan olahraga keagamaan dan generasi muda Kelurahan Birugo	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan, jumlah perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Kel. Brg	3 jenis	-	DAU		3 jenis	-
32	Pembinaan dan fasilitasi keagamaan, adat, pemuda dan olahraga keagamaan dan generasi muda Kelurahan kubu tanjung	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan, jumlah perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Kel. KT	3 jenis	-	DAU		3 jenis	-
33	Pembinaan dan fasilitasi keagamaan, adat, pemuda dan olahraga Kelurahan Sapiran	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan, jumlah perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Kel. Spr	3 jenis	-	DAU		3 jenis	-
34	Pembinaan dan fasilitasi keagamaan, adat, pemuda dan olahraga Kelurahan Ladang Cakiah	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan, jumlah perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Kel. LC	3 jenis	-	DAU		3 jenis	-
35	Pembinaan dan fasilitasi keagamaan, adat, pemuda dan olahraga Kelurahan Aur Kuning	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan, jumlah perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi	Kel. AK	3 jenis	-	DAU		3 jenis	-
36	Koordinasi Kecamatan Sehat	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kec. ABTB	4 kali	23,650,000	DAU		4 kali	26,015,000
37	Pendataan / updating UMKM	rekap laporan hasil pendataan	Ke. ABTB	8 laporan	49,500,000	DAU		8 laporan	54,450,000
38	Penunjang operasional KOTAKU	jumlah rapat dan audit yang dilaksanakan	Kec. ABTB	4 kali	37,420,000	DAU		4 kali	41,162,000
V	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat		75%	149,330,000	DAU		75%	164,263,000
1	Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Musrenbang Kecamatan	Kec.ABTB	1 laporan	19,200,000	DAU		1 laporan	21,120,000
2	Musrenbang kelurahan parit antang	Laporan Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Musrenbang Kelurahan	Kel. PA	2 laporan	15,774,000	DAU		2 laporan	17,351,400
3	Musrenbang kelurahan belakang balok	Laporan Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Musrenbang Kelurahan	Kel. BB	2 laporan	15,334,000	DAU		2 laporan	16,867,400
4	Musrenbang kelurahan pakan labuah	Laporan Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Musrenbang Kelurahan	Kel. PL	2 laporan	19,822,000	DAU		2 laporan	21,804,200
5	Musrenbang kelurahan birugo	Laporan Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Musrenbang Kelurahan	Kel. Brg	2 laporan	19,646,000	DAU		2 laporan	21,610,600
6	Musrenbang Kelurahan Kubu Tanjung	Laporan Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Musrenbang Kelurahan	Kel. KT	2 laporan	15,994,000	DAU		2 laporan	17,593,400
7	Musrenbang sapiran	Laporan Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Musrenbang Kelurahan	Kel. Spr	2 laporan	16,984,000	DAU		2 laporan	18,682,400
8	Musrenbang kelurahan ladang cakiah	Laporan Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Musrenbang Kelurahan	Kel. LC	2 laporan	10,912,000	DAU		2 laporan	12,003,200
9	Musrenbang kelurahan aur kuning	Laporan Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Musrenbang Kelurahan	Kel. AK	2 laporan	15,664,000	DAU		2 laporan	17,230,400
VII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat		86	183,592,500			86	201,951,750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pelaksanaan operasional PATEN	Laporan PATEN sesuai SOP, Jasa Pegawai Non PNS, jumlah pelatihan dan inovasi pelayanan	Kec. ABTB	12 laporan, 2 orang, 1 kali, 1 inovasi	74,000,000	DAU		12 laporan, 2 orang, 1 kali, 1 inovasi	81,400,000
2	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Buku administrasi Kelurahan yang dibina, jumlah pemenang lomba kompetensi Lurah, monitoring dan aplikasi e-Administrasi Kelurahan	Kec. ABTB	buku administrasi, 3 pemenang, 4 laporan monitoring, 1 aplikasi	59,592,500	DAU		buku administrasi, 3 pemenang, 4 laporan monitoring, 1 aplikasi	65,551,750
3	Koordinasi Kecamatan dan lintas sektoral	jumlah koordinasi yang dilaksanakan, dibayarnya honor Forkopimcam	Kec. ABTB	12 kali	50,000,000	DAU		12 kali	55,000,000
VII	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT, Satlinmas, TP-PKK, Posyandu) yang aktif		100%	1,637,978,598			100%	1,459,328,200
1	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Parit Antang	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan pertriwulan	Kel. Parit Antang	4 laporan	106,600,000	DAU		4 laporan	117,260,000
2	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Belakang Balok	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan pertriwulan	Ke. Belakang Balok	4 laporan	122,500,000	DAU		4 laporan	134,750,000
3	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Pakan Labuah	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan pertriwulan	Kel. Pakan Labuah	4 laporan	153,850,000	DAU		4 laporan	169,235,000
4	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Sapiran	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan pertriwulan	Kel. Sapiran	4 laporan	133,075,000	DAU		4 laporan	146,382,500
5	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan pertriwulan	Kel. Aur Kuning	4 laporan	145,487,000	DAU		4 laporan	160,035,700
6	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan pertriwulan	Kel. Ladang Cakiah	4 laporan	90,200,000	DAU		4 laporan	99,220,000
7	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Birugo	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan pertriwulan	Kel. Birugo	4 laporan	189,750,000	DAU		4 laporan	208,725,000
8	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung	jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan pertriwulan	Kel. Kubu Tanjung	4 laporan	97,000,000	DAU		4 laporan	106,700,000
9	Pembinaan dan fasilitasi Kamtibmas Kecamatan ABTB	laporan pembinaan dan monitoring, jasa Pegawai Non PNS	Kec.ABTB	4 laporan, 1 orang	60,000,000	DAU		4 laporan, 1 orang	66,000,000
10	Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Kecamatan	Laporan kegiatan, jumlah pemenang lomba Jambore PKK, Jasa Pegawai Non PNS, jumlah aplikasi yang digunakan	Kecamatan ABTB	6 laporan, 3 pemenang tiap lomba, 1 orang, 3 aplikasi	199,400,000	DAU		6 laporan, 3 pemenang tiap lomba, 1 orang, 3 aplikasi	219,340,000
11	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Parit Antang	laporan kegiatan	Kel. P.Antang	12 laporan	2,700,000	DAU		12 laporan	2,970,000
12	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Belakang Balok	laporan kegiatan	Kel. B. Balok	12 laporan	2,700,000	DAU		12 laporan	2,970,000
13	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Labuah	laporan kegiatan	Kelurahan PL	12 laporan	3,600,000	DAU		12 laporan	3,960,000
14	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Birugo	laporan kegiatan	Kelurahan Brg	12 laporan	6,300,000	DAU		12 laporan	6,930,000
15	Pembinaan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung	laporan kegiatan	Kelurahan KT	12 laporan	1,800,000	DAU		12 laporan	1,980,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Sapiran	laporan kegiatan	Kel. Spn	12 laporan	4,500,000	DAU		12 laporan	4,950,000
17	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Aur Kuning	laporan kegiatan	Kel. AK	12 laporan	5,400,000	DAU		12 laporan	5,940,000
18	Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Ladang Cakiah	laporan kegiatan	Kel. LC	12 laporan	1,800,000	DAU		12 laporan	1,980,000
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4,490,942,572				5,572,140,750
	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4,490,942,572				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Bukittinggi	100%	369,745,374	APBD		100%	406,370,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia	Bukittinggi	425 Lbr Materai	1,725,000	APBD		450 Lbr Materai	1,800,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	Bukittinggi	36 tagihan	30,160,000	APBD		36 tagihan	35,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Bukittinggi	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	45,000,000	APBD		1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	57,500,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Bukittinggi	1 orang	57,077,153	APBD		1 orang	59,000,000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Bukittinggi	2 unit komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 1 unit AC	8,000,000	APBD		2 unit komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 1 unit AC	12,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Bukittinggi	50 jenis	18,927,125	APBD		50 jenis	22,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan	Bukittinggi	4 Jenis Barang Cetak dan 30.000 Lembar Penggandaan	11,945,000	APBD		4 Jenis Barang Cetak dan 35.000 Lembar Penggandaan	12,500,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Bukittinggi	3 jenis komponen	1,570,000	APBD		3 jenis komponen	1,570,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Bukittinggi	100 bungkus makan, 100 kotak snack, 70 porsi minum, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	5,775,000	APBD		100 bungkus makan, 100 kotak snack, 70 porsi minum, 12 bulan makan minum di ruang Kakan	12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang diikuti	Bukittinggi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 40 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 20 kali	181,166,096	APBD		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 40 kali dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 20 kali	175,000,000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS yang dibayarkan honorarium, tunjangan kesejahteraan tahunan dan premi asuransinya	Bukittinggi	-	-	-		-	-
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Honorarium PPK dan PjPHP yang dibayarkan	Bukittinggi	Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	8,400,000	APBD		Jumlah Honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah Honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang	18,000,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	Bukittinggi	100%	20,376,278	-		100%	45,000,000
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan yang dibeli	Bukittinggi	1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 2 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	-	APBD		-	-
14	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bukittinggi	1 unit filling kabinet	-	APBD		1 unit lemari arsip	15,000,000
15	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bukittinggi	2 unit PC Desktop	20,376,278	APBD		1 unit laptop - 1 unit printer - 1 unit penghancur kertas	30,000,000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Bukittinggi	100%	-	-		100%	14,000,000
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Bukittinggi	20 Stel	-	APBD		20 Stel	14,000,000
17	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu yang dibeli	Bukittinggi	-	-	-		-	-
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD	Bukittinggi	100%	36,740,000	-		100%	-
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD	Bukittinggi	-	-	-		-	-
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah rencana kerja dan keuangan SKPD	Bukittinggi	-	-	-		-	-
20	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah buku renja yang tersedia	Bukittinggi	-	36,740,000	-		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	Bukittinggi	-	-	-		-	-
V	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Bukittinggi	95%	692,819,520	APBD		95%	750,000,000
22	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Jumlah laporan KOMINDA	Bukittinggi	-	-	APBD		-	-
23	Pengawasan Orang Asing	Jumlah laporan pengawasan orang asing	Bukittinggi	-	-	APBD		-	-
24	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi	Bukittinggi	12 Laporan	650,000,000	APBD		12 Laporan	700,000,000
25	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial	Bukittinggi	1 laporan	34,995,500	APBD		1 laporan	40,000,000
26	Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian	Jumlah rekomendasi penelitian, jumlah rekomendasi keramaian dan jumlah laporan pemantauan terhadap keramaian berisiko tinggi	Bukittinggi	Rekomendasi penelitian : 1.600 berkas, Rekomendasi keramaian : 55 berkas, Laporan pemantauan terhadap keramaian berisiko tinggi : 35 berkas	7,824,020	APBD		Rekomendasi penelitian : 1.600 berkas, Rekomendasi keramaian : 55 berkas, Laporan pemantauan terhadap keramaian berisiko tinggi : 35 berkas	10,000,000
27	Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah	Jumlah laporan monitoring	Bukittinggi	-	-	-		-	-
28	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana	Jumlah laporan pengawasan	Bukittinggi	-	-	-		-	-
29	SATGAS Saber Pungli	Jumlah peserta sosialisasi dan iklan layanan masyarakat	Bukittinggi	-	-	-		-	-
VI	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bukittinggi	1 Kegiatan	17,886,400	APBD		3 Kegiatan	65,000,000
30	Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah laporan FPK	Bukittinggi	-	-	-		-	-
31	Sosialisasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	100 Orang	17,886,400	APBD		100 Orang	20,000,000
32	Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta pelatihan	Bukittinggi	40 Orang	-	APBD		40 Orang	45,000,000
33	Sosialisasi Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	-	-	-		-	-
VII	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Bukittinggi	80%	2,739,902,000	APBD		0%	3,451,770,750
34	Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Jumlah laporan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	Bukittinggi	24 Laporan	2,500,000,000	APBD		24 Laporan	2,800,000,000
35	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Bukittinggi	8 Parpol	40,000,000	APBD		8 Parpol	45,000,000
36	Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	50 orang	39,910,000	APBD		50 orang	50,000,000
37	Bimtek Kader Partai Politik	Jumlah peserta bimtek	Bukittinggi	240 orang	50,000,000	APBD		240 orang	300,000,000
38	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	100 Orang	-	APBD		150 Orang	80,870,500
39	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	Jumlah buku data ormas yang dicetak	Bukittinggi	40 Eksemplar	39,992,000	APBD		40 Eksemplar	50,000,000
40	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	Bukittinggi	100 Orang	70,000,000	APBD		100 Orang	75,900,250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41	Pembinaan kepada kader Parpol	Jumlah laporan pembinaan	Bukittinggi	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	50,000,000
42	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah spanduk, Jumlah baliho, Jumlah Iklan Layanan Masyarakat	Bukittinggi	-	-	-		-	-
43	Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan	Bukittinggi	-	-	-		-	-
44	Desk Pemilu / Pilkada	Jumlah laporan	Bukittinggi	-	-	-		-	-
VIII	Program Pencegahan, Penanganan Dan Rehabilitasi Narkoba	Persentase penurunan kasus narkoba di Bukittinggi	Bukittinggi	5%	253,473,000	APBD		5%	390,000,000
45	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah peserta pembekalan, jumlah leaflet yang dicetak, jumlah pin anti narkoba yang diserahkan kepada masyarakat	Bukittinggi	Jumlah peserta pembekalan : 250 orang	69,994,000	APBD		Jumlah peserta pembekalan : 250 orang	80,000,000
46	Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Jumlah laporan pelaksanaan	Bukittinggi	1 Laporan	50,000,000	APBD		1 Laporan	150,000,000
47	Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi	Jumlah laporan KOMPANI	Bukittinggi	1 Laporan	60,000,000	APBD		1 Laporan	80,000,000
48	Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi	Jumlah ASN yang dites urine	Bukittinggi	270 orang	73,479,000	APBD		270 orang	80,000,000
49	Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba	Jumlah sosialisasi	Bukittinggi	-	-	-		-	-
IX	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	Bukittinggi	100%	180,000,000	APBD		100%	200,000,000
50	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Upacara	Bukittinggi	5 kegiatan	180,000,000	APBD		5 kegiatan	200,000,000
X	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Persentase penurunan agama dan aliran kepercayaan yang menyimpang	Bukittinggi	5%	180,000,000	APBD		5%	250,000,000
51	Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan laporan pengawasan	Bukittinggi	Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan	180,000,000	APBD		Jumlah peserta sosialisasi : 100 orang dan jumlah laporan pengawasan : 1 laporan	250,000,000
52	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Bukittinggi	-	-	-		-	-

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah. Indikator kinerja utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Pemilihan indikator kinerja utama ini merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Langkah penetapan Indikator Kinerja Utama:

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (*result statement*) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada Perubahan RPJMD tahun 2016-2021, indikator kinerja utama Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	DEFENISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA	
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5
1	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah usulan pemangku kepentingan/jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir pada RKPD	80	100
2	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	Jumlah anggaran CSR/ jumlah belanja langsung APBD	1%	2,5%
3	Nilai SAKIP	Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	SAKIP C	SAKIP A
4	Peringkat LPPD	Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	LPPD RANKING 65	LPPD RANKING 30
5	Indeks RB			B
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK RI	WTP	WTP
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	30	80
8	Persentase RTH Publik	Jumlah RTH publik/jumlah RTH	8%	17%
9	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	Jumlah Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan/Jumlah fasum	55%	85%
10	Penyediaan air minum layak	Jumlah air minum layak yang tersedia	85	100
11	Kawasan Kumuh		30,60 ha	0
12	Persentase sanitasi layak	Persentase sanitasi layak yang tersedia	85	100
13	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	Jumlah pemanfaatan ruang kota yang sesuai peraturan/jumlah pemanfaatan ruang kota	55%	70%
14	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	6,12%	6,50%

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	DEFENISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA	
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
15	PDRB Perkapita	jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun	49,88 Juta	56 Juta
16	Indeks Gini	distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi	0,34	<0,3
17	Jumlah Investasi	Jumlah pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi)	25% (80 Perusahaan)	65% (120 Perusahaan)
18	Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	4,23	2,84
19	Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara per tahun	460.905 orang	588.245 orang
20	Harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	14,7	15
21	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	Jumlah sekolah yang ber akreditasi A tingkat SD/jumlah SD	72,88%	81,35%
22	Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	Jumlah sekolah yang ber akreditasi A tingkat SMP/jumlah SMP	54,50%	90,90%
23	Angka Harapan Hidup	rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x.	72,36	73,14
24	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah puskesmas yang terakreditasi/jumlah puskesmas	30	100
25	Tingkat Inflasi	kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.	6,50	3,00
26	Laju Pertumbuhan Penduduk	perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya	1,71	1,38

Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama ini dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Target Kinerja Tahunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	KONDISI AWAL	Target Kinerja					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR, manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung APBD	na	na	na	na	5	5	5
3	Persentase SKPD/ Unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik online maupun offline	na	na	na	na	100	100	100
4	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100	100	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP	C	B	BB	BB	A	A	A
6	Nilai EKPPD	3.359	3.167	3.217	3.267	3.317	3.367	3.367
7	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK	0	0	0	0	1	2	2
9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	30	70	75	75	80	80	80
10	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	12,4	12,6	13	13,3	13,7	14	14
11	Indeks jalan mantap	87,17	86,57	100	100	100	100	100
12	Indeks air minum layak	85	85	90	95	95	100	100
13	Indeks akses sanitasi layak	85	90	95	100	100	100	100
14	Indeks kawasan pemukiman tidak kumuh perkotaan	99,01	99,21	99,41	99,60	99,80	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	KONDISI AWAL	Target Kinerja					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	
15	Indeks kepemilikan rumah	na	na	na	na	71,56	71,56	71,56
16	Indeks kualitas air							
17	Indeks kualitas udara							
18	Indeks kualitas tutupan lahan							
19	Indeks aksesibilitas angkutan umum jalan	na	na	na	na	80	80	80
20	Tingkat kecelakaan lalu lintas jalan	202	148	181	215	168	151	151
21	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	5,8	3,41	0,24	3,18	3,31	3,48	3,48
22	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6,14	8,61	4,85	3,43	6,05	6,35	6,35
23	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9,57	9,13	7,41	8,61	9,11	9,57	9,57
24	Tingkat Kemiskinan	4,23	3,75	3,5	3,35	3,35	2,84	2,84
25	Harapan lama sekolah	14,93	14,94	14,95	14,96	14,9	15	15
26	Angka rata rata lama sekolah	10,95	11,3	11,31	11,32	11,15	11,2	11,2
27	Usia harapan hidup	73,6	73,69	73,91	74,22	74,52	74,7	74,7
28	Indek pemberdayaan gender	70,84	71,84	72,84	73,84	74,84	75,84	75,84
29	Indeks ramah disabilitas	na	na	na	na			
30	Angka kriminalitas							

Berdasarkan target kinerja utama untuk tahun 2019, dapat dilihat target dan realisasi dari Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan Pembangunan	%	2	2,39	119,5
2	Nilai SAKIP	nilai	BB	BB	100
3	Peringkat LPPD	peringkat	35	27	122,86
4	Indeks RB	nilai	B	B	100
5	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	nilai	WTP	WTP	100
6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	%	75	85,03	113,37
7	Persentase RTH Publik	%	17	8,4	49,41
8	Persentase Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	%	75	88,12	117,49
9	Penyediaan air minum layak	%	95	88,68	93,34
10	Kawasan Kumuh	ha	0	0	100
11	Persentase sanitasi layak	%	100	96,39	96,39
12	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	70	80,13	114,47
13	Pertumbuhan ekonomi	%	6,40	5,88	91,87
14	PDRB Perkapita	jumlah	54,50	66,52	122,06
15	Indeks Gini	jumlah	<0,3	<0,267	89
16	Tingkat Kemiskinan	nilai	3,35	4,6	62,69
17	Kunjungan Wisatawan	jumlah	588.245 orang	584.785 orang	99,41
18	Harapan lama sekolah	%	15	14,96	99,73
19	Angka rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,20	11,32	101,07
20	Angka Harapan Hidup	%	73	74,22	101,67
21	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	80	100	125
22	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,45	1,55	93,11

6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Aspek Kesejahteraan

Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.	Laju inflasi	2,84	4,00	4,00	4,00
2.	PDRB per kapita (riil)/juta	39.763	49.296	51.496	51.496
3.	Tingkat Kemiskinan	4,58	3,08	2,84	2,84
5.	Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)	6.1	7	7	7
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.04	5,10	4,93	4,93
5.	Harapan Lama Sekolah	14,92	14,90	15	15
6.	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu/Kapita/Bulan)	12.330	13.110	13.271	13.271
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,84	74,84	75,84	75,84
	Urusan Pendidikan				
8.	Angka melek huruf	99.94	99.95	99.95	99.95
9.	Angka rata-rata lama sekolah	10,79	11,15	11,20	11,20
10.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	136,75	>100%	>100%	>100%
11.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	140,02	>100%	>100%	>100%
12.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	165,41	>100%	>100%	>100%
13.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	121,93	>100%	>100%	>100%
14.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	110,30	>100%	>100%	>100%
15.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	123,48	>100%	>100%	>100%
	KESEHATAN				
16.	Angka harapan hidup	73,52	74,52	74,70	74,70
17.	Persentase balita gizi buruk	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15
	KETENAGAKERJAAN				
18	Rasio penduduk yang bekerja	0,94	0,98	0,98	0,98
	Pemuda dan Olahraga				
19	Jumlah gedung olahraga	6	7	7	7
A	ASPEK PELAYANAN UMUM				

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
a.	URUSAN PENDIDIKAN				
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	85,57%	88%	88,50%	88,50%
	Pendidikan Dasar				
	Angka partisipasi sekolah	127,36	128,5	129	129
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:243	1:243	1:243	1:243
	Rasio guru/murid	1:28	1:30	1:30	1:30
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	120,95	130,8	132,17	132,17
	Pendidikan menengah:				
	Angka partisipasi sekolah	144,96	145,2	145,30	145,30
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1:273	1:281	1:282	1:282
	Rasio guru terhadap murid	1:11	1:15	1:16	1:16
	Fasilitas Pendidikan:				
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	100	100%	100%
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	100%	100 %	100%	100%
	Angka Putus Sekolah:				
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01%	<1%	<1%	<1%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10%	<1%	<1%	<1%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,30%	<1%	<1%	<1%
	Angka kelulusan				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	10	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	10	100%	100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	124%	>100%	>100%	>100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	178%	>100%	>100%	>100%
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92%	100%	100%	100%
b.	URUSAN KESEHATAN				
	Rasio posyandu per satuan penduduk	0.1	0.1	0.1	0.1
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	4.9	5.7	5.7	5.7
	Rasio dokter per satuan penduduk	1.75	1.75	1.75	1.75
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk Perawat & bidan)	12.95	12.95	12.95	12.95
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	5.7	5.7	5.7	5.7
	Pelayanan Kesehatan Dasar				
	- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	91	94	95	95
	- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	96.7	99	10089.2	10089.2
	- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89.2	90.8	91	91
	- Cakupan pelayanan nifas	83.6	90	90	90
	- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70.6	80	80	80
	- Cakupan kunjungan bayi	83.8	90	90	90
	- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				
	- Cakupan pelayanan anak balita	54.8	90	90	90
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	96.97	100	100	100
	- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	- Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100
	- Cakupan peserta KB aktif	53.4	70	70	70
	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular:	100	100	100	100
	- Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP)	0.0025	<1	<1	<1
	- Cakupan Penemuan Penderita pneumonia Balita	57.57	100	100	100
	- Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	80	90	90	90
	- Cakupan penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100
	- Cakupan Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100
	- Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	1	1	1	1
	- Persentase balita ditimbang berat badan D/S	59.72	80	80	80
	- Peersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Rujukan				
	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100
	cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100
	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	100	100	100	100
	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100	100	100	100
	Persentase orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	10	10	10	10
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan	100	100	100	100
	Cakupan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	100	100	100	100
c.	URUSAN PEKERJAAN UMUM				
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	85.20%	94%	95%	95%
	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 20 Km/Jam)	167,16	181,99	183,93	183,93
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	53.478 km	74.478 km	79.478 km	79.478 km
	Sempah dan sungai yang dipakai bangunan liar	90 m	-	-	-
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	47670.35 m	66738.49 m	71505.53	71505.53
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	0 titik	1 titik	4 titik	4 titik

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Penurunan jumlah wilayah/titik yang terkena dampak genangan (banjir) dan longsor	8 titik	0	0	0
	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	7,7%	13%	14%	14%
d.	URUSAN PERUMAHAN				
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65%	100%	100%	100%
	Kawasan Kumuh	2	0	0	0
	Luas kawasan permukiman kumuh	30.60 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
e.	URUSAN PERHUBUNGAN				
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	325.000.000	360.000.000	365.000.000	365.000.000
	Jumlah uji kir angkutan umum	2700	3200	3300	3300
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis				
	Kepemilikan KIR angkutan umum	2676	3100	3200	3200
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit
	Pemasangan Rambu-rambu	489	0	0	0
f.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Prosentase Penanganan sampah	90%	100%	100%	100%
	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	20%	70%	80%	80%
g.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL				
	Kepemilikan KTP	52.135	77.947	84.476	84.476
	Kepemilikan akta kelah	61.349	68.975	62.803	62.803
h.	URUSAN SOSIAL				
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	80%	86%	88%	88%
i.	URUSAN TENAGA KERJA				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,59	76,33	77	77
	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	64	94	94	94
	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrialBesaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjia Bersama (PB)	24 18	36 18	38 18	38 18
	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	7536	8500	8500	8500
	Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan				
	- Besaran Pemeriksaan perusahaan	180	Ke provinsi	Ke provinsi	Ke provinsi
	- Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	360	Ke provinsi	Ke provinsi	Ke provinsi
j.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Persentase Koperasi aktif	82	87	88	88
	Usaha Mikro dan Kecil	9.527	10.013	10.113	10.113
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	9.478	9.964	10.064	10.064
	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49
k.	URUSAN KEBUDAYAAN				
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	63	65	65
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	5%	25%	30%	30%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
I.	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Gelanggang/balai remaja/lapangan olahraga (selain milik	6	7	7	7
m.	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Jumlah organisasi pemuda	27	27	27	27
	Jumlah organisasi olahraga	33	33	33	33
	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	10	10
	Jumlah kegiatan olahraga	10	10	10	10
	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	3	3	3	3
	Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas & OKP	3	3	3	3
	Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	722	250	250	250
	PKK aktif	28	28	28	28
	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%
	LPM Berprestasi	100%	100%	100%	100%
n.	URUSAN KETAHANAN PANGAN				
	Score Pola Pangan Harapan	90	92	93	93
	Regulasi ketahanan pangan				
o.	URUSAN KEARSIPAN				
	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	3 SKPD	18 SKPD	24 SKPD	24 SKPD
	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg
p.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Web site milik pemerintah daerah	12 bh	23 Buah	27 Buah	27 Buah
	Jumlah jaringan komunikasi	21 green field, 40 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.365	0.365	0.365	0.365
	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	27	31	31	31
q.	URUSAN PERPUSTAKAAN				
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	9.536	19.536	21.536	21.536
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.750	3.850	3.850	3.850
	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1
II.	URUSAN PILIHAN				
a.	URUSAN PERTANIAN				
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	66,7	65,4	65,5	65,5
	Produksi perikanan	355 ton	354.68 ton	355 ton	355 ton
b.	URUSAN INDUSTRI				
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6.9	7.4	7.5	7.5
	Pertumbuhan Industri		5%	5%	5%
	Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri				
	Cakupan bina kelompok pengrajin	20 KUB	30 KUB	30 KUB	30 KUB
III.	FUNGSI PENUNJANG				
a.	PERENCANAAN				
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada
b.	KEUANGAN				
	Peningkatan PAD (%)	66.027.359.716	118.034.619.698	1.077.173.651.980	1.077.173.651.980

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yang memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai dokumen tahunan, penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lain, baik dokumen perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, hasil analisis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 bersifat sangat strategis karena merupakan pelaksanaan rencana kerja Walikota terpilih yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan hal di atas, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bukittinggi Tahun 2021. RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun dengan melibatkan berbagai pihak melalui koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, karena RKPD merupakan komitmen dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bukittinggi.

Akhirnya harapan kita bersama, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan bermanfaat. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, khususnya dalam pencapaian Visi Kota Bukittinggi ***“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***

WALIKOTA BUKITTINGGI,



M. RAWLAN NURMATIAS



LAMPIRAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITINGGI TAHUN 2021



RKPD 2021

LAMPIRAN I

HASIL PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN

**BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH**

MATRIK USULAN PEMUTAKHIRAN PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YANG BELUM TERTAMPUNG PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1		2	3	4		5	6	7	8
						Penunjang Urusan Pemerintah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja		
		Program Pelayanan Administrasi							
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor							diusulkan untuk dijadikan sebagai sub kegiatan

SKPD : DINAS KESEHATAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1		2	3	4		5	6	7	8
1	1	1		X	XX	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	1	1	21	X	XX	1	2		diusulkan untuk dijadikan sebagai sub kegiatan

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1		2	3	4		5	6	7	8
1	03	01	01						
1	03	01	01	21					diusulkan sebagai sub kegiatan
1	03	01	15					Program Penyelenggaraan Jalan	

1	03	01	15	02	Peningkatan Trotoar										Usulan pemutakhiran : diusulkan memunculkan sub kegiatan pembangunan trotoar/Rehabilitasi Trotoar/ Pemeliharaan trotoar.
1	03	01	15	04	Pembangunan Jalan Dalam Kota										Usulan pemutakhiran : diusulkan memunculkan sub kegiatan pembangunan jalan/Rehabilitasi jalan/Pemeliharaan jalan.
1	03	01	15	06	Pembangunan Jembatan										menjadi bagian dari Rincian Belanja pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
1	03	01	15	08	Pembangunan Trotoar										Usulan pemutakhiran : diusulkan memunculkan sub kegiatan pembangunan trotoar/Rehabilitasi Trotoar/Pemeliharaan trotoar.
1	03	01	17		Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong										
1	03	01	17	05	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan								Penyelenggaraan Jalan Kabupaen/Kota	Rekonstruksi Jalan	Usulan pemutakhiran : diusulkan memunculkan sub kegiatan pembangunan Dam Jalan

1	03	01	18		Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan											Usulan pemutakhiran : diusulkan memunculkan sub kegiatan pembangunan Dam Bangunan
1	03	01	36		PROGRAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN GEDUNG											
1	03	01	37	01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum											Diusulkan untuk Pemutakhiran : menjadi sub kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan dan Penerangan Fasilitas Umum/ pengelolaanLampu penerangan Jalan dan Penerangan Fasilitas Umum/Revitalisasi Lampu penerangan Jalan dan Penerangan Fasilitas Umum /pemeliharaan Lampu penerangan Jalan dan Penerangan Fasilitas Umum
1	03	01	37	03	Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum - Belanja Urusan Rp. 430.000.000 - Musrenbang a. Pemasangan Lampu di Kel. Pakan Kurai Rp. 120.000.000 b. Pemasangan Lampu di Kel. Bukit Apit Puhun Rp. 100.000.000 c. Pemasangan Lampu di Kel. Guguk Panjang Rp. 300.000.000											
1	03	01	37	04	Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum											
1	03	01	37	05	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum											

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	8		
1	2	3	4	5	6	7				
		Program pelayanan administrasi								
		Penyediaan Jasa Keamanan kantor							Disusulkan sebagai sub kegiatan	
		Program Pembangunan Prasarana dan Peningkatan Pengelolaan Terminal dan parkir							Diusulkan untuk pemutakhiran : sub kegiatan operasional terminal	

				Pengelolaan gedung parkir									Diusulkan untuk pemutakhiran :Sub Kegiatan Pengelolaan perparkiran
													Diusulkan untuk pemutakhiran : Sub kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana parkir
													Diusulkan untuk pemutakhiran : sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan parkir
				Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor									
				Penunjang operasional UPTD pengujian kendaraan bermotor									Usulan Pemutakhiran : Sub Kegiatan Operasional pengelolaan pengujian kendaraan bermotor
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									
				Pemuntakiran Data Perbengkelan									Diusulkan untuk pemutakhiran sebagai subkegiatan

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.1 7 7.0 1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						

2.1 7	2.1 7.0 1	01	21	11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor											Usulan pemutakhiran sebagai sub kegiatan
----------	-----------------	----	----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

SKPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Jasa Keamanan Kantor							Usulan pemutakhiran sebagai sub kegiatan

SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan							Diusulkan sebagai subkegiatan sertifikasi keamanan pangan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota
	Penyusunan Data Statistik Dan Informasi Pertanian							Diusulkan sub kegiatan Penyediaan Data dan informasi sumber daya Pertanian pada kegiatan seluruh jenis komoditi pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan		3	27	02			

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8				
		Program Peningkatan pengembangan sistim									
		Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD		X	XX	1	2.01	1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
		Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan DapoPAUD-Dikmas			XX	1	2.01	04	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
		Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi									
		Pembuatan Buku Profil Pendidikan									
		Penyusunan Database Perencanaan SPM Pendidikan									
		Rakor Kependidikan									
		Program Pelayanan Administrasi									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		X	XX	01	2.03	01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		X	XX	01	2.03	02	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		X	XX		2.03	06	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		X	XX	01	2.03	08	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		X	XX	1	2.03	10	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		X	XX	01	2.03	11	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		X	XX	01	2.03	12	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Makanan dan Minuman		X	XX	01	2.03	17	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi		X	XX	01	2.03	18	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8				
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		1	1	2	2.01	25	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD/MI							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD/MI							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Pelaksanaan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) TK SD							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Penunjang Tim Koordinasi Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Reguler		1	1	2	2.01	28	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		Operasional DAK SD/SMP									
		Penunjang Pengelolaan Bantuan Hibah/Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Dasar									
		Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi									
		Penunjang Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD									
		Penerimaan Peserta Didik Baru									
		Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama		1	1	2	2.02	12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Pengadaan Meubiler SMP		1	1	2	2.02	27	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebeluer Sekolah
		Rehab Mushala SDN 02 Percontohan									
		Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter SMP		1	01	02	2.02	36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
		Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran SMP Tahun 2021		1	1	2	2.02	37	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan									
		Pelaksanaan akreditasi sekolah			1	2	2.04	39	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Penjaminan Mutu Pendidikan									
		Program Anugrah Ki Hajar									
		Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP/MTs		1	1	2	2.03	39	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8				
		Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Guru melalui wadah MGMP dan KKG									
		Peningkatan Kompetensi manajemen Kepala Sekolah									
		Recruitmen Calon Kepala Sekolah									
		Recruitmen Calon Pengawas									
		Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS		1	1	2	2.02	39	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri									
		Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS		1	1	2	2.02	39	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri									
		Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS		1	1	2	2.02	39	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
		Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri									
		Pemeriksaan berkas Tunjangan Profesi guru (TPG) dan Aneka Tunjangan Guru		1	1	2	2.02	40	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pembinaan dan Seleksi OGN Guru SD dan SMP									
		Peningkatan Kompetensi manajemen Kepala Sekolah									
		Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional									
		Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Guru melalui wadah MGMP dan KKG									
		Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP									
		Recruitmen Calon Kepala Sekolah									
		Recruitmen Calon Pengawas									
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan									
		Pelaksanaan akreditasi sekolah		1	1	2	2.03	14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
		Pemeriksaan berkas Tunjangan Profesi guru (TPG) dan Aneka Tunjangan Guru		1	1	2	2.03	16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Lomba PAUD dan Dikmas Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional							
	Manajemen DAK Fisik Satuan Pendidikan TKNPembina, TK N 1, SPNF SKB dan PKBM							
	Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Satuan Pendidikan PAUD PNF							
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan							
	Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri		1 1 2 2.04 14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah		2 22 2 2.01 1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
	Pelatihan Panitahan Kurai Limo Jorong							
	Mengikuti event seni budaya							
	Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda							
	Festifal Seni Budaya Anak Nagari Kota Bukittinggi							
	Pelatihan Adat se Kota Bukittinggi (pokir 80.000.000)							
	Pawai Alegoris HUT RI		2 22 2 2.01 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan		
	Penunjang Kegiatan Lembaga Adat		2 22 2 2.03 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		
	Pembangunan Gedung serbaguna		2 22 2 2.03 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN		
1		2	3	4		5	6		7		
		Pembinaan Sanggar dan Perguruan silat di Kota Bukittinggi		2	22	3	2.01	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Seni dan Budaya (pokir 200.000.000)									
		Registrasi Cagar Budaya Daerah		2	22	5	2.01	1	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Register Cagar Budaya
		Pelestarian Cagar Budaya		2	22	5	2.02	2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
		Pengelolaan Operasional Museum Rumah Kelahiran Bunga Hatta		2	22	6	2.01	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
		Pengadaan sarana dan Prasarana RKBH		2	22	6	2.01	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		Program BOS		1	1	2	2.01		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Kegiatan BOS SD							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 01 Campago Ipuh
				1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
				1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 02 Campago Guguk Bulek
				1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
		Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 03 Pulai Anak Air

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8			
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
	Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 04 Garegeh
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
	Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
	Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 06 Pulai Anak Air
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
	Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
	Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 08 Campago Ipuh
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 09 Manggis Ganting		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 11 Campago Gugak Bulek		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 13 Kubu Gulai Banchah		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 14 Tanjung Alam		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8			
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
	Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 15 Pulai Anak Air
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
	Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 16 Campago Ipuh
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
	Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 17 Manggis Ganting
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
	Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
	Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas
			1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 02 Percontohan		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 03 Pakan Kurai		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 05 Tarok Dipo		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 06 Aur Tajung Tangah Sawah		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 07 Bukit Cangang		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 08 Tarok Dipo		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 12 Bukit Cangang		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 14 Aur Tajung Tangah Sawah		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 16 Tarok Dipo		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 17 Pakan Kurai		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 18 Tarok Dipo		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 19 Aur Tajung Tangah Sawah		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 01 Ladang Cangkiah		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 02 Aur Kuning		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 03 Pakan Labuah		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 04 Birugo		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 05 Birugo		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
	Kegiatan BOS SD		1 1 2 2.01 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 06 Parit Antang		
			1 1 2 2.01 23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6		7			
		Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 07 Belakang Balok	
				1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 08 Kubu Tanjung	
				1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 09 Belakang Balok	
				1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 10 Sapiroan	
				1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	UPTD SD Negeri 11 Aur Kuning	
				1	1	2	2.01	23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SD		1	1	2	2.01	21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN		
1		2	3	4		5	6		7		
		Penyelenggaraan SMP		1	1	2	2.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	UPTD SMPN 1	
				1	1	2	2.02	36 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SMP		1	1	2	2.02	32 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	UPTD SMPN 2	
				1	1	2	2.02	36 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SMP		1	1	2	2.02	32 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	UPTD SMPN 3	
				1	1	2	2.02	36 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SMP		1	1	2	2.02	32 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	UPTD SMPN 4	
				1	1	2	2.02	36 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SMP		1	1	2	2.02	32 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	UPTD SMPN 5	
				1	1	2	2.02	36 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6		7			
		Kegiatan BOS SMP		1	1	2	2.02	32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	UPTD SMPN 6	
				1	1	2	2.02	36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SMP		1	1	2	2.02	32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	UPTD SMPN 7	
				1	1	2	2.02	36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SMP		1	1	2	2.02	32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	UPTD SMPN 8	
				1	1	2	2.02	36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
		Kegiatan BOS SMP		1	1	2	2.02	32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		Penyelenggaraan TKN		1	1	2	2.03		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	UPTD TKN Pembina	
		Penyelenggaraan TK N Pembina		1	1	2	2.03	13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
		BOP PAUD							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		BOP TKN Pembina		1	1	2	2.03	11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	UPTD TKN 1	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN		
1		2	3	4		5	6		7		
		Gerbang Puskesmas Tarok Dipo		X	XX	01	2.03			Kegiatan dipindahkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Bantuan pengadaan alat kesehatan		X	XX	01	2.03	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	
		Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja SKPD									
		Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD		X	XX	1	2	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
1		URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG									
1	06	KESEHATAN									
1	1	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
		Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan		1	2	2	2	18 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
				1	2	2	2	19 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten./Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
				1	2	2	2	3 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan		1	2	2	2	16 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
1	1	16	42	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas		1	2	2	26 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	8		
1		2	3	4		5	6	7			
				1	2	5	2	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
				1	2	5	2	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1	1	19	7					29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
1	1	30									
1	1	30	8					7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1	1	22									
1	1	22	5					25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
								11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1	1	22	9					20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1	1	22	12					20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Surveillance/ Pengendalian penyakit tidak menular
								8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB Ke lab Rujukan

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN								
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN										
1		2	3	4		5	6	7										
1	24	7	1	2	2	35		8										
1	1	24	7						Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
									Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Tenaga dan Sarana Kesehatan						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
									Sosialisasi dan Pengawasan Perizinan Tenaga/Sarana Kesehatan						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	
1	1	5							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1	1	5	5						Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
															PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
															PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	
															PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusiadi Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	
															PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
															PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Tenaga Kesehatan	
															PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3		4		5	6	7		8		
					1	2	3	2.1	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
													Rincian belanja pada kegiatan administrasi umum
1	1	17			1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
1	1	17	7		1	2	4	2	1	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
1	1	17	6		1	2	4	2	2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					1	2	4	2	3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
1	1	17			1	2	2						
1	1	17	1		1	2	2	2	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
					1	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	
1	1	17			1	2	2						

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	8				
1		2	3	4		5	6	7					
1	17	1		1	2	2	2	26					
1	17	1		1	2	2	2	26	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	17	2		1	2	2	2	26				Gabung dg Keg JKN lainnya	
1	31												
1	31	2		1	2	4	2	1	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
				1	2	4	2.1	1		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		
UPTD PUSKESMAS/ INSTALASI FARMASI/LABORATORIUM													
1	16			1									
									UPTD Puskesmas Rasimah Ahmad				
1	16	35		1	2	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Opreasional Pelayanan Puskesmas Rasimah Amad-JKN/Kapitasi		
1	16	19		1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Rasimah Ahmad (APBD)		
									UPTD Puskesmas Guguk Panjang				
1	16	36		1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang-JKN/Kapitasi		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6	7			
1	16	20		1	2	2	2	33	8		
1	16	20	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Guguk Panjang	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Nilam Sari	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Guguk Panjang (APBD)
1	16	37	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari-JKN/Kapitasi	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari-JKN/Kapitasi
1	16	21	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Nilam Sari	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Mandiangin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Nilam Sari (APBD)
1	16	38	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin-JKN/Kapitasi	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin-JKN/Kapitasi
1	16	22	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandiangin	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Gulai Bancah	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Mandiangin (APBD)
1	16	39	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah-JKN/Kapitasi	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah-JKN/Kapitasi
1	16	23	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gulai Bancah	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Tigo Baleh	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Gulai Bancah (APBD)
1	16	40	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh-JKN/Kapitasi	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh-JKN/Kapitasi
1	16	24	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tigo baleh	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPTD Puskesmas Plus Mandiangin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Tigo Baleh (APBD)

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3		4		5	6	7		8		
1	1	16	41	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin-JKN/Kapitasi	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin-JKN/Kapitasi	
1	1	16	25	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plus Mandiangin	1	2	2	2	33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas Plus Mandiangin (APBD)	
1	1	15		Program Obat dan Pembekalan Kesehatan									
										UPTD INSTALASI FARMASI			
1	1	15	1	Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan	1	2	2	2	16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	
					1	2	2	2	17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan Bahan Habis Pakai	
1	1	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat									
										UPTD LABORATORIUM KESEHATAN			
1	1	21	6	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	1	2	2	2	34	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
RSUD													
1	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X	XX	1	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X	XX	1	2	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
1	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	X	XX	1	2	6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
1	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	X	XX	1	2	8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
1	1	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	X	XX	1	2	9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITINGGI

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM		KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	03	01	01								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	03	01	01	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
1	03	01	01	02					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
1	03	01	01	06					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional							
1	03	01	01	08					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor							
1	03	01	01	10					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor
				Penyediaan Alat Tulis Kantor							
1	03	01	01	11					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
1	03	01	01	12					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor							
1	03	01	01	17					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman
				Penyediaan Makanan dan Minuman							
1	03	01	01	18					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi
				Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi							
1	03	01	01	19					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
1	03	01	01	21							Usulan pemutakhiran
				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor							
1	03	01	01	22					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
				Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah							
1	03	01	01	23					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Umum	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
				Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek							
1	03	01	05								
				Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD							

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN								
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE		PROGRAM			KEGIATAN		SUBKEGIATAN					
1		2			3			4		5			6		7		8			
1	03	01	05	01	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD															
1	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
1	03	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor															
1	03	01	02	23	Pengadaan Kendaraan Dinas															
1	03	01	02	24	Pengadaan Pompa Hydran dan Jaringannya															
1	03	01	02	25	Pengadaan Bangunan gedung Tempat															
1	03	01	02	26	Pengadaan Perlengkapan Kantor															
1	03	01	02	27	Pengadaan Peralatan Kantor															
1	03	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
1	03	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya															
1	03	01	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
1	03	01	04	01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur															
1	03	01	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan															
1	03	01	15	01	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Trotoar															
1	03	01	15	02	Peningkatan Trotoar															

Usulan pemutakhiran : diusulkan memunculkan sub kegiatan pembangunan trotoar/Rehabilitasi Trotoar/ Pemeliharaan trotoar.

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN					
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR		KODE			PROGRAM			KEGIATAN		SUBKEGIATAN		
1		2			3		4			5			6		7		8
1	03	01	15	03	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota						Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan				
1	03	01	15	04	Pembangunan Jalan Dalam Kota												Usulan pemutakhiran : diusulkan memunculkan sub kegiatan pembangunan jalan/Rehabilitasi jalan/Pemeliharaan jalan.
1	03	01	15	05	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jembatan						Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem				
1	03	01	15	06	Pembangunan Jembatan												menjadi bagian dari Rincian Belanja pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
1	03	01	15	07	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Trotoar						Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan				
1	03	01	15	08	Pembangunan Trotoar												Usulan pemutakhiran : diusulkan memunculkan sub kegiatan pembangunan trotoar/Rehabilitasi Trotoar/Pemeliharaan trotoar.
					Penyusunan Leger jalan						Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan				
1	03	01	15	09	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan				
1	03	01	16		Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong												
1	03	01	16	05	Peningkatan Drainase						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Dan Lingkungan				
											Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Dan Lingkungan				

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN						
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE					PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2			3			4					5	6	7		8	
1	03	01	16	06	Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		
1	03	01	17		Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong													
1	03	01	17	05	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan									Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan		
1	03	01	17	05	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Jalan										Penyelenggaraan Jalan Kabupaen/Kota	Rekonstruksi Jalan		Usulan pemutakhiran : diusulkan memunculkan sub kegiatan pembangunan Dam Jalan
1	03	01	17	05	Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan									Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		
1	03	01	18		Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan													Usulan pemutakhiran : diusulkan memunculkan sub kegiatan pembangunan Dam Bangunan
1	03	01	18	01	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan		
1	03	01	18	07	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Dalam Kota													Digabung belanja pada sub kegiatan Rehabilitasi jalan
1	03	01	18	07	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin jalan, Jembatan dan Trotoar Dalam Kota													Digabung belanja pada sub kegiatan Rehabilitasi jalan
1	03	01	18	10	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Bidang Jalan 2021)													Digabung pada sub kegiatan Rehabilitasi berkala jalan
1	03	01	18	11	Perencanaan DAK Jalan 2022													Masuk rincian belanj dari sub kegiatan Rehabilitasi berkala jalanb
1	03	01	23		Program peningkatan sarana dan prasarana Kebnamargaan													

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1		2			3			4			5	6	7
1	03	01	23	15	Pemeliharaan Alat-alat Berat					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	
1	03	01	23	16	Pengelolaan Logistik dan Perbekalan					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /	
1	03	01	23	17	Pengadaan Alat Berat					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	
1	03	01	23	18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	
1	03	01	23	19	Pengadaan Peralatan Bengkel					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	
1	03	01	23	20	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPTD Perlengkapan dan Peralatan)	
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Perlengkapan dan Peralatan)	
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Perlengkapan dan Peralatan)	
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD Perlengkapan dan Peralatan)	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (UPTD Perlengkapan dan Peralatan)	
1	03	01	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya								
1	03	01	24	01	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis, Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
1	03	01	24	02	Rehab/peningkatan Saluran Irigasi					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1		2			3			4			5	6	7
1	03	01	24	03	Pemeliharaan Rutin Irigasi					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
										Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi Pemeliharaan Bendung Irigasi	
1	03	01	24	04	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1	Penyusunan Rencana Teknis, Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
1	03	01	24	05	Pembangunan Saluran Irigasi					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
1	03	01	24	05	DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi 2021)					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
1	03	01	24	23	Perencanaan DAK Irigasi 2022					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pada	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
1	03	01	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								
1	03	01	27	10	Pengadaan dan pemasangan pipa air jaringan air minum (Sisa DAK fisik air minum tahun 2010-2018)					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan (5 paket perluasan ditambah SR di panorama baru)	
1	03	01	27	12	Pendampingan Pengembangan Jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan (untuk pekerjaan zona 1 bangkawah)	
1	03	01	27	13	Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR		KODE		PROGRAM		KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1		2			3		4		5		6	7	8
					DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (fisik) Sisa DAK Tahun 2010 - 2015					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	03	01	31		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG								
1	03	01	31	19	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	
1	03	01	31	24	Sosialisasi Tata Ruang					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	
1	03	01	31	20	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
1	03	01	31	23	Pemetaan dan Pematokan Rencana Jalan yang Telah diserahkan Masyarakat								Masuk bagian dari Rincian Belanja pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1	03	01	31	22	Lanjutan Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok								
1	03	01	31	18	Pembuatan Keterangan Rencana Kota					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	
1	03	01	31	21	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
1	03	01	31	25	Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penataan Ruang	
1	03	01	33		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG								
1	03	01	33	09	Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukun bidang Penataan Ruang	
1	03	01	33	13	Pembuatan papan pengumuman pengendalian pemanfaatan ruang								

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR		KODE		PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN		
1		2			3		4		5		6		7		8
1	03	01	33	12	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
1	03	01	35		PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA SOSIAL KEMASYARAKATAN dan PENINGKATAN FASILITAS UMUM										
1	03	01	35	01	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun III (Ketiga)						Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan , Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
1	03	01	35	02	Event-Event Daerah dan Nasional										Tidak menjadi bagian kegiatan dari urusan pekerjaan Umum
1	03	01	35	03	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Bersama Nama Kegiatan menjadi Pembangunan Kantor Bersama (BK, Bapelitbang, BKPSDM, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Komindo) PRIORITAS						Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan , Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
1	03	01	35	05	Penataan Kawasan Rumah Kelahiran Bung Hatta PRIORITAS										
1	03	01	35	06	Revitalisasi/Pembangunan Kembali Pasar Bawah dan Pasar Aua Tajungkang PRIORITAS										
1	03	01	36		PROGRAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN GEDUNG										
1	03	01	36	01	Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung						Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	
1	03	01	37	01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum										Diusulkan untuk Pemutakhiran : menjadi sub kegiatan Pengadaan Lampu penerangan Jalan dan

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR		KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1		2			3		4		5	6	7	8
1	03	01	37	03	Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum - Belanja Urusan Rp. 430.000.000 - Musrenbang a. Pemasangan Lampu di Kel. Pakan							Penerangan Fasilitas Umum/ pengelolaanLampu penerangan Jalan dan Penerangan Fasilitas Umum/Revitalisasi Lampu penerangan Jalan dan Penerangan Fasilitas Umum /pemeliharaan Lampu penerangan Jalan dan Penerangan Fasilitas Umum
1	03	01	37	04	Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum							
1	03	01	37	05	Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum							
1	03	01	37	02	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum							
									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PFU)	
									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD PFU)	
									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPTD PFU)	
									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PFU)	
									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman (UPTD PFU)	
									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (UPTD PFU)	
1	03	01	38		PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI							
1	03	01	38	01	Pembinaan Jasa Konstruksi							
									Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	
									Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	
1	03	01	38	02	Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain							Tidak menadi urusan pada pekerjaan umum, tapi melekat pada pembangunan gedung pada skpd yang

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR					KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1		2			3					4	5	6	7
1	03	01	38	04	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	
1	03	01	16		PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN ,PENGUNAAN dan PEMANFAATAN TANAH								
1	03	01	16	03	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah					Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	jika menyelesaikan tanah konflik sampai sertifikat, pekerjaan pu, namun jika tanah lama hanya untuk mensertifikat itu urusan aset. kegiatan sertifikasi aset
1	03	01	16	04	Pengadaan Tanah Pembangunan Relokasi Rumah Dinas Pegawai Lembaga Pemasarakatan Bukittinggi								Merupakan bagian dari rincian belanja pada sub kegiatan pembangunan rumah dinas ex-LP
					Inventarisasi Tanah Ulayat					Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan Tanah Ulayat	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	
1	03	01	16	05	Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi								Bagian Rincian Belanja Dalam Kegiatan Pembangunan Fisik oleh SKPD pengusul
1	03	01	17		PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN								
1	03	01	17	02	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass ,masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya					Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	
										Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	
1	03	01	18		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN								
1	03	01	18	02	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi								gabungkan ke dalam sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR		KODE		PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2			3		4		5		6		7		8	
x	xx	xx	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
x	xx	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat			X	XX	01	2.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
x	xx	xx	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik			X	XX	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
x	xx	xx	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional			X	XX	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
x	xx	xx	01	04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			X	XX		2.03	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
x	xx	xx	01	05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			X	XX	01	2.03	08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
x	xx	xx	01	06	Penyediaan Alat Tulis kantor			X	XX	01	2.03	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
x	xx	xx	01	07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			X	XX	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
x	xx	xx	01	08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			X	XX	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
x	xx	xx	01	09	Penyediaan Makanan dan Minuman			X	XX	01	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	
x	xx	xx	01	10	Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi			X	XX	01	2.03	17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
x	xx	xx	01	11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			X	XX	01	2.03	18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek			X	XX	01	2.03	07				
x	xx	xx	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019						KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR		KODE		PROGRAM		KEGIATAN			SUBKEGIATAN		
1		2		3		4		5		6			7		
8		9		10		11		12		13			14		
x	xx	xx	02	26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		X	XX	01	2.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		
					Pengadaan Perlengkapan Kantor						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Kantor		
					Pengadaan Peralatan Kantor						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Kantor		
x	xx	xx	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										
x	xx	xx	06	01	Penyusunan Renstra OPD		X	XX	01	2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		
										01					
1					URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG										
					Program Lingkungan Sehat Perumahan										
					Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan		1	04	04	2	01	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMU (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Pembangunan Riol										
					Rehab/ Peningkatan Riol										
					Pembangunan Jalan Lingkung										
					Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan										
					Pemutakhiran basis data PSU									Menjadi rincian belanja sub kgtn perencanaan psu perumahan	
					Pembangunan Septictank komunal							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Program Pengembangan Perumahan										
					Pemutakhiran Basis Data Perumahan							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penertiban izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1		2	3	4		5	6	7		
			Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah						kgtn melekat pada sub kgtn yang menjadi hibah seperti rumah & PSU	
			Bedah Rumah			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	peningkatan Kawasan permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan RTLH untuk pencegahan terhadap dan Berkembangnya permukiman kumuh		
			Jasa kebersihan dan keamanan Rusunawa			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Pengguna RUSUN		
			Program Pemberdayaan Komunitas							
			Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM						Bukan urusan Dinas Perkim	
			Pembangunan Gedung/ Gapura			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMU (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
			Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penebitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pembangunan dan Pengembangan Kawasan PKP		
			Pendamping Kegiatan BSPS		1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	peningkatan Kawasan permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	kerjasama Perbaikan RTLH beserta PSU		
			Penyusunan Perda RP3KP			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penebitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Penyusunan dan/atau review serta legalitas Rencana Pemb. Dan Pengembangan kawasan permukiman dn permukiman kumuh		
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman							
			Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMU (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS KEBAKARAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4				5	6	7	8		
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN										
		Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD		x	xx	01	2.01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		x	xx	01	2.02	04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		x	xx	01	2.02	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		x	xx	01	2.02	07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		x	xx							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		x	xx	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		x	xx	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		x	xx	01	2.03	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		x	xx	01	2.03	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
		Pelaksanaan Proses Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		x	xx	01	2.03	07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		x	xx	01	2.03	08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		x	xx	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		x	xx	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		x	xx	01	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6	7			
								8			
		Pengadaan Perlengkapan Kantor		x	xx	01	2.03	13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Pengadaan Peralatan Kantor									
		Penyediaan Makanan dan Minuman		x	xx	01	2.03	17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		x	xx	01	2.03	18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		Pengadaan Mobeler		x	xx	01	2.03	25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Mebeleur
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		x	xx	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor		x	xx	01	2.03	38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		x	xx	01	2.04	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEG.PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
		Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran		x	xx	01	2.04	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEG.PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pendidikan dan Pelatihan Formal
				x	xx	01	2.04	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEG.PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
				x	xx						
		PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN		x	xx						
		Keg. Penanggulangan Kebakaran		x	xx		2.01	02	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6		7			
1	2	3	4	5	6	7	8					
1.05	02	02	22	1	05	01	02.01	28	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	
												Tidak ada Pemetaan untuk SKPD Satpol PP
1.05	01	05										
1.05	01	05	01	1	05	01	02.01	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
1.05	02	03										
1.05	02	03	02	1	05	02	02.04	02	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
1.05	02	05										
1.05	02	05	06	1	05	02	02.01	05	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	
1.05	02	05	07									
1.05	02	16										
1.05	02	16	06	1	05	02	2:01	02	Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	
1.05	02	16	07	1	05	02	2:02	03	Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	
1.05	02	16	08									
1.05	02	16	09									
1.05	02	16	10									
1.05	02	16	11	1	05	02	2:02	02	Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8					
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN										
		Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD		x	xx	01	2.01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		x	xx	01	2.02	04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		x	xx	01	2.02	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		x	xx	01	2.02	07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		x	xx							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		x	xx	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		x	xx	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		x	xx	01	2.03	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		x	xx	01	2.03	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
		Pelaksanaan Proses Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		x	xx	01	2.03	07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		x	xx	01	2.03	08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		x	xx	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		x	xx	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		x	xx	01	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		Pengadaan Perlengkapan Kantor		x	xx	01	2.03	13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7				
		Pengadaan Peralatan Kantor				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengengkapan Kantor				
		Penyediaan Makanan dan Minuman		x	xx	01	2.03	17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		x	xx	01	2.03	18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
		Pengadaan Mobeler		x	xx	01	2.03	25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Mebeleur	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		x	xx	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor		x	xx	01	2.03	38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		x	xx	01	2.04	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEG.PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
		Program Sistem Kebencanaan										
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Keg. Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan Bencana Alam dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
		Operasional Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS)							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Keg. Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan Bencana Alam dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian operasional dan penyediaan sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota	
		Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Petugas BPBD							Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Keg. Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan Bencana Alam dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1		2	3	4		5	6	7		
			Pelatihan KBLK			Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Keg. Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan Bencana Alam dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/kota		
			Pendampingan Kegiatan BPBD Propinsi (Jambore PRB, Simulasi Bencana dan Lomba Pasang Tenda)			Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Keg. Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan Bencana Alam dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan Bencana Kab/Kota		
			Bintek dan simulasi penanggulangan bencana						Gabung ke sub kgtn Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/kota	
			Pembuatan Sarana Deteksi Kebencanaan			Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebencanaan	Sarana Prasarana Proteksi Kebencanaan		
			penyusunan kajian resiko bencana, penanggulangan dan rencana aksi tingkat kelurahan			Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Bencana	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/ Kota	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/ Kota	
			pembentukan dan pelatihan siaga bencana di setiap kelurahan						Gabung ke sub kgtn Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/kota	
			Pendampingan Kegiatan BPBD Propinsi (Jambore PRB, Simulasi Bencana dan Lomba Pasang Tenda)			Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Bencana			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS			Program Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparat Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Bencana			
			Pelatihan dan penyediaan sarana fasilitas penanggulangan bencana						gabung ke sub kgtn Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITINGGI

SKPD : DINAS SOSIAL

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE					PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4					5	6	7	8		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4	02	01	2.03	01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4	02	01	2.03	02	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Sosial/ Operasional		4	02	01	2.03	06	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		4	02	01	2.03	08	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4	02	01	2.03	10	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		4	02	01	2.03	11	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Penyediaan Alat Tulis Kantor	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4	02	01	2.03	12	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruangan Kantor		4	02	01	2.03	17	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		Penyediaan Makanan dan Minuman		4	02	01	2.03	18	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Penyediaan Makanan dan Minuman	
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi		4	02	01	2.04	19	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
		Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		4	01	01	2.03	28	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	
		Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Kusuma Bhakti		1	06	07	2.01	01	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6		7			
				1	06	07	2.01	02	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	
				1	06	07	2.01	03	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	
									Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
				4	01	01	2.02	04	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
									Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			
									Pendataan DTKS dan PMKS lainnya			
				1	06	04	2.02	01	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				1	06	04	2.02	07	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
									Peningkatan SDM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan			
									Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian PMKS			
									Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PRSE			
									Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
				1	06	04	2.01	12	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	
								05	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
								09	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1		2	3		4		5	6	7		8
							10	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	Pemberian Layanan Kedaruratan	
							11	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	Pemberian Layanan Penelusuran keluarga	
				Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan		1 06 05 2.01	01	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
						1 06 05 2.01	02	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar	
						1 06 05 2.01	03	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	
				Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan		1 06 04 2.02	09	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
							10	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	
							03	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti	Penyediaan Alat Bantu	
							05	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
							11	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti	Pemberian Layanan Penelusuran keluarga	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN		
1		2	3	4		5	6		7		
				1	06	02	2.03		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	
				1	06	02	2.03	04	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
				1	06	02	2.03	05	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
				1	06	02	2.03		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
									Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial
									Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
				1	06	06	2.01	01	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
				1	06	06	2.01	02	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
				1	06	06	2.01	03	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6	7	8		
				1	06	06	2.01	04	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi kelompok rentan
				1	06	06	2.01	05	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial
			Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana)	1	06	06	2.02	01	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
				1	06	06	2.02	02	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
			Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pegelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kota Bukittinggi
			Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan								
			Pelatihan Usaha bagi Lanjut Usia Miskin Produktif						Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR		KODE		PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
2	02	01	01											
				program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran										
2	02	01	01	01	penyediaan jasa surat menyurat	x	xx	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2	02	01	01	02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	x	xx	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2	02	01	01	03	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	x	xx	01	2.03	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
2	02	01	01	04	penyediaan jasa kebersihan	x	xx	01	2.03	08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
2	02	01	01	05	penyediaan alat tulis kantor	x	xx	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
2	02	01	01	06	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	x	xx	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
2	02	01	01	07	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	x	xx	01	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2	02	01	01	08	penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor									masuk rician belanja
2	02	01	01	09	penyediaan makanan dan minuman	x	xx	01	2.03	17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	
2	02	01	01	10	rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	x	xx	01	2.03	18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
2	02	01	01	11	penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	x	xx	01	2.03	03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	02	01	01	13	pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	x	xx	02	2.04	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
2	02	01	02		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
2	02	01	02	01	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	x	xx	01	2.03	20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN								
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN										
1		2	3	4		5	6	7										
1	2	3	4	5	6	7	8											
2	02	01	02	03		pengadaan peralatan kantor		x	xx	1	2.03	13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
2	02	01	02	04		pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		x	xx	1	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			
2	02	01	02	05		Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor		x	xx	1	2.03	38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			
2	02	01	03			program peningkatan disiplin aparat												
2	02	01	03	1		pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		x	xx	01	2.04	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			
2	02	01	15			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				2	08	07	2.02					
2	02	01	15	01		Pelayanan dan perlindungan khusus anak				2	08	07	2.01	01	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	
2	02	01	16			Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.												
2	02	01	16	01		Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah.				2	08	02	2.01	03	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	
2	02	01	16	02		Pengelolaan Data Gender dan Anak				2	08	05	2.01	01	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di	
2	02	01	16	03		Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).				2	08	07	2.03	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang	
2	02	01	16	04		Pemenuhan Hak-hak Anak				2	08	06	2.01	01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha.	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN								
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN					
1		2			3			4			5	6	7					
8		9			10			11		12	13	14						
2	02	01	16	05	Pembinaan Forum Anak Daerah (Forda).				2	08	06	2.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	
2	02	01	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan													
2	02	01	16	01	Pelayanan Perempuan dan Anak korban kekerasan				2	08	03	2.02	01	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi	Penyediaan layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan		
									2	08	06	2.02	01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		
2	02	01	17	02	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga				2	08	04	2.01	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan		
2	02	01	17	03	KIE dan Advokasi Jelajah Three End				2	08	03	2.01	01	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan		
2	02	01	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan													
2	02	01	18	01	Perkuatan Organisasi Perempuan				2	08	02	2.02	01	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		
2	02	01	18	03	Penyelenggaraan , Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga				2	08	04	2.01	03	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga		
2	02	01	18	04	Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Perempuan				2	08	02	2.02	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik		
2	02	01	15		Program Keluarga Berencana													
2	02	01	15	01	Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS				2	14	03	2.01	02	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR		KODE		PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2			3		4		5		6		7		8	
2	02	01	15	02			2	14	03	2.02	03					
2	02	01	15	02	Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		2	14	03	2.02	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
2	02	01	15	03	Penilaian dan Penghargaan KB teladan		2	14	03	2.01	05	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)		
2	02	01	15	04	Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader		2	14	03	2.02	04	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
2	02	01	15	05	Pelaksanaan Kampung KB.		2	14	3	2.04	04	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB		
2	02	01	15	07	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera		2	14	04	2.02	04	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		
2	02	01	18		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri		2	14								
2	02	01	18	01	Pendataan Keluarga		2	14	02	2.02	12	PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN							
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2			3			4			5	6	7				
													8				
2	02	01	18	02	Koordinasi Koalisi Kependudukan			2	14	02	2.02	02	PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		
2	02	01	18	03	Sekolah Siaga Kependudukan			2	14	02	2.01	10	PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam Rangka	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		
2	02	01	18		Grand Design Pengendalian Penduduk (GDPK)			2	14	02	2.01	02	PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)		
2	02	01	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR												
2	02	01	20	01	Pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Generasi Berencana.			2	14	04	2.01	07	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3		4		5	6	7		8		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	11	01	2.03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi,	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
		Penyediaan Makanan dan Minuman			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	
		Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor											Usulan Pemutakhiran
		Penanggulangan resiko kerja pelayanan kebersihan dan pertamanan kota			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penanggulangan resiko kerja pelayanan kebersihan dan	
		Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan	
		Penyediaan administrasi Pengelolaan DAK			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan administrasi Pengelolaan DAK	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur											
		Lanjutan pembangunan pagar dan pembangunan gudang kantor DLH			2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Lanjutan pembangunan pagar dan pembangunan gudang kantor DLH	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6		7			
									8			
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	
		Pengadaan Perlengkapan Kantor		2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Paralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Pengadaan Peralatan Kantor										
		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	
		Pembuatan Kanopi dan Roof Top		2	11	01	2.03	..	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pembuatan Kanopi dan Roof Top	
		Program Peningkatan disiplin aparatur										
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		2	11	01	2.04	02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
		Peningkatan kapasitas Aparatur Pengelolaan Lingkungan Hidup		2	11	01	2.04	09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
		Penyusunan RPPLH		2	11	02	2.01	01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
		Pemantauan kualitas lingkungan hidup		2	11	03	2.01	01	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
		Pengelolaan laboratoritium lingkungan hidup										
		Pemantauan Kualitas Tanah dan Produksi Biomasa										
		Studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang tambuo kota bukittinggi										
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup										
		Pembinaan Kampung Iklim		2	11	03	2.01	02	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7				
			Pengembangan Data dan penyebarluasan informasi tentang lingkungan hidup dan penyuluhan keliling pada masyarakat	2	11	03	2.02	01	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Pembuatan Profil Dinas Lingkungan Hidup									
			Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah									
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau									
			Penyusunan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati	2	11	04	2.01	01	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Update profil keanekaragaman hayati									
			Pemeliharaan rutin taman dalam kota	2	11	04	2.01	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Pengadaan pot beserta bunga									
			Pengadaan sarana dan prasarana taman									
			Rehab Taman dalam kota (Taman depan DPRD)									
			Revitalisasi Taman Tugu Exponen 66									
			Pengembangan kawasan Taman Ngarai Maaram									
			Rehab Taman Tugu Imam Bonjol									
			Pembuatan Taman Pulau Jalan									
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
			Pelayanan perizinan PPLH	2	11	06	2.01	01	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	2	11	06	2.01	03	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN					
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12			
2	6	1	1												
2	06	01	01	01				2	12	01	2.03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	06	01	01	02				2	12	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	06	01	01	06				2	12	01	2.03	06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
2	06	01	01	08				2	12	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2	06	01	01	10				2	12	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2	06	01	01	11				2	12	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	06	01	01	12				2	12	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	06	01	01	17				2	12	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman
2	06	01	01	19				2	12	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	06	01	01	22				2	12	01	2.03	07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2	06	01	01	18				2	12	01	2.03	18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2	06	xx	xx												
2	06	xx	xx	xx				2	12	01	2.03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2	06	01	15												
2	06	01	15	15				2	12	02	2.01	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN						
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2			3			4			5	6	7			
													8			
								2	12	02	2.01	04	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2	06	01	15	17	Pelayanan Pindah Datang Penduduk			2	12	02	2.01	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	
								2	12	02	2.01	04	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2	06	01	15	20	Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan			2	12	02	2.01	06	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
2	06	01	15	21	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk			2	12	02	2.01	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	
2	06	01	15	16	Pelayanan Akta Kelahiran			2	12	03	2.01	01	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
								2	12	03	2.01	02	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
2	06	01	15	19	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian			2	12	03	2.01	01	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
								2	12	03	2.01	02	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
2	06	01	15	18	Pelayanan Akta Kematian			2	12	03	2.01	01	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
								2	12	03	2.01	02	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
2	06	01	15	14	Pengelolaan Administrasi Kependudukan dengan Aplikasi SIAK dan AFIS			2	12	04	2.03	6	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	
2	06	01	15	06	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan			2	12	04	2.01	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Penyajian Database	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan			2	12	04	2.01	05	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Penyajian Database	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	
2	06	01	15	15	Pelayanan Identitas Penduduk			2	12	04	2.02	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penataan Administrasi Kependudukan	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	
2	06	01	15	17	Pelayanan Pindah Datang Penduduk											
2	06	01	15	16	Pelayanan Akta Kelahiran											
2	06	01	15	19	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian											
2	06	01	15	18	Pelayanan Akta Kematian											
2	06	01	15	xx	Penyusunan Data Agregat Kependudukan			2	12	05	2.01	01	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		1. Penyediaan jasa surat menyurat				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	1. Penyediaan jasa surat menyurat		
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		
		5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor		
		7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
		8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
		9. Penyediaan Makanan Minuman				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	9. Penyediaan Makanan Minuman		
		10. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	10. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi		
		11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		
		Program Pengembangan dan Pencapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		1. Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN		
1		2	3	4		5	6		7		
		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi									
		1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-Government		2	16	03	2.02	01	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di lingkpu Pemerintah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)									
		Pengelolaan Aplikasi TPP		2	16	03	2.02	07	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di lingkpu Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
		Kustomisasi dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi									
		Pembuatan e PKK, e Posyandu, e Swadaya, e Administrasi Kelurahan ,e Dasawisma									
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa									
		1. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet		2	16	03	1.01	03	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		2. Pengadaan CCTV Online		2	16	03	2.02	03	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di lingkpu Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
		3. Pengelolaan dan peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center									
		Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi									
		1. Penataan dan pembinaan menara telekomunikasi		2	16	03	2.02	10	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di lingkpu Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
		Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa									
		1. Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		2	16	02	2.01	06	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006			PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	perangko, materai 3000, materai 6000, buku cek		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening telp, Pembayaran tagihan rekening air, Pembayaran tagihan rekening listrik, Pembayaran tagihan rekening belanja kawat/faximile /internet		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (komputer ,laptop,mesin tik,sound system, infocus,kamera, printer AC dll)		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara, jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor , retribusi sampah yang terbayar, peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor yang terbeli.		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli (jenis)		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		penggandaan (fotocopy, jilid)					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan lembur		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	
		minum lembur					
		makan dan minum tamu					
		makan dan minum rapat					
		snack rapat					
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas dalam daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas	
		Perjalanan dinas luar daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	iuran BPJS (bulan)			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	
			jasa pegawai non PNS (orang)						
		Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	publikasi kegiatan kantor			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran (tabung)			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Pelaksanaan proses adminisrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Honor PPK, PTK ,Pejabat pengadaan, Pejabat pemeriksa hasil pekerja dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pelaksanaan proses adminisrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)						
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis peralatan kantor yang dibeli			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
			jenis perlengkapan kantor yang dibeli						
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara (paket)			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	
		Pembangunan Pagar Rumah Dinas	Pagar rumah dinas (paket)			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pembangunan Pagar Rumah Dinas	
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang dibeli			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai (%)						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia (stel)			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi ASN bidang Koperasi,Perdagangan dan Pasar						
		Peningkatan kompetensi Aparatur Pembina Koperasi ,UMKM,Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	Perjalanan dinas dalam rangka pengembangan wawasan dan disiplin personil						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)						
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu (dok)			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	8	
1	2	3	4	5	6	7		
	Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan sesuai dengan kriteria pasar SNI (struktur bangunan, arsitektur bangunan, mekanikal dan elektrikal)						
	Promosi/pameran dalam dan luar negeri bersama mitra kerja	Pesentase capaian target retribusi pelayanan pasar		Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada	Pameran dagang nasional		
		pemeliharaan sarana dan prasarana pasar						
		Gedung pasar yang terpelihara						
	Pasar Lelang dan Kontak Dagang	pemeliharaan lift, escalator, pompa air dan pompa ipal, genset, kamera cctv, jaringan, alat keselamatan, pemeliharaan taman, alat elektronik		Program Pengembangan Ekspor	Pelaksanaan promosi ,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		
		jumlah wc umum yang dikelola						
		upah kerja pegawai kontrak dan iuran BPJS						
	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan	Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar (%)						
	Pembangunan pasar penampungan pedagang pasar bawah	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar (kali)		Program Peningkatan Sarana Distribusi Pasar	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar	tersedianya jasa keamanan pasar		Program Peningkatan Sarana Distribusi Pasar	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
	Pengelolaan gedung pasar atas							
	Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi			Program Peningkatan Sarana Distribusi Pasar	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerja nya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
	Intensifikasi pemungutan retribusi pasar							
	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar							
	Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar			Program Peningkatan Sarana Distribusi Pasar	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerja	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
	UPTD kemetrollogian daerah							
	Pengawasan dan pelayanan pengujian UTPP			Program standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan meteorologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Pelaksanaan meteorologi legal berupa tera, tera ulang		

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		X	XX	01	2.03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		X	XX		2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Kebersihan		X	XX		2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		X	XX		2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		X	XX		2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		X	XX		2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		X	XX		2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
		Penyediaan Makanan dan Minuman		X	XX		2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		X	XX		2.03	18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		X	XX		2.03	07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		X	XX		2.03	30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		Penyediaan Petugas Pengamanan Kantor (Security)									Tidak dapat dipetakan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
		Pengadaan Perlengkapan Kantor		X	XX		2.03	22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		Pengadaan Peralatan Kantor		X	XX		2.03	23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
	Pelatihan Jasa Perhotelan							
	Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas Lembaga Latihan Swasta		2.07.03.2.02	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
	Monev. Eks Siswa Pelatihan		2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja							
	Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja		
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Pembinaan dan Penilaian Perusahaan			Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN
1		2	3	4		5	6		7
		Promosi dan Gelar Potensi Investasi				Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah							
		Penyusunan Study Kelayakan Investasi				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investi dan Peluang Usaha	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	
		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah							
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Kecil Menengah (IKM)						Koordinasi & Sinkronisasi pelaksanaan Renc. Pemabngunan Sumber daya industri	
		Pelatihan Teknis Industri Kecil Menengah (IKM)							
		Promosi Industri Kecil Menengah (IKM)							
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri							
		Sosialisasi Penerapan dan Konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM)						Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri	
		Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri							masuk ke dlm sub kgtn rutin yang sma dengan sekretariat disesuaikan dengan kebutuhan
		Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri						Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan renc. Pebangunan sarpras industri	
		Perkuatan Asosiasi Makanan							
		Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri							

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN						
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2			3			4			5	6	7			
													8			
2.17	2.17.03.02			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				x	xx	01	2.04	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
				1 Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
2.18	2.17.16.07			2 Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah				X	XX	01	2.04	02	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				3 Bintek pengelolaan kearsipan di lingkungan kota Bukittinggi												
2.17	2.17.15			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan												
2.17	2.17.15			1 Penyediaan Bahan Pustaka Digital Perpustakaan Umum Daerah				2	23	02	2.01	01	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
2.17	2.17.16.01			2 Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan												
2.17	2.17.15.17			3 Pembinaan Perpustakaan				2	23	02	2.01	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota	
2.17	2.17.15.15			4 Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah				2	23	02	2.01	07	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
2.17	2.17.15			5 Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Anak				2	23	02	2.01	08	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan Bahan Pustaka	
2.17	2.17.15.16			6 Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka				2	23	02	2.01	09	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pokir
2.17	2.17.15			7 Pemeliharaan Bahan/Koleksi Bahan Pustaka												
				8 Pengadaan buku untuk Rumah Baca Literasi												
				9 Pengadaan Buku bacaan di komunitas atau rumah baca untuk Rumah Baca Literasi												
2.17	2.17.16			10 Pelaksanaan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka				2	23	02	2.01	10	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Peperustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tkt Daerah Kab/Kota	
2.17	2.17.16			11 Survey Tingkat Kepuasan Pemustaka												
2.17	2.17.15.14			12 Layanan Perpustakaan Keliling				2	23	02	2.02	01	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	

SKPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
1		2	3	4		5	6		7	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan								
		Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD			01	2.01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		Penyediaan jasa surat menyurat			01	2.03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik			01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			01	2.03	03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			01	2.03	06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		Jasa Kebersihan Kantor			01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Alat Tulis kantor			01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Makanan dan Minuman			01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke			01	2.03	18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
	Jasa Keamanan Kantor						Usulan pemutakhiran	
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor		01 2.03 28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		
			01 2.03 38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		
	Program Pembinaan Kepemudaan							
	Kegiatan Pengembangan Pemuda		2 19 02 2 01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelopor Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan							
	Pelatihan kepemimpinan kepemudaan		2 19 02 2 08	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelopor Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda		
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda							
	Pelatihan Kewirausahaan pemuda pemula		2 19 02 2 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelopor Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Daya Saing WiraUsaha Pemuda Pemula		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3		4		5	6	7				
		Pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi			2	19	02	2	07	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelopor Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	
		Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional			2	19	02	2	08	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelopor Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga											
		Pelatihan dan Pembinaan Marcingband			2	19	03	2	01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Multy Event dan Single event tingkat Kab/Kota	
		Program peningkatan peran serta kepemudaan											
		Pelatihan Peningkatan Mutu Organisasi kepemudaan Kota Bukittinggi			2	19	02	2	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga											
		Invitasi bola basket			2	19	03	2	01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single event tingkat Kab/Kota	
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga											
		Fasilitasi kejuaraan olahraga daerah dan nasional			2	19	03	2	01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single event tingkat Kab/Kota	
					2	19	03	2	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	
					2	19	03	2	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	
		Pelaksanaan / Pertandingan Olahraga Masyarakat (Car free day)			2	19	03	2.1	01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan olahraga Rekreasi	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga									
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana olahraga				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat									
	Fasiliatsi Pacu Kuda				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat			
	Festival silek tradisional									
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata									
	Pengelolaan Jam Gadang		03	26	02	2.01	01	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kab/kota
	Pemeliharaan dan Perawatan Flora dan Fauna									
	Pemeliharaan Kandang Satwa dan Aquarium									
	Penambahan Koleksi Fauna dan Flora									
	Jasa Kebersihan dan Pengamanan TMS-BK									
	Pengelolaan dan Pelayanan TMS-BK									
	Pengelolaan dan Pelayanan RANB									
	Pemeliharaan Jembatan Limpapeh									
	Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana TMSBK									
	Pengelolaan Taman Panorama Lobang jampang									
	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Jampang									
	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata									
	Pengelolaan Jenjang Seribu									
	Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok menjadi Kawasan Geopark/ Geosite Ranah Minang		03	26	02	2	01	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota
	Penyusunan Studi Kelayakan alih fungsi Museum Zoologi							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan daya tarik wisata kab/kota
	Penataan kawasan Benteng Fort de Kock							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Pengelolaan daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan daya tarik wisata kab/kota

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	x	xx	01	2.01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	x	xx	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Administrasi Umum	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	x	xx	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Administrasi Umum	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	x	xx				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Administrasi Umum	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	x	xx	01	2.03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	x	xx	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	x	xx	01	2.03	03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	x	xx	01	2.03	06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	x	xx	01	2.03	07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	x	xx	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	x	xx	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	x	xx	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	x	xx	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	x	xx	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

							3	27	04	2.03	02	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Keg. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
							3	27	04	2.04	02	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	
							3	27	04	2.05		Program Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	
							3	27	05	2.01	01	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	
							3	7	07	2.01	01	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
							3	7	07	2.01	02	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
							3	7	07	2.01	02	Pekan Daerah (PEDA) dan rembug KTNA Tingkat provinsi Sumatera Barat			
							3	30	04						
							3	30	04	2.03	03	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6	7	8		
		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4	01	01	2.03	01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik		4	01	01	2.03	02	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dians/ operasional		4	01	01	2.03	06	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
		Penyediaan jasa kebersihan kantor		4	01	01	2.03	08	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan alat tulis kantor		4	01	01	2.03	10	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		4	01	01	2.03	11	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan komponen instalsi listrik/ penerangan bangunan kantor		4	01	01	2.03	12	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
		Penyediaan makanan dan minuman		4	01	01	2.03	17	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan makan dan minum
		Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi		4	01	01	2.03	18	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Rapat - rapat Koordinasi ,dan Konsultasi ke Luar Daerah
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		4	01	01	2.03	09	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		4	01	01	2.03	15	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
		Pengembangan pelayanan kesehatan Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		4	01	04	2.01	01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan kepegawaian
		Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor		4	01	04	2.03	03	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
		Pengadaan kendaraan dinas		4	01	01	2.03	19	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Mobil Jabatan
		Pengadaan peralatan rumah dinas/ jabatan		4	01	01	2.03	23	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
		Pengadaan peralatan kantor		4	01	01	2.03	13	Penunjang Urusan	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Pengadaan perlengkapan kantor			Pemerintah Daerah		Perlengkapan Kantor		
	Pengadaan mobiler		4 01 01 2.03 25	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Mebeleur		
	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas/ jabatan		4 01 01 2.03 26	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan		
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor		4 01 01 2.03 28	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah dinas/ jabatan		4 01 01 2.03 31	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas		
	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor		4 01 01 2.03 38	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor		
	Program Peningatan Disiplin Aparatur							
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		4 01 01 2.04 02	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	Penyusunan Laporan keuangan		4 01 01 2.02 04	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		
	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD		4 01 01 2.01 01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		
	Pengelolaan Keuangan SKPD		4 01 04 2.04 02	Administrasi Umum	Perencanaan dan keuangan	Pengelolaan Keuangan		
			4 01 01 2.02 03	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		
	Penyusunan LKIP Kota Bukittinggi		4 01 01 2.02 06	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja		
	Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah							
	Penunjang keprotokolan dan pantap agenda pimpinan		4 01 01 2.03 01	Program Administrasi Umum	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan		
	Pelaksanaan acara dan upacara nasional dan kedaerahan							
	Penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah							
	Penunjang operasional KDH		4 01 01 2.01 03	Program Administrasi Umum	Pelaksanaan Administrasi umum	Pengelolaan Rumah Tangga		
	Penunjang operasional Wakil KDH							
	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Dinas Walikota							

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6		7			
		Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan		4	01	01	2.01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
		Penilaian Kelurahan Berprestasi										
		Penilaian Kompetensi Lurah										
		Penilaian Kompetensi Camat										
		Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan										
		Monev dan pembinaan pelaksanaan PATEN di Kecamatan										
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										
		Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		4	01	01	2.02	03	Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
		Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik		4	01	01	2.02	02	Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
		Indeks Kepuasan Masyarakat										
		Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan										
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)										Kewenangan Bapelitbang
		Program Peningkatan peran Kehumasan										
		Penunjang Pers & Kehumasan		4	01	01	2.03	02	Administrasi Umum	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
		Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota										
		Penyebaran Informasi Pembangunan daerah melalui media cetak dan online										
		Bimbingan Teknis Kehumasan										
		Bimbingan Teknis Jurnalistik bagi pewartu										
		Promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi		4	01	01	2.03	03	Administrasi Umum	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
		Pengumpulan data informasi,kliping,penelaah berita										
		Pembuatan Majalah Pemko										
		Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat										
		Pemberian Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Guru		4	01	02	2.02	03	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan Rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jama'ah Haji Kota Bukittinggi					Kesejahteraan masyarakat					
	Pelatihan Guru MDTA, TPQ, TKQ, TPSQ, PQ, dan Ponpes										
	Pendidikan dan Pelatihan Imam / Khatib										
	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hibah		4	01	02	2.02	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan Rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan sosial	
	Lomba DDS Kota Bukittinggi		4	01	01	2.02	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Bina Mental Spritual	
	Wirid Bulanan dan Halal bi Halal										
	MTQ Tingkat Provinsi										
	Tabligh Akbar										
	Pengiriman Peserta Lomba dan Peninjauan Lomba TK. Propinsi dan Nasional										
	Lomba Penyelenggaraan Jenazah										
	Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Al- Qur'an										
	Pelayanan Kunjungan Tim Ramadhan										
	Program Pengembangan Potensi Ekonomi										
	Koordinasi BidangEkonomi , Failitasi TPKAD dan FPED, Pembinaan dan Pengawasan LKM		4	01	03	2.01	03	Perekonomian dan Pembangunan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan perekonomian	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD		4	01	03	2.01	01	Perekonomian dan Pembangunan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BUD	
	Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan		4	01	03	2.02	01	Perekonomian dan Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Fasiltasi Penyusunan program pembagunan	
	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian										
	Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah		4	01	03	2.01	01	Perekonomian dan Pembangunan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral										
	Pendampingan dan Dukungan Promosi Produk Daerah		4	01	03	2.01	03	Perekonomian dan Pembangunan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan perekonomian	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Program : Penataan Organisasi Perangkat Daerah										
	Evaluasi kelembagaan dan tusi perangkat daerah		4	01	04	2.02	01	Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
	Penyusunan Revisi Tupoksi sesuai hasil evaluasi										
	Moniroting dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah SKPD di lingkungan kota bukittinggi										
	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan										
	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal		4	01	03	2.02	02	Perekonomian dan Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program pembangunan	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan										
	Tim Pendampingan pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi		4	01	03	2.02	01	Perekonomian dan Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Fasiltasi Penyusunan program pembagunan	
	Pengembangan Kompetensi Pegawai Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										Dipindahkan ke BKPSDM
	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		4	01	03	2.03	01	Perekonomian dan Pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	Asistensi Penyusunan RUP, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										
	Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa							Perekonomian dan Pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	Internalisasi dan Desiminasi Kode Etik Pengelolaan Barang dan Jasa										
	Penyusunan E-Katalog Lokal		4	01	03	2.03	02	Perekonomian dan Pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	
	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan										
	Penyusunan LPPD		4	01	02	2.01	01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
	Penunjang Penyusunan LKPJ										
	Penunjang Kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi										Ditampung pada kegiatan Administrasi Umum

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7	8			
		Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi		4	01	02	2.01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)		4	01	01	2.01	05	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
		Rapat Koordinasi Pemerintah Kota / Kecamatan / Kelurahan										
		Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur										
		Penyusunan anjab dan ABK		4	01	04	2.02	01	Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
		Penyusunan evaluasi jabatan										
		Penyusunan standar kompetensi teknis		4	01	04	2.02	02	Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik Publik dan Tata Laksana	
		Evaluasi penyusunan standar kompetensi Manajerial										
		Program : Penegasan Batas Wilayah										
		Penegasan Batas Wilayah Kecamatan / kelurahan dan pemetaan Wilayah		4	01	01	2.01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7	8			
		Pengadaan kendaraan dinas		4	02	01	2.03	20	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		4	02	01	2.04	21	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	
		Pengadaan peralatan rumah dinas/ jabatan		4	02	01	2.03	23	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		4	02	01	2.03	28	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	
		Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah dinas/ jabatan		4	02	01	2.03	31	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	
		Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah dinas/ jabatan							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah dinas/ jabatan	
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	
		Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas/ jabatan		4	02	01	2.03	26	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan /Dinas	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Pemulangan Jenazah Anggota DPRD							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan Tugas	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
		Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD		4	02	01	2.01	01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
		Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah										
		Rapat - rapat paripurna istimewa DPRD		4	02	01	2.03	01	Layanan dan Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitas Rapat DPRD	
		Kegiatan reses		4	02	03	2.05	03	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Pelaksanaan Reses	
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		4	02	03	2.04	01	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Bimbingan Teknis DPRD	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7	8			
		Promosi dan Publikasi Melalui Media Massa, Profil, dan Dokumentasi Kegiatan		4	02	03	2.04	03	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
		Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli		4	02	03	2.04	05	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
		Penyusunan standarisasi tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan dan anggota DPRD		4	02	02	2.02	01	Layanan dan Administrasi Keuangan	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
		Penunjang kegiatan kerjasama asosiasi DPRD dan asosiasi sekretaris DPRD se-Indonesia		4	02	03	2.04		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	
		Pembentukan Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Peraturan DPRD		4	02	03	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	
				4	02	03	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	
		Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD		4	02	02	2.01	04	Layanan dan Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	
		Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan dan Penganggaran		4	02	03	2.02	01	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	
				4	02	03	2.02	02	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	
				4	02	03	2.02	03	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD	
				4	02	03	2.02	04	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD Perubahan	
				4	02	03	2.02	05	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Laporan Semester	
				4	02	03	2.02	06	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				4	02	03	2.03	01	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
				4	02	03	2.03	02	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
				4	02	03	2.03	03	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3		4		5	6	7		8		
					4	02	03	2.03	04	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
					4	02	03	2.03	05	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
					4	02	03	2.03	06	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
					4	02	03	2.03	07	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan	Pengawasan Penggunaan Anggaran	
					4	02	03	2.06	01	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	
					4	02	03	2.06	02	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan dan Risalah	4	02	03	2.01	01	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
					4	02	03	2.01	02	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Perda	
				Penunjang operasional pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	4	02	03	2.08		Layanan dan Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD	
				Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD beserta kelengkapannya	4	02	02	2.02	02	Layanan dan Administrasi Keuangan	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITINGGI

SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN					
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN				
1		2			3			4		5	6		7				
													8				
x	xx	xx	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
x	xx	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat				X	XX	01	2.03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
x	xx	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				X	XX	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
x	xx	xx	01	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				X	XX		2.03	06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
x	xx	xx	01	04	Penyediaan jasa kebersihan kantor				X	XX	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
x	xx	xx	01	05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				X	XX	01	2.03	03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
x	xx	xx	01	06	Penyediaan alat tulis kantor				X	XX	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
x	xx	xx	01	07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				X	XX	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
x	xx	xx	01	08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				X	XX	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
x	xx	xx	01	09	Penyediaan makanan dan minuman				X	XX	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	
x	xx	xx	01	10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				X	XX	01	2.03	18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
x	xx	xx	01	11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				X	XX	01	2.03	07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
x	xx	xx	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												
x	xx	xx	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				X	XX	01	2.03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg. Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN						
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2			3			4			5	6	7	8		
x	xx	xx	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			X	XX	01						
x	xx	xx	06	01	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD			X	XX	01	2.01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
1					URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG											
1	06				PERENCANAAN											
1	06	xx	21		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
1	06	xx	21	01	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi			5	01	02	2.01	01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	
1	06	xx	21	02	Penyusunan Perubahan RKPDP Kota Bukittinggi											
1	06	xx	21	03	Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026			5	01	02	2.01	03	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah			5	01	02	2.01	04	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI											
					Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan			5	01	02	2.01	07	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	
								5	01	02	2.01	08	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	
								5	01	02	2.01	09	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	6	xx			PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
1	06	xx	21	04	Pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan			5	01	02	2.02	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE					PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1		2			3			4					5	6	7	8
1	06	xx	21	05	Penyusunan kalender Penyelenggaraan pemerintah			5	01	02	2.02	03				Pindah Ke Sekretariat Daerah Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
1	06	xx	21	06	Pelaksanaan Pengendalian Monitoring dan evaluasi Pembangunan Kota Bukittinggi			5	01	02	2.03	01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	
								5	01	02	2.03	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	
								5	01	02	2.03	03	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	
1	06	xx	23		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA											
1	06	xx	23	01	Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan			5	01	03	2.01	02	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan	
								5	01	03	2.01	03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan	
1	06	xx	23	02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia			5	01	03	2.02	02	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pembangunan Manusia	
								5	01	03	2.02	03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pembangunan Manusia	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN						
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2			3			4			5	6	7			
													8			
								5	01	03	2.03	01	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
1	06	xx	23	03				5	01	03	2.03	02	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
								5	01	03	2.03	03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
1	06	xx	23										PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI			
1	06	xx	23	01				5	01	04	2.01	02	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	
								5	01	04	2.01	03	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	
1	06	xx	23	02				5	01	04	2.02	02	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	
								5	01	04	2.02	03	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	
1	06	xx	19										PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGANKOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR			

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN								
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR			KODE					PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN					
1					2				3				4				5	6	7	8
1	06	xx	19	01				5	01	05	2.01		02	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup				
1	06	xx	19	02				5	01	05	2.01	03	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup					
								5	01	05	2.02	02	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan					
								5	01	05	2.02	03	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan					
1	06	xx	18		PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH			5	01	05										
					Sinkronisasi Penyusunan Startegi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2025			5	01	05	2.03	01	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan					
1	06	xx	18	02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2021			5	01	05	2.03	02	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan					

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN					
1		2	3	4			5	6	7		8			
				5	01	05	2.03	03	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi Dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan			
									PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENUNJANG					
									Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi	5 05 02 2.01 01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
									Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	5 05 02 2.01 12	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
									Kajian Peran Lembaga Adat dan Budaya dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal	5 05 02 2.02 03	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
									Kajian Akademis Pembangunan Museum Sejarah Kota Bukittinggi					
									Penguatan Inovasi Daerah	5 5 2 2.04 01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Keg.Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaaan diBidang Teknologi dan Inovasi	

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : BADAN KEUANGAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1	2	3	4				5	6	7	8			
04	01	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
04	01	17	20	Penyusunan APBD Kota Bukittinggi	5	02	02	2	01	05	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
					5	02	02	2	01	09	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
					5	02	02	2	01	10	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
					5	02	02	2	01	11	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
04	01	17	21	1. Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi	5	02	02	2	01	06	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
04	01	17	22	2. Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang pergeseran penjabaran APBD									
04	01	17	23	Pengendalian hibah dan bansos	5	02	02	2	04	03	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan
04	01	17	24	Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA	5	02	02	2	01	03	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
					5	02	02	2	01	04	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
04	01	17	25	Penyusunan perwako tentang Standar Biaya	5	02	02	2	01	08	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
04	01	17	31	Pengendalian kas daerah	5	02	02	2	02	01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
					5	02	02	2	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
					5	02	02	2	02	07	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
04	01	17	32	Pemrosesan gaji ASN	5	02	02	2	02	05	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN											
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN										
1		2	3	4		5	6		7										
				5	02	02	2	02	06	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
04	01	17	33		Pengendalian belanja daerah					5	02	02	2	02	04	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pemrosesan, penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	
										5	02	02	2	02	03	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	
										5	02	02	2	02	10	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
04	01	17	35		Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah					5	02	02	2	02	08	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
04	01	17	26		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					5	02	02	2	03	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
										5	02	02	2	03	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
04	01	17	27		Pelaksanaan dan peningkatan akuntansi berbasis akrual					5	02	02	2	03	12	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	
04	01	17	28		1. Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah					5	02	02	2	03	01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
04	01	17	29		2. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan														
04	01	17	30		Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah					5	02	02	2	03	05	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4			5	6	7	8			
				5	02	02	2	03	07	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan	
				5	02	02	2	03	11	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	
04	01	17	36							Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi			
04	01	17		5	02	02	2	01	01	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	
04	01	17		5	02	03	2	03	09	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
04	01	17		5	02	02	2	03	10	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
										Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah			
04	01	19	12							Penyusunan rencana kebutuhan barang			
				5	02	03	2	01	02	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				5	02	03	2	01	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				5	02	03	2	01	04	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	
04	01	19	13							Penatausahaan BMD			
				5	02	03	2	01	05	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				5	02	03	2	01	11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	
				5	02	03	2	01	12	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	
				5	02	03	2	01	13	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
04	01	19	14							inventarisasi barang milik daerah			
				5	02	03	2	01	06	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
04	01	19	15							Pengalihan bukti kepemilikan tanah Pemko			
				5	02	03	2	01	07	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan fisik, administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6	7			
								8			
		Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD		X	XX	01	2.01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
				5	03	02	2.01	01	Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Dan Manajemen
		Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur									
		Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu		5	03	02	2.01	01	Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Dan Manajemen
				5	03	02	2.01	02	Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jaatan
		Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian									
		Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian		5	03	02	2.01	03	Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
		Penyusunan Formasi PNS		5	03	02	2.03	1	Program Kepegawaian Daerah	Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
		Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS									
		Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi									
		Pengangkatan/Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja									
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
		Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut		5	03	02	2.04	03	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Karir ASN	Penataan dan Mutasi Jabatan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		5	03	02	2.04	01	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Karir ASN	pengembangan karir dan promosi ASN
		Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama									
		Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian		5	03	02	2.02	05	Program Kepegawaian Daerah	Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai
		Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun		5	03	02	2.02	04	Program Kepegawaian Daerah	Administrasi Kepegawaian	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019						KETERANGAN						
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN				INDIKATOR		KODE		PROGRAM			KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2				3		4		5			6		7		8	
1	20	07	01	20	24													
1	20	07	01	20	24	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi												
1	20	07	01	20	26	Penyelesaian Kerugian Daerah												
1	20	07	01	20	17	Unit Pengendali Gratifikasi				6	01	03	2.02	01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Asistensi dan Pendampingan	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	
1	20	07	01	20	20	Survey Penilaian Integritas				6	01	03	2.02	02	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Asistensi dan Pendampingan	Asistensi dan Pendampingan	
1	20	07	01	20	25	Pemantapan Saber Pungli												
1	20	07	01	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan												
1	20	07	01	21	01	Pengiriman Peserta mengikuti diklat teknis pengawasan				6	01	01	2.04	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	
1	20	07	01	21	02	Pengiriman Peserta mengikuti diklat pembentukan dan penjenjangan auditor dan P2UPD												
1	20	07	01	21	03	Pelatihan Kantor Mandiri				6	01	01	2.04	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
1	20	07	01	21	04	Peningkatan Kapabilitas dan Profesional APIP									Penilaian angka kredit auditor dan P2UPD			

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN					
1		2	3		4		5	6	7					
										Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
										Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	7 01 01 2.01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
										Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 01 01 2.03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
										Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan koto selayan	7 01 01 2.03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Koto Selayan	
											7 01 01 2.03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Campago Ipuh	
											7 01 01 2.03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Manggis Ganting	
											7 01 01 2.03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Pulau Anak Air	
											7 01 01 2.03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Puhun Pintu Kabun	
											7 01 01 2.03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Puhun Tembok	
											7 01 01 2.03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Kubu Gulai Bancah	
											7 01 01 2.03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Campago Guguk Bulek	
											7 01 01 2.03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Garegeh	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN							
KODE			PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR			KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1			2		3			4			5	6	7		8		
					Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7	01	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
									7	01	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Koto Selayan	
									7	01	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Campago Ipuh	
									7	01	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Manggis Ganting	
									7	01	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Pulau Anak Air	
									7	01	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Puhun Pintu Kabun	
									7	01	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Puhun Tembok	
									7	01	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Kubu Gulai Bancah	
									7	01	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Campago Guguk Bulek	
									7	01	01	2.03	02	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Garegeh	
					Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				7	01	01	2.03	05	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kelurahan Manggis Ganting	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										KETERANGAN																													
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN					INDIKATOR					KODE						PROGRAM					KEGIATAN					SUBKEGIATAN																		
1					2					3					4						5					6					7					8													
					Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															7	01	01	2.03	06	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Campago Guguk Bulek																						
															7	01	01	2.03	06	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Garegeh																											
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah					7	01	01	2.03	07	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan																																
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					7	01	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor																																
										7	01	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Koto Selayan																																
										7	01	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Campago Ipuh																																
										7	01	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Manggis Ganting																																
										7	01	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulau Anak Air																																
										7	01	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Puhun Pintu Kabun																																
										7	01	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Puhun Tembok																																
										7	01	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Kubu Gulai Bancah																																
										7	01	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Campago Guguk Bulek																																

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN					
1		2	3		4		5	6	7		8			
										Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
						7	01	01	2.03	08	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Garegeh	
						7	01	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
						7	01	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Koto Selayan	
						7	01	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Campago Ipuh	
						7	01	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Manggis Ganting	
						7	01	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Pulau Anak Air	
						7	01	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Puhun Pintu Kabun	
						7	01	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Puhun Tembok	
						7	01	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Kubu Gulai Bancah	
						7	01	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Campago Guguk Bulek	
						7	01	01	2.03	09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Garegeh	
						7	01	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
						7	01	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Koto Selayan	
						7	01	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Campago Ipuh	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6	7			
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
				7	01	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Manggis Ganting
				7	01	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Pulai Anak Air
				7	01	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Puhun Pintu Kabun
				7	01	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Puhun Tembok
				7	01	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Kubu Gulai Bancah
				7	01	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Campago Guguk Bulek
				7	01	01	2.03	10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Garegeh
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7	01	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				7	01	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Koto Selayan
				7	01	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Campago Ipuh
				7	01	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Manggis Ganting
				7	01	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Pulai Anak Air
				7	01	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Puhun Pintu Kabun
				7	01	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Puhun Tembok

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019							KETERANGAN																				
KODE			PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR	KODE			PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN																							
1			2		3	4			5	6	7		8																					
															Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
																					7	01	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Kubu Gulai Bancah	
																				7	01	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Campago Guguk Bulek		
																				7	01	01	2.03	11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Garegeh		
															Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7	01	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
																				7	01	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Koto Selayan		
																				7	01	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Campago Ipuh		
																				7	01	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Manggis Ganting		
																				7	01	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Pulau Anak Air		
																				7	01	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Puhun Pintu Kabun		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2	3		4		5	6	7		8	
										Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
					7	01	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Puhun Tembok
					7	01	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Kubu Gulai Bancah
					7	01	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Campago Guguk Bulek
					7	01	01	2.03	12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Garegeh
					7	01	01	2.03	13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Kantor
												Pengadaan Perlengkapan Kantor
					7	01	01	2.03	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan Koto Selayan
					7	01	01	2.03	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan Campago Ipuh
					7	01	01	2.03	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan Manggis Ganting
					7	01	01	2.03	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan Pulai Anak Air

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7				
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
				7	01	01	2.03	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan Puhun Pintu Kabun	
				7	01	01	2.03	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan Puhun Tembok	
				7	01	01	2.03	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan	
				7	01	01	2.03	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan	
				7	01	01	2.03	15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	7	01	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	
				7	01	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Koto Selayan	
				7	01	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Campago Ipuh	
				7	01	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Manggis Ganting	
				7	01	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Pulai Anak Air	
				7	01	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Puhun Pintu Kabun	
				7	01	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Puhun Tembok	
				7	01	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Kubu Gulai Bancah	
				7	01	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Campago Guguk Bulek	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN															
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN														
1		2	3	4		5	6		7														
									Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
															7	01	01	2.03	17	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Garegeh	
															7	01	01	2.03	18	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	
															7	01	01	2.03	27	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	
															7	01	01	2.03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
															7	01	01	2.03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Koto Selayan	
															7	01	01	2.03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Campago Ipuh	
															7	01	01	2.03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Manggis Ganting	
															7	01	01	2.03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Pulau Anak Air	
															7	01	01	2.03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Puhun Pintu Kabun	
															7	01	01	2.03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Puhun Tembok	
															7	01	01	2.03	28	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Kubu Gulai Bancah	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN				
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE			PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN			
1		2	3	4			5	6		7			
									Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
						7	01	02	2.04	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
						7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Koto Selayan
						7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Campago Ipuh
						7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggis Ganting
						7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pulai Anak Air
						7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Puhun Pintu Kabun
						7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Puhun Tembok
						7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah
						7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Campago Guguk Bulek

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6	7			
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
		Musrenbang Kelurahan Garegeh		7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Garegeh
		Manunggal Sakato Kel. Koto Selayan		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Selayan
		Manunggal Sakato Kel. Campago Ipuh		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Campago Ipuh
		Manunggal Sakato Kel. Manggis Ganting		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggis Ganting
		Manunggal Sakato Kel. Pulai Anak air		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulai Anak Air
		Manunggal Sakato Kel Puhun Pintu Kabun		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Puhun Pintu Kabun
		Manunggal Sakato Kel Puhun Tembok		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Puhun Tembok
		Manunggal Sakato Kel Kubu Gulai Bancah		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kubu Gulai Bancah
		Manunggal Sakato Kel. Campago Guguk Bulek		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Campago Guguk Bulek
		Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Garegeh

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1		2	3		4		5	6	7	
										Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Koto Selayan
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Campago Ipuh
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Manggis Ganting
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Pulau Anak Air
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Tembok
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Gulai Bancah
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Campago Guguk Bulek
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Adat dan Generasi Muda Kelurahan Garegeh
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan
					7	01	03	2.02	03	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan campago ipuh

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006				PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN		
1		2	3	4		5	6		7		
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis ganting	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggis Ganting
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan pulau anak air	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Anak Air
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan puhun pintu kabun	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Puhun Pintu Kabun
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan puhun tembok	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Puhun Tembok
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai bancah	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kubu Gulai Bancah
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan campago guguk bulek	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Campago Guguk Bulek
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan garegeh	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Garegeh
			Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan koto selayan	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Selayan
			Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan campago ipuh	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Campago Ipuh
			Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan manggis ganting	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggis Ganting
			Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan pulau anak air	7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Anak Air

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI

SKPD : KECAMATAN GUGUK PANJANG

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6	7	8		
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
			Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	7	1	1	2.01	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (kec dan 7 kel)	7	1	1	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (kec dan 7 kel)	7	1	1	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (kec dan 7 kel)	7	1	1	2.03	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
			Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (kec dan 7 kel)	7	1	1	2.03	07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
			Penyediaan jasa kebersihan kantor (kec dan 7 kel)	7	1	1	2.03	08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor (kec dan 7 kel)	7	1	1	2.03	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
			Penyediaan alat tulis kantor (kec dan 7 kel)	7	1	1	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (kec dan 7 kel)	7	1	1	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (kec dan 7 kel)	7	1	1	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Surat kabar dan majalah (kec dan 7 kel)	7	1	1	2.03	15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7				
			Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	7	01	02	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor									
			Penyediaan Jasa dokumentasi dan publikasi kantor									
			Pendataan/ Updating UMKM	7	01	02	2.04	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	
				7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				7	01	03	2.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Musrenbang Kelurahan Tarok Dipo	7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
			Musrenbang Kelurahan Bukit Apit Puhun	8	01	03	2.03	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
			Musrenbang Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	9	01	03	2.04	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
			Musrenbang Kelurahan Benteng Pasar Atas	10	01	03	2.05	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
			Musrenbang Kelurahan Pakan Kurai	11	01	03	2.06	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
			Musrenbang Kelurahan Kayu Kubu	12	01	03	2.07	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7				
		Musrenbang Kelurahan ATTS		13	01	03	2.08	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
		Manunggal Sakato Kelurahan Tarok Dipo		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Apit Puhun		8	01	03	2.03	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang		9	01	03	2.04	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Manunggal Sakato Kelurahan Benteng Pasar Atas		10	01	03	2.05	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Manunggal Sakato Kelurahan Pakan Kurai		11	01	03	2.06	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Manunggal Sakato Kelurahan Kayu Kubu		12	01	03	2.07	08	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Manunggal Sakato Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah		13	01	03	2.08	09	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Tarok Dipo		14	01	03	2.09	10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Bukit Apit Puhun		15	01	03	2.10	11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang		16	01	03	2.11	12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Benteng Pasar Atas		17	01	03	2.12	13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Pakan Kurai		18	01	03	2.13	14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan Kayu Kubu		19	01	03	2.14	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
1		2	3	4		5	6	7		
		Pembinaan dan Fasilitas Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan ATTS		20	01 03 2.15 16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Tarok Dipo		21	01 03 2.16 17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Bukit Apit Puhun		22	01 03 2.17 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang		23	01 03 2.18 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Benteng Pasar Atas		24	01 03 2.19 20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Kurai		25	01 03 2.20 21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Kayu Kubu		26	01 03 2.21 22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah		27	01 03 2.22 23	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo		28	01 03 2.23 24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit		29	01 03 2.24 25	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BCKR		30	01 03 2.25 26	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BPA		31	01 03 2.26 27	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan PK		32	01 03 2.27 28	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KK		33	01 03 2.28 29	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ATTS		34	01 03 2.29 30	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE				PROGRAM		KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1		2	3	4				5	6	7	8	
		Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi		7	01	03	2.02	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
		Pembinaan dan fasilitasi Kamtibmas Kecamatan		7	01	04	2.01	01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	

MATRIK PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 KOTA BUKITINGGI

SKPD : KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		7	1	1	2.01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
				7	1	1	2.01	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
				7	1	1	2.02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				7	1	1	2.02	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				7	1	1	2.02	07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		7	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan	
				7	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Aur Kuning	
				7	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Belakang Balok	
				7	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Birugo	
				7	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Kubu Tanjung	
				7	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Ladang Cakiah	
				7	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Pakan Labuah	
				7	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Parit Antang	
				7	01	01	2.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Sapiroan	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN		
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7	8			
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7	01	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan	
				7	01	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Aur Kuning	
				7	01	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Belakang Balok	
				7	01	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Birugo	
				7	01	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kubu Tanjung	
				7	01	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Ladang Cakiah	
				7	01	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Pakan Labuah	
				7	01	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Parit Antang	
				7	01	01	2.03	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Sapiran	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	7	01	01	2.03	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Aur Kuning	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Belakang Balok	
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Birugo	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1		2	3		4		5	6	7	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Kubu Tanjung	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Ladang Cakiah	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Pakan Labuah	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Parit Antang	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Sapiran	
						7 01 01 2.03 07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
						7 01 01 2.03 08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan	
						7 01 01 2.03 08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Aur Kuning	
						7 01 01 2.03 08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Belakang Balok	
						7 01 01 2.03 08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Birugo	
						7 01 01 2.03 08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Kubu Tanjung	
						7 01 01 2.03 08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Ladang Cakiah	
						7 01 01 2.03 08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pakan Labuah	
						7 01 01 2.03 08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Parit Antang	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019				KETERANGAN							
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN									
1		2	3	4		5	6	7	8								
				7	01	01	2.03	08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Sapiran						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor						7	01	01	2.03	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan	
									7	01	01	2.03	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Aur Kuning	
									7	01	01	2.03	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Belakang Balok	
									7	01	01	2.03	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Birugo	
									7	01	01	2.03	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Kubu Tanjung	
									7	01	01	2.03	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Ladang Cakiah	
									7	01	01	2.03	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Pakan Labuah	
									7	01	01	2.03	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Parit Antang	
									7	01	01	2.03	09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelurahan Sapiran	
			Penyediaan alat tulis kantor						7	01	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan	
									7	01	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
									7	01	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Belakang Balok	
									7	01	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Birugo	
									7	01	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Kubu Tanjung	
									7	01	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Ladang Cakiah	
									7	01	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Pakan Labuah	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019						KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7		8		
				7	01	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Parit Antang	
				7	01	01	2.03	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sapiran	
				7	01	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7	01	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Aur Kuning	
				7	01	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Belakang Balok	
				7	01	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Birugo	
				7	01	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Kubu Tanjung	
				7	01	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Ladang Cakiah	
				7	01	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Pakan Labuah	
				7	01	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Parit Antang	
				7	01	01	2.03	11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Sapiran	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7	01	01	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan	
				7	01	01	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Aur Kuning	
				7	01	01	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Belakang Balok	
				7	01	01	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Birugo	
				7	01	01	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Kubu Tanjung	
				7	01	01	2.03	12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Ladang Cakiah	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN			
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR		KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3		4		5	6	7		8		
		Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional			7	1	1	2.03	20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
		Pengadaan perlengkapan kantor			7	1	1	2.03	22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
		Pengadaan peralatan kantor			7	1	1	2.03	24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			7	01	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan	
					7	01	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Aur	
					7	01	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Belakang Balok	
					7	01	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Birugo	
					7	01	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Kubu Tanjung	
					7	01	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Ladang Cakiah	
					7	01	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Pakan Labuah	
					7	01	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Parit Antang	
					7	01	01	2.03	28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan Sapiran	
					7	01	01	2.03	32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			7	1	1	2.04	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Aur Kuning	
										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Belakang Balok	

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006					PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019					KETERANGAN	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN			
1		2	3	4		5	6	7	8		
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
		Pendataan/ Updating UMKM		7	01	02	2.04	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
		Koordinasi Kecamatan Sehat (UKS, Kec. Sehat, Pokja Kelurahan Sehat)		7	01	02	2.01	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
		Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)									
		Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan									
		Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga									
		Program Peningkatan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan									
		Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan									
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa									
		Musrenbang Kelurahan Aur Kuning		7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
		Musrenbang Kelurahan Belakang Balok		7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
		Musrenbang Kelurahan Birugo		7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
		Musrenbang Kelurahan Kubu Tanjung		7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
		Musrenbang Kelurahan Ladang Cakiah		7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
		Musrenbang Kelurahan Pakan Labuah		7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
		Musrenbang Kelurahan Parit Antang		7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019						KETERANGAN
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1		2	3	4		5	6	7		8		
		Pembinaan dan Fasilitas Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Birugo	
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Birugo										
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Birugo										
		Pembinaan dan Fasilitas Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kubu Tanjung	
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung										
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kubu Tanjung										
		Pembinaan dan Fasilitas Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ladang Cakiah	
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Ladang Cakiah										
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ladang Cakiah										
		Pembinaan dan Fasilitas Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakan Labuah	
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Labuah										
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Labuah										
		Pembinaan dan Fasilitas Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parit Antang	
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Parit Antang										
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Parit Antang										
		Pembinaan dan Fasilitas Keagamaan, Adat, Pemuda dan Olah Raga Kelurahan		7	01	03	2.02	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sapiran	
		Pembinaan dan fasilitas 10 program pokok PKK Kelurahan Sapiran										
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sapiran										
		Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi		7	01	03	2.02	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
		Pembinaan Administrasi kelurahan										
		Pembinaan dan fasilitas Kamtibmas Kecamatan		7	01	04	2.01	01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	

LAMPIRAN II

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						157,590,002,411	183,121,658,892				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						87,421,095,823	103,420,991,224				
1	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						532,301,000	631,753,801				
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perencanaan Yang tepat waktu	2 dokumen	Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	98,430,900	142,486,301	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anak usia sekolah yang divalidasi Jumlah buku profil pendidikan Jumlah kelompok dalam website yang dikelola Jumlah kelompok Data Pokok Pendidikan yang terupdate Jumlah Peserta mengikuti Workshop verifikasi Dapodik Jumlah peserta peserta workshop penyusunan buku profil Jumlah peserta workshop pembekalan pendataan dan pengolahan data	5062 anak 10 buku 2 kelompok 5 kelompok 201 orang 125 orang 68 orang	Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	433,870,100	489,267,500	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan						84,383,979,498	100,000,000,000				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan gaji ASN Disdikbud	12 bulan	Lancarnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Disdikbud	12 bulan	84,383,979,498	100,000,000,000	
1	01	01	2.03		Administrasi Umum						2,504,815,325	2,789,237,423				
1	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli	3220 buah	Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	8,069,950	8,624,942	
1	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan	6 rekening/bulan	Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	142,280,000	162,150,000	
1	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dibayarkan Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) yang dibayarkan	45 unit roda 2 5 unit roda empat	Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	165,721,875	183,220,156	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Honor PPK, PPHP, PTK dan Pejabat pengadaan yang dibayarkan	150 paket	12 bulan	0	0		
1.01.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jasa kebersihan kantor yang disediakan peralatan kebersihanyang disediakan	1 tahun 10 jenis	12 bulan	122,080,000	129,582,000		
1.01.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			peralatan kantor yang dipelihara dan peripheral yang dibeli	12 bulan	12 bulan	16,500,000	17,250,000		
1.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			alat tulis kantor yang dibeli	10 item	12 bulan	29,440,000	31,625,000		
1.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	30 item	12 bulan	11,960,000	13,018,000		
1.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	13 item	12 bulan	5,913,500	6,064,525		
1.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			makanan dan minuman yang dibeli makanan dan minuman yang dibeli	6500 kotak snack 6500 porsi makan	12 bulan	35,700,000	37,375,000		
1.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rakor, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	180,772,000	200,527,800		
1.01.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kendaraan Operasional TK Negeri 1	1 ls	12 bulan	1,008,550,000	1,150,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	254,874,000	287,500,000	
1	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	76,904,000	86,250,000	
1	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	446,050,000	476,050,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						70,168,906,588	79,700,667,668				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						48,845,996,388	56,024,893,309				
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana SD Kota Bukittinggi	8 SD	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	100 persen	29,603,240,000	33,451,016,000	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	100 persen	80,000,000	88,000,000	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana SD Kota Bukittinggi	4 SD	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	100 persen	204,060,000	230,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Terlaksananya AKM SD Kota Bukittinggi	60 sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	100 persen	43,040,000	46,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Jumlah Peserta Sosialisasi e-Raport Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Jumlah Sekolah yang akan di Akreditasi Jumlah sekolah yang akan mengolah Rapor Mutu Pendidikan	40 orang 135 orang 128 orang 16 sekolah 60 sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	100 persen	182,818,550	235,399,307	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Pelaksanaan Kompetisi olahraga siswa nasional (KOSN) Tk SD Terlaksananya reward untuk siswa berprestasi Terpilihnya siswa pemenang KSN SD/MI Terpilihnya siswa SD untuk mengikuti FLS2N Tk.Prov dan Nasional	50 orang 50 orang 6 orang 75 sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	100 persen	350,774,750	438,350,962	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak Jumlah guru Non PNS yang menerima Tunjangan Kesejahteraan	217 orang 316 orang	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	100 persen	9,458,351,978	11,559,110,000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Jumlah bahan angka kredit Jumlah Dokumen guru TPG dan PPG Jumlah guru yang akan di seleksi gupres Jumlah guru yang dibina OGN Jumlah peserta bintek kepala sekolah Jumlah peserta diklat cakep Jumlah peserta diklat cawas Jumlah peserta KKG	50 buah 384 orang 16 orang 20 orang 60 orang 30 orang 15 orang 500 orang	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	100 persen	525,237,200	614,268,130	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Pelaksanaan Terlaksananya penunjang pengelolaan bantuan hibah/bantuan sosial bidang pendidikan dasar (SD) Terfasilitasinya pelaksanaan beasiswa miskin melalui program PIP pada jenjang SD dengan verifikasi data siswa yang akurat Terfasilitasinya pelaksanaan BOS Jenjang SD Terlaksananya pembinaan sekolah/madrasah sehat dan LSS Tk.Prov dan Nasional (SD) Terlaksananya pengelolaan DAK SD Terlaksananya program pendidikan inklusi (SD)	50 lembaga/sekolah 64 sekolah 59 sekolah 1 Paket 64 sekolah 64 sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	100 persen	1,291,713,910	1,291,713,910	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									14,430,271,694	15,890,516,134		
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi	3 SMP	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	100 persen	6,882,750,000	7,000,000,000	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebeluer Sekolah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi	4 SMP	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	100 persen	204,060,000	230,000,000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Terlaksananya AKM SMP Kota Bukittinggi	15 sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	100 persen	22,624,000	24,150,000	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi anugrah kihajar Jumlah Sekolah yang akan di Akreditasi Jumlah sekolah yang akan mengolah Rapor Mutu Pendidikan	40 orang 30 orang 4 sekolah 15 sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	100 persen	98,446,700	118,845,255	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Kontingen kota Bukittinggi di KOSN SMP/MTs Terlaksananya reward untuk siswa berprestasi Terpilihnya siswa pemenang KSN SMP/MTs Terpilihnya siswa SMP untuk mengikuti FLS2N Tk.Prov dan Nasional	50 orang 50 orang 9 orang 30 sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	100 persen	402,740,750	452,278,612	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak Jumlah guru Non PNS yang menerima Tunjangan Kesejahteraan	66 orang 159 orang	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	100 persen	3,331,322,394	4,193,861,975	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Jumlah bahan angka kredit Jumlah Dokumen guru TPG dan PPG Jumlah guru yang akan di seleksi Gupres Jumlah guru yang dibina OGN Jumlah peserta bintek kepala sekolah Jumlah peserta diklat cakep Jumlah peserta diklat cawas Jumlah peserta MGMP	50 buah 263 orang 16 orang 20 orang 15 orang 15 orang 220 orang	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	100 persen	354,346,950	400,923,292	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Terfasilitasinya pelaksanaan beasiswa miskin melalui program indonesia pintar jenjang SMP Terfasilitasinya pelaksanaan BOS jenjang SMP Terlaksananya pembinaan sekolah/madrasah sehat dan LSS Tk.Prov dan Nasional Terlaksananya pengelolaan DAK SMP Terlaksananya program pendidikan inklusi (SD)	15 SMP 11 sekolah N/S 100 sekolah 15 SMP 75 sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	100 persen	512,580,900	530,000,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						5,718,704,350	6,457,514,500					
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Bangunan yang direhab	1 ls	APK PAUD	88.5 %	100,000,000	110,000,000	
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	perlengkapan yang dibeli	1 ls	APK PAUD	88.5 %	5,480,000	5,480,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	01 02 2.03 15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak Jumlah guru Non PNS yang menerima Tunjangan Kesejahteraan	8 orang 455 orang	APK PAUD	88.5 %	3,229,515,000	3,689,200,000	
1	01 02 2.03 16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Jumlah bahan angka kredit Jumlah Dokumen guru TPG dan PPG Jumlah guru yang akan di seleksi Gupres Jumlah peserta PKG	25 buah 153 orang 10 orang 300 orang	APK PAUD	88.5 %	159,495,850	410,000,000	
1	01 02 2.03 17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Terfasilitasinya Lembaga PAUD dalam pengelolaan manajemen dan administrasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Secara Optimal	100 % 107 lembaga 60 %	APK PAUD	88.5 %	2,026,473,500	2,026,473,500	
1	01 02 2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									1,173,934,156	1,327,743,725	
1	01 02 2.04 09		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	perlengkapan yang dibeli	1 ls	Angka Putus Sekolah	2.3 %	10,210,000	10,210,000	
1	01 02 2.04 13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, B dan C Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Non Formal secara optimal	300 orang 90 % 90 %	Angka Putus Sekolah	2.3 %	27,800,000	33,902,000	
1	01 02 2.04 14		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak	9 orang	Angka Putus Sekolah	2.3 %	309,177,656	382,950,000	
1	01 02 2.04 15		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal	1 kegiatan	Angka Putus Sekolah	2.3 %	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Terfasilitasinya Sekolah Non Formal dan Kesetaraan dalam pengelolaan manajemen dan administrasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal dan Kesetaraan Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Secara Optimal	100 % 4 lembaga 30 %	Angka Putus Sekolah	2.3 %	202,888,500	211,673,025	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5,030,198,100	5,250,150,215				
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						3,640,538,500	3,750,335,386				
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						845,758,500	955,555,386				
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Even Seni Budaya yang diikuti Jumlah Kelompok seni budaya yang mengikuti Festival Seni Budaya Anak Nagari Jumlah Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Panitahan Kurai Limo Jorong	3 even 20 kelompok 2 objek 30 orang	Jumlah warisan budaya yang dilindungi	30 objek	764,497,500	877,815,386			
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lembaga dan pranata kebudayaan yang mengikuti pawai alegoris HUT RI	100 lembaga	Jumlah warisan budaya yang dilindungi	30 objek	81,261,000	77,740,000			
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						2,794,780,000	2,794,780,000				
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	lancarnya operasional lembaga adat	7 lembaga adat			156,280,000	156,280,000			
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	sarana dan prasarana	1 ls			2,638,500,000	2,638,500,000			
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						470,266,000	480,109,750				
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						470,266,000	480,109,750				
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah diklat	1 ls	Jumlah warisan budaya tak benda yang diapresiasi	30 objek	410,000,000	410,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan sanggar dan perguruan silat	20 lembaga	Jumlah warisan budaya tak benda yang diapresiasi	30 objek	60,266,000	70,109,750	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								205,101,000	219,650,000		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								205,101,000	219,650,000		
2	22	05	2.01	01	Register Cagar Budaya	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ODCB yang direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya	3 cagar budaya	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 CB	43,930,500	47,150,000	
2	22	05	2.01	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya yang dipelihara jumlah Studi/Kajian Kelayakan dan Teknis Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya jumlah Studi/kajian terhadap Objek Diduga Cagar Budaya	1 pemeliharaan 2 studi teknis 2 kajian	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 CB	161,170,500	172,500,000	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								714,292,600	800,055,079		
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								714,292,600	800,055,079		
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Operasional Museum RKBH Pembayaran Honor Lembur PNS Pembayaran Honor Pegawai Non PNS Pembayaran Jasa Tenaga Cleaning Servis Pembayaran Jasa Tenaga Security Penunjang Pelaksanaan DAK Non Fisik	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	1 museum	352,968,600	447,897,479	
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana Prasarana yang tersedia	1 RKBH	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	1 museum	361,324,000	352,157,600	
TOTAL													152,070,442,511	176,454,947,407		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.01 SDN 01 Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						157,590,002,411	183,121,658,892			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						70,168,906,588	79,700,667,668			
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meubelair yang dibeli	1 ls		101,940,000	101,940,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 Bulan		27,820,000	31,625,000	
TOTAL											129,760,000	133,565,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.02 SDN 02 Campago Guguk Bulek

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meubelair yang dibeli	1 ls			101,940,000	101,940,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	1 ls			28,370,000	28,370,000	
TOTAL												130,310,000	130,310,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.03 SDN 03 Pulau Anak Air

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 Paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 Bulan			31,670,000	36,052,500	
TOTAL													133,610,000	151,052,500			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.04 SDN 04 Garegeh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 bulan			27,820,000	31,625,000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Peralatan Drumband yang dibeli	1 ls			50,000,000	50,000,000	
TOTAL											179,760,000	196,625,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.05 SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			33,320,000	101,940,000	
TOTAL											135,260,000	216,940,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.06 SDN 06 Pulau Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			29,470,000	29,470,000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Peralatan Drumband yang dibeli	1 ls			50,000,000	55,000,000	
TOTAL											181,410,000	199,470,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.07 SDN 07 Kubu Gulai Bancah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 Paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			45,970,000	52,497,500	
TOTAL												147,910,000	167,497,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.08 SDN 08 Campago Ipuh

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 Paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 Bulan			43,770,000	49,967,500	
TOTAL												145,710,000	164,967,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.09 SDN 09 Manggis Ganting

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 Bulan			34,420,000	39,215,000	
TOTAL												136,360,000	154,215,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.10 SDN 10 Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Perlengkapan yang dibeli	1 ls			20,000,000	20,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 Bulan			38,820,000	44,275,000	
TOTAL											160,760,000	179,275,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.11 SDN 11 Campago Guguk Bulek

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			28,370,000	32,257,500	
TOTAL												130,310,000	147,257,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.12 SDN 12 Puhun Pintu Kabun

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket		101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan		17,920,000	20,240,000	
TOTAL													119,860,000	135,240,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.13 SDN 13 Kubu Gulai Bancah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket		101,940,000	115,000,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan		38,820,000	101,940,000		
TOTAL												140,760,000	216,940,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.14 SDN 14 Tanjung Alam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
TOTAL									15,720,000	17,710,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.15 SDN 15 Pulai Anak Air

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 Paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			35,520,000	40,480,000	
TOTAL												137,460,000	155,480,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.16 SDN 16 Campago Ipuh

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			31,670,000	36,052,500	
TOTAL												133,610,000	151,052,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.17 SDN 17 Manggis Ganting

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 bulan			33,320,000	37,950,000	
TOTAL												135,260,000	152,950,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.18 SDN 18 Campago Guguk Bulek

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			35,520,000	40,480,000	
TOTAL												137,460,000	155,480,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.19 SDN 01 Benteng Pasar Atas

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya Meja kursi Siswa dan Guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			27,820,000	31,625,000	
TOTAL												129,760,000	146,625,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.20 SDN 02 Percontohan Kayu Kubu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 bulan			83,720,000	94,875,000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Alat Kesenian yang dibeli	1 ls			174,000,000	174,000,000	
TOTAL											359,660,000	383,875,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.21 SDN 03 Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 bulan			110,540,000	125,235,000	
TOTAL											212,480,000	240,235,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.22 SDN 04 Bukit Apit Puhun

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 bulan			49,820,000	56,925,000	
TOTAL												151,760,000	171,925,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.23 SDN 05 Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Perlengkapan yang dibeli	1 ls			77,000,000	77,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 bulan			31,120,000	35,420,000	
TOTAL											210,060,000	227,420,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.24 SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			47,070,000	53,762,500	
TOTAL												149,010,000	168,762,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.25 SDN 07 Teladan Bukit Canggih

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 bulan			30,020,000	34,155,000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	alat kesenian yang dibeli	1 ls			50,000,000	55,000,000	
TOTAL											181,960,000	204,155,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.26 SDN 08 Tarok Dipo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			136,040,000	154,560,000	
TOTAL												237,980,000	269,560,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.27 SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			44,320,000	50,600,000	
TOTAL												146,260,000	165,600,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.28 SDN 11 Bukit Apit Puhun

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket		101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan		71,620,000	80,960,000	
TOTAL												173,560,000	195,960,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.29 SDN 12 Bukit Canggih

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			27,270,000	30,992,500	
TOTAL												129,210,000	145,992,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.30 SDN 13 Bukit Apit Puhun

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket		101,940,000	115,000,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 bulan		27,270,000	30,992,500		
TOTAL												129,210,000	145,992,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.31 SDN 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			49,820,000	56,925,000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	alat kesenian yang dibeli	1 ls			50,000,000	55,000,000	
TOTAL											201,760,000	226,925,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.32 SDN 16 Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			47,620,000	54,395,000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	alat kesenian yang dibeli	1 ls			91,000,000	99,000,000	
TOTAL											240,560,000	268,395,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.33 SDN 17 Pakan Kurai

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket		101,940,000	115,000,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 bulan		79,870,000	90,447,500		
TOTAL												181,810,000	205,447,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.34 SDN 18 Tarok Dipo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			18,470,000	20,872,500	
TOTAL												120,410,000	135,872,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.35 SDN 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			51,820,000	58,190,000	
TOTAL													153,760,000	173,190,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.36 SDN 01 Ladang Cakiah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			33,320,000	37,950,000	
TOTAL												135,260,000	152,950,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.37 SDN 02 Aur Kuning

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			83,720,000	94,875,000	
TOTAL												185,660,000	209,875,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.38 SDN 03 Pakan Labuah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			43,770,000	49,967,500	
TOTAL												145,710,000	164,967,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.39 SDN 04 Birugo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	lancarnya PBM SD	12 bulan			49,270,000	56,292,500	
TOTAL												151,210,000	171,292,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.40 SDN 05 Birugo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			33,320,000	37,950,000	
TOTAL												135,260,000	152,950,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.41 SDN 06 Parit Antang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket		101,940,000	115,000,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan		32,220,000	36,685,000		
TOTAL												134,160,000	151,685,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.42 SDN 07 Belakang Balok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			24,520,000	27,830,000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	alat kesenian yang dibeli	1 ls			50,000,000	55,000,000	
TOTAL											176,460,000	197,830,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.43 SDN 08 Kubu Tanjung

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			23,970,000	27,197,500	
TOTAL												125,910,000	142,197,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.44 SDN 09 Belakang Balok

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 Paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			12,420,000	13,915,000	
TOTAL												114,360,000	128,915,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.45 SDN 10 Sapiran

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			38,820,000	44,275,000	
TOTAL												140,760,000	159,275,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.46 SDN 11 Aur Kuning

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	1 paket			101,940,000	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SD	12 bulan			19,570,000	22,137,500	
TOTAL												121,510,000	137,137,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.48 SMPN 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi	1 paket			127,780,000	143,750,000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	alat kesenian yang dibeli	1 ls			12,500,000	12,500,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SMP	12 bulan			143,540,000	163,185,000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	alat kesenian yang dibeli	1 ls			150,000,000	155,000,000	
TOTAL											433,820,000	474,435,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.49 SMPN 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi	1 paket			127,780,000	143,750,000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	alat kesenian yang dibeli	1 ls			12,500,000	12,500,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SMP	12 bulan			192,380,000	219,351,000	
TOTAL											332,660,000	375,601,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.50 SMPN 3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi	1 paket			127,780,000	143,750,000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	perlengkapan yang dibeli	1 ls			12,500,000	12,500,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SMP	12 bulan			113,840,000	129,030,000	
TOTAL											254,120,000	285,280,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.51 SMPN 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi	1 paket			127,780,000	143,750,000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	perlengkapan yang dibeli	1 ls			12,500,000	12,500,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SMP	12 bulan			308,800,000	352,176,000	
TOTAL											449,080,000	508,426,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.52 SMPN 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi	1 paket			127,780,000	143,750,000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	perlengkapan yang dibeli	1 ls			12,500,000	12,500,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SMP	12 bulan			175,880,000	200,376,000	
TOTAL											316,160,000	356,626,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.53 SMPN 6

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi	1 paket			127,740,000	143,750,000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	perlengkapan yang dibeli	1 ls			12,500,000	12,500,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SMP	12 bulan			163,320,000	185,955,000	
TOTAL											303,560,000	342,205,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.54 SMPN 7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi	1 paket			127,780,000	143,750,000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	perlengkapan yang dibeli	1 ls			12,500,000	12,500,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SMP	12 bulan			117,140,000	132,825,000	
TOTAL											257,420,000	289,075,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.55 SMPN 8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana SMP Kota Bukittinggi	1 paket			127,780,000	143,750,000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	perlengkapan yang dibeli	1 ls			12,500,000	12,500,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya PBM SMP	12 bulan			134,300,000	152,559,000	
TOTAL											274,580,000	308,809,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.56 UPTD TK NEGERI PEMBINA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya Proses Belajar Mengajar TKN Pembina Terlaksananya Saran dan Prasarana TK Negeri Pembina	100 % 12 bulan 12 bulan			81,340,000	89,861,000	
TOTAL											81,340,000	89,861,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.57 UPTD TK NEGERI 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembanguna n Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
TOTAL									116,400,000	126,500,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.58 SPNF SKB Kota Bukittinggi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya Pembelajaran Paket A, B dan C Terlaksananya layanan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Terlaksananya Pembelajaran PAket A, B dan C	12 bulan 100 % 12 bulan			93,120,000	105,685,000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dan operasional Kantor Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional SPNF SKB Tersedianya Kebutuhan Adminstrasi Kantor	12 bulan 100 % 12 bulan			530,738,000	583,323,700	
TOTAL											623,858,000	689,008,700	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						76,742,194,452	85,913,584,222				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						42,377,797,669	48,192,885,388				
1	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						78,958,000	88,593,700				
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi di Dinas Kesehatan	6 dokumen	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	100 persen	78,958,000	88,593,700	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan						34,137,055,860	38,964,457,389				
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan gaji yang dibayarkan	12 bulan	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	100 persen	34,137,055,860	38,964,457,389	
1	02	01	2.03		Administrasi Umum						8,161,783,809	9,139,834,299				
1	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya cek, materai, dan lancarnya jasa lainnya gaji yang dibayarkan di Dinkes	2 item	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	7,390,000	7,475,000	
1	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar di Dinkes	37 rekening	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	273,900,000	312,489,500	
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pengurusan izin kendaraan dinas di Dinkes	22 kali	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	521,691,000	566,180,650	
1	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terbayar di Dinkes	55 paket	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	0	92,000,000	
1	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia di Dinkes Jumlah tenaga kebersihan kantor di Dinkes	50 item 17 orang	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	666,924,588	742,703,695	
1	02	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja di Dinkes	12 bulan	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	66,090,000	71,300,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah item alat tulis kantor di Dinkes	27 item	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	19,395,721	21,281,579	
1	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia di Dinkes	6 item	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	30,370,000	31,694,000	
1	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan di Dinkes Jumlah jaringan listrik yang dipelihara di Dinkes	20 item 11 item	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	19,337,500	21,214,625	
1	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah makan minum rapat, tamu dan lembur di Dinkes	100 kali	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	50,465,000	53,618,750	
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di Dinkes	100 persen	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	135,062,000	146,489,300	
1	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercapainya penyediaan tenaga pengamanan kantor	90 % 17 orang	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	801,760,000	810,000,000	
1	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	90 %	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	17,680,000	18,250,000	
1	02	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	90 %	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	677,960,000	747,500,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							33,169,201,283	36,388,164,309			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota							6,754,524,910	6,909,377,646			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan tanah puskesmas birugo	1 paket	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	80 persen	4,972,920,000	5,000,000,000	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	90 %	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	80 persen	3,370,000	3,800,000	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan UKBM yang disediakan (Dana POKIR)	1 paket	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	80 persen	125,220,000	130,000,000	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat kesehatan atau penunjang medik yang disediakan	1 paket	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	80 persen	17,680,000	19,000,000	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pemeliharaan Ambulance siaga	12 bulan	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	80 persen	10,860,000	11,500,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,024,918,323	29,070,781,555			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cetak Buku kespro catin Cetak Buku KIA + Stiker P4K Cetak Media Informasi Monev dan RTL ke Puskesmas Pelaksanaan Manual Rujukan Peningkatan Kompetensi Bidan Pertemuan Data dan Evaluasi Program Kesga Review Bedah Kohort Sosialisasi Surveilens Berbasis Aplikasi	800 buah 1600 buah 7 puskesmas 7 puskesmas 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	193,163,300	223,315,395	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cetak media promosi Terlaksananya pertemuan sosialisasi tatalaksana pasca persalinan dan masa nifas Terlaksananya pertemuan update APN	7 paket 30 orang 30 orang	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	47,720,000	50,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	02 02 2.02 03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan laptop Terlaksananya pemeriksaan sampel SHK pada BBL Terlaksananya pertemuan pembahasan AMP ibu dan bayi Terlaksananya pertemuan pembelajaran AMP pada ibu dan bayi Terlaksananya pertemuan update AMP pada ibu dan anak Terlaksananya pertemuan update pelayanan neonatal essensial dan kegawatdaruratan BBL di tingkat primer	1 unit 650 sampel 38 orang 38 orang 25 orang 30 orang	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	131,133,000	158,972,550	
1	02 02 2.02 04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cetak kartu cakram DDTK Cetak media promosi Terlaksananya pertemuan update kohort Terlaksananya pertemuan update MTBS/MTBM Terlaksananya pertemuan update SIDDTK	1000 buah 7 paket 25 orang 25 orang 25 orang	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	72,240,000	80,500,000	
1	02 02 2.02 05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah guru UKS yang mengikuti orientasi program sekolah sehat Jumlah konselor sebaya yang dilatih Jumlah petugas yang mengikuti Bimtek pengelolaan program PKPR di puskesmas	30 guru 30 KKR 30 petugas	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	17,917,000	25,664,550	
1	02 02 2.02 07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mencetak buku kesehatan lansia Mencetak buku pedoman kesehatan lansia Terlaksananya kegiatan lomba senam lansia Terlaksananya kegiatan pertemuan validasi data dan evaluasi program lansia Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola dan kader lansia Terlaksananya pertemuan pemberdayaan kesehatan lansia	1000 buku 14 buku 7 puskesmas 21 orang 50 orang 25 orang	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	136,918,000	157,550,000	
1	02 02 2.02 11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			"Jumlah keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Success Rate) " Jumlah penemuan pasien baru TB BTA+	100 % 100 %	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	48,560,000	57,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kasus positif tertangani dengan tahapan layanan kesehatan Jumlah Komunitas yang berisiko HIV Aids yang terjangkau Jumlah sosialisasi yang diberikan ke masyarakat	100 % 50 % 1 kali	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	299,380,000	335,527,450	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cetak media promosi Diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri Mengikuti pertemuan gizi (penyusunan kebutuhan PMT dan peningkatan pelayanan kesehatan dari sektor gizi di tingkat nasional) Pelatihan nutriceen Pelatihan PMBA Pengadaan tropot dan dacin Pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja putri Pertemuan Rakontek dalam rangka pencegahan stunting tingkat Kota Bukittinggi Pertemuan validasi data dan evaluasi program gizi PMT Sosialisasi regulasi ASI Eksklusif	2 item 30 orang 2 paket 20 orang 20 orang 7 paket 20 orang 35 orang 15 orang 3600 botol 35 orang	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	422,752,500	473,492,375	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang diukur kebugarannya Jumlah jemaah haji yang diukur kebugarannya Jumlah peserta pertemuan kebugaran Jumlah peserta pertemuan pemilik usaha dan kader Pos UKK Jumlah peserta pertemuan program kesehatan kerja dan olahraga	80 orang 400 orang 43 orang 50 orang 25 orang	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	66,675,000	74,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IKL Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3 Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan limbah B3 Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan UKL-UPL Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi program Jumlah TPM yang dilakukan pengawasan Jumlah TTU yang dilakukan pengawasan	24 kelurahan 120 orang 35 orang 2 orang 2 orang 30 orang 24 kali 50 sarana	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	448,430,500	500,000,000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan tradisional	7 puskesmas 7 puskesmas	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	51,733,200	54,886,280	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembuatan media promosi surveilans penyakit Jumlah peserta Monev PM dan PTM Jumlah peserta pertemuan pengelolaan surveilans penyakit Hipertensi dan DM Jumlah Peserta pertemuan penguatan peranan posbindu Jumlah peserta sosialisasi Program Indra Jumlah peserta workshop Penyakit Menular Jumlah peserta workshop PTM Jumlah puskesmas yang menerima sosialisasi SI PTM	3 item 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 7 puskesmas	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	222,935,000	247,543,250	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pecandu Napza yang terjangkau Jumlah peserta sosialisasi efek samping narkoba Jumlah peserta workshop deteksi dini kesehatan jiwa pada anak	50 % 30 orang 30 orang	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	48,640,000	51,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aktifitas kegiatan PMI Jumlah anak yang dilakukan tindakan khitan Jumlah layanan yang diberikan pada calon jemaah haji	12 bulan 58 orang 100 %	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	589,018,000	600,000,000	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Jumlah pengendalian krisis kesehatan akibat bencana	100 % 100 %	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	50,263,000	55,686,450	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM . Jumlah Masyarakat terdeteksi kadar gula darah Jumlah Masyarakat terdeteksi kolesterol Jumlah penderita DBD yang ditangani Jumlah penderita diare dan penyakit menular lainnya yang diberi pelayanan kesehatan Jumlah penderita malaria, bumil dengan hepatitis dan rabies yang diberi layanan kesehatan Jumlah penderita pneumonia balita yang diberi layanan kesehatan Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu . Jumlah terlaksana Monev Penyakit Tidak Menular	24 kelurahan 60 % 60 % 100 % 100 % 100 % 7 puskesmas 1 kali	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	288,336,000	318,338,400	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta JKN (PBI APBD) yang dibantu pembayaran premi JKN Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan dan monitoring pengelolaan JKN Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non Kapitasi	9268 orang 7 puskesmas 7 puskesmas	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	3,841,605,600	4,390,338,440	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah spesimen yang diambil Jumlah spesimen yang dikirim	100 % 100 %	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	4,905,000	5,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cetak media promosi Pertemuan bulanan forum Pertemuan persiapan teknis kegiatan Pertemuan tatanan di Kecamatan Pertemuan tatanan di Kelurahan Pertemuan tatanan di SKPD	3 paket 12 kali 10 kali 6 kali 42 kali 6 kali	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	404,525,500	447,586,325	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah honorarium tenaga akutansi blud puskesmas Jumlah Puskesmas BLUD	7 orang 7 puskesmas	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	305,760,000	400,000,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan Akreditasi Rumah Sakit Jumlah peserta yang mengikuti survey simulasi Jumlah peserta yang mengikuti workshop akreditasi Rumah Sakit Tingkat capaian akreditasi Rumah Sakit	120 orang 200 orang 120 orang 1 paripurna	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	522,540,000	575,000,000	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kasus KIPI yang dirawat Jumlah kasus KIPI yang terlacak	100 % 100 %	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	21,820,000	23,000,000	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah balita yang mendapatkan imunisasi Jumlah kelurahan yang sudah Universal Child Immunization	93 % 24 sekolah	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	98,575,000	128,862,139	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						81,740,550	85,905,633				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah buku profil kesehatan	30 buku	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	36,696,050	38,520,458	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan capaian SPM	1 laporan	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	45,044,500	47,385,175	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						308,017,500	322,099,475				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	02 02 2.04 02		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan koordinasi dan visitasi	25 sarana 50 orang	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	19,988,500	21,548,125	
1	02 02 2.04 03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP Berprestasi Jumlah kunjungan layanan kesehatan LAPAS kelas IIA Bukittinggi Jumlah layanan P3K yang dilaksanakan Jumlah masyarakat penerima layanan ambulance siaga Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan monev terpadu Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan dasar	7 puskesmas 12 kali 12 bulan 1.5 % 50 orang 7 puskesmas 30 orang	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	288,029,000	300,551,350	
1	02 03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									428,079,500	467,121,425	
1	02 03	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota									5,105,000	5,502,750	
1	02 03 2.01 01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Kesehatan/Apotek/Toko Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin operasional	250 rekomendasi	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	90 persen	5,105,000	5,502,750	
1	02 03	2.02	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota									21,850,000	22,919,500	
1	02 03 2.02 02		Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi	20 orang	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	95 persen	21,850,000	22,919,500	
1	02 03	2.03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota									184,280,000	200,000,000	
1	02 03 2.03 02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di RSUD Kota Bukittinggi Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	2 kegiatan 100 %	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	95 persen	184,280,000	200,000,000	
1	02 03	2.04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									196,497,500	217,140,125	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan Jumlah rekomendasi izin belajar/tugas belajar bagi SDM kesehatan Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposium/seminar teknis kesehatan dan rumah sakit Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian	1 kegiatan 50 rekomendasi 100 orang 500 orang	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	95 persen	196,497,500	217,140,125	
1	02	03	2.05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20,347,000	21,559,050		
1	02	03	2.05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas kesehatan Kota Bukittinggi Tersusunnya data dan informasi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	1 kegiatan 2 kegiatan 100 % 100 %	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	95 persen	20,347,000	21,559,050	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						316,439,000	354,474,850		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						101,066,000	107,393,900		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	Frekuensi Pertemuan pengelolaan ASPAK Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang Terawasi Penggunaan Obat Rasionalnya Jumlah sarana yang terbina dan terawasi distribusi sediaan farmasinya Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan kefarmasian di puskesmas Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/ Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek "Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian"	2 kali 1 kali 20 sarana 30 sarana 20 orang 30 orang 180 orang	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes	90 persen	49,631,000	52,659,650	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	Adanya kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan Data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan Jumlah peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap pemenuhan standar dan persyaratan Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian tentang peraturan / regulasi terkait sarana pelayanan kefarmasian	100 % 100 % 100 sarana 180 sarana	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes	90 persen	51,435,000	54,734,250	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									56,404,000	60,448,600		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prevalensi gizi kurang BB/TB (≤ -2 SD) (Wasting)	4,55 persen	Bimtek DFI bagi petugas Pengawas Keamanan Pangan Frekuensi Pemeriksaan Sampel Pangan Jumlah Industri Rumah Tangga yang diaudit Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	1 kegiatan 1 kali 70 sarana 60 orang	Persentase kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	90 persen	56,404,000	60,448,600	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						62,840,000	80,500,000				
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prevalensi gizi kurang BB/TB (≤ -2 SD) (Wasting)	4,55 persen	Jumlah Depot yang diawasi Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sanitasi DAMIU	116 buah 33 orang	Persentase kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	90 persen	62,840,000	80,500,000	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						96,129,000	106,132,350				
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prevalensi gizi kurang BB/TB (≤ -2 SD) (Wasting)	4,55 persen	Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP Inventarisasi IRTP Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan IRTP Pengawasan dalam rangka penerbitan SPPIRT Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan Pengkajian Ulang SPPIRT Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga	60 orang 2 kegiatan 300 orang 3 kegiatan 50 sarana 220 sarana 1 kegiatan 71 sampel	Persentase kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	90 persen	96,129,000	106,132,350	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						450,677,000	510,938,250				
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						24,132,000	25,000,000				
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah advokasi dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan LP/LS Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan yang dihasilkan Jumlah kemitraan dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan LP/LS	1 kegiatan 3 dokumen 3 mitra	"Persentase penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu "	90 persen	24,132,000	25,000,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						150,155,000	168,572,750				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kampanye germas Tingkat Kota yang dilaksanakan Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye germas Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan Jumlah penyiaran dan liputan untuk promosi kesehatan Jumlah tema KIE ke masyarakat yang dihasilkan	3 kali 24 kelurahan 8 macam 312 kali 70 tema	Persentase kelurahan yang telah ODF (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	80 persen	150,155,000	168,572,750	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						276,390,000	317,365,500		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah anggota saka bakti husada yang dibina Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat kota Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat provinsi Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti Jumlah kelurahan siaga aktif Jumlah posyandu yang aktif	70 % 30 orang 3 kader 1 kader 2 kegiatan 24 kelurahan 136 posyandu	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik	15 persen	276,390,000	317,365,500	
TOTAL											52,554,588,819	59,036,351,425		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.01 UPTD Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										33,169,201,283	36,388,164,309	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	4 kelurahan			1,056,030,000	1,100,000,000	
TOTAL												1,056,030,000	1,100,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.02 UPTD Puskesmas Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
TOTAL									974,277,560	990,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.03 UPTD Puskesmas Nilam Sari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembanguna n Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
TOTAL									439,520,000	450,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.04 UPTD Puskesmas Mandiangin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembanguna n Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
TOTAL									842,318,000	850,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.05 UPTD Puskesmas Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
TOTAL									399,060,000	400,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.06 UPTD Puskesmas Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembanguna n Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
TOTAL									703,910,500	724,500,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.07 UPTD Puskesmas Plus Mandiangin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembanguna n Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
TOTAL									332,856,000	340,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.08 UPTD Instalasi Farmasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan	7 puskesmas			10,840,000	11,000,000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketersediaan obat terpenuhi di Dinkes	100 persen			280,173,990	290,506,088	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketersediaan BMHP terpenuhi di Dinkes	100 persen			261,670,920	267,571,558	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan Persentase pengelolaan obat dan perbekalan sesuai standar di IFK	7 puskesmas 100 %			35,445,053	37,000,000	
TOTAL											588,129,963	606,077,646	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.09 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan	3800 sampel			25,710,000	26,000,000	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan	3800 sampel			612,540,000	683,077,000	
TOTAL											638,250,000	709,077,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						42,377,797,669	48,192,885,388					
1	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya cek, materai dan jasa lancar lainnya	3 paket			19,890,000	21,850,000	
1	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di bayar	3 rekening			508,250,000	580,968,500	
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	22 kali			496,328,000	557,529,200	
1	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK, PPHP	16 SPK			0	115,000,000	
1	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia Penyediaan tenaga kebersihan kantor	276 item 24 orang			1,150,200,000	1,296,556,000	
1	02	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	11 item			387,020,000	431,250,000	
1	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor Rumah Sakit	73 item			277,420,000	316,250,000	
1	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	20 item			208,180,000	230,000,000	
1	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya alat listrik dan elektronik	30 item			126,780,000	143,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	02 01 2.03 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya makan minum rapat, tamu dan lembur	12 bulan			263,520,000	289,800,000	
1	02 01 2.03 18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bulan			584,650,000	654,683,500	
1	02 01 2.03 28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah tenaga pengamanan yang diberikan jasa	90 % 16 orang			851,520,000	860,000,000	
1	02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									33,169,201,283	36,388,164,309	
1	02 02 2.01 16		Pengadaan Obat, Vaksin	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketersediaan obat terpenuhi	100 %			625,860,000	690,000,000	
1	02 02 2.01 17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketersediaan BMHP terpenuhi	100 %			420,220,000	460,000,000	
1	02 02 2.02 32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat kesehatan RSUD yang disediakan Jumlah prasarana dan kelengkapan RSUD yang disediakan Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	1 ls 1 ls 1 ls			12,293,415,610	14,059,940,951	
TOTAL											18,213,253,610	20,707,578,151		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.01 UPTD Penerangan Fasilitas Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						153,509,769,151	126,440,497,047					
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						10,618,657,692	11,678,511,847					
1	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Surat Menyurati	2 jenis			815,000	569,250	
1	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat Tulis Kantor yang dibeli	27 jenis			3,125,200	3,225,980	
1	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan	12 bulan			806,450	559,418	
1	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makanan yang dibeli, snack yang dibeli	12 bulan			610,000	701,500	
1	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rapat-rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	12 bulan			21,060,000	23,115,000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						21,055,138,248	8,573,245,007					
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Penerangan Fasilitas Umum yang direvitalisasi	30 titik lampu			0	345,000,000	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	12 bulan			0	4,270,822,275	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						9,964,905,542	7,300,000,000					
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						9,964,905,542	7,300,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.01 UPTD Penerangan Fasilitas Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah titik lampu yang diadakan	30 titik			309,600,000	500,000,000	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lampu penerangan umum dan lampu penerangan Fasum yang direvitalisasi jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara	30 titik 12 bulab			4,314,798,500	5,000,000,000	
TOTAL											4,650,815,150	10,143,993,423					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.02 UPTD Perlengkapan dan Peralatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						153,509,769,151	126,440,497,047			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						10,618,657,692	11,678,511,847			
1	03	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat berat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	28 unit		870,160,000	977,500,000	
1	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat tulis kantor yang dibeli	1 kegiatan		4,561,050	4,877,208	
1	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan	1 kegiatan		1,000,000	1,150,000	
1	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rapat-rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	1 kegiatan		26,280,000	28,750,000	
1	03	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pakaian lapangan yang diadakan	1 kegiatan		4,520,000	4,830,000	
TOTAL										906,521,050	1,017,107,208				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1 03 01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,696,250	23,892,688		
1 03 01	2.01 01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen perencanaan	2 dokumen		22,696,250	23,892,688		
1 03 01	2.02		Administrasi Keuangan								8,135,963,742	9,348,216,303		
1 03 01	2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji dan tunjangan ASN tersedia	72 orang		8,135,963,742	9,348,216,303		
1 03 01	2.03		Administrasi Umum								2,455,477,700	2,301,572,856		
1 03 01	2.03 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis surat menyurat	4 jenis	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	3,820,000	4,025,000	
1 03 01	2.03 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pembayaran rekening air pembayaran rekening internet pembayaran rekening listrik pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	261,280,000	299,000,000	
1 03 01	2.03 06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya kendaraan dinas roda empat atau lebih yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	24 buah 17 buah	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	306,258,000	343,364,700	
1 03 01	2.03 08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			alat kebersihan yang disediakan Jasa kebersihan yang disediakan retribusi sampah yang dibayar	10 item 1 paket 12 bulan	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	287,110,000	310,707,000	
1 03 01	2.03 09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			peralatan dan perlengkapan yang dipelihara peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	2 item 9 jenis	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	16,920,000	17,250,000	
1 03 01	2.03 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat tulis kantor yang dibeli	59 jenis	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	15,640,000	17,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang cetakan yang disediakan Penggandaan yang dilakukan	11 Jenis 67855 lembar	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	18,140,000	20,125,000	
1	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang dibeli	13 Jenis	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	5,640,000	5,750,000	
1	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makanan yang dibeli obat2 dan suplemen yang dibeli Snack yang dibeli	1232 bungkus nasi 1 Lumpsum 525 bungkus snack	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	16,340,000	25,875,000	
1	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti	1 lumpsum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	182,052,000	200,527,800	
1	03	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang dipelihara	3900 titik	413,860,000	17,250,000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								1,683,510,000	1,805,758,750		
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								1,683,510,000	1,805,758,750		
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Perencanaan Laporan Pengawasan Panjang Saluran Irigasi Yang Dibangun	1 Dokumen 1 Laporan 250 m	Presentase Daerah Irigasi Berkondisi Baik	60 %	969,325,000	1,081,000,000	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Presentase Daerah Irigasi Berkondisi Baik	60 %	169,725,000	116,293,750	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara Panjang saluran irigasi yang dipelihara	11 Daerah Irigasi 33.8 km	Presentase Daerah Irigasi Berkondisi Baik	60 %	544,460,000	608,465,000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								170,580,000	180,000,000		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								170,580,000	180,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Rencana Induk Air Minum	1 dokumen	rencana induk	1 dokumen	110,580,000	115,000,000	
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dokumen	rencana induk	1 dokumen	60,000,000	65,000,000	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						128,520,518	112,924,846				
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						128,520,518	112,924,846				
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pembangunan tps3r pengawasan perencanaan	1 unit 1 laporan 1 dokumen	bangunan TPS3R	1 unit	128,520,518	112,924,846	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						21,642,751,000	7,333,165,900				
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						21,642,751,000	7,333,165,900				
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 %	panjang drainase yang dibangun	456 meter	meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase kota dan lingkungan	1197 meter	1,417,327,000	4,613,618,300	
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 %	panjang drainase yang ditingkatkan	482 meter	meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase kota dan lingkungan	1197 meter	19,089,717,000	1,465,418,550	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 %	panjang drainase yang direhab	129 meter	meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase kota dan lingkungan	1197 meter	379,800,000	402,500,000	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 %	panjang drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk	130 meter	meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase kota dan lingkungan	1197 meter	755,907,000	851,629,050	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						96,917,635,000	95,342,187,500				
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						96,917,635,000	95,342,187,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekomendasi SLF Jumlah Rekomendasi teknis TABG	5 Rekomendasi 20 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Teknis dan SLF	25 Rekomendasi	2,883,930,000	173,937,500	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bangunan Gedung Bersama Bangunan kantor DPRD Dokumen Manajemen konstruksi Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Halaman dan taman Kejaksaan Negeri Laporan pengawasan berkala Gedung Bersama Laporan pengawasan berkala kantor DPRD Laporan Pengawasan Gedung Bersama Laporan Pengawasan Rehabilitasi Halaman dan taman Kejaksaan Negeri Rehabilitasi Halaman dan taman	1 Gedung 1 Gedung 1 Laporan 1 Dokumen 1 laporan 1 Laporan 1 laporan 1 paket	Jumlah Rekomendasi Teknis dan SLF	25 Rekomendasi	94,009,865,000	95,145,250,000	
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gambar RAB Usulan Biaya	20 Gambar 20 RAB 20 Usulan Biaya	Jumlah Rekomendasi Teknis dan SLF	25 Rekomendasi	23,840,000	23,000,000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										21,055,138,248	8,573,245,007	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										21,055,138,248	8,573,245,007	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Perencanaan Laporan Pengawasan Panjang Jalan yang Direhab	1 Dokumen 1 Laporan 750 m	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang terpelihara dan dibangun	3930 titik lampu	19,910,310,940	2,669,839,828	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang terpelihara dan dibangun	3930 titik lampu	183,551,500	199,779,725	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Panjang jalan yang dipelihara	150 km	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum yang terpelihara dan dibangun	3930 titik lampu	961,275,808	1,087,803,179	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										133,520,000	128,800,000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										85,840,000	94,300,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pelatihan	70 orang	Peserta pelatihan Keterampilan	70 Orang	85,840,000	94,300,000	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						23,840,000	23,000,000					
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Harga satuan pekerjaan konstruksi dan HSBGN	5 Buku	Buku harga satuan pekerjaan konstruksi dan HSBGN	5 Dokumen	23,840,000	23,000,000	
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)						23,840,000	11,500,000					
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rekomendasi Penerbitan IUJK	35 Rekomendasi	Buku harga satuan pekerjaan konstruksi dan HSBGN	35 Rekomendasi	23,840,000	11,500,000	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						1,159,456,693	1,285,903,197					
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota						109,571,768	117,727,533					
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen materi teknis Perda RDTR	1 dokumen 1 perda	Jumlah rencana tata ruang yang dilegalkan	2 Perda	109,571,768	117,727,533	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						606,361,000	678,731,150					
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembuatan Keterangan Rencana Kota	300 KRK	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang	2 jenis	606,361,000	678,731,150	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						443,523,925	489,444,514					
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah razia bangunan dan pelanggaran pemanfaatan ruang	200 SP	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditertibkan	150 pelanggaran	295,992,825	327,143,749	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sidang TKPRD	5 sidang	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditertibkan	150 pelanggaran	147,531,100	162,300,765	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						649,250,060	710,573,569					
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						40,840,000	42,550,000					
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.						40,840,000	42,550,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah sengketa, konflik, perkara pertanahan yang difasilitasi	10 kasus	fasilitasi permasalahan tanah yang diselesaikan	10 kasus	40,840,000	42,550,000	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						35,147,100	36,003,165				
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						35,147,100	36,003,165				
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			fasilitasi pengadaan tanah skala kecil perwako pengadaan tanah skala kecil	1 SKPD 1 dokumen	jumlah fasilitasi pengadaan tanah untuk Pemda	2 kegiatan	35,147,100	36,003,165	
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT						82,895,000	90,913,250				
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota						82,895,000	90,913,250				
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Data tanah ulayat Rancangan Teknis Materi Ranperda	1 dokumen 1 dokumen	jumlah data dan peta tanah ulayat	15 bidang	82,895,000	90,913,250	
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						148,678,000	163,619,700				
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah						148,678,000	163,619,700				
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah daerah yang terbit	10 sertifikat	jumlah sertifikat yang terbit	10 sertifikat	148,678,000	163,619,700	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						341,689,960	377,487,454				
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						341,689,960	377,487,454				
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			entry data tanah up dating aplikasi	30 data 1 aplikasi	persentase masalah tanah yang diselesaikan	85 persen	52,112,000	55,512,800	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			masalah tanah konsolidasi by pass yang ditangani	50 persil	persentase masalah tanah yang diselesaikan	85 persen	289,577,960	321,974,654	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						9,964,905,542	7,300,000,000				
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						9,964,905,542	7,300,000,000				
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						9,964,905,542	7,300,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Trotoar yang dibangun	2 paket			1,449,490,850	1,500,000,000	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Trotoar yang dipelihara	12 bulan			3,891,016,192	300,000,000	
TOTAL											158,566,588,553	123,289,969,985				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						17,468,151,500	20,088,374,226					
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						3,922,748,155	4,511,160,379					
1	04	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,070,000	25,380,500					
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja DPKP 2021-2026	2 dokumen	Meningkatnya kualitas perencanaan	100 persen	22,070,000	25,380,500	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan						3,420,718,025	3,933,825,729					
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersalurkannya gaji dan tunjangan	12 bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	3,420,718,025	3,933,825,729	
1	04	01	2.03		Administrasi Umum						479,960,130	551,954,150					
1	04	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah materai, prangko dan benda pos lainnya yang dibeli	3 item	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	3,920,000	4,508,000	
1	04	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening yang dibayarkan	12 bulan rekening	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	15,640,000	17,986,000	
1	04	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan, suku cadang, service, bbm serta pajak yang terbayarkan	14 unit	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	135,730,000	156,089,500	
1	04	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli, retribusi persampahan termasuk denda yang dibayarkan	26 item	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	48,840,000	56,166,000	
1	04	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	5 item	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	6,340,000	7,291,000	
1	04	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	34 item	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	10,828,130	12,452,350	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.04.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	3 item	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	5,640,000	6,486,000	
1.04.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli	10 item	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	2,413,000	2,774,950	
1.04.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	6 item	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	81,940,000	94,231,000	
1.04.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan	360 porsi nasi	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	15,615,000	17,957,250	
1.04.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Rapat dan Koordinasi dalam dan luar Kota Bukittinggi yang diikuti	100 persen	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	153,054,000	176,012,100	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										1,842,410,000	2,118,771,500	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus										1,842,410,000	2,118,771,500	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya IPAL dan RTH Rumah Susun serta Pagar Rumah Susun	7 paket	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni	100 %	1,234,850,000	1,420,077,500	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah petugas kebersihan dan alat kebersihan rusunawa yang disediakan, jumlah petugas keamanan rusunawa yang disediakan serta jumlah rekening listrik rusunawa yang dibayarkan	13 orang	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni	100 %	607,560,000	698,694,000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH										1,774,532,800	2,040,712,720	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman										391,719,800	450,477,770	
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Database Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Lengkap dan Mutakhir	1 dokumen	Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan	0 ha	288,019,800	331,222,770	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen RP2KPKPK dan Perwako RP2KPKPK	1 dokumen	Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan	0 ha	103,700,000	119,255,000	
1	04	03	2.02		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						81,214,400	93,396,560					
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Permukiman Kumuh yang dilaksanakanpermukiman kumuh	1 laporan	Luas kawasan Kumuh yang dientaskan	0 ha	81,214,400	93,396,560	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1,301,598,600	1,496,838,390					
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya perencanaan tapak (site plan) dan DED untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh	3 dokumen	Luas kawasan Kumuh yang dientaskan	0 ha	130,098,600	149,613,390	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Luas kawasan Kumuh yang dientaskan	0 ha	1,080,000,000	1,242,000,000	
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	Luas kawasan Kumuh yang dientaskan	0 ha	91,500,000	105,225,000	
1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						9,928,460,545	11,417,729,627					
1	04	04	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						9,928,460,545	11,417,729,627					
1	04	04	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dan basis data PSU termutakhir	10 dokumen	Persentase Penyediaan PSU yang sesuai standar	100 %	259,659,000	298,607,850	
1	04	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	32 paket	Persentase Penyediaan PSU yang sesuai standar	100 %	9,668,801,545	11,119,121,777	
TOTAL															17,468,151,500	20,088,374,226	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9,630,608,047	10,573,686,417					
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						7,889,815,793	8,832,894,163					
1	05	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,070,000	23,172,500					
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Renstra	1 dokumen	Persentase Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	100 persen	22,070,000	23,172,500	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan						4,024,833,293	4,620,577,225					
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai PNS	60 orang	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	60 orang	4,024,833,293	4,620,577,225	
1	05	01	2.03		Administrasi Umum						3,701,622,500	4,047,854,438					
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Materai dan Buku cek terbeli	3 jenis	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	1,155,000	1,207,500	
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening Air Jumlah Rekening Listrik Jumlah Rekening Telpon	96 rekening 24 rekening 24 rekening	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	52,640,000	59,800,000	
1	05	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	3 jenis	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	11,640,000	12,650,000	
1	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ketersediaan kendaraan roda dua yang diperbaiki Jumlah ketersediaan kendaraan roda empat yang diperbaiki Jumlah ketersediaan mobil Damkar yang diperbaiki	6 unit 8 unit 6 unit	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	948,040,000	1,280,528,713	
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat kebersihan serta bahan pembersih tersedia jumlah iuran retribusi persampahan	26 buah 12 bulan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	7,476,500	7,844,725	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.05.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laptop, mesin tik, infocus, alat komunikasi radio dan printer yang diperbaiki	6 jenis	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	2,695,000	2,695,000	
1.05.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli	28 jenis	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	8,140,000	8,625,000	
1.05.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang cetak dan Penggandaan	12 jenis	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	13,890,000	15,237,500	
1.05.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli	10 jenis	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	3,587,000	3,587,000	
1.05.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan kantor Yang disediakan	2 jenis	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	28,090,000	31,050,000	
1.05.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat rumah tangga yang diadakan	1 jenis	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	6,540,000	6,900,000	
1.05.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah makan dan Minum yang disediakan Jumlah snack yang disediakan	575 nasi bungkus 495 snack kotak	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	19,711,000	19,711,000	
1.05.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan	12 bulan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	87,398,000	87,398,000	
1.05.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mobil pemadam kebakaran yang diadakan	1 unit	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	2,480,000,000	2,480,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	05	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung yang dipelihara Jumlah PBB yang dibayarkan Jumlah Reservoir yang dipelihara	1 unit 1 PBB 8 unit	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen	30,620,000	30,620,000	
1	05	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										141,290,000	141,290,000	
1	05	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mesin/Kartu absen yang terbeli	1 unit	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 Persen	10,820,000	10,820,000	
1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	57 stel	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 Persen	130,470,000	130,470,000	
1	05	04			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN										1,740,792,254	1,740,792,254	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										1,648,397,229	1,648,397,229	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran	57 orang	Persentase Penanggulangan Kebakaran Sesuai SOP	100 Persen	296,397,229	296,397,229	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	100 kejadian	Persentase Penanggulangan Kebakaran Sesuai SOP	100 Persen	1,287,614,000	1,287,614,000	
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 Persen	Persentase Penanggulangan Kebakaran Sesuai SOP	100 Persen	64,386,000	64,386,000	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran										26,125,725	26,125,725	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendataan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	60 kegiatan	Persentase penurunan pelanggaran peraturan pencegahan kebakaran	20 persen	26,125,725	26,125,725	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										66,269,300	66,269,300	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Jasa Informasi pencegahan Kebakaran Jumlah peserta penyuluhan	4 jenis 192 orang	Persentase kelompok Masyarakat yang aktif dalam pencegahan kebakaran	63 Persen	66,269,300	66,269,300	
TOTAL															9,630,608,047	10,573,686,417	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						19,541,792,078	24,090,444,443					
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						8,324,625,778	8,590,000,048					
1	05	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						38,780,000	42,251,000					
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD	2 Dok	Nilai Sakip A	100 persen	38,780,000	42,251,000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan						7,041,867,978	7,041,867,978					
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan			7,041,867,978	7,041,867,978	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	05	01	2.03		Administrasi Umum						1,158,257,800	1,409,051,070					
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	2 buku 491 lbr	Nilai Sakip A	100 persen	4,330,000	4,450,500	
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	48 bulan rekening	Nilai Sakip A	100 persen	117,760,000	133,860,000	
1	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara dan pembelian 5 unit lampu rotari	36 unit	Nilai Sakip A	100 persen	478,136,000	654,028,000	
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service	12 bulan	Nilai Sakip A	100 persen	213,415,000	244,403,750	
1	05	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	12 bulan	Nilai Sakip A	100 persen	21,950,000	23,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	05 01 2.03 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Peripheral kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	12 bulan	Nilai Sakip A	100 persen	26,974,800	30,239,020	
1	05 01 2.03 11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan	5 jenis	Nilai Sakip A	100 persen	17,512,000	18,574,800	
1	05 01 2.03 12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis peralatan listrik terbeli	15 jenis	Nilai Sakip A	100 persen	15,480,000	17,020,000	
1	05 01 2.03 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya	100 persen	Nilai Sakip A	100 persen	40,460,000	41,975,000	
1	05 01 2.03 18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	95 persen	Nilai Sakip A	100 persen	118,160,000	126,500,000	
1	05 01 2.03 28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	Nilai Sakip A	100 persen	104,080,000	115,000,000	
1	05 01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									85,720,000	96,830,000	
1	05 01 2.04 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	63 stel	Nilai Sakip A	100 persen	85,720,000	96,830,000	
1	05 02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									11,217,166,300	15,500,444,395	
1	05 02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									10,753,839,600	14,938,743,340	
1	05 02 2.01 01		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa pengamanan kantor/rumah dinas dan pengamanan hari besar keagamaan serta pejabat/tamu negara	28 orang	Jumlah Kasus Pelanggaran Yang terselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Keseluruhan	95 persen	1,130,003,500	2,024,661,250	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah titik pengawasan dan pengendalian, operasional SK4	12 bulan	Jumlah Kasus Pelanggaran Yang terselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Keseluruhan	95 persen	9,370,434,500	12,428,636,500	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	120 orang	Jumlah Kasus Pelanggaran Yang terselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Keseluruhan	95 persen	188,905,100	381,644,865	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota Pol.PP yg mengikuti latihan pembinaan kesatuan, mengikuti HUT Satpol PP, Bimtek, Diksar	200 orang	Jumlah Kasus Pelanggaran Yang terselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Keseluruhan	95 persen	64,496,500	103,800,725	
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						463,326,700	561,701,055					
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sosialisasi Perda dan Perkada	3500 orang	Wilayah Bukittinggi terawasi dibagi Wilayah keseluruhan kota Bukittinggi	95 persen	144,730,000	171,718,000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemantauan titik rawan pelanggaran trantibum, serta pengawasan oleh PTI	12 bulan	Wilayah Bukittinggi terawasi dibagi Wilayah keseluruhan kota Bukittinggi	95 persen	151,262,600	214,626,340	
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyelesaian kasus, pemusnahan barang bukti serta fasilitasi Sekber PPNS	12 bulan	Wilayah Bukittinggi terawasi dibagi Wilayah keseluruhan kota Bukittinggi	95 persen	167,334,100	175,356,715	
TOTAL												19,541,792,078	24,090,444,443				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4,438,614,896	4,438,704,896				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2,694,349,396	2,694,439,396				
1	05	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,270,000	22,270,000				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	4 kegiatan	Tingkat Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	22,270,000	22,270,000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan						1,873,605,896	1,873,605,896				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji ASN	12 bulan			1,873,605,896	1,873,605,896	
1	05	01	2.03		Administrasi Umum						755,318,500	755,408,500				
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis surat menyurat	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	600,000	690,000	
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rekening listrik/komunikasi yang dibayar	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	8,510,000	8,510,000	
1	05	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	2,180,000	2,180,000	
1	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	1 kantor	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	114,300,000	114,300,000	
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	1 kantor	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	4,528,500	4,528,500	
1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	8,010,000	8,010,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	5,470,000	5,470,000	
1	05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	3,300,000	3,300,000	
1	05	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	110,420,000	110,420,000	
1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	8,765,000	8,765,000	
1	05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	188,060,000	188,060,000	
1	05	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Mebeleur yang diadakan	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	87,320,000	87,320,000	
1	05	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	16,455,000	16,455,000	
1	05	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	12 bulan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	100 persen	197,400,000	197,400,000	
1	05	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									43,155,000	43,155,000	
1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12 bulan	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara	100 persen	43,155,000	43,155,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1,744,265,500	1,744,265,500				
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						105,478,000	105,478,000				
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peran serta BPBD Kota Bukittinggi dalam peningkatan aksi tingkat kelurahan	1 kegiatan	Jumlah Relawan Terlatih dalam Kebencanaan	100 persen	36,053,000	36,053,000	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perlengkapan kebutuhan yang terbeli	1 paket	Jumlah Relawan Terlatih dalam Kebencanaan	100 persen	69,425,000	69,425,000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						1,511,882,500	1,511,882,500				
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pelatihan mitigasi bencana	1 kali	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 persen	50,000,000	50,000,000	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			% Jumlah Honorarium Operasional Petugas PUSDALOPS PB	1 kegiatan	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 persen	1,158,052,500	1,158,052,500	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pembentukan dan pelatihan siaga bencana di setiap kelurahan	1 kegiatan	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 persen	303,830,000	303,830,000	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			% pengetahuan dan wawasan petugas BPBD meningkat	1 kegiatan	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 persen	0	0	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						126,905,000	126,905,000				
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peran serta BPBD Kota Bukittinggi Pendampingan Kegiatan BPBD Propinsi terlaksana	1 kegiatan	Jumlah Relawan Terlatih dalam Kebencanaan	100 persen	126,905,000	126,905,000	
TOTAL											4,438,614,896	4,438,704,896				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6,644,816,832	7,369,546,883				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						3,488,468,990	3,965,755,843				
1	06	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21,550,000	23,172,500				
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah renja dan perubahan renja	3 dokumen	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 Persen	21,550,000	23,172,500	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan						2,957,680,290	3,396,697,088				
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah renja dan perubahan renja	3 dokumen		2,957,680,290	3,396,697,088		
1	06	01	2.03		Administrasi Umum						509,238,700	545,886,255				
1	06	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			buku cek dan benda pos lainnya jumlah materai 3000 jumlah materai 6000	4 buku 100 lembar 550 lembar		2,185,000	2,300,000		
1	06	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekening terbayar	7 rekening		35,700,000	40,250,000		
1	06	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	16 unit		120,580,700	129,007,805		
1	06	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bulan pemeliharaan kebersihan	12 bulan		143,035,000	149,500,000		
1	06	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bulan pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan		8,120,000	8,625,000		
1	06	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ATK terbeli	41 jenis		5,970,000	6,325,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.06.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jenis barang cetak dan foto copy surat dinas	5 jenis			4,707,500	4,873,125	
1.06.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis alat listrik dan elektronik terbeli	12 jenis			1,801,500	1,887,725	
1.06.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu, rapat dan lembur	12 bulan			6,820,000	7,187,500	
1.06.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pelaksanaan rapat koordinasi	12 bulan			152,754,000	167,180,100	
1.06.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pemeliharaan gedung kantor	4 gedung			27,565,000	28,750,000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										878,884,000	1,012,855,600	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										878,884,000	1,012,855,600	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7. Penanggulangan Kemiskinan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pilar sosial terbina	413 orang	Persentase PSKS Aktif	87 Persen	490,344,250	566,080,888	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	7. Penanggulangan Kemiskinan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pilar sosial TKSK terbina	3 orang	Persentase PSKS Aktif	87 Persen	77,655,750	84,819,112	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7. Penanggulangan Kemiskinan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah LKS orsos terbina	17 Lembaga	Persentase PSKS Aktif	87 Persen	217,849,000	257,311,350	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	7. Penanggulangan Kemiskinan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penguatan LK3	12 bulan	Persentase PSKS Aktif	87 Persen	93,035,000	104,644,250	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										1,115,290,100	1,043,825,990	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										450,197,500	604,000,000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7. Penanggulangan Kemiskinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyandang Disabilitas yang dibina dan Diberi bantuan Jumlah peserta yang dilatih	200 Orang 50 Orang	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	70 persen	190,600,000	250,000,000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	7. Penanggulangan Kemiskinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lanjut Usia Miskin Produktif yang dilatih dan diberi permakanaan tambahan	50 Orang	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	70 persen	42,350,000	70,000,000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	7. Penanggulangan Kemiskinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Operasional penanganan orang terlantar mayat terlantar Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk ke rumah sakit	12 Bulan 5 Orang	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	70 persen	175,556,200	209,000,000	
1.06.04.2.01.13	Pemberian Layanan Rujukan	7. Penanggulangan Kemiskinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Operasional penanganan orang terlantar mayat terlantar	12 Bulan	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	70 persen	41,691,300	75,000,000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial										665,092,600	439,825,990	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	7. Penanggulangan Kemiskinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan kasus Korban tindak kekerasan yang mendapat rehabilitasi dan pendampingan sosial	12 Bulan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	750 Orang	38,925,000	58,000,000	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7. Penanggulangan Kemiskinan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pengurus kube yang ditingkatkan kapasitasnya jumlah PMKS yang diberdayakan dan meningkat kemandiriannya jumlah PRSE yang meningkat penghasilannya	825 orang 50 orang 100 orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	750 Orang	626,167,600	381,825,990	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										804,527,708	923,109,450	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar										60,210,000	85,900,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	06 05 2.01 03		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	7. Penanggulangan Kemiskinan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar	12 Bulan	Tersedianya pendampingan anak - anak terlantar	100 Persen	60,210,000	85,900,000	
1	06 05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									744,317,708	837,209,450	
1	06 05 2.02 01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7. Penanggulangan Kemiskinan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			verifikasi data	2 kali	Meningkatnya Akurasi Data Penduduk Miskin	100 Persen	367,302,400	412,209,450	
1	06 05 2.02 02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7. Penanggulangan Kemiskinan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penerima bantuan PKH dan BPNT yang terfasilitasi	889 KK	Meningkatnya Akurasi Data Penduduk Miskin	100 Persen	377,015,308	425,000,000	
1	06 06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA									260,054,790	319,000,000	
1	06 06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									122,845,000	163,000,000	
1	06 06 2.01 01		Penyediaan Makanan	7. Penanggulangan Kemiskinan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan korban Bencana yang mendapat pelayanan	12 Bulan	Tertanganinya Korban bencana	100 Persen	74,200,000	98,000,000	
1	06 06 2.01 05		Pelayanan Dukungan Psikososial	7. Penanggulangan Kemiskinan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan korban Bencana yang mendapat pelayanan	12 Bulan	Tertanganinya Korban bencana	100 Persen	48,645,000	65,000,000	
1	06 06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									137,209,790	156,000,000	
1	06 06 2.02 02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	7. Penanggulangan Kemiskinan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan operasional Taruna Siaga Bencana	12 Bulan			137,209,790	156,000,000	
1	06 07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									97,591,244	105,000,000	
1	06 07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									97,591,244	105,000,000	
1	06 07 2.01 02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7. Penanggulangan Kemiskinan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bulan pemeliharaan TMP	12 bulan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	12 Bulan	97,591,244	105,000,000	
TOTAL												6,644,816,832	7,369,546,883	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						7,268,477,488	7,515,548,158					
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						5,148,120,928	5,235,416,772					
2	08	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,070,000	25,380,500					
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	2 dokumen	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	22,070,000	25,380,500	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan						4,612,148,631	4,612,148,631					
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang dibayar	33 orang			4,612,148,631	4,612,148,631	
2	08	01	2.03		Administrasi Umum						513,902,297	597,887,641					
2	08	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			buku cek Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000	3 buah 75 buah 150 buah	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	1,350,000	1,552,500	
2	08	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening yang terbayar	36 rekening	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	42,640,000	49,036,000	
2	08	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	8 jenis	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	5,495,000	6,319,250	
2	08	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			kendaraan R2 kendaraan R4	34 buah 7 buah	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	207,529,547	238,658,979	
2	08	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket pengadaan	10 paket	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	0	6,900,000	
2	08	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	30 jenis	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	3,260,000	3,749,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	08	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ATK yang terbeli	37 jenis	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	4,945,000	5,686,750	
2	08	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	8 jenis	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	10,294,000	11,838,100	
2	08	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli.	14 jenis	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	1,532,750	1,762,662	
2	08	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	10 unit	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	49,040,000	56,396,000	
2	08	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	225 porsi 391 porsi	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	6,330,000	7,279,500	
2	08	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	70 kali	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	124,786,000	143,503,900	
2	08	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung yang terpelihara	1 kantor	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen	56,700,000	65,205,000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						403,377,550	463,884,182					
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						51,965,000	59,759,750					
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pendampingan perencanaan penganggaran yang responsif gender oleh focal point.	28 SKPD	Persentase perempuan aktif diorganisasi perempuan	5 Persen	51,965,000	59,759,750	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						351,412,550	404,124,432					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	3 Organisasi	Persentase perempuan yang berpartisipasi dipartai politik	8 Persen	155,850,000	179,227,500	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi	100 orang	Persentase perempuan yang berpartisipasi dipartai politik	8 Persen	195,562,550	224,896,932	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						134,050,260	154,157,829				
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						75,487,000	86,810,050				
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah capaian KIE dan Advokasi	10 Kelurahan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	98 Persen	75,487,000	86,810,050	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						58,563,260	67,347,779				
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (P2TP2A) Penanganan dan pendampingan Anak korban pasca kekerasan	1 lembaga 10 kasus	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	98 Persen	58,563,260	67,347,779	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						979,436,621	1,058,597,246				
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota						979,436,621	1,058,597,246				
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Keluarga yang di bina	720 keluarga	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	5.3 Persen	527,737,500	606,898,125	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PKK aktif	3 kecamatan	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	5.3 Persen	451,699,121	451,699,121	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						27,732,000	27,732,000				
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota						27,732,000	27,732,000				
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Update data gender dan anak	11 jenis	Persentase Lembaga PUG Aktif	75 Persen	27,732,000	27,732,000	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						416,551,970	416,551,970				
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						284,209,450	284,209,450				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Bermain Anak Jumlah Fasilitas Sekolah Ramah Anak Jumlah Kelurahan ramah anak Jumlah Pelayanan Kesehatan Ramah Anak Jumlah Peserta Pelatihan Dapat Sertifikat	1 buah 6 Sekolah 5 Kelurahan 7 Puskesmas 80 Orang	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	60 Persen	170,966,300	170,966,300	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Forum Anak aktif	4 Forum	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	60 Persen	113,243,150	113,243,150	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						132,342,520	132,342,520					
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (P2TP2A) Penanganan dan pendampingan Anak korban pasca kekerasan	1 lembaga 30 kasus	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	60 Persen	132,342,520	132,342,520	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						159,208,159	159,208,159					
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						52,488,000	52,488,000					
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus.	140 Orang	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	98 Persen	52,488,000	52,488,000	
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						106,720,159	106,720,159					
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PATBM Aktif dan terlatih.	24 kelurahan	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	60 Persen	106,720,159	106,720,159	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1,547,554,711	1,607,122,261					
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						128,760,000	128,760,000					
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						128,760,000	128,760,000					
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Grand design tersedia	5 buah	Jumlah Parameter Kependudukan tersusun	24 buah	128,760,000	128,760,000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						1,230,489,211	1,261,810,936					
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						71,544,000	71,544,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	14	03	2.01	05	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,63 persen	Jumlah gelar dagang kelompok UPPKS Jumlah penghargaan Tingkat Kota Jumlah peringatan Harganas	3 kali 3 3 kali	Persentase penggunaan MKJP	25 Persen	71,544,000	71,544,000	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						950,133,711	950,133,711					
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,63 persen	Jumlah rehabilitasi bangunan fisik	4 bangunan	Rasio petugas pembantu pembina KB (PPKBD) disetiap desa/kelurahan	100 Persen	291,690,000	291,690,000	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,63 persen	Jumlah kelompok kegiatan aktif. Jumlah PPKBK aktif Jumlah sub PPKBK aktif	85 Poktan 24 PPKBK 165 sub PPKBK	Rasio petugas pembantu pembina KB (PPKBD) disetiap desa/kelurahan	100 Persen	658,443,711	658,443,711	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota						161,506,000	185,731,900					
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,63 persen	Bhakti sosial Pelayanan KB, , Jumlah Akseptor baru IUD Implan yang dikIE kader Jumlah akseptor yang dilayani KB Jumlah Klinik KB yang melayani KB	4 kegiatan 800 Akseptor 1700 Akseptor 24 klinik	Cakupan ketersediaan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 Persen	161,506,000	185,731,900	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						47,305,500	54,401,325					
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,63 persen	Jumlah Kampung KB yang memenuhi indikator Kampung KB.	6 Kampung KB	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100 Persen	47,305,500	54,401,325	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						188,305,500	216,551,325					
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						109,804,500	126,275,175					
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fasilitasi Generasi Berencana. Pelatihan pengurus PIK Remaja, Pembentukan PIK,	1 Forum 2 Angkatan 2 PIK	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100 Persen	109,804,500	126,275,175	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						78,501,000	90,276,150					
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	23 kelompok	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri	50 Persen	78,501,000	90,276,150	
TOTAL														8,816,032,199	9,122,670,419		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						35,577,288,843	39,331,081,897				
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						18,745,180,265	21,239,100,555				
2	11	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54,950,000	57,672,500				
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Renstra & Renja	2 Dokumen	Dokumen perencanaan dan keuangan	4 dokumen	22,070,000	23,172,500	
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	2 Kegiatan	Dokumen perencanaan dan keuangan	4 dokumen	32,880,000	34,500,000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan						12,889,568,265	14,810,549,005				
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	143 orang	Dokumen Keuangan	12 bulan	12,878,658,265	14,799,049,005	
2	11	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen keuangan	12 buah	Dokumen Keuangan	12 bulan	10,910,000	11,500,000	
2	11	01	2.03		Administrasi Umum						5,403,142,000	5,917,319,050				
2	11	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Materai 6000, materai 3000 dan cek bermaterai	628 buah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	1,620,000	1,725,000	
2	11	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rekening air, listrik dan telepon	36 rekening	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	151,240,000	172,500,000	
2	11	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional yang dilaksanakan	12 bulan	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	4,311,413,000	4,909,318,950	
2	11	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa administrasi keuangan	12 bulan	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	0	28,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.11.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan	1 paket	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	192,830,000	218,500,000	
2.11.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	9,140,000	9,775,000	
2.11.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			alat-alat tulis kantor	44 jenis	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	13,140,000	14,375,000	
2.11.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	8,140,000	8,625,000	
2.11.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			alat-alat listrik	12 jenis	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	3,270,000	3,450,000	
2.11.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	112,830,000	126,500,000	
2.11.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			peralatan rumah tangga	1 set	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	20,335,000	23,000,000	
2.11.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli	12 bulan	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	13,550,000	14,375,000	
2.11.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	153,054,000	167,180,100	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	11 01 2.03 20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			kendaraan roda 2	1 unit	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	20,870,000	20,870,000	
2	11 01 2.03 22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang ditambah	1 paket	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	163,970,000	184,000,000	
2	11 01 2.03 28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	12 bulan	227,740,000	14,375,000	
2	11 01 2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									397,520,000	453,560,000	
2	11 01 2.04 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 paket	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	12 bulan	60,860,000	69,000,000	
2	11 01 2.04 03		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian kerja lapangan	238 stel	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	12 bulan	311,340,000	355,810,000	
2	11 01 2.04 09		Pendidikan dan Pelatihan Formal	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pelatihan	2 orang	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	12 bulan	25,320,000	28,750,000	
2	11 03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									961,716,500	1,075,015,975	
2	11 03 2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									646,126,500	721,045,975	
2	11 03 2.01 01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang agam kota bukittinggi jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat Operasional laboratorium lingkungan hidup	1 dokumen 12 titik pantau 12 bulan	Indeks Kualiatas Udara (IKU) Kota Bukittinggi	84 µg/m3	440,060,000	491,050,000	
2	11 03 2.01 02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kampung iklim yang dibina	3 RW	Indeks Kualiatas Udara (IKU) Kota Bukittinggi	84 µg/m3	206,066,500	229,995,975	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 11 03		2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								315,590,000	353,970,000			
2 11 03	2.02 01		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	9. Pelestarian lingkungan hidup		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			DIKPLHD Jumlah media informasi	3 buku 6 media	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi	50.65 Pj	315,590,000	353,970,000	
2 11 04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								2,984,635,800	3,027,945,170			
2 11 04		2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								2,984,635,800	3,027,945,170			
2 11 04	2.01 01		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			profil keaneekaragaman hayati	1 dokumen	Luas RTH yang dipelihara	100 %	43,200,000	46,000,000	
2 11 04	2.01 04		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pot dan bunga taman kota yang dipelihara	1 paket 5.3 Ha	Luas RTH yang dipelihara	100 %	2,941,435,800	2,981,945,170	
2 11 06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								90,152,360	97,856,474			
2 11 06		2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								90,152,360	97,856,474			
2 11 06	2.01 01		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan RTH yang Terkelola	79,25 persen	Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	100 usaha/kegiatan	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi	50.65 Pj	53,737,500	58,935,775	
2 11 06	2.01 03		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan RTH yang Terkelola	79,25 persen	Jumlah usaha yang diamati	50 usaha	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi	50.65 Pj	26,930,600	28,750,000	
2 11 06	2.01 04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan RTH yang Terkelola	79,25 persen	Jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan	20 kasus	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi	50.65 Pj	9,484,260	10,170,699	
2 11 08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								284,600,000	316,250,000			
2 11 08		2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								284,600,000	316,250,000			
2 11 08	2.01 02		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sekolah Adiwiyata tingkat SD,SLTP Jumlah siswa pramuka yang menerapkan Saka Kalpataru Penilaian di bidang lingkungan hidup tingkat kota, provinsi dan nasional	10 sekolah 50 orang 8 kali penilaian	Persentase Stakeholders yang berperanserta	80 %	284,600,000	316,250,000	
2 11 09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								106,400,000	115,000,000			
2 11 09		2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								106,400,000	115,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9. Pelestarian lingkungan hidup		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penilaian adipura yang diselenggarakan	3 kali penilaian	Pengurangan timbulan sampah	24 %	106,400,000	115,000,000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									21,004,254	22,004,392		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									21,004,254	22,004,392		
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengaduan lingkungan hidup	20 pengaduan	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi	50.65 Pj	21,004,254	22,004,392		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									12,383,599,664	13,437,909,331		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah									12,383,599,664	13,437,909,331		
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kompos yang dihasilkan	72 ton.tahun	Persentase luas wilayah yang terlayani	74 %	820,468,000	905,174,200		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Jumlah kali razia penekan Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional Jumlah TPSS dan TPST	1 dokumen 24 kali 38100 ton/tahun 68 unit	Persentase luas wilayah yang terlayani	74 %	9,619,996,200	10,513,476,755		
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	9. Pelestarian lingkungan hidup				Jumlah peserta peran serta dunia usaha Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja Jumlah RW yang ikut lomba kelurahan	30 orang 6 orang 24 RW	Persentase luas wilayah yang terlayani	74 %	439,656,964	515,779,876		
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	9. Pelestarian lingkungan hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara	29 jenis 12 bulan	Persentase luas wilayah yang terlayani	74 %	1,503,478,500	1,503,478,500		
TOTAL														35,577,288,843	39,331,081,897		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5,654,838,628	6,503,064,420				
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4,269,702,116	4,910,157,433				
2	12	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,130,000	25,449,500				
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	100 %	22,130,000	25,449,500	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan						3,670,525,315	4,221,104,112				
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gaji dan tunjangan dibayarkan	1 tahun	Persentase layanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100 %	3,670,525,315	4,221,104,112	
2	12	01	2.03		Administrasi Umum						577,046,801	663,603,821				
2	12	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah materai, buku cek dan benda pos lainnya yang terbeli	4 jenis	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	2,430,000	2,794,500	
2	12	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening air yang dibayarkan Jumlah rekening internet yang dibayarkan Jumlah rekening listrik yang dibayarkan Jumlah rekening telepon yang dibayarkan	12 rek/tahun 12 rek/tahun 24 rek/tahun 24 rek/tahun	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	83,660,000	96,209,000	
2	12	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara	11 unit 3 unit	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	147,470,800	169,591,420	
2	12	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa petugas kebersihan yang tersedia Jumlah iuran redistribusi sampah yang dibayarkan Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli	12 bulan 12 rek/tahun 27 jenis	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	134,470,001	154,640,501	
2	12	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	3 jenis	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	13,490,000	15,513,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	12	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	50 jenis	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	25,660,000	29,509,000	
2	12	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan	4 jenis	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	13,490,000	15,513,500	
2	12	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibeli	4 jenis	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	2,705,000	3,110,750	
2	12	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket makanan dan minuman yang dibeli	3 paket	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	16,320,000	18,768,000	
2	12	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	100 persen	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	123,816,000	142,388,400	
2	12	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan	1 paket	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	13,535,000	15,565,250	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						711,252,005	817,939,805				
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						711,252,005	817,939,805				
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Jumlah pelaporan lahir, mati, pindah dan datang yang dicatat Jumlah Perekaman Data Biometrik Jumlah Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan	6000 KIA 8000 KK 10000 KTP 10000 jiwa 1500 orang 4000 dokumen	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	88 %	323,502,003	372,027,303	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	18000 pelayanan	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	88 %	387,750,002	445,912,502	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								307,824,005	353,997,605		
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								307,824,005	353,997,605		
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun	3000 akta 500 akta 50 akta 800 data	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	84 %	114,063,003	131,172,453	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan	5000 pelayanan	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	84 %	193,761,002	222,825,152	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								306,344,002	352,295,602		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								89,849,500	103,326,925		
2	12	04	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia	12 laporan	Persentase data kependudukan yang disajikan	100 %	37,283,500	42,876,025	
2	12	04	2.01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah instansi yang bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan	3 skpd/instansi	Persentase data kependudukan yang disajikan	100 %	52,566,000	60,450,900	
2	12	04	2.02		Penataan Administrasi Kependudukan								73,722,502	84,780,877		
2	12	04	2.02	02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah blanko dan formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disediakan	10 jenis	Persentase data kependudukan yang disajikan	100 %	73,722,502	84,780,877	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan								142,772,000	164,187,800		
2	12	04	2.03	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan SIAK yang terpelihara jumlah SDM yang mengikuti workshop SIAK	4 jenis 38 orang	Persentase data kependudukan yang disajikan	100 %	142,772,000	164,187,800	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								59,716,500	68,673,975		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						59,716,500	68,673,975						
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah buku agregat kependudukan kota yang dicetak	80 exemplar	Persentase informasi kependudukan yang tersedia	90 %	21,734,500	24,994,675	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah buku profil data perkembangan penduduk yang dicetak	60 exemplar	Persentase informasi kependudukan yang tersedia	90 %	37,982,000	43,679,300	
TOTAL									5,654,838,628	6,503,064,420							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						21,586,241,212	16,882,528,415					
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						12,942,473,568	11,775,221,715					
2	15	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,070,000	23,172,500					
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Tersusunnya dokumen renstra	1 Dokumen	Nilai AKIP Dinas Perhubungan A	1 angka	22,070,000	23,172,500	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan						7,147,082,646	8,211,003,043					
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			Gaji dan tunjangan Insentif retribusi daerah Tambahan penghasilan	64 orang 100 orang 64 orang	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	100 %	7,147,082,646	8,211,003,043	
2	15	01	2.03		Administrasi Umum						5,556,919,922	3,293,898,522					
2	15	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Buku Cetakan jasa pengirim jumlah materai 3000 jumlah materai 6000	10 buku 1 ls 100 buah 400 buah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	1,650,000	1,897,500	
2	15	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah rekening telepon, air, dan telepon yang dibayar	13 rekening	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	50,640,000	57,500,000	
2	15	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4	19 unit 6 unit	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	163,806,075	179,544,986	
2	15	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah paket pengadaan barang dan jasa, PPK, PTK dan Pejabat pengadaan, PPHP, dan PjPHP yang dibayarkan honoranya	12 paket	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	10,000,000	11,500,000	
2	15	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Cs Retribusi sampah	1 Paket 1 ls	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	89,686,000	94,697,900	
2	15	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			HT Komputer Laptop	26 unit 10 Unit 13 unit	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	9,840,000	6,900,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	15	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah ATK yang dibeli	56 buah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	15,639,400	17,249,310	
2	15	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas			Barang cetakan penggandaan	8 item 1 ls	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	16,836,892	18,626,426	
2	15	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia	7 item	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	2,140,000	1,725,000	
2	15	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas			Makan Minum Rapat	700 porsi	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	10,840,000	8,050,000	
2	15	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah rapat, Koordinasi, sosialisasi yang diikuti	12 bulan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	124,056,000	133,832,400	
2	15	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas			Lapto Mesin penghacur kertas Printer	1 unit 1 unit 1 unit	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	30,140,000	33,925,000	
2	15	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah Gedung yang diperihara Jumlah Petugas Jasa Keamanan yang tersedia	1 paket 1 Paket	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	104,180,000	14,950,000	
2	15	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor yang direhab	2 Gedung	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	1,610,000,000	0	
2	15	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									216,401,000	247,147,650		
2	15	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah Pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	100 stel	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	216,401,000	247,147,650	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						8,643,767,644	5,107,306,700					
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						391,094,000	1,319,210,100					
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Jalan yang diadakan (Rubber Speed Humb) Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan (cermin Tikung)	119 Buah 12 Buah	Persentase ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan	80 %	102,000,000	1,000,000,000	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Terpeliharanya rambu-rambu lalulintas	12 bulan	Persentase ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan	80 %	289,094,000	319,210,100	
2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						4,847,171,100	0					
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Terminal Type C yang direhab	1 Gedung			4,847,171,100	0	
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						2,712,734,350	3,150,000,000					
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat yang diberi penyuluhan Jumlah Pelajar yang diberi penyuluhan	200 orang 30 orang			107,095,850	150,000,000	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Upah non PNS Lembur PNS dan Non PNS	30 orang 50 orang			2,605,638,500	3,000,000,000	
2	15	02	2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						25,639,000	27,276,850					
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan	75 Dokumen	Persentase ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan	80 %	25,639,000	27,276,850	
2	15	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						50,331,200	54,568,880					
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah pengemudi angkutan umum teladan yang diseleksi untuk dipilih	30 orang	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	85 %	50,331,200	54,568,880	
2	15	02	2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						518,470,750	445,316,250					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas			Tersediannya dokumentrayek angkutan umum	1 dokumen	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	85 %	465,219,000	345,316,250	
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data angkutan kota dalam jaringan trayek A.001.A.002.A.003	1 dokumen	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	85 %	53,251,750	100,000,000	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						74,607,244	88,486,620						
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah Plat kir dan Buku STNKTB yang diadakan	376 set	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	85 %	8,019,670	8,486,620	
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Informasi Jalur Taryek angkutan yang diadakan Jumlah pertemuan perumusan forum LLAJ	1078 papan 1 rumusan	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	85 %	66,587,574	80,000,000	
TOTAL											18,245,055,657	14,146,580,415						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.01 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						12,942,473,568	11,775,221,715					
2	15	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening listrik dan air yang dibayarkan	2 rekening			5,400,000	7,500,000	
2	15	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jasa keamana	1 paket			40,000,000	45,000,000	
2	15	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis ATK yang diadakan	32 Jenis			14,366,950	15,000,000	
2	15	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah cetak yang diadakan	2 jenis			127,924,000	120,000,000	
2	15	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Komponen Listrik yang diadakan	8 Jenis			1,450,000	3,000,000	
2	15	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			persentase rapat yang diikuti	100 persen			26,665,000	30,000,000	
2	15	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			BBM Jasa keamanan kantor Lembur PNS	1 ls 1 paket 1 ls			89,450,000	95,000,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						8,643,767,644	5,107,306,700				
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	1 gedung	Tersentase kendaraan yang laik uji	85 %	23,720,000	22,448,000	
TOTAL											328,975,950	337,948,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.02 UPTD Terminal dan Parkir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						12,942,473,568	11,775,221,715						
2	15	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			rekening listrik dan air	5 rekening			170,449,245	160,000,000	
2	15	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Aat kebersihan jasa kebersihan	15 jenis 1 paket			185,267,500	190,000,000	
2	15	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ATK yang diadakan	47 jenis			13,173,100	15,000,000	
2	15	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis cetak	3 jenis			10,500,000	12,000,000	
2	15	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jenis komponen listrik	6 jenis			4,595,360	6,000,000	
2	15	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Rapat yang diikuti	100 persen			13,866,010	15,000,000	
2	15	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Biaya BBM Jasa Keamanan lembur Non PNS Pemeliharaan CCTV dan genset Upah Kerja Juru Parkir	1 ls 1 paket 28 orang 2 jenis 28 orang			2,614,358,390	2,000,000,000	
									TOTAL					3,012,209,605	2,398,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6,812,934,654	7,763,215,851				
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						3,541,554,500	4,028,092,924				
2	16	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23,030,000	23,172,500				
2	16	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat tulis Kantor fotocopy Jilid Perjalanan Dinas	6 item 16000 lembar 100 buah 1 tahun			23,030,000	23,172,500	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan						3,179,289,855	3,649,237,333				
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1 tahun 1 tahun			3,179,289,855	3,649,237,333	
2	16	01	2.03		Administrasi Umum						339,234,645	355,683,091				
2	16	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			buku cek materai 3000 materai 6000 paket pengiriman	1 buah 60 buah 150 buah 1 ls			1,210,000	1,293,750	
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekening terbayar	12 bulan			20,720,000	23,000,000	
2	16	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			kendaraan dinas roda 2 kendaraan dinas roda 4	1 unit 4 unit			122,436,000	122,286,400	
2	16	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jasa kebersihan dan peralatan dan bahan kebersihan	1 paket			49,000,000	51,750,000	
2	16	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan Kerja yang telah diperbaiki	6 jenis			8,200,000	8,625,000	
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis atk terbeli	34 item			6,945,750	7,182,612	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah barang cetakan Penggandaan	2 jenis 8000 lembar			3,220,000	3,450,000	
2	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			komponen instalasi listrik	7 jenis			708,395	814,654	
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makan Minum Rapat / Tamu dan Lembur	1 tahun			3,218,500	3,448,275	
2	16	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	1 tahun			123,576,000	133,832,400	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						278,900,000	303,600,000				
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						278,900,000	303,600,000				
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	12 bulan	cakupan media informasi publik	80 persen	77,600,000	85,100,000	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Publikasi informasi Pemko Bukittinggi	12 bulan	cakupan media informasi publik	80 persen	151,700,000	165,600,000	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	5 laporan	cakupan media informasi publik	80 persen	49,600,000	52,900,000	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						2,992,480,154	3,431,522,927				
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2,228,489,554	2,536,680,987				
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Layanan intranet dan internet	1 tahun			2,228,489,554	2,536,680,987	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						763,990,600	894,841,940				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan Monev E-Government	2 kali	Indeks layanan masyarakat	3 nilai	73,600,000	80,500,000	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah cctv yang diadakan Sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center yang terkelola	4 lokasi 12 bulan	Indeks layanan masyarakat	3 nilai	248,484,000	300,000,000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Aplikasi/Sistem Informasi yang mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan Terkelolanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS Kota Bukittinggi	4 buah	Indeks layanan masyarakat	3 nilai	413,375,600	464,341,940	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya data menara telekomunikas	1 dokumen	Indeks layanan masyarakat	3 nilai	28,531,000	50,000,000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										111,200,000	119,600,000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										111,200,000	119,600,000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										111,200,000	119,600,000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Buku Bukittinggi Dalam Angka Data Sektoral Kota Bukittinggi	1 buku 1 dokumen			111,200,000	119,600,000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										80,298,250	84,476,988	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										80,298,250	84,476,988	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										80,298,250	84,476,988	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pelatihan	3 orang			47,230,000	50,174,500	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen dan data yang diamankan	550 dokumen			33,068,250	34,302,488	
TOTAL											7,004,432,904	7,967,292,839	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						9,485,309,568	10,783,607,801				
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						8,104,945,968	9,258,973,113				
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan						7,380,779,030	8,469,472,884				
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai	53 orang	jumlah laporan dokumen kinerja instansi pemerintah	3 dokumen	7,358,709,030	8,446,300,384	
2	17	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu	3 dokumen	jumlah laporan dokumen kinerja instansi pemerintah	3 dokumen	22,070,000	23,172,500	
2	17	01	2.03		Administrasi Umum						724,166,938	789,500,229				
2	17	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia	4 jenis	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,920,913	2,025,050	
2	17	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening terbayar	12 bulan	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	142,680,000	155,250,000	
2	17	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	9 jenis	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	9,264,886	9,918,619	
2	17	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 2 Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4	14 unit 7 unit	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	184,248,984	203,399,332	
2	17	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Honor PPK, PTK, pejabat Pengadaan, pejabat pemeriksa hasil pekerja dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan	10 orang	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	0	0	
2	17	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat pembersih dan bahan pembersih jasa kebersihan	22 jenis 3 orang	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	153,651,800	166,717,570	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	17	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat Tulis Kantor	32 jenis	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	15,884,355	17,531,008	
2	17	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cetak Penggandaan	9 jenis 2 jenis	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	36,280,000	40,986,000	
2	17	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor	12 bulan	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	8,140,000	8,625,000	
2	17	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengisian tabung pemadam kebakaran	12 bulan	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	6,305,000	6,900,000	
2	17	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			makan minum rapat, lembur	12 bulan	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	18,199,000	19,088,850	
2	17	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perjalanan Dinas dalam & luar daerah	12 bulan	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	133,492,000	144,683,800	
2	17	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor	1 item	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	14,100,000	14,375,000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								70,649,700	76,831,155		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								70,649,700	76,831,155		
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koperasi yang dibuatkan LHP Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek SPI koperasi Jumlah satgas pengawasan yang mengikuti Bimtek	10 koperasi 50 koperasi 90 orang 3 orang	koperasi yang berjalan sesuai dengan aturan	23 koperasi	70,649,700	76,831,155	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								139,424,450	155,186,118		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota						139,424,450	155,186,118					
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Akuntansi Koperasi Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Kelembagaan Koperasi Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Manajemen usaha simpan pinjam	90 orang 60 orang 60 orang	jumlah pengurus koperasi yang terlatih	50 orang	139,424,450	155,186,118	
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						240,206,150	268,141,072					
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						240,206,150	268,141,072					
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koperasi yang difasilitasi keikutsertannya dalam Pameran Harkopnas Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Akuntansi Pola Syariah Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Konversi koperasi dari pola konvensional ke syariah Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Operasional Koperasi Syariah Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Penyusunan SOP dan Persus Koperasi Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Sosialisasi Sumber Modal Jumlah pengurus UEM-SP yang diberikan Bimtek Teknis Pengelolaan UEM-SP	60 orang 2 koperasi 30 orang 60 orang 30 orang 60 orang 30 orang 60 orang	jumlah sdm koperasi yang meningkat kemampuan manajemennya	60 orang	240,206,150	268,141,072	
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						85,424,250	95,351,388					
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						85,424,250	95,351,388					
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan dari Kec. Guguk Panjang	35 orang 50 orang		22,517,400	24,848,510		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro di Kec. Guguk Panjang	40 orang 100 orang		62,906,850	70,502,878		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						844,659,050	929,124,955				
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						844,659,050	929,124,955				
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengusaha mikro yang diberikan Bimtek Peningkatan Kualitas Kemasan Produk Jumlah pengusaha mikro yang dilatih pada Pelatihan UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan Kec. Guguk Panjang Jumlah usaha mikro yang difasilitasi keikutsertaannya dalam Pameran UMKM Expo	25 orang 80 orang 2 Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang naik kelas	10 usaha mikro	844,659,050	929,124,955	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						10,573,401,689	11,673,145,195				
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						9,742,354,009	10,748,870,955				
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						7,213,943,109	7,935,337,420				
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung Pasar Atas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Pengelolaan Gedung Pasar Atas	1 item 3 lokasi 12 bulan	jumlah sarana pasar yang dipelihara	3 item	7,213,943,109	7,935,337,420	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya						2,528,410,900	2,813,533,535				
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah operasi pengawasan dan penertiban pasar Tersedianya Upah kerja jasa keamanan pasar Tertibnya administrasi surat izin/perjanjian sewa toko/kios, los dan Pelataran pasar	96 kali 35 orang/bulan 8670 dokumen	Persentasen pemenuhan target PAD	80 Persen	1,392,633,000	1,573,306,950	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pedagang Lapangan Harian Pasar/Pelataran yang dipungut retribusinya Jumlah Pedagang Toko Grosir/Toko/Kios/Los yang dipungut retribusinya Jumlah WC Umum yang dikelola	1714 hari 4807 orang 16 unit	Persentasen pemenuhan target PAD	80 Persen	1,135,777,900	1,240,226,585	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						40,534,000	44,038,100				
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						13,631,000	14,571,650				
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Agen agen kebutuhan pokok yang dilakukan pemantauan	9 agen	Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Bukittinggi	80 Persen	13,631,000	14,571,650	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						14,690,000	15,789,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Update harga barang kebutuhan pokok	104 kali	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali di Kota Bukittinggi	80 Persen	14,690,000	15,789,500	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12,213,000	13,676,950					
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten dan kota	12 kali			12,213,000	13,676,950	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						499,301,000	563,156,150					
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						499,301,000	563,156,150					
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaku usaha yang ikut even promosi/ pameran dalam dan luar negeri	10 kali	Persentase peningkatan omset pelaku usaha yang mengikuti promosi dan misi dagang produk unggulan kota	30 persen	499,301,000	563,156,150	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						60,237,000	64,856,550					
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						60,237,000	64,856,550					
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksana promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	2 kali			60,237,000	64,856,550	
TOTAL												19,827,735,577	22,204,529,556				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.01 UPTD Kemetrolagian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						157,480,680	172,120,190					
3	30	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia	4 jenis			200,000	230,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	30	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening terbayar	12 bulan			18,720,000	20,355,000	
3	30	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan yang dipelihara	1 ls			1,085,132	1,150,152	
3	30	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat pembersih dan bahan pembersih jasa kebersihan retribusi pengolahan sampah	22 jenis 3 orang 12 bulan			39,926,848	43,919,533	
3	30	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat Tulis Kantor	32 jenis			3,863,700	4,132,755	
3	30	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cetak Penggandaan	9 jenis 2 jenis			7,491,500	7,994,225	
3	30	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor	12 bulan			533,500	613,525	
3	30	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 paket			35,320,000	40,250,000	
3	30	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perjalanan Dinas dalam & luar daerah	12 bulan			50,340,000	53,475,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.01 UPTD Kemetrolagian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						73,495,000	80,103,250					
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Operasional UPTD	12 bulan	Persentase pemberian logo tera pada alat ukur	40 Persen	73,495,000	80,103,250	
TOTAL											230,975,680	252,223,440					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						670,824,500	740,045,675					
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						550,000,000	613,000,000					
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						550,000,000	613,000,000					
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7. Penanggulangan Kemiskinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pelatihan desain grafis Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tata boga	16 orang 16 orang 32 orang 32 orang	Persentase tenaga kerja bersertifikat keahlian	63 persen	550,000,000	613,000,000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						42,924,500	45,395,675					
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						42,924,500	45,395,675					
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	7. Penanggulangan Kemiskinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan pencari kerja	12 laporan	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	23 persen	42,924,500	45,395,675	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						77,900,000	81,650,000					
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						77,900,000	81,650,000					
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7. Penanggulangan Kemiskinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	10 perusahaan	Tingkat persentase penurunan kasus hubungan industrial	21 persen	38,450,000	40,250,000	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7. Penanggulangan Kemiskinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	100 persen	Tingkat persentase penurunan kasus hubungan industrial	21 persen	39,450,000	41,400,000	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						15,541,898,543	13,945,111,769					
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						14,457,040,968	12,735,041,558					
2	18	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21,540,000	23,172,500					
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 jenis	Persentase keselarasan program dan kegiatan pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah	85 persen	21,540,000	23,172,500	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan						7,542,048,568	8,667,203,353					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang digaji	57 orang			7,542,048,568	8,667,203,353	
2	18	01	2.03		Administrasi Umum									6,893,452,400	4,044,665,705		
2	18	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000	12 bulan 4 buah 175 buah 230 buah	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	3,640,000	4,050,000	
2	18	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	180,900,000	190,000,000	
2	18	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	14 unit 8 unit	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	200,150,000	204,125,000	
2	18	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	16 paket	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	0	28,750,000	
2	18	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. jasa cleaning service	12 jenis 12 bulan	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	193,905,000	123,573,250	
2	18	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa perbaikan peralatan kantor	12 bulan	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	5,570,000	5,750,000	
2	18	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis alat tulis yang dibeli	46 jenis	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	23,444,000	25,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	18	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid	7 jenis 30050 lembar 90 buah	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	20,230,000	21,355,000	
2	18	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis peralatan listrik yang dibeli	45 jenis	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	6,140,000	6,500,000	
2	18	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jml. penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur	12 bulan	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	21,760,000	22,000,000	
2	18	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	90 persen	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	277,912,000	235,000,000	
2	18	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis peralatan kantor yang diadakan	10 jenis	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	168,741,700	178,562,455	
2	18	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pembangunan gedung kantor	12 bulan 1 unit	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	95 persen	5,791,059,700	3,000,000,000	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						154,414,125	174,229,744				
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						154,414,125	174,229,744				
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah buku studi kelayakan investasi Jumlah peta potensi investasi	1 dokumen 1 peta	Persentase peningkatan jumlah potensi investasi	45 persen	154,414,125	174,229,744	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						155,625,000	175,967,250				
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						155,625,000	175,967,250				
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah promosi investasi yang diikuti	1 event	Jumlah realisasi investasi	2.3 Triliyun	155,625,000	175,967,250	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						639,868,250	715,228,987				
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						639,868,250	715,228,987				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	3 aplikasi 3700 izin 100 persen	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	82 persen	570,998,200	641,755,430	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen aturan hukum perizinan Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan	2 dokumen 1 laporan	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	82 persen	50,496,750	54,103,762	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	100 persen	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	82 persen	18,373,300	19,369,795	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						50,940,000	52,000,000				
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50,940,000	52,000,000				
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	1 dokumen	Tingkat keuntungan investasi	25 persen	50,940,000	52,000,000	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						84,010,200	92,644,230				
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						84,010,200	92,644,230				
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	3000 berkas 48 laporan 100 persen	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	82 persen	84,010,200	92,644,230	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,331,342,000	1,460,582,800				
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1,258,210,000	1,381,104,000				
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						1,258,210,000	1,381,104,000				
3	31	02	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah IKM yang mengikuti Konvensi GKM Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi GKM Jumlah peserta bimbingan teknis standarisasi produk Jumlah peserta pelatihan packing Jumlah sertifikasi label halal IKM	5 IKM 25 IKM 25 orang 30 orang 10 IKM	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	13 persen	255,171,000	251,874,150	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pameran Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) yang diikuti Jumlah peserta magang sepatu sandal Jumlah peserta pelatihan kain perca	4 event 5 orang 50 orang	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	13 persen	590,415,000	665,694,750	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						70,772,800	77,421,220					
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						70,772,800	77,421,220					
3	31	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data informasi industri	1 dokumen	Persentase pertumbuhan industri yang memiliki legalitas usaha	13 persen	70,772,800	77,421,220	
TOTAL											17,129,081,843	15,680,147,564					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.02.01 UPTD Kerajinan Industri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	31	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2,359,200	2,057,580						
3	31	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis alat kebersihan yang dibeli	8 jenis			2,359,200	2,057,580	
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1,258,210,000	1,381,104,000						
3	31	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi	1 unit 1 unit 1 organisasi			412,624,000	463,535,100	
TOTAL									414,983,200	465,592,680							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						9,532,915,435	9,245,378,368			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						8,652,000,595	8,389,463,528			
2	23	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,325,000	23,172,500			
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan			Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu (dokumen)	10 Dokumen			22,325,000	23,172,500	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan						4,363,413,485	4,138,933,485			
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan			Gaji dan tunjangan ASN tersedia	12 bulan			4,363,413,485	4,138,933,485	
2	23	01	2.03		Administrasi Umum						4,204,526,560	4,159,524,493			
2	23	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Cek yang dibeli Jumlah Materai yang dibeli	2 Buku 376 Buah			1,059,000	2,240,200	
2	23	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan			Jumlah rekening terbayar (rekening/bulan)	48 Rekening			50,310,000	57,120,500	
2	23	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan			Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terpelihara (unit)	13 Unit			151,120,960	164,957,104	
2	23	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar honorinya	6 Paket			0	23,000,000	
2	23	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Jasa dan peralatan kebersihan kantor	1 Paket			95,835,000	105,794,250	
2	23	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Perbaikan			6,640,000	6,900,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	23	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli	41 Jenis			11,062,250	12,721,587	
2	23	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan barang cetakan	2 Paket			11,472,600	11,905,490	
2	23	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah komponen listrik yang terbeli	6 Jenis			763,750	790,912	
2	23	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah porsi makan, minum dan snack yang tersedia	1571 Porsi			11,749,000	12,039,350	
2	23	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, konsultasi, informasi, pendidikan yang diikuti	12 Bulan			223,054,000	247,680,100	
2	23	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan	1 Paket			141,460,000	14,375,000	
2	23	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar honorinya	6 Paket 1 dok			3,500,000,000	3,500,000,000	
2	23	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								61,735,550	67,833,050	
2	23	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pakaian dinas harian yang tersedia	33 Stel			22,410,000	24,667,500	
2	23	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta bimtek (SKPD 27, 9 Sekretariat Setda	36 Peserta			39,325,550	43,165,550	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						797,548,140	772,548,140				
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						506,428,400	481,428,400				
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbangunnya aplikasi android layanan perpustakaan Terbangunnya website layanan perpustakaan Tersedianya buku digital layanan perpustakaan Terwujudnya fasilitas internet bagi pengunjung perpustakaan terwujudnya perpustakaan yang menerapkan otomasi perpustakaan	1 sistem 1 sistem 1 paket 1 Tahun 1 sistem			117,679,850	117,679,850	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah kunjungan pembinaan perpustakaan	100 kali			34,497,150	34,497,150	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pengunjung perpustakaan	8000 orang			48,840,000	48,840,000	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah buku yang diolah Jumlah buku yang diadakan Jumlah Buku yang dirawat	75 eksemplar 200 eksemplar 100 eksemplar			289,515,900	264,515,900	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Indeks Kepuasan Pemustaka Laporan Data Stock Opname	80 persen 1 Dokumen			15,895,500	15,895,500	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						291,119,740	291,119,740				
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kunjungan Pustaka Keliling dan Komunitas Literasi	215 kali			95,332,240	95,332,240	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Telaksananya lomba bercerita bagi siswa SD Telaksananya Mendengar dongeng bagi siswa/I,TK/PAUD Terlaksananya lomba melukis bagi siswa SMP Terlaksananya lomba menulis cerita rakyat	30 orang siswa 300 Orang siswa 40 orang siswa 30 orang			116,947,500	116,947,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			bertambahnya pengetahuan peserta bimtek	40 Orang			78,840,000	78,840,000	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						83,366,700	83,366,700					
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						83,366,700	83,366,700					
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Naskah Kuno yang dialihmediakan	3 Naskah			83,366,700	83,366,700	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						698,180,783	688,180,783					
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						585,643,283	575,643,283					
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						168,486,200	158,486,200					
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku	3 Buku dan Laporan			84,646,200	84,646,200	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Bertambahnya pengetahuan tentang pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis bagi Lembaga Masyarakat dan Perorangan	100 orang			83,840,000	73,840,000	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						132,680,000	132,680,000					
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Arsip statis bernilai sejarah berupa Foto dan Dokumen	3 File			132,680,000	132,680,000	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						284,477,083	284,477,083					
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah kunjungan SIKN JIKN tersedianya arsip statis yang terinput Tersedianya satu uni server terinstal	75 orang 500 lembar 1 buah server			228,171,983	228,171,983	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah peserta Pemberdayaan Unit Kearsipan SKPD dan Kecamatan	30 orang			56,305,100	56,305,100	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						26,208,000	26,208,000					
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						26,208,000	26,208,000					
2	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai aturan yang berlaku	2 SKPD			26,208,000	26,208,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						86,329,500	86,329,500					
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						86,329,500	86,329,500					
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			SOP Pengguna Arsip	1 Dokumen			45,116,250	45,116,250	
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah layanan	1 Jenis Layanan			41,213,250	41,213,250	
TOTAL											10,231,096,218	9,933,559,151					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3,605,248,542	3,062,094,452					
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						1,344,936,642	1,003,673,999					
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						959,001,642	917,423,999					
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	5. Pengembangan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Wirausaha muda yang mengikuti pelatihan	40 orang	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	75 Pesen	203,134,100	85,898,502	
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	5. Pengembangan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemuda yang menerima penghargaan	10 orang	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	75 Pesen	49,670,000	58,998,450	
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5. Pengembangan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pemuda yang dibina "Jumlah Upacara yang dilaksanakan	40 orang 3 Upacara	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	75 Pesen	706,197,542	772,527,047	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						385,935,000	86,250,000					
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	5. Pengembangan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peserta pelatihan kepariwisataan	40 orang	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	75 Pesen	385,935,000	86,250,000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						2,057,831,900	1,855,940,453					
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						854,094,900	712,281,135					
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5. Pengembangan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tim yang mengikuti kejuaraan	25 tim			390,670,000	74,750,000	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	5. Pengembangan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Atlit Yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat kota, propinsi dan nasional	100 orang			463,424,900	637,531,135	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						466,525,000	466,525,000					
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	5. Pengembangan Pariwisata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah cabor yang diikuti	23 cabor			466,525,000	466,525,000	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						737,212,000	677,134,318					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah olahraga masyarakat yang difasilitasi tingkat kota, propinsi dan nasional	40 kali			319,050,000	69,000,000	
2	19	03	2.05	04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah sarana olahraga yang diberikan kepada masyarakat Jumlah sarana olahraga yang difasilitasi	5 paket 5 sarana			418,162,000	608,134,318	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						202,480,000	202,480,000				
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						202,480,000	202,480,000				
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan Kepramukaan yang Difasilitasi	2 kegiatan			202,480,000	202,480,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						25,826,466,941	29,706,453,798				
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						9,109,669,653	11,231,578,069				
3	26	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21,490,000	23,172,500				
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Renstra, Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu	3 Dokumen	Persentase sasaran, program dan kegiatan yang selaras Renja dan yang selaras Renstra	85 persen	21,490,000	23,172,500	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan						7,585,393,153	9,624,773,344				
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah PNS yang menerima gaji	66 orang			7,585,393,153	9,624,773,344	
3	26	01	2.03		Administrasi Umum						1,468,781,500	1,544,911,725				
3	26	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			materai 6000, materai 3000, buku cek, benda lainnya terbeli	120 buah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	3,755,000	1,633,000	
3	26	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)	36 Rekening	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	657,400,000	742,325,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	26	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda 2 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 3 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 yg terpelihara	10 Unit 1 Unit 6 Unit	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	207,480,000	231,472,000	
3	26	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pejabat pengadaan barang jasa (pphp, ppk, ppjb, ptk) yang dibayar	13 orang	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	0	0	
3	26	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa cleaning service yang dibayarkan Jasa Keamanan yang dibayarkan	2 orang 3 orang	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	220,550,000	241,500,000	
3	26	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan perlengkapan yg terpelihara	24 Unit	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	25,670,000	15,525,000	
3	26	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis ATK terbeli	25 item	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	25,670,000	17,250,000	
3	26	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah barang cetakan jumlah penggandaan	5 item 10500 lembar	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	18,350,000	11,500,000	
3	26	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan listrik terbeli	5 item	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	1,914,500	1,816,425	
3	26	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya	95 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	24,600,000	18,687,500	
3	26	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti	75 %	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	180,572,000	200,527,800	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	26	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	85 persen	102,820,000	62,675,000	
3	26	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						34,005,000	38,720,500				
3	26	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang dibelikan Pakaian lapangan	29 orang	Persentase laporan kepegawaian tepat waktu	85 persen	34,005,000	38,720,500	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						15,217,085,628	17,091,268,522				
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						11,249,740,000	12,723,600,000				
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kajian Alih Fungsi Museum Zoologi	1 Dokumen	Indeks kepuasan wisatawan	78 baik	80,410,000	89,700,000	
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembangunan Zona Herbivora	1 Zona	Indeks kepuasan wisatawan	78 baik	4,931,100,000	5,750,000,000	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan Pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah flora dan fauna yang bertambah Jumlah satwa yang dirawat Jumlah tenaga outsourcing kebersihan dan pengaman Luasan kawasan TMS-BK yang dikelola	6 Jenis 113 Spesies 44 Orang 7 ha	Indeks kepuasan wisatawan	78 baik	6,134,880,000	6,768,900,000	
3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Geopark menuju UGG	1 paket	Indeks kepuasan wisatawan	78 baik	103,350,000	115,000,000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						3,967,345,628	4,367,668,522				
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Masterplant Taman Panorama Lobang Jepang	1 Dokumen	Indeks kepuasan wisatawan	78 baik	408,957,500	462,268,375	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terkelolanya Destinasi Pariwisata	3 Destinasi	Indeks kepuasan wisatawan	78 baik	3,558,388,128	3,905,400,147	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						659,762,360	477,822,012				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						659,762,360	477,822,012						
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	5. Pengembangan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Media Informasi Pariwisata (Digital, Elektronik, Sosial)	3 Media	Jumlah target pasar wisatawan	2 pasar	401,010,000	248,929,048	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	5. Pengembangan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah event pariwisata yang difasilitasi	5 Kali	Jumlah target pasar wisatawan	2 pasar	224,737,360	193,242,964	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	5. Pengembangan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data pelaku wisata dan ekraf	3 Dokumen	Jumlah target pasar wisatawan	2 pasar	34,015,000	35,650,000	
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						839,949,300	905,785,195						
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						839,949,300	905,785,195						
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	5. Pengembangan Pariwisata	Peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	Jumlah peserta pelatihan kepariwisataan	40 Orang	Jumlah industri pariwisata	10 jenis	86,005,000	97,750,000	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	5. Pengembangan Pariwisata	Peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	Jumlah peserta festival randang Jumlah promosi ekraf yang diikuti	40 Orang 4 Kali	Jumlah industri pariwisata	10 jenis	444,894,300	490,813,445	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	5. Pengembangan Pariwisata	Peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	Jumlah penampilan kesenian	10 Kali	Jumlah industri pariwisata	10 jenis	309,050,000	317,221,750	
TOTAL									29,431,715,483	32,768,548,250							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						9,024,172,028	10,363,362,390				
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						8,829,225,728	10,151,226,145				
2	09	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,070,000	23,172,500				
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen rencana kerja dan keuangan	2 dokumen	Dokumen Rencana Kerja dan Keuangan	2 dokumen	22,070,000	23,172,500	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan						7,987,797,068	9,199,177,186				
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 persen	persentase Laporan Keuangan	100 persen	7,987,797,068	9,199,177,186	
2	09	01	2.03		Administrasi Umum						819,358,660	928,876,459				
2	09	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Buku cek Kiriman paket/kilat khusus Materai 3000 Materai 6000	1 buah 15 kali 534 buah 550 buah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	5,388,650	5,828,948	
2	09	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	108 rekening	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	55,710,000	63,204,000	
2	09	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 3 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	51 unit 5 unit 8 unit	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	277,838,180	304,264,907	
2	09	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket pengadaan barang dan jasa	10 paket	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	0	39,100,000	
2	09	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Iuran retribusi persampahan dan jasa cleaning service Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	12 bulan 11 item	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	202,429,330	215,187,229	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	09	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah AC yang diperbaiki Jumlah camera yang diperbaiki Jumlah Infocus yang diperbaiki Jumlah Komputer yang diperbaiki Jumlah laptop yang diperbaiki Jumlah mesin tik yang diperbaiki Jumlah peripheral komputer yang yang terbeli Jumlah printer yang diperbaiki Jumlah Tv yang diperbaiki Jumlah Videotron yang diperbaiki	3 unit 1 unit 1 unit 3 unit 3 unit 1 unit 2 item 3 unit 1 unit 1 unit	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	29,897,500	31,070,125	
2	09	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat tulis kantor yang terbeli	38 item	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	24,785,000	27,732,250	
2	09	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang yang dicetak Jumlah penggandaan surat dan dokumen	6 item 38843 lembar	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	15,750,000	17,250,000	
2	09	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	18 item	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	7,610,000	7,889,000	
2	09	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Nasi untuk kebutuhan lembur dan rapat tersedia Snack untuk kebutuhan lembur dan rapat tersedia	204 bungkus 400 kotah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	12,170,000	12,650,000	
2	09	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi ke luar daerah	100 persen	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	165,860,000	181,700,000	
2	09	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pintu, jendela, lantai, saluran air dan taman yang diperbaiki Luas dinding kantor yang dicat ulang	5 paket 300 m2	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	100 persen	21,920,000	23,000,000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						155,174,300	169,342,445				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						16,008,600	16,937,890					
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen NBM Jumlah informasi media Jumlah laporan	1 dokumen 12 bulan 12 laporan	Angka Konsumsi dan Energi dan Protein Perkapita	2150 Kkal/kap/th	16,008,600	16,937,890	
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						139,165,700	152,404,555					
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bibit tanaman yang di serahkan kepada masyarakat Jumlah Lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat kota bukittinggi yang diselenggarakan Jumlah lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat propinsi sumatera barat yang diikuti	10000 btg 1 kali 1 kali		132,607,000	145,230,050		
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu	1 dokumen		6,558,700	7,174,505		
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						21,775,000	23,201,250					
2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						21,775,000	23,201,250					
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen SKPG	1 dokumen	Angka konsumsi Energi perkapita	2150 kkal/kap/th	21,775,000	23,201,250	
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						17,997,000	19,592,550					
2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						17,997,000	19,592,550					
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis komoditi pangan yang di konsumsi masyarakat yang diuji	14 jenis	Angka konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/th	17,997,000	19,592,550	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1,037,202,776	922,599,943					
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						813,168,700	674,396,505					
3	25	03	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						813,168,700	674,396,505					
3	25	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembangunan/ rehab kolam Pengadaan benih lele Pengadaan induk lele Pengadaan induk nila Pengadaan pakan Peningkatan SDM kelompok	1 paket 1000 ekor 30 pasang 250 pasang 1500 kg 2 kali		250,000,000	200,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	25	03	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan Benih ikan Pengadaan induk ikan Pengadaan Pakan ikan	55000 ekor 3 paket 2600 Kg			307,608,100	136,862,190	
3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									204,003,025	227,070,979		
3	25	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil									204,003,025	227,070,979		
3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lomba Forikan dan Lomba PAUD Tk. Kota dan TK. Propinsi Lomba Masak Ikan, Inovasi dan Cipta lagi Tk. Propinsi Lomba masak Ikan Tk. Kota Lomba Masak Ikan Tk. Nasional Terlaksananya pengujian mutu hasil perikanan	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 sampel	Pengembangan Pengolahan pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	2 persen	204,003,025	227,070,979		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									10,590,380,740	7,647,638,201		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									2,733,708,390	805,733,648		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									531,057,500	251,586,125		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat dan mesin pertanian yang diprbaiki Jumlah dokumen Data Rencana defenitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk bersubsidi)	1 unit 6 eksemplar	Peningkatan produktivitas padi	6 ton/ha	271,057,500	51,586,125		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan data statistik pertanian laporan data ubinan pangan palawija dan ortikultura	12 laporan 15 sampel	Peningkatan produktivitas padi	6 ton/ha	260,000,000	200,000,000		
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota									2,012,158,990	347,030,338		
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lahan pertanian yang ditanamai benih berlabel	0.4 Ha	Peningkatan Produktivitas Padi	6 ton/ha	52,850,000	52,850,000		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perkawinan Kuda Bibit Pejantan	40 kali	Peningkatan Produktivitas Padi	6 ton/ha	1,119,680,750	124,062,862		
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pameran yang diikuti Pameran yang dilaksanakan Ubinan tanaman hortikultura	1 kali 1 kali 15 kali	Peningkatan Produktivitas Padi	6 ton/ha	839,628,240	170,117,476		
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota									132,493,400	144,834,910		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah acara yang diikuti pada acara Promosi Peternakan di Tingkat Provinsi Sumatera	1 kali	Peningkatan kelahiran ternak besar	180 ekor	132,493,400	144,834,910	
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer									20,200,500	22,126,575		
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sampel obat hewan yang di periksa Sosialisasi pedagang obat hewan	5 sampel 20 org	Peningkatan kelahiran ternak besar	0 kasus	20,200,500	22,126,575		
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota									37,798,000	40,155,700		
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan AUTSK Laporan KUR Laporan Reg. Kandang Laporan Sikomandan Laporan Statistik peternakan	2 Dokumen 2 Laporan 2 laporan 12 laporan 2 laporan	Peningkatan kelahiran ternak besar	180 ekor	37,798,000	40,155,700		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									6,822,214,000	5,697,075,700		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian									226,533,000	247,287,950		
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LP2B yang tersusun Naskah akademis draf Ranperda LP2B	1 dokumen 1 dokumen	Tersedianya dokumen draf ranperda album peta dan kajian akademi	1 paket	181,333,000	198,987,950		
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan Upsus LTT	12 Laporan	Tersedianya dokumen draf ranperda album peta dan kajian akademi	1 paket	45,200,000	48,300,000		
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian									6,595,681,000	5,449,787,750		
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian Jaringan Irigasi di Rw 01, Rw 02 dan Rw 05 di Kelurahan Campago Guguk bulek Jumlah pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian Sambungan banda Baru di Kubu Tanjung	306 m 100 m			708,787,000	797,280,050		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian Pembangunan jalan usaha tani dan rabat beton di belakang Masjid Istiqomah Sumua	250 m			585,598,000	652,507,700	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						450,317,950	493,784,643					
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						78,672,000	86,792,800					
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penangkapan , penertiban anjing liar Sosialisasi tentang penyakit zoonosis	1 kali 50 org	Persentase kasus penyakit Zoonosis	0 kasus	78,672,000	86,792,800	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						199,376,950	218,714,993					
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengurus Mesjid/Musalla yang mengikuti pelatihan pemotongan hewan Qurban	75 org			19,262,250	21,415,588	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						29,620,000	31,119,000					
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						29,620,000	31,119,000					
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi pengendalian hama tikus dan ulat pada tanaman pertanian Jumlah pelatihan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	3 lokasi 3 kali	Produktivitas padi	6 ton/ha	29,620,000	31,119,000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						486,430,900	540,708,035					
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						486,430,900	540,708,035					
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fasilitasi Keperluan BPP Gaji pegawai Kontrak Media percontohan Tanaman	12 Bulan 12 bulan 3 demplot	Peningkatan kelas kelompok tani Pemula, Lanjut, Madya, Utama	45 kelompok	219,535,900	245,106,285	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok Tani yang ditingkatkan kemampuannya dari Pemula ke Lanjut, Lanjut ke Madya, Madya ke Utama Pelaksanaan Evaluasi penyuluh Pertanian (1 kali dalam 15 hari) Pelaksanaan Rapat KTNA, Poktan, Gapoktan, UP3HP,LKMA dan UPJA (1 x 1 kali masing-masing) Pelaksanaan Training penyuluh pertanian dan Perikanan, PPS, KTNA, Gapoktan, Poktan, UP3HP dan LKMA (1 kali dlm 15 hari) Penilaian dan Pemberian Penghargaan bidang pertanian dan Perikanan Pertemuan KTNA dan Menghadiri PENAS TANI 2021 di Padang dan Padang Pariaman	10 poktan 12 kali 1 kali 12 kali 8 kategori 1 kali	Peningkatan kelas kelompok tani Pemula, Lanjut, Madya, Utama	45 kelompok	266,895,000	295,601,750	
TOTAL											14,654,394,693	14,110,140,330				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.01 UPTD Rumah Potong Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						68,089,500	79,217,175					
3	27	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jumlah rekening telepon, yang dibayarkan jumlah rekening air yang dibayarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan	12 rekening 12 rekening 12 rekening			41,900,000	51,405,000	
3	27	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	6175 ekor			13,960,000	14,950,000	
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						6,822,214,000	5,697,075,700					
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen perencanaan pembangunan biogas Jumlah RPH terbangun Pengolahan air limbah RP terbangun	1 dokumen 1 unit 1 unit			5,301,296,000	4,000,000,000	
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						450,317,950	493,784,643					
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	6175 ekor	Persentase kasus penyakit zoonosis	0 kasus	180,114,700	197,299,405	
TOTAL											5,537,270,700	4,263,654,405				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.02 UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						68,089,500	79,217,175					
3	27	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	15 item			3,544,000	3,707,600	
3	27	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Biaya service dan penggantian alat komputer/laptop, Mesin tik, Printer, TV, dan pengisian Freon AC	1 ls			2,820,000	2,875,000	
3	27	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlengkapinya belanja alat tulis kantor	22 item			4,545,500	4,859,325	
3	27	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Face Shield Masker sarung tangan	10 bh 4 kotak 1 kotak	Persentase kasus penyakit zoonosis	0 kasus	1,320,000	1,420,250	
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						450,317,950	493,784,643					
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemenuhan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas : Jumlah Vaksinasi Rabies Pemenuhan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas : Pemeriksaan hewan Qurban Pemenuhan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas : Pemeriksaan kesehatan hewan besar Pemenuhan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas : Sterilisasi hewan penular rabies/HPR	1500 ekor 750 ekor 30 ekor 40 ekor	Persentase kasus penyakit zoonosis	0 kasus	172,269,000	188,276,850	
TOTAL											184,498,500	201,139,025				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.03 UPTD Balai Benih Ikan Hias

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1,037,202,776	922,599,943					
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						20,031,051	21,132,459					
3	25	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	11 item			4,065,000	4,243,500	
3	25	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang terbeli	27 set			3,020,000	3,105,000	
3	25	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pintu, jendela, lantai, kran saluran air dan luas dinding gedung yang di cat ulang	1 paket			12,946,051	13,783,959	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						813,168,700	674,396,505					
3	25	03	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah produksi benih ikan	470000 ekor	Peningkatan Produksi ikan	450 ton	255,560,600	337,534,315	
TOTAL											275,591,651	358,666,774					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						56,439,165,539	46,892,193,104					
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						25,203,305,474	23,425,491,680					
4	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,538,000	24,860,700					
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			Laporan rencana kerja sekretariat daerah	5 laporan	Mewujudkan pelayanan administrasi keuangan Sekretariat Daerah IK : Persentase administrasi perencanaan, pelaksanaan keuangan dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	5 laporan	22,538,000	24,860,700	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan						13,239,738,714	14,320,345,980					
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			Jumlah gaji PNS yang dibayarkan	112 Orang	Laporan keuangan	2 laporan	13,233,838,714	14,308,845,980	
4	01	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			Laporan keuangan	2 laporan	Laporan keuangan	2 laporan	5,900,000	11,500,000	
4	01	01	2.03		Administrasi Umum						11,910,388,760	9,045,785,000					
4	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dana Perangko, Materai dan Benda Pos Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran Tingkat Ketersediaan layanan administrasi Perkantoran	30000000 Rupiah 4 Jenis 14 % 95 %	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	30,580,000	34,500,000	
4	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembayaran rekening air, listrik dan telepon	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	376,480,000	431,250,000	
4	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kendaraan Dinas yang terpelihara	95 Unit	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	1,306,148,760	1,597,235,000	
4	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	200,640,000	230,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan dan Perlengkapan Kerja terpelihara	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	50,640,000	57,500,000	
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	100,640,000	115,000,000	
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cetak dan Peggandaan	2 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	151,280,000	172,500,000	
4	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	75,640,000	86,250,000	
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	5,571,450,000	1,495,000,000	
4	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya sumber informasi koran nasional dan majalah	14 koran majalah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	50,640,000	57,500,000	
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makan Minum Rapat/Pertemuan/Diklat sesuai kebutuhan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	103,200,000	115,000,000	
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	912,800,000	1,035,000,000	
4	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mobil Jabatan	3 Unit	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	1,500,000,000	1,955,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan rumah dinas/ jabatan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	50,640,000	57,500,000	
4	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mebeleur	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	50,640,000	57,500,000	
4	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rumah Dinas terpelihara secara rutin	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	259,600,000	287,500,000	
4	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung Kantor terpelihara secara rutin	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	1,017,250,000	1,150,000,000	
4	01	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perlengkapan rumah dinas / jabatan terpelihara secara rutin	2 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	25,200,000	25,300,000	
4	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung kantor terpelihara secara rutin	2 Unit	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	76,920,000	86,250,000	
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						30,640,000	34,500,000					
4	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aparaturnya mengikuti sosialisasi	150 orang	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU	100 %	30,640,000	34,500,000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						17,788,740,955	7,746,350,798					
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan						304,800,000	310,500,000					
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah			Kalender Komitmen bersama sesuai hasil rakor	1 paket 2 kali	Peringkat EKPPD dan LPPD	30 peringkat	83,200,000	92,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	01 02 2.01 02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			Jumlah dokumen penyusunan evaluasi perkembangan desa / kelurahan Jumlah kelurahan yang dinilai tingkat kota Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan Pembinaan kelurahan untuk tingkat propinsi	1 dokumen 24 kelurahan 3 kali 1 kelurahan	Peringkat EKPPD dan LPPD	30 peringkat	83,200,000	92,000,000	
4	01 02 2.01 03		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			Jumlah laporan SPM dan Monev Laporan EKPPD LKPD Walikota Bukittinggi LPPD Kota Bukittinggi	1 laporan 1 laporan 45 buku 7 buku	Peringkat EKPPD dan LPPD	30 peringkat	138,400,000	126,500,000	
4	01 02	2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									16,885,361,955	6,776,960,298	
4	01 02 2.02 01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kafilah yang diutus Jumlah Masjid/Mushala yang dikunjungi Pelaksanaan Tabligh Akbar Pelaksanaan wirid pengajian	60 orang 160 buah 1 kali 36 kali	Persentase sarana ibadah dan lembaga agama yang aktif	100 %	1,228,601,455	1,393,054,173	
4	01 02 2.02 02		Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga penerima hibah dan bantuan sosial	40 lembaga	Persentase sarana ibadah dan lembaga agama yang aktif	100 %	594,957,500	669,481,125	
4	01 02 2.02 03		Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jemaah Haji yang diberangkatkan Jumlah penerima bantuan tunjangan operasional guru/garin	300 orang 610 orang/bulan	Persentase sarana ibadah dan lembaga agama yang aktif	100 %	15,061,803,000	4,714,425,000	
4	01 02	2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah									508,950,000	563,212,500	
4	01 02 2.03 01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan	35 produk hukum	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU	100 %	131,400,000	143,750,000	
4	01 02 2.03 02		Fasilitasi Bantuan Hukum	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			Jumlah sidang perkara yang ditangani Laporan rencana aksi nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi	50 kali 4 laporan	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU	100 %	248,650,000	278,587,500	
4	01 02 2.03 03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Buku Berita Daerah Buku Lembaran Daerah Jumlah dokumen hukum yang dipublikasikan di laman JDIH Jumlah dokumen produk hukum yang tersedia	180 buku 180 buku 50 peraturan 3 jenis dokumen	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU	100 %	128,900,000	140,875,000	
4	01 02	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah									89,629,000	95,678,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			Jumlah raker / rakor yang diikuti	5 kali	Jumlah MOu	5 MOu	89,629,000	95,678,000	
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			Jumlah raker / rakor yang diikuti	5 kali	Jumlah MOu	5 MOu	0	0	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1,336,419,500	1,493,850,000					
4	01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						189,600,000	207,000,000					
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan	2 BUMD	Jumlah laporan	3 laporan	33,200,000	34,500,000	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Komoditas yang dikendalikan	10 Komoditas	Jumlah laporan	3 laporan	53,200,000	57,500,000	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan	4 Rapat	Jumlah laporan	3 laporan	103,200,000	115,000,000	
4	01	03	2.02		Administrasi Pembangunan						167,219,500	189,750,000					
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kegiatan fisik yang terlaksana	80 %	Jumlah laporan	12 bulan	81,617,000	86,250,000	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	80 %	Jumlah laporan	12 bulan	85,602,500	103,500,000	
4	01	03	2.03		Pengadaan Barang dan Jasa						946,400,000	1,062,600,000					
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RUP yang diumumkan jumlah usulan tender yang terlaksana	9168 kegiatan 120 kegiatan	Jumlah paket barang dan jasa pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD	120 paket	736,800,000	832,600,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			Jumlah Paket Pengadaan Yang Dilakukan dengan Proses Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	120 Paket	Jumlah paket barang dan jasa pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD	120 paket	136,400,000	149,500,000	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pengelolaan pengadaan barang dan jasa	1 Laporan	Jumlah paket barang dan jasa pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD	120 paket	73,200,000	80,500,000	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam						33,200,000	34,500,000				
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekomendasi	4 Rekomendasi	Laporan monitoring evaluasi pengawasan dan pembinaan energi dan sumber daya mineral	1 laporan	33,200,000	34,500,000	
4	01	04			PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM						12,110,699,610	14,226,500,626				
4	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum						8,556,772,110	10,255,644,926				
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringkat EKPP dan LPPD	30 .	Jumlah staf penunjang operasional pimpinan	50 Orang	Lancarnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	12 Bulan	743,752,110	840,594,926	
4	01	04	2.01	02	Pengelolaan Perlengkapan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Peringkat EKPP dan LPPD	30 .	Pelayanan kedinasan KDH Penunjang operasional Wakil KDH Sarana dan prasarana rumah dinas wako	12 Bulan 12 Bulan 1 Jenis	Lancarnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	12 Bulan	3,413,020,000	3,910,000,000	
4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringkat EKPP dan LPPD	30 .	Pelayanan kedinasan KDH Penunjang operasional Wakil KDH Sarana dan prasarana rumah dinas wako	12 Bulan 12 Bulan 1 Jenis	Lancarnya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	12 Bulan	4,400,000,000	5,505,050,000	
4	01	04	2.02		Penataan Organisasi						539,200,000	538,200,000				
4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringkat EKPP dan LPPD	30 .	Peraturan/keputusan tentang ANJAB/ABK PERDA/PERWAKO OPD SESUAI HASIL EVALUASI PERWAKO TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD	1 DOKUMEN 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN	Perwako, Perda	3 dokumen	186,400,000	149,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringkat EKPP dan LPPD	30 .	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BERNILAI BAIK JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK LOLOS TOP 99 TINGKAT NASIONAL JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG DILOMBAKAN TINGKAT KOTA JUMLAH INOVASI YANG MENANG KOMPETISI TINGKAT PROVINSI JUMLAH KOORDINASI KEGIATAN DALAM PENYUSUNAN PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK	8 NILAI 2 INOVASI 3 INOVASI 1 INOVASI 6 KALI	Perwako, Perda	3 dokumen	63,200,000	69,000,000	
4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringkat EKPP dan LPPD	30 .	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi LKIP Kota Tahun 2020 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Peraturan/keputusan tentang Standar Kompetensi Jabatan Peraturan/ keputusan Walikota tentang Kelas Jabatan	1 DOKUMEN 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN	Perwako, Perda	3 dokumen	289,600,000	319,700,000	
4	01	04	2.03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2,998,129,000	3,415,500,000				
4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringkat EKPP dan LPPD	30 .	Penerimaan tamu pemerintah daerah Uang lembur pelaksanaan upacara Uang lembur penunjang keprotokolan dan pantap agenda [pim]pinan	12 Bulan 10 Orang 48 Orang	Persentase informasi yang direspon	80 persen	1,500,560,000	1,840,000,000	
4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringkat EKPP dan LPPD	30 .	Jumlah dialog interaktif yang terlaksana Terlaksananya kegiatan jumpa pers dan kegiatan kehumasan	48 kali 8 kali jumpa pers	Persentase informasi yang direspon	80 persen	854,900,000	851,000,000	
4	01	04	2.03	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringkat EKPP dan LPPD	30 .	Data dan klipng Dokumentasi kegiatan Pemko Kegiatan srategis kota yang dimuat dalam profil daerah	12 bln 1200 foto 150 berita	Persentase informasi yang direspon	80 persen	642,669,000	724,500,000	
4	01	04	2.04		Perencanaan dan Keuangan						16,598,500	17,155,700				
4	01	04	2.04	02	Pengelolaan Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	Peringkat EKPP dan LPPD	30 .	Laporan pengelolaan	12 bln	laporan pengelolaan	12 Bulan	16,598,500	17,155,700	
TOTAL											56,439,165,539	46,892,193,104				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	02				SEKRETARIAT DPRD						35,771,134,135	39,118,413,553				
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						22,766,464,650	24,813,277,116				
4	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40,070,000	44,077,000				
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen renstra dan renja SKPD disusun sesuai peraturan	2 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	2 dokumen	40,070,000	44,077,000	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan						16,706,233,625	18,376,856,988				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah gaji dan tunjangan asn yang disediakan	37 orang			16,706,233,625	18,376,856,988	
4	02	01	2.03		Administrasi Umum						5,944,421,025	6,309,029,128				
4	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Buku cek jumlah bulan pengiriman paket jumlah materai 3000 jumlah materai 6000	5 buah 12 bulan 200 lembar 600 lembar	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	4,739,000	5,212,900	
4	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening telepon,air, listrik dan TV kabel dibayar tepat waktu	7 rekening	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	262,020,000	288,222,000	
4	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Roda Dua yang terpelihara Jumlah Kendaraan Roda Empat yang terpelihara	14 unit 19 unit	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	668,263,900	735,090,290	
4	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket tersedianya Honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	50 paket	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	15,000,000	17,250,000	
4	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa kebersihan kantor jumlah peralatan kebersihan	12 bulan 5 jenis	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	219,475,660	241,432,226	
4	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	16,740,000	18,414,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan tersedianya belanja fotokopi jumlah item barang cetakan jumlah plakat DPRD yang tersedia	12 bulan 12 jenis 1 paket	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	93,680,000	103,048,000	
4	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen alat listrik dan elektronik	13 jenis	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	15,740,000	17,314,000	
4	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	2 paket	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	7,370,000	7,700,000	
4	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket surat kabar, majalah dan buku bacaan tersedia	12 paket	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	412,120,000	453,332,000	
4	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bulan terfasilitasinya makan dan minum tamu Jumlah bulan tersedianya makan minum lembur pegawai jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan upahnya	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	538,263,900	592,090,290	
4	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan perjalanan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	12 bulan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	2,763,228,565	3,039,551,422	
4	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas pokir anggota DPRD yang tersedia	2 kendaraan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	30,870,000	33,957,000	
4	02	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket tersedianya perlengkapan rumah jabatan	12 paket	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	181,930,000	200,123,000	
4	02	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket tersedianya peralatan rumah jabatan	3 paket	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	40,870,000	44,957,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	02	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan terpeliharanya rumah jabatan	12 bulan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	222,690,000	178,959,000		
4	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	295,610,000	160,985,000		
4	02	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan	12 bulan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	50,870,000	55,957,000		
4	02	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	60,870,000	66,957,000		
4	02	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan terpeliharanya peralatan rumah jabatan	12 bulan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	15,370,000	16,907,000		
4	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	28,700,000	31,570,000		
4	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						75,740,000	83,314,000					
4	02	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota dewan yang dapat difasilitasi pengurusan dan pemulangan jenazah dari luar daerah	5 orang	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi kantor	80 Persen	75,740,000	83,314,000		
4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN						1,247,287,925	1,372,016,718					
4	02	02	2.01		Layanan Administrasi DPRD						882,847,925	971,132,718					
4	02	02	2.01	01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	indeks kepuasan pelayanan sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	82 .	Jumlah bulan terfasilitasinya administrasi, ketatausahaan, kepegawaian dan keprotokolanan pimpinan dan anggota DPRD	12 bulan	Persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat DPRD berjalan sesuai rencana, persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak keprotokolannya, persentase terselenggaranya pelayanan umum dan rumah tangga dewan sesuai rencana	80 persen	188,757,925	207,633,718	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	indeks kepuasan pelayanan sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	82 .	Jumlah rapat - rapat paripurna yang difasilitasi istimewa	6 kali	Persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat DPRD berjalan sesuai rencana, persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak keprotokolerannya, persentase terselenggaranya pelayanan umum dan rumah tangga dewan sesuai rencana	80 persen	381,970,000	420,167,000	
4	02	02	2.01	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	indeks kepuasan pelayanan sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	82 .	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga ketua DPRD	12 bulan	Persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat DPRD berjalan sesuai rencana, persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak keprotokolerannya, persentase terselenggaranya pelayanan umum dan rumah tangga dewan sesuai rencana	80 persen	312,120,000	343,332,000	
4	02	02	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						364,440,000	400,884,000					
4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	indeks kepuasan pelayanan sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	82 .	Jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan perumahan	2 dokumen	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak protokolernya, jumlah peraturan dan sk walikota yang disusun sesuai peraturan dan diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran	80 persen	101,240,000	111,364,000	
4	02	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	indeks kepuasan pelayanan sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	82 .	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya yang tersedia	300 stel	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak protokolernya, jumlah peraturan dan sk walikota yang disusun sesuai peraturan dan diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran	80 persen	199,960,000	219,956,000	
4	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	indeks kepuasan pelayanan sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	82 .	Jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	25 orang	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak protokolernya, jumlah peraturan dan sk walikota yang disusun sesuai peraturan dan diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran	80 persen	63,240,000	69,564,000	
4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						11,757,381,560	12,933,119,719					
4	02	03	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						2,417,934,000	2,659,727,400					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	02	03	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen propemperda yang selesai disusun	1 dokumen	Persentase produk hukum inisiatif pemda yang difasilitasi sesuai dengan rencana kerja, persentase produk hukum inisiatif DPRD yang difasilitasi sesuai rencana kerja, persentase risalah rapat yang terdokumentasi, persentase risalah rapat yang disusun tepat waktu, persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat AKD berjalan lancar dan sesuai rencana	80 Persen	31,545,000	34,699,500	
4	02	03	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jasa publikasi kegiatan dewan yang terlaksana Jumlah kegiatan alat kelengkapan dewan yang difasilitasi jumlah risalah rapat yang terdokumentasi tepat waktu	200 kali 120 rapat 120 risalah rapat	Persentase produk hukum inisiatif pemda yang difasilitasi sesuai dengan rencana kerja, persentase produk hukum inisiatif DPRD yang difasilitasi sesuai rencana kerja, persentase risalah rapat yang terdokumentasi, persentase risalah rapat yang disusun tepat waktu, persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat AKD berjalan lancar dan sesuai rencana	80 Persen	2,098,620,000	2,308,482,000	
4	02	03	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase jumlah kajian perundangan - undangan yang difasilitasi	75 persen	Persentase produk hukum inisiatif pemda yang difasilitasi sesuai dengan rencana kerja, persentase produk hukum inisiatif DPRD yang difasilitasi sesuai rencana kerja, persentase risalah rapat yang terdokumentasi, persentase risalah rapat yang disusun tepat waktu, persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat AKD berjalan lancar dan sesuai rencana	80 Persen	287,769,000	316,545,900	
4	02	03	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								1,562,977,825	1,719,275,609		
4	02	03	2.02	01	pembahasan KUA dan PPAS	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan KUA dan PPAS sesuai rencana	75 persen	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	80 Persen	226,941,700	249,635,870	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	02	03	2.02	02	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan KUA dan PPAS Perubahan sesuai rencana	75 persen	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	80 Persen	264,823,935	291,306,329	
4	02	03	2.02	03	Pembahasan APBD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan APBD sesuai rencana	75 persen	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	80 Persen	407,270,000	447,997,000	
4	02	03	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan APBD Perubahan sesuai rencana	75 persen	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	80 Persen	176,991,620	194,690,782	
4	02	03	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan laporan semesteran sesuai rencana	75 persen	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	80 Persen	226,335,285	248,968,814	
4	02	03	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD sesuai rencana	75 persen	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	80 Persen	260,615,285	286,676,814	
4	02	03	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						1,847,920,059	2,032,712,066				
4	02	03	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum sesuai rencana	75 persen	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	80 Persen	645,902,371	710,492,608	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	02	03	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur sesuai rencana	75 persen	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	80 Persen	557,672,948	613,440,243	
4	02	03	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat sesuai rencana	75 persen	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	80 Persen	557,672,948	613,440,243	
4	02	03	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian sesuai rencana	75 persen	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	80 Persen	31,062,948	34,169,243	
4	02	03	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam sesuai rencana	75 persen	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	80 Persen	31,062,948	34,169,243	
4	02	03	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan sesuai rencana	75 persen	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	80 Persen	12,272,948	13,500,243	
4	02	03	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terlaksananya rapat dan koordinasi dengan pemda melalui SKPD sebagai pengguna anggaran sesuai rencana	75 persen	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	80 Persen	12,272,948	13,500,243	
4	02	03	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								2,874,803,780	3,162,284,158		
4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bimbingan teknis yang diikuti selama 1 tahun	6 kali	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada media cetak dan elektronik, persentase fasilitasi kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana	80 persen	2,262,620,000	2,488,882,000	
4	02	03	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah berita dewan di media cetak dan elektronik jumlah pariwisata di media cetak Jumlah suara dewan di media elektronik	1000 berita 15 kali 10 kali	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada media cetak dan elektronik, persentase fasilitasi kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana	80 persen	441,423,780	485,566,158	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	02	03	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorarium	6 fraksi	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada media cetak dan elektronik, persentase fasilitasi kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana	80 persen	170,760,000	187,836,000	
4	02	03	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						1,035,510,000	1,139,061,000				
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah terfasilitasinya reses ke daerah pemilihan	84 kali	Persentase fasilitasi kegiatan reses, hearing atau dialog sesuai rencana	80 persen	1,035,510,000	1,139,061,000	
4	02	03	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						413,385,896	454,724,486				
4	02	03	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kode etik DPRD yang tersusun	1 dokumen	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat terkait kode etik sesuai rencana	80 persen	206,692,948	227,362,243	
4	02	03	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan kode etik DPRD sesuai rencana	75 persen	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat terkait kode etik sesuai rencana	80 persen	206,692,948	227,362,243	
4	02	03	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						1,604,850,000	1,765,335,000				
4	02	03	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah iuran adeksi dan asdeksi yang terbayar jumlah kontribusi keikutsertaan asdeksi dan adeksi jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	2 paket 2 paket 2 paket	Persentase fasilitasi kegiatan penunjang kerjasama asosiasi dewan	80 persen	1,604,850,000	1,765,335,000	
TOTAL											35,771,134,135	39,118,413,553				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	01				PERENCANAAN						7,362,358,758	7,269,415,170				
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						5,621,975,978	5,768,480,924				
5	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,230,000	23,172,500				
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Perencanaan	3 dokumen	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dokumen Sektor dan Spasial Bapelitbang	100 %	22,230,000	23,172,500	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan						4,832,791,728	4,889,054,487				
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun		4,832,791,728	4,889,054,487		
5	01	01	2.03		Administrasi Umum						766,954,250	856,253,937				
5	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jasa paket pengiriman materai Rp. 3.000 materai Rp. 6.000	1 ls 350 lembar 225 lembar	antah 2	100 %	1,741,250	1,818,437	
5	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tagihan pemakaian internet tagihan pemakaian listrik tagihan pemakaian telepon dibayarkan	3 rekening 1 rekening 2 rekening	antah 2	100 %	69,180,000	78,821,000	
5	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Komputer dipelihara Laptop dipelihara Periperal dan perlengkapan lainnya diadakan Printer dipelihara	24 unit 29 unit 1 ls 25 unit	antah 2	100 %	6,965,000	7,273,750	
5	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya Kendaraan roda 2 yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	6 unit 7 unit	antah 2	100 %	187,376,900	206,651,435	
5	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Honorarium Pejabat Pengelolaan Barang dan Jasa yang dibayarkan	1 tahun	antah 2	100 %	0	20,659,050	
5	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan Kebersihan Kantor Upah Jasa Petugas kebersihan dan keuntungan rekanan	23 item 4 orang	antah 2	100 %	228,319,100	243,212,465	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran			tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	antah 2	100 %	14,140,000	15,525,000	
5	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang Cetak dan Penggandaan	6 item 1 ls	antah 2	100 %	11,360,000	11,960,000	
5	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat-alat Listrik Penerangan Kantor	1 ls	antah 2	100 %	3,570,000	3,737,500	
5	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makan Minum lembur Makan Minum Rapat Makan Minum Tamu	200 pasang 200 pasang 1 ls	antah 2	100 %	11,410,000	12,017,500	
5	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	12 bulan	antah 2	100 %	182,052,000	200,527,800	
5	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung Kantor yang dipelihara	1 gedung	antah 2	100 %	50,840,000	54,050,000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						968,484,030	1,049,660,708					
5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah						828,333,535	843,714,675					
5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesesuaian perencanaan	100 persen	Laporan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah Perda tentang RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 Perkada tentang Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 Perkada tentang RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022	1 laporan 1 perda 1 perkada 1 perkada	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	100 %	482,276,737	459,825,318	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	01	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesesuaian perencanaan	100 persen	BA Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2022 BA Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2021-2026 Rekapitulasi hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan BA Musrenbang RKPD	1 berita acara 1 berita acara 1 berita acara	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	100 %	159,105,775	178,452,141	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesesuaian perencanaan	100 persen	BA Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	1 berita acara	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	100 %	21,964,273	24,522,914	
5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesesuaian perencanaan	100 persen	Pengimplementasian SIPD Updating data aplikasi SDP2D Provinsi Sumatera Barat Updating Data e_database pada aplikasi SIPD	1 update data aplikasi 1 update data aplikasi 1 update data aplikasi	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	100 %	91,841,500	101,209,693	
5	01	02	2.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesesuaian perencanaan	100 persen	Indeks partisipasi masyarakat Indeks ramah disabilitas Indeks rasa aman	1 laporan 1 laporan 1 laporan	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	100 %	73,145,250	79,704,609	
5	01	02	2.02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah						72,054,000	72,067,328					
5	01	02	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesesuaian perencanaan	100 persen	Data dan Informasi Kegiatan Yang di danai dari DAK Laporan Pelaksanaan DAK Kota Bukittinggi Tahun 2021	1 laporan 1 laporan	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	100 %	72,054,000	72,067,328	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah						68,096,495	133,878,705					
5	01	02	2.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesesuaian perencanaan	100 persen	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021	1 laporan	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	100 %	19,385,245	20,683,032	
5	01	02	2.03	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesesuaian perencanaan	100 persen	Laporan Pencapaian SPM	1 laporan	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	100 %	32,876,500	96,456,908	
5	01	02	2.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesesuaian perencanaan	100 persen	laporan evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah kota bukittinggi tahun 2021	1 laporan	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	100 %	15,834,750	16,738,765	
5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						217,848,250	271,371,279					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	01	03	2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan						66,080,000	79,262,257						
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 %	Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat mandatory bidang pemerintahan Jumlah SKPD yang dilakukan koordinasi	2 kegiatan 3 SKPD	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	33,040,000	33,040,000	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 %	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang diasistensi	72 dokumen	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	33,040,000	46,222,257	
5	01	03	2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia						33,040,000	45,487,121						
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 %	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang diasistensi jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat mandatory bidang pembangunan manusia	8 dokumen 3 kegiatan	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	33,040,000	45,487,121	
5	01	03	2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat						118,728,250	146,621,901						
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 %	laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	1 laporan	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	85,688,250	110,741,821	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 %	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang diasistensi Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat mandatory bidang kesejahteraan masyarakat	8 dokumen 2 kegiatan	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	33,040,000	35,880,080	
5	01	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						53,772,000	45,144,534						
5	01	04	2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian						33,040,000	23,510,354						
5	01	04	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian yang diasistensi	8 dokumen	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100 %	33,040,000	23,510,354	
5	01	04	2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif						20,732,000	21,634,180						
5	01	04	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	Jumlah Dokumen Sektoral dan Spasial dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Ekonomi Kreatif	1 laporan	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100 %	20,732,000	21,634,180	
5	01	05		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						500,278,500	134,757,725						
5	01	05	2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup						33,040,000	51,920,849						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	01	05	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup yang diasistensi	8 Dokumen	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektor dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100 %	33,040,000	51,920,849	
5	01	05	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan						9,253,800	18,710,459					
5	01	05	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan yang diasistensi	8 Dokumen	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektor dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100 %	9,253,800	18,710,459	
5	01	05	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan						457,984,700	64,126,417					
5	01	05	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	Laporan Implementasi dan Monitoring Dokumen SSK Kota Bukittinggi Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga (SABRT) Laporan Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP)	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektor dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100 %	434,678,500	0	
5	01	05	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan yang diasistensi	8 Dokumen	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektor dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100 %	23,306,200	64,126,417	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						423,344,250	417,551,884					
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						423,344,250	417,551,884					
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						161,745,500	139,064,905					
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	Rencana induk Ikelitbangan Kota Bukittinggi	1 dokumen	Persentase hasil riset riset yang dapat digunakan dalam program Perencanaan pembangunan	100 %	115,854,500	89,969,856	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	Database kelitbangan Kota Bukittinggi Diseminasi hasil kelitbangan	10 data 2 kali	Persentase hasil riset riset yang dapat digunakan dalam program Perencanaan pembangunan	100 %	45,891,000	49,095,049	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						114,475,000	120,427,500					
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	Kajian Akademis Pembangunan Museum Sejarah Kota Bukittinggi	1 Dokumen	Persentase hasil riset riset yang dapat digunakan dalam program Perencanaan pembangunan	100 %	114,475,000	120,427,500	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi						147,123,750	158,059,479					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	aa	100 %	Jumlah Inovasi daerah	29 inovasi	Persentase hasil riset riset yang dapat digunakan dalam program Perencanaan pembangunan	100 %	147,123,750	158,059,479	
TOTAL											7,785,703,008	7,686,967,054	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	02				KEUANGAN						17,412,872,578	25,070,922,272					
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						12,784,065,376	19,573,342,798					
5	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,040,000	23,172,500					
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan	2 Dokumen			22,040,000	23,172,500	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan						11,502,695,931	11,729,972,321					
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan	76 ASN			11,502,695,931	11,729,972,321	
5	02	01	2.03		Administrasi Umum						1,259,329,445	7,820,197,977					
5	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Materai 3000 tersedia Materai 6000 tersedia	200 Lembar 300 Lembar			1,660,000	1,725,000	
5	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Rekening air terbayarkan Rekening internet/fax Rekening listrik terbayarkan Rekening telpon terbayarkan	12 Rekening 12 Rekening 36 Rekening 24 Rekening			143,580,000	163,875,000	
5	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan Pajak kendaraan terbayarkan Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia Servis dan suku cadang kendaraan roda 4 tersedia	32 Unit 40 Unit 32 Unit 8 Unit			191,180,500	212,405,575	
5	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa Pengelola keuangan yang dibayarkan honorinya	9 Orang 9 Komponen Pengelola		0		6,417,463,116	
5	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia Jasa cleaning service tersedia Jasa pengamanan kantor terbayarkan Retribusi sampah terbayarkan	16 Jenis 5 Orang 5 Orang 12 Tagihan			419,150,000	470,844,500	
5	02	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Laptop, Komputer, printer dan peralatan kantor lainnya terpelihara	30 Unit			16,350,000	17,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.02.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			alat tulis kantor	46 Jenis			29,686,250	33,518,187	
5.02.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Barang cetakan keperluan kantor tercetak Fotocopy terbayarkan Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak	9 Jenis 300000 Lembar 8 Jenis			264,824,695	293,370,399	
5.02.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Komponen instalasi listrik tersedia Penerangan bangunan kantor tersedia	6 Jenis 1 Jenis			2,750,000	2,875,000	
5.02.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Makan dan minum Makan minum pendampingan pemeriksaan Minum tamu dan snack ruang pimpinan	50 Porsi 60 Hari 3 Jenis			35,470,000	37,375,000	
5.02.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			perjalanan dinas dalam daerah diikuti Perjalanan dinas luar daerah diikuti	10 Kali 15 Kali			144,868,000	159,146,200	
5.02.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung			9,810,000	10,350,000	
5.02.02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								1,648,459,250	2,100,677,329	
5.02.02.2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								546,562,000	1,019,949,766	
5.02.02.2.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			KUA dan PPAS yang dihasilkan	2 Buku			108,660,000	112,700,000	
5.02.02.2.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan	2 Buku			29,590,000	71,300,000	
5.02.02.2.01.04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah DPA Perubahan yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD Jumlah DPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD	1500 DPPA 2000 DPA			29,340,000	76,648,466	
5.02.02.2.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Pengelolaan penganggaran terintegrasi Perda APBD yang dihasilkan Perwako APBD yang dihasilkan	1 Bidang Pengelola 1 Perda 1 Perwako			224,233,000	577,475,950	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Dokumen Perwako pergeseran APBD yang dihasilkan Perda Perubahan APBD yang dihasilkan Perwako Perubahan APBD yang dihasilkan	1 Perwako 1 Perda 1 Perwako			100,970,000	112,700,000	
5	02	02	2.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Perwako Standar Biaya	1 Perwako			53,769,000	69,125,350	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						443,831,000	475,382,400					
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda Jumlah transaksi kas daerah deposito	7 Transaksi 5 Transaksi			45,741,000	51,032,400	
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Laporan dana transfer disampaikan	9 Kali laporan			108,240,000	110,400,000	
5	02	02	2.02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Dokumen SP2DSKPD selain gaji	388 SP2D			164,675,000	177,370,250	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji yang diteliti	600 Daftar gaji			31,200,000	35,650,000	
5	02	02	2.02	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	168 Penyetoran PFK			33,700,000	35,650,000	
5	02	02	2.02	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Berita acara rekonsiliasi data penerimaan	12 Berita Acara			55,240,000	59,800,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	02	02	2.02	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			SPD yang diterbitkan	4 SPD			5,035,000	5,479,750	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						632,446,250	577,745,163					
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun Laporan keuangan semester 1 tersusun prognosis 6 bulan berikutnya tersusun	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan			154,876,000	149,955,400	
5	02	02	2.03	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan	1 Perda 1 Perwako			356,670,000	299,053,475	
5	02	02	2.03	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	14 SKPD			56,240,000	56,240,000	
5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah dokumen LK yang disusun sesuai SAP	6 Laporan			64,660,250	72,496,288	
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan						25,620,000	27,600,000					
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos	14 SKPD			25,620,000	27,600,000	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						1,991,191,600	2,354,385,340					
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah						1,991,191,600	2,354,385,340					
5	02	03	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	1 Buku			96,350,000	109,250,000	
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah dokumen RKBMD Jumlah dokumen RKPBMMD	1 Buku 1 Buku			15,553,500	27,972,025	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang Jumlah laporan BMD tahunan Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorinya	2 Buku 4 Laporan 145 Orang			1,394,120,000	1,656,000,000	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah data BMD yang diinventarisir	28 Laporan			153,780,000	172,500,000	
5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	10 Sertifikat			40,668,100	43,663,315	
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah HGB diatas HPL yang tertata Jumlah objek pemanfaatan aset Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah	76 HGB diatas HPL 57 Unit 29 penetapan status 29 Pengalihan			88,240,000	97,750,000	
5	02	03	2.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			BMD yang dapat dikendalikan BMD yang diawasi Jumlah BMD yang dipindahtanganan	1 Laporan 1 Laporan 2 Jenis			202,480,000	247,250,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						989,156,352	1,042,516,805				
5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah						989,156,352	1,042,516,805				
5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Dokumen pajak daerah yang disusun	9 Jenis pajak			213,098,000	216,910,700	
5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah data pajak online yang terintegasi	10 Data online			11,810,000	12,650,000	
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Verifikasi dan validasi data PBB Verifikasi data BPHTB dan survey lapangan	3000 Data WP 190 WP			297,147,620	309,841,763	
5	02	04	2.02	10	Pemeriksaan Pajak Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah WP yang diperiksa	10 WP			28,409,000	30,496,850	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	03				KEPEGAWAIAN						6,464,008,824	7,177,425,388				
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						4,611,756,840	5,285,367,616				
5	03	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,070,000	23,172,500				
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya DPA 2021, DPA Pergeseran 2021, RKA 2022, DPPA 2021, Renja 2021, Renja Perubahan 2021	6 dokumen	Persentase laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 persen	22,070,000	23,172,500	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan						4,284,143,715	4,920,509,272				
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji dan tunjangan yang dibayarkan	14 bulan	Pengelolaan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100 persen	4,284,143,715	4,920,509,272	
5	03	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya LKIP, LPPD,LKPJ	3 dokumen	Pengelolaan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100 persen	0	0	
5	03	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Laporan Keuangan 2021	2 Laporan	Pengelolaan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100 persen	0	0	
5	03	01	2.03		Administrasi Umum						285,138,125	318,685,844				
5	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Materai 3000 yang dibeli Jumlah Materai 6000 yang dibeli Pengiriman surat yang dilakukan	50 lembar 100 lembar 12 bulan	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	1,085,000	1,150,000	
5	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening telephone yang di bayarkan	1 rekening telephone	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	9,020,000	9,430,000	
5	03	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kendaraan dinas/operasioal yang dipelihara	11 unit	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	96,830,000	110,520,750	
5	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tertibnya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 tahun	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	0	4,082,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.03.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat-alat kebersihan kantor yang disediakan	10 item	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	1,640,000	1,725,000	
5.03.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	10 item	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	1,640,000	1,725,000	
5.03.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat-alat tulis kantor yang disediakan	20 item	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	6,045,000	6,325,000	
5.03.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang cetakan yang disediakan Penggandaan yang disediakan	5 item 12 bulan	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	5,649,125	5,909,994	
5.03.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 item	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	825,000	862,500	
5.03.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 item	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.03.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang disediakan	12 bulan	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	9,350,000	9,775,000	
5.03.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Biaya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek dan Perjalanan Tugas Kedinasan lainnya yang disediakan	12 bulan	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	153,054,000	167,180,100	
5.03.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5	03	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor	5 item	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	03	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor	5 item	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	03	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	Persentase layanan administrasi umum	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	03	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						20,405,000	23,000,000				
5	03	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Disiplin dalam Penggunaan Pakaian Dinas	40 stel	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	90 persen	0	0	
5	03	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fasilitasi pemulangan jenazah ASN	1 Jenazah	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	90 persen	14,985,000	17,250,000	
5	03	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya laporan evaluasi dan implementasi TPP PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	2 Laporan	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	90 persen	5,420,000	5,750,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1,852,251,984	1,892,057,772				
5	03	02	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN						159,039,522	169,359,560				
5	03	02	2.01	02	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional	5 orang	Persentase Data Base Kepegawaian yang Lengkap	90 persen	31,359,560	31,359,560	
5	03	02	2.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Up date Data SAPK On-line ke BKN Pusat dan Jasa Internet dan Gaji Non PNS yang dibayarkan	12 bulan	Persentase Data Base Kepegawaian yang Lengkap	90 persen	127,679,962	138,000,000	
5	03	02	2.02		Administrasi Kepegawaian						392,993,962	419,084,712				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5	03	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan ASN CPNS Proses Pengangkatan/Penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kinerja Terlaksananya Sumpah Janji PNS Terpenuhinya Formasi ASN Kota Bukittinggi	1 Kegiatan 1 Laporan 100 orang 1 dokumen	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	90 persen	181,144,250	204,700,000	
5	03	02	2.02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	5 paket rekomendasi	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	90 persen	74,261,000	74,261,000	
5	03	02	2.02	05	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengurusan Pensiun PNS	120 orang	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	90 persen	43,465,000	46,000,000	
5	03	02	2.02	07	Pengelolaan Mutasi ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Fasilitasi PNS Pindah/Masuk	50 orang	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	90 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	03	02	2.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemakaian Gelar Penyesuaian Masa Kerja Terlaksananya Proses Administrasi Kenaikan Pangkat	1 SK 5 SK 400 SK	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	90 persen	94,123,712	94,123,712	
5	03	02	2.03		Peningkatan Kapasitas ASN								632,280,000	633,990,000		
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pegawai BKPSDM yang telah mengikuti peningkatan kompetensi Peserta yang telah mengikuti Diklat Pembentukan dan Penjurangan Auditor dan P2UPD Peserta yang telah mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Pimpinan yang memiliki profesionalitas Terlaksananya pembekalan kewirausahaan Terpenuhinya kompetensi ASN Pemko Bukittinggi sesuai kebutuhan melalui Diklat Khusus/Teknis	5 Orang 5 Orang 10 Orang 43 Orang 40 Orang 100 Orang	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan formal	90 persen	128,780,000	128,780,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5	03	02	2.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rekomendasi indeks kepuasan layanan kepegawaian Rekomendasi indeks merit sistem Rekomendasi indeks profesional aparaturnya Terlaksananya penyusunan SKP	1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 2600 Dokumen	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan formal	90 persen	10,815,000	11,500,000	
5	03	02	2.03	03	Pengembangan Assessment Center	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpetaknya potensi ASN	25 ASN	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan formal	90 persen	16,225,000	17,250,000	
5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fasilitasi Kegiatan KORPRI	1 Laporan	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan formal	90 persen	207,680,000	207,680,000	
5	03	02	2.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya kompetensi ASN Pemko Bukittinggi melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar Terpenuhinya syarat untuk kepangkatan PNS melalui ujian kedinasan	89 Orang 50 Orang	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan formal	90 persen	268,780,000	268,780,000	
5	03	02	2.04		Pengembangan Karir ASN								293,639,000	293,639,000		
5	03	02	2.04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jabatan Tinggi Pratama yang dievaluasi	24 eselon II/b	Persentase ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 persen	293,639,000	293,639,000	
5	03	02	2.05		Pembinaan ASN								374,299,500	375,984,500		
5	03	02	2.05	01	Pembinaan Disiplin ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya bimbingan konseling Pra Nikah dan Surat Keputusan Izin Melaksanakan Proses Perceraian dan atau Islah Terlaksananya pengawasan disiplin dan pembinaan ASN	20 Rekomendasi 9 Laporan	Persentase Kasus Disiplin yang ditindaklanjuti	90 persen	31,090,000	32,775,000	
5	03	02	2.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin	10 Rekomendasi	Persentase Kasus Disiplin yang ditindaklanjuti	90 persen	24,455,000	24,455,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5	03	02	2.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah berkas administrasi dan pengurusan berkas penghargaan SLKS Pegawai yang menerima penghargaan PNS yang melaksanakan pembekalan purna tugas Tersedianya Kartu Identitas Pegawai	150 Piagam 20 Orang 25 Orang 75 Dokumen	Persentase Kasus Disiplin yang ditindaklanjuti	90 persen	318,754,500	318,754,500	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1,333,258,000	2,300,964,299		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								1,333,258,000	2,300,964,299		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1,333,258,000	2,300,964,299		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya persyaratan untuk pengangkatan sebagai PNS Terpenuhinya syarat menduduki jabatan struktural (1 orang Pim Tk II, 1 orang Pim Tk III dan 2 orang Pim Tk IV)	160 Orang 4 Orang	Persentase ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 persen	1,333,258,000	2,300,964,299	
TOTAL													7,797,266,824	9,478,389,687		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						7,857,174,500	8,926,029,750		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						7,143,841,000	8,101,051,950		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan						6,041,390,000	6,900,000,000		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji dan tunjangan ASN terbayar	37 orang		6,041,390,000	6,900,000,000	
6	01	01	2.03		Administrasi Umum						718,024,000	775,551,950		
6	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	3 item		1,475,000	1,541,000	
6	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening telepon, internet, dan listrik terbayar	12 bulan/rekening		40,210,000	45,425,000	
6	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	8 kendaraan		163,148,000	178,512,200	
6	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa kebersihan yang dibayar, jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli	1 paket		173,320,000	179,112,500	
6	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	7 item		13,200,000	10,281,000	
6	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ATK yang terbeli	17 item		22,052,000	20,460,800	
6	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang tercetak, jumlah lembar terdandan, jumlah buku terjilid	800 lembar		16,124,000	13,643,600	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor yang terbeli	11 item			4,857,000	3,136,050	
6.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan kantor yang terbeli	1 jenis			23,180,000	23,000,000	
6.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli	9 jenis			15,930,000	15,870,000	
6.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah makan dan minuman lembur,rapat,tamu yang tersedia	12 bulan			14,993,000	21,447,500	
6.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase rapat-rapat koordinasi , konsultasi,sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi yang dihadiri	75 %			201,725,000	237,247,300	
6.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perbaikan /penggantian bagian kantor yang rusak	1 paket			23,180,000	23,000,000	
6.01.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perbaikan/penggantian mebeleur yang rusak	1 paket			4,630,000	2,875,000	
6.01.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										384,427,000	425,500,000	
6.01.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan (pengembangan /teknis)	28 orang			361,192,000	402,500,000	
6.01.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri	40 orang			23,235,000	23,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						579,662,000	679,509,700			
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						473,333,000	556,896,700			
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus /Kasus Kerugian Daerah	85 LHP		48,777,000	53,258,800	
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan hasil review	11 laporan		126,785,000	175,208,250	
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan terpenuhi	4 laporan		46,760,000	48,875,000	
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan evaluasi	59 laporan		251,011,000	279,554,650	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						106,329,000	122,613,000			
6	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus / Kasus kerugian Daerah	26 LHP khusus/kasus		36,195,000	38,778,000	
6	01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan pemantauan TLHP	12 laporan		70,134,000	83,835,000	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						133,671,500	145,468,100			
6	01	03	2.02		Asistensi dan Pendampingan						133,671,500	145,468,100			
6	01	03	2.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaporan yang diteruskan	10 laporan		23,760,000	22,425,000	
6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan terpenuhi	1 laporan		109,911,500	123,043,100	
TOTAL											7,857,174,500	8,926,029,750			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN						36,211,334,972	37,042,802,819				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,398,136,100	32,967,697,466				
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,140,000	23,172,500				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen yang tersusun (RENJA, RENSTRA)	2 dokumen	Persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	22,140,000	23,172,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan						9,667,645,424	11,111,041,738				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	1 tahun	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 Persen	9,667,645,424	11,111,041,738	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03		Administrasi Umum						21,708,350,676	21,833,483,228				
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			Buku cek bermaterai Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000	13 buku 200 buah 100 buah	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	2,730,000	2,875,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening Listrik, telepon dan air (Kecamatan dan 9 kelurahan)	30 rekening	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	118,760,000	135,056,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	26 unit	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	64,580,000	69,575,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			terbayarnya honor P/PHP, PPK, PPHP, PPBJ, PTK	5 Jenis	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	0	40,250,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			Jasa Pegawai Non PNS yang dibayar Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar	1 orang 30 Item 12 Bulan	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	45,014,711	46,879,370	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	59 item	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	6,585,000	6,900,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	55 Item	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	23,215,100	25,961,365	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan	7 item 34725 lembar	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	11,680,000	12,650,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	4 item	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	3,840,000	4,025,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			jumlah makan lembur terbeli Jumlah makan rapat/pertemuan terbeli Jumlah snack lembur terbeli Jumlah snack rapat/pertemuan terbeli makan minum tamu	300 porsi 200 porsi 300 porsi 200 porsi 12 bulan	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	32,860,000	34,500,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang difasilitasi	40 kali	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	78,165,000	85,197,750	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	6,445,000	6,900,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	10,945,000	11,500,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah gedung kantor yang dibangun	2 unit	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	20,500,000,000	20,500,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4,559,863,411	3,722,575,773						
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4,473,483,700	3,629,886,105						
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			Berita Acara hasil musrenbang Kecamatan Jumlah koordinasi yang dilakukan Laporan hasil musrenbang	1 buah 6 kali 1 laporan	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	54,540,000	60,375,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			jumlah cabang olahraga yang dibina dan difasilitasi jumlah koordinasi yang dilaksanakan jumlah lembaga adat yang terbina jumlah pelaksanaan MTQ Kecamatan jumlah pemenang lomba didikan subuh jumlah pemenang lomba jambore PKK jumlah rapat koordinasi KOTAKU Jumlah Sosialisasi / pelatihan yang dilaksanakan laporan hasil monitoring mansato kecamatan laporan kegiatan 10 program pokok PKK Kecamatan laporan manunggal sakato	2 cabang 4 kali 2 lembaga 2 kegiatan 3 pemenang 3 Pemenang tiap lomba 8 kali 5 kali 6 laporan 6 laporan 1 laporan	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	604,920,500	556,140,575	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					86,379,711	92,689,668						
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			jumlah pelatihan untuk pendataan jumlah pendataan dan entrian UMKM	2 kali 2800 UMKM	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	42,639,711	46,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			Jasa Pegawai Non PNS jumlah inovasi pelayanan Jumlah pelatihan laporan PATEN sesuai SOP	1 orang 1 inovasi 1 kali 12 laporan	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	100 persen	43,740,000	46,689,668	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					167,308,750	231,705,162						
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					167,308,750	231,705,162						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			buku administrasi kelurahan yang dibina jumlah kelurahan yang terbina Jumlah laporan monitoring Jumlah pemenang lomba Jumlah pemenang lomba kompetensi lurah	12 buku 9 kelurahan 4 laporan 3 pemenang 3 pemenang		persentase program kerja yang dilaksanakan sesuai rencana kerja	80 persen	61,725,000	69,028,750	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										86,026,711	120,824,418		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										86,026,711	120,824,418		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan			laporan pembinaan dan monitoring Upah Jasa pegawai Non PNS terbayar	3 kegiatan 1 orang		Persentase keterlibatan Satlinmas dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum	100 persen	86,026,711	120,824,418	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
TOTAL											31,488,197,157	33,015,542,134		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.01 Kelurahan Koto Salayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,398,136,100	32,967,697,466				
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan			Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000	50 buah 50 buah			475,000	517,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 Unit			27,336,745	28,522,007	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan			Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar	18 item 12 Bulan 1 orang			5,836,000	6,153,650	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapatkan jasa perbaikan	5 jenis			1,085,000	1,150,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan			Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	31 item			6,787,800	7,161,970	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan			Jumlah Barang cetakan yang dicetak jumlah pengadaan	6 item 6500 lembar			3,863,300	4,103,545	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan			jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	4 jenis			1,123,500	1,194,275	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan			tersedianya surat kabar/ majalah	1 jenis			1,430,000	1,518,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.02 Kelurahan Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,398,136,100	32,967,697,466					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000	150 buah 30 buah			680,000	724,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 Unit			25,355,000	26,519,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			jumlah alat kebersihan yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar	35 item 12 bulan 1 orang			5,621,400	5,952,860	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	8 item			2,530,750	2,668,862	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	38 item			10,752,000	11,582,800	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			Jumlah Barang cetakan yang Jumlah penggandaan	11800 lembar			3,187,000	3,383,300	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	6 jenis			930,000	977,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			tersedianya surat kabar/ majalah	1 jenis			1,430,000	1,518,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.02 Kelurahan Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			jumlah makan rapat/pertemuan yang tersedia Jumlah minuman lembur yang tersedia Jumlah snack rapat/pertemuan yang tersedia	40 porsi 160 porsi 250 porsi			5,870,000	6,175,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit			14,050,000	14,812,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										4,559,863,411	3,722,575,773	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan			641,783,750	412,156,262	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										167,308,750	231,705,162	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			laporan hasil embuk warga dan musrembang kelurahan	2 laporan			11,652,000	21,587,800	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
TOTAL											723,841,900	508,058,384	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.03 Kelurahan Manggis Ganting

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,398,136,100	32,967,697,466					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting			Jumlah Materai	200 buah			805,000	862,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting			jumlah PPB yang dibayar	1 rekening			755,000	805,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 unit			27,505,000	28,773,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting			jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar	35 item 12 bulan 1 orang			6,583,600	6,927,140	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	8 jenis			1,634,875	1,724,856	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting			jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 item			9,685,275	10,356,066	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting			jumlah batang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan	6 item 7000 lembar			3,966,250	4,193,187	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting			jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	6 jenis			712,000	755,550	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.04 Kelurahan Pulai Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,398,136,100	32,967,697,466				
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air			Jumlah Materai	200 buah			805,000	862,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 unit			23,434,000	24,511,100	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air			jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah upah jasa kebersihan yang dibayar	35 item 12 bulan 2 orang			10,398,800	10,906,370	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	8 jenis			1,640,000	1,725,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air			jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 item			8,720,000	9,246,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air			jumlah barang cetakan yang citek jumlah penggandaan	6 item 7000 lembar			2,408,250	2,533,738	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air			jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	6 jenis			958,000	1,009,700	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air			tersedianya surat kabar/ majalah	1 jenis			1,430,000	1,518,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.04 Kelurahan Pulau Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air			jumlah item makan dan minum yang tersedia	240 porsi			8,516,000	8,994,150	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			10,890,000	11,500,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										4,559,863,411	3,722,575,773	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air			jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan			469,998,500	327,601,075	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										167,308,750	231,705,162	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air			laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan	2 laporan			11,520,000	15,587,100	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
TOTAL											550,718,550	415,994,733	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.05 Kelurahan Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,398,136,100	32,967,697,466					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000	50 buah 80 buah			715,000	759,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 unit			31,804,000	33,256,850	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah upah jasa kebersihan yang dibayar	35 item 12 bulan 1 orang			7,357,800	7,759,970	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	8 jenis			2,740,000	2,875,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 item			7,062,000	7,477,300	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			jumlah barang cetak yang dicetak jumlah penggandaan	6 item 7000 lembar			7,605,000	7,963,750	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	6 jenis			830,000	862,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			tersedianya surat kabar/majalah	1 jenis			1,430,000	1,518,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.05 Kelurahan Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			jumlah item makan dan minum yang tersedia	190 porsi			6,840,000	7,210,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			12,340,000	13,041,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										4,559,863,411	3,722,575,773	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan			448,532,000	337,251,300	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										167,308,750	231,705,162	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan	2 laporan			13,820,000	14,720,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
TOTAL											541,075,800	434,695,170	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.06 Kelurahan Puhun Tembok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,398,136,100	32,967,697,466				
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000	50 buah 80 buah			595,000	621,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 unit			29,842,000	31,201,800	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar	35 item 12 bulan 1 orang			6,601,300	6,947,495	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	8 jenis			5,785,000	6,095,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 item			9,432,200	10,065,030	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			jumlah barang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan	6 item 7000 lembar			5,909,500	6,180,675	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	6 jenis			1,880,000	2,001,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			tersedianya surat kabar/ majalah	1 jenis			1,430,000	1,518,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.06 Kelurahan Puhun Tembok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			jumlah item makan dan minum yang tersedia	300 porsi			10,790,000	11,385,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			10,915,000	11,500,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										4,559,863,411	3,722,575,773	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan			293,806,000	365,355,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										167,308,750	231,705,162	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan	2 laporan			10,900,000	19,624,750	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
TOTAL											387,886,000	472,494,750	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.07 Kelurahan Kubu Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,398,136,100	32,967,697,466				
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000	50 buah 150 buah			805,000	862,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 unit			27,043,000	28,540,700	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar	35 item 12 bulan 1 orang			9,166,950	9,633,492	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	8 jenis			4,248,046	4,471,253	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 item			8,560,100	9,142,615	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			jumlah barang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan	6 item 7000 lembar			6,555,000	6,894,250	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	6 jenis			756,400	806,610	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			tersedianya surat kabar/majalah	1 jenis			1,430,000	1,518,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.07 Kelurahan Kubu Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			jumlah item makan dan minum yang tersedia	245 porsi			8,805,000	9,315,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			7,635,000	8,050,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										4,559,863,411	3,722,575,773	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan			296,894,250	328,870,388	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										167,308,750	231,705,162	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan	2 laporan			11,392,750	19,806,162	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
TOTAL											383,291,496	427,910,970	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.08 Kelurahan Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,398,136,100	32,967,697,466					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000	100 buah 120 buah			1,040,000	1,104,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 unit			27,349,000	28,616,600	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar	35 item 12 bulan 2 orang			11,066,700	11,674,455	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	8 jenis			2,185,000	2,300,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 item			7,837,843	8,415,519	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			jumlah barang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan	6 item 7000 lembar			2,040,000	2,156,250	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli	6 jenis			1,326,000	1,398,400	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			tersedianya surat kabar/majalah	1 jenis			1,430,000	1,518,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.08 Kelurahan Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			jumlah item makan dan minum yang tersedia	156 porsi			5,593,000	5,920,200	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			9,790,000	10,350,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										4,559,863,411	3,722,575,773	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan			546,078,000	457,536,700	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										167,308,750	231,705,162	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan	2 laporan			15,846,000	24,852,650	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
TOTAL											631,581,543	555,842,774	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.09 Kelurahan Garegeh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,398,136,100	32,967,697,466				
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			Jumlah Materai 3000 jumlah materai 6000	60 buah 50 buah			655,000	690,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 unit			26,244,000	27,443,600	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi yang dibayar upah jasa kebersihan yang dibayar	35 item 12 bulan 1 orang			5,565,000	5,876,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	8 jenis			1,640,000	1,725,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 item			7,324,731	7,721,941	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			jumlah barang cetakan yang dicetak jumlah penggandaan	6 item 7000 lembar			4,626,750	4,860,762	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	6 jenis			1,085,000	1,150,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			tersedianya surat kabar/ majalah	1 jenis			1,430,000	1,518,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.09 Kelurahan Garegeh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			jumlah item makan dan minum yang tersedia	181 porsi			6,510,000	6,900,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			9,790,000	10,350,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										4,559,863,411	3,722,575,773	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan dalam bulan bakti gotong royong masyarakat jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan	4 kegiatan 2 proyek 3 kegiatan 12 laporan			370,523,500	232,246,525	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										167,308,750	231,705,162	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan	2 laporan			12,621,000	13,375,650	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
TOTAL											448,014,981	313,857,978	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						13,565,007,211	14,432,695,887					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						9,687,759,211	11,065,706,912					
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,190,000	23,172,500					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Rencana Kerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	4 dokumen	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	22,190,000	23,172,500	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan						8,198,499,711	9,421,834,668					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangannya	71 orang	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	1 tahun	8,198,499,711	9,421,834,668	
7	01	01	2.03		Administrasi Umum						1,467,069,500	1,620,699,744					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			jumlah materai terbeli	280 buah	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	1,750,000	1,811,250	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			jumlah rekening telepon, internet, listrik yang dibayar	36 bulan rekening	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	36,680,000	41,400,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	7 unit 2 unit	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	71,080,000	77,050,000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa yang dibayarkan	5 orang bulan kegiatan	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	0	28,750,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			jumlah alat kebersihan tersedia jumlah jasa pihek ketiga untuk kebersihan kantor yang tersedia jumlah restribusi sampah terbayar	49 jenis 2 orang 12 bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	97,580,000	103,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	5 jenis	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	9,255,000	9,585,250	
7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			jumlah alat tulis kantor tersedia	68 jenis	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	24,853,000	27,798,950	
7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			jumlah barang cetakan yang tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	8 jenis 12 bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	20,724,000	23,050,600	
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	19 jenis	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	3,583,500	3,712,775	
7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	3 jenis	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	117,800,000	133,952,000	
7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 jenis	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	50,680,000	57,500,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			jumlah makan yang tersedia jumlah minum yang tersedia jumlah snack yang tersedia	446 porsi 446 porsi 410 kotak	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	19,425,000	20,125,000	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas keluar kota bukittinggi yang di ikuti	10 OK	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	78,165,000	85,197,750	
7.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah Meubelair tersedia	1 jenis	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	65,180,000	74,175,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	11,110,000	11,500,000	
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung kantor Terehabilitasi	1 unit	Terselenggaranya Administrasi Umum	1 tahun	243,430,000	275,425,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3,622,393,000	3,064,538,975					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3,560,313,000	2,997,838,975					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			laporan hasil musrenbang kecamatan Rapat koordinasi yang diadakan	1 dokumen 4 kali	Berfungsinya lembaga kemasyarakatan	85 persen	44,922,000	53,561,250	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah Kafilah MTQ yang dikirim ke tingkat selanjutnya Jumlah Kegiatan yang diikuti jumlah koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan Harian Perkembangan Kegiatan Manunggal Sakato Jumlah Pembinaan yang dilakukan Jumlah Pemenang Lomba jumlah rapat dan audit yang dilaksanakan Jumlah Tim Olah raga yang dibina	100 Orang 4 kali 4 kali 30 laporan 5 kali 3 pemenang/lomba 2 kali 2 tim	Berfungsinya lembaga kemasyarakatan	85 persen	699,620,000	589,375,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						62,080,000	66,700,000					
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan yang diberikan	7 jenis	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	82 IKM	62,080,000	66,700,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						161,275,000	203,550,000					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						161,275,000	203,550,000					
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Buku Administrasi Kelurahan yang terisi Laporan monitoring Lurah yang akan dibina Pembinaan yang dilaksanakan Pemenang lomba Profil Kecamatan dan Kelurahan	7 kelurahan 1 laporan 2 lurah 4 kali 2 Pemenang/lomba 8 profil	Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan	10 persen	104,080,000	115,000,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						93,580,000	98,900,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						93,580,000	98,900,000					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pihak Ketiga untuk Kebersihan kantor yang tersedia Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilaksanakan	1 orang 4 kali	Melibatkan Satlinmas dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum	100 persen	93,580,000	98,900,000	
TOTAL									10,076,267,211	11,343,076,993							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.01 Kelurahan Kayu Kubu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						9,687,759,211	11,065,706,912						
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			jumlah materai terbeli	150 buah			765,000	793,500	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			jumlah rekening air yang dibayar jumlah rekening internet yang dibayar jumlah rekening listrik yang dibayar jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening			25,390,000	28,290,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	4 unit			25,459,000	26,362,600	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			jumlah alat kebersihan tersedia jumlah restribusi sampah terbayar	15 jenis 12 bulan			13,029,700	13,489,155	
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	5 jenis			2,215,800	2,300,920	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			jumlah alat tulis kantor tersedia	37 jenis			8,931,500	9,362,725	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			jumlah penggandaan yang tersedia	12 bulan			2,795,000	2,760,000	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	8 jenis			2,598,000	2,694,450	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			jumlah bahan bacaan tersedia	12 bulan			1,600,000	1,656,000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			Jumlah Makan tersedia Jumlah Snack Tersedia	80 bungkus 80 porsi			3,020,000	3,128,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.01 Kelurahan Kayu Kubu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3,622,393,000	3,064,538,975					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Tim Olah Raga yang dibina	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim			265,306,000	288,748,900	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						161,275,000	203,550,000					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	2 laporan			8,880,000	12,650,000	
									TOTAL	359,990,000	392,236,250						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.02 Kelurahan Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						9,687,759,211	11,065,706,912						
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			jumlah materai terbeli	130 buah			600,000	621,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			jumlah rekening air yang dibayar jumlah rekening internet yang dibayar jumlah rekening listrik yang dibayar jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening			16,390,000	17,940,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	4 unit			26,655,000	27,588,500	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			jumlah alat kebersihan tersedia jumlah restribusi sampah terbayar	15 jenis 12 bulan			11,790,500	12,213,575	
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	5 jenis			3,570,000	3,726,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			jumlah alat tulis kantor tersedia	41 jenis			14,744,000	16,047,100	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			jumlah barang cetakan yang tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	4 jenis 12 bulan			4,155,500	4,301,575	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	4 jenis			2,455,000	2,547,250	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			jumlah bahan bacaan tersedia	12 bulan			1,660,000	1,725,000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			Jumlah Makan tersedia Jumlah Snack Tersedia	200 bungkus 200 porsi			7,325,000	7,590,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.02 Kelurahan Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3,622,393,000	3,064,538,975					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			Jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Tim Olah Raga yang dibina	2 proyek 4 kali 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim			349,595,000	345,431,250	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						161,275,000	203,550,000					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	2 laporan			7,610,000	12,650,000	
									TOTAL	446,550,000	452,381,250						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.03 Kelurahan Benteng Pasar Atas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						9,687,759,211	11,065,706,912						
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			jumlah materai terbeli	100 buah			460,000	483,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			jumlah rekening air yang dibayar jumlah rekening internet yang dibayar jumlah rekening listrik yang dibayar jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening			17,190,000	18,860,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	4 unit			25,502,000	26,394,800	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			jumlah alat kebersihan tersedia jumlah restribusi sampah terbayar	11 jenis 12 bulan			9,672,000	10,024,550	
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	5 jenis			3,330,000	3,450,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			jumlah alat tulis kantor tersedia	23 jenis			7,106,000	7,355,400	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			jumlah barang cetakan yang tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	2 jenis 12 bulan			2,270,000	2,363,250	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	2 jenis			410,000	437,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.03 Kelurahan Benteng Pasar Atas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			jumlah bahan bacaan tersedia	12 bulan			2,925,000	3,036,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			Jumlah Makan tersedia Jumlah Snack Tersedia	205 bungkus 205 porsi			7,510,000	7,779,750	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										3,622,393,000	3,064,538,975	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Tim Olah Raga yang dibina	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 lembaga 4 kali 2 tim			206,505,000	226,590,250	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										161,275,000	203,550,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas			laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	2 laporan			7,995,000	12,650,000	
TOTAL											290,875,000	319,424,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.04 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						9,687,759,211	11,065,706,912						
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			jumlah materai terbeli	100 buah			500,000	517,500	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekening air yang dibayar jumlah rekening internet yang dibayar jumlah rekening listrik yang dibayar jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening			9,490,000	10,005,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	3 unit			25,804,000	26,707,600	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			jumlah alat kebersihan tersedia jumlah redistribusi sampah terbayar	19 jenis 12 bulan			10,971,000	11,368,900	
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	5 jenis			2,265,000	2,357,500	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			jumlah alat tulis kantor tersedia	49 jenis			8,770,000	9,177,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			jumlah barang cetakan tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	4 jenis 12 bulan			3,210,000	3,311,569	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	6 jenis			1,190,000	1,236,250	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.04 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			jumlah bahan bacaan tersedia	12 bulan			1,600,000	1,656,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			Jumlah Makan tersedia Jumlah Snack Tersedia	320 bungkus 320 porsi			11,730,000	12,144,000	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung			9,990,000	10,350,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										3,622,393,000	3,064,538,975	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Tim Olah Raga yang dibina	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim			233,175,000	257,249,250	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										161,275,000	203,550,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	2 laporan			7,540,000	12,650,000	
TOTAL											326,235,000	358,730,569	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.05 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						9,687,759,211	11,065,706,912						
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah materai terbeli	120 buah			600,000	621,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			jumlah rekening air yang dibayar jumlah rekening internet yang dibayar jumlah rekening listrik yang dibayar jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening			10,930,000	11,661,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	4 unit			42,786,500	44,293,975	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			jumlah alat kebersihan tersedia jumlah restribusi sampah terbayar	23 jenis 12 bulan			12,848,500	13,303,775	
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	5 jenis			2,755,000	2,875,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			jumlah alat tulis kantor tersedia	47 jenis			12,684,500	13,678,675	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			jumlah barang cetakan yang tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	5 jenis 12 bulan			3,725,500	3,870,325	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	4 jenis			765,000	793,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.05 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			jumlah bahan bacaan tersedia	12 bulan			2,395,000	2,484,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			Jumlah Makan tersedia Jumlah Snack Tersedia	150 bungkus 250 porsi			6,380,000	6,612,500	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										3,622,393,000	3,064,538,975	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Tim Olah Raga yang dibina	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 lembaga 4 kali 2 tim			630,165,000	361,359,325	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										161,275,000	203,550,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tg h. Sawah			laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	2 laporan			8,095,000	12,650,000	
TOTAL											734,130,000	474,203,075	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.06 Kelurahan Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						9,687,759,211	11,065,706,912						
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			jumlah materai terbeli	100 buah			460,000	483,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			jumlah rekening air yang dibayar jumlah rekening internet yang dibayar jumlah rekening listrik yang dibayar jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening			11,890,000	12,765,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	4 unit			26,390,200	27,318,480	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			jumlah alat kebersihan tersedia jumlah restribusi sampah terbayar	13 jenis 12 bulan			9,605,400	9,953,710	
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	5 jenis			1,110,000	1,150,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			jumlah alat tulis kantor tersedia	32 jenis			10,228,900	10,854,735	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			jumlah barang cetakan yang tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	9 jenis 12 bulan			12,982,500	14,021,375	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	4 jenis			553,000	572,700	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			jumlah bahan bacaan tersedia	12 bulan			1,600,000	1,656,000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			Jumlah Makan tersedia Jumlah Snack Tersedia	500 bungkus 500 porsi			18,330,000	18,975,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.06 Kelurahan Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3,622,393,000	3,064,538,975					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Tim Olah Raga yang dibina	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim			729,980,000	545,675,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						161,275,000	203,550,000					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	2 laporan			10,195,000	12,650,000	
									TOTAL	833,325,000	656,075,000						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.07 Kelurahan Bukit Apik Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						9,687,759,211	11,065,706,912						
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			jumlah materai terbeli	80 buah			430,000	448,500	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			jumlah rekening air yang dibayar jumlah rekening internet yang dibayar jumlah rekening listrik yang dibayar jumlah rekening telepon yang dibayar	12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening			16,990,000	18,630,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	4 unit			32,251,000	33,391,400	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			jumlah alat kebersihan tersedia jumlah restribusi sampah terbayar	13 jenis 12 bulan			11,445,000	11,850,750	
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	5 jenis			3,330,000	3,450,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			jumlah alat tulis kantor tersedia	36 jenis			8,824,000	9,239,100	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			jumlah barang cetakan yang tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	4 jenis 12 bulan			5,205,000	5,387,750	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	6 jenis			3,010,000	3,128,000	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			jumlah bahan bacaan tersedia	12 bulan			1,990,000	2,070,000	
7	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			jumlah bendera tersedia	2 buah			380,000	402,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.07 Kelurahan Bukit Apik Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			Jumlah Makan tersedia Jumlah Snack Tersedia	160 bungkus 160 porsi			5,855,000	6,072,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										3,622,393,000	3,064,538,975	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			Jumlah kegiatan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Tim Olah Raga yang dibina	2 proyek 4 kegiatan 1 kegiatan 3 laporan 4 kali 2 tim			401,045,000	329,848,750	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										161,275,000	203,550,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			laporan hasil rembuk warga dan musrenbang kelurahan	2 laporan			6,880,000	12,650,000	
TOTAL											497,635,000	436,568,750	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						34,109,854,602	35,723,746,549					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,328,023,102	32,647,540,249					
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						41,040,000	43,000,000					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			disusunnya renstra dan renja perangkat daerah	2 dokumen			41,040,000	43,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan						8,153,324,904	9,370,481,635					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Terpenuhinya administrasi keuangan	1 tahun	8,153,324,904	9,370,481,635	
7	01	01	2.03		Administrasi Umum						23,133,658,198	23,234,058,614					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli	3 item	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	8,680,000	9,200,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar	4 rekening	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	151,260,000	172,500,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Kendaraan dinas yang dipelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	12 bulan	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	279,200,000	310,500,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			dan jasa outsourcing kebersihan Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar	4 Orang 1 paket 12 bulan	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	164,700,000	179,400,000	
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	34,095,000	34,500,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	12,150,000	13,225,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			tersedianya jasa percetakan, penggandaan dan spanduk	3 jenis	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	11,646,250	12,650,000	
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Alat listrik dan elektronik yang dibeli	1 paket	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	17,625,000	18,400,000	
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan kantor	12 bulan	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	13,300,000	13,800,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	3 item	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	31,175,000	33,235,000	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti	36 kali	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	77,981,250	85,197,750	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	88,896,250	97,750,000	
7.01.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			gedung kantor yang dibangun	2 gedung	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	1 tahun	22,000,000,000	22,000,000,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										2,421,333,500	2,641,161,300	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										2,287,533,500	2,496,261,300	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan, jumlah koordinasi yang dilaksanakan	1 laporan 12 kali	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di kecamatan yang terkoordinir	2 kegiatan	40,570,250	79,925,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya	5 kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di kecamatan yang terkoordinir	2 kegiatan	382,005,000	416,185,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										133,800,000	144,900,000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			inovasi pelayanan Jasa Pegawai Non PNS, jumlah pelatihan Laporan PATEN sesuai SOP,	1 inovasi 2 orang 1 kali 12 laporan	dilaksanakannya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2 urusan	84,900,000	93,150,000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			rekap laporan hasil pendataan	8 Laporan	dilaksanakannya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2 urusan	48,900,000	51,750,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										150,460,000	193,545,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										150,460,000	193,545,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			aplikasi e-Administrasi Kelurahan Pembinaan pengisian buku administrasi Kelurahan umrah pemenang lomba Kelurahan Berprestasi dan kompetensi Lurah,	1 aplikasi 8 kelurahan 6 pemenang			54,848,000	57,500,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										210,038,000	241,500,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										210,038,000	241,500,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			jasa outsourcing pengamanan kantor jasa Pegawai Non PNS, laporan pembinaan dan monitoring,	2 orang 3 orang 4 laporan	Dilakukannya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tang terkoordinir	1 tahun	210,038,000	241,500,000	
TOTAL															31,906,334,904	33,333,849,385	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.01 Kelurahan Belakang Balok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,328,023,102	32,647,540,249						
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar	1 paket 12 bulan			6,036,250	6,164,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket			8,676,250	9,200,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			tersedianya jasa percetakan, penggandaan dan spanduk	3 jenis			4,064,931	4,287,983	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	3 item			9,976,250	10,350,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,421,333,500	2,641,161,300					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya	4 kegiatan			218,852,500	242,305,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						150,460,000	193,545,000					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok			Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan	2 berita acara			10,052,250	16,031,000	
									TOTAL					257,658,431	288,337,983		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.02 Kelurahan Birugo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,328,023,102	32,647,540,249						
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			jasa kebersihan Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar	2 orang 1 paket 12 bulan			10,236,250	10,994,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket			8,676,250	9,200,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			tersedianya jasa percetakan, penggandaan dan spanduk	3 jenis			4,064,931	4,287,983	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	3 item			9,976,250	10,350,000	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,421,333,500	2,641,161,300						
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya	4 kegiatan			323,778,750	323,782,500	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						150,460,000	193,545,000						
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan	2 berita acara			10,786,250	20,539,000	
TOTAL											367,518,681	379,153,483					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.03 Kelurahan Aur Kuning

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,328,023,102	32,647,540,249						
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			jasa kebersihan Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar	2 orang 1 paket 12 bulan			10,076,250	10,419,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket			8,676,250	9,200,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			tersedianya jasa percetakan, penggandaan dan spanduk	3 jenis			4,064,931	4,287,983	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	3 item			9,976,250	10,350,000	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,421,333,500	2,641,161,300						
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya	4 kegiatan			273,289,500	271,845,050	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						150,460,000	193,545,000						
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan	2 berita acara			11,016,250	16,376,000	
TOTAL									317,099,431	322,478,033							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.04 Kelurahan Sapiran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,328,023,102	32,647,540,249						
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			jasa kebersihan Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar	1 orang 1 paket 12 bulan			6,136,250	6,279,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket			8,676,250	9,200,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			tersedianya jasa percetakan, penggandaan dan spanduk	3 jenis			4,404,931	4,287,983	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	3 item			9,976,250	10,350,000	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,421,333,500	2,641,161,300						
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran			Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya	4 kegiatan			228,227,500	253,086,250	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						150,460,000	193,545,000						
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan	2 berita acara			9,066,250	17,756,000	
TOTAL									266,487,431	300,959,233							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.05 Kelurahan Kubu Tanjung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,328,023,102	32,647,540,249						
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			jasa kebersihan Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar	1 orang 1 paket 12 bulan			6,136,250	6,279,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket			8,676,250	9,200,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			tersedianya jasa percetakan, penggandaan dan spanduk	3 jenis			4,064,931	4,287,983	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	3 item			9,976,250	10,350,000	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,421,333,500	2,641,161,300						
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung			Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya	4 kegiatan			188,702,500	208,495,000	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						150,460,000	193,545,000						
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan	2 berita acara			10,382,250	16,721,000	
TOTAL											227,938,431	255,332,983					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.06 Kelurahan Pakan Labuah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,328,023,102	32,647,540,249						
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli retribusi sampah yang dibayar	1 Paket 12 bulan			6,036,250	6,164,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket			8,676,250	9,200,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			tersedianya jasa percetakan, penggandaan dan spanduk	3 jenis			4,064,931	4,287,983	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	3 item			9,976,250	10,350,000	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,421,333,500	2,641,161,300						
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh			Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya	4 kegiatan			251,102,500	279,392,500	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						150,460,000	193,545,000						
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh			Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan	2 berita acara			18,696,250	20,723,000	
TOTAL									298,552,431	330,117,483							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.07 Kelurahan Ladang Cakiah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,328,023,102	32,647,540,249						
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			jasa kebersihan Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar	1 orang 1 paket 12 bulan			6,136,250	6,279,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket			8,676,250	9,200,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			tersedianya jasa percetakan, penggandaan dan spanduk	3 jenis			4,064,931	4,287,983	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	3 item			9,976,250	10,350,000	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,421,333,500	2,641,161,300						
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah			Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya	4 kegiatan			182,652,500	200,675,000	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						150,460,000	193,545,000						
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan	2 berita acara			10,596,250	11,408,000	
TOTAL									222,102,431	242,199,983							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.08 Kelurahan Parit Antang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						31,328,023,102	32,647,540,249					
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jasa kebersihan Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar	1 orang 1 paket 12 bulan			10,076,250	10,419,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket			8,676,250	9,200,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			tersedianya jasa percetakan, penggandaan dan spanduk	3 jenis			4,064,931	4,287,983	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah item pelayanan makanan dan minuman (rapat/pertemuan, tamu dan lembur)	3 item			9,976,250	10,350,000	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,421,333,500	2,641,161,300					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya	4 kegiatan			198,352,500	220,570,000	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						150,460,000	193,545,000					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan			Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan	2 berita acara	terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan	2 kegiatan	15,016,250	16,491,000	
TOTAL											246,162,431	271,317,983				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5,865,108,808	6,377,677,428				
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2,124,459,069	2,021,393,968				
8	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,110,000	23,172,500				
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah buku renja yang tersedia	2 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	100 persen	22,110,000	23,172,500	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan						1,818,071,008	1,676,235,142				
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 orang	Persentase layanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100 persen	1,818,071,008	1,676,235,142	
8	01	01	2.03		Administrasi Umum						284,278,061	321,986,326				
8	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah materai yang tersedia	275 lembar	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	975,000	1,121,250	
8	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	36 tagihan	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	30,650,000	34,684,000	
8	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	2 unit 1 unit	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	41,025,200	44,361,480	
8	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan	1 orang 1 orang	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	0	8,619,306	
8	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	1 orang	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	55,700,000	59,800,000	
8	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki Jumlah perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 unit 3 unit	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	5,490,000	5,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	10,629,383	11,660,290	
8.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang dibayarkan	2 jenis 12 bulan	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	6,933,200	7,409,680	
8.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 komponen	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	783,500	901,025	
8.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan kantor yang dibeli : PC Desktop	2 unit	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	20,866,278	23,432,720	
8.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah makanan dan minuman yang tersedia : makan Jumlah makanan dan minuman yang tersedia : makan dan minum di ruang Kakan Jumlah makanan dan minuman yang tersedia : snack	201 bungkus 12 bulan 201 kotak	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	10,255,500	10,948,575	
8.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti	26 kali 11 kali	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100 persen	100,970,000	113,298,000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										198,176,300	584,489,484	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										198,176,300	584,489,484	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan FPK Jumlah Peserta Sosialisasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	12 laporan 100 orang	Tingkat keberhasilan pencapaian zero growth perkembangan kelompok radikal di Kota Bukittinggi	100 persen	25,236,300	377,489,484	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Upacara	5 kegiatan	Tingkat keberhasilan pencapaian zero growth perkembangan kelompok radikal di Kota Bukittinggi	100 persen	172,940,000	207,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									2,080,574,750	1,054,640,562		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									2,080,574,750	1,054,640,562		
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Jumlah Peserta Bimtek Kader Parpol Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik	12 laporan 50 orang 100 orang	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada di Kota Bukittinggi	70 persen	119,088,750	1,005,673,562	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	8 Parpol	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada di Kota Bukittinggi	70 persen	1,961,486,000	48,967,000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									79,216,500	389,472,225		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									79,216,500	389,472,225		
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Sosialisasi Ormas	100 orang	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan di Kota Bukittinggi	10 organisasi	31,874,500	44,717,175	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Database ormas	1 dokumen	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan di Kota Bukittinggi	10 organisasi	47,342,000	344,755,050	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									506,694,050	838,144,207		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya									506,694,050	838,144,207		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang dites narkoba	270 orang	Persentase penurunan penyakit masyarakat di Kota Bukittinggi	10 persen	51,061,500	55,822,725	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan HANI Jumlah laporan KOMPANI Jumlah Laporan PAKEM Jumlah Peserta P4GN Jumlah Peserta Sosialisasi PAKEM	1 laporan 1 laporan 1 laporan 500 orang 100 orang	Persentase penurunan penyakit masyarakat di Kota Bukittinggi	10 persen	455,632,550	782,321,482	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										875,988,139	1,489,536,982	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										875,988,139	1,489,536,982	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi Jumlah laporan Tim POA Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 laporan 12 laporan 12 laporan	Persentase potensi konflik sosial yang dapat diredam di Kota Bukittinggi	70 persen	875,988,139	1,489,536,982	
TOTAL											5,865,108,808	6,377,677,428	